KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Profil Kesehatan Indonesia 2020

351.077
Ind
p

PROFIL KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2021

351.077 Ind p

Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Sekretariat Jenderal
Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. --
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2021

ISBN 978-623-301-218-8

1. Judul I. HEALTH STATISTICS
II. HEALTH INFORMATION SYSTEMS

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: http://www.kemkes.go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah
drg. Oscar Primadi, MPH
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua
dr. Anas Ma'ruf, MKM
Kepala Pusat Data dan Informasi

Editor
Boga Hardhana, S.Si, MM
Farida Sibuea, SKM, MSc.PH
Winne Widiantini, SKM, MKM

Anggota
dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Wardah, SKM, MKM; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Supriyono Pangribowo, SKM, MKM; Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; dr. Ellysa, M.Epid; Eka Satriani Sakti, SKM; Tri Wahyudi, S.Si; Dian Mulya Sari, S.Ds; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Hellena Maslinda; Prillia Syafira Liani, SKM; Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom; Anisah Mufidatush Shalihah, S.Stat.

Kontributor
Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Kepegawaian; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Pusat Krisis Kesehatan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional; Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Kesehatan Keluarga; Direktorat Kesehatan Lingkungan; Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga; Direktorat Gizi Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Set. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2020 dan semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2020 ini.

Profil Kesehatan Indonesia disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Profil ini menyajikan gambaran nasional, perbandingan antar provinsi, serta tren dari tahun ke tahun.

Buku Profil Kesehatan Indonesia tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh melalui *website* www.kemkes.go.id. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk penyempurnaan Profil Kesehatan Indonesia yang akan datang.

Jakarta, Juli 2021
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan

drg. Oscar Primadi, MPH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang strategis yang menjadi awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV tahun 2020-2024. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya antar program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Profil Kesehatan Indonesia yang terbit setiap tahun sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif, diharapkan dapat menyediakan data dan informasi terkini sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Profil Kesehatan ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini berdampak besar terhadap tatanan hidup masyarakat. Perubahan perilaku dan penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama dalam upaya penanggulangan pandemi ini. Data dan informasi yang terkini dan akurat terkait COVID-19 tidak hanya diperlukan untuk pengambilan keputusan, namun juga menjadi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, Profil Kesehatan Indonesia tahun ini menyajikan data dan informasi terkait COVID-19. Semoga terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2020 ini dapat memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat.

Akhir kata, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil Kesehatan 2020 ini. Para pengelola data baik di pusat maupun daerah diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas data dari ketepatan waktu, validitas, kelengkapan dan konsistensi data, termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan sumber data utama.

Juli 2021
Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9 Jakarta 12950 Telpon/Faxsimile (021) 5201591

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2016 – 2020 (dalam jutaan)	1
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	2
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2020	3
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2020	3
GAMBAR 1.5	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2) DI INDONESIA TAHUN 2020	4
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020 (dalam %)	6
GAMBAR 1.7	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	7
GAMBAR 1.8	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2020	8
GAMBAR 1.9	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2020	10
GAMBAR 1.10	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2016 – 2020 (dalam tahun)	11
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2017 – 2020	12
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2017 – 2020	13
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2017 – 2020	13
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004 – 2020	14
GAMBAR 1.15	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	15

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2020	20
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2020	21
GAMBAR 2.3	PERSENTASE AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020	22
GAMBAR 2.4	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020	23
GAMBAR 2.5	PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	24
GAMBAR 2.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	25
GAMBAR 2.7	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	26
GAMBAR 2.8	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	28

GAMBAR 2.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	30
GAMBAR 2.10	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA DI INDONESIA TAHUN 2020	29
GAMBAR 2.11	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2020	30
GAMBAR 2.12	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATTRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2020	31
GAMBAR 2.13	JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH DENGAN TENAGA KESEHATAN YANG SUDAH DILATIH DI INDONESIA TAHUN 2020	31
GAMBAR 2.14	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN UTAMA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	32
GAMBAR 2.15	JUMLAH PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	33
GAMBAR 2.16	JUMLAH PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	34
GAMBAR 2.17	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	35
GAMBAR 2.18	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2020	36
GAMBAR 2.19	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	36
GAMBAR 2.20	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020	37
GAMBAR 2.21	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2020	38
GAMBAR 2.22	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2020	39
GAMBAR 2.23	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2015 - 2020	40
GAMBAR 2.24	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	40
GAMBAR 2.25	PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	41
GAMBAR 2.26	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL TAHUN 2020	42
GAMBAR 2.27	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL TAHUN 2020	44
GAMBAR 2.28	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) TAHUN 2020	45
GAMBAR 2.29	JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020	46
GAMBAR 2.30	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020	47

GAMBAR 2.31 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 48
GAMBAR 2.32 JUMLAH POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 48

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1 REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020 52
GAMBAR 3.2 JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2020 52
GAMBAR 3.3 JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020 53
GAMBAR 3.4 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 54
GAMBAR 3.5 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2020 55
GAMBAR 3.6 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2020 56
GAMBAR 3.7 PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2020 57
GAMBAR 3.8 JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020 58
GAMBAR 3.9 JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020 59
GAMBAR 3.10 PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2020 60
GAMBAR 3.11 SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2020 60
GAMBAR 3.12 JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2020 61
GAMBAR 3.13 JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020 62
GAMBAR 3.14 JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 63
GAMBAR 3.15 JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020 63
GAMBAR 3.16 JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 64
GAMBAR 3.17 JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2020 66
GAMBAR 3.18 PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2020 67
GAMBAR 3.19 PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2020 68
GAMBAR 3.20 PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA TAHUN 2020 69
GAMBAR 3.21 JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2020 70

GAMBAR 3.22 PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2020 71
GAMBAR 3.23 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020 73
GAMBAR 3.24 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020 74
GAMBAR 3.25 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020 75
GAMBAR 3.26 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 75
GAMBAR 3.27 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2020 76

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2011-2020 80
GAMBAR 4.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2020 81
GAMBAR 4.3 PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2020 82
GAMBAR 4.4 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2020 82
GAMBAR 4.5 REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 83
GAMBAR 4.6 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 84
GAMBAR 4.7 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 85
GAMBAR 4.8 PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN TAHUN 2012-2019 87
GAMBAR 4.9 PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2020 90
GAMBAR 4.10 CAKUPAN KEPERSERTAAN JAMINAN NASIOANL (JKN) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 91
GAMBAR 4.11 TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2020 92
GAMBAR 4.12 ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2020 92
GAMBAR 4.13 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2020 93
GAMBAR 4.14 PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2020 93
GAMBAR 4.15 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020 94
GAMBAR 4.16 PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020 94

GAMBAR 4.17 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020 94
GAMBAR 4.18 PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020 94
GAMBAR 4.19 PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPERSERTAAN TAHUN 2020 95
GAMBAR 4.20 PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN TAHUN 2020 95
GAMBAR 4.21 BIAYA MANFAAT PROGRAM DAN JKN TAHUN 2020 95

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1 ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2015 100
GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2020 101
GAMBAR 5.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 102
GAMBAR 5.4 CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2020 103
GAMBAR 5.5 CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2020 104
GAMBAR 5.6 CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 105
GAMBAR 5.7 CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 106
GAMBAR 5.8 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 107
GAMBAR 5.9 PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 108
GAMBAR 5.10 PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 109
GAMBAR 5.11 CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2020 111
GAMBAR 5.12 CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN TAHUN 2020 111
GAMBAR 5.13 PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA TAHUN 2020 112
GAMBAR 5.14 PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 113
GAMBAR 5.15 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 114
GAMBAR 5.16 PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 115

GAMBAR 5.17	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	116
GAMBAR 5.18	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2020	117
GAMBAR 5.19	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2020	117
GAMBAR 5.20	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2020	118
GAMBAR 5.21	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12 59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2020	118
GAMBAR 5.22	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) TAHUN 2009-2020	120
GAMBAR 5.23	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	120
GAMBAR 5.24	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2011-2020	122
GAMBAR 5.25	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	122
GAMBAR 5.26	ANGKA DROP OUT IMUNISASI DPT/HB/HiB1-CAMPAK PADA BAYI TAHUN 2009-2020	124
GAMBAR 5.27	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	124
GAMBAR 5.28	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2015-2020	125
GAMBAR 5.29	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	125
GAMBAR 5.30	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	127
GAMBAR 5.31	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	129
GAMBAR 5.32	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	130
GAMBAR 5.33	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	131
GAMBAR 5.34	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	132
GAMBAR 5.35	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	133
GAMBAR 5.36	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	134
GAMBAR 5.37	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	135

GAMBAR 5.38 PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 136
GAMBAR 5.39 PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 137
GAMBAR 5.40 PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2019 138
GAMBAR 5.41 GRAFIK PROPORSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI, SSGBI 2019 138
GAMBAR 5.42 CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 140
GAMBAR 5.43 CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 141
GAMBAR 5.44 PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 142
GAMBAR 5.45 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 143
GAMBAR 5.46 CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 144
GAMBAR 5.47 CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) 145
GAMBAR 5.48 CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 146

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2020 150
GAMBAR 6.2 *TREATMENT COVERAGE* (*TC*) TAHUN 2010-2020 151
GAMBAR 6.3 *TREATMENT COVERAGE* (*TC*) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 151
GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2020 152
GAMBAR 6.5 ANGKA NOTOFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 153
GAMBAR 6.6 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2010-2020 153
GAMBAR 6.7 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 154
GAMBAR 6.8 JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2020 155
GAMBAR 6.9 PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2020 156

GAMBAR 6.10	PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2020	156
GAMBAR 6.11	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA DI INDONESIA TAHUN 2010-2020	157
GAMBAR 6.12	CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	158
GAMBAR 6.13	CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG 50% PUSKESMASNYA MELAKSANAKAN TATALAKSANA STANDAR PNEUMONIA 2016-2020	158
GAMBAR 6.14	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2020	160
GAMBAR 6.15	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	161
GAMBAR 6.16	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	162
GAMBAR 6.17	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2010-2020	163
GAMBAR 6.18	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019 DAN 2020	164
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2020	165
GAMBAR 6.20	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2020	166
GAMBAR 6.21	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2010-2020	166
GAMBAR 6.22	KASUS KONFIRMASI COVID-19 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020	168
GAMBAR 6.23	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2010-2020	169
GAMBAR 6.24	*RECOVERY RATE* (*RR*) DAN *CASE FATALITY RATE* (*CFR*) COVID-19 TAHUN 2020	169
GAMBAR 6.25	*RECOVERY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	170
GAMBAR 6.26	*CASE FATALITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	171
GAMBAR 6.27	*POSITIVITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	172
GAMBAR 6.28	DISTRIBUSI KASUS TETANUS NEONATORUM PER PROVINSI TAHUN 2019 dan 2020	173
GAMBAR 6.29	PROPORSI KASUS TETANUS NENONATORUM MENURUT FAKTOR RISIKO TAHUN 2020	174
GAMBAR 6.30	SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2019 DAN 2020	175

GAMBAR 6.31	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN DI INDONESIA TAHUN 2020	176
GAMBAR 6.32	PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA TAHUN 2020	177
GAMBAR 6.33	PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	177
GAMBAR 6.34	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020	178
GAMBAR 6.35	SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	179
GAMBAR 6.36	PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK UMUR < 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 DAN 2020	182
GAMBAR 6.37	CAPAIAN SURVEILANS *AFP* DI INDONESIA TAHUN 2007-2020	183
GAMBAR 6.38	*NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2020	183
GAMBAR 6.39	PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 DAN 2020	184
GAMBAR 6.40	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT *AFP* MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	185
GAMBAR 6.41	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2020	186
GAMBAR 6.42	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2020	187
GAMBAR 6.43	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2020	188
GAMBAR 6.44	PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2020	188
GAMBAR 6.45	JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	189
GAMBAR 6.46	JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2020	190
GAMBAR 6.47	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2011-2020	192
GAMBAR 6.48	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	193
GAMBAR 6.49	*CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	194
GAMBAR 6.50	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2011-2020	194
GAMBAR 6.51	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD <49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2020	195
GAMBAR 6.52	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2011-2020	196
GAMBAR 6.53	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2020	197
GAMBAR 6.54	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	198

GAMBAR 6.55	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	199
GAMBAR 6.56	CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2011-2020	200
GAMBAR 6.57	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	201
GAMBAR 6.58	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2020	202
GAMBAR 6.59	ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2020	202
GAMBAR 6.60	ANGKA KESAKITAN MALARIA (*API*) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	203
GAMBAR 6.61	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	204
GAMBAR 6.62	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2020	205
GAMBAR 6.63	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2020	206
GAMBAR 6.64	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2019 – 2020	206
GAMBAR 6.65	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	209
GAMBAR 6.66	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DAN PAYUDARA TAHUN 2018-2020	210
GAMBAR 6.67	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2018-2020	211
GAMBAR 6.68	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA TAHUN 2020	212
GAMBAR 6.69	INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR	213

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI TAHUN 2020	218
GAMBAR 7.2	PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR TAHUN 2020	219
GAMBAR 7.3	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK TAHUN 2020	223
GAMBAR 7.4	PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2020	224
GAMBAR 7.5	PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2020	225
GAMBAR 7.6	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2020	226
GAMBAR 7.7	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2018-2020	227

GAMBAR 7.8	PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	228
GAMBAR 7.9	PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	229
GAMBAR 7.10	PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR TAHUN 2020	231
GAMBAR 7.11	PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR TAHUN 2020	232
GAMBAR 7.12	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2020	234
GAMBAR 7.13	PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2020	236
GAMBAR 7.14	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2020	237
GAMBAR 7.15	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	238
GAMBAR 7.16	PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	239

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020	5
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2018 (juta orang)	9

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012-2019	87
TABEL 4.2	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN TAHUN 2020	96

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2020	190

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PROPORSI RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM AMAN DARI PARAMETER *E. COLLI* BERDASARKAN KARATERISTIK WILAYAH, SKAM-RT TAHUN 202	220
TABEL 7.2	PROPORSI RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM AMAN DARI PARAMETER TDS, *E. COLLI*, PH, NITRAT, NITRIT BERDASARKAN KARATERISTIK WILAYAH, SKAM-RT TAHUN 2020	221
TABEL 7.3	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2020	222

DAFTAR ISI

Tim Penyusun i
Kata Pengantar ii
Kata Sambutan iii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel xv
Daftar Isi xvi
Daftar Lampiran xxi

BAB I. DEMOGRAFI 1
A. KEADAAN PENDUDUK 1
B. KEADAAN EKONOMI 6
C. KEADAAN PENDIDIKAN 11
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 14

BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM 19
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 20
1. Akreditasi Puskesmas 21
2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap 23
3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan 23
4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani 26
5. Pelayanan Kesehatan Tradisional 30
B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM 32
1. Klinik 32
2. Praktik Mandiiri Tenaga Kesehatan 33
3. Unit Tranfusi Darah 34
C. LABORATORIUM 35

D. RUMAH SAKIT 37
1. Jenis Rumah Sakit 37
2. Tipe Rumah Sakit 38
3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 39
4. Akreditasi Rumah Sakit 41
E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN 42
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial 42
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 43
3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) .44
F. UPAYA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 46
Sarana dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 46
G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 47

BAB III SDM KESEHATAN 51
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN 51
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 53
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 58
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal 59
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN 61
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 64
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) 64
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus 66
3. Program Internsip Dokter 69
4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 70
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN 71
1. Jumlah Lulusan Poltekkes 73
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi 74
BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 79
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 79
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020 82
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN 85

1. Total Belanja Kesehatan/*Total Health Expenditure* (THE) 86
2. Jaminan Kesehatan 88
BAB V KESEHATAN KELUARGA 99
A. KESEHATAN IBU 99
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil 103
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil 104
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 105
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 107
6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 108
7. Pelayanan Kontrasepsi 110
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil 112
B. KESEHATAN ANAK 116
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal 119
2. Imunisasi 121
3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 128
C. GIZI 131
1. Status Gizi Balita 131
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi 139

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT 149
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 149
1. Tuberkulosis 149
2. HIV dan AIDS 154
3. Pneumonia 157
4. Hepatitis 159
5. Diare 161
6. Kusta 163
7. *Coronavirus Diseases* (COVID-19) 167

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) 172
1. Tetanus Neonatrum 172
2. Campak 174
3. Difteri 179
4. Polio dan *AFP (Acute Flaccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut) 180
C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA 186
D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS 191
1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 191
2. Chikungunya 195
3. Filariasis 196
4. Malaria 200
5. Rabies 204
6. Leptospirosis 205
7. Pengendalian Vektor Terpadu 207
E. PENYAKIT TIDAK MENULAR 207
1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM 208
2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 210
F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 211
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza 211
2. Penyalaguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis 212
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa 213

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN 217
A. AIR MINUM 217
B. AKSES SANITASI LAYAK 223
C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) 227
D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN
PENGAWASAN SESUAI STANDAR 230
E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) 231
F. KABUPATEN/KOTA SEHAT 233
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 234

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) 236
I. PERUMAHAN.....237
Daftar Pustaka 243
Daftar Lampiran

LAMPIRAN 9.a PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 9.b PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 9.c PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 9.d JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 9.e JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 10 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.b JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.c JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.d JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.e KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.f JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR* MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.g JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.h JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2018- 2020
LAMPIRAN 11.i JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM BATCH XV-XVI (PERIODE I-III TAHUN 2020)
LAMPIRAN 11.j JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XV SAMPAI DENGAN BATCH XVI/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II TAHUN 2020)
LAMPIRAN 11.k JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.l JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-V TAHUN 2020)
LAMPIRAN 11.m JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 11.n JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 12.a JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

LAMPIRAN 12.b	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 12.c	JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 12.d	JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2020
LAMPIRAN 13.a	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 13.b	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 13.c	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 14.a	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 14.b	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 14.c	JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 15.a	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 15.b	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 15.c	JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.a	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.b	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.c	JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.d	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.e	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.f	JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.g	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.h	JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.i	JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.j	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.k	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI* MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 16.l	JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 17.a	CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2020
LAMPIRAN 17.b	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 17.c	FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 17.d	FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 19.a	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020
LAMPIRAN 19.b	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2020
LAMPIRAN 19.c	ALOKASI DAN REALISASI REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN 19.d	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN 19.e	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN 19.f	ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

BAB V KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 20	JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 21	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2020
LAMPIRAN 22	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 23.a	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 23.b	PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 24	CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 25	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 26	PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 27.a	JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 27.b	PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 27.c	PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 28.a	JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2020

LAMPIRAN 28.b	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 29	CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 30.a	PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 30.b	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 31	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 32	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 33	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 34	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 35	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 37	CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 38	CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0-7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 39.a	CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-HiB 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 39.b	*DROP OUT RATE* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB (1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB (1) - DPT/HB/HiB (3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 39.c	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 40.a	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 40.b	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 41	CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 43	JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 44.a	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 44.b	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 44.c	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 44.d	PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 44.e	PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

LAMPIRAN 44.f PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 45 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 48 PELAKSANAKAN DETEKSI DINI PADA POPULASI USIA >= 15 TAHUN TAHUN 2020
LAMPIRAN 49 CAKUPAN PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN SANTUN LANSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 51.a JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN *TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 51.b JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 51.c JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 52 ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 53.a PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 53.b BALITA BATUK/ KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/ KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 53.c KASUS KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT TAHUN 2020
LAMPIRAN 53.d JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 53.e KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 54 JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 55.a JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020
LAMPIRAN 55.b JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 55.c JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 55.d JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2020
LAMPIRAN 55.e JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020
LAMPIRAN 55.f JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 56 KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 57 KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020

LAMPIRAN 58	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 59	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 59.b	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (*RELEASE FROM TREATMENT*/RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 60.a	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 60.b	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 61	KASUS *AFP (NON POLIO)* PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.a	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.b	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.c	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.d	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.e	FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 62.f	DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 63	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 63.b	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 63.c	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2020
LAMPIRAN 63.d	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 65.a	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 65.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020
LAMPIRAN 66.a	KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 66.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 66.c	*ANNUAL PARASITE INSIDENCE* (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016-2020
LAMPIRAN 67.a	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 67.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 67.c	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

LAMPIRAN 67.d JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE* (CFR) LEPTOSPIROSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 70.a REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 70.b JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 70.c KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 71.a JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020
LAMPIRAN 71.b JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 72.a PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 72.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSIMENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 73.a JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 73.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 74 PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 75 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 76.a PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 76.b JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 76.c JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020
LAMPIRAN 76.d PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2020
LAMPIRAN 76.e PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020
LAMPIRAN 76.f PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

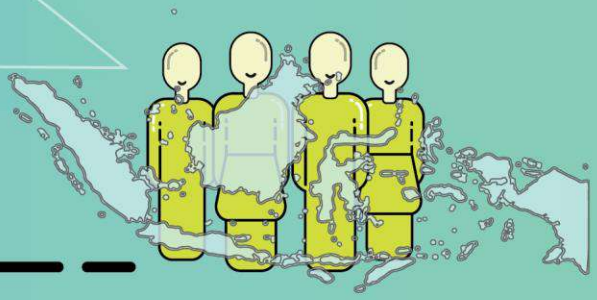

Bab I
Demografi

BAB I. DEMOGRAFI

Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), diantara Benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996) pulau, luas daratan sebesar 1.916.862,2 km^2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 km^2 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa (Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 136.142.501 jiwa penduduk laki-laki dan 134.923.865 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 dari 3,06 juta per tahun menjadi 2,99 juta per tahun (Lihat Gambar 1.1).

GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2016 – 2020 (dalam Jutaan)

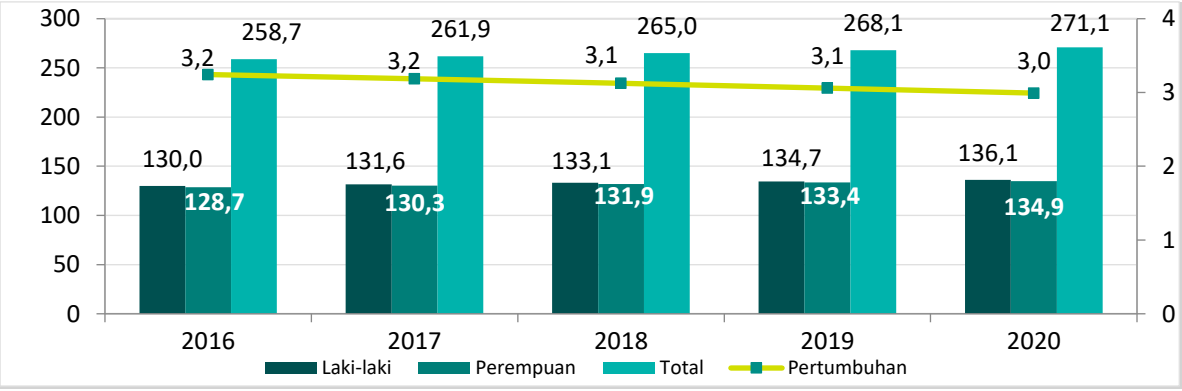

Sumber: Kepmenkes Nomor 117 Tahun 2017, Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS
(Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat (49.935.858 jiwa), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara (768.505 jiwa). Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

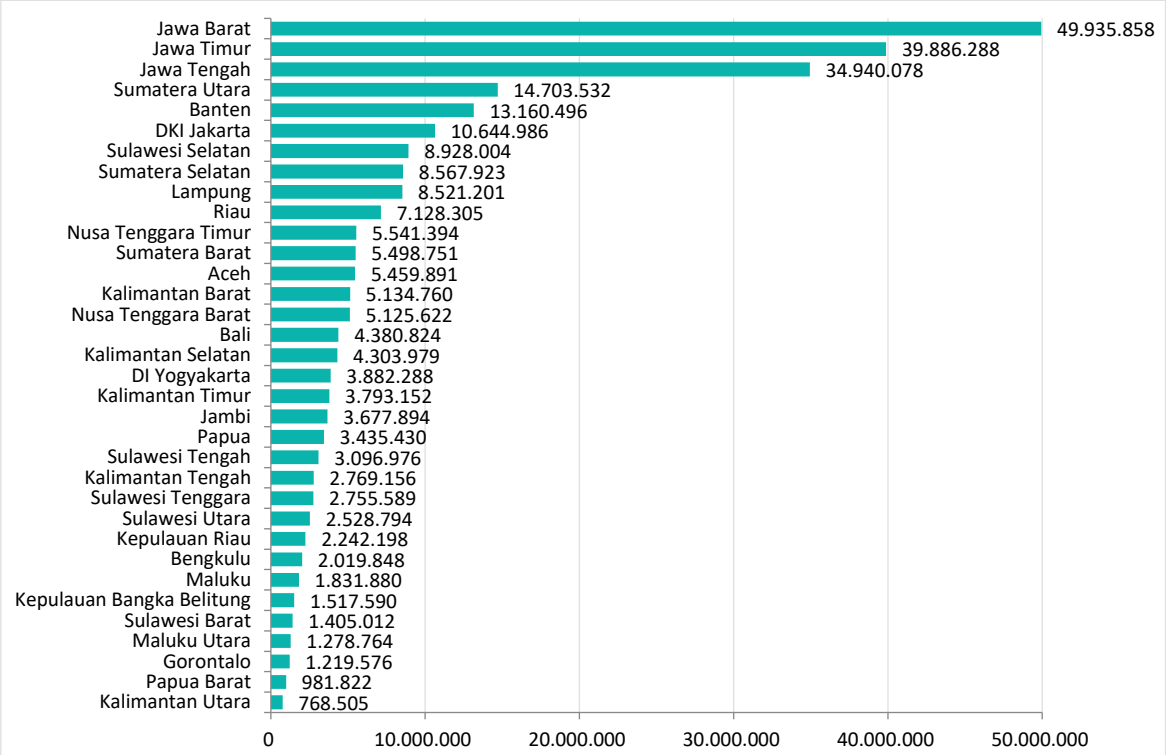

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

Pulau Jawa (59,9%) merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia. Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,1%) dan Papua (1,6%) merupakan pulau dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat secara rinci pada Gambar 1.3.

GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2020

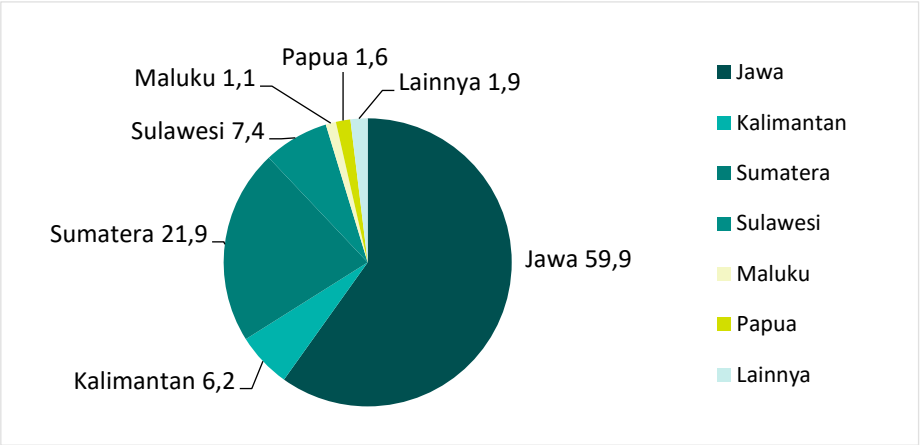

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS
(Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2020

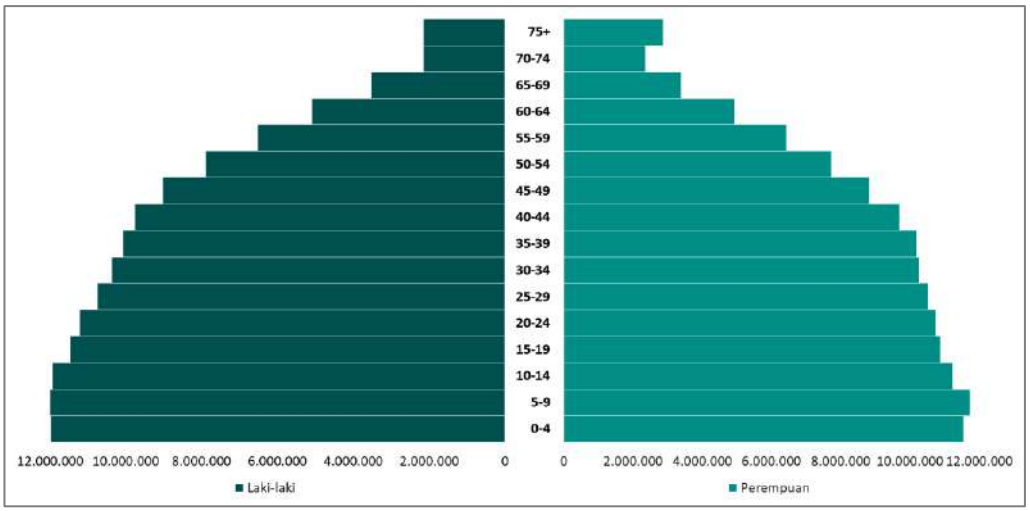

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Grafik pada usia muda lebih lebar dibandingkan bagian di atasnya membuktikan bahwa

penduduk Indonesia memiliki struktur muda. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menujukkan tingkat persebaran penduduk suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2020 berdasarkan hasil estimasi sebesar 141,408 jiwa per km^2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.5
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2) DI INDONESIA
TAHUN 2020

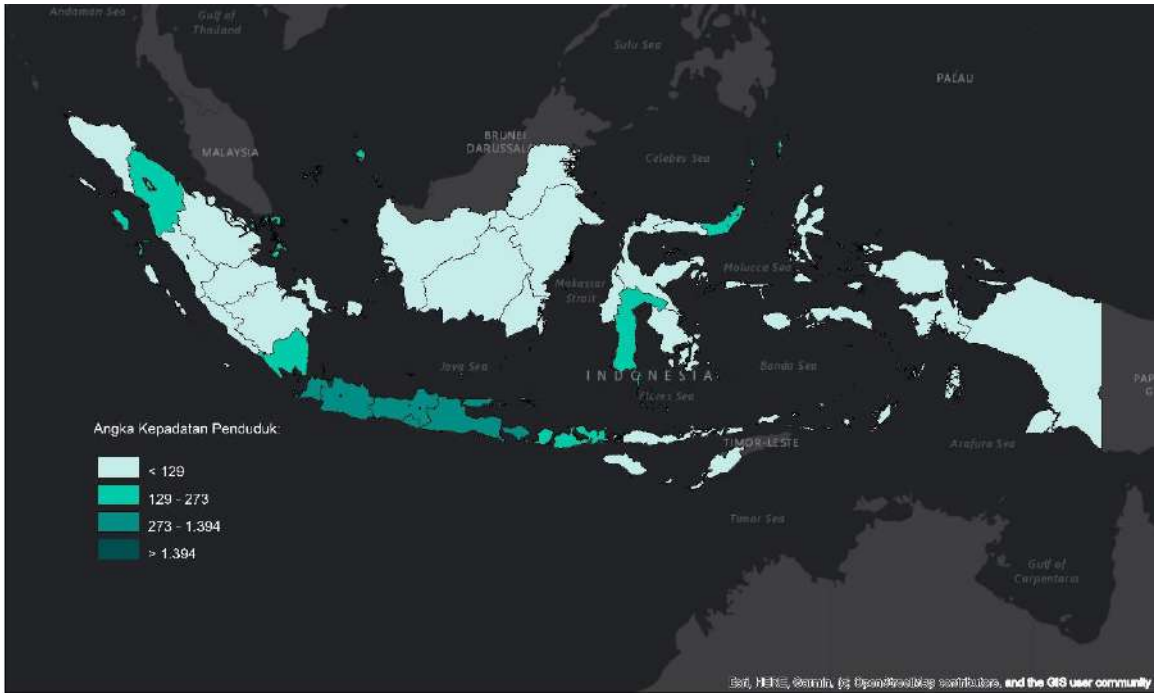

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

Gambar 1.5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 16.031,36 jiwa per km^2. Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Papua Barat sebesar 9,54 jiwa per km^2 (Lampiran 1).

Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) mensosialisasikan program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebesar 46,79%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 47 orang yang tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan per provinsi secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.a.

Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2020 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 2.b, 2.c, 2.d, dan 3.a.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup	-	-	-	4.747.077
2	Bayi	0 Tahun	2.381.409	2.280.969	4.662.378
3	Batita (Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 Tahun	7.161.120	6.866.989	14.028.109
4	Anak Balita	1 – 4 Tahun	9.598.795	9.214.585	18.813.380
5	Balita (Bawah Lima Tahun)	0 – 4 Tahun	11.980.204	11.495.554	23.475.758
6	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.857.859	4.670.547	9.573.353
7	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.442.881	2.350.677	4.793.558
8	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	14.567.981	13.927.519	28.495.500
9	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	36.130.351	34.579.453	70.709.804
10	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	92.188.550	91.328.851	183.517.401
11	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	7.823.600	9.015.561	16.839.161
12	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	12.912.675	14.175.078	27.087.753
13	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	4.295.664	5.413.455	9.709.119
14	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 Tahun	-	71.570.465	71.570.465
15	Wanita Usia Subur Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	52.779.457	52.779.457
16	Ibu Hamil	1,1 x lahir hidup	-		5.221.784
17	Ibu Bersalin/Nifas	1,05 x lahir hidup	-		4.984.432

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (Diolah oleh: Pusdatin, Kemenkes RI)

B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%.

Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75%, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%.

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020
(dalam %)

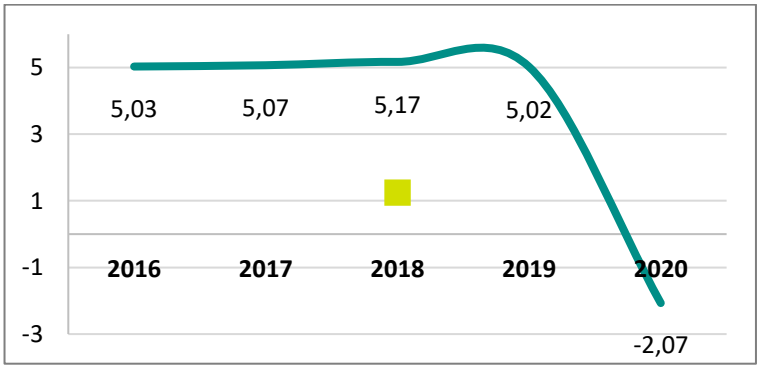

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dampak negatif covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang membawa kontraksi yang sangat buruk.

Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan

jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 poin terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat di lihat pada lampiran 3.b dan 3.c.

GAMBAR 1.7
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

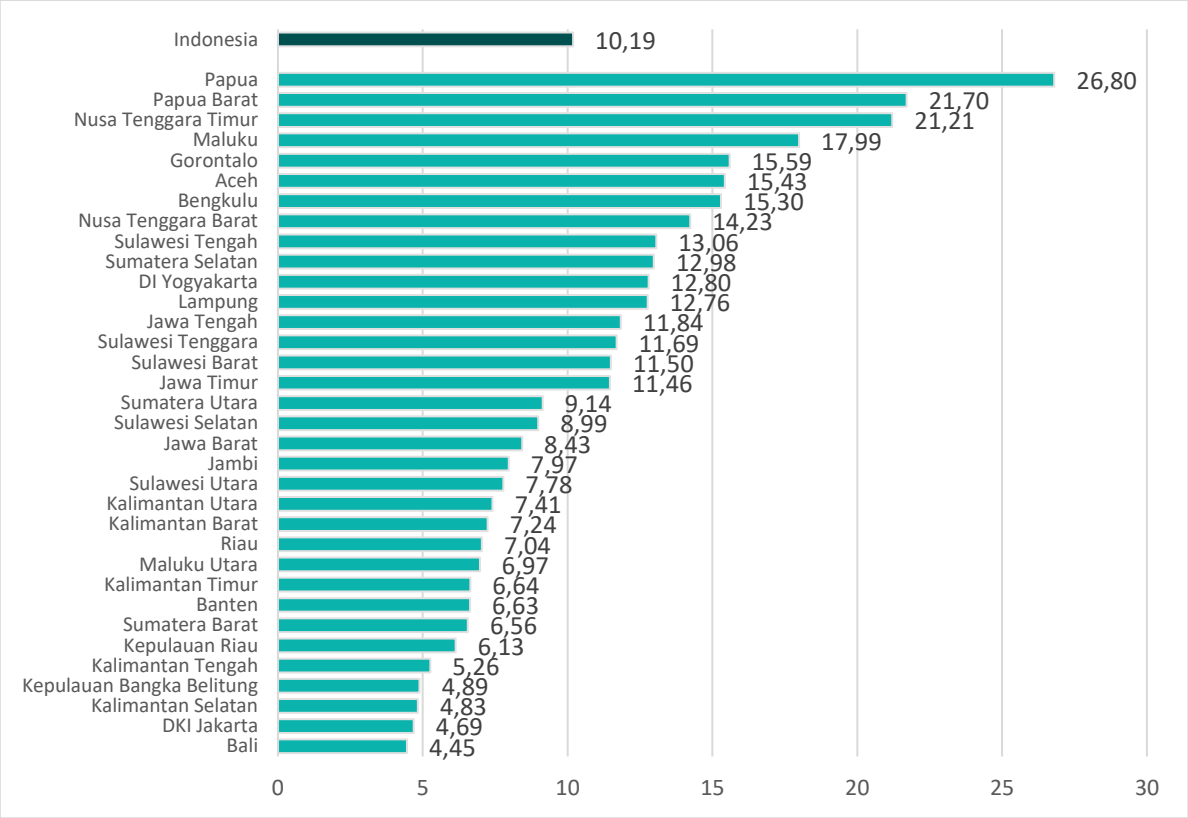

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari gambar 1.7, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020, persentase kemiskinan terendah ada di Provinsi Bali sebesar 4,45%, sementara yang tertinggi ada di Provinsi Papua yang mencapai angka sebesar 26,80%.

Selain jumlah penduduk miskin, yang penting diketahui lainnya adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 adalah sebesar 1,75, menurun 0,25 poin dari kondisi September

2019. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan tahun 2020 adalah sebesar 0,47 menurun 0,11 poin dari kondisi September 2019. Data mengenai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.d.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada tahun 2020, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,39 dimana ada kenaikan sebesar 0,1 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian mengenai Indeks Gini secara detail dapat dilihat pada lampiran 3.e.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.8

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2020

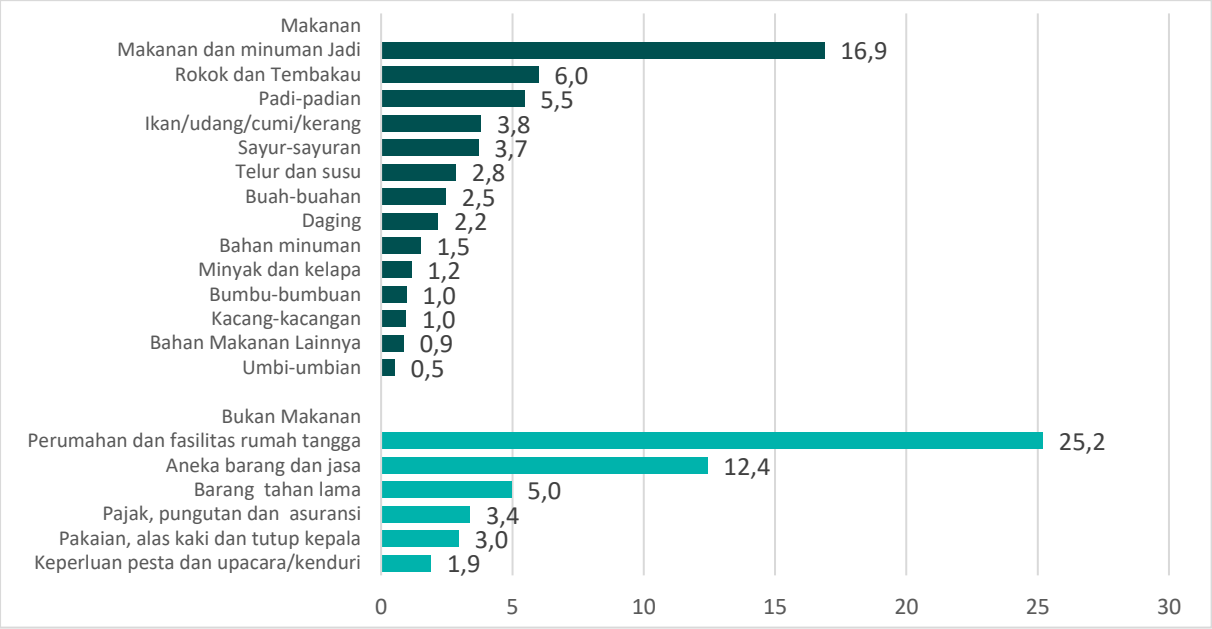

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2020, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan (49,2%) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk bukan makanan (50,8%). Dari gambar 1.8 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (25,2%), makanan dan minuman jadi (16,9%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,4%).

Berdasarkan konsep dari The Labor Force Concept yang disarankan *oleh International Labor Organization* (ILO), penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang menjadi 140,22 juta orang pada periode Februari 2020. Namun mengalami penurunan pada jumlah penduduk yang bekerja dari 128,75 juta orang pada Agustus 2019 menjadi 128,45 juta orang pada Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan, dari 67,53% pada Agustus 2019 menjadi 67,77% pada Agustus 2020. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode Agustus 2019, jumlah pengangguran terbuka adalah 7,1 juta orang, meningkat menjadi 9,76 juta orang di periode Agustus 2020.

TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2015-2018
(juta orang)

Angkatan Kerja	2017		2018		2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	131,54	128,06	133,94	131,01	136,18	133,56	140,22	138,22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,02	66,67	69,2	67,26	69,37	67,53	69,21	67,77
Jumlah Penduduk yang Bekerja	124,54	121,02	127,07	124,01	131,69	128,75	133,29	128,45
Jumlah Pengangguran Terbuka	7,01	7,04	6,87	7,00	6,89	7,10	6,92	9,76
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,33	5,50	5,13	5,34	5,01	5,28	4,94	7,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

GAMBAR 1.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI
TAHUN 2020

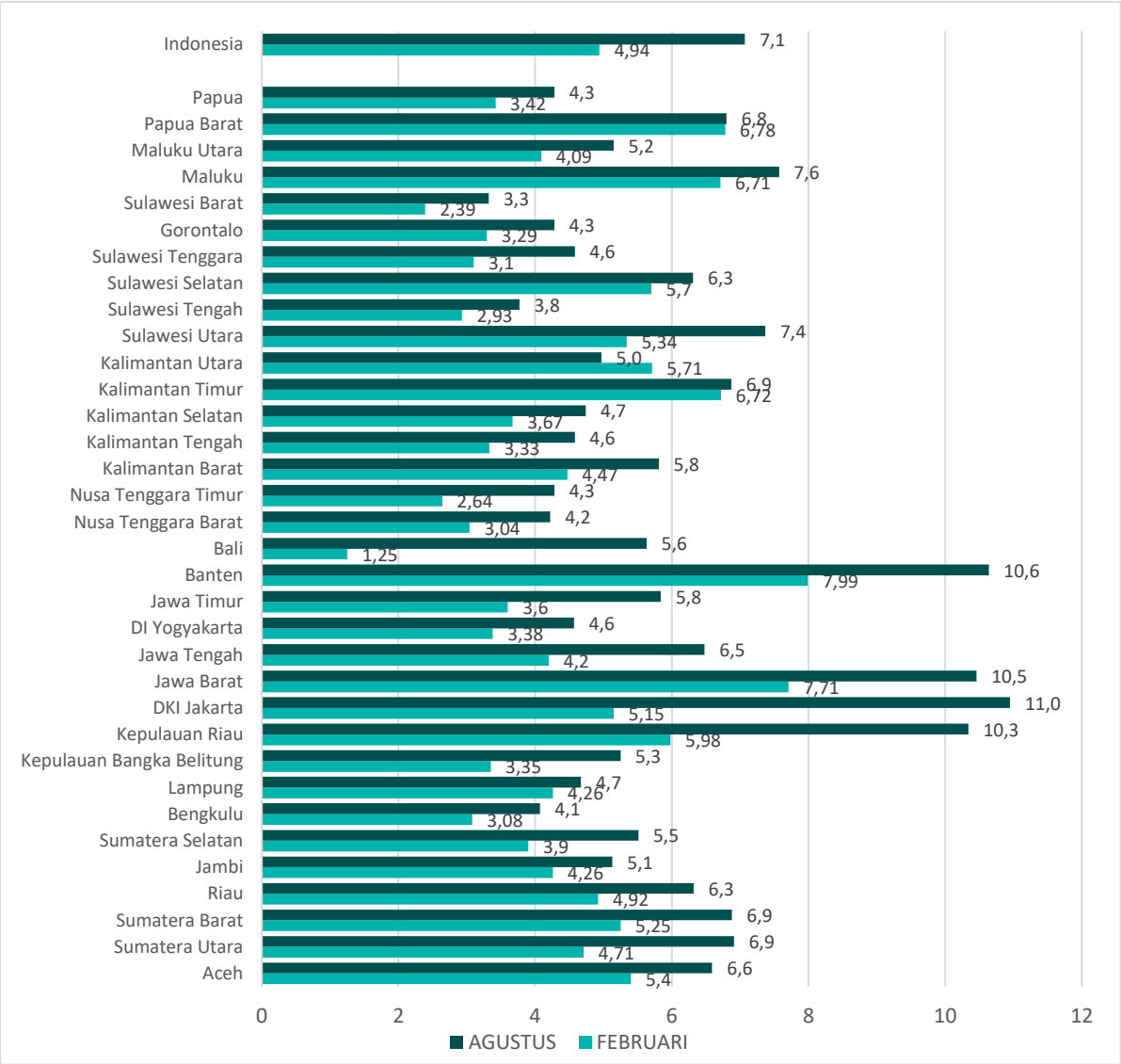

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2019 sebesar 5,23% mengalami kenaikan di periode Agustus 2020 menjadi 7,07 %. Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka Februari 2019 ke Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 0,04%. Tingginya TPT biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

GAMBAR 1.10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
TAHUN 2016 – 2020 (dalam tahun)

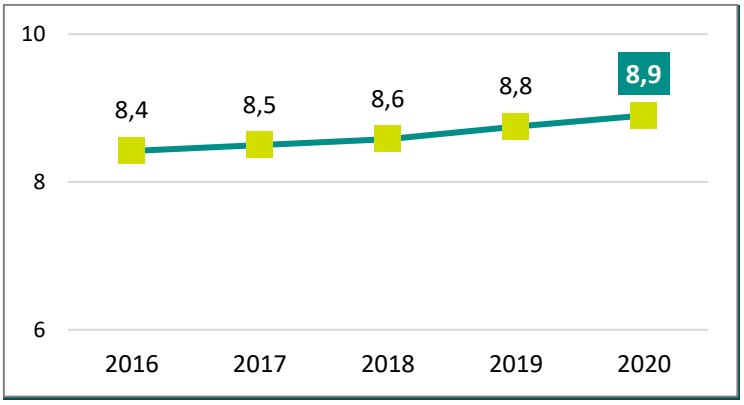

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Dari gambar 1.10, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berumur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan terlihat dari gambar yaitu RLS pada tahun 2016 sebesar 8,42 tahun menjadi 8,90 tahun pada tahun 2020.

Berdasarkan provinsi, Rata-rata Lama Sekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,96 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 11,17 tahun. Sebanyak 16 (enam belas) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.i.

Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, AMH laki-laki (98,7 %) lebih tinggi dari perempuan (96,9 %). Secara rinci dan detail, AMH (persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.j.

Angka partisipasi adalah indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Nilai APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2017 – 2020

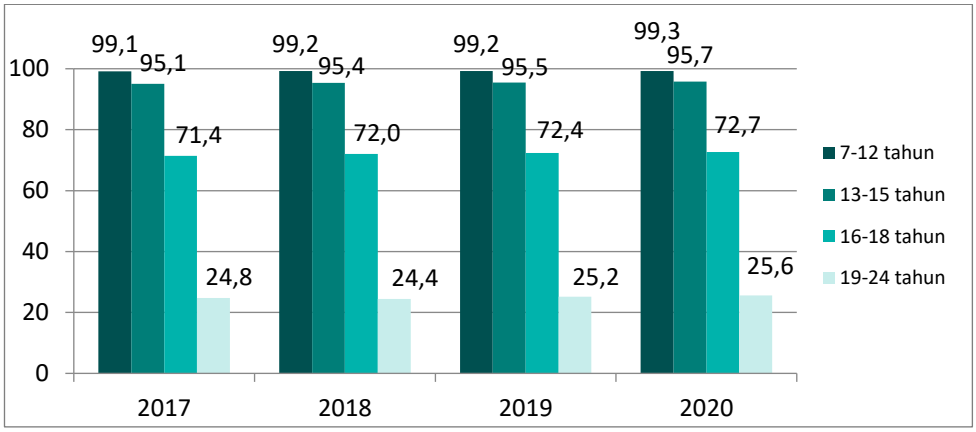

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan gambar 1.11, persentase APS setiap tahunnya di setiap kelompok umur mengalami peningkatan. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini dimungkinkan karena usia pada kelompok umur yang tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) masuk ke dalam angkatan kerja. Peningkatan persentase APS pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/sederajat) dan 13-15 tahun (setara SMP/sederajat) dimungkinkan karena adanya program wajib belajar 9 tahun. Begitupula dengan peningkatan persentase APS pada kelompok 16-18 tahun (SMA/sederajat) yang terjadi karena adanya program wajib belajar 12 tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2017 – 2020

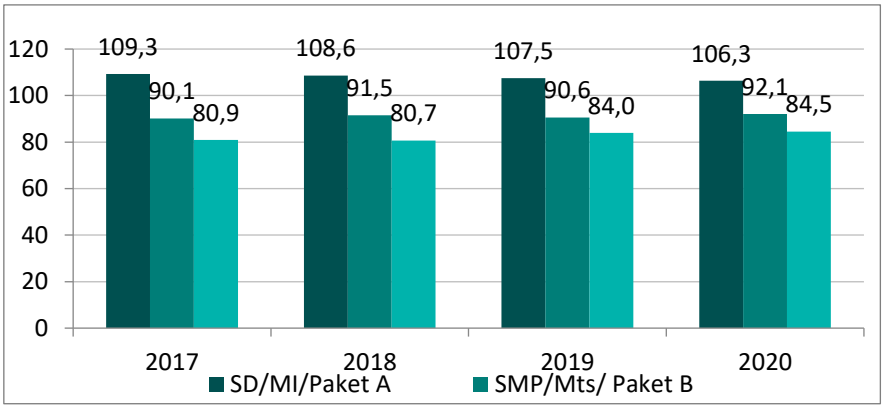

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2017-2020 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Gambar 1.12 menunjukan bahwa dari tahun 2017-2020, hanya nilai APK untuk SMA/sederajat yang mengalami kenaikan terus menerus dibandingkan nilai APK SD/MI dan SMP/MTs yang cenderung tidak stabil. Secara umum APK penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2020 terdapat pada Lampiran 3.m.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2017 – 2020

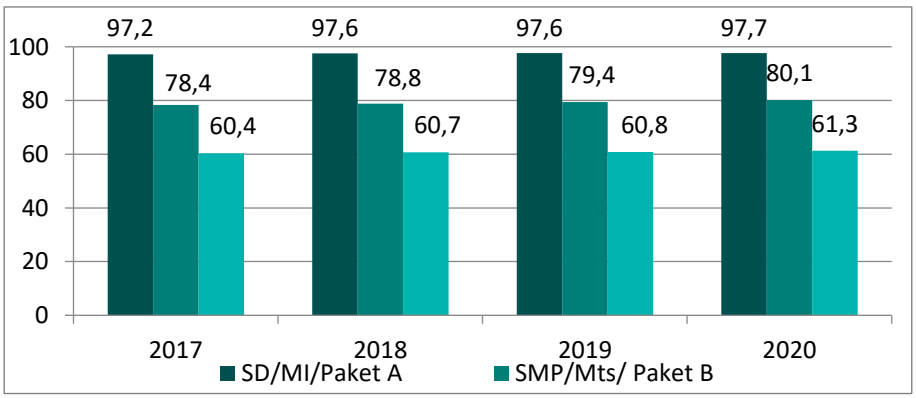

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Tahun 2020 nilai APM untuk SD/sederajat sebesar 97,69%, SMP/sederajat sebesar 80,12% dan SMA/sederajat sebesar 61,25%. Kondisi ini terus meningkat pada semua jenjang pendidikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nilai APM lebih mencerminkan kondisi partisipasi sekolah dibandingkan nilai APK. Rincian APM menurut provinsi tahun 2017-2020 terdapat pada Lampiran 3.n.

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dengan metode lama dan metode baru. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 sebesar 71,94 persen atau tumbuh 0,03 % dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari 11,30 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11,01 juta rupiah pada tahun 2020. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2020 anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,14 tahun, dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004 – 2020

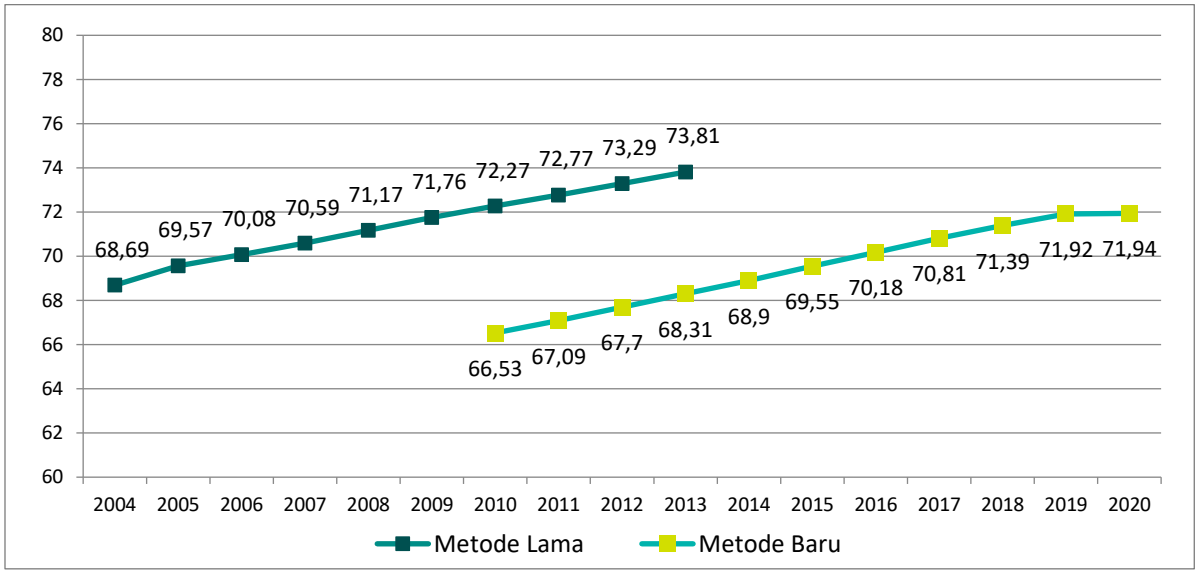

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 IPM Indonesia mencapai 71,94. Angka ini meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun 2019. Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai nilai IPM kategori sangat tinggi (80,77). Terdapat 22 provinsi dengan kategori IPM tinggi dan 11 provinsi masuk dalam kaegori IPM sedang.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2020, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi di antara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta.

GAMBAR 1.15
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

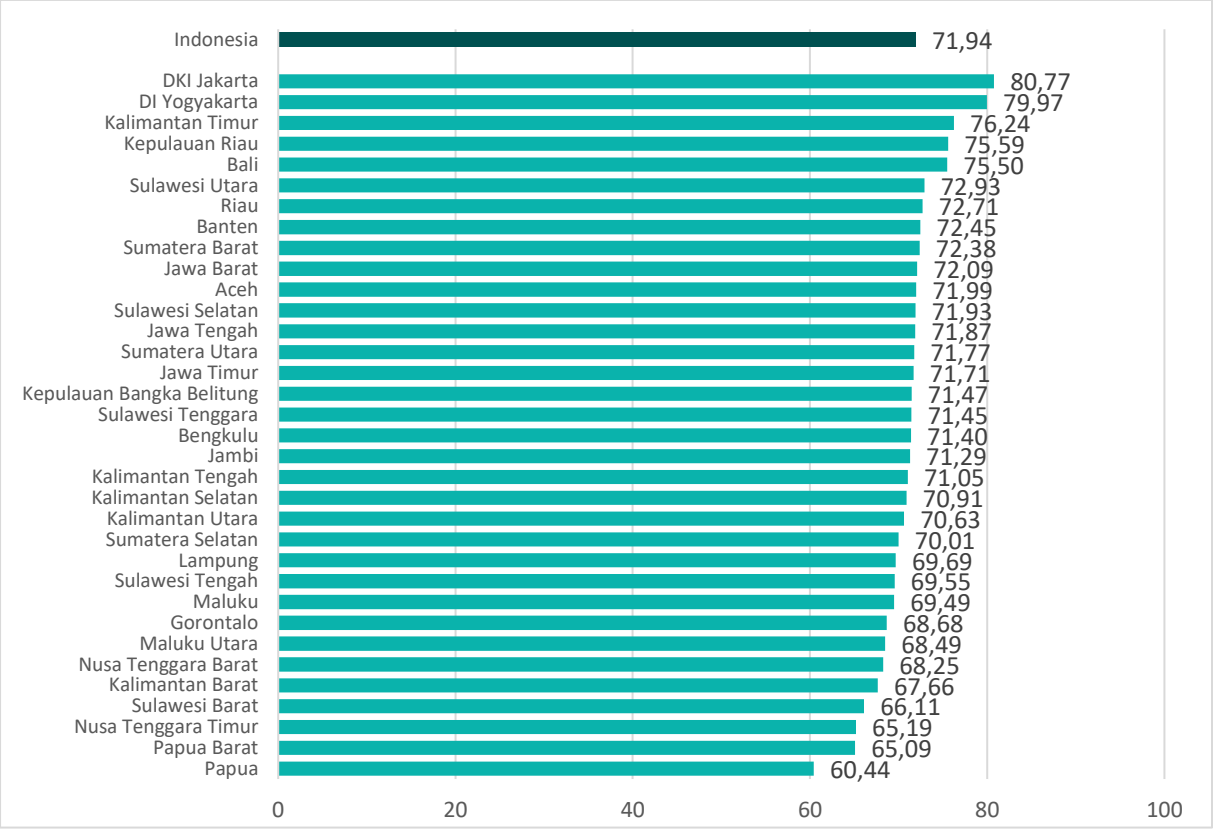

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

***

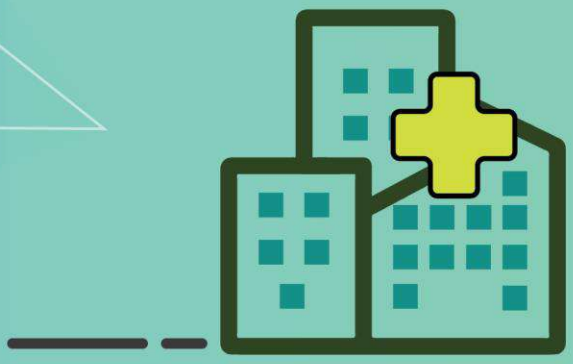

Bab II
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan UKBM

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari FKTP/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga kesehatan), Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, FKTRL/Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), dan Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Wahana pemberdayaan masyarakat adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Sehingga memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan melainkan yang lebih penting sebagai subyek pembangunan Kesehatan yang dapat mengambil keputusan dalam mengadopsi inovasi di bidang Kesehatan. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan tahap: a. pengenalan kondisi desa/kelurahan; b. survei mawas diri; c. musyawarah di desa/kelurahan; d. perencanaan partisipatif; e. pelaksanaan kegiatan; dan f. pembinaan kelestarian.

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat didampingi oleh Tenaga Pendamping yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. Tenaga Pendamping dimaksud harus memiliki kemampuan sebagai Tenaga Pendamping yang didapat melalui pelatihan. Pada bab II ini, UKBM yang akan diulas adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Total jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2020 adalah 10.205 puskesmas, yang terdiri dari 4.119 Puskesmas rawat inap dan 6.086 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 10.134, dengan jumlah Puskesmas rawat inap sebanyak 4.048 puskesmas dan Puskesmas non rawat inap 6.086 sebanyak puskesmas. Data mengenai jumlah Puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.a dan 4.b.

GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2016 - 2020

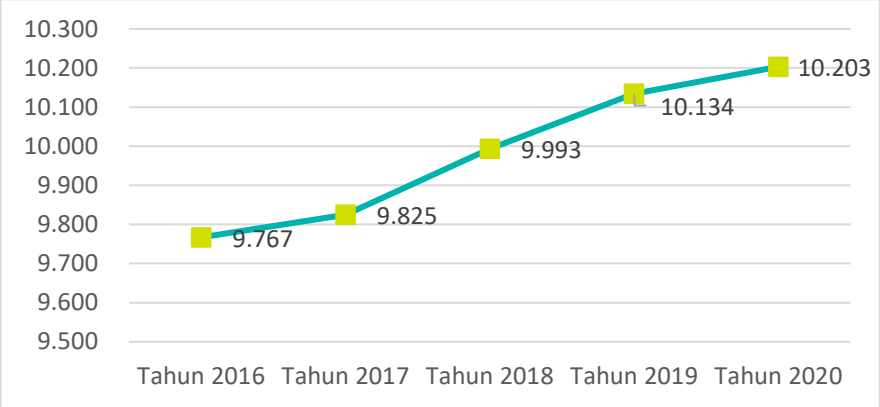

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2016, jumlah Puskesmas semakin meningkat, dari 9.767 unit menjadi 10.230 Puskesmas pada tahun 2020. Peningkatan jumlah Puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio Puskesmas terhadap kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2020 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari Puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2020

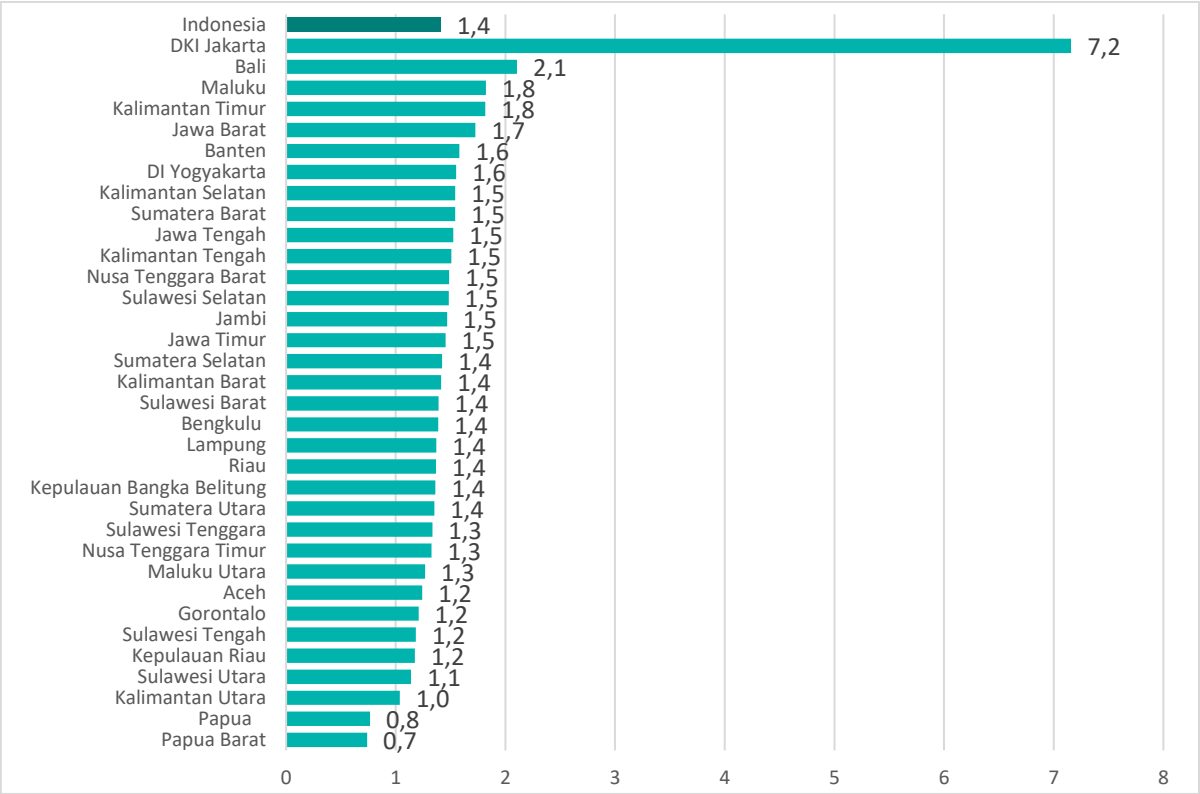

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021; Kementerian Dalam Negeri, 2020

Rasio Puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di provinsi Papua Barat. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi, peta sebaran rasio puskesmas dapat dilihat pada Gambar 2.3. Data mengenai rasio Puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

1. Akreditasi Puskemas

Permenkes No. 43 Tahun 2019 menyatakan akreditasi puskesmas yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Dengan akreditasi puskesmas diharapkan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola: 1) manajemen secara institusi, 2) manajemen program, 3) manajemen risiko, dan 4) manajemen mutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 57 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Tahun 2020, terdapat 9.153 Puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 89,69% dari 10.205 Puskesmas (Gambar 2.3). Jumlah puskesmas yang terakreditasi ini sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Corona Virus 19 sejak bulan maret tahun 2020, maka Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 455 tahun 2020 yang mengamanahkan adanya perpanjangan masa berlaku sertifikat akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak bencana dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. Dari 9.153 Puskesmas yang terakreditasi sampai tahun 2020, untuk tingkat kelulusan akreditasi masih didominasi oleh status kelulusan madya dan dasar. Adapun distribusi tingkat kelulusan akreditasi Puskesmas adalah sebanyak 5.068 (55,4%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan madya, sebanyak 2.177 (23,8%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan dasar, 1.669 (18,2%) Puskesmas terakreditasi status kelulusan utama, dan 239 (2,6%) Puskesmas terakreditasi dengan status kelulusan paripurna. Data mengenai akreditasi Puskesmas dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.d.

GAMBAR 2.3
PERSENTASE AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2020

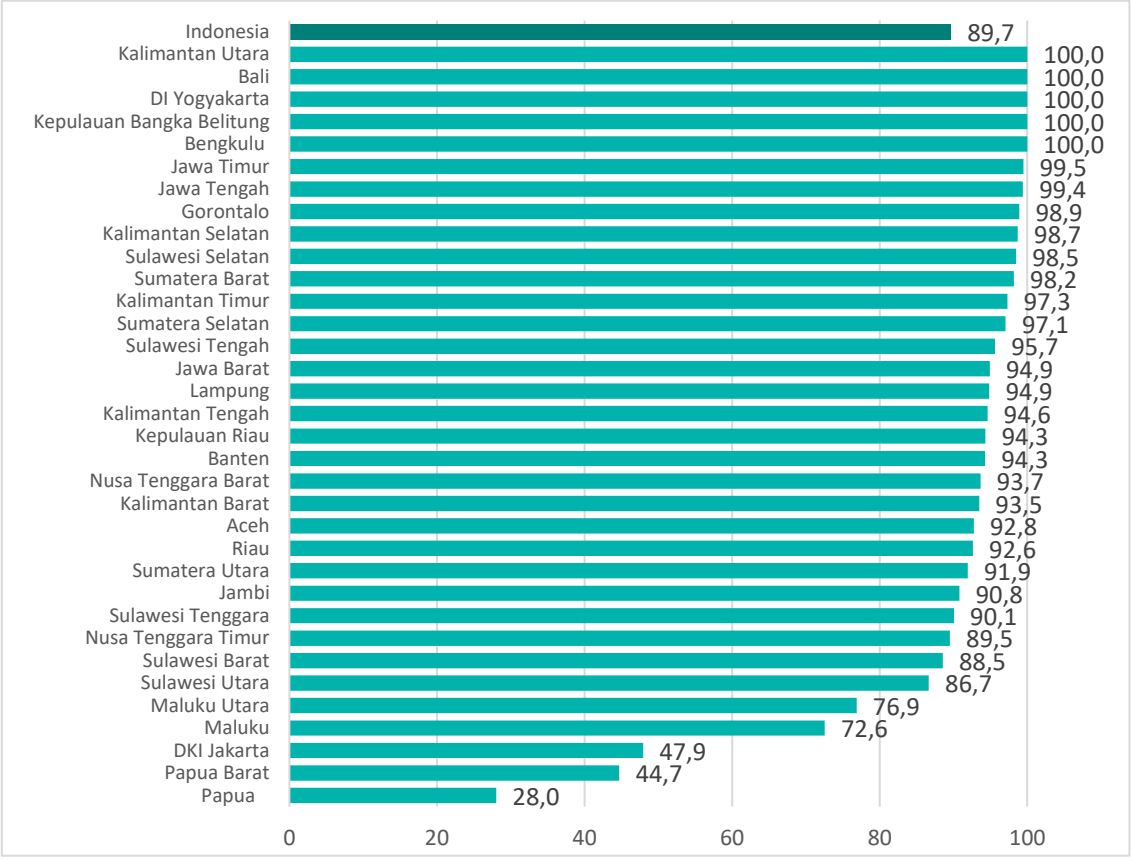

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

2. Perkembangan Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah Puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

GAMBAR 2.4
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2016 – 2020

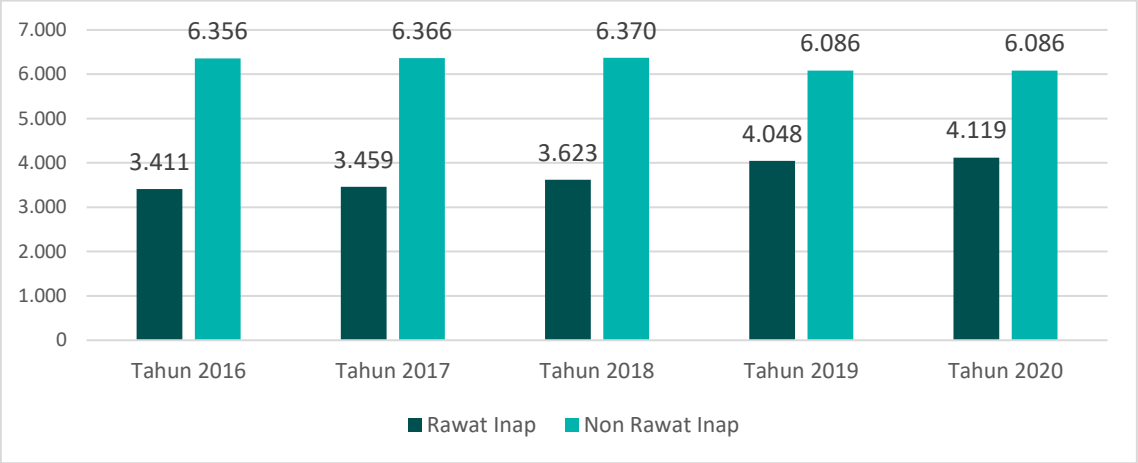

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Jumlah Puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.411 unit pada tahun 2016, lalu meningkat menjadi 4.119 unit pada tahun 2020 (Gambar 2.4). Puskesmas non rawat inap cenderung mengalami penurunan jumlah Puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2016, yaitu 6.356 lalu dan pada tahun 2020 sebanyak 6.086. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis Puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang bertugas di puskemas tidak hanya medis dan paramedis. Namun juga terdapat tenaga promotif dan preventif untuk mendukung tugas Puskesmas dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

GAMBAR 2.5
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

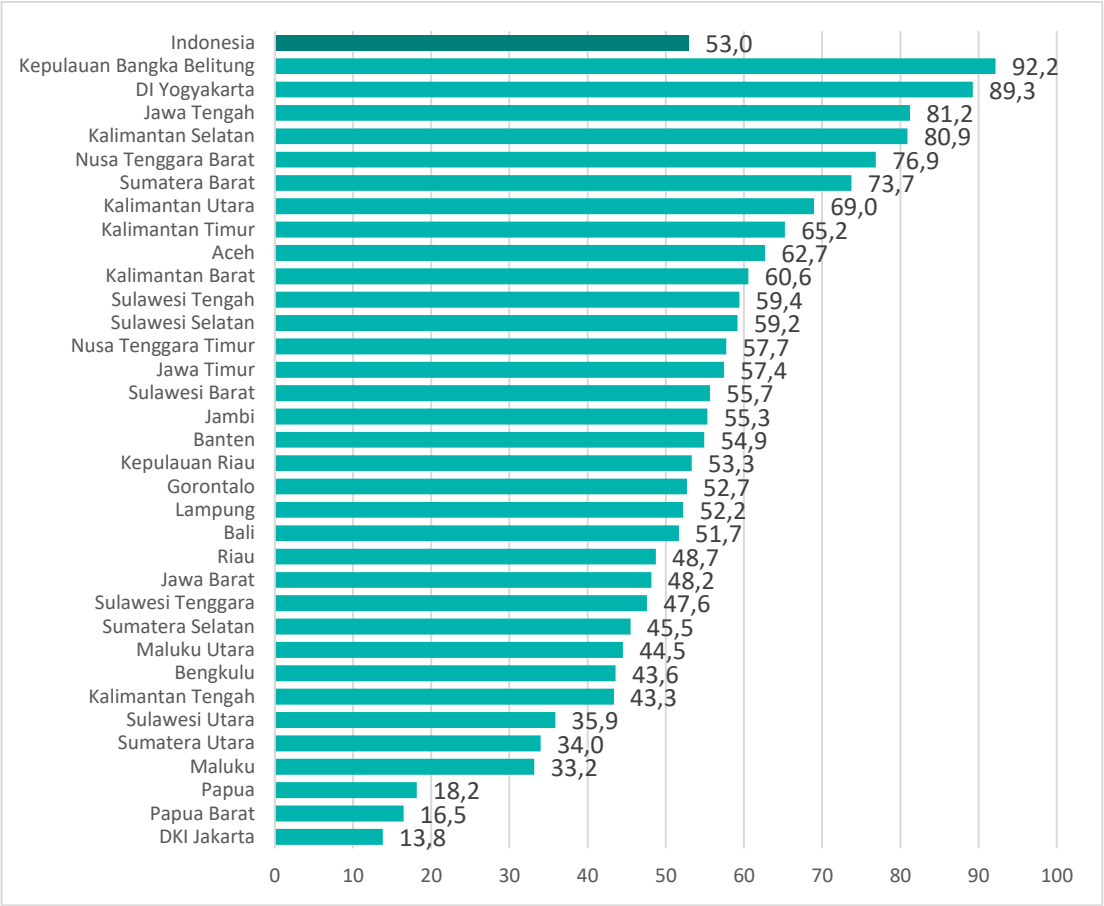

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 terdapat 5.431 Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dari 10.251 Puskesmas yang melaporkan data. Rincian lengkap mengenai jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan promotif dan preventif dapat dilihat di Lampiran 4.e.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), hanya 39,6% puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut.

GAMBAR 2.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

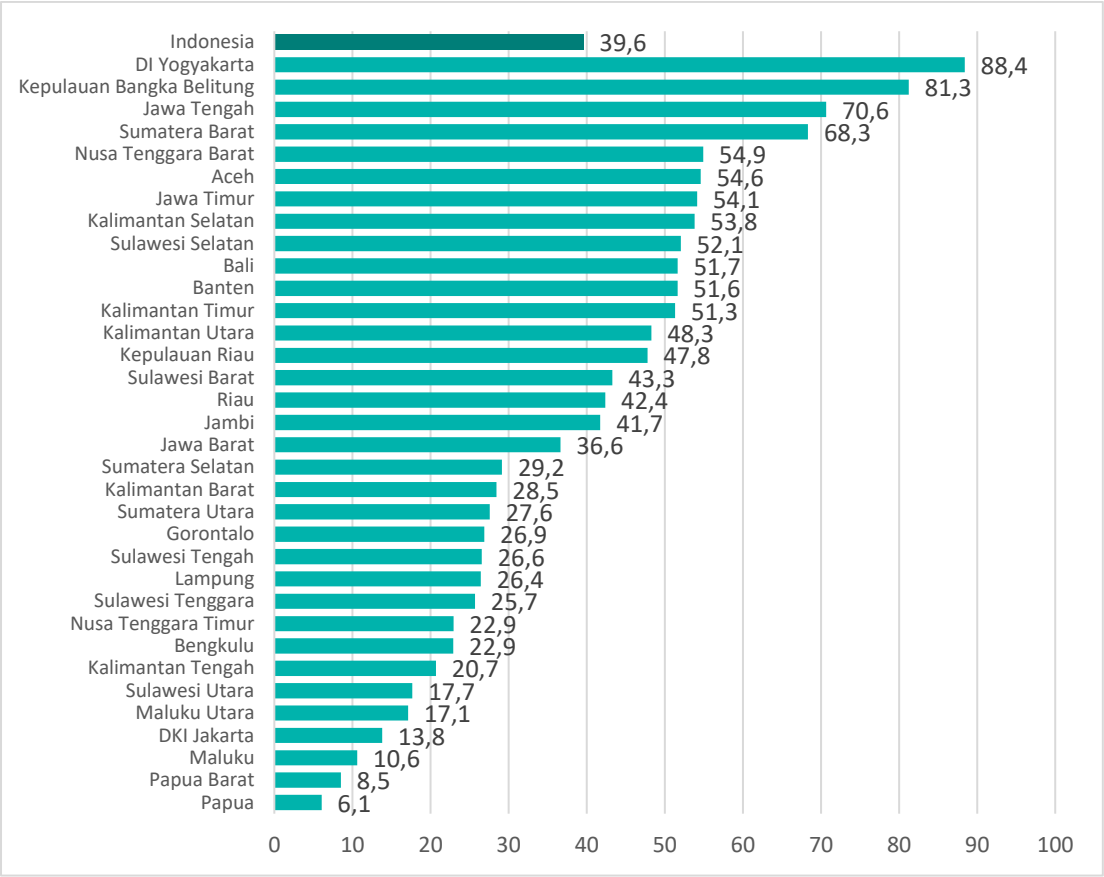

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan gambar 2.6, persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes sesuai standar paling tinggi berdasarkan gambar 2.6 adalah provinsi DI Yogyakarta (88,4%), diikuti oleh provinsi Kep. Bangka Belitung (81,3%) dan provinsi Jawa Tengah (70,6%). Sedangkan persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes sesuai standar paling rendah adalah provinsi Papua (6,1%), diikuti oleh provinsi Papua Barat (8,5%), dan provinsi Maluku (10,6%). Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (nakes) dapat dilihat. di Lampiran 4.f.

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter belum ada di semua puskesmas.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2020 masih terdapat 6,9% puskesmas tanpa dokter. Program Kementerian Kesehatan dalam rangka meratakan distribusi dalam hal tenaga kesehatan, khususnya dokter adalah dengan program Nusantara Sehat (tim dan individu).

GAMBAR 2.7
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

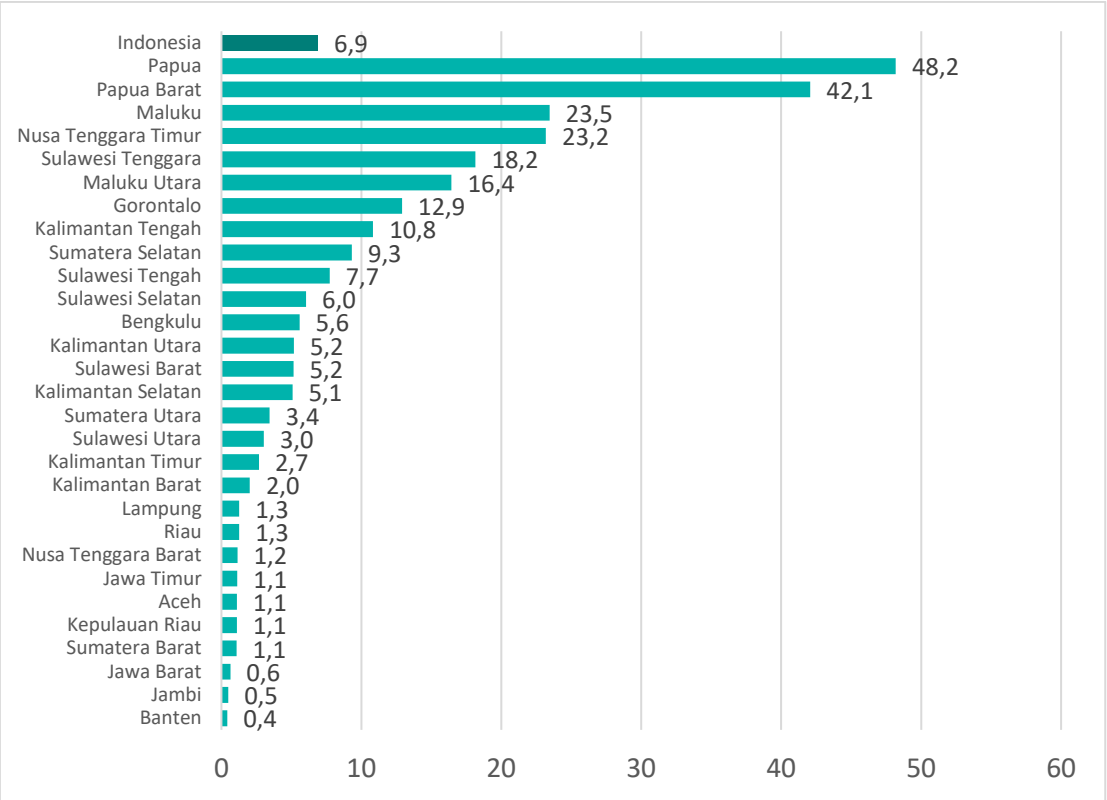

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan persentase puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan gambar 2.7 adalah provinsi Papua (48,18%), diikuti oleh provinsi Papua Barat (42,07%) dan provinsi Maluku (23,45%). Sedangkan provinsi dimana tidak ada puskesmas tanpa dokter di wilayahnya (0%) adalah provinsi Bali, provinsi DI Yogyakarta, provinsi Jawa Tengah, provinsi DKI Jakarta, dan provinsi Kep. Bangka Belitung. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas tanpa dokter dapat dilihat di Lampiran 4.g.

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII tentang pengelolaan kesehatan pada pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil). Selain itu, pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja melalui pengelola tempat kerja lewat upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi pekerja. Sedangkan pada BAB VI tentang upaya kesehatan Bagian kesembilan pada pasal 80-81, upaya kesehatan

olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, yang menjadi dasar dalam peningkatan prestasi belajar, kerja dan olahraga.

Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2019 dalam pasal 3 mengamanatkan penyelenggaraan Kesehatan Kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di Tempat Kerja, dan dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan standar kesehatan kerja.

Pada tahun 2020, indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra) terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan.

GAMBAR 2.8
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

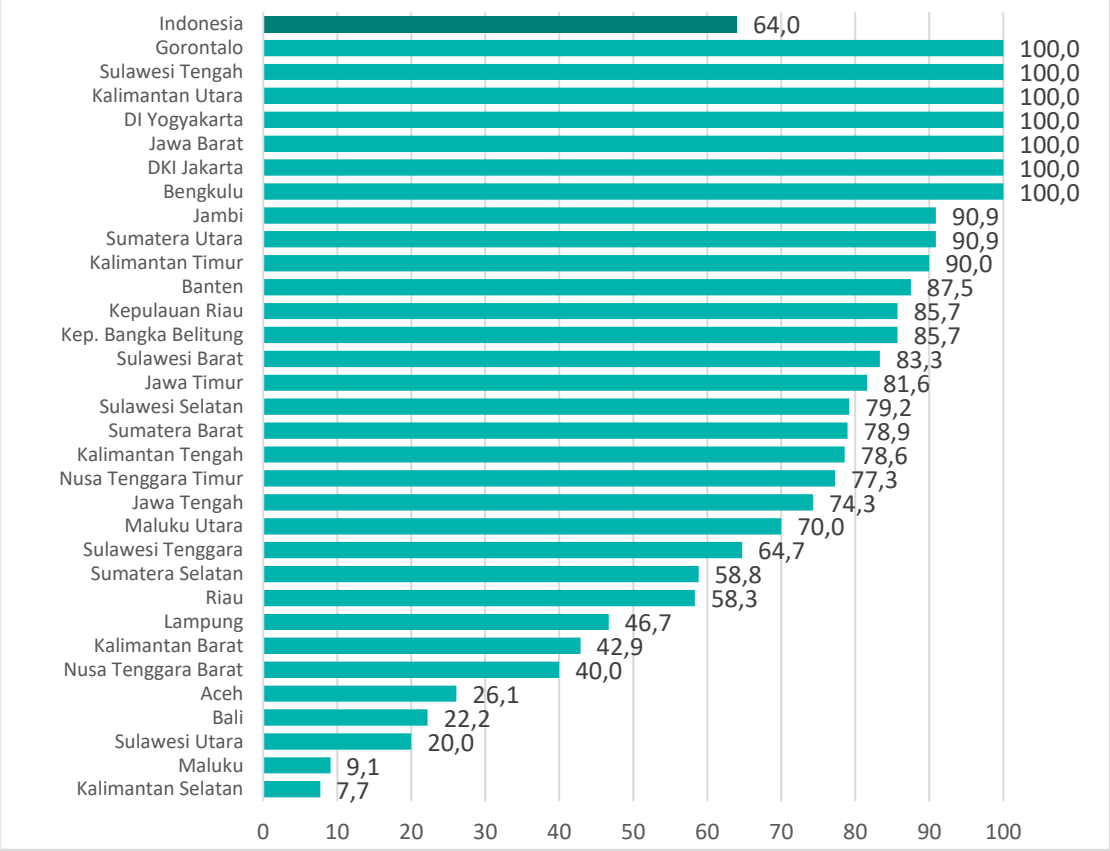

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan gambar 2.8, Provinsi yang seluruh Kabupaten/Kotanya sudah melaksanakan kesehatan kerja adalah Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bengkulu. Sedangkan provinsi Papua dan Papua Barat, belum memenuhi kriteria kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja (minimal 30% puskesmas melaksanakan kesehatan kerja).

GAMBAR 2.9
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

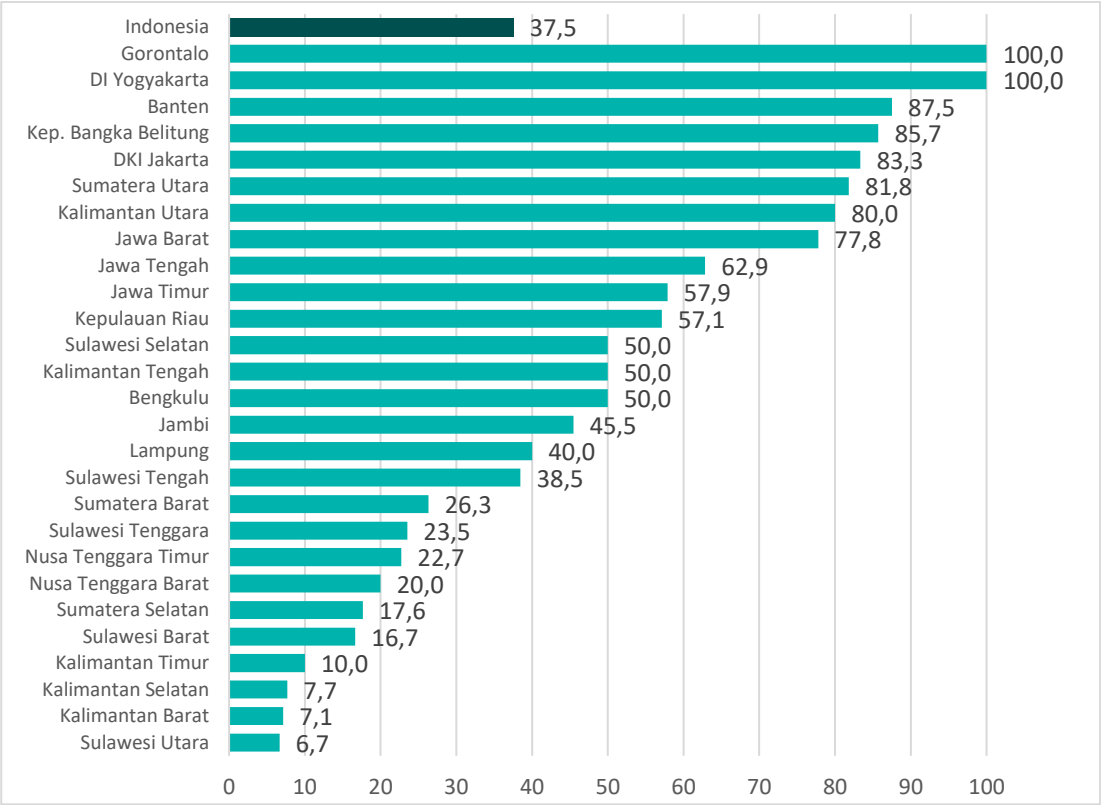

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan gambar 2.9, Provinsi yang seluruh Kabupaten/Kotanya sudah melaksanakan kesehatan olahraga adalah Gorontalo dan DI Yogyakarta. Sedangkan provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Bali, Riau, dan Aceh belum memenuhi kriteria kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga (minimal 30% puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga).

Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan, GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus dalam implementasinya.

Pada tahun 2020, di Indonesia terdapat 4.651 puskesmas, 678 perusahaan, 8.553 Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), dan 671 GP2SP yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.

GAMBAR 2.10
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA DI INDONESIA TAHUN 2020

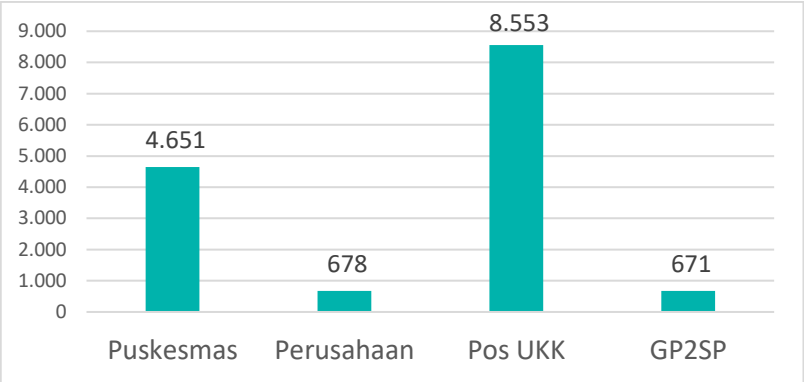

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2019 meliputi:

a) peningkatan pengetahuan kesehatan;
b) pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
c) pembudayaan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat kerja
d) penerapan gizi kerja; dan
e) peningkatan kesehatan fisik dan mental.

Peningkatan kesehatan fisik adalah peningkatan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dengan melakukan aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur, guna mencapai kebugaran jasmani.

Dari gambar 2.11, pada tahun 2020 di Indonesia, jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani adalah sebesar 5.850, jumlah pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji sebanyak 95.820 jemaah, dan jumlah kelompok olah raga adalah sebesar 20.850. Gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan kesehatan kerja, pengukuran dan pemeriksaan kebugaran menurut provinsi terdapat pada Lampiran 8.h. Keberhasilan pelaksanaan pengukuran kebugaran di masa pandemi dipengaruhi faktor adaptasi kegiatan kebugaran jasmani menjadi kegiatan mandiri oleh baik kelompok pekerja (instansi pemerintah), Jemaah haji. Sedangkan pembinaan kelompok olahraga disebabkan diawal tahun 2020 sudah dilakukan penandatangan kerja sama dengan 6 induk olahraga masyarakat.

GAMBAR 2.11
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA
TAHUN 2020

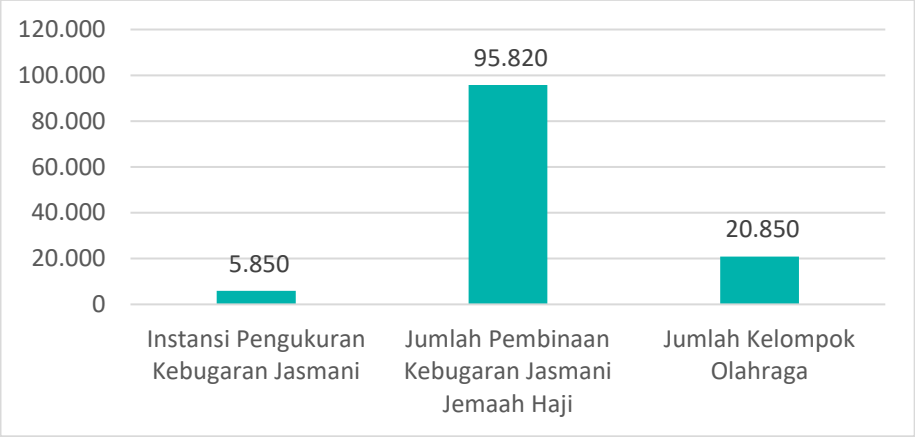

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau *continuum of care* sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, diberikan baik dengan metode keterampilan maupun ramuan. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menyatakan bahwa jenis pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan pelayanan kesehatan tradisional yang dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan Permenkes No 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris serta Permenkes No 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Permenkes No 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer serta peraturan lain yang mendukung.

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 telah menetapkan indikator pencapaian target pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, jumlah rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi, dan jumlah griya sehat di kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan tradisional, dapat diselenggarakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan di Fasilitas pelayanan Kesehatan tradisional (Griya Sehat). Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional, pembinaan kelompok asuhan mandiri, pendataan dan pembinaan penyehat tradisional, dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam bentuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional pada tahun 2020 sebesar 130 puskesmas dari 10.203 puskesmas

(1,27%) yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua.

Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 merupakan rumah sakit yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Jumlah rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi sebesar 10 rumah sakit dari 1.071 rumah sakit pemerintah (0,93%) yang berada di provinsi Aceh, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Maluku.

GAMBAR 2.12
PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATTRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2020

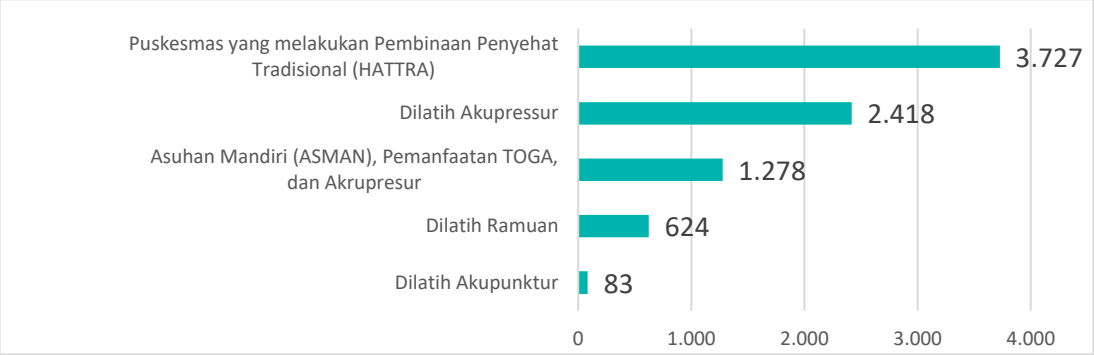

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Data tahun 2020, puskesmas yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (HATRA) sebanyak 3.727 Puskesmas. Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2019, provinsi Sulawesi Barat belum terdapat puskesmas yang melakukan pembinaan penyehatan tradisional (HATTRA). Sedangkan Puskesmas yang melakukan pembinaan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional adalah 1.278 Puskesmas. Untuk pelatihan di bidang Kesehatan Tradisional, sebanyak 2.418 Puskesmas memiliki tenaga yang sudah dilatih akupresur, 624 Puskesmas memiliki tenaga dilatih ramuan, dan 83 Puskesmas memiliki tenaga yang dilatih akupunktur. Secara rinci, data mengenai puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 4.h.

GAMBAR 2.13
JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH DENGAN TENAGA KESEHATAN YANG SUDAH DILATIH DI INDONESIA TAHUN 2020

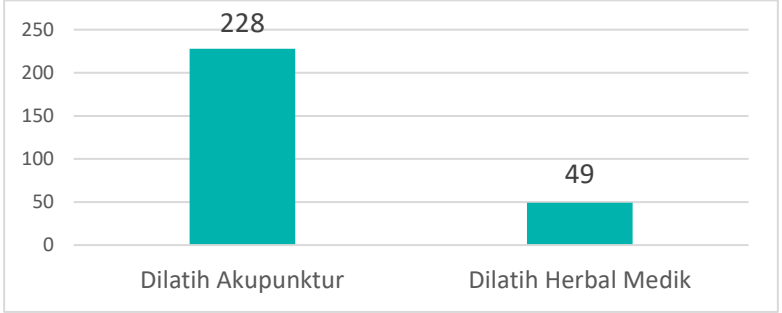

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Data tahun 2020, rumah sakit pemerintah dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih akupunktur sebanyak 228 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit pemerintah dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih herbal medik sebanyak 49 rumah sakit. Secara rinci, data mengenai rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran 8.f.

B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM

1. Klinik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dan/ atau spesialistik. Pada tahun 2020, terdapat 11.347 klinik di Indonesia baik dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, terdiri atas 10.238 klinik pratama dan 1.109 klinik utama. Provinsi dengan jumlah klinik paling banyak adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu 1.565 klinik yang terdiri atas 1.491 klinik pratama dan 74 klinik utama. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik paling sedikit adalah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 2 klinik pratama dan tidak memiliki klinik utama. Data mengenai klinik secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.14 dan lampiran 4.i.

GAMBAR 2.14
JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN UTAMA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

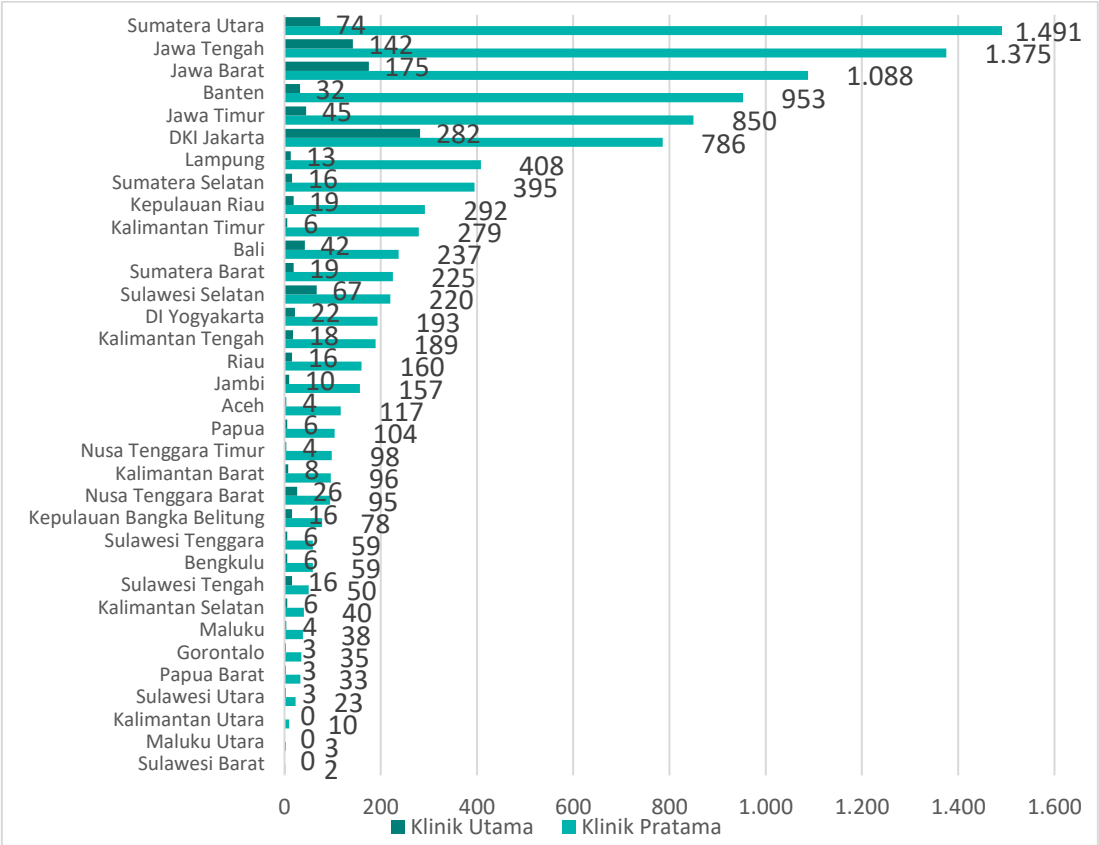

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

2. Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter Umum dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang memenuhi persyaratan.

Pada tahun 2020, terdapat 4.704 praktik mandiri dokter umum dan 1.158 praktik mandiri dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Provinsi yang memiliki jumlah Dokter Praktik Mandiri dan Dokter Gigi Praktik Mandiri yang bekerjasama dengan BPJS paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu 1.059 orang praktik mandiri dokter dan 303 praktik mandiri dokter gigi. Data mengenai praktik mandiri tenaga kesehatan ini dapat dilihat pada Lampiran 4.j.

GAMBAR 2.15
JUMLAH PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

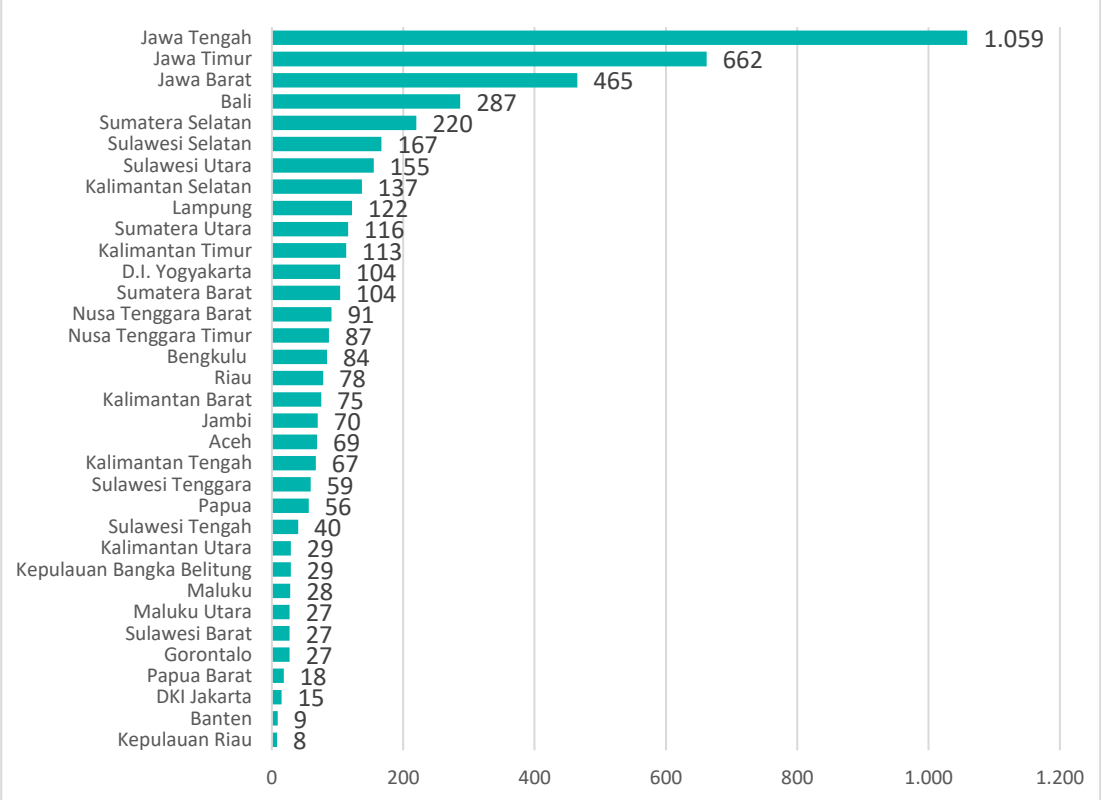

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021 (Data BPJS Kesehatan)

GAMBAR 2.16
JUMLAH PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

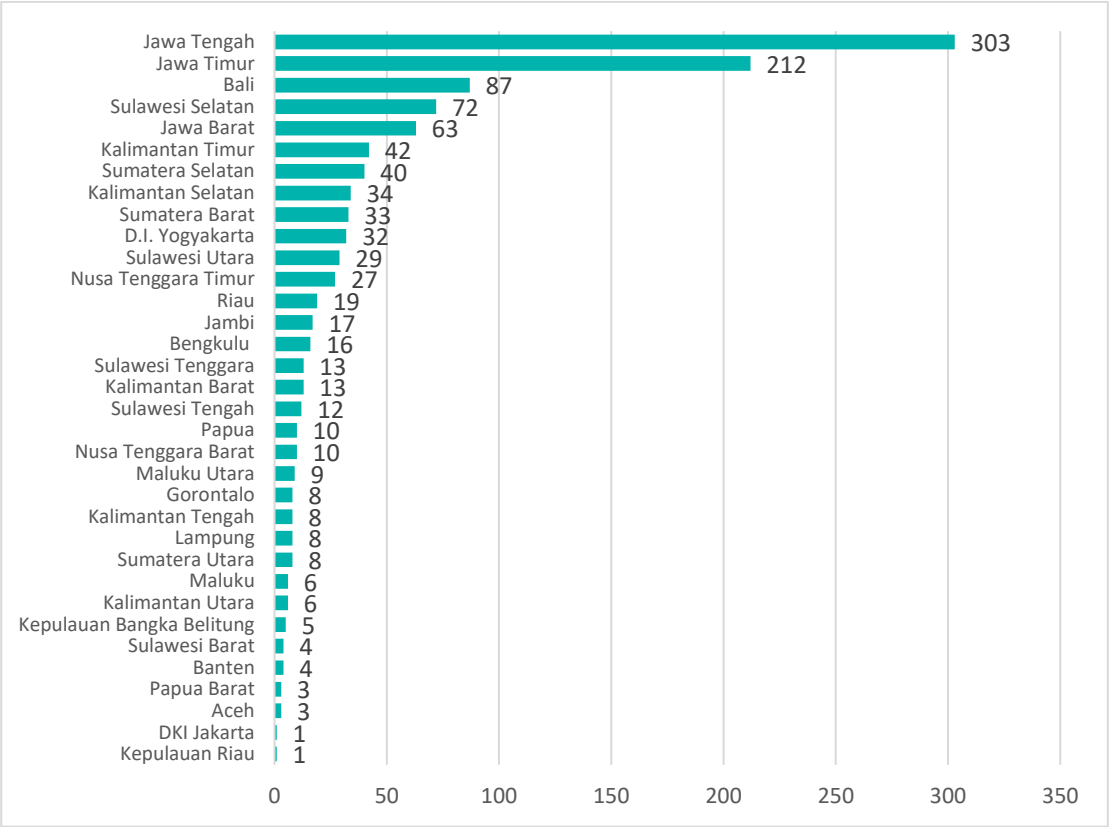

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021
(Data BPJS Kesehatan per Maret 2021)

3. Unit Transfusi Darah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014, Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Pada tahun 2020, terdapat 460 UTD di Indonesia yang diselenggarakan hanya oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2020, provinsi dengan total jumlah UTD paling banyak yaitu Provinsi Jawa Timur (39 UTD) sedangkan provinsi dengan total jumlah UTD paling sedikit yaitu Provinsi Kalimantan Utara (4 UTD). Provinsi yang paling banyak memiliki UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah adalah Provinsi Sumatera Utara (21 UTD), sedangkan provinsi yang paling banyak memiliki UTD yang diselenggarakan oleh PMI adalah Provinsi Jawa Timur (37 UTD). Terdapat 2 provinsi yang tidak memiliki UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yaitu Provinsi Bali dan Banten, sedangkan UTD yang diselenggarakan oleh PMI dimiliki oleh semua provinsi di Indonesia minimal 1 UTD, yaitu Provinsi Maluku Utara, Jambi, dan Maluku. Data selengkapnya mengenai UTD dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan lampiran 4.I.

GAMBAR 2.17
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

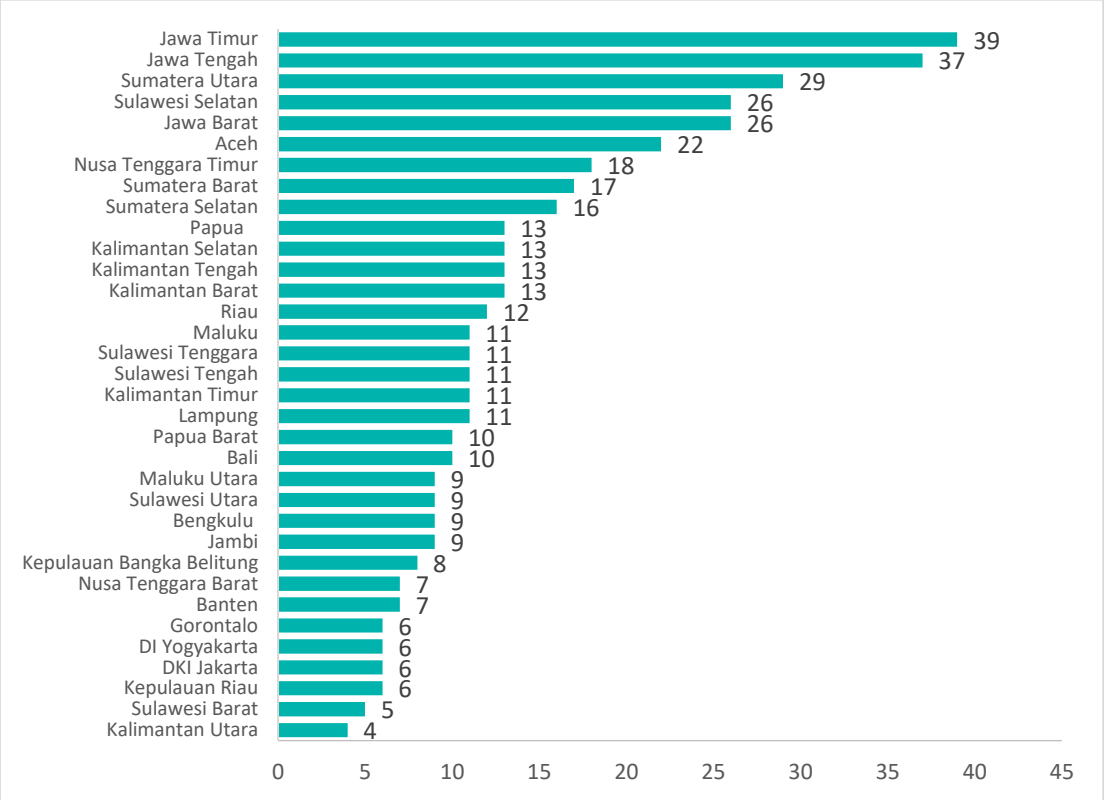

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesahatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh swasta, yaitu sebanyak 1.275 laboratorium yang sudah terakreditasi 174. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 228 laboratorium, sudah terakreditasi sebanyak 137. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 28 laboratorium. Laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, dan menjadi pengampu dari laboratorium Kesehatan yang tersebar di Indonesia berdasarkan pembagian wilayah yaitu 4 laboratorium berupa Balai Besar Laboratorium Kesehatan.

GAMBAR 2.18
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

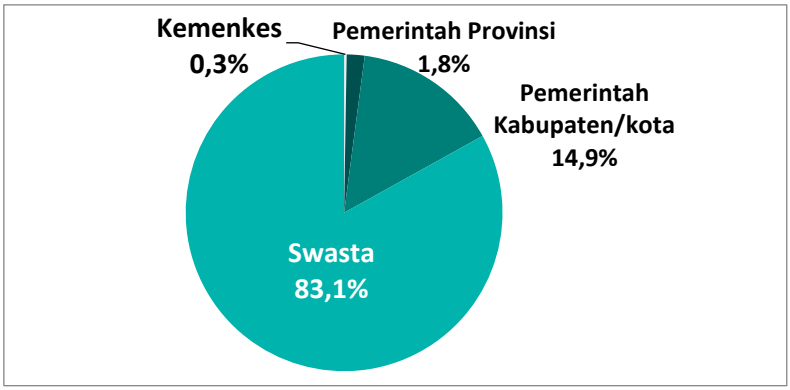

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 312 laboratorium. Provinsi terbanyak ke dua yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 228, dan terbanyak ke tiga yaitu Provinsi Jawa Timur (215 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Barat (2 laboratorium), Sulawesi Tengah (3 laboratorium), dan Sulawesi Barat (4 laboratorium).

GAMBAR 2.19
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

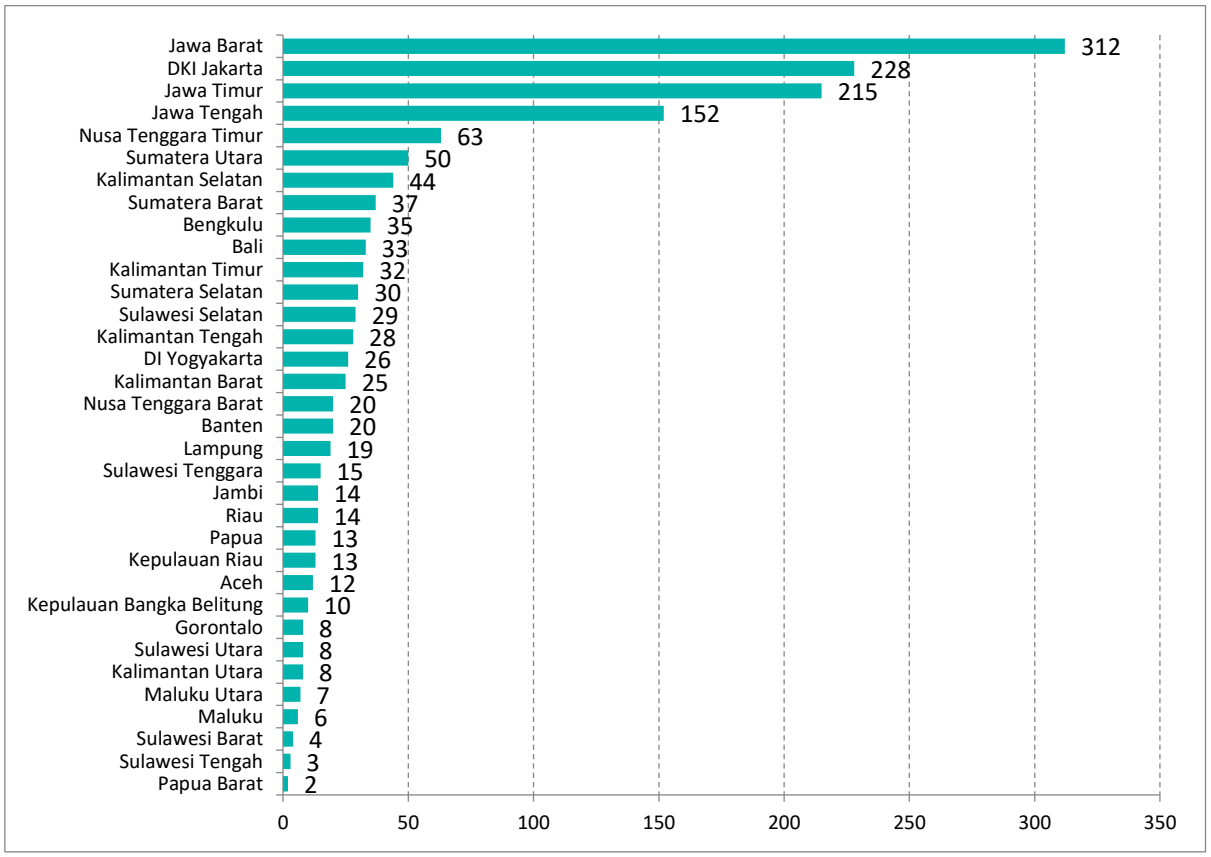

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

D. RUMAH SAKIT

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

1. Jenis Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, pengelompokan rumah sakit berdasarkan penyelenggaraan, yaitu rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta. Rumah sakit yang didirikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang bersifat nirlaba dan dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus.

Rumah sakit di Indonesia dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 12,86%. Pada tahun 2016 jumlah rumah sakit sebanyak 2.601 meningkat menjadi 2.985 pada tahun 2020. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2019 terdiri dari 2.344 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 533 Rumah Sakit Khusus (RSK). Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020

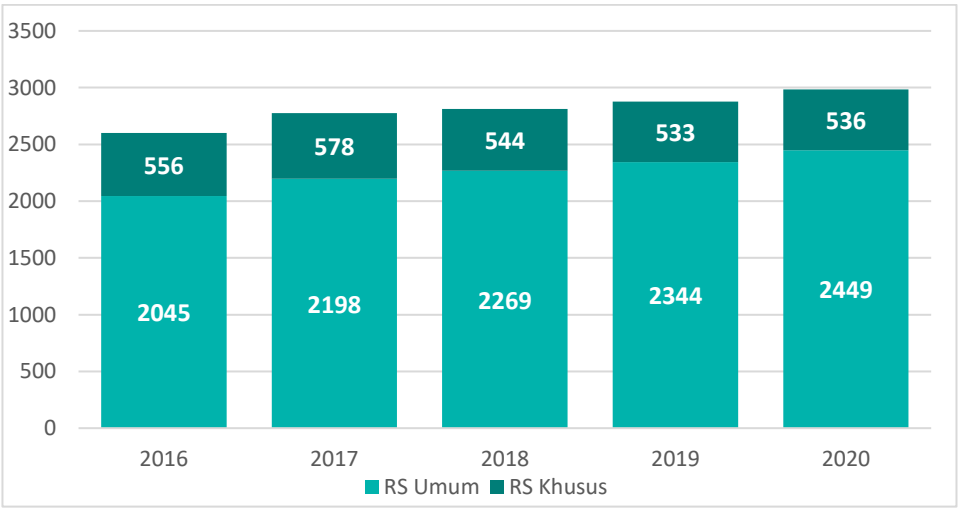

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN
DI INDONESIA TAHUN 2016 – 2020

No	Penyelenggara	2016	2017	2018	2019	2020
PEMERINTAH						
1	Kementerian Kesehatan	14	14	15	18	19
2	TNI/POLRI	161	164	158	159	160
3	Kementerian Lain dan BUMN	67	62	55	51	52
Total		**242**	**240**	**228**	**228**	**231**
PEMERINTAH DAERAH						
1	Pemerintah Provinsi	75	87	91	92	97
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	564	585	614	640	676
Total		**639**	**672**	**705**	**732**	**773**
SWASTA		1.164	1.286	1.336	1.384	1.445
Total Keseluruhan		**2.045**	**2.198**	**2.269**	**2.344**	**2.449**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

RS Umum terdiri dari 6 jenis RS berdasarkan penyelenggaranya diantaranya 3 jenis oleh pemerintah pusat (Kemenkes, TNI/POLRI, K/L, dan BUMN), 2 jenis oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota) dan RS Umum milik swasta adapun rincian dapat dilihat pada Lampiran 8.a.

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.550 RS) sebesar 51,9%, kemudian kelas D dan D Pratama (877 RS) sebesar 29,4%, kelas B (436 RS) sebesar 14,6%, dan kelas A (60 RS) sebesar 2,0%, sedangkan selebihnya sebesar 2,1% merupakan RS yang belum ditetapkan kelas (62 RS).

GAMBAR 2.21
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2020

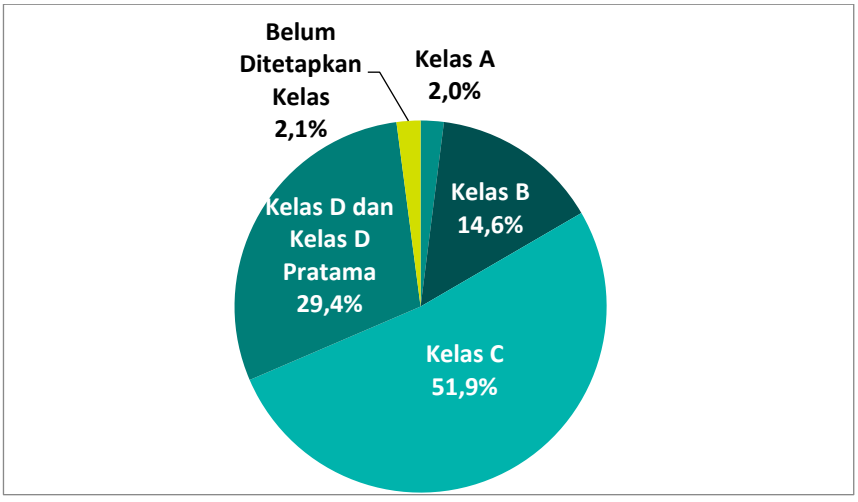

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Pasal 3 mengatakan bahwa Rumah Sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang-kurangnya pelayanan medik umum, gawat darurat, pelayanan keperawatan, rawat jalan, rawat inap, operasi/bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.

Adapun persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang tahun 2020 sebesar 69,8% dengan persentase tertinggi pada Provinsi Aceh (95,8%), Jawa Tengah (91,1%) dan Bengkulu (90%) sedangkan Provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Papua (20%), Kepulauan Riau (25%) dan Papua Barat (25%). Provinsi DKI Jakarta tidak ada data. Rincian per provinsi dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

GAMBAR 2.22
PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2020

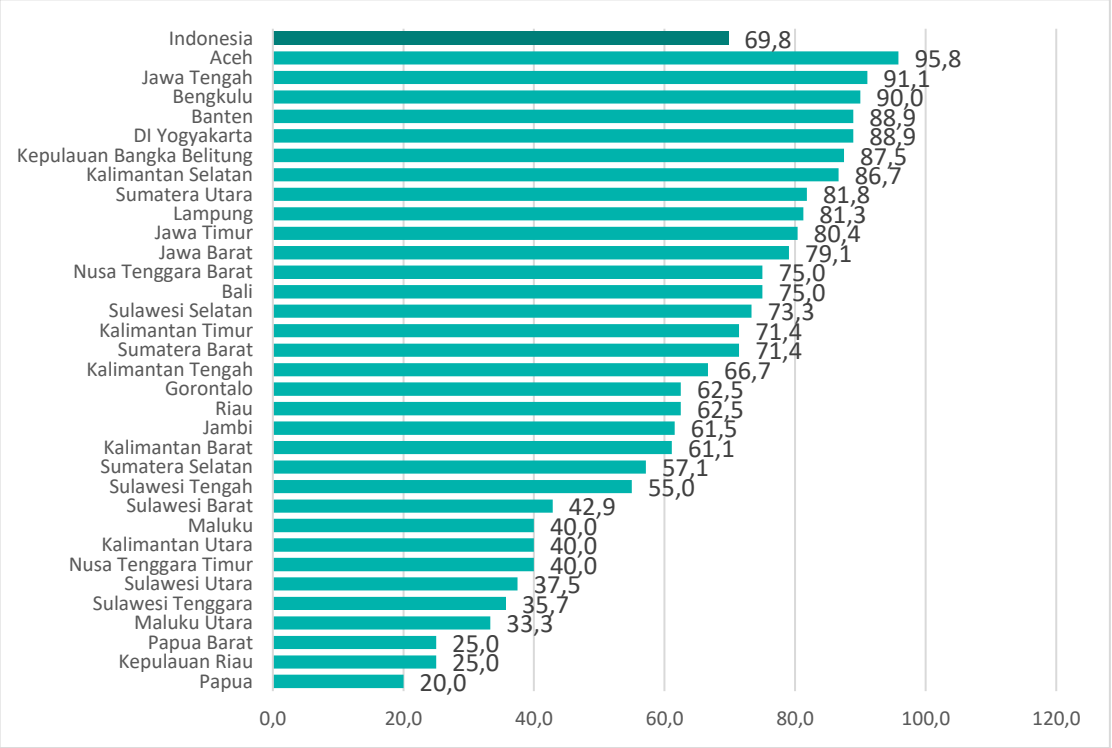

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar WHO, standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2020 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Sehingga, Jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi

menurut WHO. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 2.23
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA
TAHUN 2015 - 2020

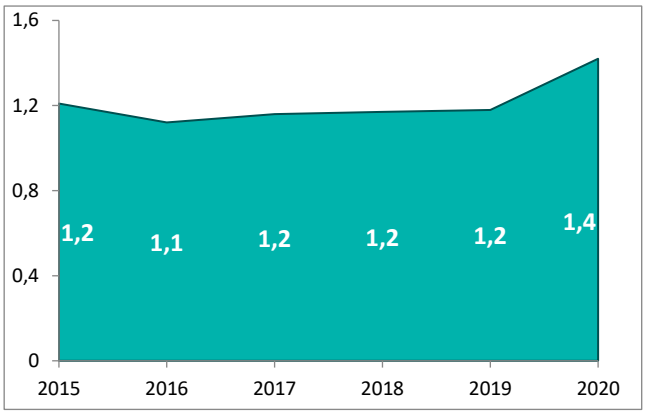

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

Secara nasional, rasio jumlah tempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai standar minimal dari WHO. Meskipun demikian, terdapat. 3 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum memenuhi standar WHO, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat (0,9) dan Nusa Tenggara Timur (0,9).

GAMBAR 2.24
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

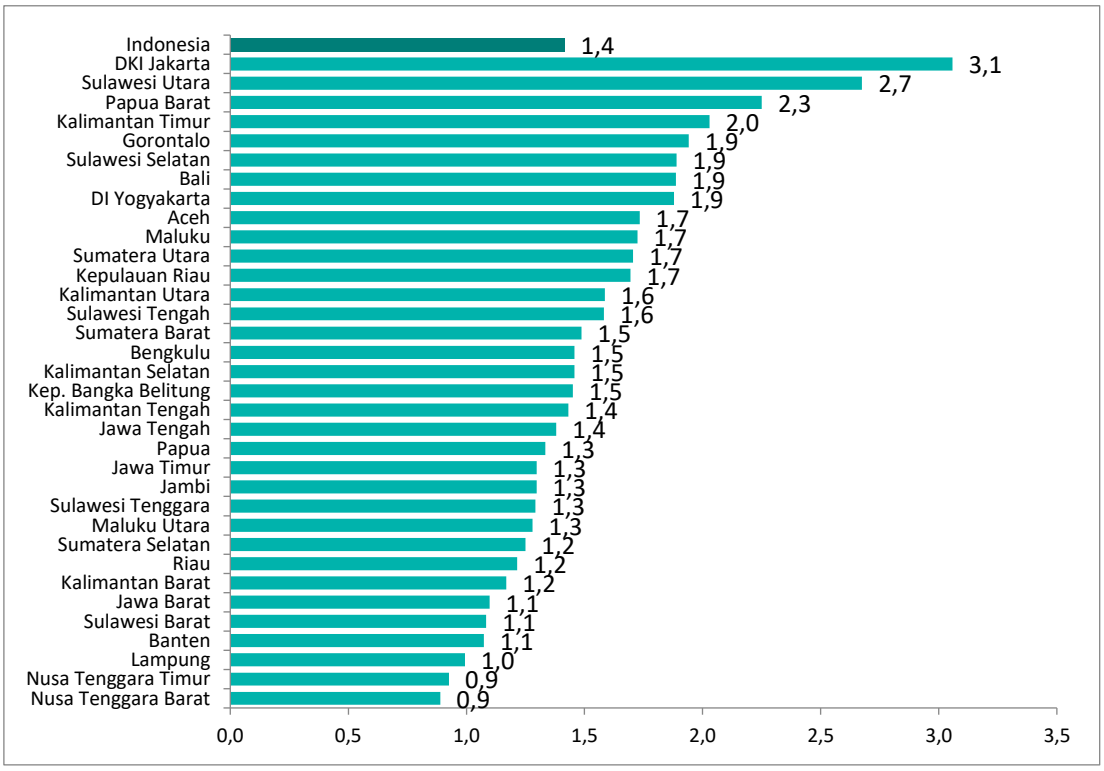

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

4. Akreditasi Rumah Sakit

Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024.

Pada tahun 2020, tercatat 2.985 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.449 rumah sakit umum dan 536 rumah sakit khusus. Sebanyak 1.058 rumah sakit adalah milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, TNI/POLRI dan sebanyak 1.927 rumah sakit milik swasta. Sebanyak 2.484 RS (83,2%) telah terakreditasi dengan distribusi 908 RS pemerintah (36,6%) dan 1.576 RS swasta (63,4%). Berdasarkan tingkat akreditasi maka tingkat akreditasi perdana 26%, dasar 8,4%, madya 15,5%, utama 13,4%, paripurna 36,5%, dan hanya akreditasi internasional JCI sebanyak 0,2%.

Persentase RS terakreditasi tertinggi adalah Provinsi Aceh sebesar 92,86% dan terendah di Provinsi Papua sebesar 68,09%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.23 dibawah untuk rincian data selengkapnya terdapat pada Lampiran 8.d.

GAMBAR 2.25
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

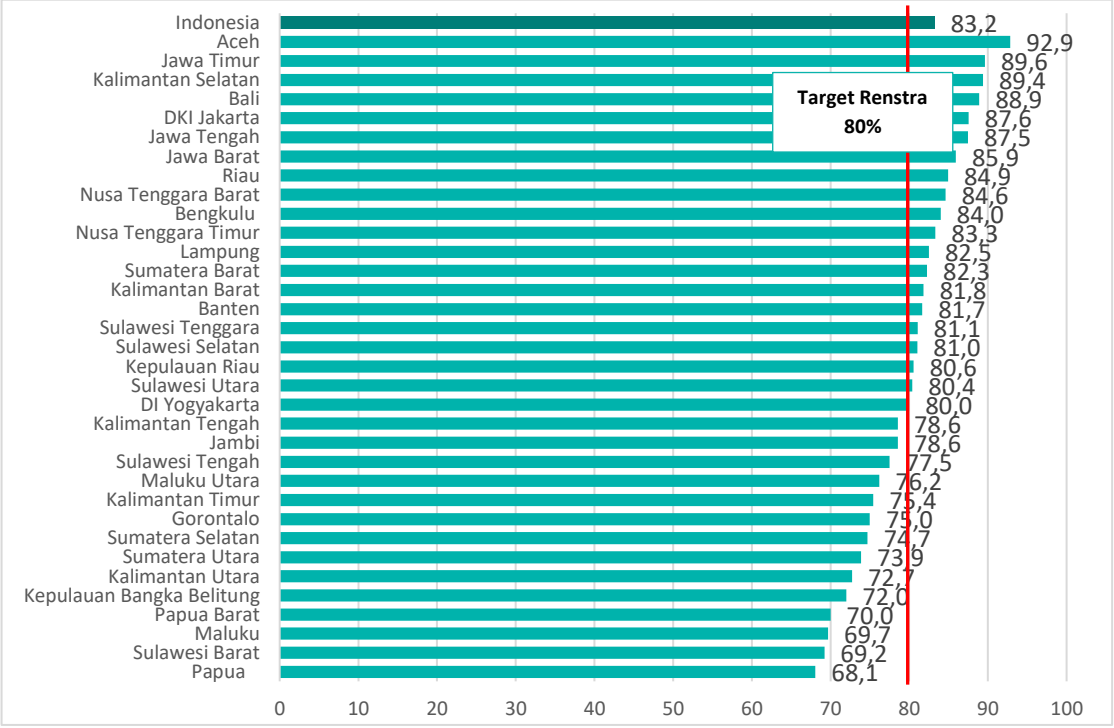

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2021

Pada bulan Maret 2020 kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditemukan di Indonesia dan menunjukkan peningkatan kasus konfirmasi setiap hari. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan bencana nasional non alam COVID-19. Untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko COVID-19 dalam rangka kesinambungan pelayanan dan mencegah timbulnya episentrum baru COVID-19 maka ditetapkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19. Dengan demikian kegiatan persiapan dan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dilakukan setelah status bencana nasional dicabut oleh Pemerintah. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah RS terakreditasi pada tahun 2020 kurang signifikan dan perlu dilakukan upaya lain untuk menjamin mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19, antara lain melalui pernyataan komitmen RS untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu, pemantauan dan evaluasi kesiapan RS pada masa pandemi COVID-19 serta pemantauan dan evaluasi mutu RS pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Dalam rangka menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut. Adapun indikator sasaran strategis tersebut yaitu persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pemantauan dilakukan terhadap 40 item obat yang dianggap esensial dan harus tersedia di pelayanan kesehatan dasar. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program tuberkulosis, malaria, kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pada tahun 2020, realisasi indikator persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 92,1%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 85% dengan capaian sebesar 108,4%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2020 dimana jumlah Puskesmas yang melapor sebanyak 9.514 Puskesmas dari 10.139 Puskesmas di Indonesia (93,8%), dengan jumlah Puskesmas yang memiliki 80% obat essensial sebanyak 8.764 Puskesmas.

Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2020 sebesar 100% dan dicapai oleh lima provinsi, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Terdapat empat provinsi yang belum mencapai target indikator tahun 2020 sebesar 85% yaitu Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Rincian data Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.a.

GAMBAR 2.26
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
TAHUN 2020

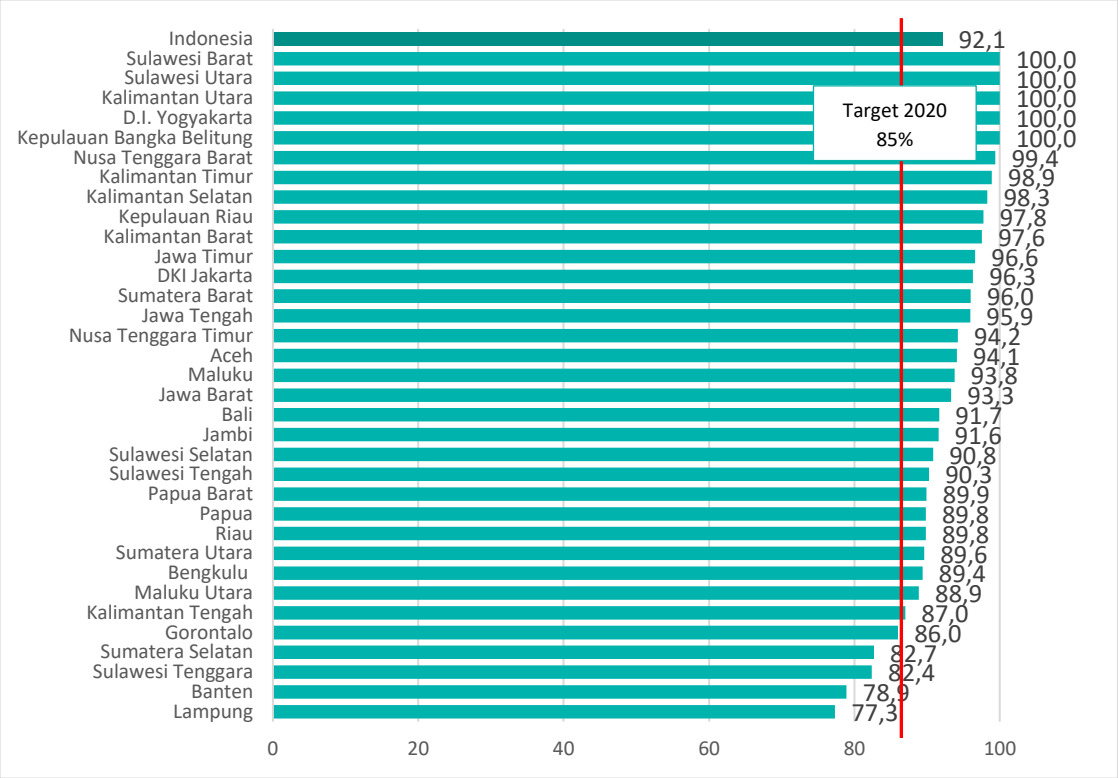

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu program di Kementerian Kesehatan berperan dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat esensial di tingkat kabupaten/kota. Adapun definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2020, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 83,75%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 77% dengan capaian sebesar 108,77%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2020 dimana jumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% obat essensial (40 item obat indikator) sebanyak 402 kabupaten/kota dari 480 kabupaten/kota yang melapor. Hal tersebut menunjukkan tingkat pelaporan kabupaten/kota sebesar 93,39% dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Capaian tertinggi persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2020 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,

Kalimantan Timur, Gorontalo dan Papua. Namun, Terdapat 9 (sembilan) provinsi dengan capaian persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial dibawah target nasional dimana 2 (dua) provinsi dengan capaian terendah pada tahun 2020 adalah Provinsi DKI Jakarta (0%) dikarenakan tidak adanya laporan serta Provinsi Banten (50%) yang dimana hanya 50% kabupaten/kotanya yang tersedia 85% obat essensial (40 item obat indikator). Rincian data kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.b.

GAMBAR 2.27
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
TAHUN 2020

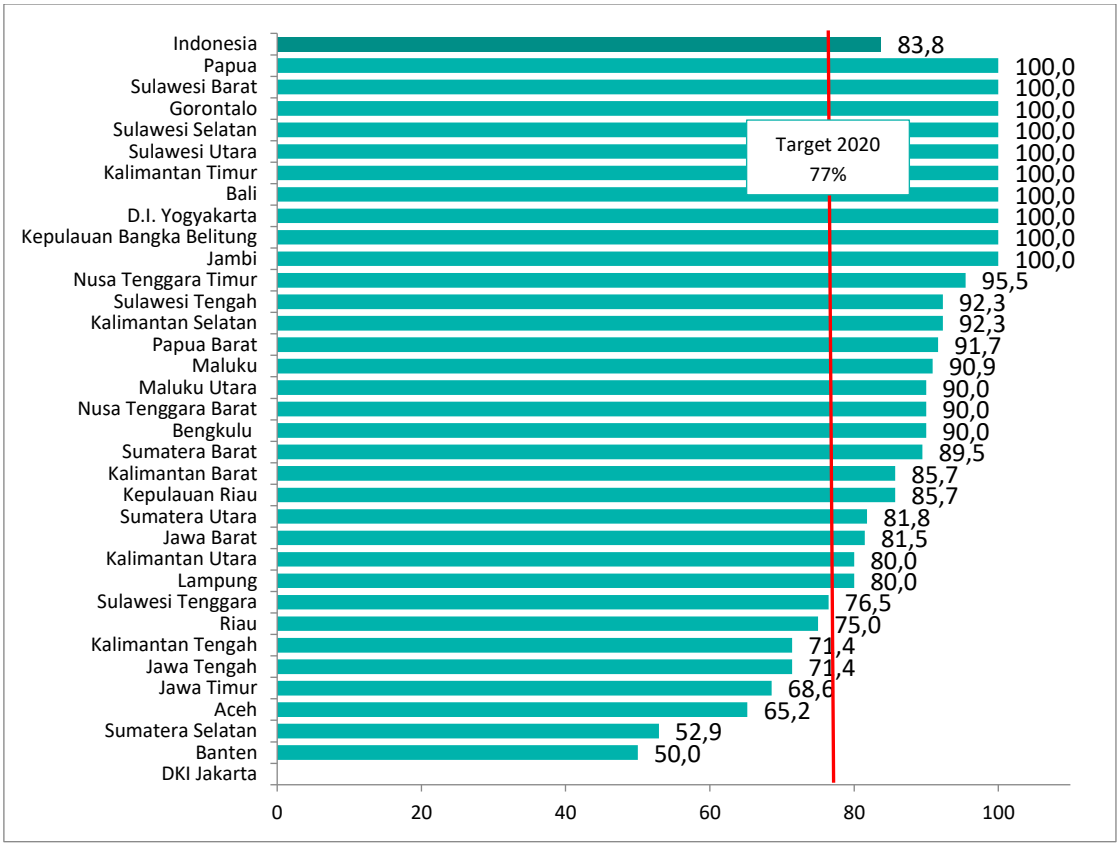

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2021

3. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)

Memastikan ketersediaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut diindikasikan dengan indikator kinerja persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) yang bertujuan untuk memantau ketersediaan vaksin IDL di tingkat Puskesmas. Adapun definisi operasional dari indikator persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) adalah persentase Puskesmas yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*), Vaksin DPT-HB-HIB (Difteri, Pertusis, Tetanus - Hepatitis B -Haemophilus Influenza tipe B), Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2020, realisasi indikator persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) sebesar 96,9%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 90% dengan capaian sebesar 107,8%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2020 dimana jumlah Puskesmas yang memiliki vaksin IDL yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella sebanyak 9.224 Puskesmas dari 9.511 Puskesmas yang melapor. Hal tersebut menunjukkan tingkat pelaporan Puskesmas sebesar 90,9% dari 10.139 Puskesmas yang tersedia vaksin IDL.

Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) pada tahun 2020 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 21 (dua puluh satu) provinsi. Namun, Terdapat 4 (empat) provinsi dengan capaian persentase Puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) dibawah target nasional yakni Provinsi Papua Barat (81,9%), Provinsi Sulawesi Selatan (86,5%), Provinsi Aceh (88,2%) dan Provinsi Jawa Tengah (88,4%).

GAMBAR 2.28
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN
KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
TAHUN 2020

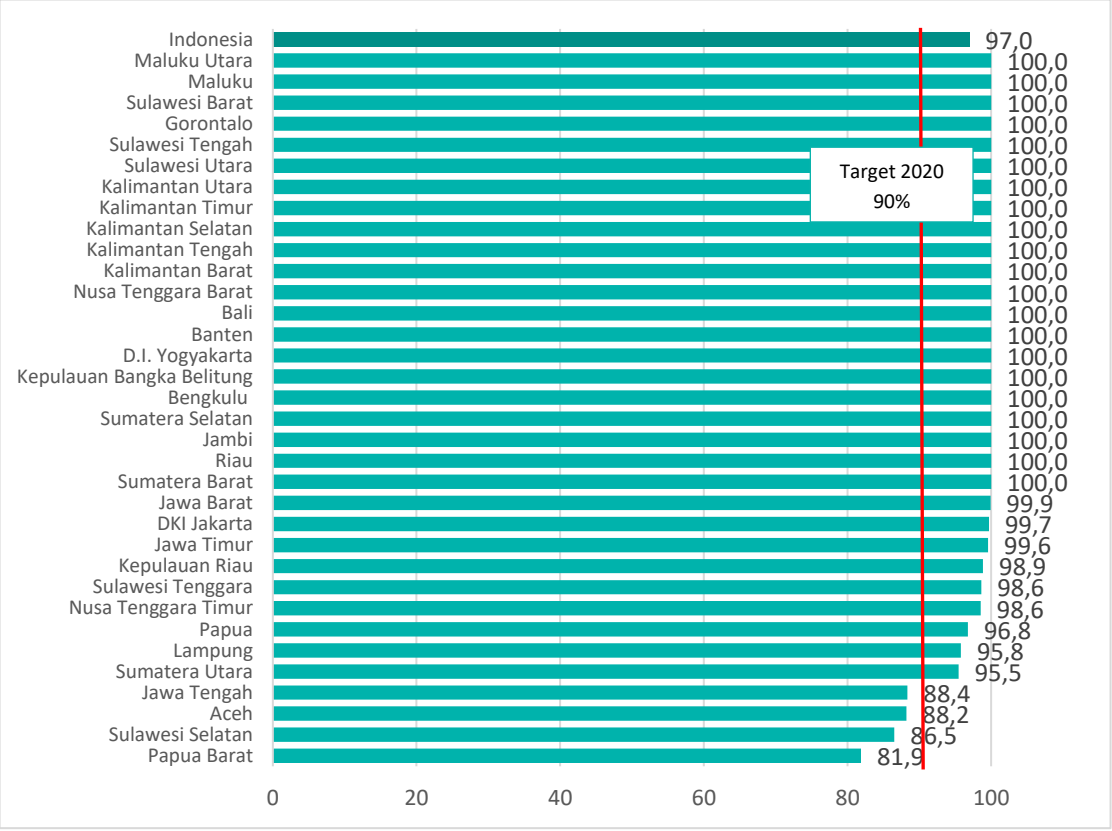

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes) dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 94,5% sarana produksi dan 76% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2020 terdapat 4.095 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.148 sarana. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Namun, terdapat 7 provinsi yang tidak memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2020 terdapat pada Gambar 2.29 berikut.

GAMBAR 2.29
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

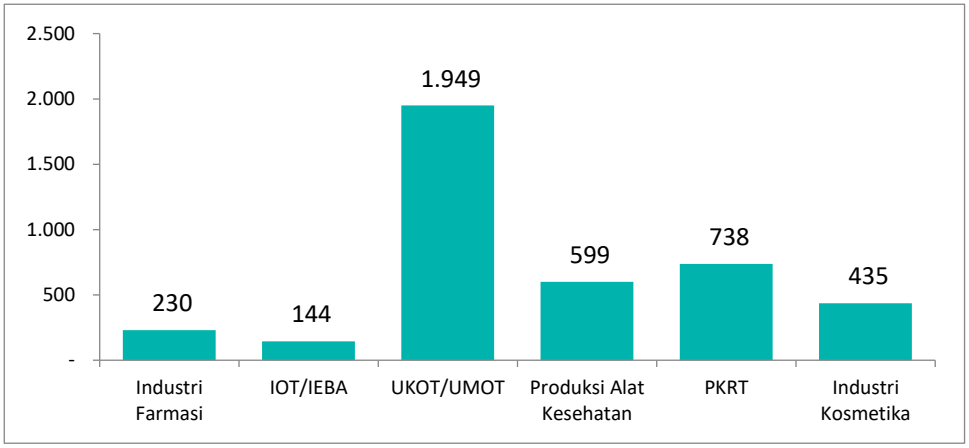

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 45.775 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana distribusi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 7.319 sarana. Gambar 2.30 berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2020.

GAMBAR 2.30
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

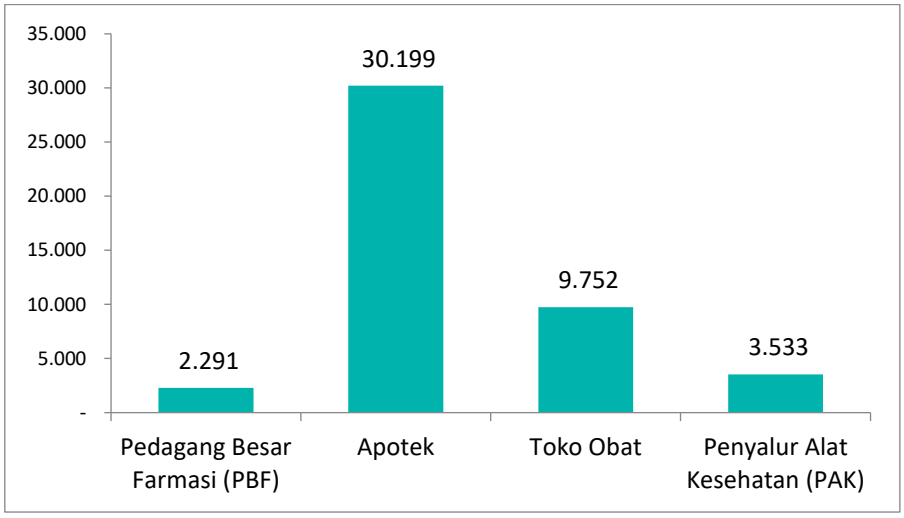

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Posyandu (Pos palayanan terpadu) adalah lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah. Secara kelembagaan Posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama anak usia dini serta ibu hamil, menyusui dan nifas.

Sesuai Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang secara kelembagaan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa . Secara pembinaan teknis, Posyandu dibina oleh Puskesmas dan lintas sektor terkait sesuai dengan kegiatan pengembangan yang telah dilakukan, sedangkan pembinaan kelembagaan Posyandu dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pada tahun 2020, terdapat 108 kabupaten/kota (21,0%) dengan minimal 80% posyandu aktif di seluruh Indonesia dari 15 Provinsi yang melaporkan. Posyandu aktif adalah posyandu yang mampu melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare) dengan cakupan masing-masing minimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan. Data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

GAMBAR 2.31

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

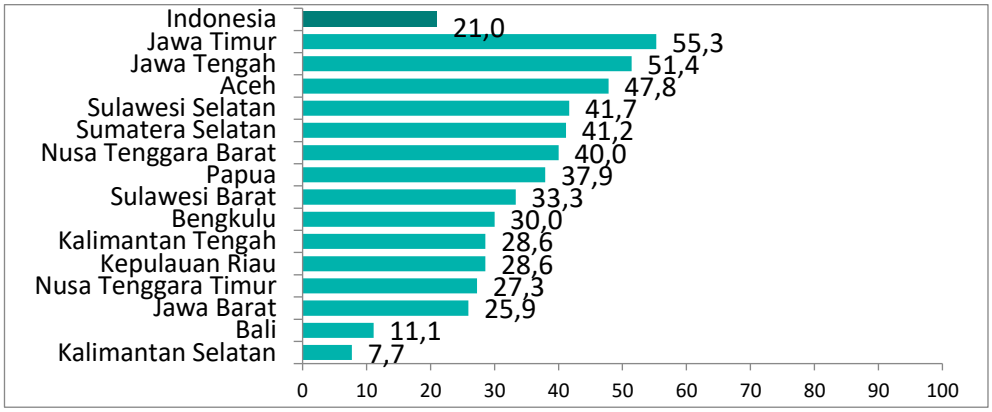

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2021

Selain Posyandu, terdapat beberapa jenis UKBM, yaitu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren), Posyandu Lanjut Usia (Lansia), dan Posbindu PTM. (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular). Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM menjadi sangat penting. Pada tahun 2020 di Indonesia terdapat 68.320 Posbindu PTM. Provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak yaitu Jawa Timur dengan 10.208 Posbindu dan provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terendah yaitu Kalimantan Utara (125 Posbindu).

GAMBAR 2.32

JUMLAH POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

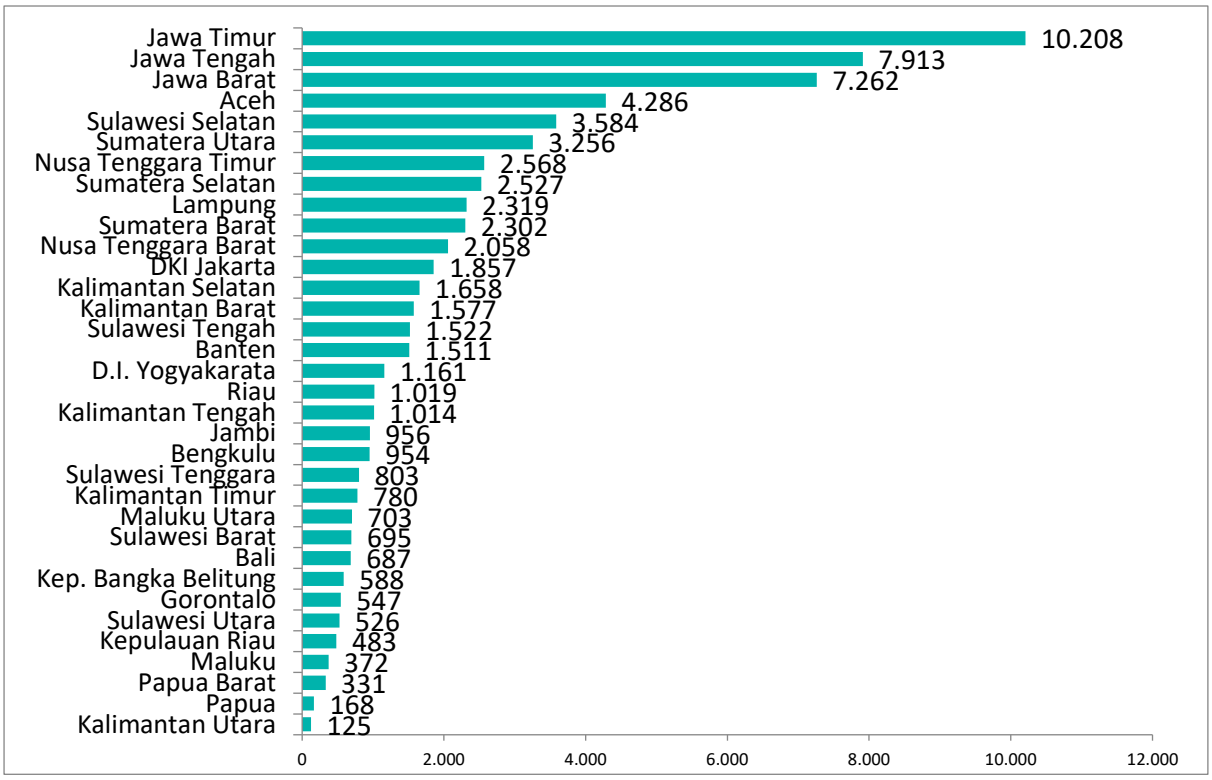

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2021

***

Bab III
SDM Kesehatan

BAB III. SDM KESEHATAN

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDMK berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana updaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pembahasan mengenai SDMK pada bab ini mencakup jumlah tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta lulusan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) setiap tahunnya menggunakan pendekatan tugas dan fungsi SDMK dalam pengelolaan data SDMK. Jumlah SDMK di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 1.463.452 orang yang terdiri dari 1.072.679 orang tenaga kesehatan (73,30 %) dan 390.773 orang tenaga penunjang kesehatan (26,70%). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 40,85 % dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional 0,03% dari total tenaga kesehatan. Distribusi lengkap mengenai SDMK di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 11-15.

GAMBAR 3.1
REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2020

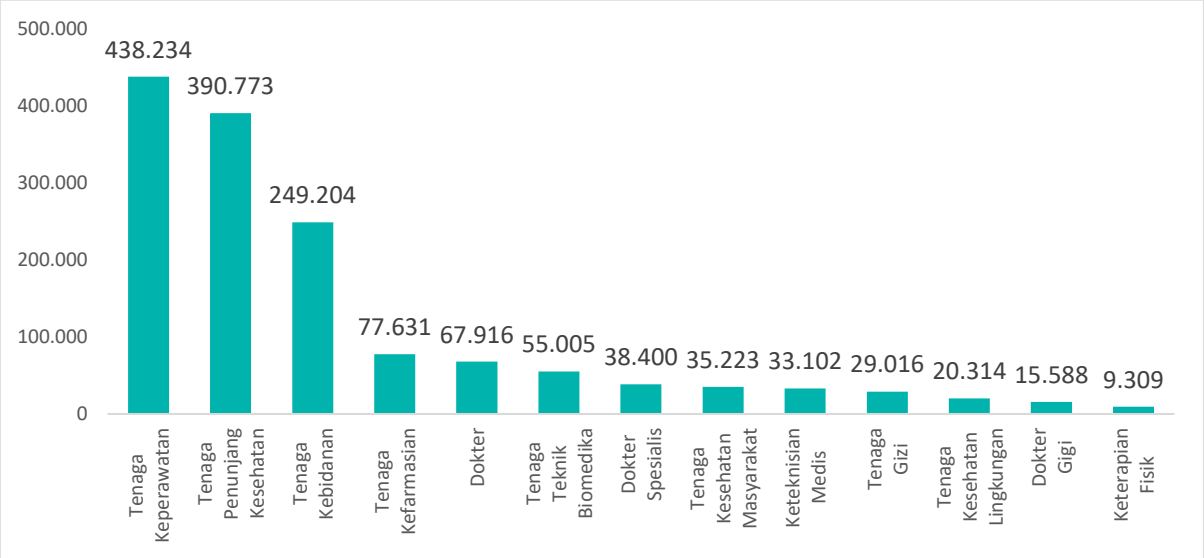

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Tenaga medis yang dijabarkan pada bagian ini adalah tenaga yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Jumlah tenaga medis di Indonesia adalah sebanyak 124.449 orang, dengan proporsi terbanyak, yaitu dokter sebesar 55%. Sebanyak 61,12% tenaga medis berada di Pulau Jawa-Bali dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat (17.032 orang), DKI Jakarta (16.754 orang), dan Jawa Timur (15.396 orang). Provinsi dengan tenaga medis paling sedikit adalah Kalimantan Utara (483 orang). Papua Barat (484 orang), dan Sulawesi Barat (489 orang).

GAMBAR 3.2
JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2020

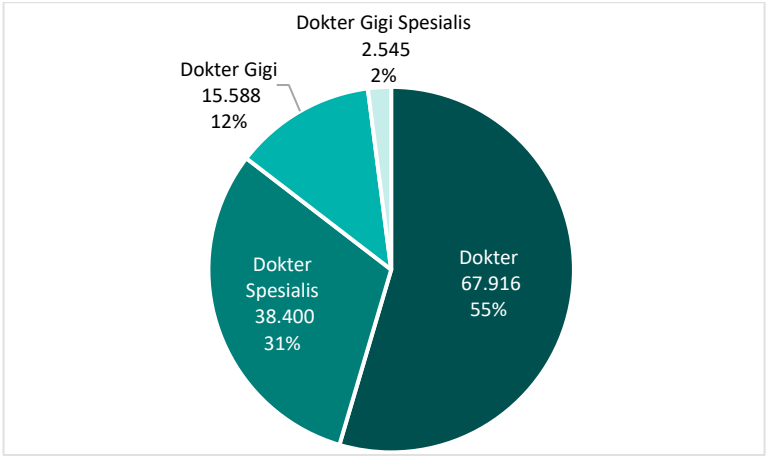

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Dengan demikian, untuk mendukung fungsi dan tujuan puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paling sedikit terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2020

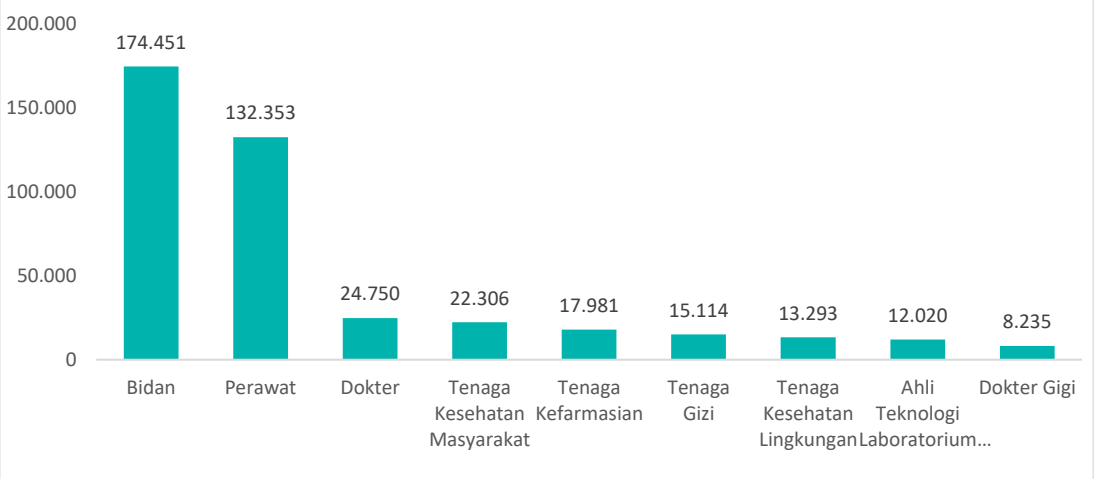

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 434.308 orang. Proporsi tenaga kesehatan di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebesar 40,17% (174.451 orang), sedangkan proporsi dokter gigi hanya sebesar 1,90% (8.235 orang).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, yaitu pada puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sementara itu, pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional terdapat 12,49% puskesmas yang kekurangan dokter, 29,83% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 57,68% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

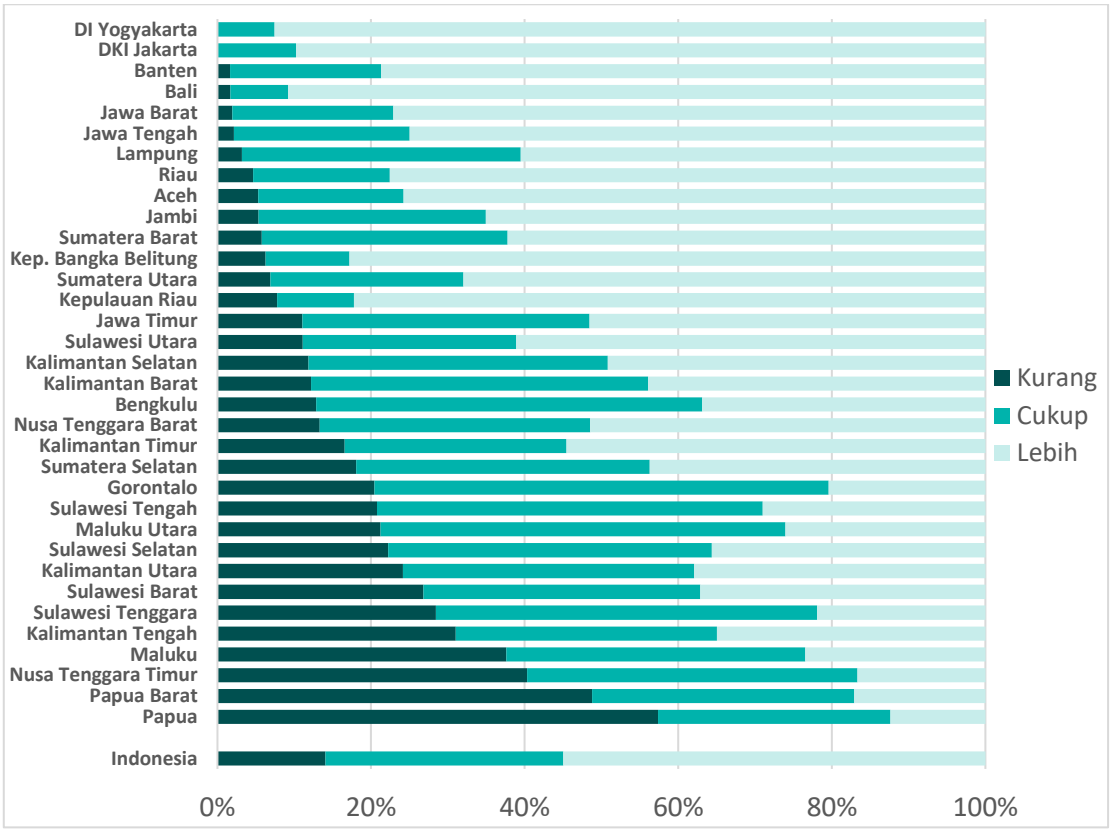

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Dilihat dari proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter terhadap puskesmas dengan status cukup dan lebih, hampir semua provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan dokter di bawah 50%. Hanya Papua yang memiliki persentase kekurangan dokter 57,38%. Sebaliknya, terdapat 18 provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter berlebih terhadap total puskesmas di atas 50%. Jika melihat angka nasional, proporsi puskesmas dengan jumlah dokter melebihi standar kebutuhan masih lebih tinggi dibandingkan proporsi puskesmas dengan jumlah dokter kurang dari standar. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan dokter dapat dilihat di Lampiran 11.e.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Standar kecukupan dokter gigi di puskesmas adalah minimal satu orang, baik. di puskesmas rawat inap dan non rawat inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional, terdapat 33,81% puskesmas memiliki dokter gigi dibawah standar minimal. Sedangkan proporsi sisanya yaitu 56,29% puskesmas dengan status jumlah dokter gigi cukup dan 9,90% puskesmas dengan jumlah dokter gigi melebihi standar minimal.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2020

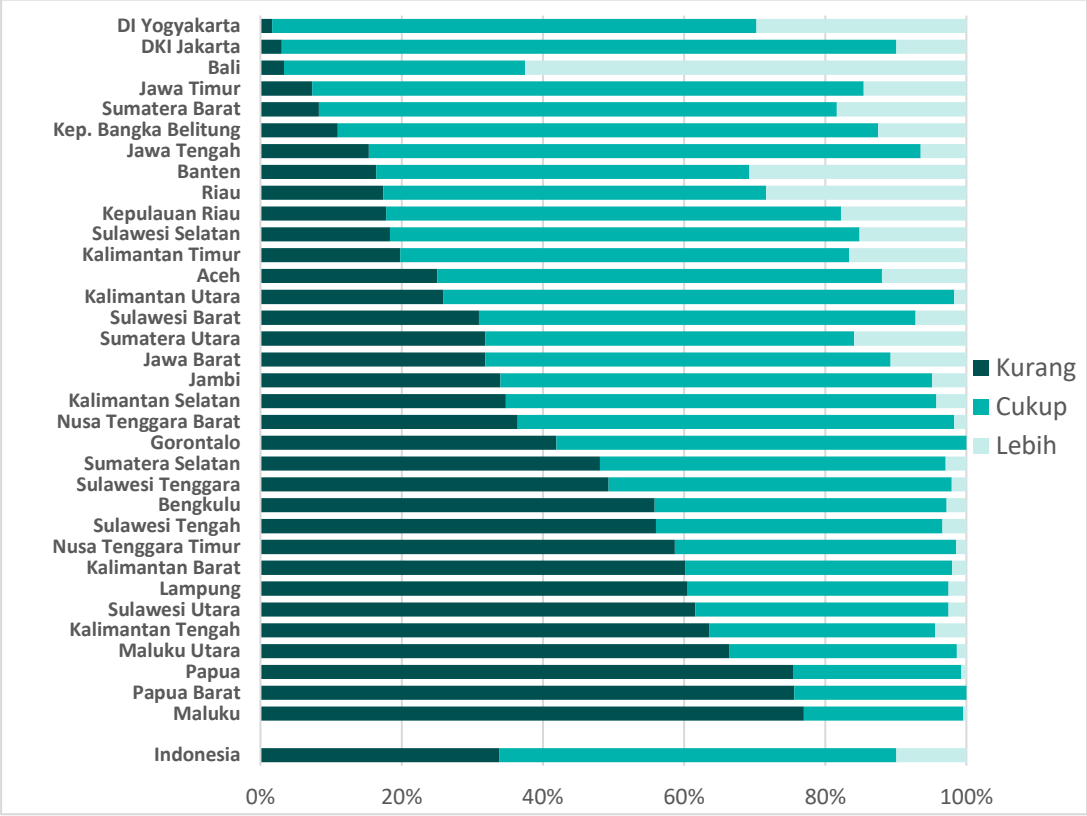

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Gambaran kecukupan di tingkat provinsi menunjukkan bahwa terdapat 11 provinsi dengan persentase puskesmas lebih dari 50% memiliki dokter gigi kurang dari standar. Provinsi dengan persentase tertinggi puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar adalah Maluku (76,99%), Papua Barat (75,61%), dan Maluku (75,54%). Hanya satu provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki dokter gigi lebih dari standar minimal di atas 50%, yaitu Bali (62,50%). Secara nasional, provinsi dengan puskesmas memiliki dokter gigi kurang dari standar lebih banyak dibandingkan puskesmas dengan dokter gigi cukup atau lebih dari standar. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dapat dilihat di Lampiran 11.e.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan perawat pada puskesmas rawat inap. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional, terdapat 71,80% puskesmas memiliki jumlah perawat melebihi dari standar yang ditetapkan. Hanya 11,99% puskesmas dengan kategori kurang, dan 16,21% puskesmas dengan kategori cukup.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2020

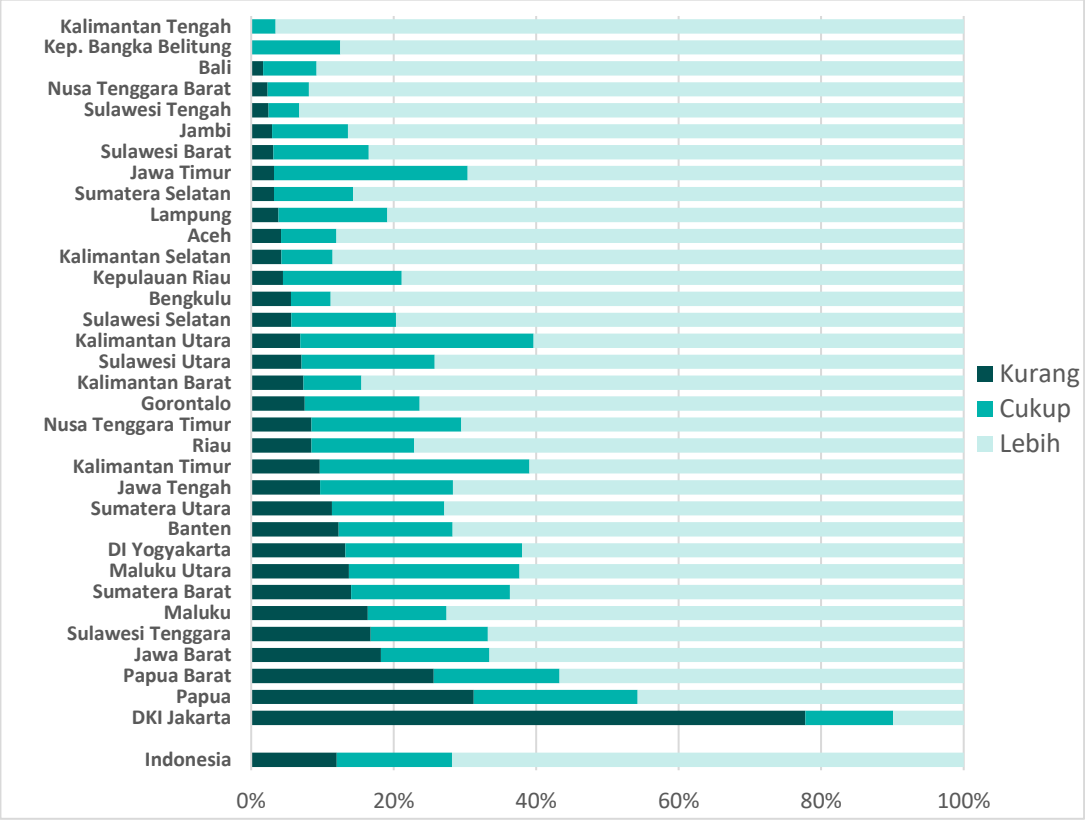

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kecukupan perawat berlebih. Provinsi DKI Jakarta memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan perawat yang tinggi (77,78%). Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta kekurangan perawat di puskesmas. Kekurangan ini dapat disebabkan karena sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta adalah "puskesmas kelurahan" yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut tidak terlalu memperhatikan kecukupan jumlah tenaga perawat.

Jika dilihat pada tingkat provinsi dengan puskesmas memiliki perawat lebih dari standar, semua provinsi selain DKI Jakarta dan Papua menunjukkan persentase di atas 50%. Dengan demikian, Sebagian besar puskesmas di Indonesia memiliki distribusi perawat

berlebih. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan perawat dapat dilihat di Lampiran 11.e.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah bidan di Puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2020

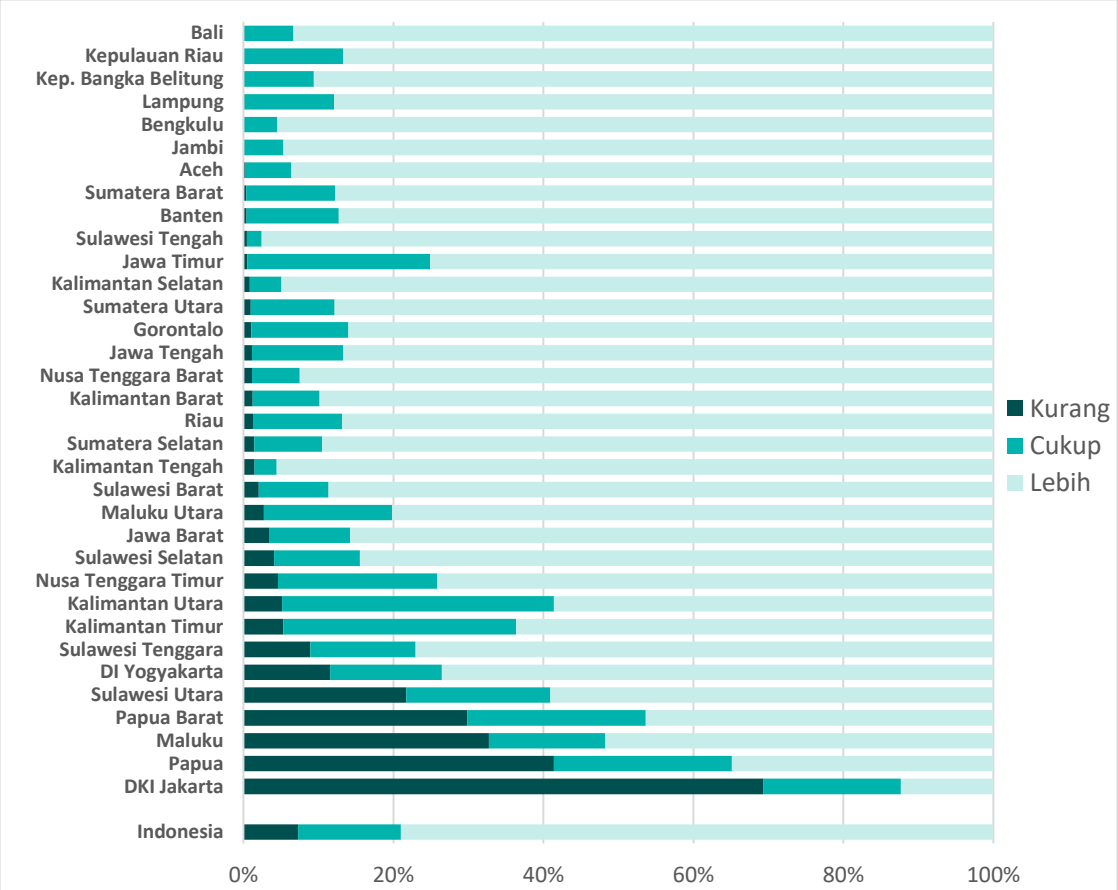

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada kategori puskesmas yang memiliki jumlah bidan kurang dari standar minimal, sebagian besar provinsi memiliki persentase kurang dari 50%. Hanya DKI Jakarta yang memiliki persentase di atas 50%, yaitu sebesar 69,37%.

Secara nasional, hampir semua puskesmas memiliki bidan lebih dari standar minimal. Hanya DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat yang memiliki persentase puskesmas dengan jumlah bidan melebihi standar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu permasalahan distribusi bidan di Indonesia adalah berlebihnya jumlah bidan di sebagian besar puskesmas. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. SDMK di rumah sakit terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan. Gambar 3.8 berikut menunjukkan distribusi jenis SDMK di rumah sakit.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

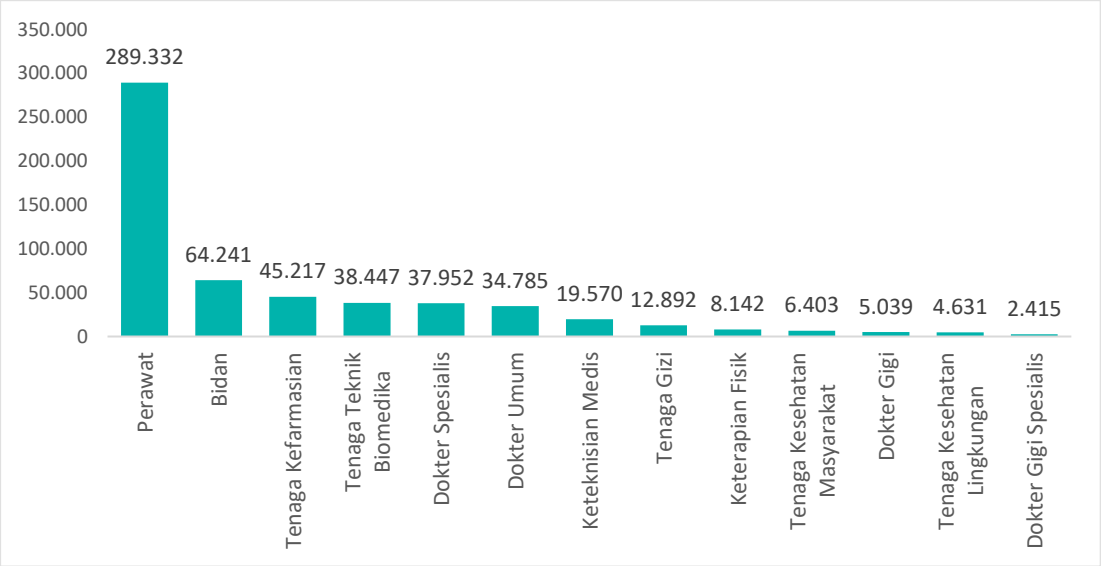

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Terdapat 817.145 SDMK di rumah sakit, yang terdiri dari 569.714 orang tenaga kesehatan dan 247.431 orang tenaga penunjang kesehatan. Proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah perawat sebesar 50,79%, sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga kesehatan tradisional keterampilan dan tenaga kesehatan tradisional ramuan. Dokter gigi spesialis menempati peringkat ketiga terbawah jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit, yaitu sebesar 0,42%. Rincian lengkap mengenai jumlah sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11-16.

GAMBAR 3.9
JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

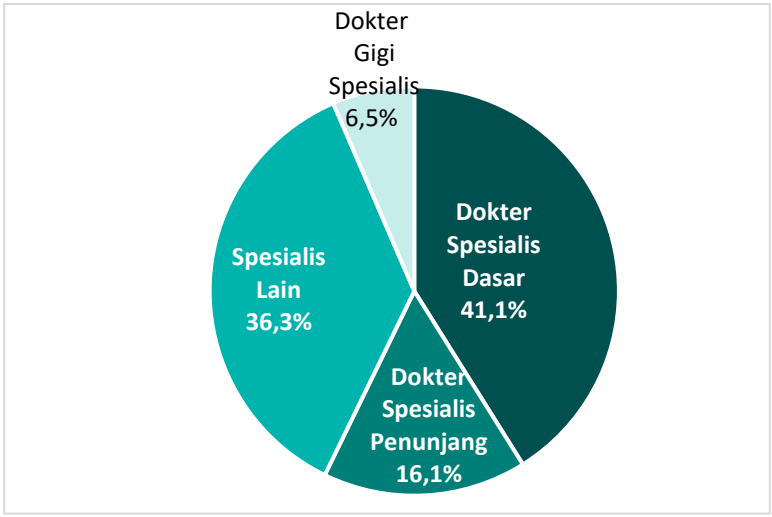

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 44.158 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi terbanyak yaitu dokter spesialis dasar (41,1%) dan proporsi paling sedikit yaitu dokter gigi spesialis (6,5%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis penyakit dalam dengan jumlah 5.518 orang (12,5%). Terjadi sedikit penurunan proporsi dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang dibandingkan dengan tahun lalu.

Provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 7.175 orang dan Jawa Barat sebanyak 6.310 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah Sulawesi Barat (118 orang) dan Maluku Utara (124 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di rumah sakit dapat dilihat di Lampiran 11.d.

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah, pemerintah pusat telah menetapkan daerah tertinggal sebagai sasaran utama pembangunan. Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

Daerah Tertinggal mencakup 62 kabupaten/kota yang berada di 11 provinsi. Pemenuhan SDMK di Daerah Tertinggal tidak hanya membutuhkan peran pusat tetapi juga peran dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menganalisis kebutuhan wilayahnya dan mengajukannya kepada pemerintah pusat.

GAMBAR 3.10
PERBANDINGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2020

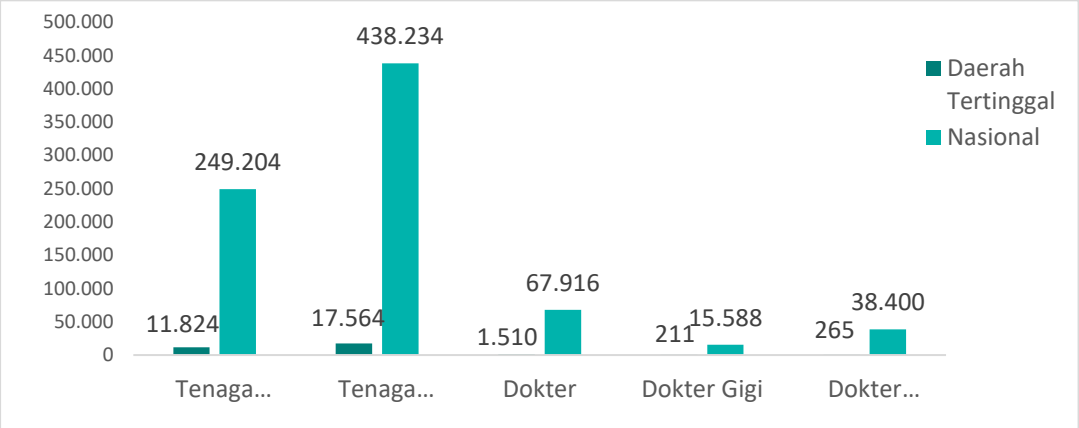

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Proporsi kabupaten/kota dengan kategori Daerah Tertinggal adalah 12,1% dari total kabupaten/kota. SDMK di Daerah Tertinggal tersebut sebesar 3,9% (31.374 orang) terhadap total SDMK secara nasional. Proporsi berdasarkan jenis tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal terhadap total tenaga kesehatan di Indonesia, yaitu tenaga kebidanan sebesar 4,7%, tenaga keperawatan sebesar 4,0%, dokter sebesar 2,2%, dokter gigi sebesar 1,4%, dan dokter spesialis sebesar 0,7%.

GAMBAR 3.11
SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL
DI INDONESIA TAHUN 2020

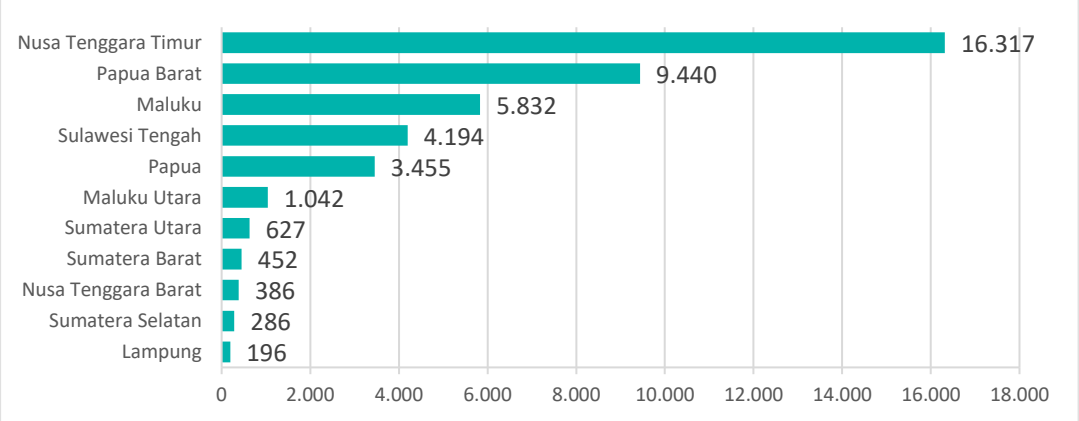

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan
diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan jumlah SDMK di Daerah Tertinggal terbanyak yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 13 jumlah kabupaten/kota Daerah Tertinggal dan total SDMK sebanyak 16.317 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah SDMK di Daerah Tertinggal tahun 2020 dapat dilihat di Lampiran 11.f.

B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 44. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan setelah tenaga kesehatan yang mengajukan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Registrasi dokter dan dokter gigi Konsil dikelola oleh Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi ini bertujuan agar KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi dokter/dokter gigi Registrasi dan juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

GAMBAR 3.12
JUMLAH DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS,
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2020

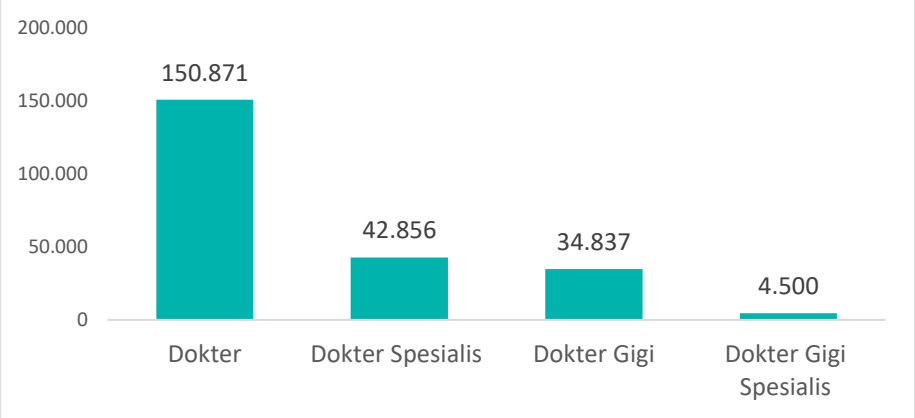

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2021

Jumlah tenaga medis yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) aktif sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 233.064 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019. Tenaga dokter merupakan tenaga medis yang paling banyak memiliki STR, yaitu sejumlah 150.871 orang. Sementara itu, tenaga dokter gigi spesialis yang memiliki STR sebanyak 4.500 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 11.g.

Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur kewenangan lembaga Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk mengelola registrasi tenaga kesehatan selain tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 pasal 2). Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib

memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah diperlukan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan berlaku secara nasional selama lima tahun. tenaga Kesehatan harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi) setelah memenuhi syarat setelah lima tahun dari registrasi sebelumnya. Terdapat 27 jenis profesi kesehatan yang dapat diterbitkan STR.

Penerbitan STR terdiri dari pengajuan baru dan registrasi ulang bagi pemilik STR yang masa berlakunya telah habis. STR baru yang diterbitkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 72.143 surat. Jumlah penerbitan STR baru ini mengalami penurunan hampir 50% dibandingkan tahun 2019 (140.301 surat). Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru yang mengatur setiap tenaga kesehatan wajib mengikuti uji kompetensi untuk memiliki STR baru. Proporsi terbanyak STR yang diterbitkan adalah untuk jenis tenaga perawat (50,60%) dan bidan (28,85%).

GAMBAR 3.13
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2020

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2021

Jika dilihat distribusi penerbitan STR tenaga kesehatan berdasarkan wilayah. Provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru adalah Banten sebanyak 16.845 orang, diikuti oleh Jawa Tengah sebanyak 7.289 orang, dan DI Yogyakarta sebanyak 6.309 orang. Secara umum provinsi-provinsi tersebut memiliki lulusan tenaga kesehatan terbanyak, oleh karena itu jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi baru lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya.

GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

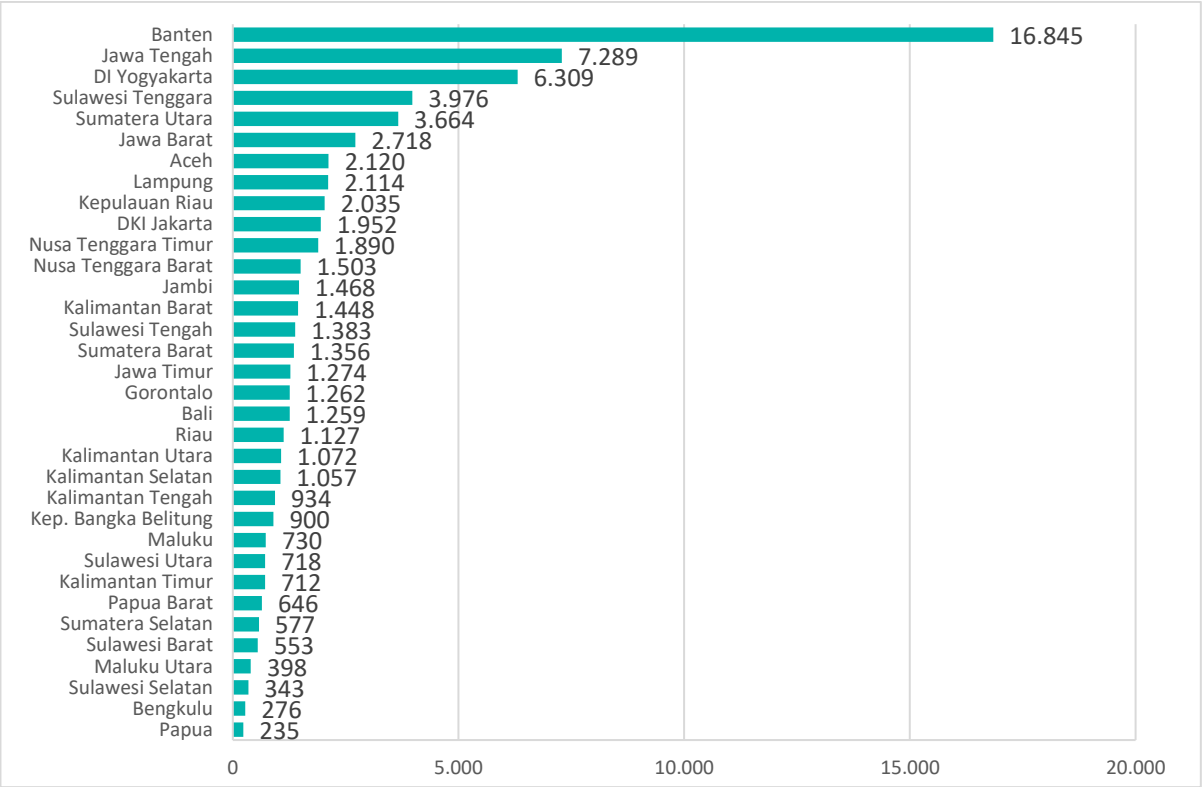

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2021

Registrasi ulang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan surat tanda registrasi yang telah habis masa berlaku. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi ulang tahun 2020 sebanyak 141.406 orang. Jumlah Jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan yang melakukan registrasi ulang hampir berimbang, yaitu tenaga keperawatan sebesar 44,94% dan tenaga kebidanan sebesar 41,04%. Sementara itu, tenaga kesehatan lainnya yang melakukan registrasi ulang hanya di bawah 6%.

GAMBAR 3.15
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2020

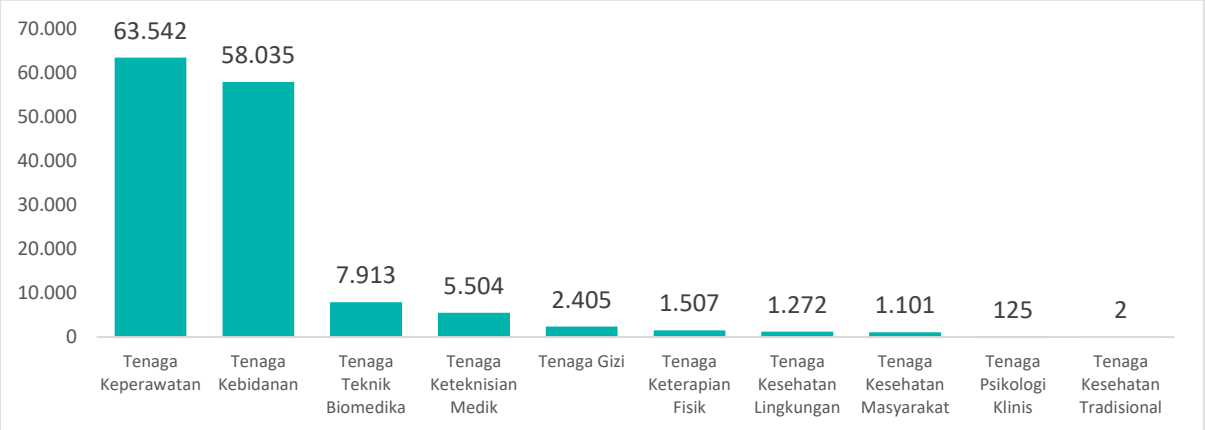

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan wilayah, provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi ulang adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 20.388 orang dan Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 14.692 orang. Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru maupun registrasi ulang. Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

GAMBAR 3.16
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

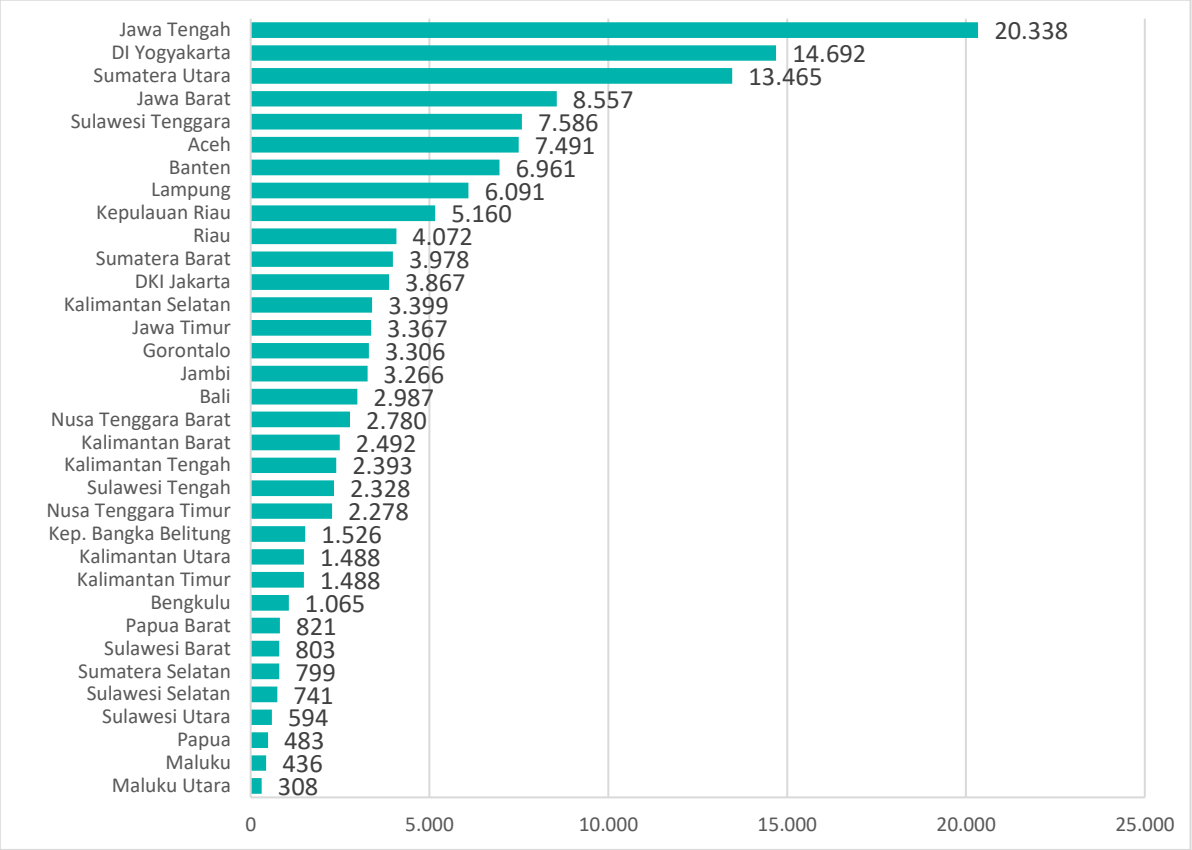

Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2021

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT), tujuan pengangkatan PTT dalam jangka waktu tertentu adalah untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dalam surat edaran nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tidak hanya jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, atau bidan, tetapi juga jenis tenaga kesehatan yang mendukung upaya promotif dan preventif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan berupa program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Jumlah tenaga kesehatan yang masih bertugas PTT Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2020 berjumlah 53 orang dengan rincian 47 orang bidan, 3 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, dan 1 orang dokter spesialis. Sementara itu, berdasarkan kriteria wilayah, terdapat 25 orang tenaga kesehatan di wilayah biasa, 14 orang di wilayah terpencil, dan 14 orang di wilayah sangat terpencil.

GAMBAR 3.17
JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2020

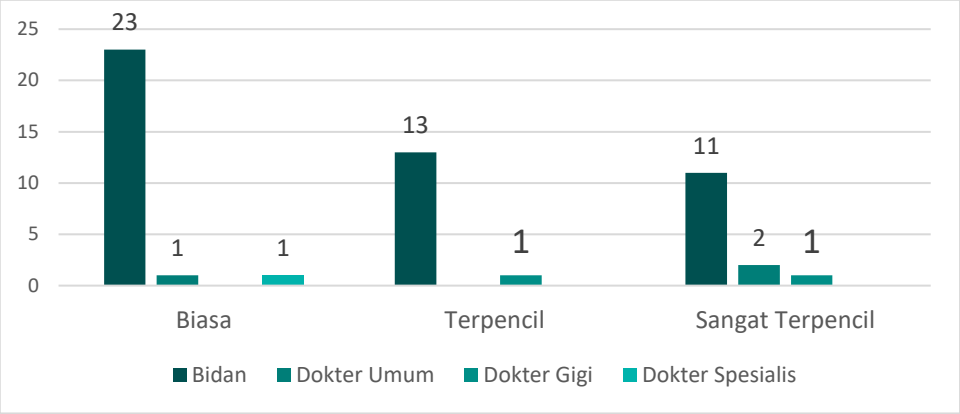

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2021
Ket: Sejumlah 17 provinsi sudah tidak ada PTT Kemenkes

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pasal 13, perencanaan penugasan khusus residen dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Badan PPSDMK, Direktorat Pelayanan Kesehayan, dan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi data dan analisis kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit provinsi dan kabupaten/kota.

Pada tahun 2020, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 127 orang. Tren jumlah penugasan khusus residen selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 490 orang pada tahun 2018 dan 339 orang pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program tugsus residen masih berlanjut hingga tahun 2024.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2020 adalah regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 32,3%, diikuti oleh regional Sumatera sebesar 24,4%, dan Kalimantan sebesar 16,5%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (14 orang). Sebanyak 7 provinsi tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2020. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.18
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2020

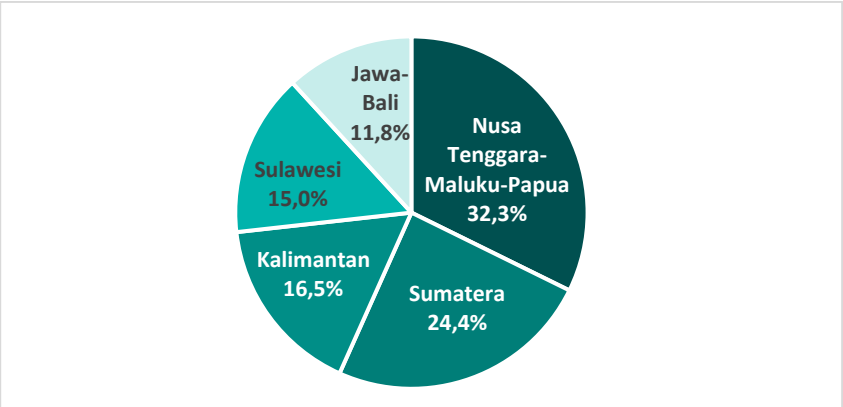

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (team based) dan individu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, fungsi program Nusantara Sehat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu program penugasan khusus ini dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat berbasis tim (tim NS) minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. Tim NS akan ditempatkan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masayarakat dengan masa tugas selama 2 tahun.

Penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 16 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan

penempatan di 156 puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penempatan di 173 puskesmas. Batch XV-XVI dilaksanakan tahun 2020 dengan penempatan tim NS yang masih aktif pada 32 puskesmas, 22 kabupaten/kota, dan 11 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan di tahun 2020 adalah tenaga kefarmasian dan ahli tenaga laboratorium medik yaitu masing-masing sebanyak 29 orang (13,3%), sedangkan jenis tenaga yang paling sedikit adalah dokter gigi sebanyak 13 orang (6%). Provinsi dengan penempatan tim NS terbanyak adalah Maluku (48 orang), sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Sulawesi Tenggara (5 orang). Sebanyak 17 provinsi tidak mendapatkan penempatan tim NS pada tahun 2020. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.j.

GAMBAR 3.19
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2020

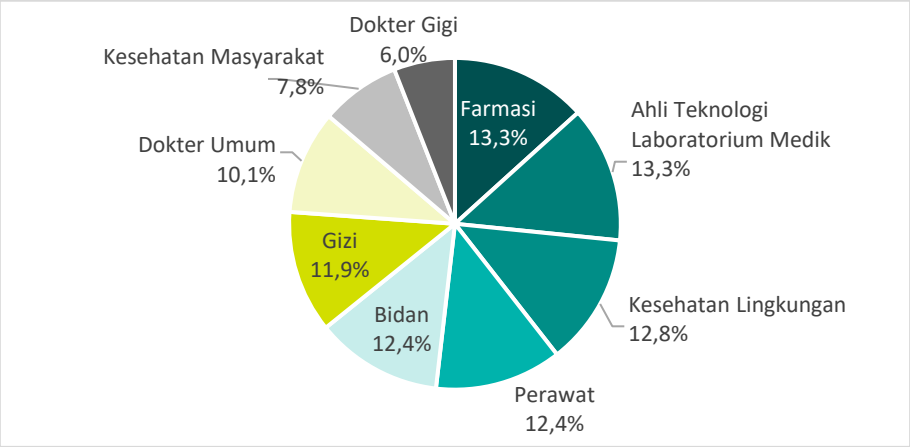

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

c. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, penugasan tenaga kesehatan Nusantara Sehat Individu (NS Individu) adalah penugasan khusus yang penempatannya berbentuk individu yang disesuaikan dengan pemetaan ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung Nusantara Sehat. Jenis tenaga kesehatan yang ditugaskan terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. NS Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan NS Individu sampai dengan tahun 2020 sebanyak 27 periode. Sampai dengan tahun 2020 telah ditempatkan tenaga NS individu sebanyak 9.916 orang, dengan

penempatan di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan pada tahun 2020 adalah perawat yaitu sebanyak 473 orang (20,2%), diikuti oleh tenaga kefarmasian sebanyak 342 orang (14,6%), dan ahli teknologi laboratorium medik sebanyak 341 orang (14,5%), sedangkan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga teknik elektromedik yaitu sebanyak 3 orang (0,1%). Provinsi dengan penempatan NS individu terbanyak pada tahun 2020 adalah DKI Jakarta yaitu 426 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan NS individu paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 2 orang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan penempatan NS individu pada tahun 2020. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada NS individu dapat dilihat di Lampiran 11.l.

GAMBAR 3.20
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU HINGGA TAHUN 2020

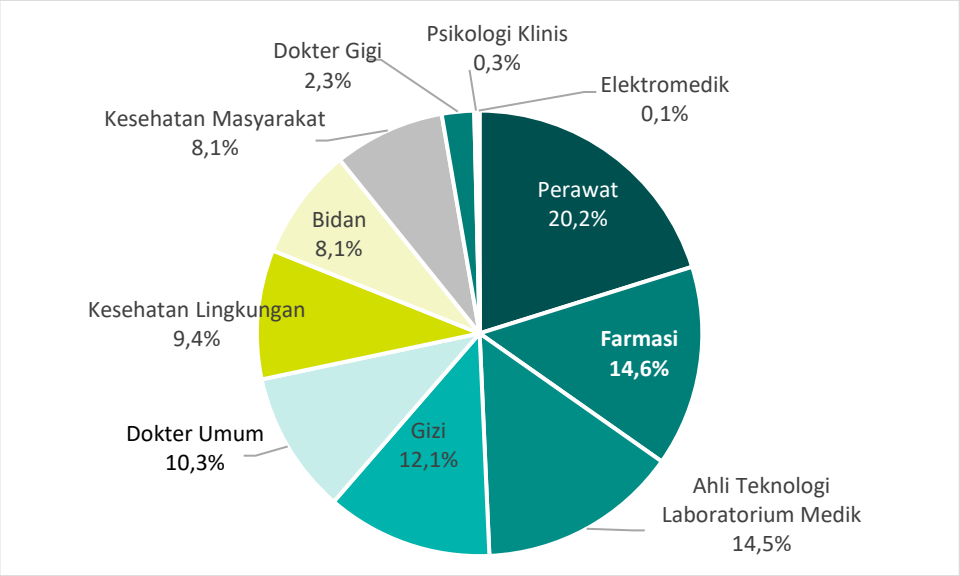

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Program Internsip Dokter

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia menjelaskan bahwa program internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.

Program internsip wajib diikuti oleh dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku selama menjalani internsip.

Dokter peserta program internsip ikatan dinas ditempatkan selama satu tahun dan wajib melaksanakan tugas pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta internsip dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari 2020 sebanyak 2.910 orang, bulan Mei sebanyak 1.544 orang, bulan Agustus-September sebanyak 3.436 orang, dan bulan November sebanyak 2.470 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta internsip yaitu regional Jawa-Bali (5.205 orang) dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Timur (1.314 orang). Provinsi dengan jumlah dokter peserta internship paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu 38 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2019 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.21
JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP
TAHUN 2020

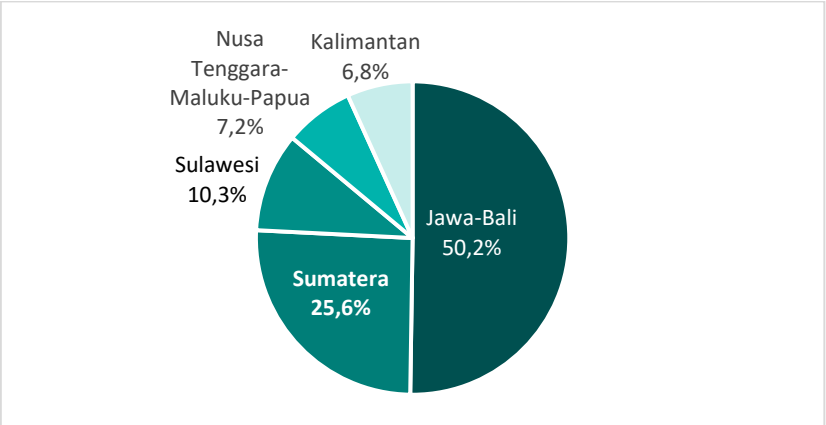

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

Pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan Kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan Kesehatan tingkat rujukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, maka Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa Peserta PGDS menerima bantuan biaya pendidikan.

Pada tahun 2020, sebanyak 510 dokter spesialis ditempatkan di RS milik pemerintah di 34 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI yang mengikuti program PGDS. Peserta PGDS terbagi menjadi peserta Peserta Bantuan Langsung (PBL)/ASN dan peserta Peserta Bantuan Tidak Langsung (PBTL) dan non ASN. Peserta Bantuan Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD serta bantuan Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis. Peserta dengan status aparatur sipil negara bantuan biaya pendidikan diberikan melalui tugas belajar. Peserta penerima bantuan tidak langsung merupakan peserta yang mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis.

Sekitar 60,4% dari peserta PGDS merupakan peserta PBL/ASN yaitu sebanyak 308 orang, sedangkan peserta PBTL-non ASN sebanyak 202 orang. Provinsi dengan penempatan tenaga kesehatan pada PGDS terbanyak adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 37 orang. Provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 3 orang. Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2020 adalah dokter spesialis anak (126 orang), sedangkan jenis spesialisasi paling sedikit adalah dokter spesialis patologi klinik (13 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2020 dapat dilihat di Lampiran 11.n.

GAMBAR 3.22
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2020

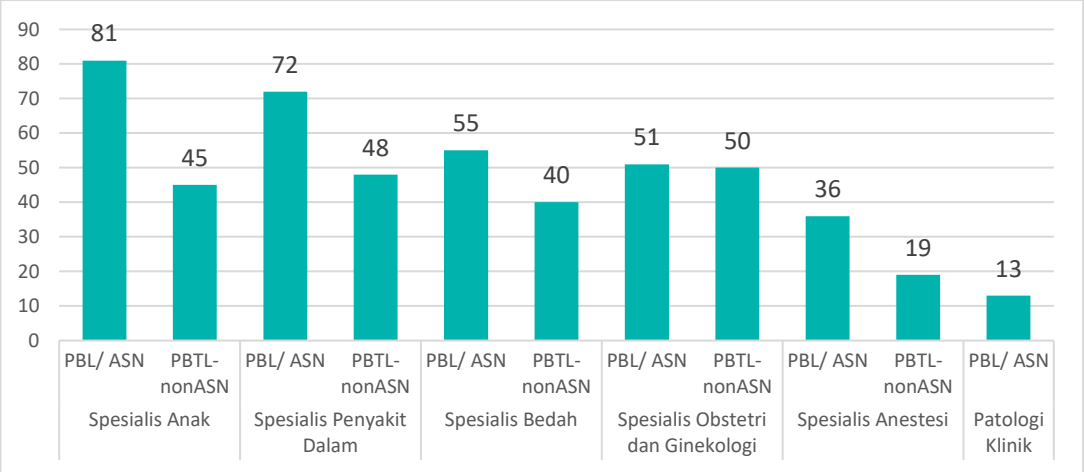

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan ini dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam

maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes memiliki 502 program studi yang terdiri dari 297 program studi strata Diploma III (293 program studi reguler dan 4 program studi PJJ), 153 program studi strata Sarjana Terapan, 48 program studi pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;

1. Kebidanan;
2. Kefarmasian, yang terdiri dari Farmasi serta Analis Farmasi dan Makanan,
3. Kesehatan Tradisional;
4. Kesehatan Lingkungan;
5. Gizi;
6. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
7. Keterapian Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur;
8. Keteknisian Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Kesehatan Gigi, Keperawatan Anestesiologi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
9. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Teknologi Laboratorium Medis, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.
10. Lainnya (Asuransi Kesehatan)

Dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bagi tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.

Program studi dalam Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada tahun 2020 terdiri dari 8 program studi Diploma III bidang kesehatan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi, Farmasi, Sanitasi, Teknologi Laboratorium Medis, Gizi, dan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Penyelenggara RPL adalah perguruan tinggi kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 181/M/KPT/2018 baik Poltekkes Kemenkes maupun perguruan tinggi kesehatan milik swasta dengan jumlah total 496 program studi yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh Poltekkes Kemenkes dan 50 PTN/PTS lainnya. Masa studi RPL terdiri dari 2- 3 semester.

Selain jenjang Diploma, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister

Terapan Keperawatan, Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, program studi Profesi diantaranya Profesi Bidan, Ners, Dietisien, dan Fisioterapi sudah dibuka di Poltekkes Tanjung Karang, Jakarta III, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Malang, Banten, Denpasar, Mataram, Kupang, Manado, dan Palu.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2020 sebanyak 34.687 orang, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari 23.722 orang lulusan Diploma (17.698 orang regular, dan 6.024 orang RPL), 9.310 orang lulusan Sarjana Terapan, 1.523 orang lulusan Pendidikan Profesi, dan 132 orang lulusan Magister Terapan. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 5.802 orang lulusan Diploma III dan 1.885 orang lulusan Diploma IV. Sementara itu, Kesehatan Masyarakat merupakan program studi dengan lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 29 orang. Secara umum, hampir semua program studi memiliki lulusan lebih banyak untuk Diploma III dibandingkan dengan Diploma IV, kecuali pada program studi Keterapian Fisik dengan jumlah lulusan 428 orang lulusan Diploma III dan 564 orang lulusan Diploma III. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.1.

GAMBAR 3.23
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020

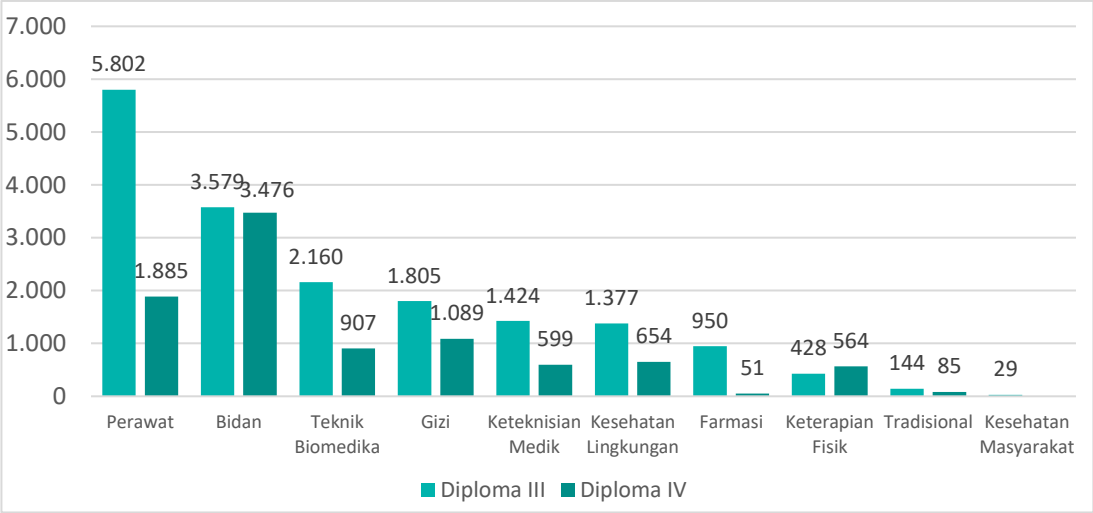

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

Poltekkes telah menghasilkan lulusan program studi Diploma III RPL sebanyak 6.024 orang pada tahun 2020. Program studi dengan jumlah lulusan terbanyak pada tahun 2020 adalah Keperawatan yaitu 2.603 orang, sedangkan program studi dengan jumlah lulusan paling sedikit adalah gizi yaitu sebanyak 106 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III RPL Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.24

JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III RPL
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020

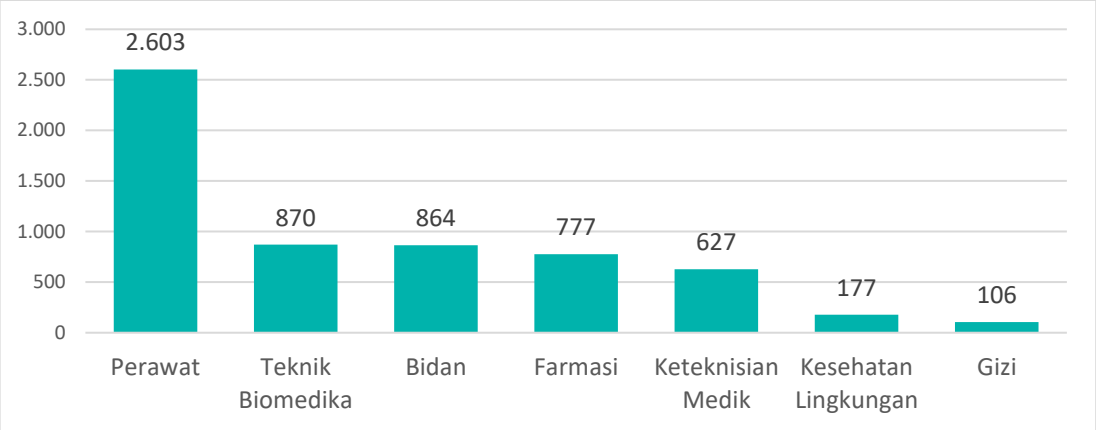

Sumber : BPPSDMK, Kemenkes RI, 2021

Selain jenjang Diploma, pada tahun 2020 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program profesi sebanyak 1.523 orang dengan rincian 474 orang lulusan Profesi Bidan, 742 orang lulusan Profesi Ners, 17 orang Profesi Dietisien, dan 290 orang lulusan Profesi Fisioterapi. Program studi Magister Terapan di Poltekkes Semarang pada tahun 2020 menghasilkan 132 lulusan dengan rincian 75 orang lulusan Magister Terapan Kebidanan, 28 orang lulusan Magister Terapan Keperawatan, 11 orang lulusan Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan 18 orang Magister Terapan Imaging Diagnostik. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.j.

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat sebanyak 668.230 lulusan dari 12.723 program studi di 2.689 lembaga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, S2, S2 Terapan, Spesialis 1, Spesialis 2, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan dan bidang lain terkait kesehatan (MIPA, Teknik, Pertanian, dan Sosial) dengan jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2020 sebanyak 278.614 orang. Menurut rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 116.485 orang, diikuti oleh bidan (41.312 orang) dan tenaga teknik kefarmasian (39.907 orang). Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional yaitu sejumlah 65 orang.

GAMBAR 3.25

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020

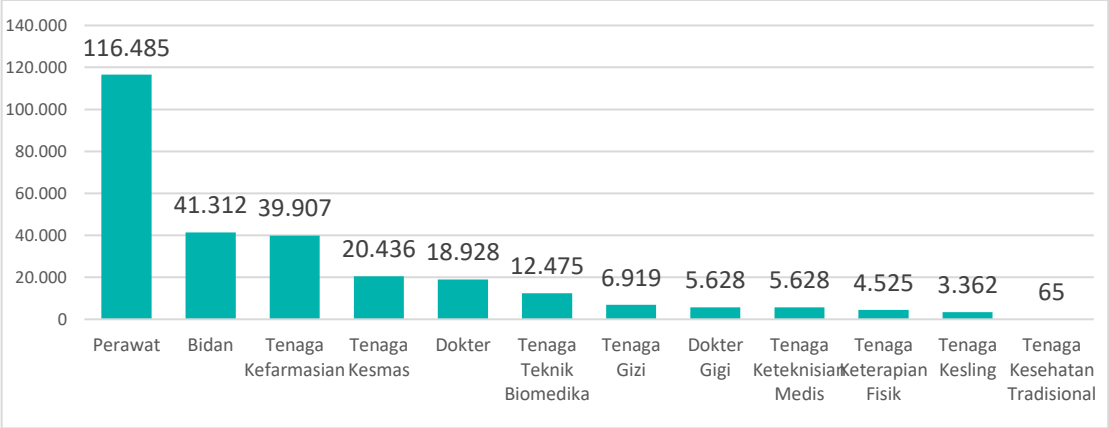

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 37.495 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 34.319 orang, dan Jawa Barat sejumlah 29.567 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu sebanyak 200 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 16.I.

GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

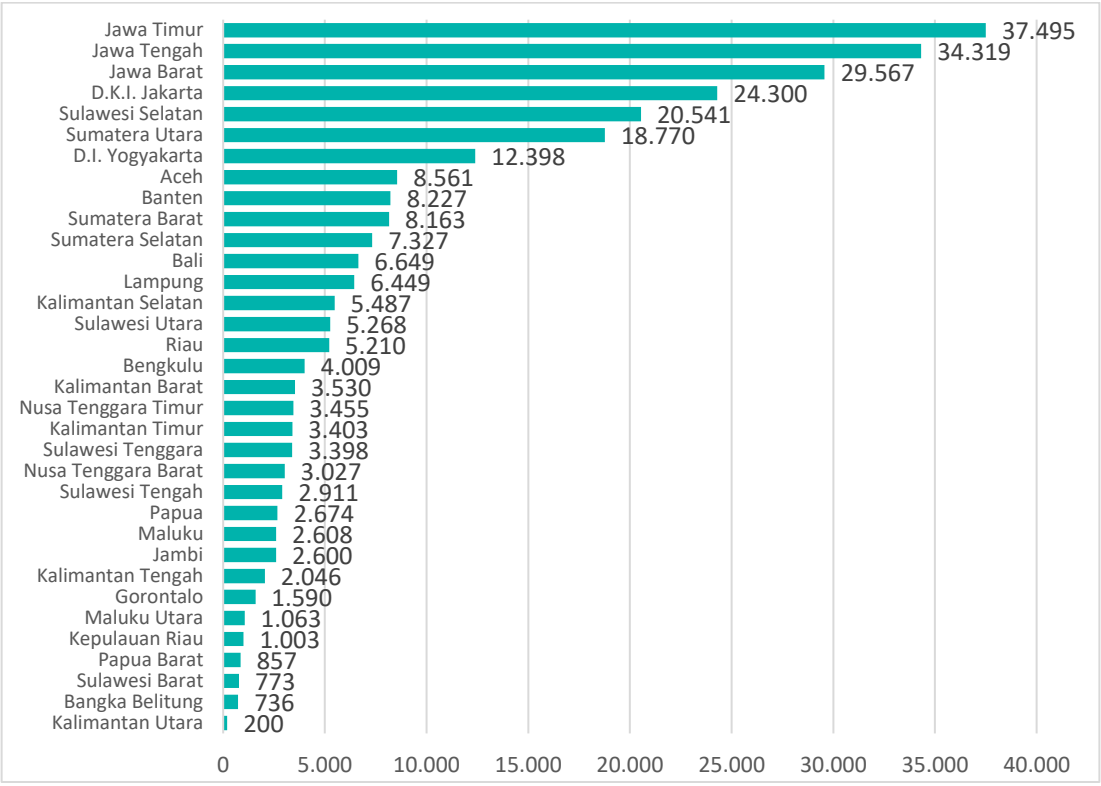

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2020 sebanyak 2.944 orang yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis bedah sejumlah 387 orang, diikuti oleh dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 354 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, di luar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 942 orang dan dokter gigi spesialis berjumlah 319 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2020 yang paling sedikit adalah dokter spesialis rehabilitasi medik dan dokter spesialis patologi anatomi sejumlah 62 orang.

GAMBAR 3.27
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2020

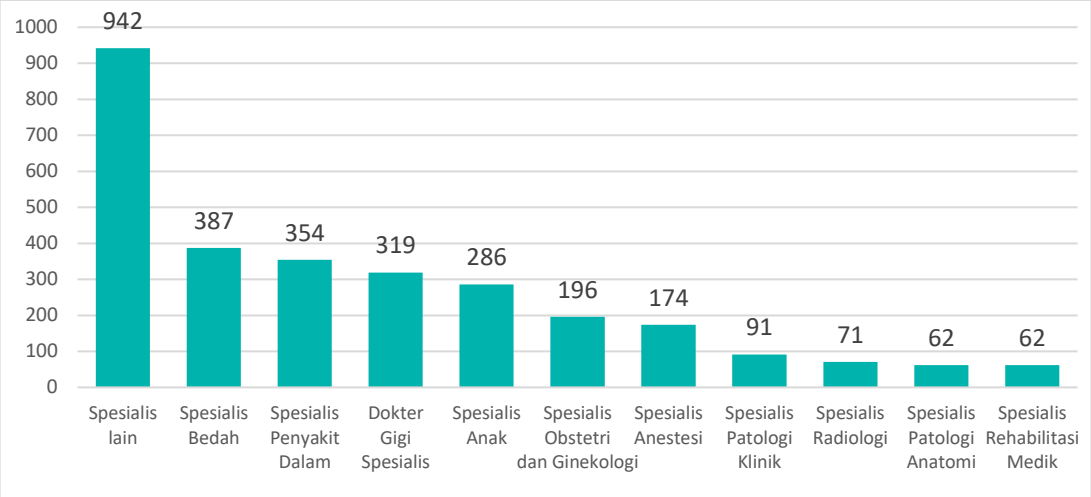

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 16.m.

***

Bab IV

Pembiayaan Kesehatan

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, unsur ekonomis merupakan salah satu aspek yang dipentingkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Selain itu, di dalam Undang-Undang yang sama juga disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat.

Anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai instrument pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga negara (Ansar, 2017). Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 107 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 102 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 36 trilyun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dilihat dari persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2020 juga mengalami kenaikan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 95,5%, naik dari tahun 2019 sebesar 94,6%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2011-2020

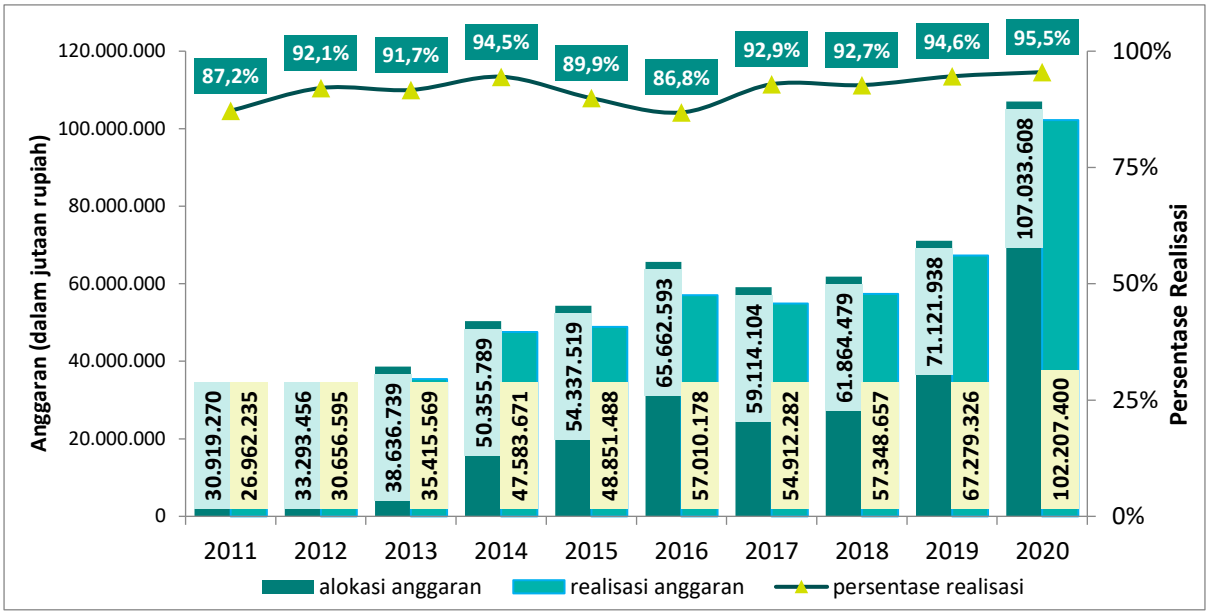

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Gambar 4.1 menunjukkan peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2011-2020, dengan alokasi tertinggi yaitu pada tahun 2020.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 51,7 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 81,5 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 98,2%, sedangkan realisasi terendah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) dengan persentase realisasi sebesar 89,9%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2020 selengkapnya terdapat pada Lampiran 19.b.

GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I
TAHUN 2020

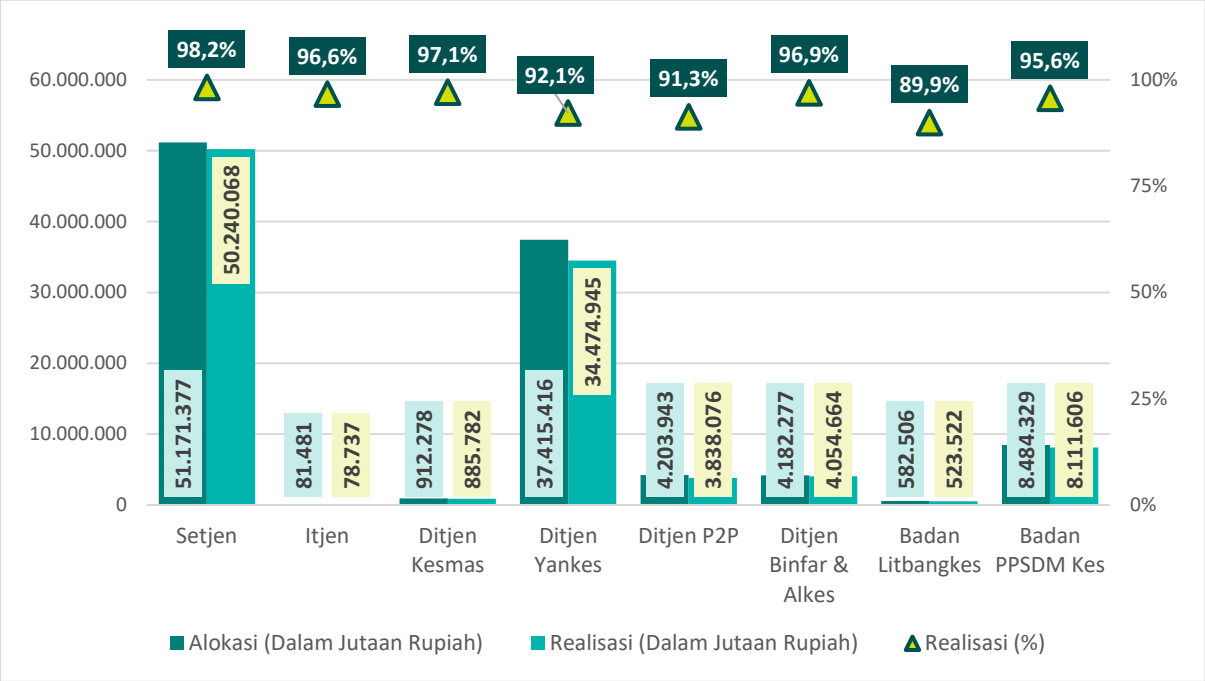

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 71,12 triliun rupiah, sebanyak 48,8 triliun rupiah atau sebesar 45,6% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan yang terbesar berikutnya dialokasikan untuk belanja barang, sebesar 44,1%, serta belanja pegawai dan belanja modal sebesar masing-masing 4,9%. Untuk persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 99,6% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 84,4% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19.C.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2020

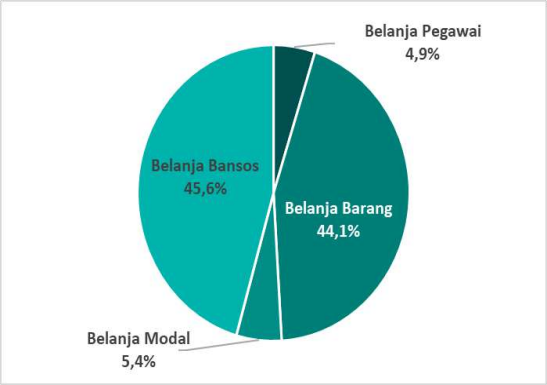

GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2020

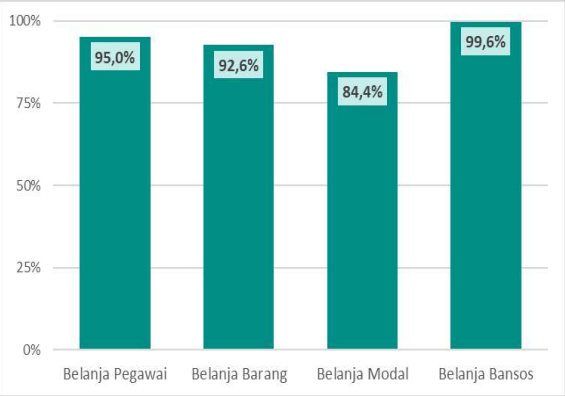

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 248/PMK.07/2010, untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka good governance dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan target program kesehatan inilah dana dekonsentrasi diberikan. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non fisik yang dimaksud antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, workshop, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, maka sebagian kecil dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Namun demikian, dana dekonsentrasi bukanlah merupakan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan di daerah, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemanfaatan dana dekonsentrasi harus dilakukan dengan cermat agar terpadu dengan kegiatan yang berasal dari sumber anggaran lainnya dan jangan sampai terjadi duplikasi kegiatan.

Setiap tahunnya diterbitkan petunjuk teknis untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun anggaran 2020 disajikan pada Lampiran 19.e.

Berdasarkan grafik yang disajikan pada gambar 4.5, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 97,6%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Papua sebesar 48,1%. Masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

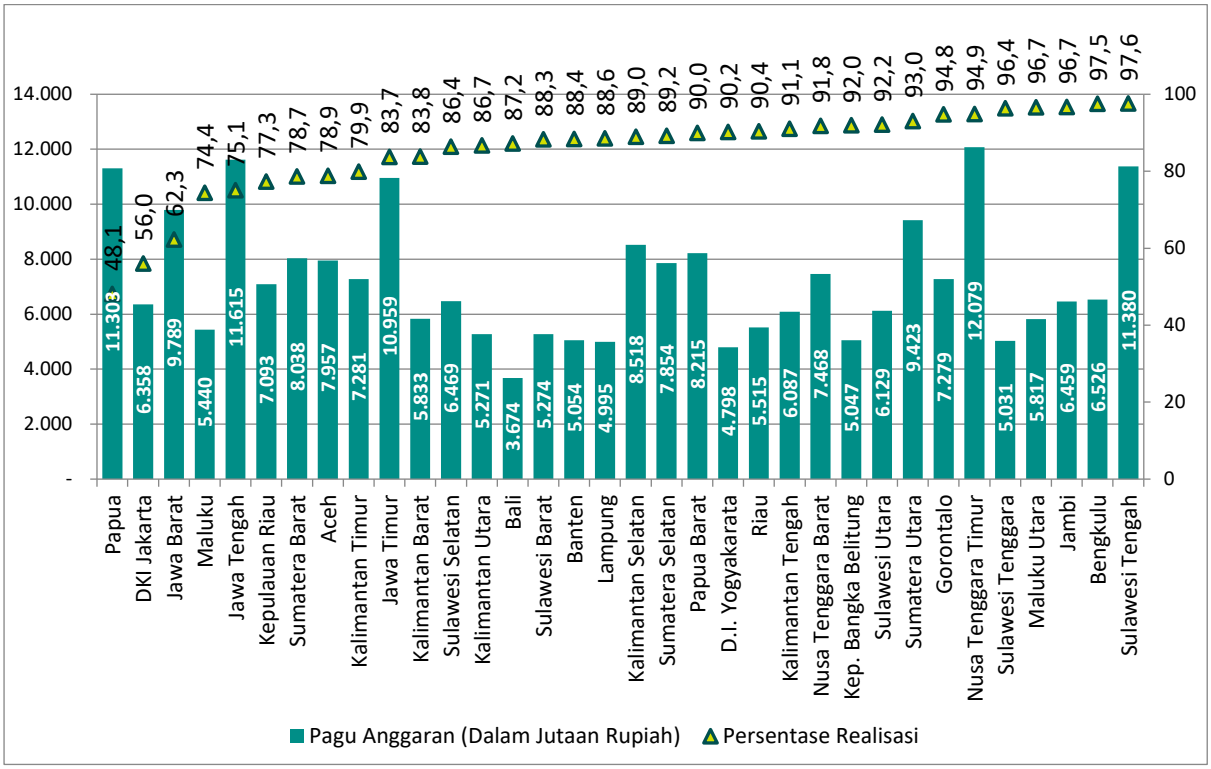

Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi dua, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Panduan pemanfaatan DAK bidang kesehatan tahun 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti: penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan, penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional, penguatan laboratorium kesehatan daerah, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota, penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit, dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/ kabupaten/kota, penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota, pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas: bantuan operasional kesehatan (BOK), jaminan persalinan (jampersal), akreditasi Puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan serta laporan tahunan). Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda, yaitu DAK Fisik menggunakan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan DAK Non Fisik menggunakan aplikasi e-Renggar.

Pada tahun 2020, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020 secara nasional sebesar 57,6% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (100%) dan terendah adalah Provinsi Papua Barat (7,1%), seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut.

GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

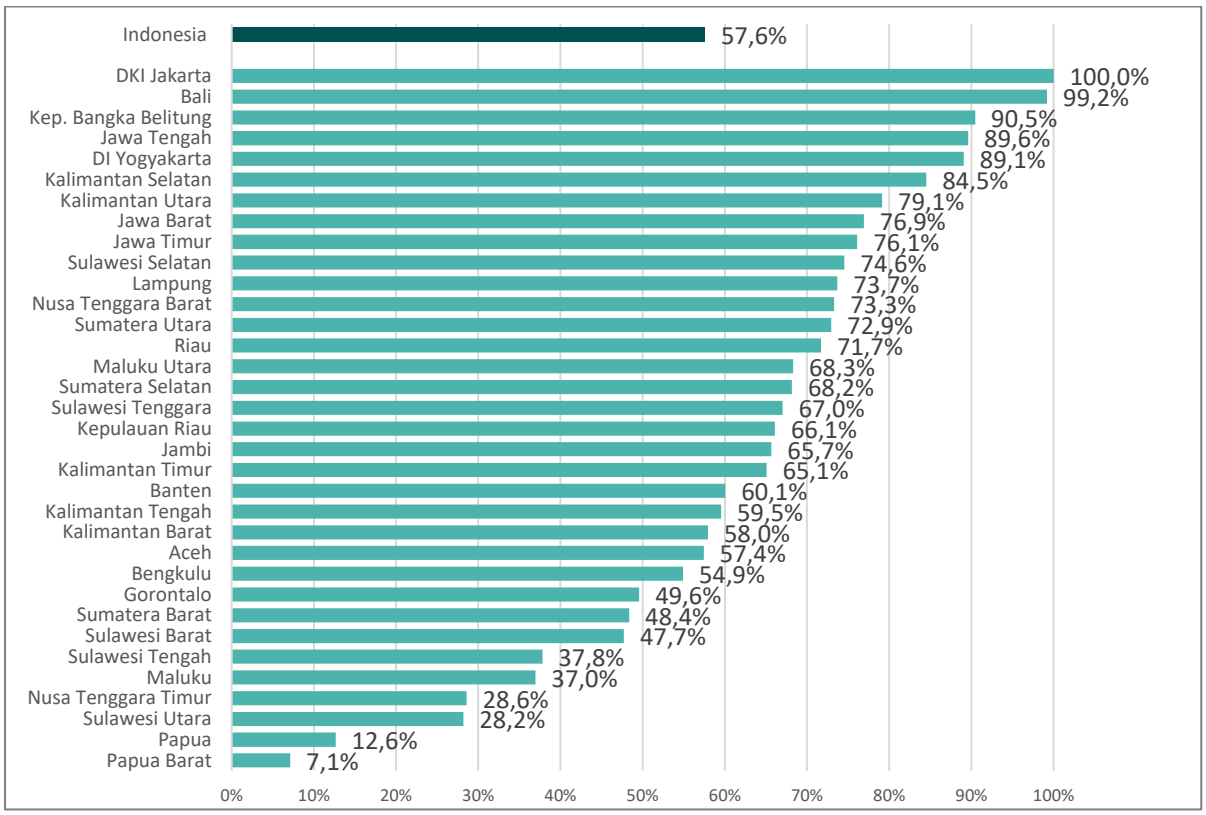

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2021 (Data Kemenkeu per 28 Januari 2021)

Untuk realisasi DAK Non Fisik Tahun 2020 secara nasional adalah 76,94% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Banten (97,06%) dan terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat (9,10%) seperti tampak pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

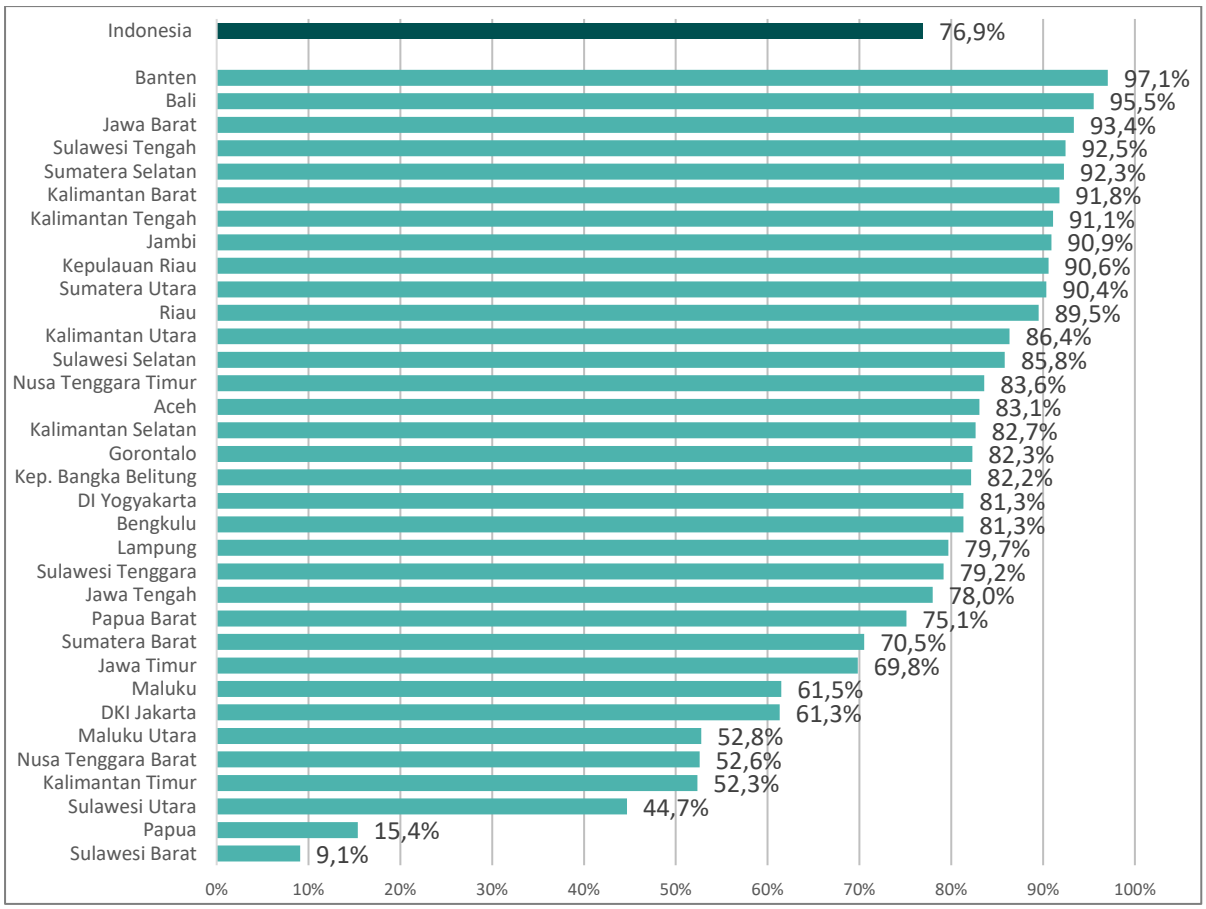

Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2020 (Data e-Renggar per 28 Januari 2021)

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa alokasi belanja di bidang Kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal 171 dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang Kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kesehatan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besar belanja Kesehatan di suatu negara adalah National Health Accounts atau NHA. NHA adalah pendekatan yang sistematik dan konprehensif yang digunakan untuk memonitor besaran pengeluaran kesehatan di suatu negara, mencakup aliran dana kesehatan, distribusi dan penggunaannya. NHA diperlukan untuk menjawab pertanyaan isu-isu

pembiayaan kesehatan seperti kecukupan (*sufficiency*), pemerataan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), efektifitas (*effectiveness*), dan keberlanjutan (*sustainability*) terkait kebijakan alokasi sumber daya kesehatan, baik dari sisi *supply* maupun demand dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*/*UHC*).

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (*SHA*) 2011 yang merupakan metode standar internasional, sehingga dapat melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan secara global dalam *World Health Report* yang terpublikasi setiap tahunnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai negara dengan kebijakan *single payer* (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagi badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara memberi perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju *UHC*. Dari data NHA tahun 2018, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya penguatan pendanaan untuk menunjang upaya preventif dan promotif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), edukasi kesehatan untuk pola hidup bersih sehat, imunisasi, surveilance, skrining, pengadaan pola makan tambahan, dan lain-lain. Penguatan pendanaan untuk layanan di FKTP serta pendanaan preventif-promotif akan membangun sistem layanan Kesehatan yang lebih kokoh terhadap berbagai kejadian tidak terduga termasuk adanya pandemik COVID-19.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/*Total Health Expenditure* (*THE*)

Estimasi NHA 2018 menghasilkan angka total belanja kesehatan Indonesia yang mencakup *Current Health Expenditure* (*CHE*) dan belanja investasi. *CHE* merupakan seluruh belanja kesehatan di luar belanja investasi (belanja modal), baik berupa belanja untuk pelayanan Kesehatan perorangan maupun komunitas, juga termasuk tata kelola administrasi sistem kesehatan. Belanja investasi merupakan belanja komoditas barang dan jasa yang memiliki masa guna lebih dari satu tahun, seperti infrastruktur kesehatan (bangunan, mesin, teknologi informasi, dan lain-lain), belanja untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta untuk penelitian dan pengembangan kesehatan. Keterbatasan akses pada sumber data skema non-publik (swasta) menyebabkan saat ini belanja investasi di Indonesia belum dapat terpotret secara utuh, khususnya pada sektor non-publik yang baru mencakup sebagian belanja yang terdapat pada skema Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Indikator umum yang digunakan untuk mengukur belanja kesehatan di suatu negara pada skala internasional saat ini adalah CHE, karena menggambarkan konsumsi akhir yang dapat dinikmati dalam setahun. Namun, dalam publikasi ini, indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2012-2019

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US $)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2012	260.7	1.062.079	113	3.0
2013	287.5	1.155.370	110	3.0
2014	324.6	1.287.409	109	3.1
2015	358.3	1.402.747	105	3.1
2016	399.3	1.543.512	116	3.2
2017	432.9	1.618.548	121	3.1
2018	454.1	1.713.534	120	3.1
2019	490.3	1.828.862	129	3.1

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan , Kemenkes RI, 2021

Gambar 4.1 di atas menunjukkan total belanja kesehatan Indonesia selama tahun 2012-2019 menunjukkan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terjadi peningkatan belanja kesehatan hampir 2 (dua) kali lipat, dari Rp260,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 490,3 triliun pada tahun 2019. Proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,1% yaitu dari 3,0% di tahun 2012 menjadi 3,1% di tahun 2019, namun meski demikian belanja kesehatan perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar Rp 1.062.072 (US $113) menjadi Rp 1.828.862 (US $129) di tahun 2019.

GAMBAR 4.8
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN
TAHUN 2012-2019

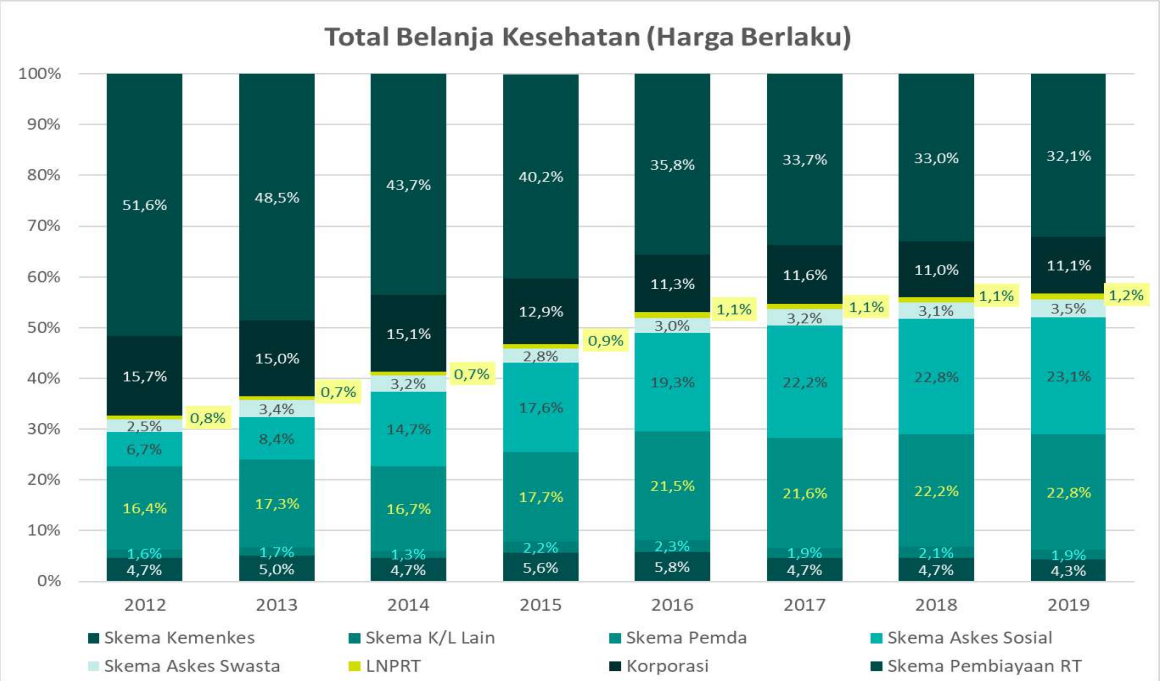

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Gambar 4.8 di atas menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan Kesehatan yang meliputi sektor publik (skema Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Asuransi Kesehatan Sosial (JKN) dan sektor non-publik (skema Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Korporasi, dan Pembiayaan Rumah Tangga). Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 harus dimonitor secara terus menerus. Namun meskipun secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 51,6% pada tahun 2012 menjadi 32,1% pada tahun 2019), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2012–2019 (dari 134,6 triliun pada tahun 2010 menjadi 157,5 triliun pada tahun 2019). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

Belanja kesehatan pada awalnya didominasi pendanaan sektor non-publik, terutama yang berasal dari kontribusi pembiayaan rumah tangga. Meskipun begitu, pendanaan dari sektor publik setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari proporsi maupun dari jumlahnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 29,4 persen (Rp76,7 triliun) dari total belanja nasional dan tahun 2019 sebesar 52,1 persen (Rp255,5 triliun). Tren peningkatan ini terutama terjadi pada skema JKN dan skema pemerintah daerah (Pemda), sementara skema Kementerian Kesehatan (Kemenkes) cenderung menurun dan skema K/L lainnya relatif stabil selama tahun 2014-2019.

Salah satu yang menunjukan tren kenaikan adalah belanja kesehatan pada skema Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota cenderung meningkat selama tahun 2012-2019. Peningkatan jumlah belanja kesehatan Pemda diharapkan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program vertikal yang menjadi indikator kinerja kesehatan nasional. Peran besar daerah dalam mengelola pembiayaan kesehatan tentu saja melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Mengingat capaian indikator kesehatan menjadi ukuran penting kinerja Kemenkes sebagai *focal point* sektor kesehatan, maka perlu dilaksanakan juga proses monitoring dan evaluasi terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar pendanaan kesehatan yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta berdampak positif pada pembangunan sektor kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Dasar hukum yang paling utama adanya Jaminan Kesehatan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, yaitu: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Selain itu, dasar hukum adanya Jaminan

Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu: (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial yang dimaksud meliputi : 1) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; 2) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; 3) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; 4) bersifat nirlaba. Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. PBI Jaminan Kesehatan.
   Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dibayari oleh pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan.
   Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:
   - Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
   - Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya
   - Bukan pekerja dan anggota keluarganya

GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2020

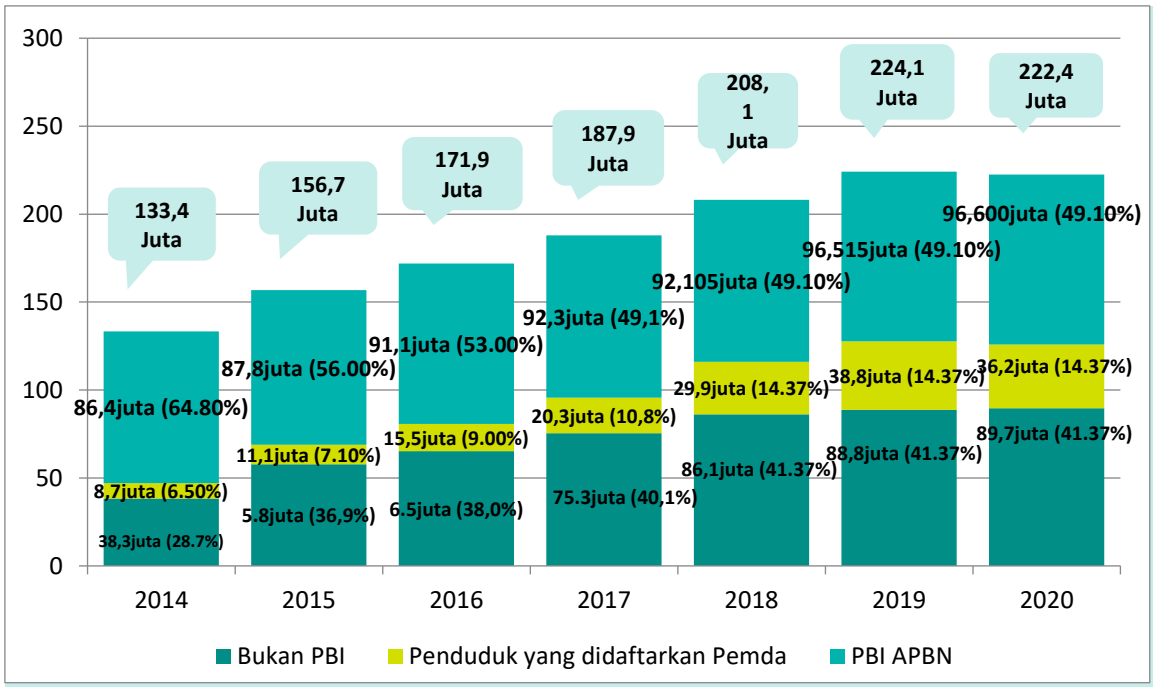

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada Tahun 2020, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 49,10%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS mencapai 222,4 juta jiwa, dimana terjadi penurunan jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kontribusi iuran pada segmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sehingga adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membayarkan iuran. Pada tahun 2020 juga diketahui bersama dengan adanya pandemi *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang berdampak juga pada kemampuan membayar iuran oleh peserta segmen PBPU/BP.

GAMBAR 4.10
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

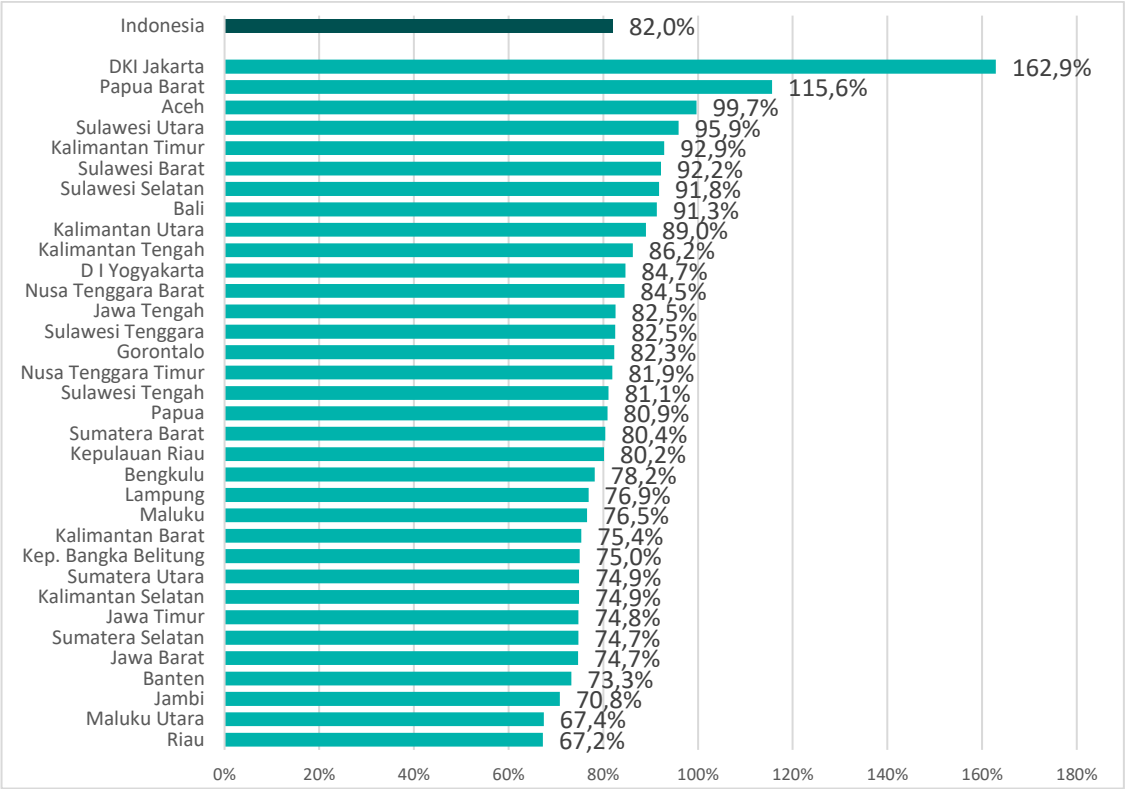

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 sebanyak 82,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 4 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/*Universal Health Coverage* (*UHC*), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta (162,9%), sedangkan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu pada penduduk Provinsi Riau (67,2%). Jumlah kepesertaan yang melebihi 100% dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja Kantor Cabang, tidak semua berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat peserta. Data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di lampiran 17.a.

GAMBAR 4.11
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2020

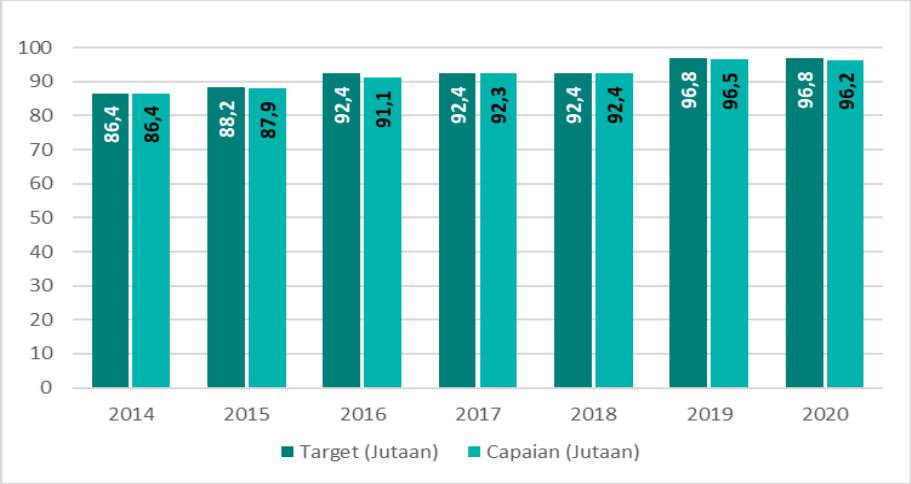

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada Tahun 2020, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Penetapan ini termasuk bayi dari PBI Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya.

GAMBAR 4.12
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2014-2020

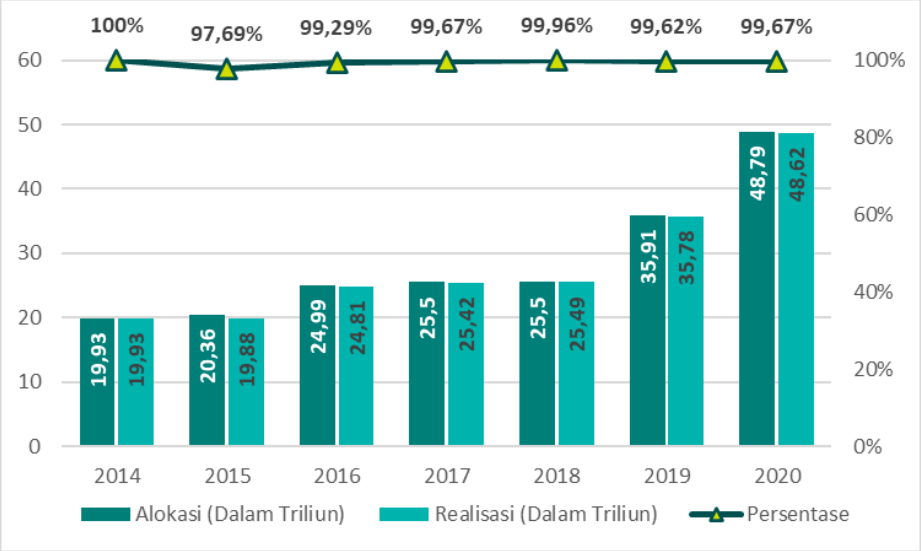

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2021

Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, terjadi perubahan pada besaran iuran, diantaranya yaitu iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000, serta besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Adapun Perpres tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 19,93 trilyun atau 100% dari alokasi yang dianggarkan. Pada tahun 2015, realisasi menjadi 97,69% mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2020, realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan mencapai 99,67% dari alokasi yang dianggarkan.

GAMBAR 4.13
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014-2020

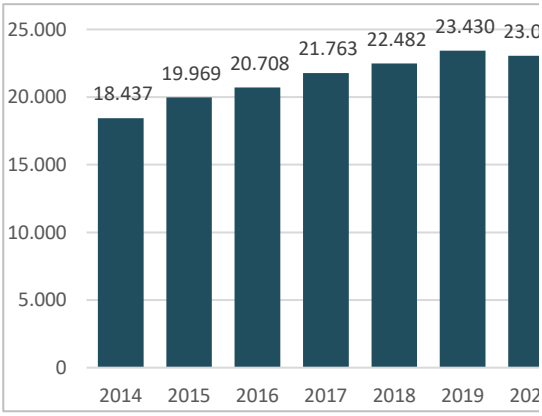

GAMBAR 4.14
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2020

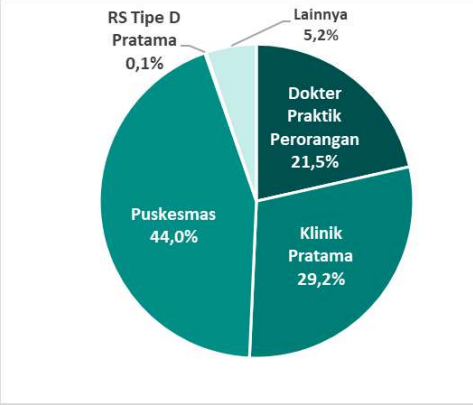

Sumber: Pusat Pembiayaan dan JaminanKesehatan, Kemenkes RI, 2021

Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dari sebanyak 18.437 faskes pada tahun 2014 menjadi 23.043 faskes pada tahun 2020. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 43,96%, kemudian Klinik Pratama sebesar 29,24%, lalu kemudian dokter praktik perorangan sebesar 21,47%. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.b.

GAMBAR 4.15
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

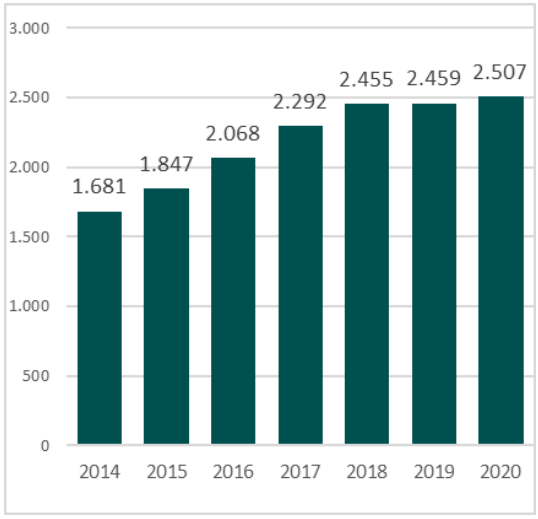

GAMBAR 4.16
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

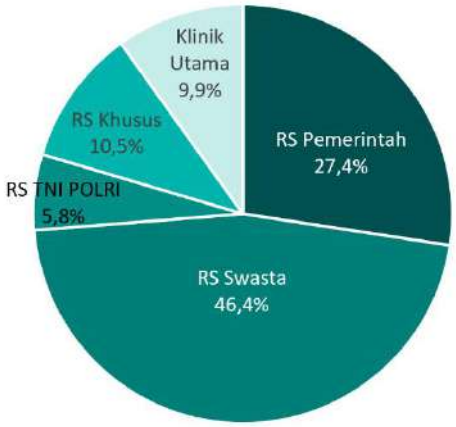

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Sama dengan halnya FKTP, perkembangan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari sebanyak 1.681 faskes pada tahun 2014 menjadi 2.507 faskes pada tahun 2020. Jenis FKRTL terbanyak adalah RS Swasta, yaitu sebesar 46,35%, RS Pemerintah (27,40%), dan RS Khusus sebesar 10,53% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.17
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

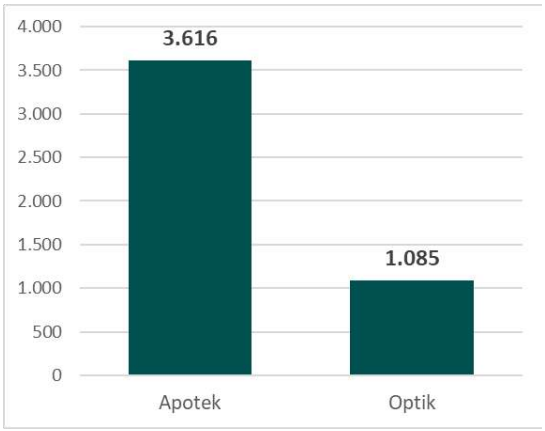

GAMBAR 4.18
PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

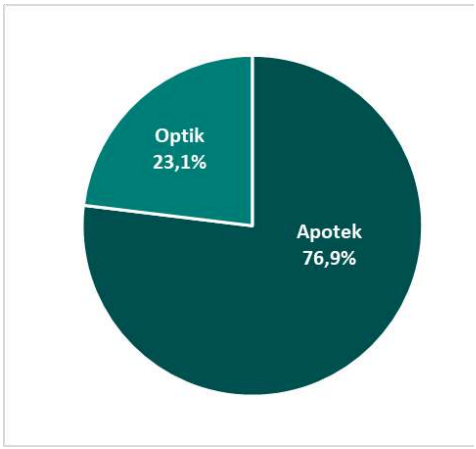

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Selain FKTP dan FKRTL yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada tahun 2020 terdapat provider fasilitas kesehatan penunjang yaitu apotek dan optik. Terdapat 3.616 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 76,9% dan 1.085 optik atau sebesar 23,1% dari jumlah provider penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.19
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPESERTAAN
TAHUN 2020

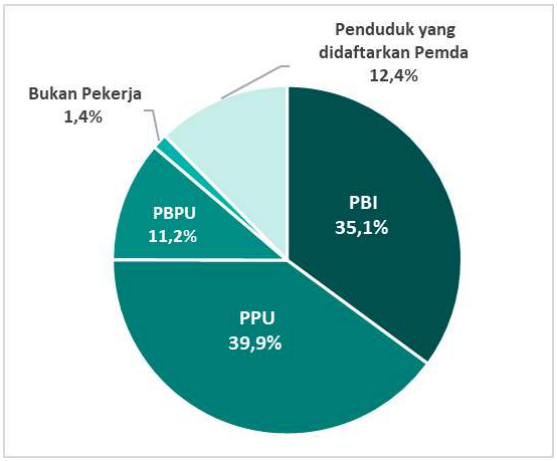

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2020 adalah Rp. 138,5 triliun, dimana pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terbesar yaitu pada segmen PPU atau Pekerja Penerima Upah sebesar Rp. 55,3 triliun atau sekitar 39,9%, terbanyak ke dua dari segmen PBI atau Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp. 48,6 triliun atau sekitar 35,1%. Sedangkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terendah yaitu pada segmen BP atau Bukan Pekerja sebesar Rp. 1,9 triliun atau hanya sekitar 1,4% dari total pendapatan iuran.

GAMBAR 4.20
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN
TAHUN 2020

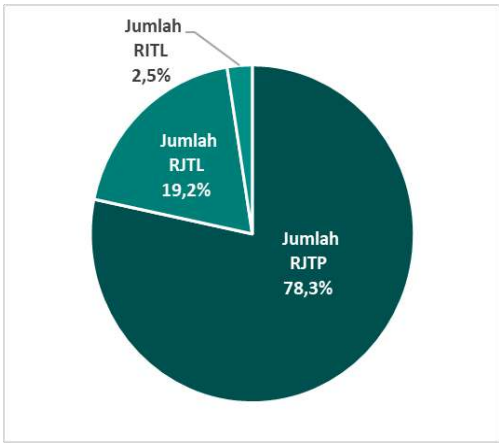

GAMBAR 4.21
BIAYA MANFAAT PROGRAM JKN
TAHUN 2020

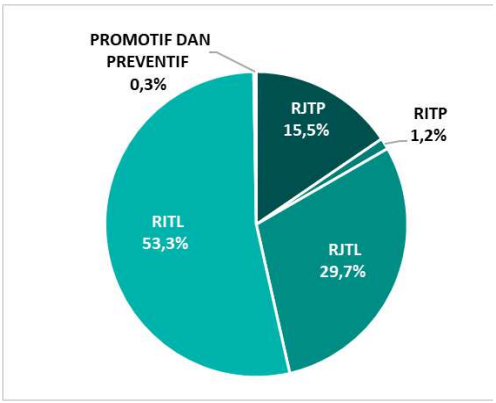

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah RJTP atau Rawat Jalan Tingkat Pertama, yaitu sebesar 78,3%. Sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah RITL atau Rawat Inap Tingkat Lanjut sebesar 2,5%. Meski RITL dari segi jumlah merupakan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan, tetapi bila dari segi pembiayaan merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar 53,3% dari seluruh pembiayaan pelayanan Kesehatan. Sedangkan pembiayaan terendah adalah untuk program promotif dan preventif, yaitu sebesar 0,3%. Angka ini memperlihatkan bahwa pembiayaan BPJS Kesehatan saat ini masih terkonsentrasi pada segi kuratif atau pengobatan, sedangkan untuk promotif dan preventif hanya mengambil sedikit sekali porsi dari pembiayaan BPJS Kesehatan.

Sampai dengan akhir Desember 2020, terdapat delapan penyakit katastropik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katarstropik merupakan penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi dalam pelayanan Kesehatan JKN. Penyakit dengan biaya terbanyak yaitu penyakit jantung, yang membutuhkan hampir 8,3 triliun rupiah untuk pembiayannya. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 11.592.990 kasus. Sedangkan penyakit katastropik dengan biaya terendah yaitu Cirrhosis Hepatis, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar lebih dari 243,5 milyar rupiah dengan kasus sebanyak 156.764 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit terkait kelainan pada darah, yaitu Haemophilia, Leukaemia, dan Thalassaemia.

TABEL 4.2
JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN TAHUN 2020

No.	Penyakit Kataspropik	Realisasi s.d. 31 Desember 2020		
		Jumlah Kasus	Biaya	Rata-rata Biaya Per Kasus
1.	Jantung	11.592.990	8.296.354.456.255	715.635
2.	Kanker	2.294.114	3.133.505.324.175	1.365.889
3.	*Stroke*	1.789.261	2.136.374.082.295	1.193.998
4.	Gagal Ginjal	1.602.059	1.922.208.770.804	1.199.836
5.	*Thalassaemia*	234.888	524.181.344.896	2.231.622
6.	*Haemophilia*	74.651	443.271.576.975	5.937.919
7.	*Leukaemia*	127.731	355.103.388.288	2.780.088
8.	*Cirrhosis Hepatis*	156.764	243.561.588.177	1.553.683
Total		**17.872.458**	**17.054.560.531.865**	

Sumber: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

***

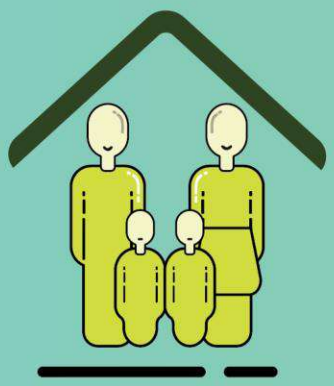

Bab V

Kesehatan Keluarga

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Berdasarkan hasil estimasi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 271.066.366 jiwa yang terdiri atas 136.142.501 jiwa penduduk laki-laki dan 134.923.865 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan jenis kelamin. Penurunan jumlah pertumbuhan penduduk terbesar terjadi pada tahun 2019-2020 dari 3,06 juta per tahun menjadi 2,99 juta per tahun (Lihat Gambar 1.1).

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil supas tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan target MDGs. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
TAHUN 1991 – 2015

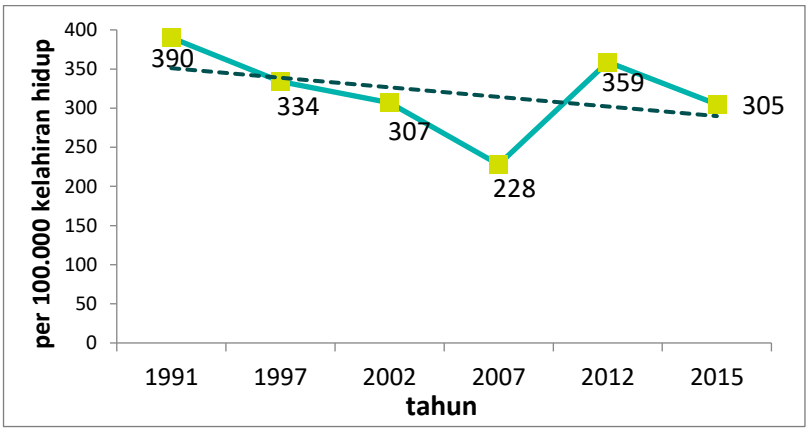

Sumber: BPS, SDKI 1991-2012
*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kematian.

Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 21.

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan imunisasi Tetanus bagi wanita usia subur dan ibu hamil, (3) pemberian tablet tambah darah, (4) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (5) pelayanan kesehatan ibu nifas, (6) Puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), (7) pelayanan kontrasepsi/KB dan (8) pemeriksaan HIV dan Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).

4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020.

GAMBAR 5.2
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2007 – 2020

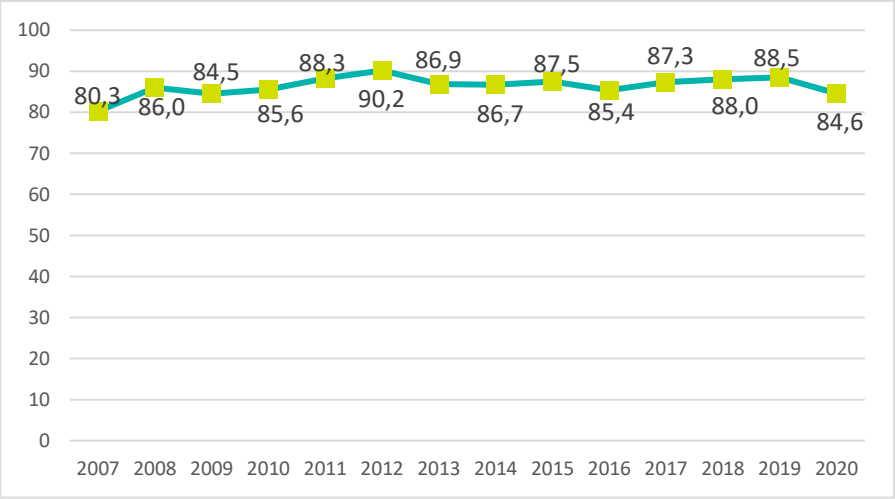

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Sejak tahun tahun 2007 sampai dengan 2020 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung meningkat. Namun demikian penurunan terjadi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 88,54% menjadi 84,6%. Penurunan ini diasumsikan terjadi karena implementasi program di daerah yang terdampak pandemi COVID-19.

Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2020 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 5.3
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

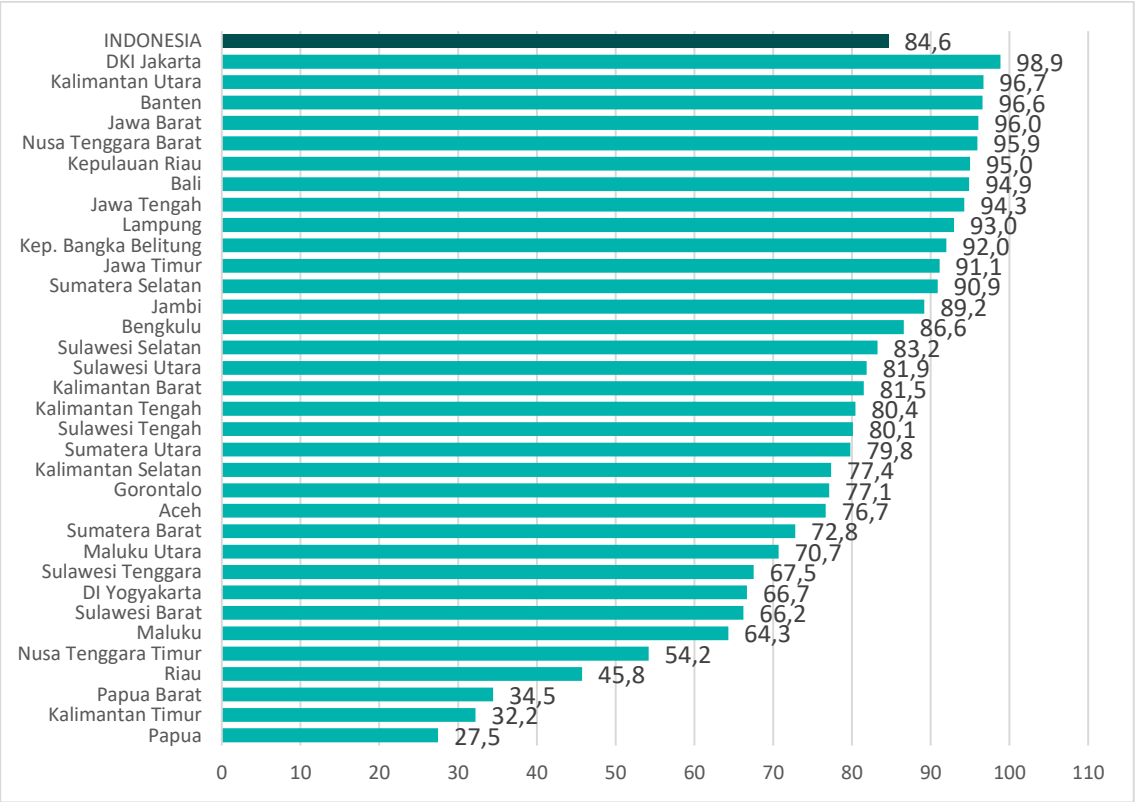

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2020 menunjukkan gambaran provinsi tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 98,9%, diikuti oleh Kalimantan Utara dan Banten. Terdapat empat provinsi dengan capaian kurang dari 50%, yaitu Papua, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Riau.

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 terdapat pada Lampiran 23.a.

2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Gambar 5.5 memperlihatkan cakupan imunisasi Td1- Td5 pada ibu hamil.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA IBU HAMIL
DI INDONESIA TAHUN 2020

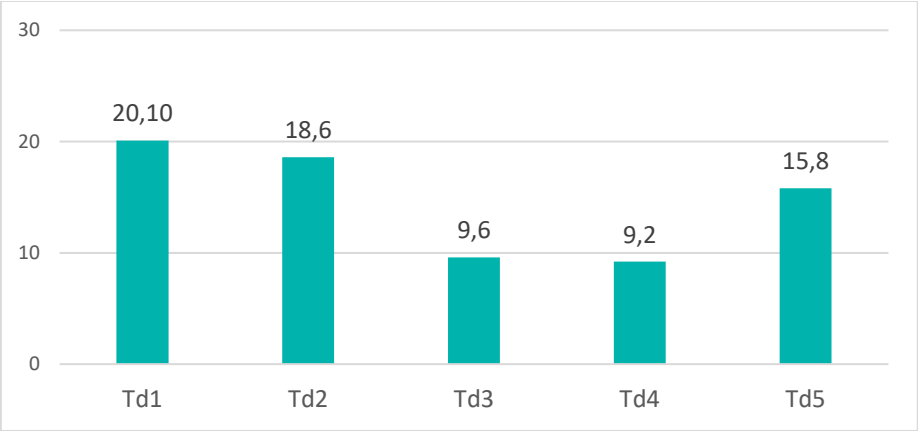

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Cakupan imunisasi Td pada status Td1 sampai Td5 pada ibu hamil tahun 2020 masih sangat rendah yaitu kurang dari 20%. Cakupan Td5 sebesar 15,8% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,3%.

GAMBAR 5.5
CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2020

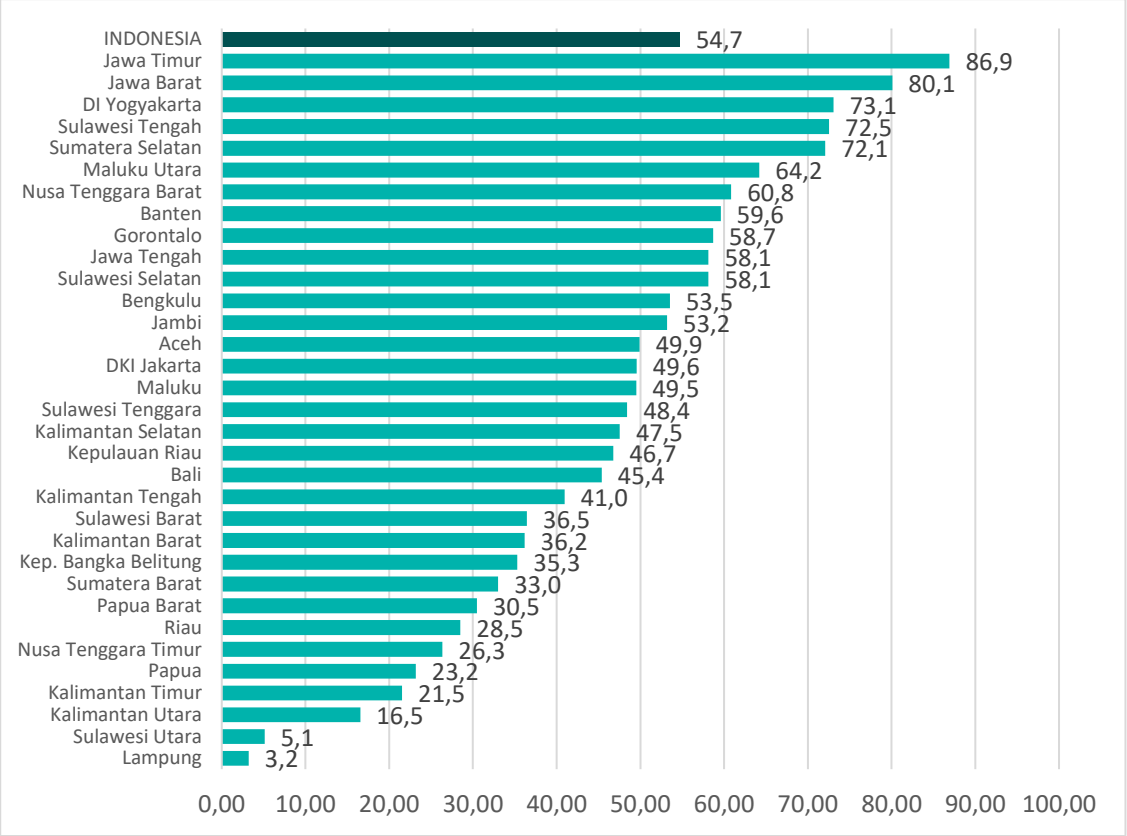

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2020 sebesar 54,7%. Cakupan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 64,88%, dan juga lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang sebesar 84,9%. Sedangkan Td2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4.

Berdasarkan distribusi provinsi, Provinsi Jawa Timur memiliki cakupan tertinggi sebesar 86,9% diikuti oleh Jawa Barat sebesar 80,1%, dan DI Yogyakarta sebesar 73,1%. Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Lampung sebesar 3,2%, diikuti oleh Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur dan ibu hamil terdapat pada Lampiran 24-26.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap

ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil di Indonesia tahun 2020 adalah 83,6%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 64%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah DKI Jakarta sebesar 99,3%, diikuti oleh Kalimantan Utara dan Bali. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 25,3%, diikuti oleh Papua Barat dan Maluku. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.a.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

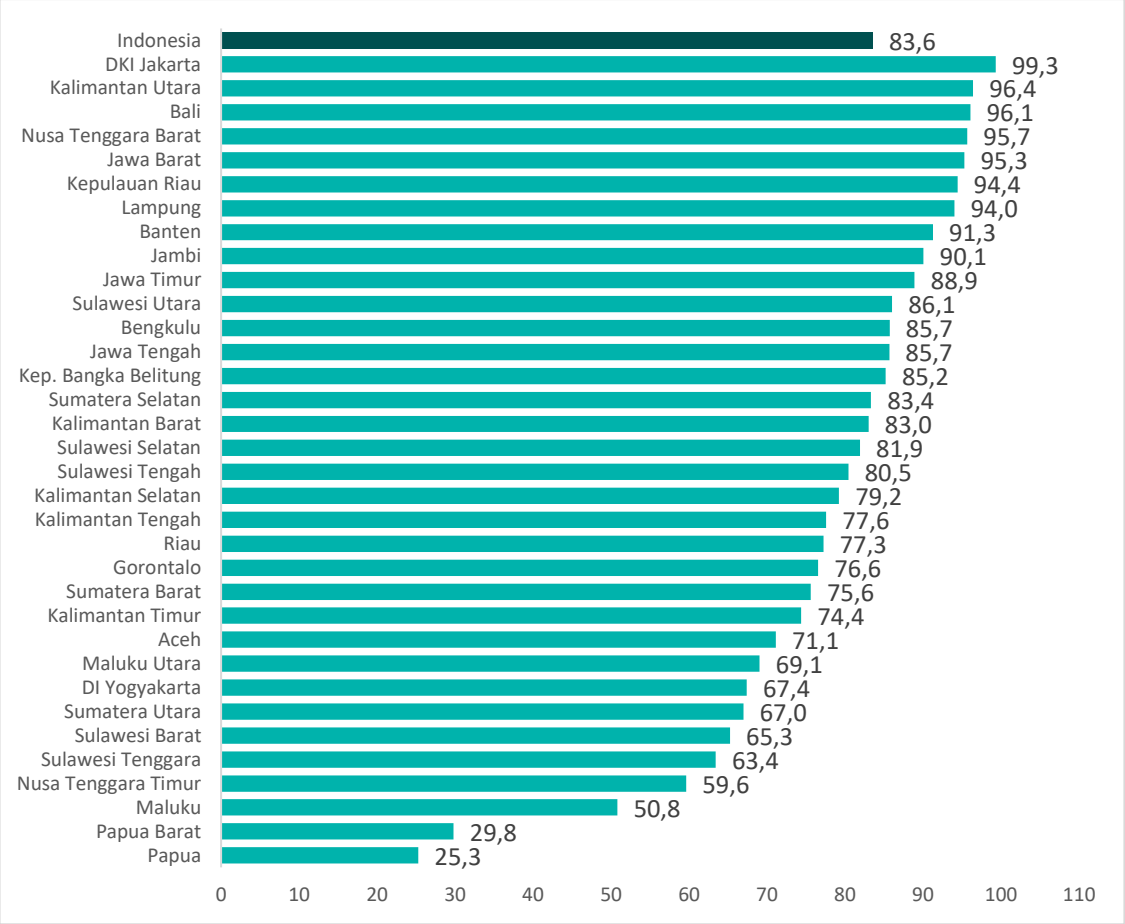

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.8 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2020.

GAMBAR 5.7
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

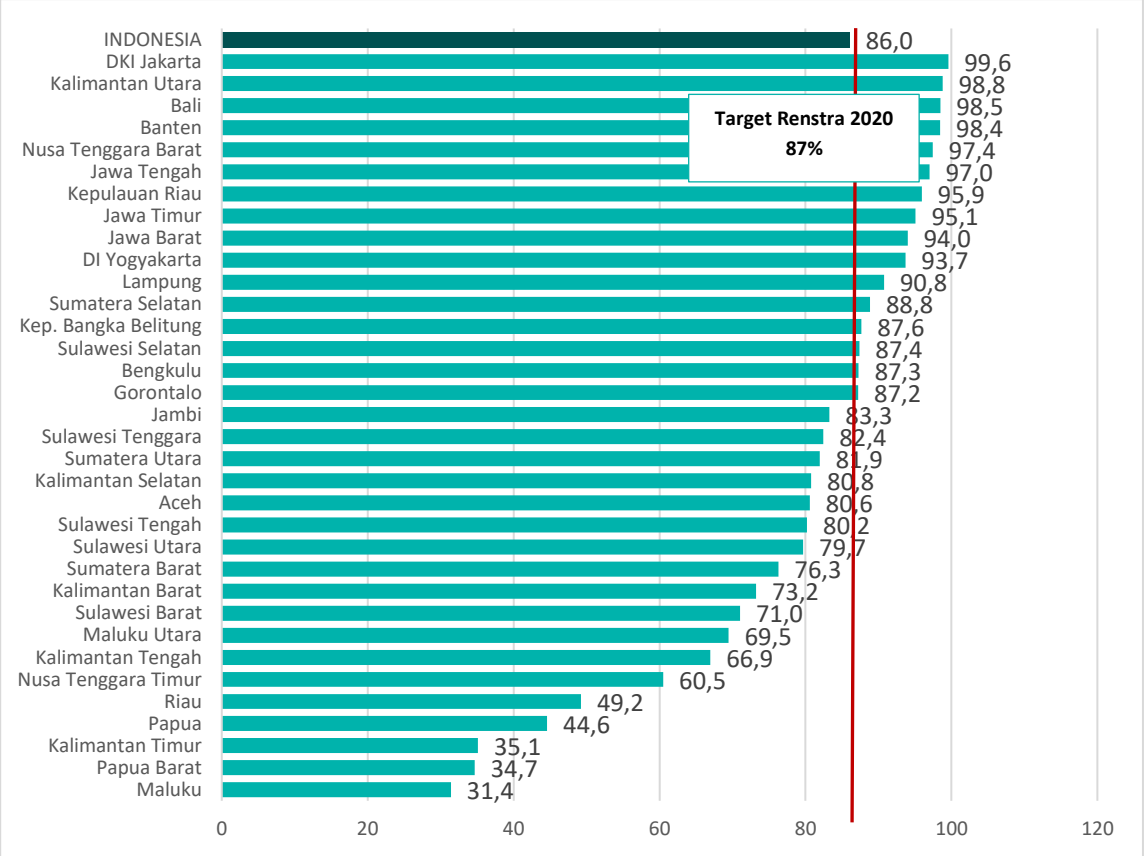

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2020 di Indonesia sebesar 89,8%. Sedangkan ibu hamil yang menjalani persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 86%. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat 3,8% persalinan yang ditolong tenaga kesehatan namun tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selisih ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 2,2%. Pada tahun tersebut, capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan sebesar 90,95% dan capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes sebesar 88,75%.

Indikator persalinan ditolong nakes di fasyankes di Indonesia pada tahun 2020 belum memenuhi target RENSTRA 2020 yaitu sebesar 86% terhadap target 87%. Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 99,6%, sedangkan Maluku memiliki capaian terendah sebesar

31,4%. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua provinsi tersebut. Provinsi dengan capaian tinggi pada umumnya berada di regional barat, sedangkan provinsi dengan capaian rendah sebagian besar berada di wilayah timur.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

a) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);
b) pemeriksaan tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
c) pemeriksaan lokhia dan cairan *per vaginam* lain;
d) pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;
e) pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana pasca persalinan;
f) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Capaian kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.12 berikut ini.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

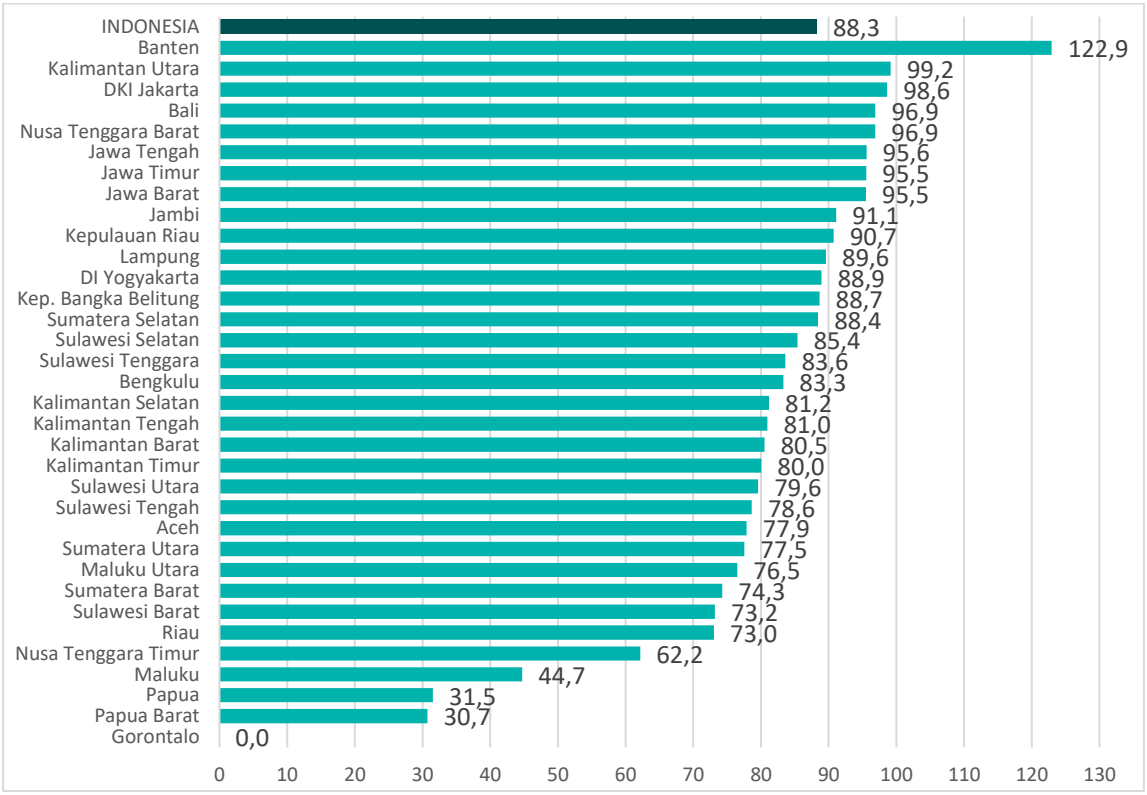

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 88,3%. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Provinsi Banten Sebesar 122,9%, diikuti oleh Kalimantan Utara dan DKI Jakarta. Sedangkan Gorontalo, Papua, dan Papua Barat memiliki capaian KF lengkap terendah.

6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase Puskesmas melaksanakan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.

Cakupan Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil didapatkan dengan menghitung puskesmas yang telah melaksanakan kelas ibu hamil dibandingkan dengan jumlah seluruh Puskesmas di wilayah kabupaten/kota. Puskesmas dikatakan telah melaksanakan kelas ibu hamil apabila telah melakukan kelas ibu hamil minimal sebanyak 4 kali.

GAMBAR 5.9
PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

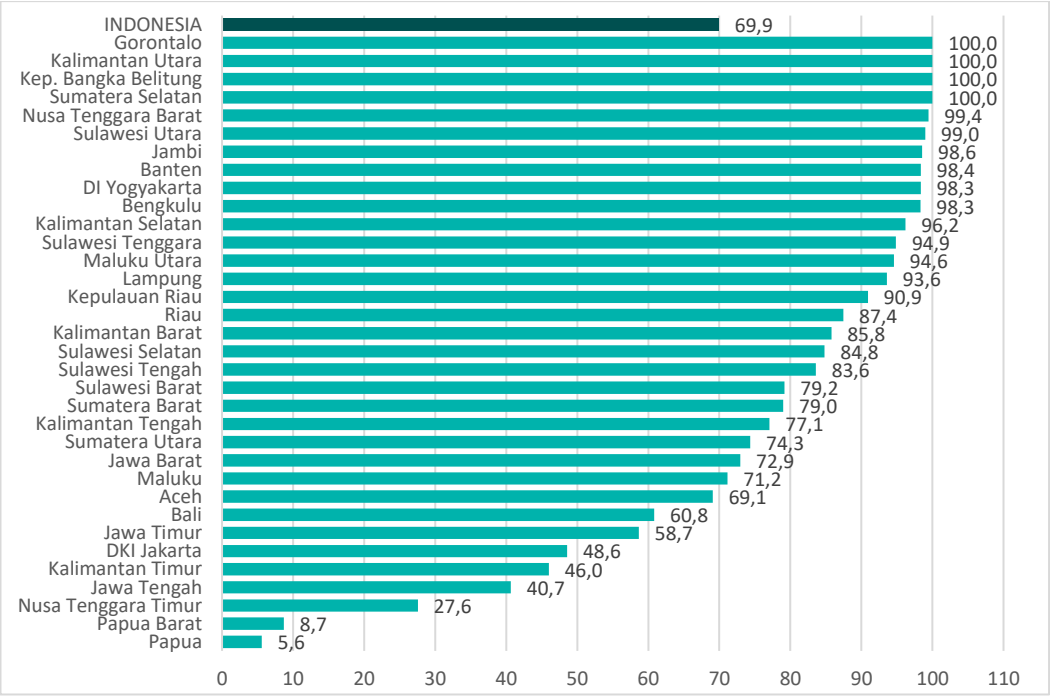

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, terdapat 69,9% puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,14%. Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kep. Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan memiliki capaian 100%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 5,6%, diikuti oleh Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI. Program ini menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam monitoring terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas.

Indikator Puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K. Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh puskesmas dengan mengundang kader dan/atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka memberikan pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.

GAMBAR 5.10
PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI
PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

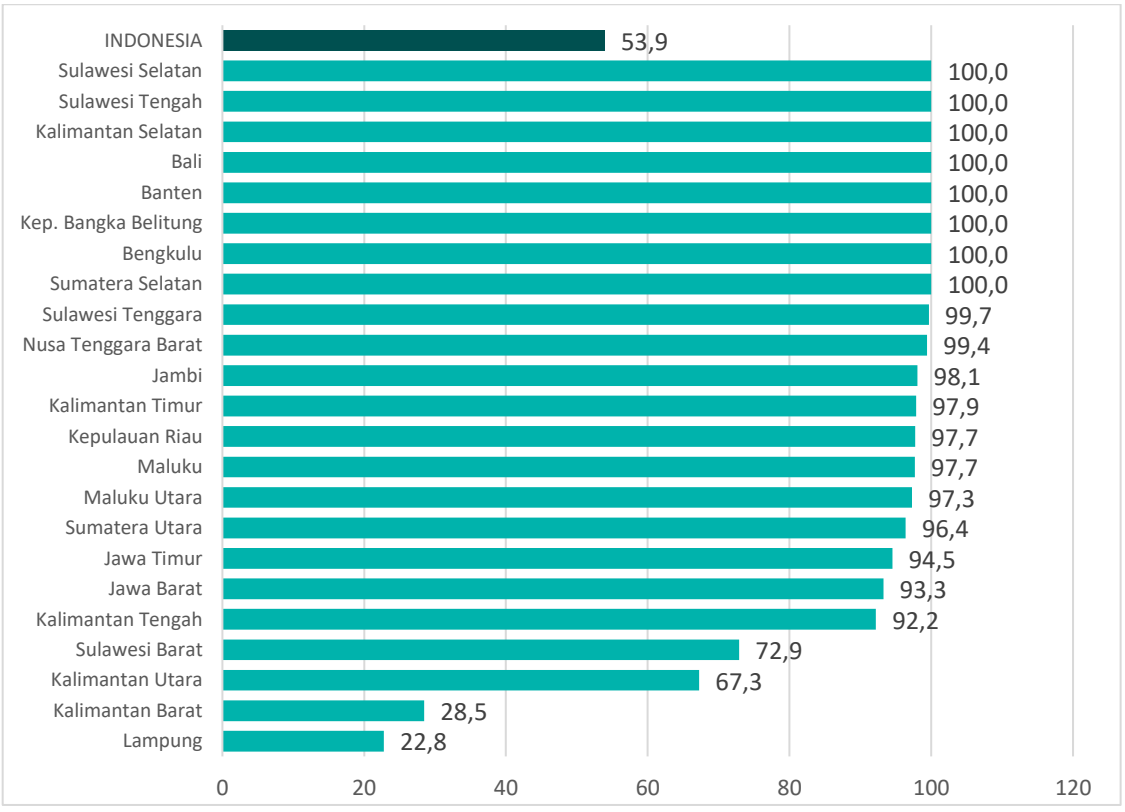

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 sebanyak 53,94% puskesmas teregistrasi telah melaksanakan orientasi P4K yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 ketika sebanyak 93,5% puskesmas telah melakuan orientasi P4K. Sebanyak delapan provinsi memiliki capaian 100% yang artinya seluruh puskesmas di wilayah tersebut telah melakukan orientasi P4K. Delapan provinsi tersebut

yaitu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Banten, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Namun demikian, terdapat 11 provinsi dengan capaian 0% pada tahun 2020.

7. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan meliputi pemberian KIE, konseling, penapisan kelayakan medis, pemberian kontrasepsi, pemasangan atau pencabutan, dan penanganan efek samping atau komplikasi dalam upaya mencegah kehamilan. Pelayanan kontrasepsi yang diberikan meliputi kondom, pil, suntik, pemasangan atau pencabutan implan, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim, pelayanan tubektomi, dan pelayanan vasektomi. KB Pascapersalinan (KBPP) adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/6 minggu setelah melahirkan. Beberapa studi menunjukkan pelayanan KB (termasuk KBPP) yang efektif dapat mengurangi kematian ibu dengan cara mengurangi kehamilan dan mengurangi kelahiran risiko tinggi.

Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan di bawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 (dua). Persentase ibu meninggal yang melahirkan berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah 33% dari seluruh kematian ibu, sehingga apabila program KB dapat dilaksanakan dengan baik lagi, kemungkinan 33% kematian ibu dapat dicegah melalui pemakaian kontrasepsi.

Menurut BKKBN, peserta KB aktif di antara Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2020 sebesar 67,6%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 63,31% berdasarkan data Profil Keluarga Indonesia,Tahun 2019.

Pada tahun 2020, kesertaan ber-KB Provinsi Bengkulu memiliki persentase tertinggi sebesar 71,3%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Jambi. Sedangkan Provinsi Papua memiliki tingkat kesertaan ber-KB terendah sebesar 24,9%, diikuti oleh Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

GAMBAR 5.11
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF DI INDONESIA TAHUN 2020

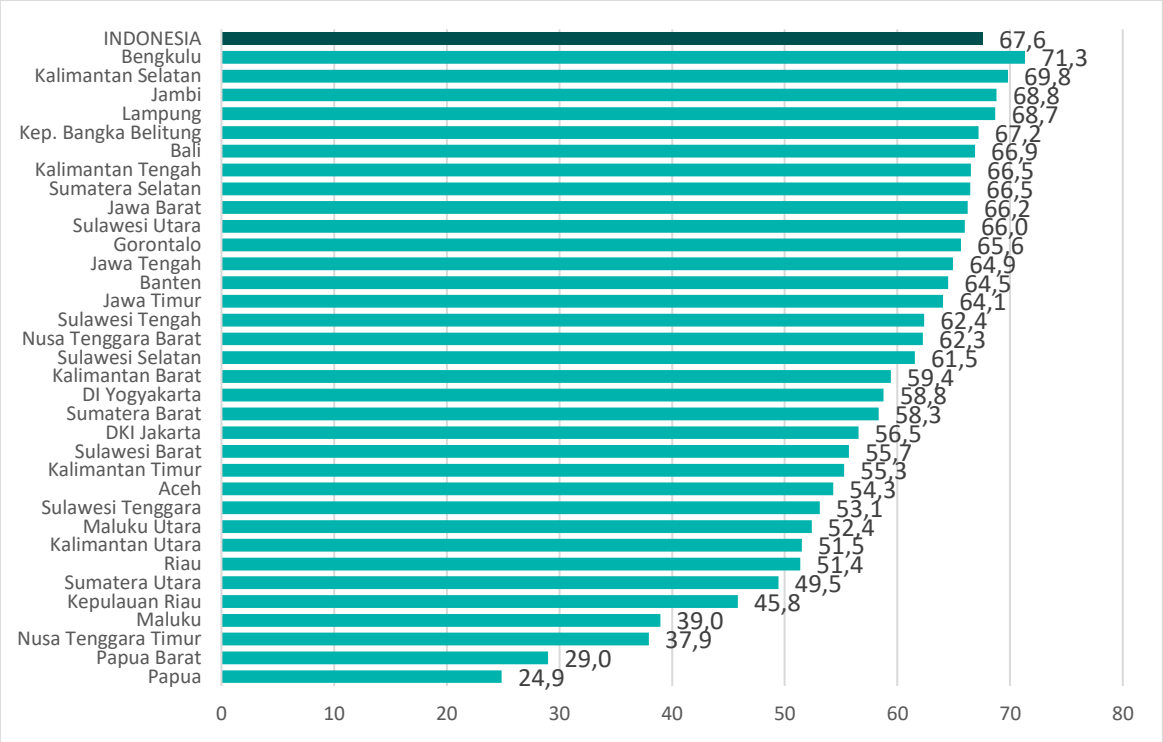

Sumber: Pendataan Keluarga, BKKBN, 2020

Pola pemilihan jenis alat kontrasepsi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan metode suntik sebesar 72,9%, diikuti oleh pil sebesar 19,4%. Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat ini termasuk metode kontrasepsi jangka pendek sehingga tingkat efektifitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan jenis kontrasepsi lainnya. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, implan, MOW dan MOP).

GAMBAR 5.12
CAKUPAN PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN TAHUN 2020

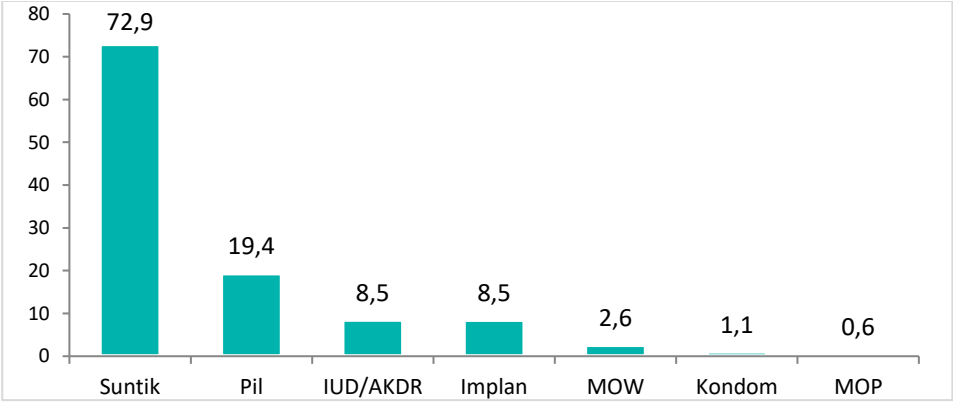

Sumber: Pendataan Keluarga, BKKBN, 2020
Keterangan: MOW = Metode Operasi Wanita
MOP = Metode Operasi Pria

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.18 berikut ini.

GAMBAR 5.13
PERSENTASE TEMPAT PELAYANAN KB DI INDONESIA
TAHUN 2020

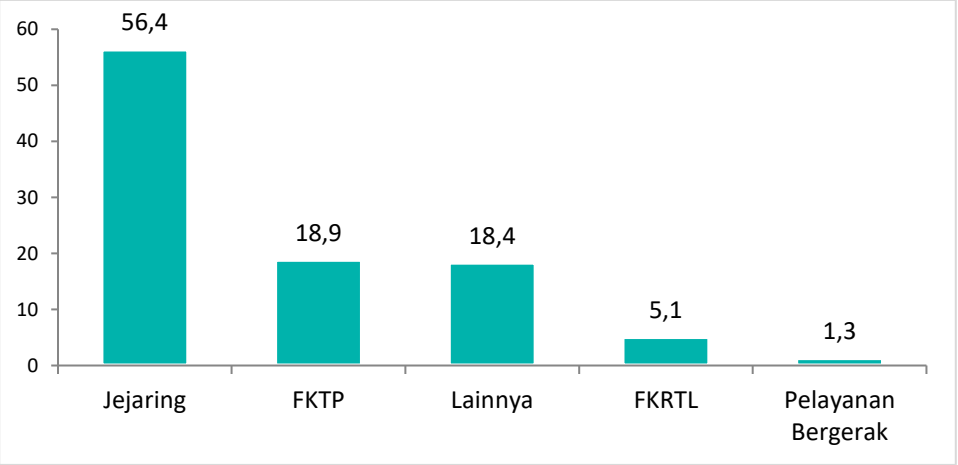

Sumber : Pendataan Keluarga, BKKBN, 2020
Keterangan: FKRTL = Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut
FKTP = Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Terdapat lima jenis tempat pelayanan KB yaitu FKRTL, FKTP, Jejaring, Pelayanan Bergerak, dan jenis tempat pelayanan KB Lainnya.

Berdasarkan tempat pelayanan tersebut PUS paling banyak dilayani oleh Jaringan/Jejaring yaitu sebesar 56,4%. Pada jenis layanan jejaring, Praktek Bidan memberikan pelayanan paling banyak yaitu sebesar 60,8% dari jumlah PUS yang dilayani. Pengguna KB yang memilih FKTP sebagai tempat pelayanan KB tertinggi berada di Provinsi Papua sebesar 63,16%. Sedangkan Provinsi DIY memiliki persentase tertinggi pada layanan FKRTL yaitu sebesar 13,28%.

8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang di lahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Selama tahun 2020 terdapat 2.404.754 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 6.094 (0,25%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Papua Barat sebesar 2,56%,

Kepulauan Riau sebesar sebesar 2,32% dan Papua sebesar 0,88%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 30.b

GAMBAR 5.14
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

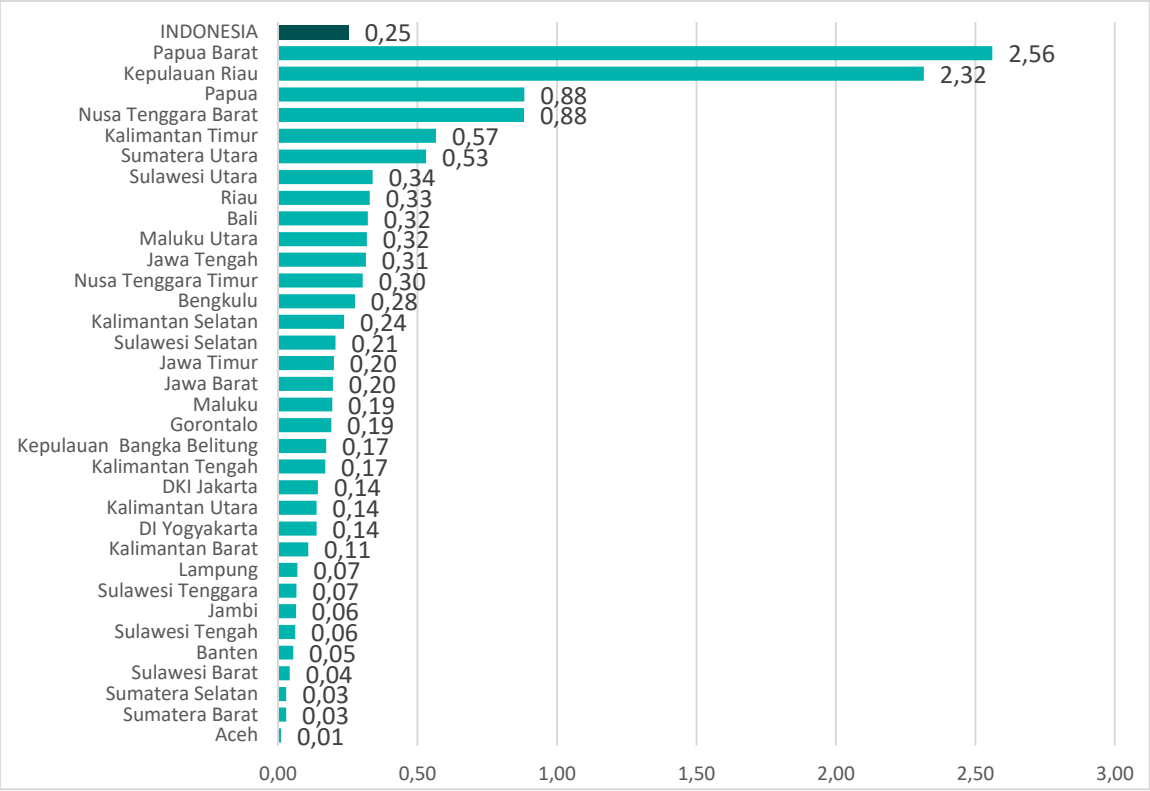

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

b. Hepatitis B

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang Positif Hepatitis B. Sejak tahun 2013 telah dilakukan Kegiatan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas) dan Jaringannya.

Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah dengan menggunakan tes cepat/*Rapid Diagnostic Test* (*RDT*) HBsAg. HBsAg (Hepatitis B *Surface Antigen*) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. Bayi yang lahir dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi aktif sesuai program Nasional (HB0, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum antibodi spesifik Hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan secara nasional mulai tahun 2015. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tiap tahun terdapat kenaikan target yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator dapat tercapai setiap tahunnya.

GAMBAR 5.15
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

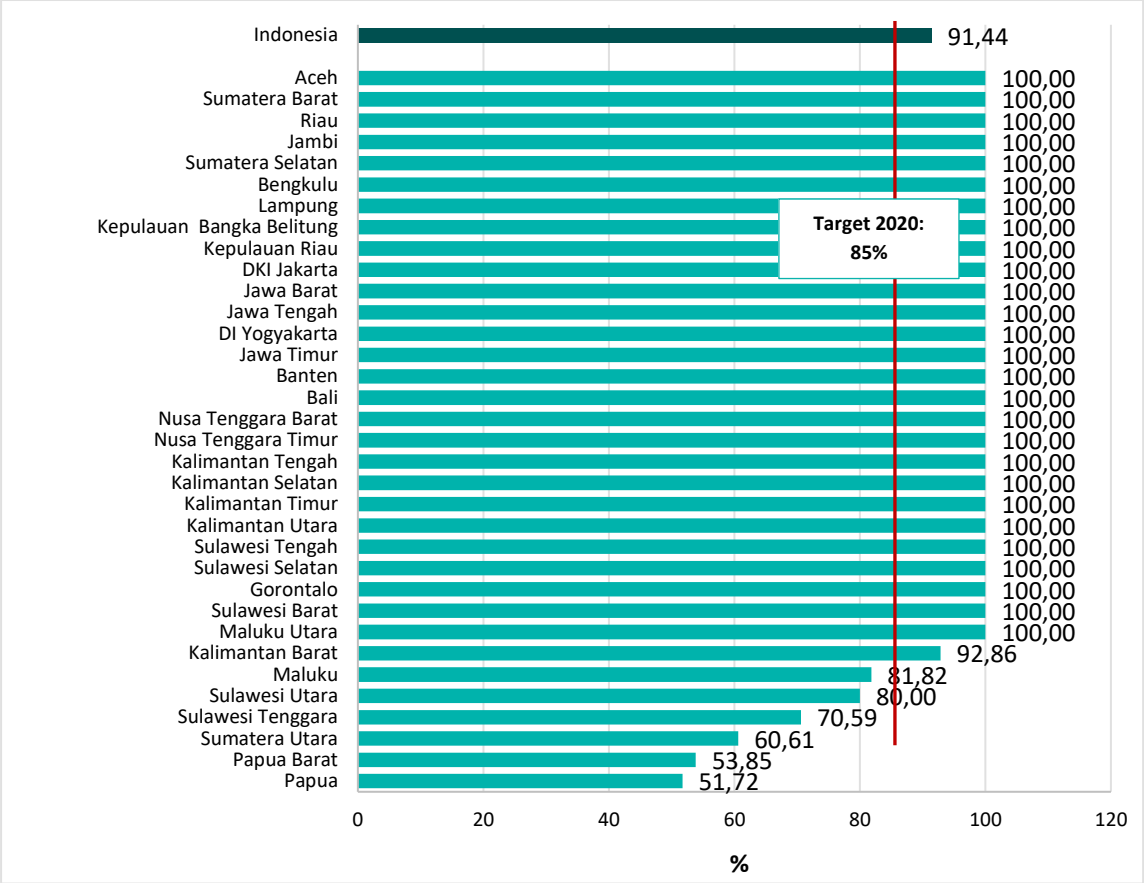

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Target Kabupaten/kota yang melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B tahun 2020 sebanyak 85% (437 Kabupaten/kota). Tahun 2020 deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 470 kabupaten/kota atau sebesar 91,44 yang tersebar di 34 Provinsi. Terdapat 28 Provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi (100%) sebesar 27 provinsi sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Provinsi Papua (51,72%), dan Papua Barat (53,85%).

GAMBAR 5.16
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

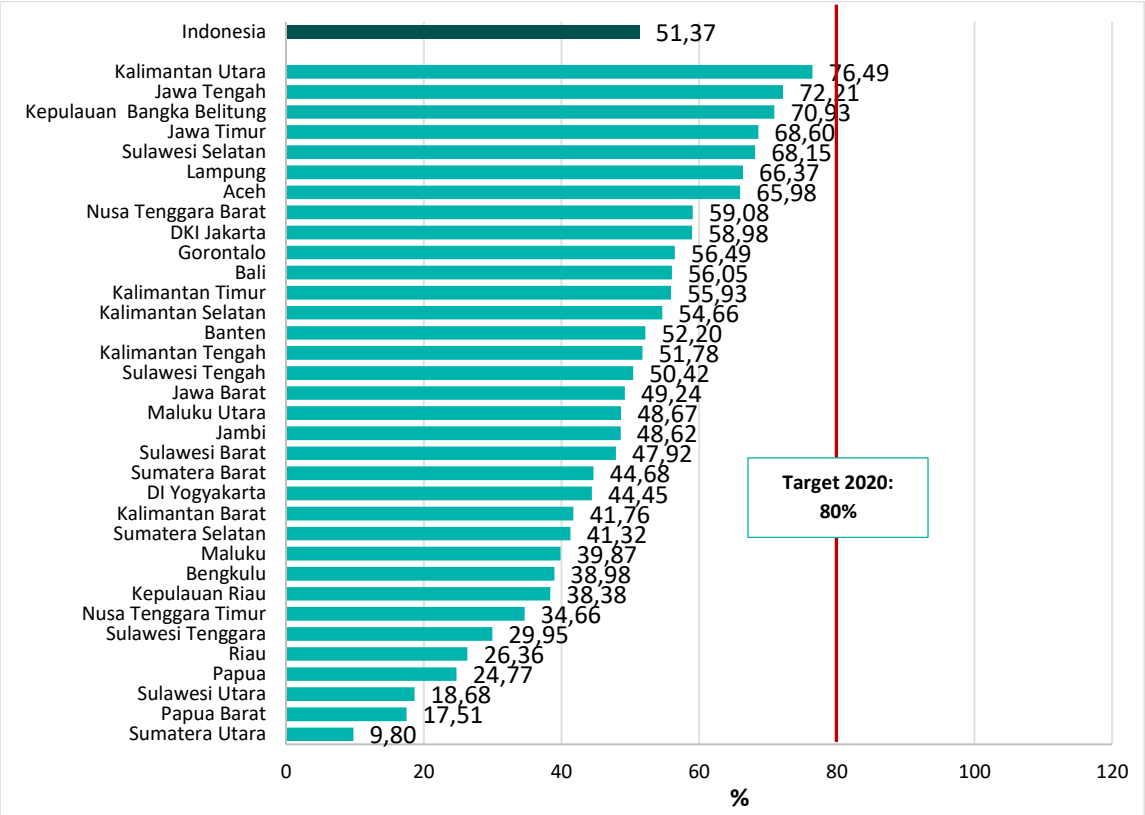

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Presentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2020 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.22. Pada tahun 2020 sebesar 51,37% ibu hamil melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dari jumlah sasaran ibu hamil tahun 2020 sebanyak 5,221,784 ibu hamil. Capaian ini masih belum mencapai target, yaitu Deteksi Dini Hepatitis B minimal 80% Ibu Hamil diperiksa terintegrasi dengan HIV dan Sifilis (*Triple* Eliminasi). Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu 76,49% (Kalimantan Utara) sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Sumatera Utara (9,80%).

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa Hepatitis B dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg tahun 2020 yaitu sebanyak 2.682.297 orang atau sebanyak 51,37% dari ibu hamil yang menjadi sasaran. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.540.158 atau 48,25% ibu hamil yang terjangkau oleh pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan RDT HbsAg tahun 2020 menemukan sebanyak 45.108 atau 1,68% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5.17
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

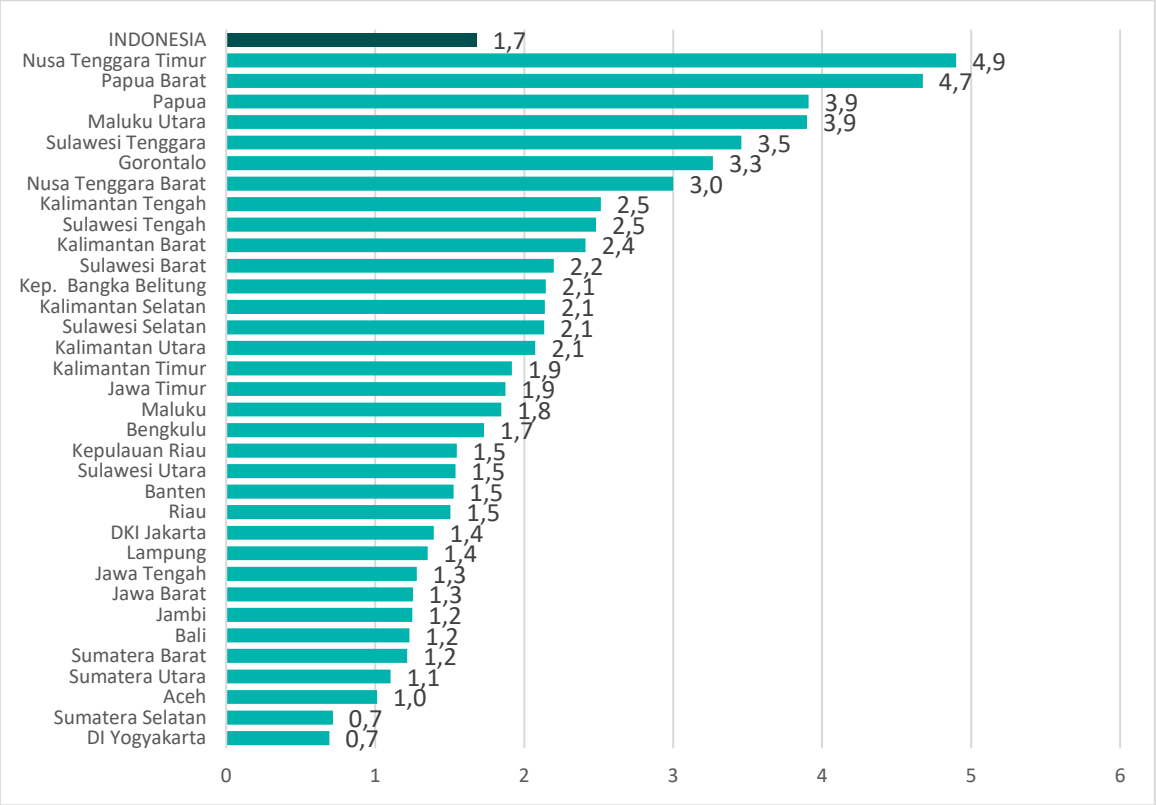

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 1,7% ibu hamil yang menunjukkan hasil pemeriksaan HBsAg reaktif. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu 1,82% ibu hamil yang dinyatakan reaktif.

Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase tertinggi sebesar 4,9%, diikuti oleh provinsi Papua Barat dan Papua. Ketiga provinsi tersebut juga memuncaki persentase tertinggi pada tahun 2019. Data/informasi terkait penyakit Hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 30.c.

B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

GAMBAR 5.18
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) DI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2020

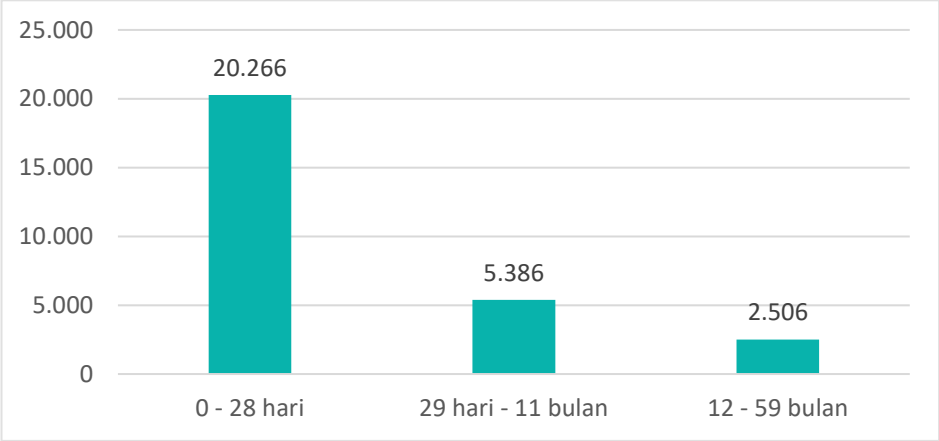

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Direktorat Kesehatan Keluarga melalui komdat.kesga.kemkes.go.id, pada tahun 2020, dari 28.158 kematian balita, 72,0% (20.266 kematian) diantaranya terjadi pada masa neonatus (Gambar 5.25). Dari seluruh kematian neonatus yang dilaporkan, 72,0% (20.266 kematian) terjadi pada usia 0-28 hari. Sementara, 19,1% (5.386 kematian) terjadi pada usia 29 hari – 11 bulan dan 9,9% (2.506 kematian) terjadi pada usia 12 – 59 bulan.

GAMBAR 5.19
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2020

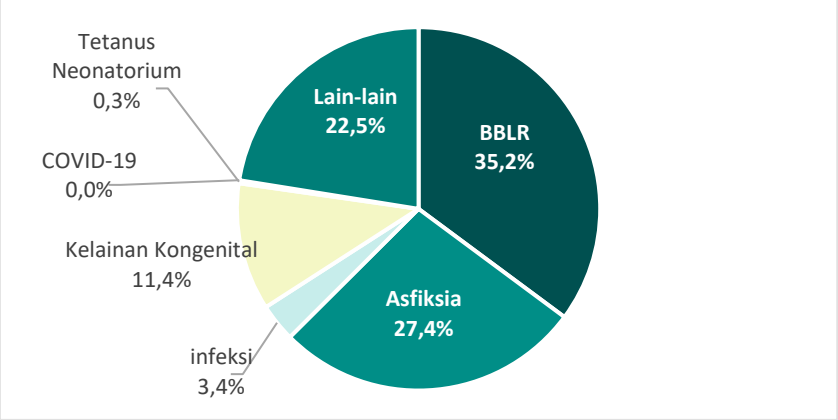

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, penyebab kematian neonatal terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di antaranya asfiksia, infeksi, kelainan kongenital, tetanus neonatorium, dan lainnya.

GAMBAR 5.20
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2020

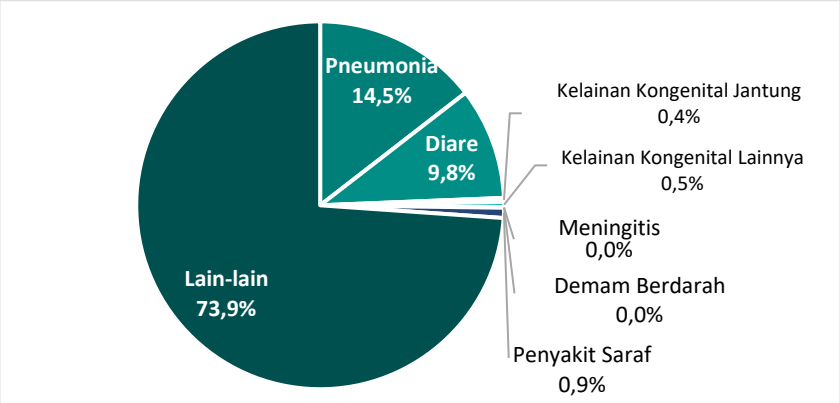

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Penyakit infeksi menjadi penyumbang kematian pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan. Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2020, pneumonia dan diare masih menjadi masalah utama yang meyebabkan 73,9% kematian (pneumonia) dan 14,5% kematian (diare). Penyebab kematian lain di antaranya adalah kelainan kongenital jantung, kelainan kongenital lainnya, meningitis, demam berdarah, penyakit saraf, dan lainnya.

GAMBAR 5.21
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2020

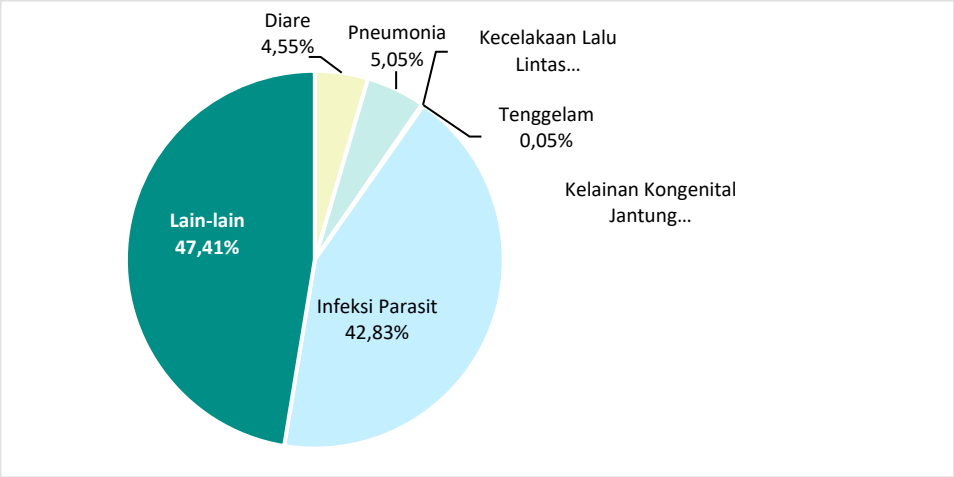

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare. Penyebab kematian lain di antaranya pneumonia, kelainan kongenital jantung, kecelakaan lalu lintas, tenggelam, infeksi parasit, dan lainnya.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalan kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, pelayanan kesehatan pada anak sekolah, dan pelayanan kesehatan peduli remaja.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh 25 provinsi kepada Direktorat Gizi Masyarakat, dari tahun 2019 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya, didapatkan sebanyak 111.827 bayi (3,4%) memiliki berat badan lahir rendah (BBLR). Sedangkan menurut hasil Riskesdas tahun 2018, dari 56,6% balita yang memiliki catatan berat lahir, sebanyak 6,2% lahir dengan kondisi BBLR. Kondisi bayi BBLR diantara disebabkan karena kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan pertambahan usian. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk stunting dan mengidap penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung saat dewasa. Rincian data mengenai bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dapat dilihat pada Lampiran 33.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

GAMBAR 5.22
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
TAHUN 2009-2020

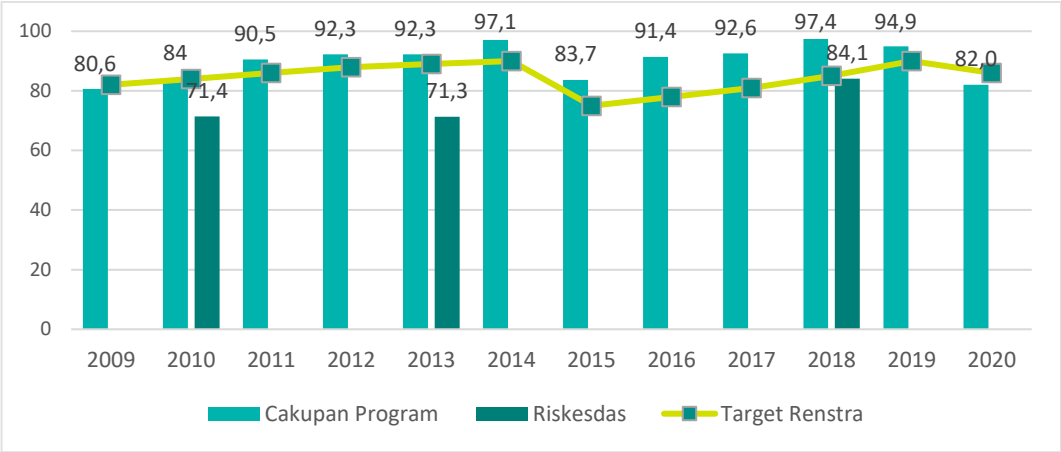

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Riskesdas, Kemenkes RI

Capaian KN1 Indonesia pada tahun 2020 sebesar 82,0%, lebih kecil dari tahun 2019 yaitu sebesar 94,9% (Gambar 5.29). Namun capaian ini belum memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 86%. Sejumlah 21 provinsi (61,76%) telah memenuhi target tersebut. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.30.

GAMBAR 5.23
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

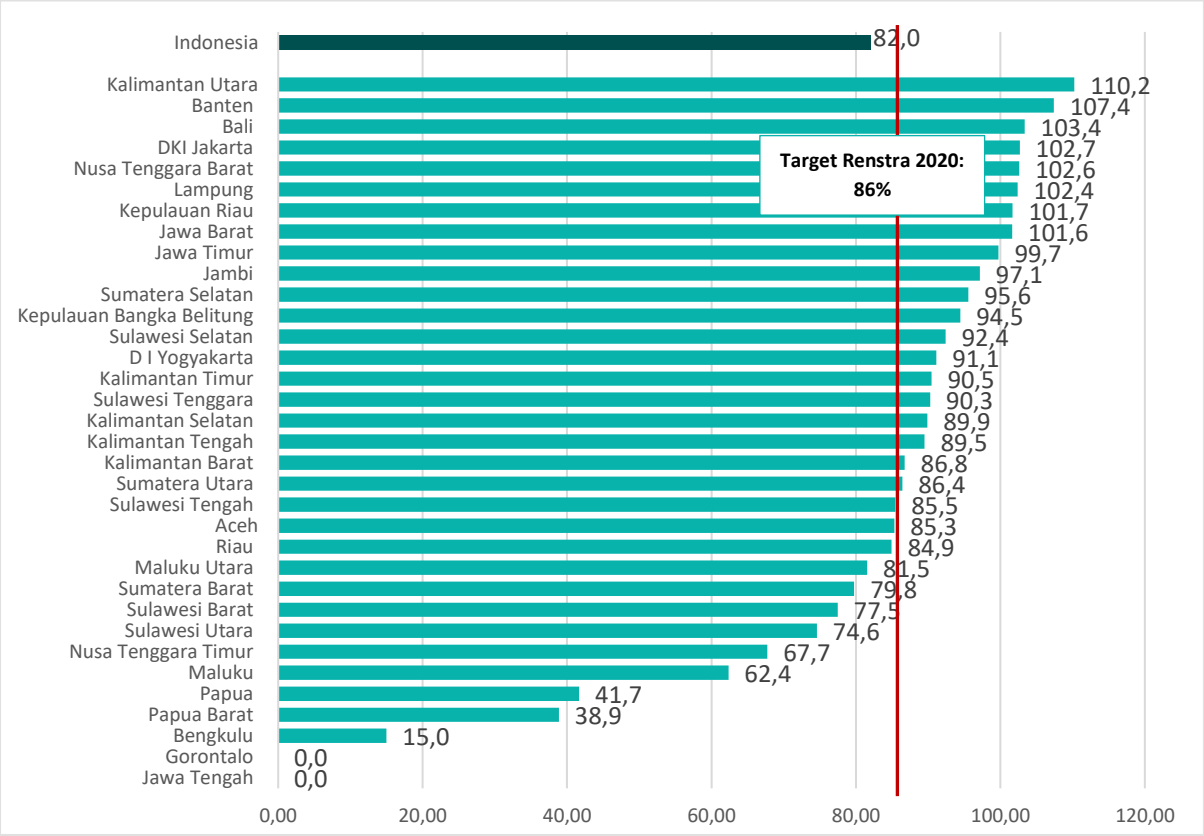

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan KN1 antar provinsi yang berkisar antara 15,0% di Bengkulu dan 110,2% di Kalimantan Utara. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil yang didapatkan.

Sedangkan cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN lengkap), yaitu cakupan pelayanan Kunjungan Neonatal minimal tiga kali sesuai standar, pada tahun 2020 sebesar 82,0%. Delapan provinsi cakupannya mencapai 100% yaitu Kalimantan Utara, Banten, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. Sedangkan provinsi dengan cakupan terendah di Bengkulu (15,0%), Papua Barat (38,9%) dan Papua (41,7%). Rincian data cakupan KN1 dan KN lengkap dapat dilihat di Lampiran 34.

2. Imunisasi

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost-effective* serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan *herd immunity*. Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/ meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Campak, Rubela, dan radang paru-paru.

Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017. Selanjutnya akan dibahas program imunisasi yang dilakukan pemerintah :

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak rubela. Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan rekomendasi ahli, ada tambahan antigen yang diberikan pada saat usia 0-11 bulan yaitu imunisasi *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (*PCV*) dan imunisasi *japanese encephalitis*. Namun,

implementasi introduksi vaksin baru tersebut belum berlaku secara nasional sehingga tidak diperhitungkan sebagai cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi.

GAMBAR 5.24
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2011-2020

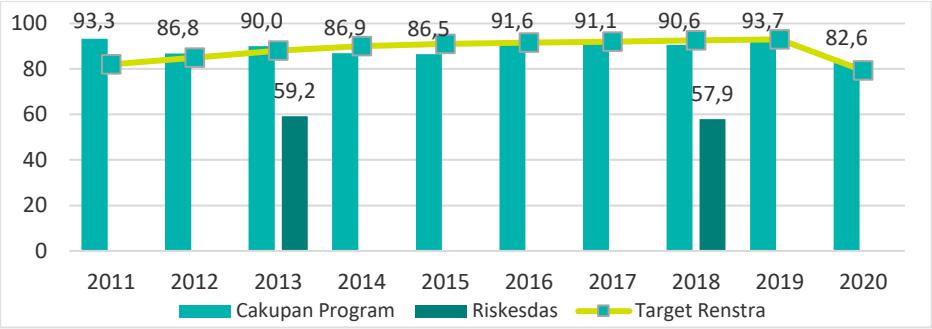

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Litbangkes, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional sebesar 83,3% (Gambar 5.31). Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu sebesar 92,9%. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2020 merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap yang terendah dalam kurun waktu 2011 – 2020 sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Sedangkan apabila dilihat menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang dapat mencapai target Renstra tahun 2020 yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Jambi.

GAMBAR 5.25
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

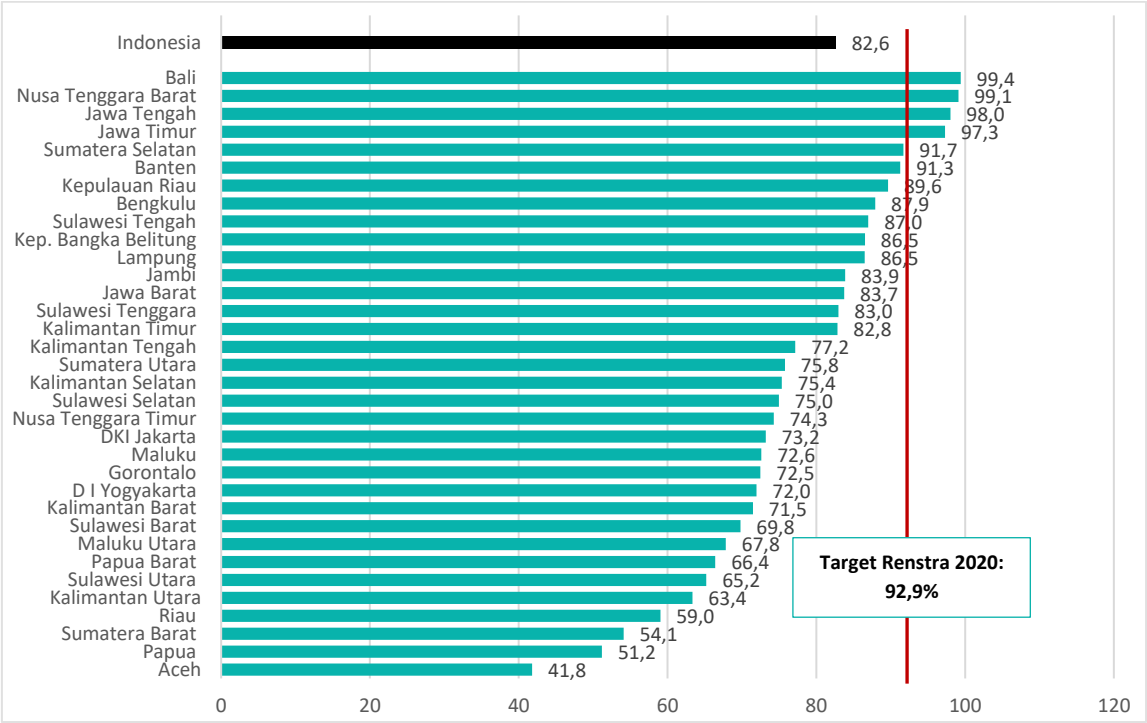

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Pada Gambar 5.32 di atas, diketahui bahwa provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah di Provinsi Bali (99,4%), Nusa Tenggara Barat (99,1%), dan Jawa Tengah (98,8%). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah yaitu Aceh (41,8%). Rincian data mengenai imunisasi dasar pada bayi tahun 2020 terdapat pada Lampiran 39.a.

b. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Sebelum anak berusia satu tahun, imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan secara lengkap sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal dengan efek simpang yang ditimbulkan seminimal mungkin. Meskipun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan *drop out* (*DO*) imunisasi. Angka *drop-out* ini menjadi indikator pemanfaatan layanan imunisasi.

Untuk mengetahui angka *drop-out*, dapat dilakukan penghitungan melalui *drop-out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau *drop-out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1. Angka *drop-out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3 terhadap cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1. Sedangkan, angka *drop-out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi Campak Rubela 1 terhadap cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1. Pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka *drop-out* <5% sehingga angka *drop-out* dari DPT-HB-Hib 1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%.

Batas maksimal angka *drop-out* tersebut telah berhasil dipenuhi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Angka *drop out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 (sebelum tahun 2017 masih imunisasi Campak saja) menunjukkan kecenderungan penurunan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang asumsinya semakin banyak bayi yang mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Namun, pada tahun 2017 terjadi peningkatan angka *drop-out* menjadi 4,1% akibat semakin banyaknya kelompok anti vaksin yang menolak mengimunisasikan anaknya sehingga cakupan imunisasi menurun hampir di semua antigen. Angka *drop out* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 pada tahun 2018 kembali dapat ditekan sehingga menurun menjadi 2,5%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 angka *drop-out* kembali meningkat, menjadi 4,2% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena vaksin campak rubela merupakan vaksin yang baru masuk ke dalam imunisasi rutin sehingga masih ada keraguan dari orangtua untuk memberikan vaksin campak rubela kepada anaknya. Namun, angka *drop out* ini masih dalam kategori baik karena masih di bawah 5%. Tren dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

GAMBAR 5.26
ANGKA *DROP OUT* IMUNISASI DPT/HB/HiB1-CAMPAK PADA BAYI
TAHUN 2009-2020

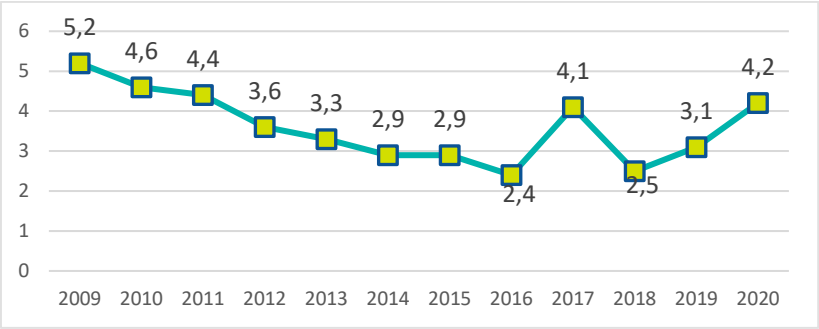

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Rincian data lengkap mengenai angka *drop out* cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 dan imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 pada tahun 2018-2020 dapat dilihat di Lampiran 39.b.

c. Desa/Kelurahan *UCI* (*Universal Child Immunization*)

Pada tahun 2020 cakupan desa *UCI* di Indonesia sebesar 59,2%. Ada dua provinsi yang telah mencapai 100% cakupan desa/kelurahan *UCI* yaitu Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sampai dengan bulan Mei 2021 terdapat 8 provinsi yang belum mengirimkan data *UCI*. Rincian lengkap mengenai cakupan desa/kelurahan *UCI* pada tahun 2020 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 37.

GAMBAR 5.27
CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

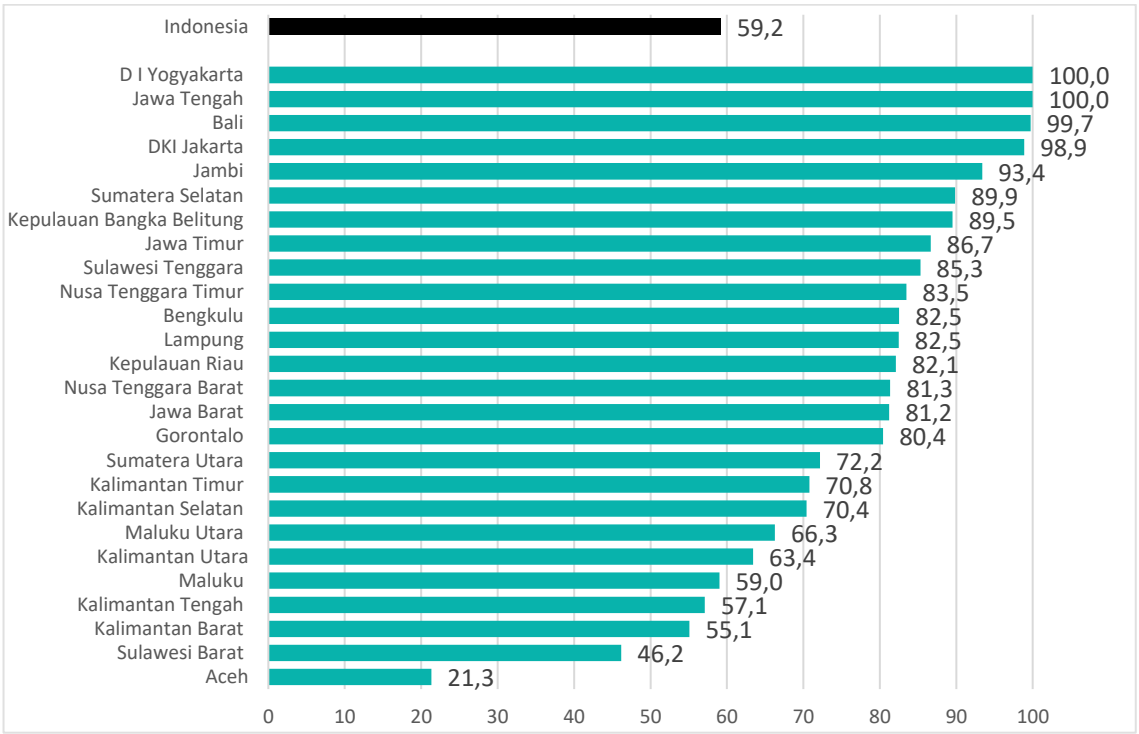

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

d. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target 78% pada tahun 2020.

GAMBAR 5.28
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2015-2020

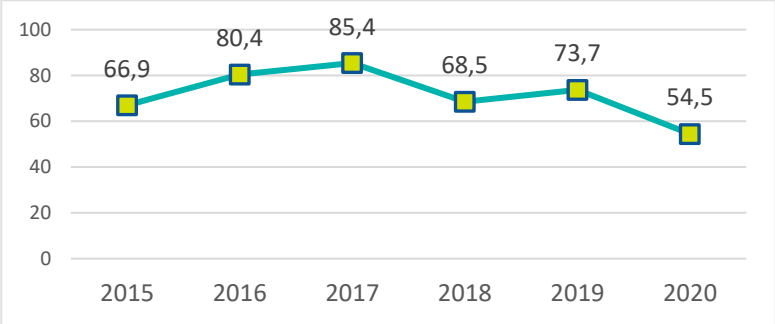

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 72,8%. Untuk capaian pada tahun 2020, terdapat 54,5% kabupaten/kota yang telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap (Gambar 5.37).

GAMBAR 5.29
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

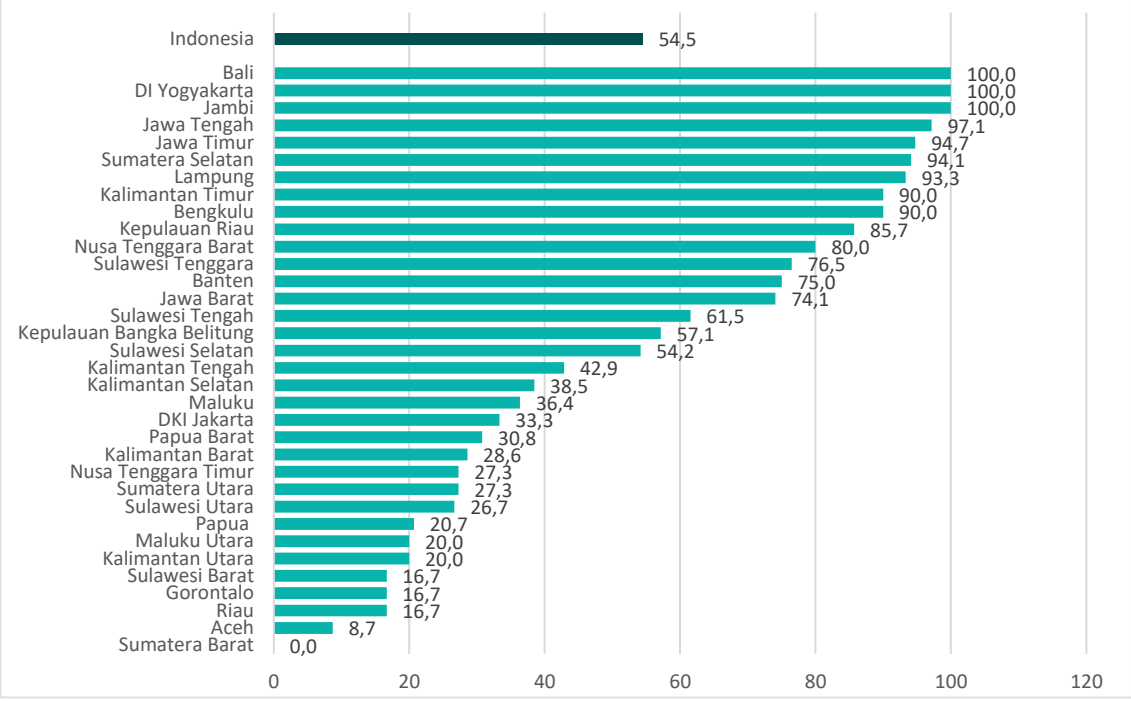

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Pada Gambar 5.38 diketahui bahwa hanya ada 3 provinsi yang 100% kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi yaitu Provinsi Bali, DI Yogyakarta dan Jambi. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Sumatera Barat, dimana tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang dapat mencapai minimal 80% cakupan imunisasi dasar lengkap. Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 39.c.

e. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (bawah dua tahun) diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan agar tetap tinggi sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi memerlukan dosis lanjutan (*booster*) untuk meningkatkan kekebalannya, salah satunya melalui pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan 1 dosis DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.30
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

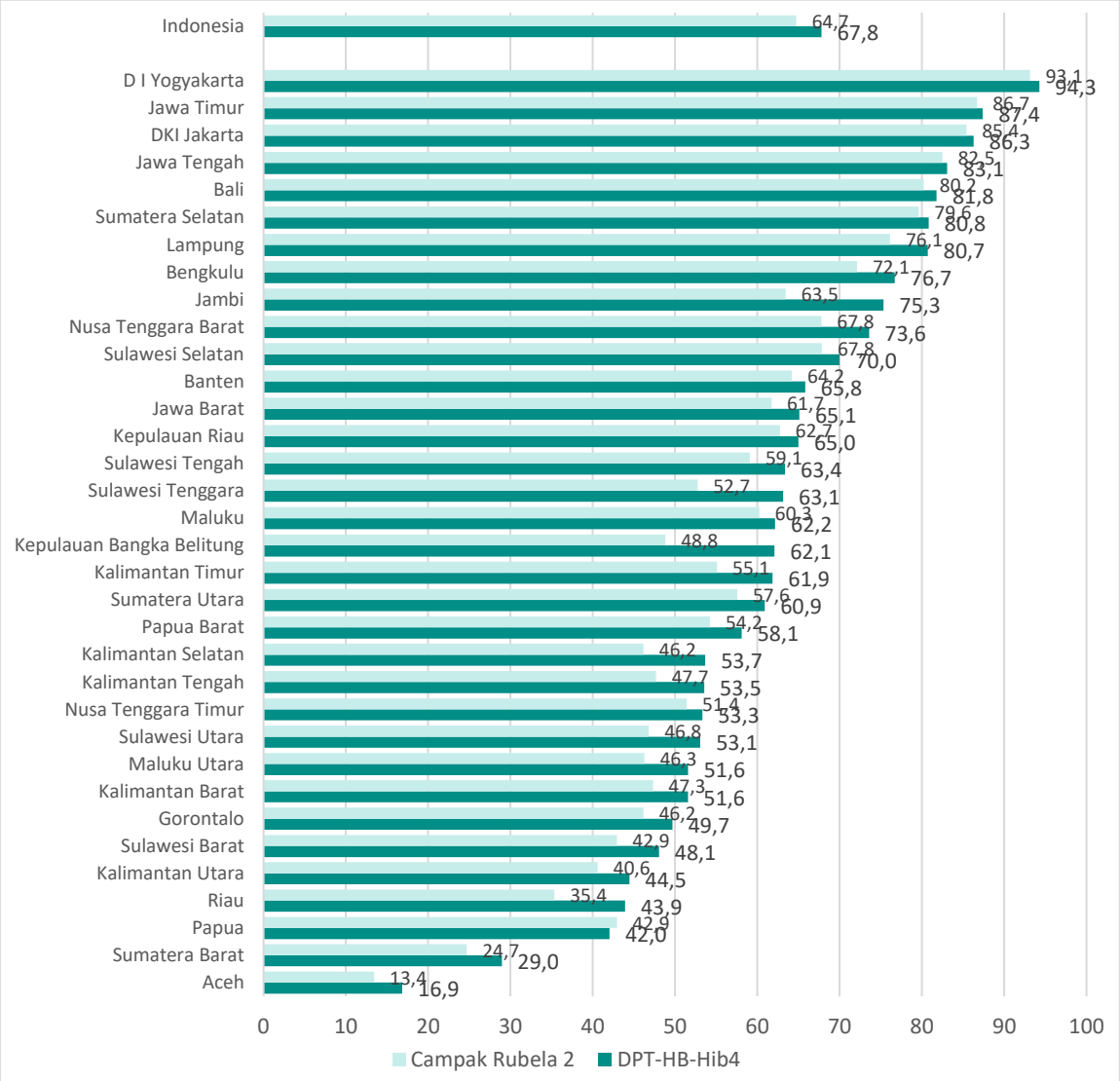

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2020 secara nasional adalah 67,8%, sedangkan cakupan imunisasi Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2020 sebesar 64,7%. Apabila dilihat menurut provinsi, cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 sangat bervariasi, dimana sebagian besar provinsi belum mencapai target tahun 2020. Adapun provinsi dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 tahun 2020 terendah adalah Provinsi Aceh. Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan. DPT-HB-HIB (4) dan campak/MR (2) pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 40.a.

f. Imunisasi Anak Sekolah

Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), juga

dilakukan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah. Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS antara lain Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi Human Papilloma Virus (HPV), ada tambahan pemberian imunisasi HPV pada kegiatan BIAS. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada BIAS diberikan pada anak usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), 2 (Td) dan 5 (Td) SD/MI/sederajat. Pelaksanaan BIAS pada masa pandemi COVID-19 sangat terdampak dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Adapun cakupan imunisasi pada pelaksanaan BIAS tahun 2020 adalah sebagai berikut: 46,4% untuk cakupan imunisasi Campak Rubela dan 41,9% untuk cakupan imunisasi DT pada anak usia kelas 1 SD/MI/sederajat; 41,6% untuk cakupan imunisasi Td pada anak usia kelas 2 SD/MI/sederajat; serta 43,2% untuk cakupan imunisasi Td pada anak usia kelas 5 SD/MI/sederajat. Rincian cakupan imunisasi anak sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 40.b.

3. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

GAMBAR 5.31
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

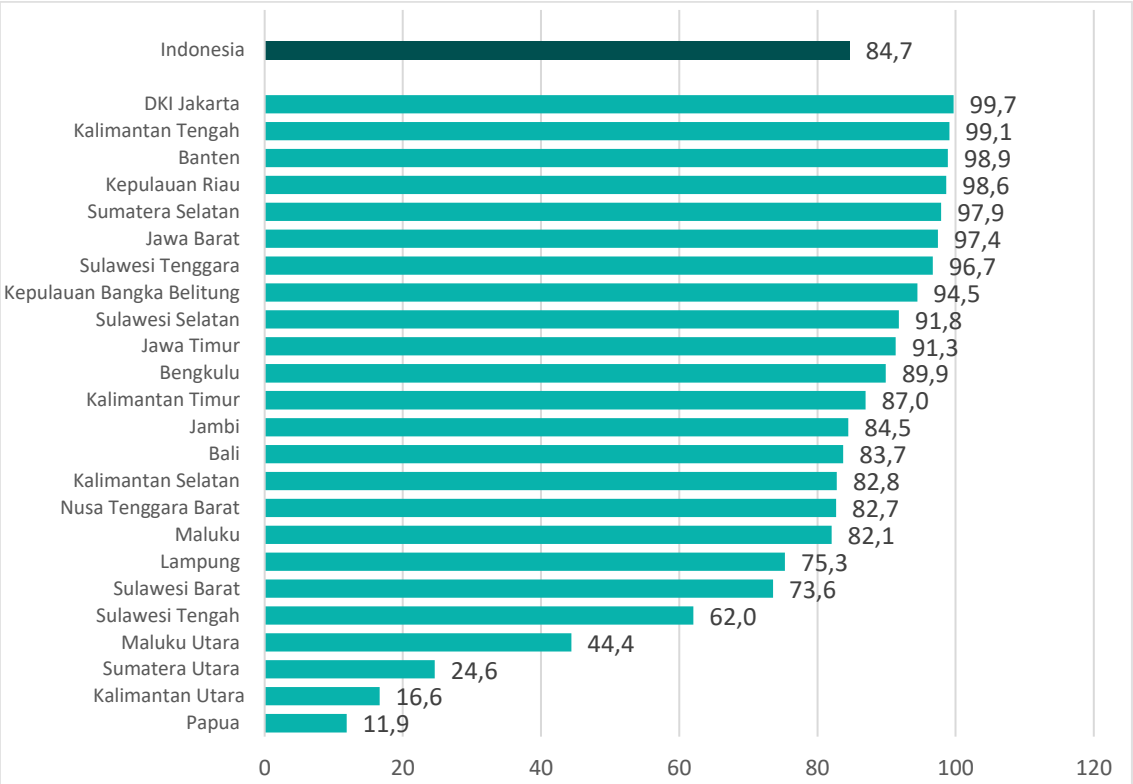

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Cakupan sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 84,7% (Gambar 5.40). Terdapat dua provinsi yang dengan cakupan tertinggi SD/MI telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu DKI Jakarta dan Kalimantan Tengah. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua (11,9%), Kalimantan Utara (16,6%), dan Sumatera Utara (24,6%). Masih ada sepuluh provinsi yang belum mengumpulkan data, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.

GAMBAR 5.32
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

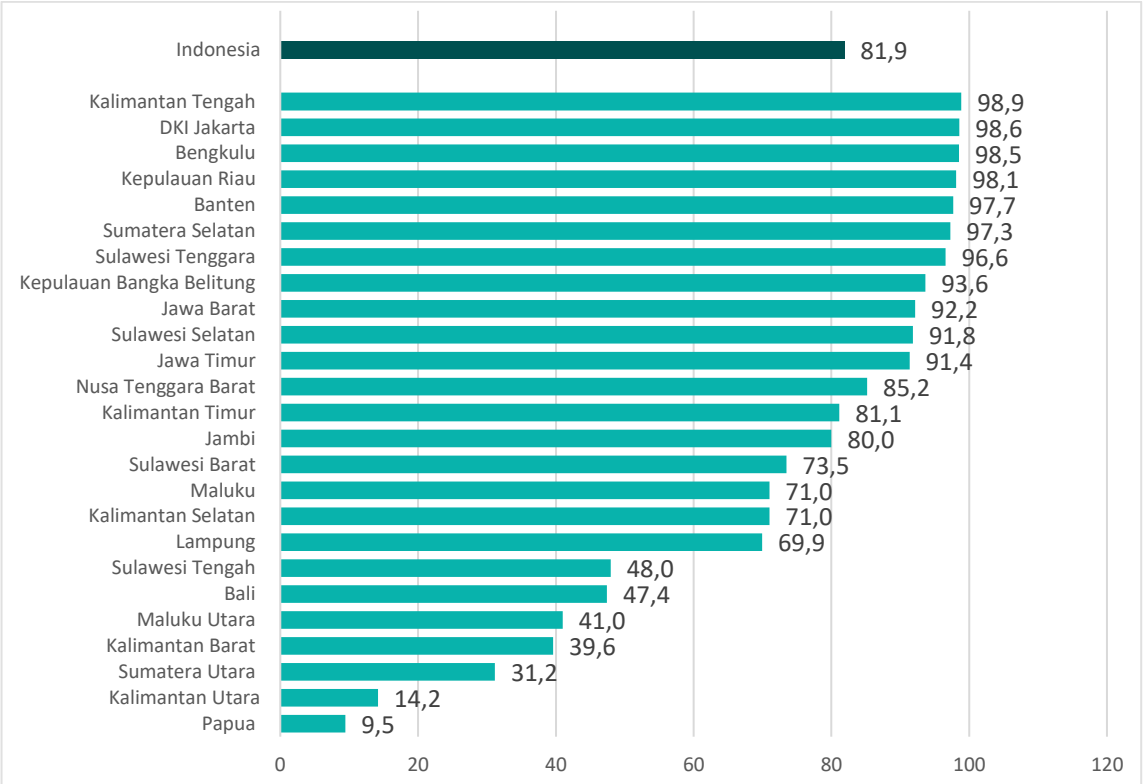

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Cakupan sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 81,9% (Gambar 5.41). Ada empat provinsi yang cakupan pelayanan kesehatan sekolah SMP/MTs tergolong cukup tinggi yaitu Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua (9,5%), dan Kalimantan Utara (14,2%).

Terdapat sembilan provinsi yang belum mengumpulkan data, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, D I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat.

GAMBAR 5.33
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

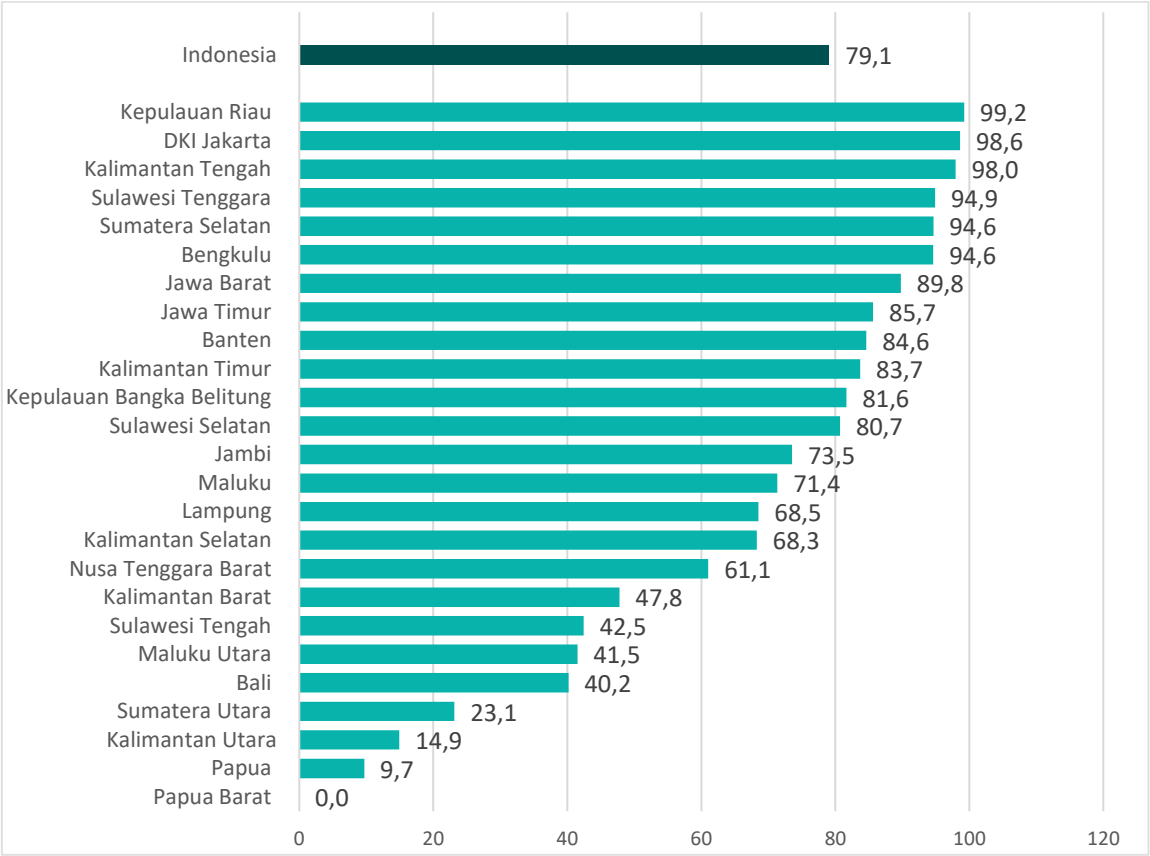

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Cakupan sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2020 adalah 79,1% (Gambar 5.41). Cakupan tertinggi sekolah SMA/MA telah melakukan pelayanan kesehatan yaitu di Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua Barat (0,0%), Papua (9,7%) dan Kalimantan Utara (14,9%). Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 45.

C. GIZI

Pada sub bab gizi ini akan dibahas terkait status gizi balita dan upaya pencegahan serta penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK dan balita gizi kurang.

1. Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas standar World Health Organization (WHO, 2005) dan telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa status gizi balita dapat

diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB).

Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) meliputi kategori berat badan sangat kurang dan berat badan kurang. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase berat badan sangat kurang pada balita usia 0-23 bulan (baduta) di Indonesia adalah 3,8%, sedangkan persentase berat badan kurang adalah 11,4%. Pada balita usia 0-59 bulan, persentase berat badan sangat kurang adalah 3,9%, sedangkan persentase berat badan kurang adalah 13,8%.

Berdasarkan hasil data surveilans gizi tahun 2020 pada kegiatan pemantauan pertumbuhan yang di *entry* kedalam aplikasi e-PPBGM, baduta dengan pengukuran indeks Berat Badan menurut Umur yang di *entry* sebanyak 49% dari sasaran baduta yang ada. Dari sasaran baduta di entry tersebut didapatkan sebanyak 58.425 (1,3%) baduta dengan berat badan sangat kurang dan sebanyak 248.407 (5,4%) baduta dengan berat badan kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada baduta adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali.

GAMBAR 5.34
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

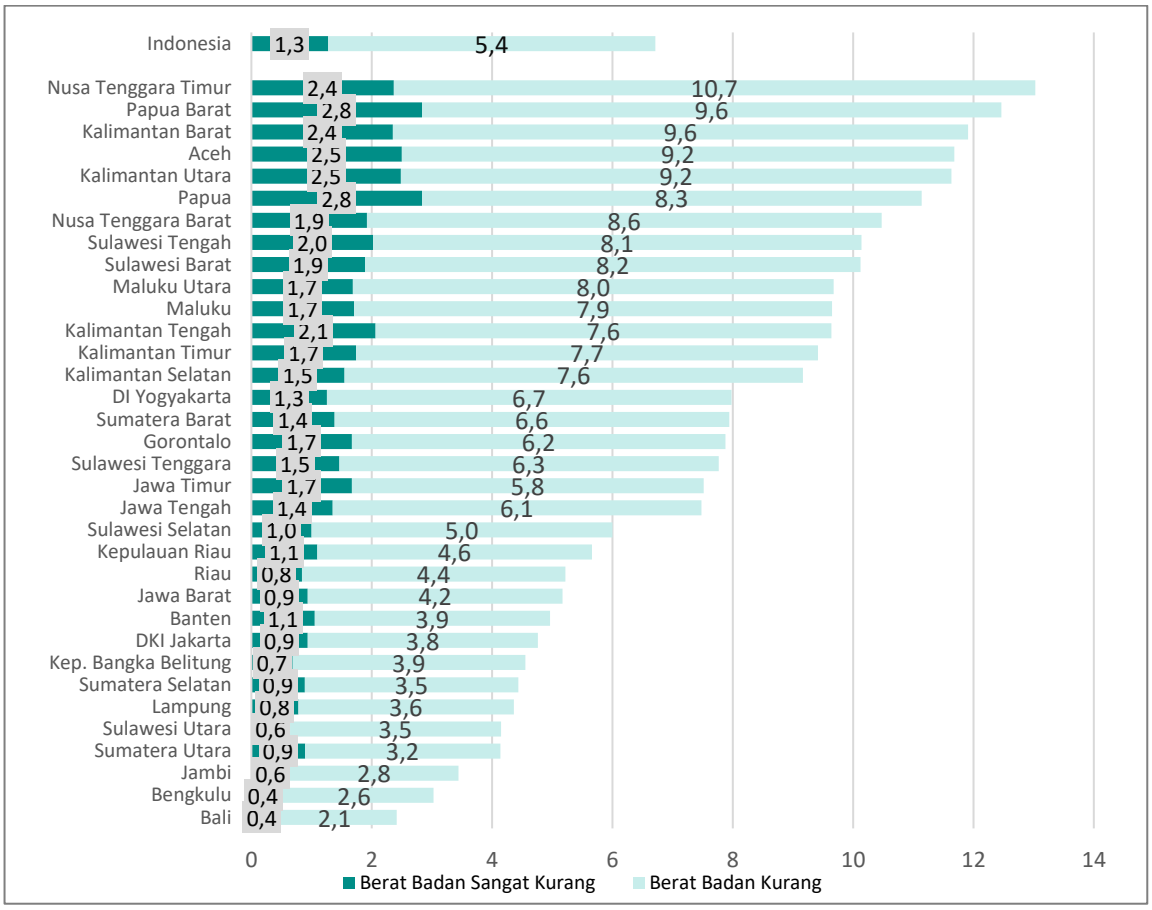

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Balita dengan pengukuran indeks Berat Badan menurut Umur yang di *entry* sebanyak 49,6% dari sasaran balita yang ada. Dari sasaran balita di *entry* tersebut didapatkan sebanyak 160.712 (1,4%) balita dengan berat badan sangat kurang dan sebanyak 779.139 (6,7%) balita dengan berat badan kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali.

GAMBAR 5.35
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

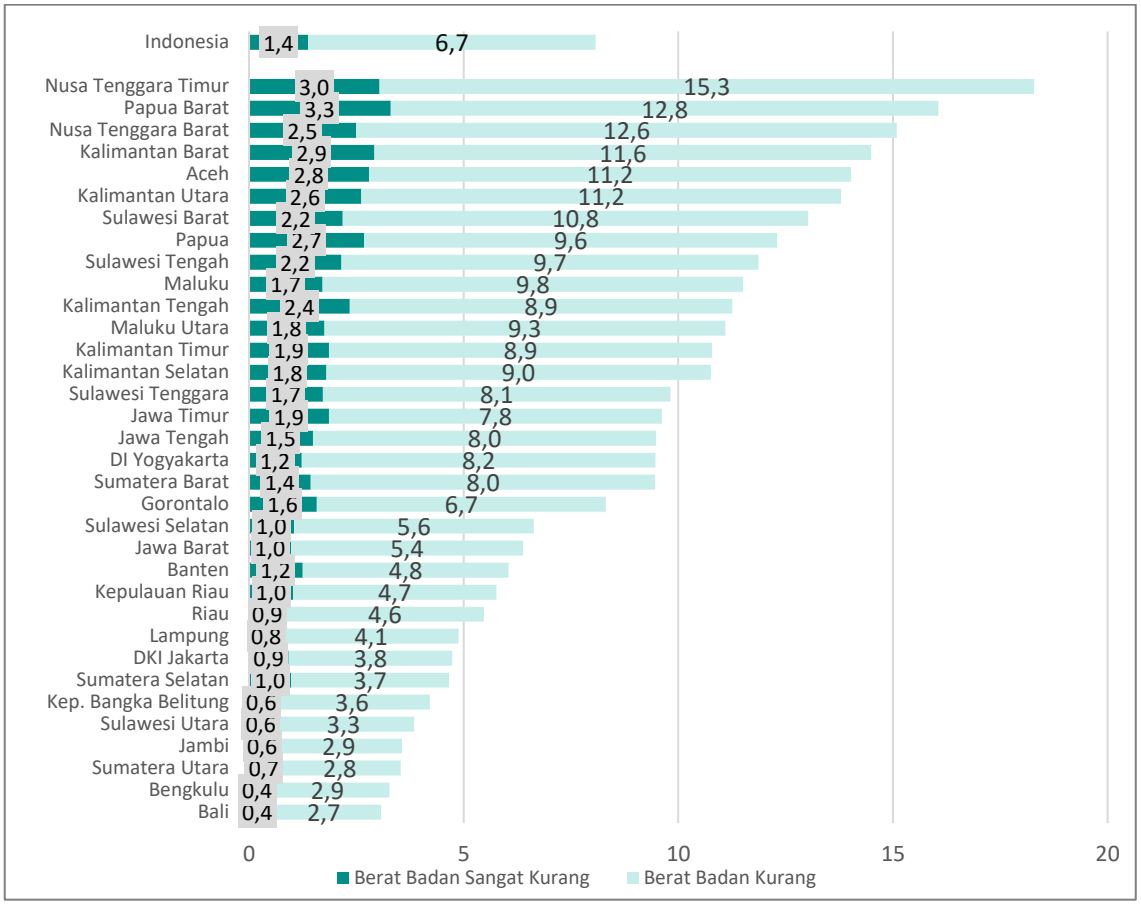

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) meliputi kategori sangat pendek dan pendek. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa persentase sangat pendek pada balita usia 0-23 bulan (baduta) di Indonesia adalah 12,8%, sedangkan persentase pendek adalah 17,1%. Pada balita usia 0-59 bulan, persentase sangat pendek adalah 11,5%, sedangkan persentase pendek adalah 19,3%

Baduta dengan pengukuran indeks Tinggi Badan menurut Umur yang di entry sebanyak 48,3% dari sasaran baduta yang ada. Dari sasaran baduta di entry tersebut didapatkan sebanyak 139.936 (3,1%) baduta sangat pendek dan sebanyak 329.163 (7,3%) baduta pendek. Provinsi dengan persentase tertinggi sangat pendek dan pendek pada baduta adalah Nusa Tenggara Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

GAMBAR 5.36
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

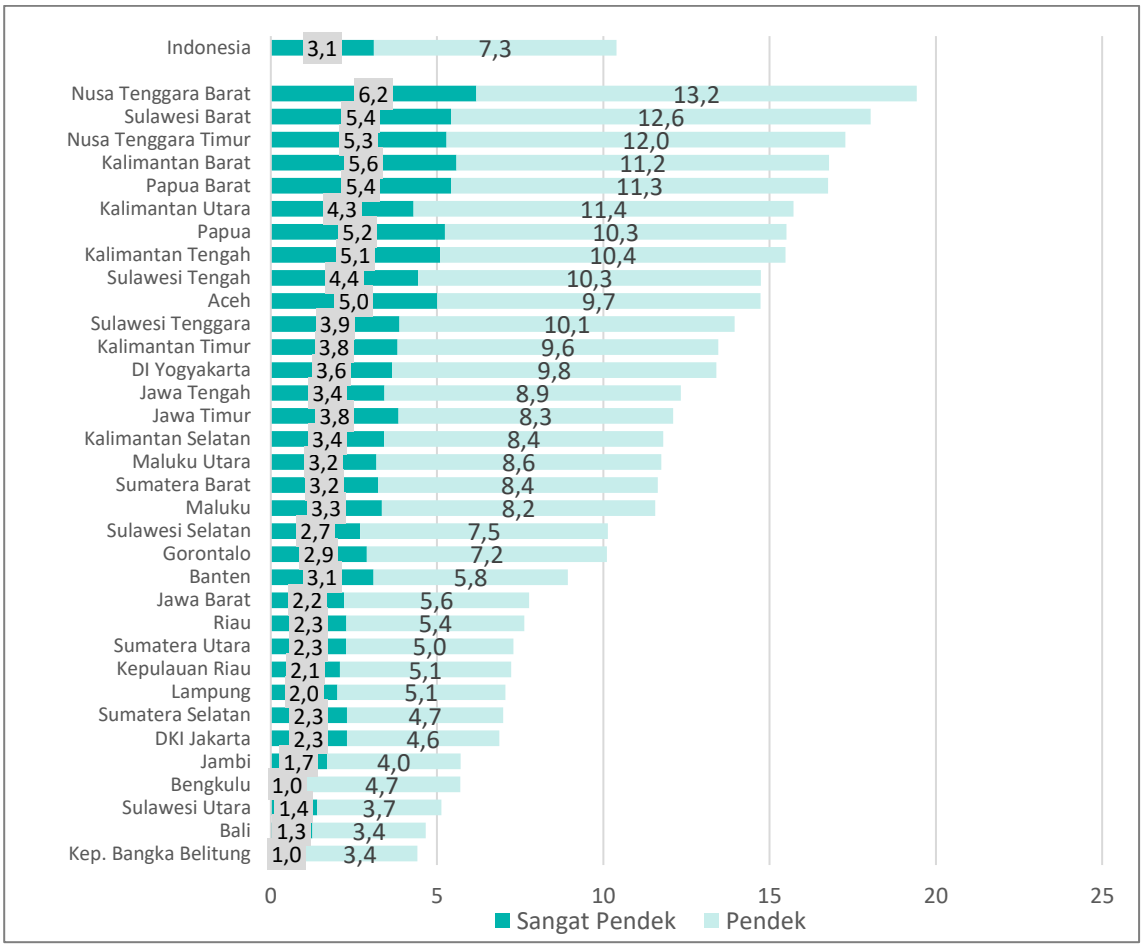

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Balita dengan pengukuran indeks Tinggi Badan menurut Umur yang di *entry* sebanyak 49,2% dari sasaran balita yang ada. Dari sasaran balita di entry tersebut didapatkan sebanyak 349.157 (3,0%) balita sangat pendek dan sebanyak 980.565 (8,5%) balita pendek. Provinsi dengan persentase tertinggi sangat pendek dan pendek pada balita adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung.

GAMBAR 5.37
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

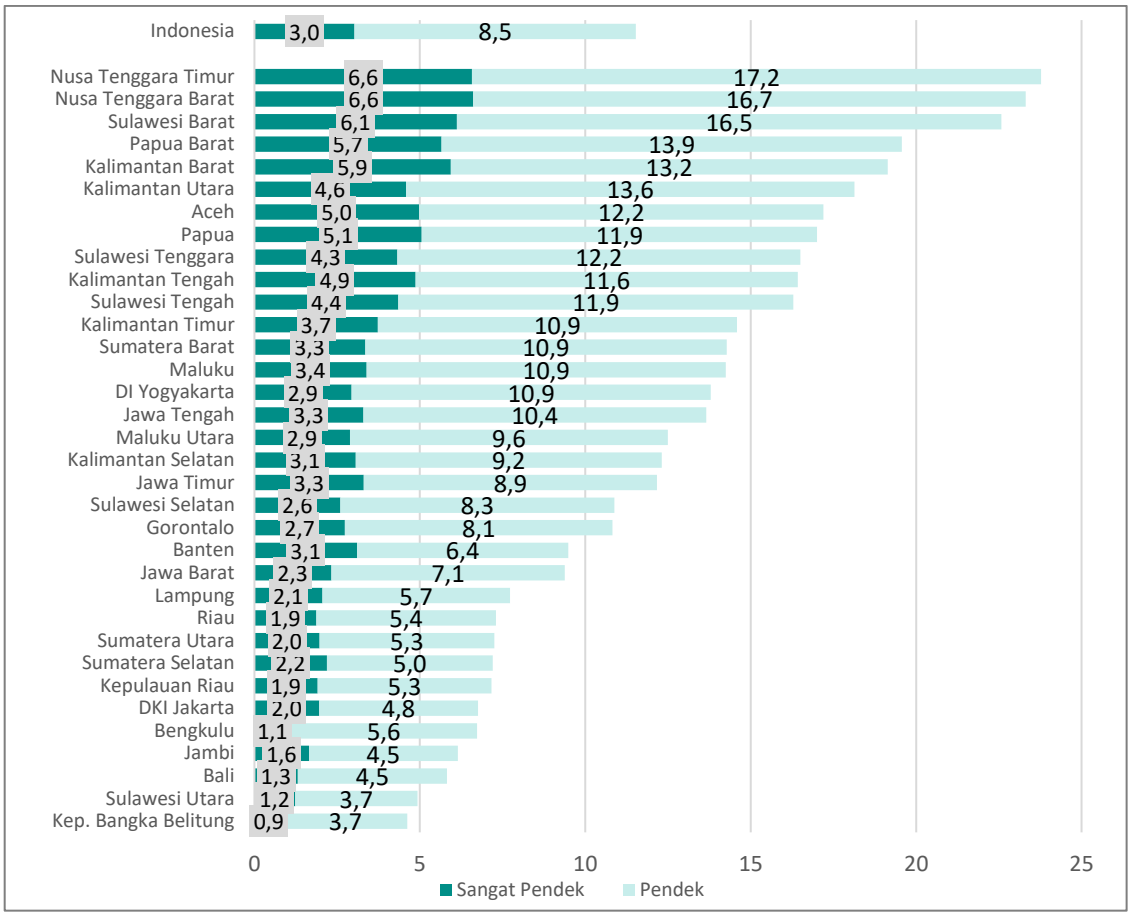

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB) meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan (baduta) di Indonesia adalah 4,5%, sedangkan persentase gizi kurang adalah 7,2%. Pada balita usia 0-59 bulan, persentase gizi buruk adalah 3,5%, sedangkan persentase pendek adalah 6,7%

Baduta dengan pengukuran indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) yang terentry sebanyak 48,6% dari sasaran baduta yang ada. Dari sasaran baduta di *entry* tersebut didapatkan sebanyak 55.283 (1,2%) baduta gizi buruk dan sebanyak 186.053 (4,1%) baduta gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada baduta adalah Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bengkulu.

GAMBAR 5.38
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

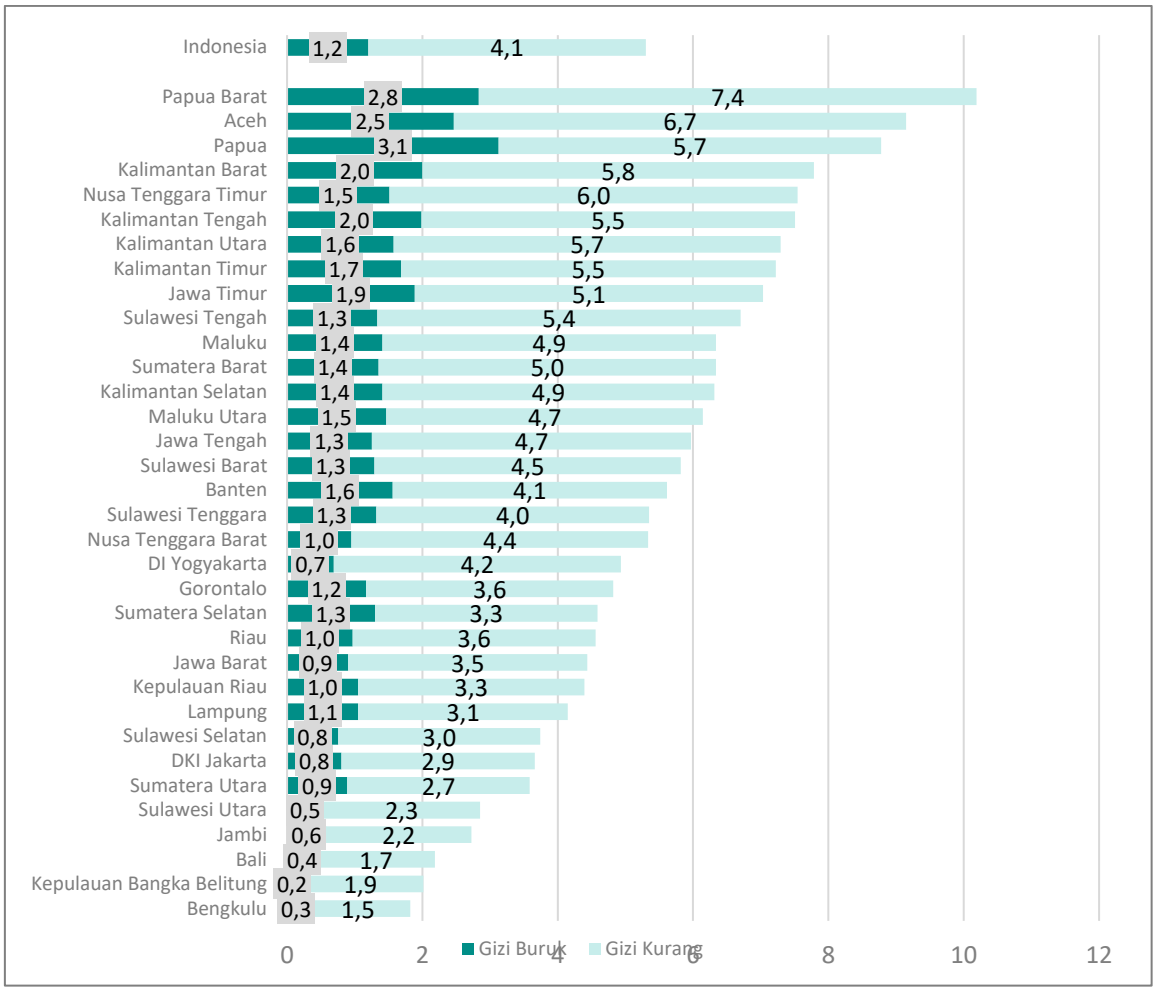

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Balita dengan pengukuran indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) yang di *entry* sebanyak 49,3% dari sasaran balita yang ada. Dari sasaran balita di *entry* tersebut didapatkan sebanyak 126.367 (1,1%) balita gizi buruk dan sebanyak 492.336 (4,3%) balita gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bengkulu.

GAMBAR 5.39
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

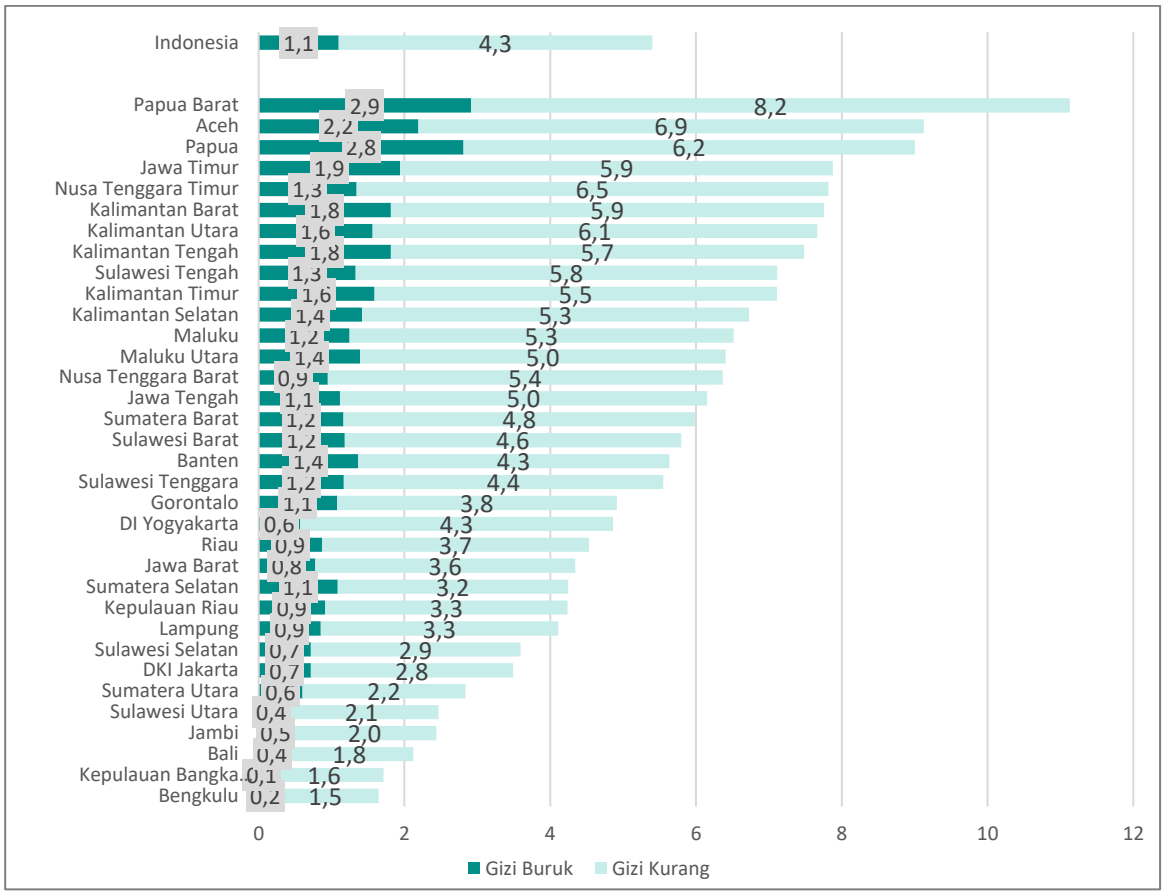

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Tren persentase pada balita usia 0-59 bulan sangat pendek dan pendek di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 persentasenya sebesar 37,2%, sedangkan pada tahun 2019 persentasenya sebesar 27,7%. Artinya dalam kurun waktu 6 tahun, Indonesia dapat menurunkan lebih dari 1,5% setiap tahunnya.

Tren persentase gizi buruk dan gizi kurang pada balita usia 0-59 bulan di Indonesia sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 secara umum mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dimana pada tahun 2013 persentase balita gizi buruk dan gizi kurang usia 0-59 bulan yaitu 12,1% menjadi 7,4% pada tahun 2019 atau turun sebesar 0,8% setiap tahunnya.

GAMBAR 5.40
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2019

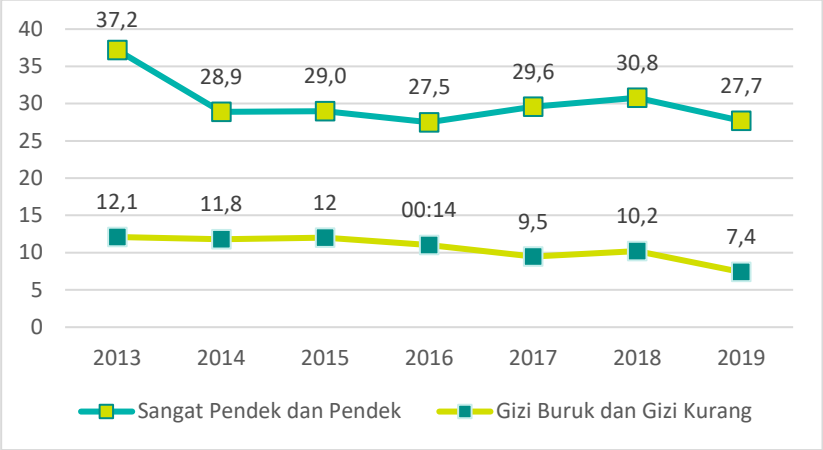

Sumber: Riskesdas (tahun 2013 dan 2018), Balitbangkes Kemenkes RI
PSG (tahun 2014-2017), Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI
SSGBI 2019, Balitbangkes Kemenkes RI

GAMBAR 5.41
GRAFIK PROPORSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI, SSGBI 2019

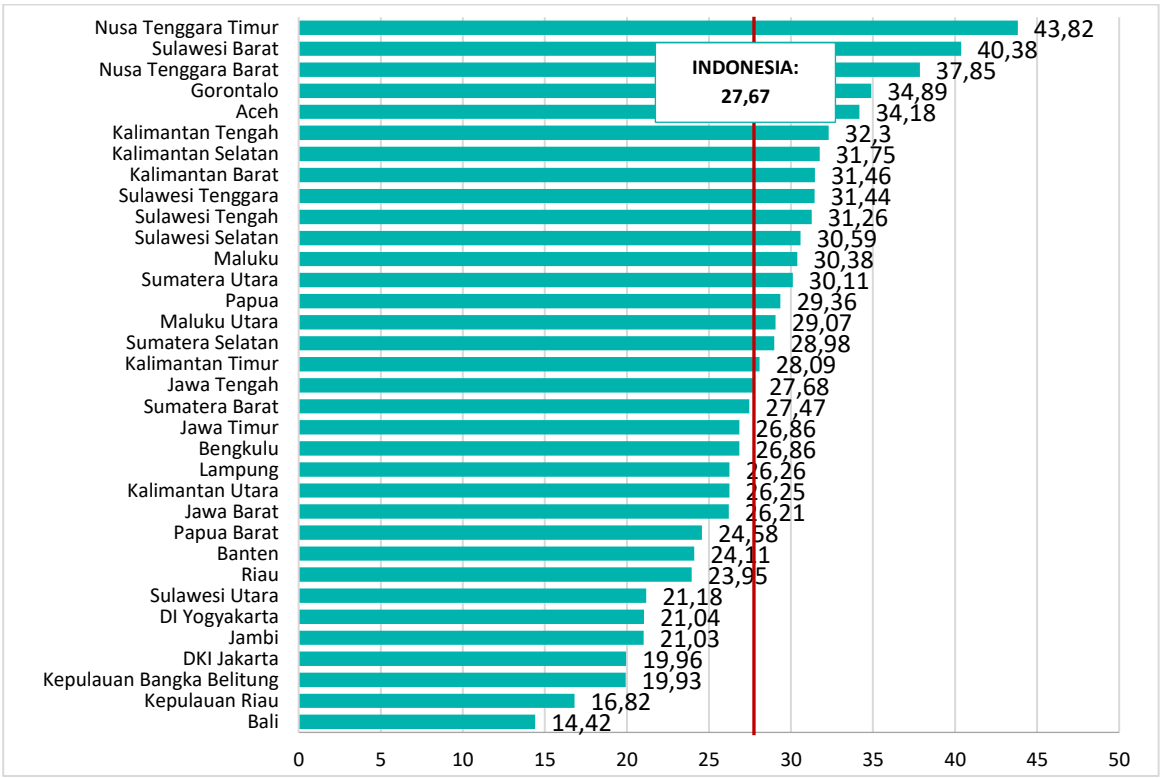

Sumber: Balitbangkes Kemenkes RI, 2020

Berdasarkan gambar 5.50 hasil Survei Status Gizi Balita Terintegrasi (SSGBI) oleh Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2019, diketahui bahwa proporsi stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil ini hampir sama dengan Riskesdas tahun 2018, dimana proporsi stunting tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Aceh. Sedangkan untuk proporsi stunting terendah menurut SSGBI 2019 ada di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bali, menurut Riskesdas 2018 terdapat di Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Dalam rangka menerapkan upaya gizi seimbang, setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada bayi. Kolostrum berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum tetapi lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Selain mengandung zat makanan, ASI juga mengandung enzim tertentu yang berfungsi sebagai zat penyerap yang tidak akan menganggu enzim lain di usus. Susu formula tidak mengandung enzim tersebut sehingga penyerapan makanan sepenuhnya bergantung pada enzim yang terdapat di usus bayi.

Pada tahun 2020, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 77,6%. Provinsi dengan persentase tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah DKI Jakarta (96,1%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Maluku (52,1%). Target nasional IMD tahun 2020 sebesar 54%. Hanya 2 provinsi yang belum mencapai target tersebut.

GAMBAR 5.42
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

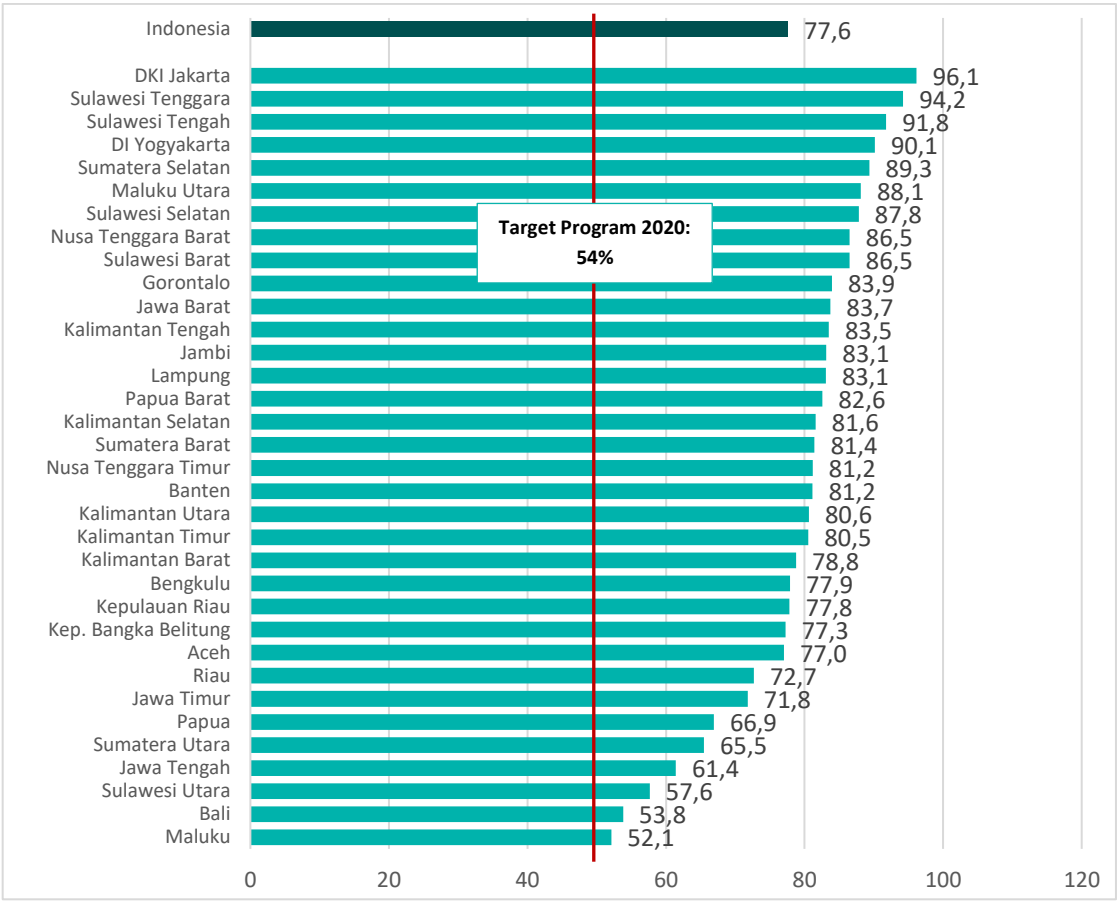

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2020 yaitu sebesar 66,06%. Angka tersebut sudah melampaui target Renstra tahun 2020 yaitu 40%. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (87,33%), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua Barat (33,96%). Terdapat empat provinsi yang belum mencapai target Renstra tahun 2020, yaitu Maluku dan Papua Barat. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.52.

GAMBAR 5.43
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

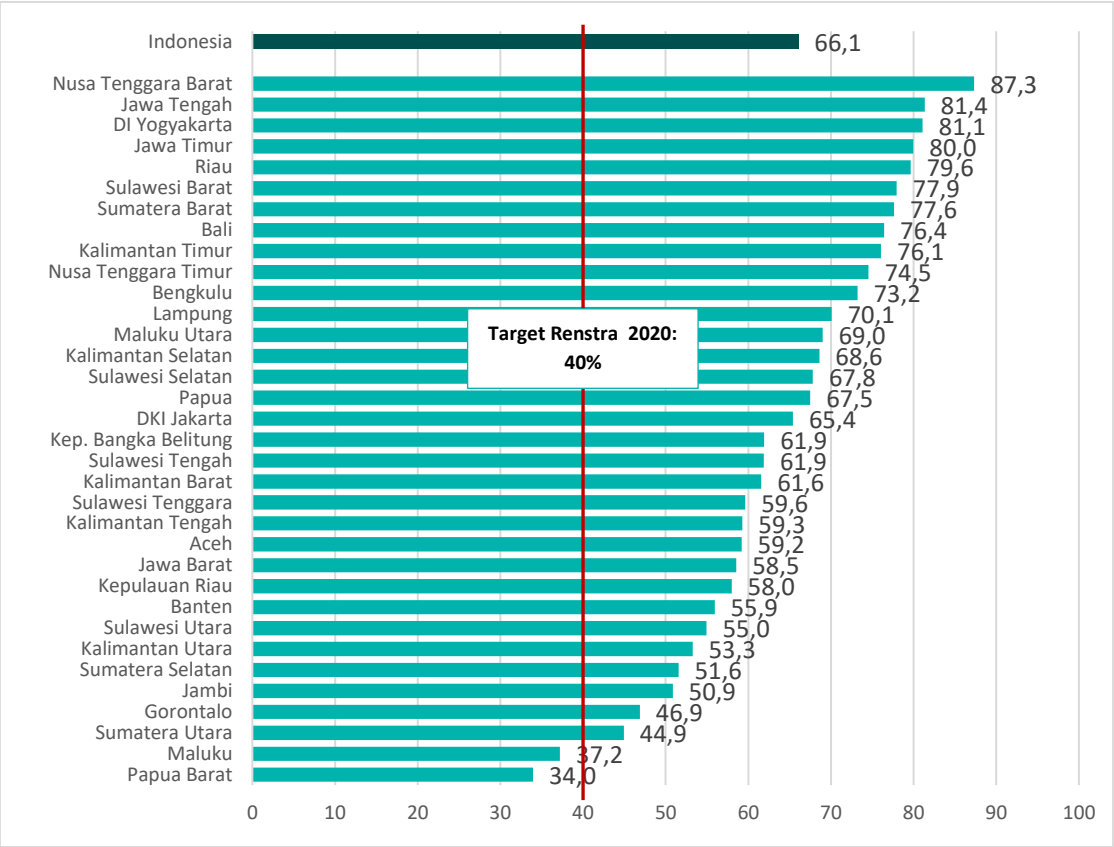

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

b. Penimbangan Balita

Penimbangan balita merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan setiap bulan bertujuan sebagai deteksi dini untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh kembang pada balita. Dengan rutin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Jika diketahui berat badan anak tidak naik atau jika ditemukan anak menderita suatu penyakit, dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan, agar tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin cepat ditangani. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi kurang atau gizi buruk akan mengurangi risiko kematian sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan.

Persentase rata-rata balita yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2020 adalah 61,3% anak per bulan. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 79,9%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 18,8%. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita yang ditimbang per bulan dapat dilihat di lampiran 5.53.

GAMBAR 5.44
PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

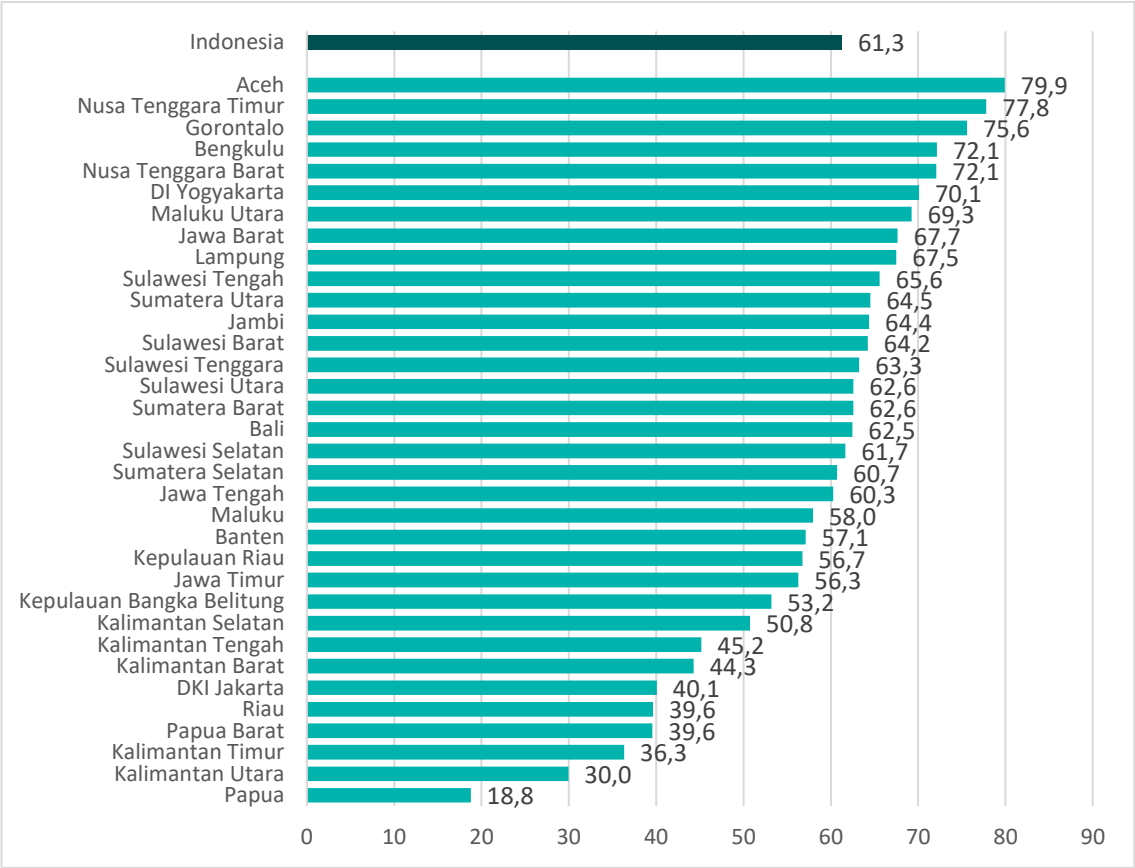

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi penting yang sangat diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anak serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Asupan vitamin A dari makanan sehari-hari masih cukup rendah sehingga diperlukan asupan gizi tambahan berupa kapsul vitamin A.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 86,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian vitamin A adalah DI Yogyakarta (99,9%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (20,7%). Capaian pemberian Vitamin A pada balita 6-59 bulan menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.54.

GAMBAR 5.45
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

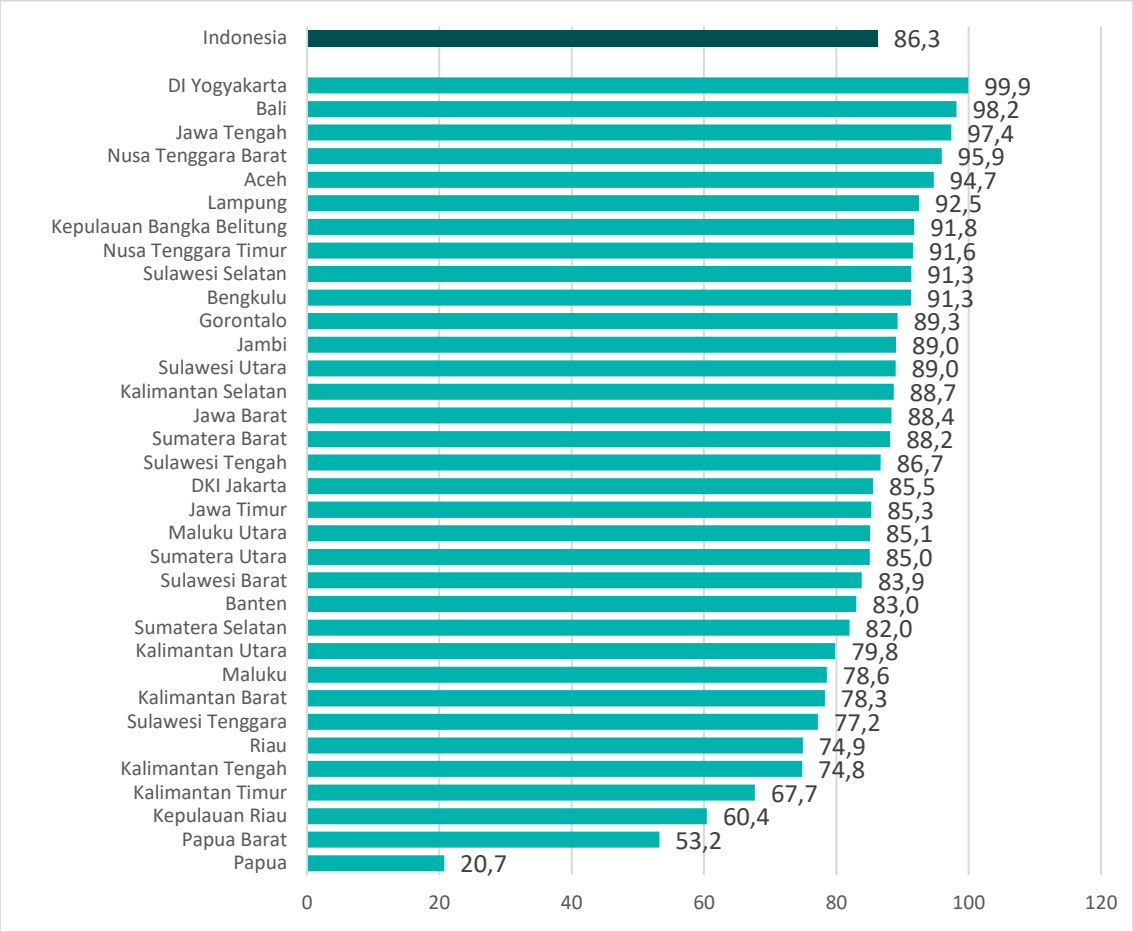

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

Anemia sering diderita pada wanita usia subur. Hal ini disebabkan karena terjadinya siklus menstruasi pada wanita setiap bulannya. Kekurangan zat besi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga dapat menyebabkan produktivitas menurun. Asupan zat besi dapat diperoleh melalui makanan bersumber protein hewani seperti hati, ikan, dan daging. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Pemberian TTD pada remaja putri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi para remaja putri yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang. Dengan cukupnya asupan zat besi sejak dini, diharapkan angka kejadian anemia ibu hamil, pendarahan saat persalinan, BBLR, dan balita pendek dapat menurun.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2020 adalah 39,1%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian TTD pada remaja putri adalah Maluku Utara (76,2%), sedangkan persentase terendah adalah Kalimantan Timur (7,8%). Cakupan pemberian TTD pada remaja putri selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.55.

GAMBAR 5.46
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

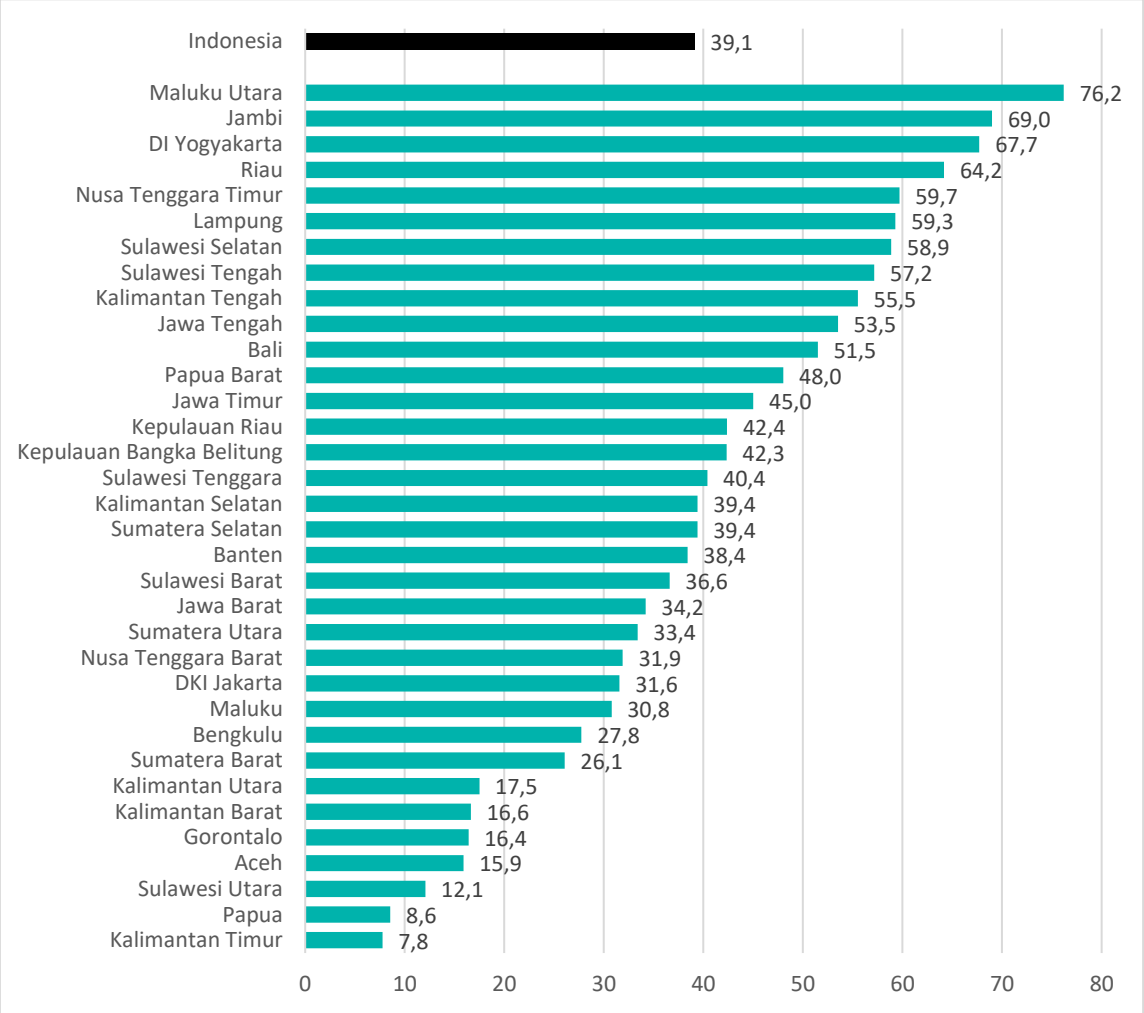

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) menjadi salah satu faktor determinan terjadinya risiko gangguan masalah gizi dan kesehatan pada bayi yang dilahirkan. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 17,3% ibu hamil mengalami KEK. Semakin muda usia kehamilan, semakin besar peluang ibu hamil menngalami KEK. Pemberian makanan tambahan

bertujuan untuk mengatasi gizi kurang pada bumil dengan fokus pada pemenuhan zat gizi makro maupun mikro yang diperlukan untuk mencegah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

Cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK di Indonesia tahun 2020 adalah 89%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK adalah Gorontalo, Bali, dan Kepulauan Riau sebesar 100,0%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua sebesar 65,7%. Cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.57.

GAMBAR 5.47
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

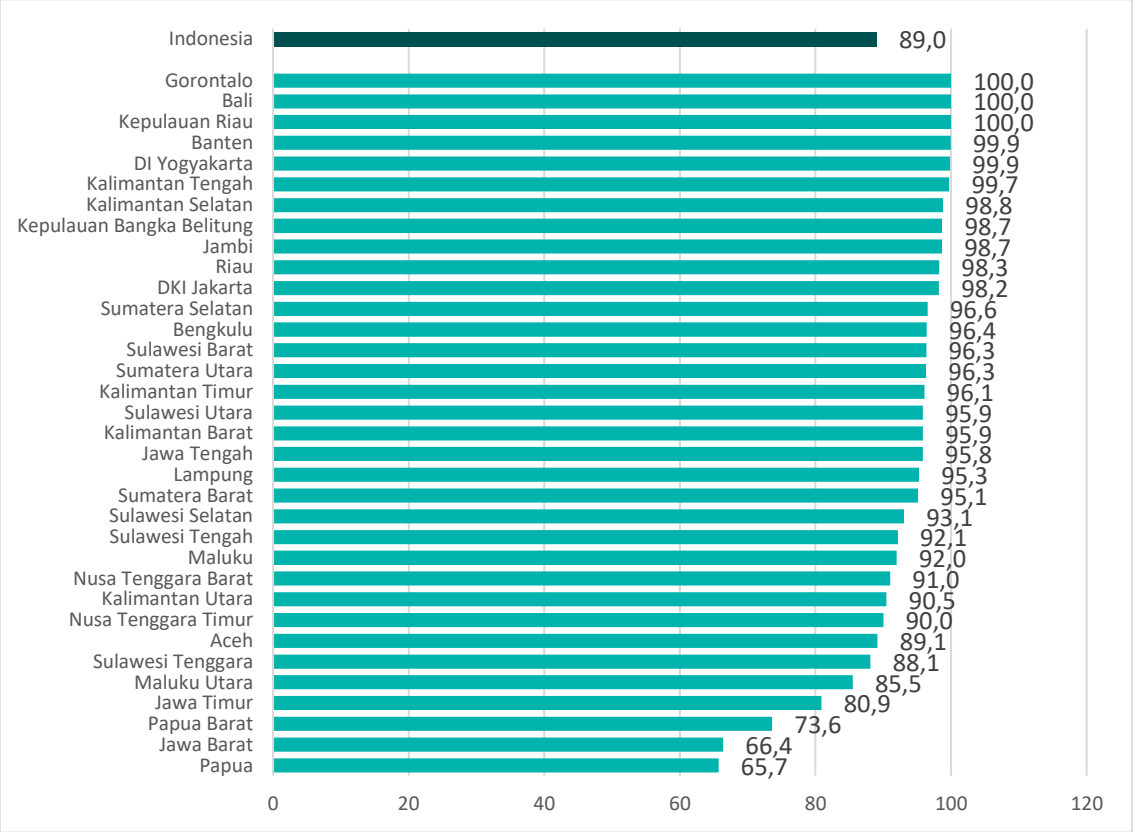

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

Balita gizi kurang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan sebesar minus 3 standar deviasi (-3SD) sampai dengan kurang dari minus 2 standar deviasi (<-2SD). Balita gizi kurang termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi dalam bentuk pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 keatas selama 90 hari berturut-turut dengan status gizi kurang. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat diberikan berupa makanan tambahan lokal maupun abrikan seperti biskuit. Bila perbandingan berat badan terhadap tinggi badan telah mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka makanan tambahan balita gizi kurang dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengkonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi gizi kurang.

Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan di Indonesia tahun 2020 adalah 78,5%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita gizi kurang mendapat makanan tambahan adalah Bali dengan capaian 100% sedangkan persentase terendah adalah Papua dengan capaian 20,4%. Cakupan balita gizi kurang mendapat makanan tambahan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.58.

GAMBAR 5.48
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

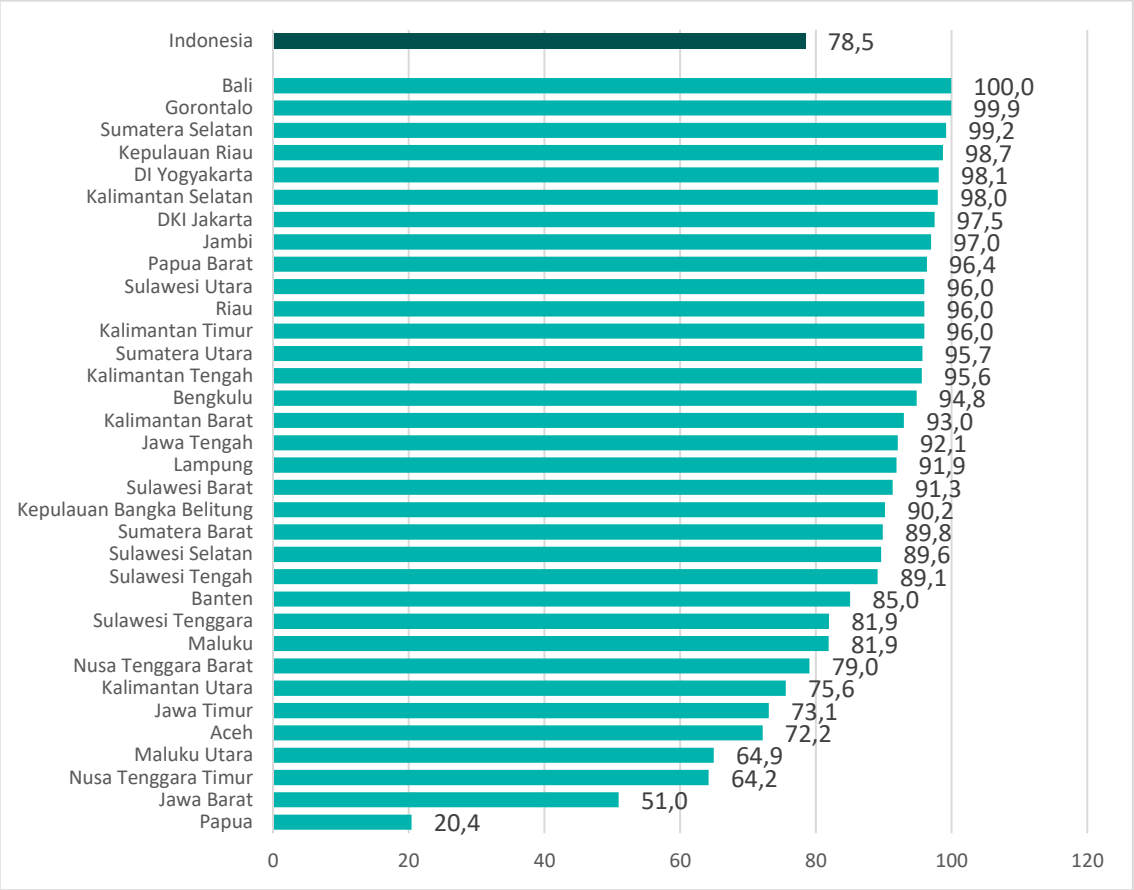

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2021

***

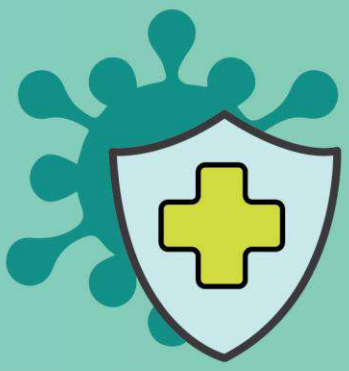

Bab VI

Pengendalian Penyakit

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* dan merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia.

Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di Dunia setelah India. Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan kasus baru TB, tetapi tidak cukup cepat untuk mencapai target Strategi END TB tahun 2020, yaitu pengurangan kasus TB sebesar 20% antara tahun 2015 – 2020. Pada tahun 2015 – 2019 penurunan kumulatif kasus TB hanya sebesar 9% (WHO, *Global Tuberculosis Report*, 2020).

Begitu juga dengan kematian akibat TB, jumlah kematian pada tahun 2019 sebesar 1,4 juta. Secara global kematian akibat TB per tahun menurun secara global, tetapi tidak mencapai target Strategi END TB tahun 2020 sebesar 35% antara tahun 2015 – 2020. Jumlah kematian kumulatif antara tahun 2015 – 2019 sebesar 14%, yaitu kurang dari setengah dari target yang ditentukan (WHO*, Global Tuberculosis Report, 2020*).

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD.

b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2020 jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 351.936 kasus, menurun bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2019 yaitu sebesar 568.987 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut hampir mencapai setengah dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia (46%).

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan secara nasional maupun pada setiap provinsi. Bahkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara kasus pada laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2020

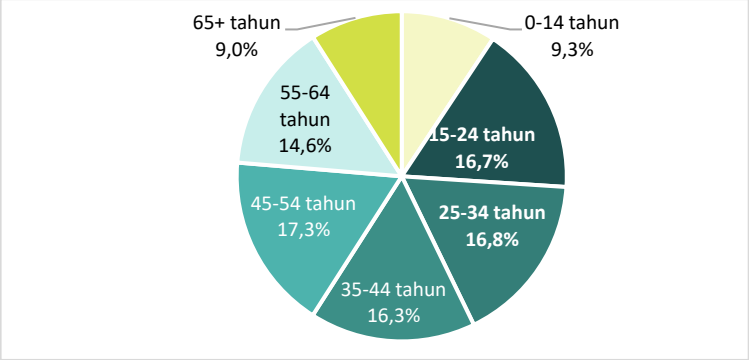

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar 6.1 menunjukan bahwa pada tahun 2020 kasus TB terbanyak ditemukan pada kelompok umur 45 – 54 tahun yaitu sebesar 17,3%, diikuti kelompok umur 25 – 34 tahun sebesar 16,8% dan 15 – 24 tahun 16,7%.

c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*/*TC*)

Treatment Coverage (*TC*) adalah jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

GAMBAR 6.2
***TREATMENT COVERAGE* (*TC*)**
TAHUN 2010-2020

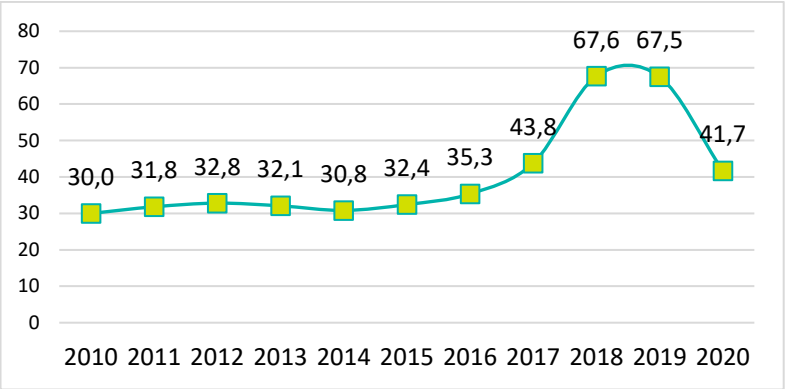

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021.

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa *TC* kasus tuberkulosis pada tahun 2020 sebesar 41,7% yang relatif menurun jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. *TC* pada tahun 2020 di Indonesia belum mencapai target *TC* yang diharapkan yaitu 80%, dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan *TC* secara global yaitu 71% pada tahun 2019 (WHO*, Global Tuberculosis Report*, 2020).

GAMBAR 6.3
***TREATMENT COVERAGE* (*TC*) MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2020

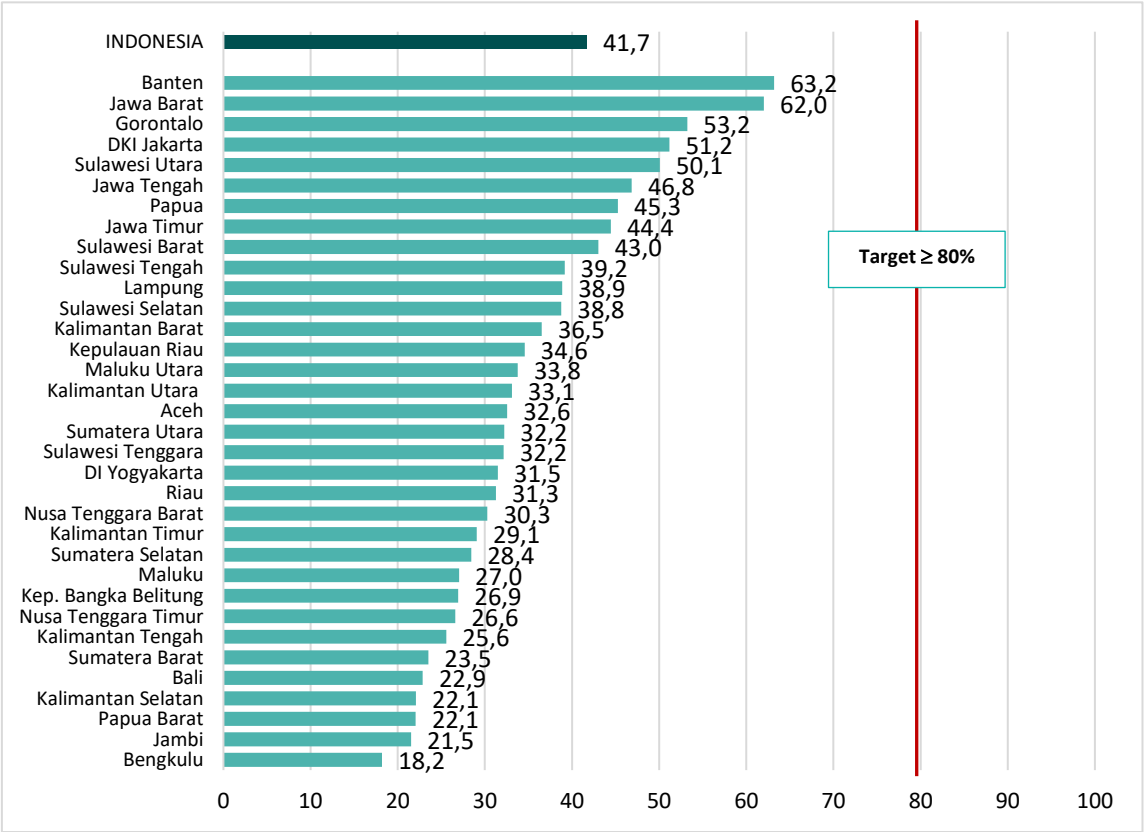

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar 6.3 menunjukan bahwa belum ada provinsi yang mencapai angka *TC* ≥ 80% pada tahun 2020. Namun, provinsi dengan *TC* tertinggi adalah Banten sebesar 63,2% dan Jawa Barat sebesar 62,0%.

d. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate (CNR)*

Case Notification Rate (*CNR*) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2010-2020 yang secara nasional memperlihatkan kecenderungan peningkatan CNR sampai tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 dan 2020.

GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2020

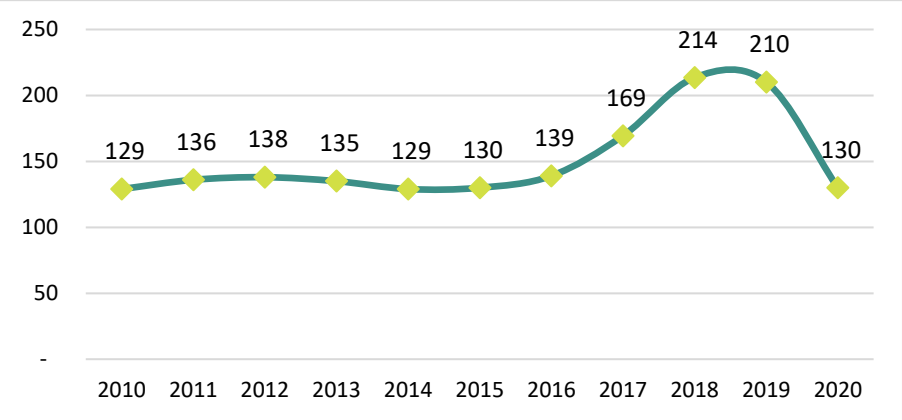

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

CNR semua kasus TB menurut provinsi tahun 2020 bervariasi antara 244 per 100.000 penduduk pada Provinsi Papua dan 65 per 100.000 penduduk pada Provinsi Bali.

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

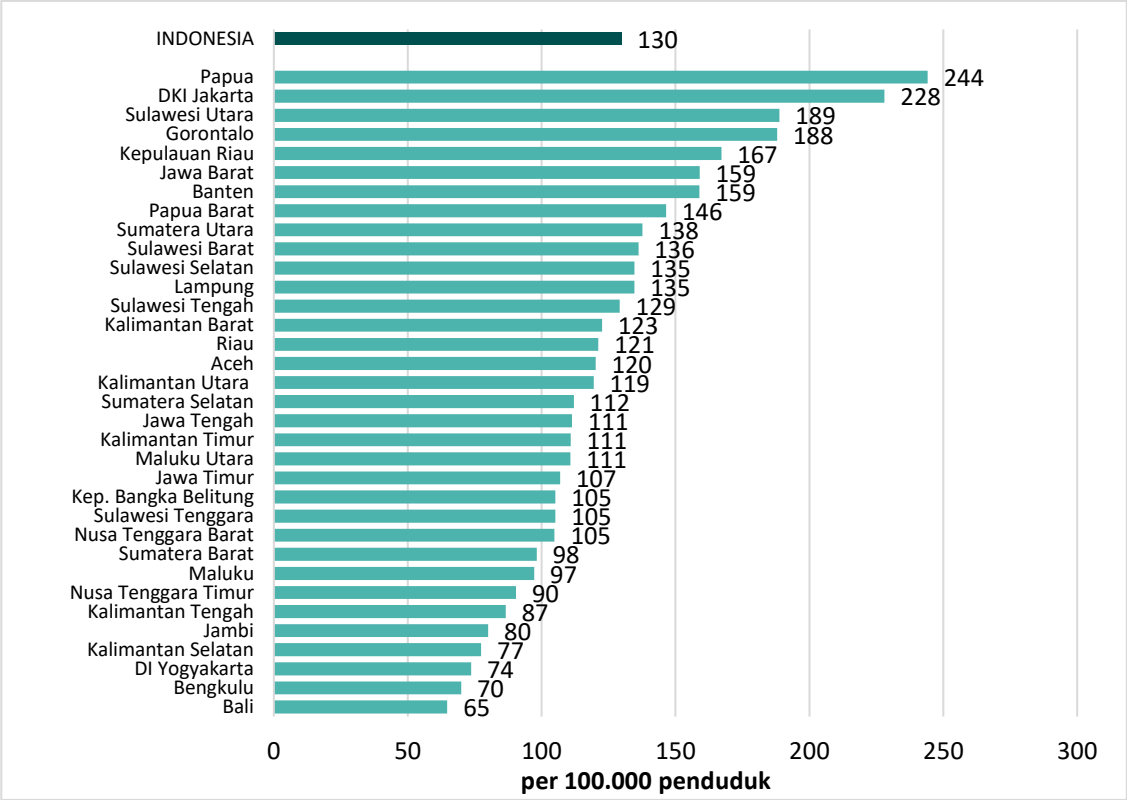

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Angka keberhasilan pengobatan (*Success Rate*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2010-2020

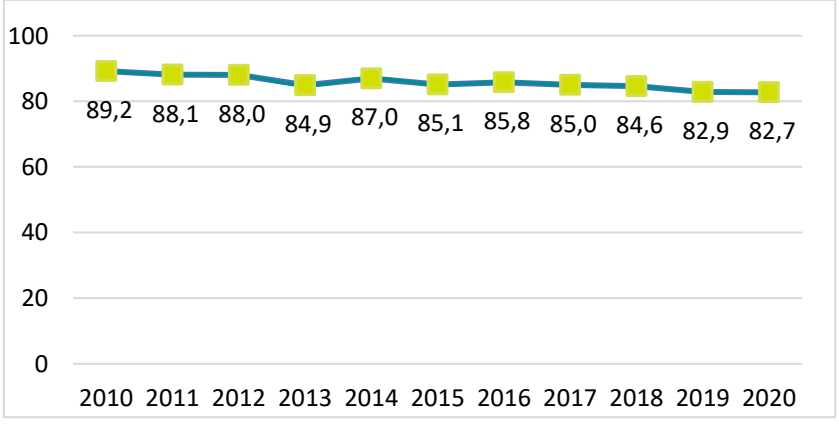

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Jika merujuk pada target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%, maka secara nasional angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis belum tercapai (82,7%).

GAMBAR 6.7
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

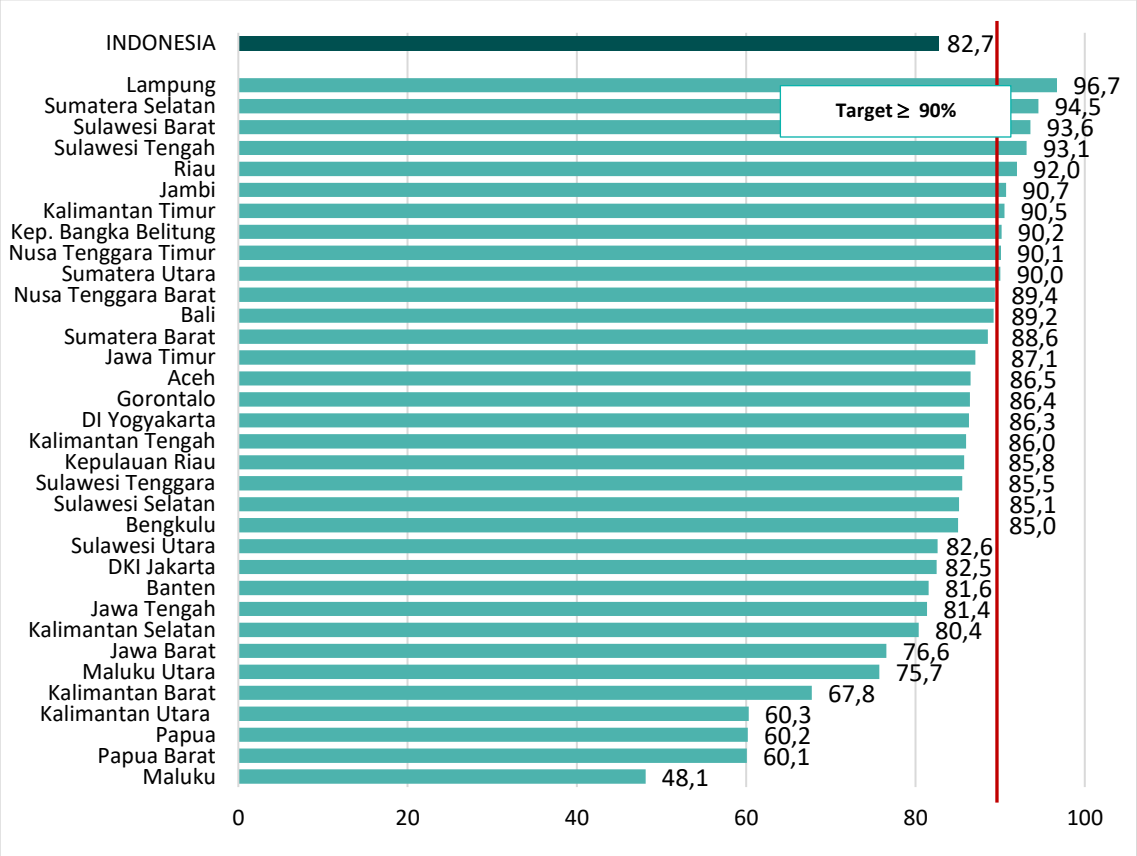

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021.

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2020 sebanyak 10 provinsi, yaitu Lampung (96,7%), Sumatera Selatan (94,5%), Sulawesi Barat (93,6%), Sulawesi Tengah (93,1%), Riau (92,0%), Jambi (90,7%), Kalimantan Timur (90,5%), Kep. Bangka Belitung (90,2%), Nusa Tenggara Barat (90,1%) dan Sumatera Utara (90,0%).

2. HIV dan AIDS

Human Immunodeficiency Virus (*HIV*) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (*AIDS*) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal

dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk: 1) Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru; 2) Menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS; dan 3) Menurunkan stigma dan diskriminasi.

Estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 543.100 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 29.557 orang dan kematian sebanyak 30.137 orang (Hasil Pemodelan *Spectrum* 2020).

Dari Gambar 6.8 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2020 jumlah kasus HIV positif merupakan yang terendah sejak empat tahun terakhir, yaitu dilaporkan sebanyak 41.987 kasus. Sebaliknya, dibandingkan rata-rata 8 tahun sebelumnya, jumlah kasus baru AIDS cenderung menurun tetapi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 8.639 kasus.

GAMBAR 6.8
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS
YANG DILAPORKAN DI INDONESIA
TAHUN 2010-2020

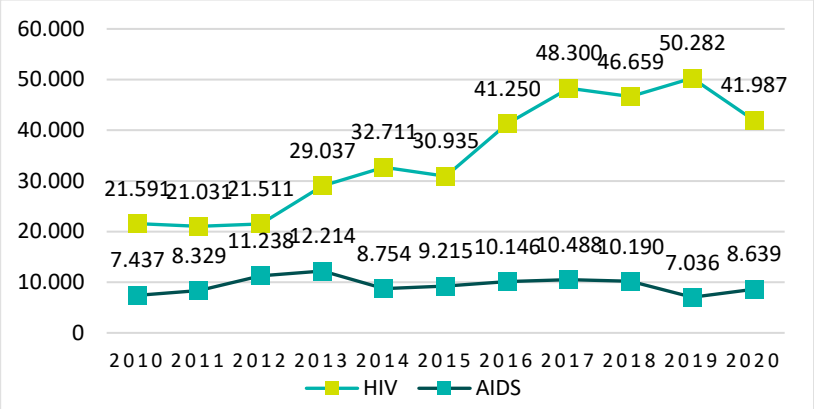

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Terdapat sebanyak 18 Kabupaten/Kota yang tidak melaporkan data HIV dan atau AIDS pada tahun 2020 yang diduga menjadi penyebab penurunan kasus HIV pada tahun 2020. Kabupaten/Kota tersebut, yaitu: 1) Aceh: Kota Sabang, Kota Subulussalam; 2) Sumatera Utara: Padang Lawas; 3) Jambi: Kerinci; 4) Nusa Tenggara Timur: Alor, Rote Ndao, Sumba Tengah; 5) Sulawesi Utara: Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Bolaang Mongondow Timur; 6) Sulawesi Tenggara: Buton Utara, Konawe Utara; 7) Maluku Utara: Pulau Morotai, Pulau Taliabu; 8) Papua Barat: Tambrauw, Maybrat, Pegunungan Arfak; 9) Papua: Nduga.

Pada HIV dan AIDS, proporsi kasus kelompok laki-laki lebih besar sekitar dua kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.9 berikut ini.

GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
DI INDONESIA TAHUN 2020

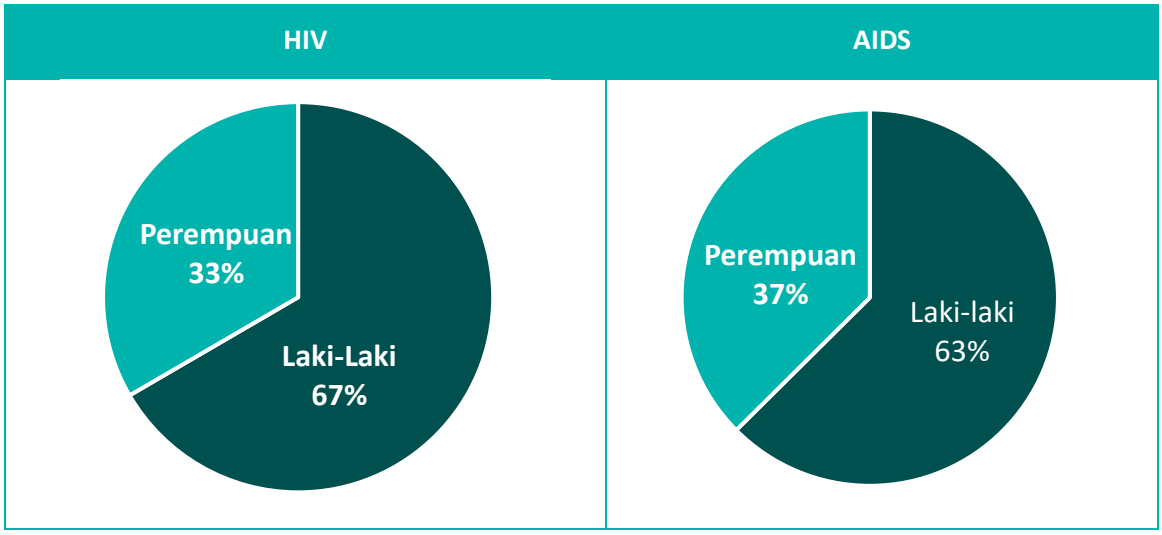

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2020 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.10 berikut ini.

GAMBAR 6.10
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2020

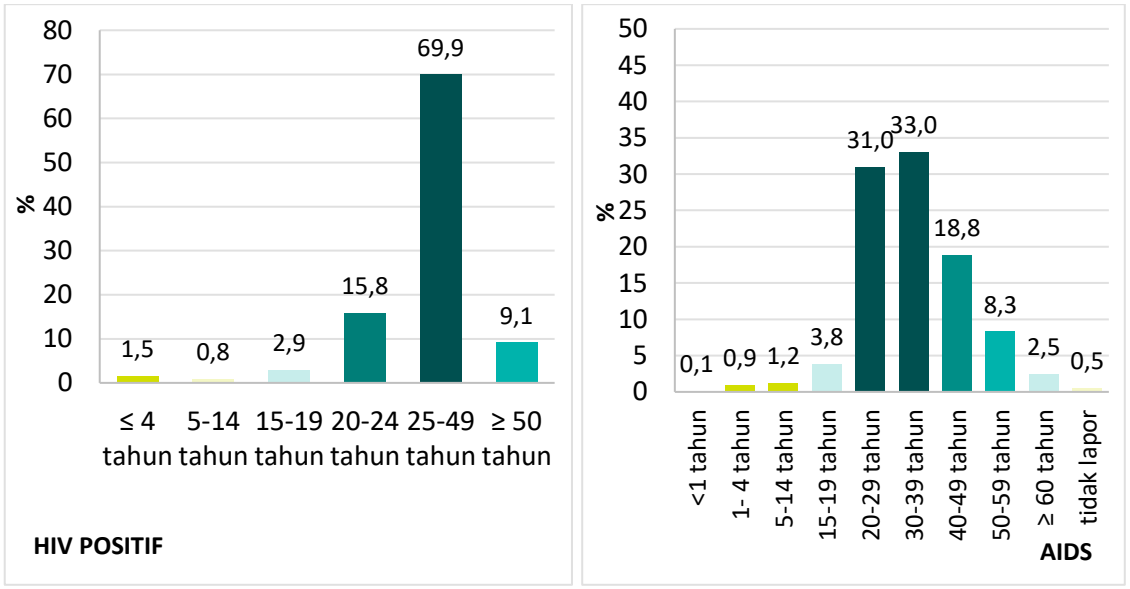

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Kelompok umur produktif (15-49 tahun) mendominasi sebaran kasus baik HIV maupun AIDS. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia di bawah 4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak. Untuk mencapai tujuan nasional dan global dalam rangka *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan batasan napas cepat berdasarkan usia penderita:

- < 2 bulan : ≤ 60/menit,
- 2 - < 12 bulan : ≤ 50/menit,
- 1 - < 5 tahun : ≤ 40/menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2010-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.11
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
DI INDONESIA TAHUN 2010-2020

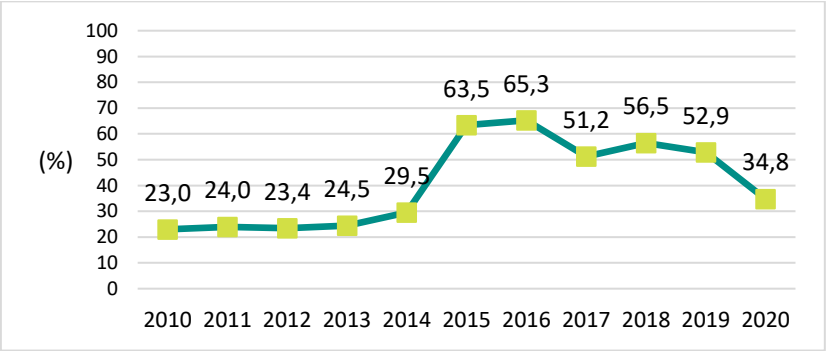

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia berkisar antara 20 – 30% dari tahun 2010 sampai dengan 2014, dan sejak tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan cakupan dikarenakan adanya perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali menjadi 34,8%. Penurunan ini lebih di sebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di puskesmas, pada tahun 2019 jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas sebesar 7,047,834 kunjungan, pada tahun 2020 menjadi 4,972,553 kunjungan, terjadi penurunan 30% dari kunjungan tahun 2019 yang pada akhirnya berdampak pada penemuan pneumonia balita.

GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

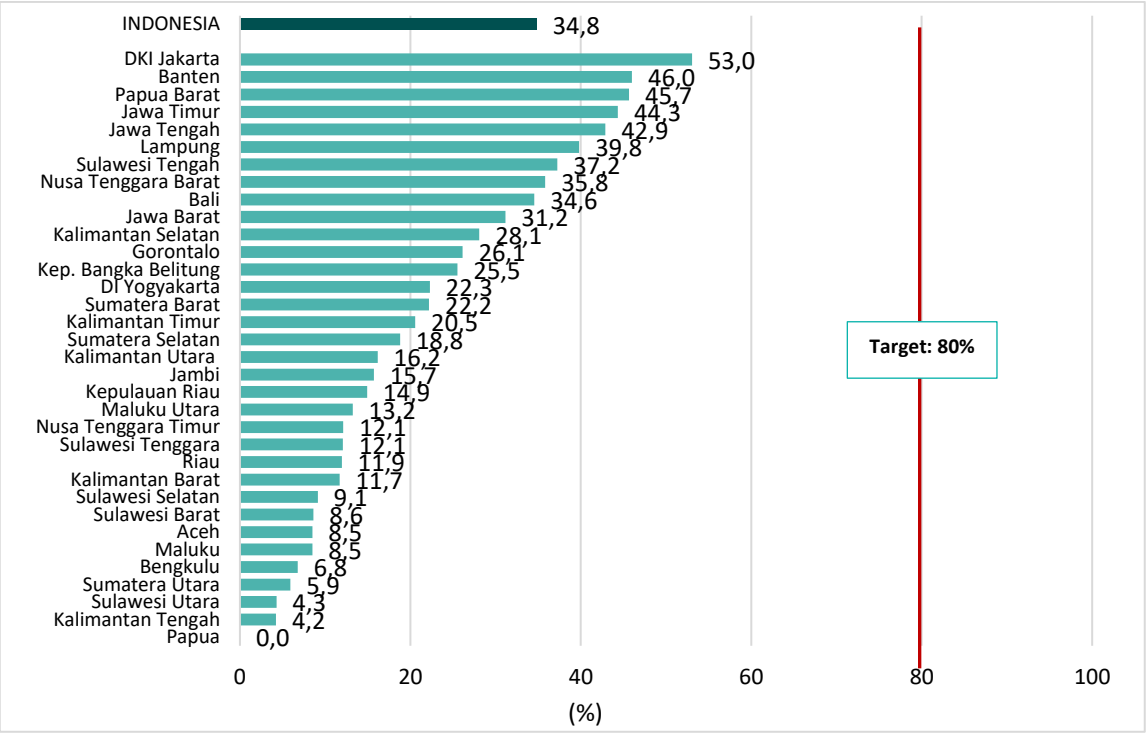

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 secara nasional dan provinsi belum mencapai target penemuan sebesar 80%. Provinsi dengan cakupan pneumonia pada balita tertinggi berada di DKI Jakarta (53,0%), Banten (46,0%), dan Papua Barat (45,7%).

GAMBAR 6.13
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA
YANG 50% PUSKESMASNYA MELAKSANAKAN
TATALAKSANA STANDAR PNEUMONIA 2016-2020

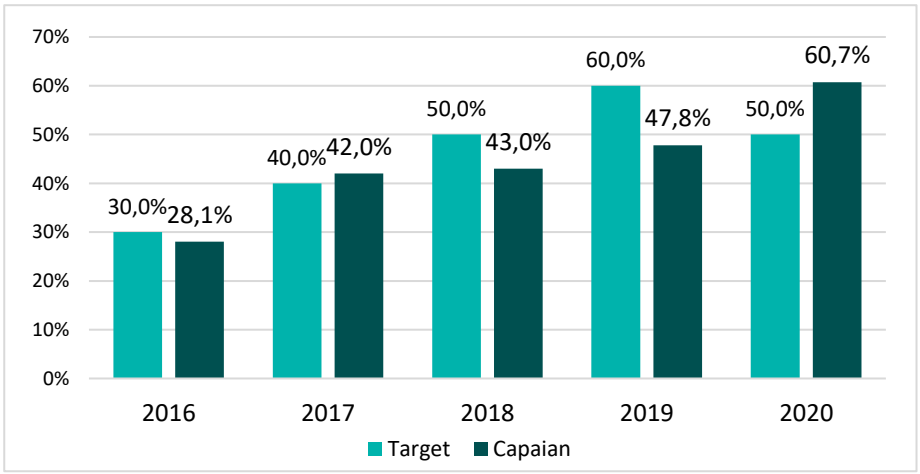

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Indikator Renstra yang digunakan pada tahun 2020 yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia sesuai standar sebesar 50%, baik melalui pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), maupun program Pencegahan dan Pengendalian ISPA. Pada tahun 2020 Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia sebesar 60,7% yang berarti sudah mencapai target renstra tahun 2020 yaitu sebesar 50%.

Terdapat tujuh provinsi yang puskesmasnya di seluruh kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia yaitu, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Bali, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Pada tahun 2020 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,16%. Angka kematian akibat Pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumonia dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 53a dan 53b.

4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A, sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan di Indonesia. Hasil RISKESDAS tahun 2018 memperlihatkan prevalensi hepatitis berdasarkan riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang Positif Hepatitis B. Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B (DDHB) pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan uji coba di satu provinsi yaitu DKI Jakarta pada 5000 ibu hamil, pelaksanaan terus diperluas secara bertahap hingga pada tahun 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di 34 provinsi (173 Kab/kota), dan di tahun yang sama juga program DDHB berkolaborasi dan berinteraksi dalam pelayanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) HIV, Sifilis dan Hepatitis B.

GAMBAR 6.14
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2020

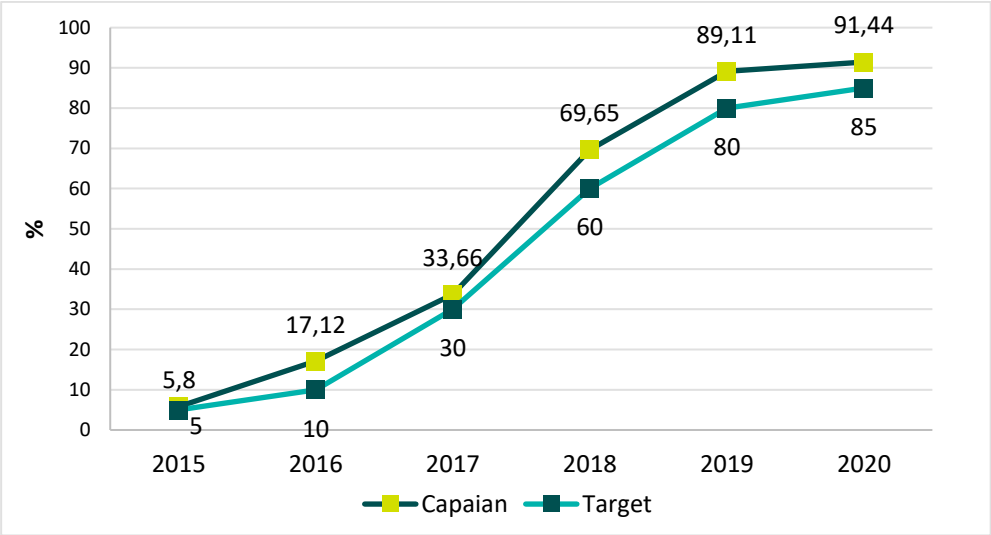

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar 6.13 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2020 capaian indikator telah mencapai target Renstra tahun 2020 (85%), yaitu 91,44%. Selama enam tahun berturut-turut sejak dilaksanakan, indikator Renstra tersebut selalu mencapai target.

Pada Gambar 6.14 dapat dilihat sebanyak 27 dari 34 provinsi telah 100% kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini hepatitis B, sedangkan sebanyak 6 provinsi belum mencapai target Renstra tahun 2020.

GAMBAR 6.15
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

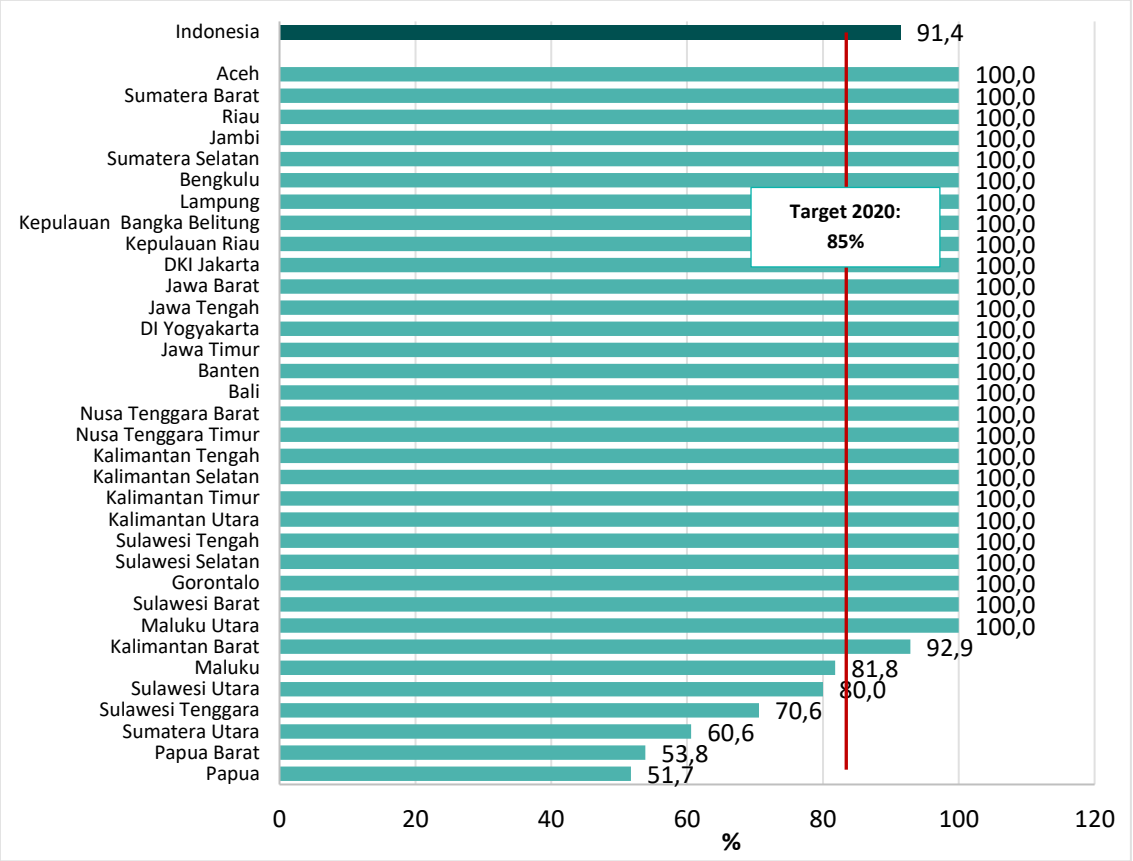

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

5. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita.

a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

GAMBAR 6.16
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

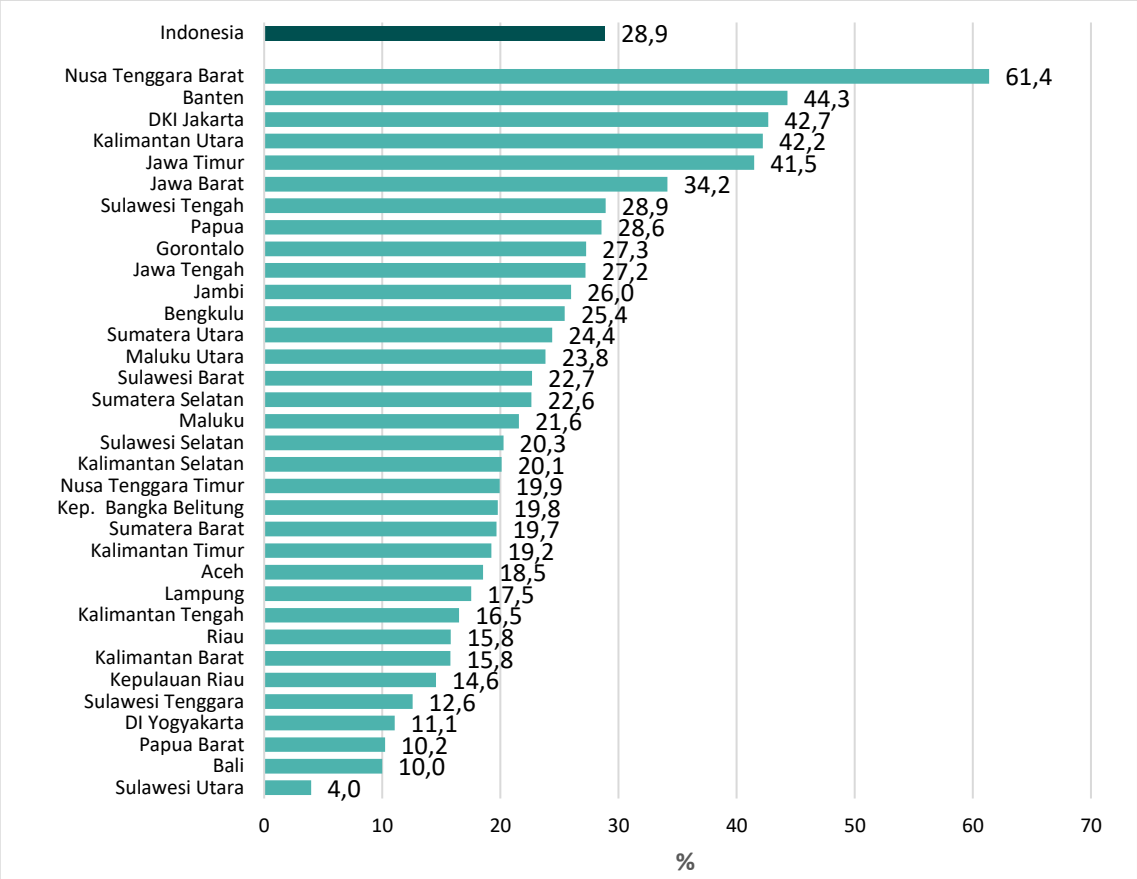

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 44,4% dan pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang ditetapkan. Disparitas antar provinsi untuk cakupan pelayanan penderita diare semua umur adalah antara 4,9% (Sulawesi Utara) dan Nusa Tenggara Barat (78,3%). Sedangkan disparitas antar provinsi untuk cakupan pelayanan penderita diare balita adalah antara 4,0% (Sulawesi Utara) dan Nusa Tenggara Barat (61,4%).

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit maka target penggunaan oralit adalah 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas dan kader. Tahun 2020 secara nasional penggunaan oralit semua umur belum mencapai target yaitu sebesar 88,3%. Pemberian oralit pada balita relatif lebih tinggi yaitu sebesar 90,8%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di Puskesmas dan kader belum memberikan oralit sesuai dengan standar tata laksana yaitu sebanyak 6 bungkus/penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2020 cakupan pemberian zink pada balita diare sebesar 89,5%.

6. Kusta

Mycobacterium leprae merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta (prevalensi kusta <1 per 10.000 penduduk). Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 0,49 kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,12 kasus per 100.000 penduduk. Tren Angka kejadian dapat dilihat pada Gambar 6.17. Selama sepuluh tahun terakhir terlihat tren relatif menurun baik pada angka prevalensi maupun angka penemuan kasus baru kusta atau *New Case Detection Rate* (*NCDR*).

Tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan deteksi dini kasus di masyarakat berjalan kurang optimal akibat adanya pembatasan kegiatan mengumpulkan masyarakat. Selain itu, sebagian besar sumber daya kesehatan juga difokuskan pada penanggulangan COVID-19, sehingga program berjalan kurang maksimal dan penemuan kasus baru mengalami penurunan.

Pada tahun 2020 dilaporkan terdapat 11.173 kasus baru kusta yang 86% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (*MB*).

GAMBAR 6.17
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (*NCDR*)
TAHUN 2010-2020

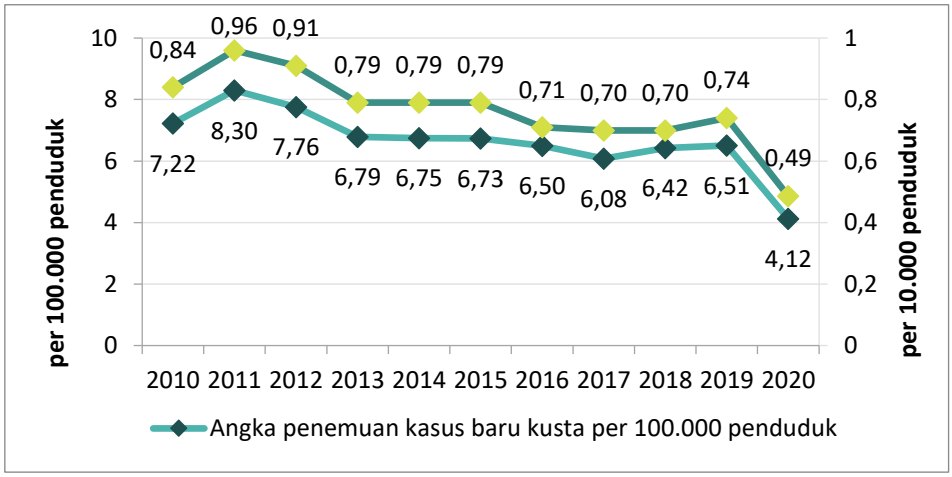

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 sebanyak dua puluh delapan provinsi telah mencapai eliminasi kusta, bertambah dua provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sedangkan provinsi yang belum mencapai eliminasi pada tahun 2020 yaitu, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.18
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019 DAN 2020

Peta Eliminasi Kusta Provinsi di Indonesia Tahun 2019

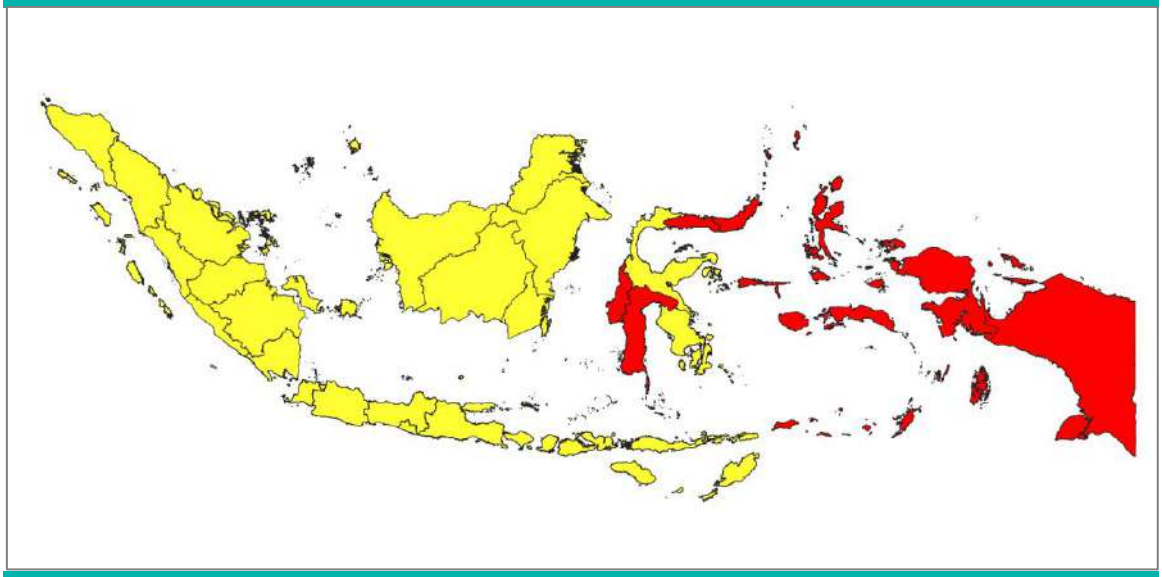

Peta Eliminasi Kusta di Indonesia Tahun 2020

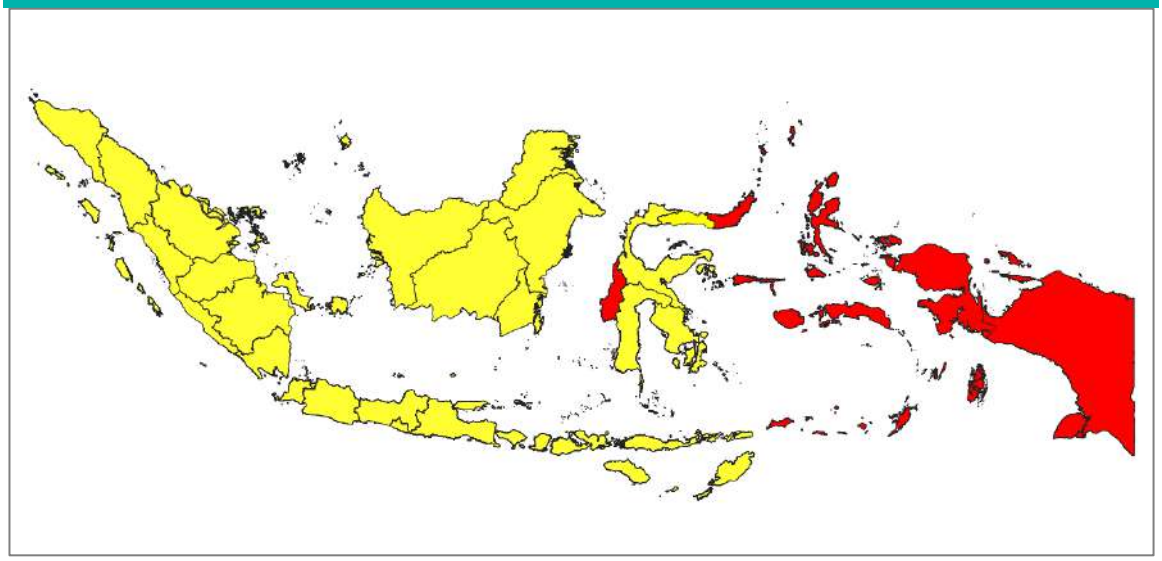

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Dapat terlihat pada Gambar 6.19 bahwa provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta terdapat di seluruh provinsi Indonesia bagian timur dan sebagian Indonesia bagian tengah.

b. Angka cacat tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini adalah angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2020 angka cacat tingkat 2 sebesar 2,32 per 1.000.000 penduduk, angka ini cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan kegiatan penemuan kasus semakin ke arah dini dan keterlambatan kasus dapat dicegah.

GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU
PER 1.000.000 PENDUDUK
TAHUN 2010-2020

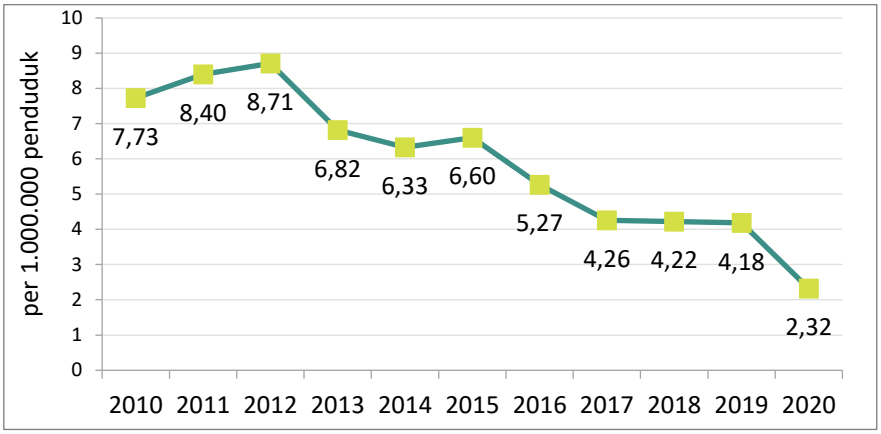

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Tidak ditemukan cacat tingkat 2 pada kasus baru tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sebaliknya di Provinsi Papua jauh melebihi provinsi yang lain yaitu mencapai 11,35 per 1.000.000 penduduk.

GAMBAR 6.20
ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2020

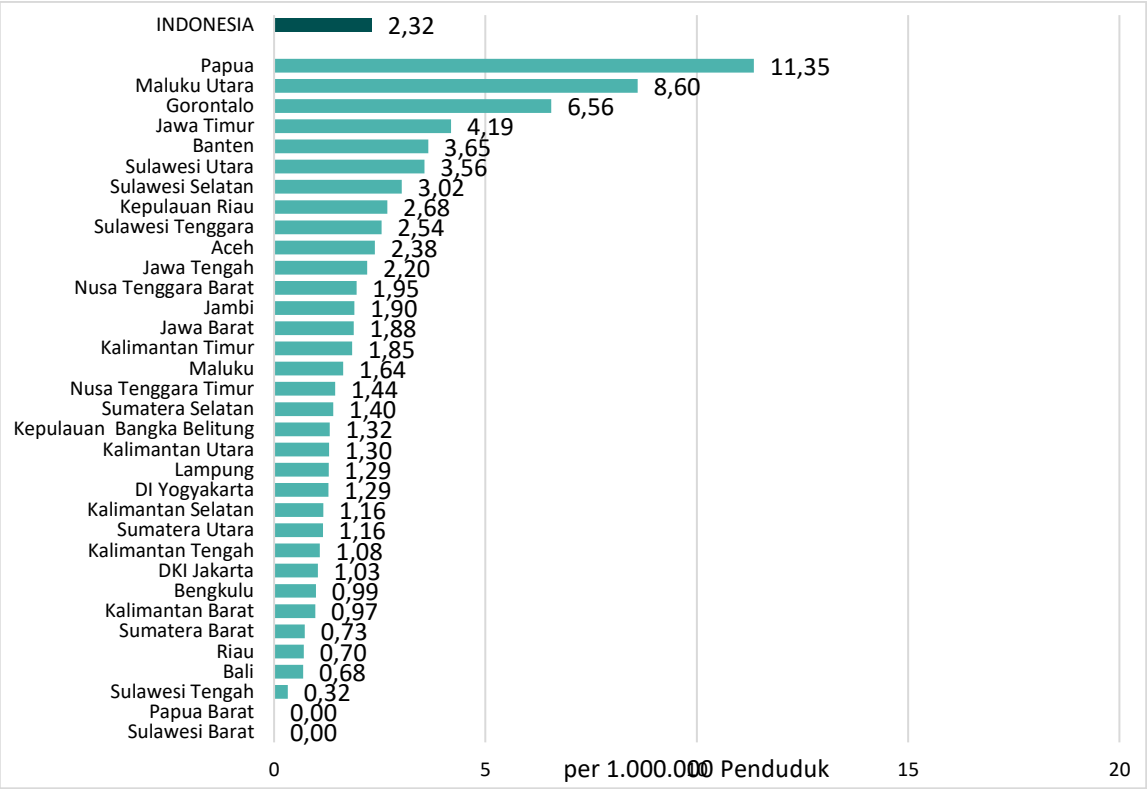

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

c. Proporsi kusta Multibasiler (MB) dan proporsi penderita kusta pada anak

Proporsi kusta MB dan proporsi penderita kusta pada anak (0-14 tahun) di antara penderita baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penularan di masyarakat.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2010-2020

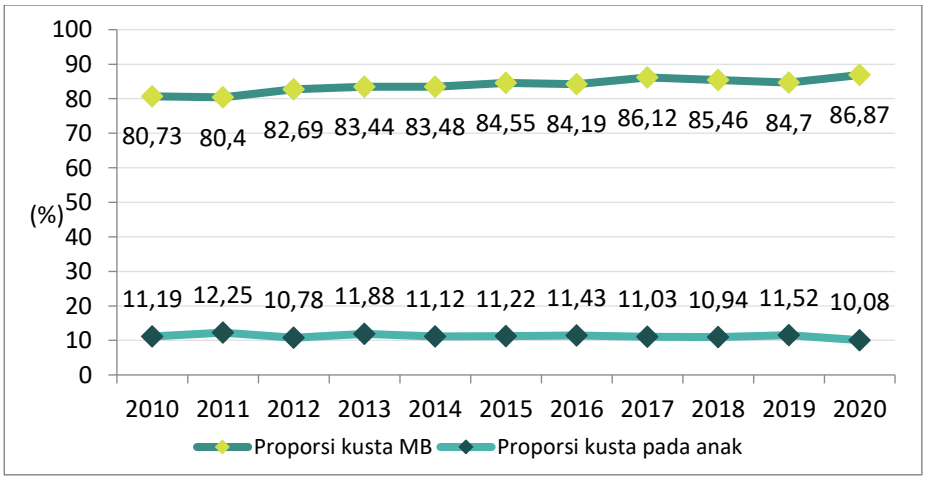

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2010-2020. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan. di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2020 yaitu Gorontalo Kalimantan Tengah, dan Riau.

Begitu juga dengan proporsi kusta anak pada periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (24,18%), Maluku Utara (23,96%), dan Papua (20,06%). Data atau informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 57 sampai Lampiran 59.b.

7. *Coronavirus Disease* (COVID-19)

Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan *yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (*SARS-CoV-2*). Kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan,sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk, nyeri tenggorok, kongesti hidung, sakit kepala, dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lain. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan beberapa pasien, geala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Orang lanjut usia dan dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.

COVID-19 ditularkan melalui droplet, penularan terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan (misalnya: batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

Kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Dan dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor K.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (*PHEIC*).

a. Kasus Konfirmasi COVID-19

Sejak pertama kali diumumkan adanya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 31 Desember 2020, tercatat kasus konfirmasi di Indonesia sebesar 743.198 kasus dengan 109.963 kasus aktif. Jumlah kasus konfirmasi tertinggi dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta (183.735), Jawa Timur (84.152), dan Jawa Barat (83.579).

GAMBAR 6.22
KASUS KONFIRMASI COVID-19
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2020

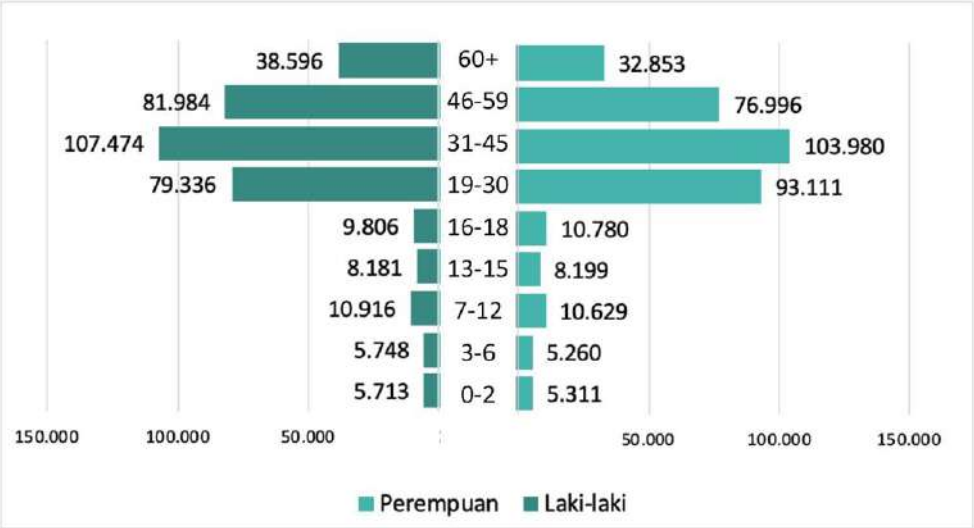

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Gambar diatas menunjukan bahwa jumah kasus konfirmasi COVID-19 pada jenis kelamin secara keseluruhan dan pada setiap kelompok umur tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, kasus konfirmasi COVID-19 terbanyak yaitu pada jenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan kelompok umur, kasus COVID-19 terbanyak diderita pada kelompok umur 31 – 45 tahun (211.454), 19 – 30 tahun (172.447), dan 46 – 59 tahun (158.980), baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa, data diatas merupakan distribusi jenis kelamin dan kelompok umur dari identitas yang dilaporkan lengkap pada sistem *New All Record*.

b. Angka Kesembuhan (Recovery Rate/*RR*) dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*/*CFR*) COVID-19

Recovery Rate (*RR*) merupakan jumlah kasus COVID-19 yang sembuh dibagi dengan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Sedangkan, *Case Fatality Rate* (*CFR*) merupakan perhitungan dari jumlah kasus COVID-19 yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi.

GAMBAR 6.23
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2010-2020

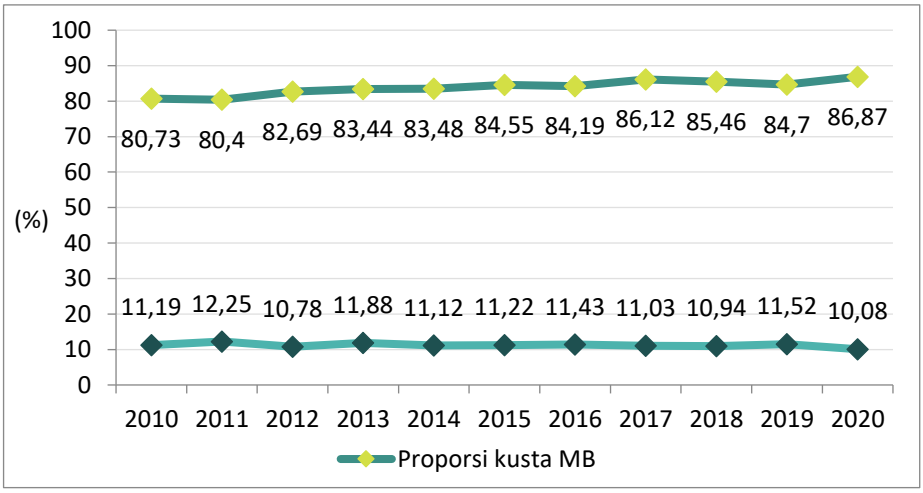

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

GAMBAR 6.24
***RECOVERY RATE* (RR) DAN *CASE FATALITY RATE* (*CFR*) COVID-19**
TAHUN 2020

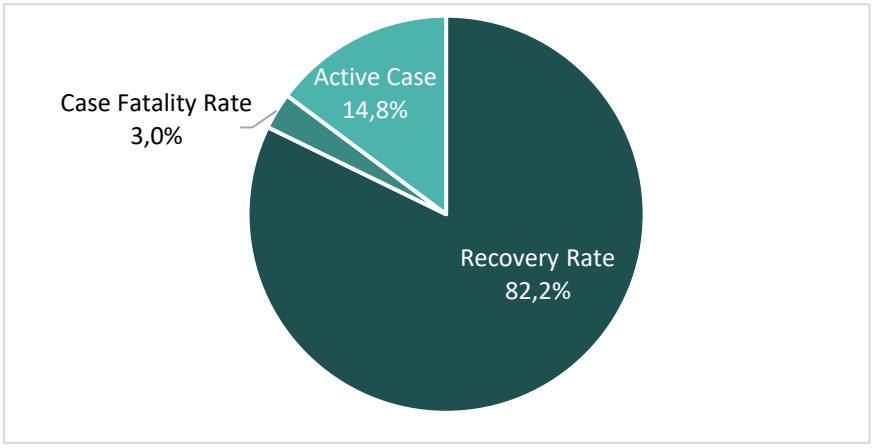

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar diatas menunjukan bahwa sampai 31 Desember 2020 RR di Indonesia sebesar 82,2% dengan total kasus sembuh sebanyak 611.097 dan *CFR* sebesar 3,0% dengan total kasus meninggal 22.138.

GAMBAR 6.25
***RECOVERY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2020

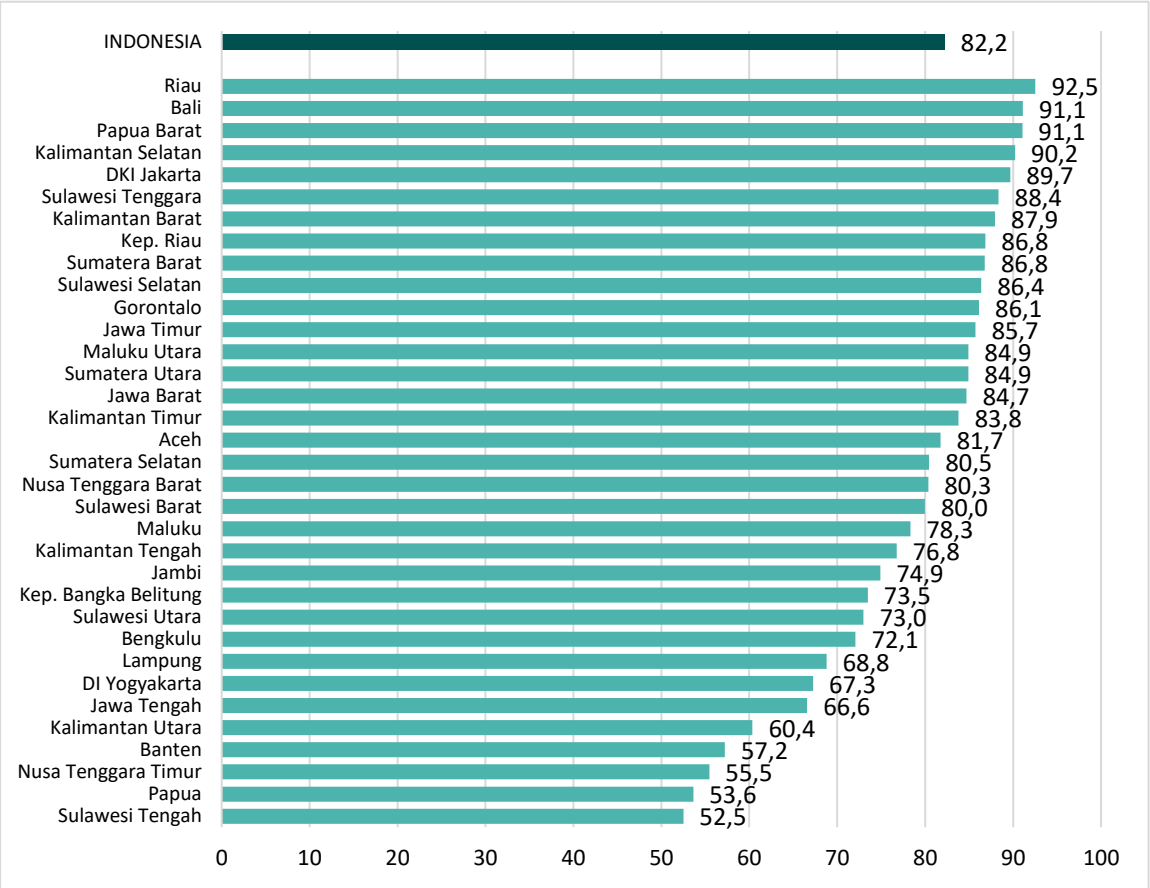

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan RR tertinggi yaitu Provinsi Riau (92,5%), Bali (91,1%), Papua Barat (91,1%) dan Kalimantan Selatan (90,2%). Sedangkan, provinsi dengan RR terendah yaitu Sulawesi Tengah (52,5%), Papua (53,6%), dan Nusa Tenggara Timur (55,5%),

GAMBAR 6.26
***CASE FATALITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2020

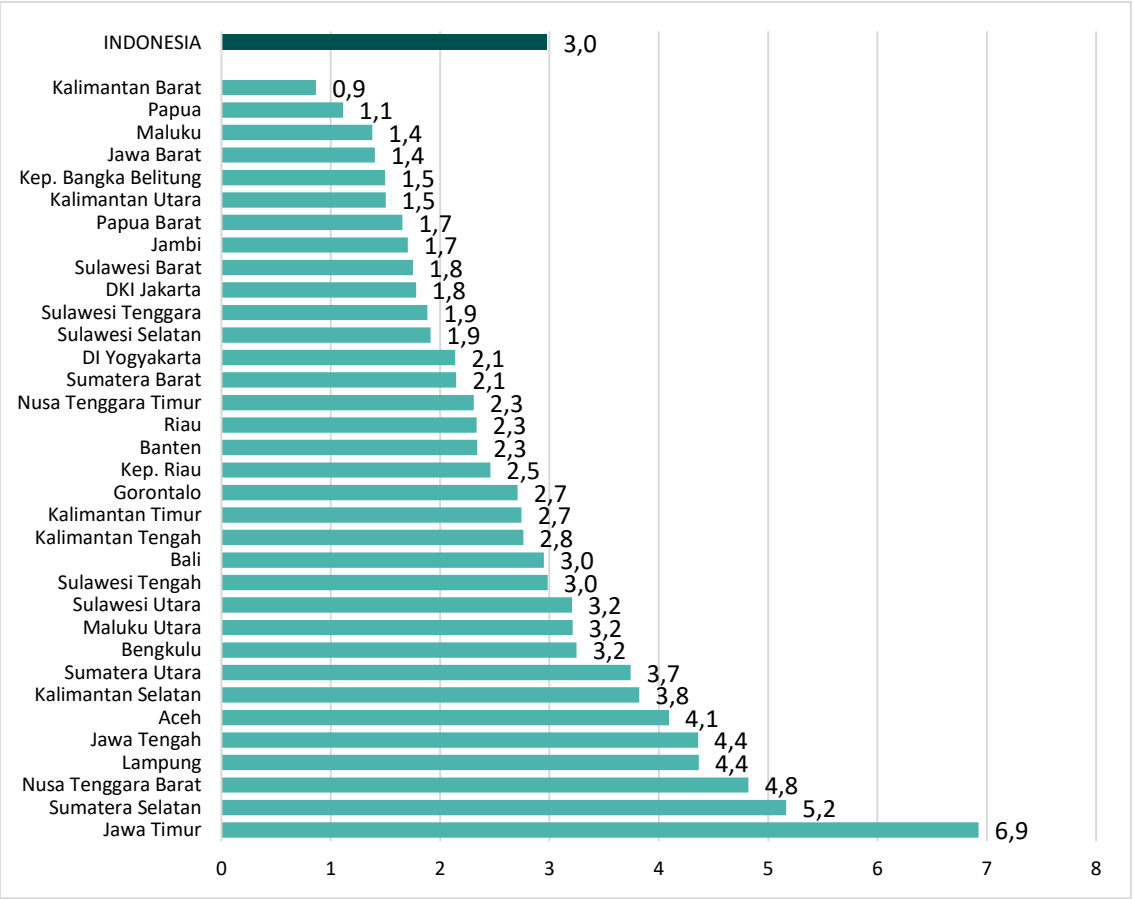

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan *CFR* lebih besar dibandingkan Indonesia adalah Jawa Timur (6,9%), Sumatera Selatan (5,2%), Nusa Tenggara Barat (4,8%), Lampung (4,4%), Jawa Tengah (4,4%), Aceh (4,1%), Kalimantan Selatan (3,8%), Sumatera Utara (3,7%), Bengkulu (3,2%), Maluku Utara (3,2%), dan Sulawesi Utara (3,2%).

c. *Positivity Rate* COVID-19

Positivity rate dihitung dengan membandingkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dibagi dengan jumlah orang yang dites COVID-19. *Positivity rate* yang direkomendasikan WHO sebesar ≤ 5%. *Positivity rate* dapat memberikan indikasi seberapa luas penularan di komunitas atau di area tempat testing dilakukan. *Positivity rate* yang tinggi menunjukan transmisi penularan yang tinggi dan kemungkinan masih banyak orang dengan virus corona di komunitas yang belum di tes. Hal ini juga dapat terjadi jika hanya sebagian dari komunitas dengan risiko besar yang dites, dan kemungkinan lainnya yaitu, adanya proses pelaporan yang tertunda atau mengganggu hasil dari *positivity rate*, misalnya dengan memprioritaskan pelaporan hasil tes positif daripada hasil negatif.

GAMBAR 6.27
***POSITIVITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2020

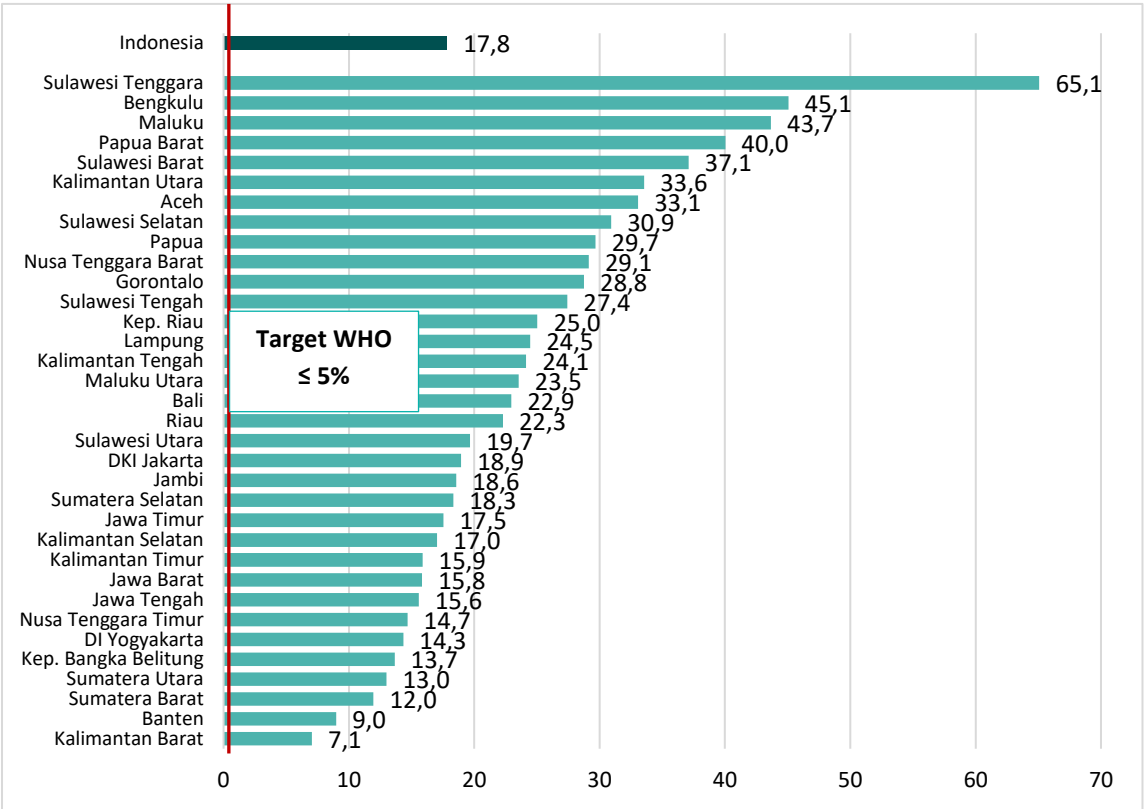

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Gambar diatas menunjukan bahwa *positivity rate* secara nasional dan provinsi belum mencapai rekomendasi WHO sebesar ≤ 5%. *Positivity rate* nasional sebesar 17,8%, sedangkan provinsi dengan *positivity rate* terendah yaitu Provinsi Kalimantan Barat (7,06%), Banten (8,98%), dan Sumatera Barat (11,96%).

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Untuk menekan penyebaran virus dan untuk menanggulangi pandemi salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Selain itu kita juga harus menerapkan Protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) untuk mencegah serta mengurangi angka penyebaran kasus.

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

1. Tetanus Neonatrum

Tetanus neonatorum merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dapat terkena penyakit tetanus apabila *Basil Clostridium tetani* masuk ke dalam tubuhnya melalui luka. Infeksi ini dapat terjadi akibat pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat yang tidak steril. Pada negara berkembang masih banyak ditemukan kasus *tetanus*

neonatorum (*TN*), khususnya negara dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Jumlah kasus *TN* menurun pada tahun 2020, yaitu sebesar 4 kasus, dimana sebelumnya terdapat 17 kasus pada tahun 2019. Meski demikian, *CFR* meningkat menjadi 50% pada tahun 2020 dimana sebelumnya tahun 2019 *CFR* sebesar 11,76%. Dari 2 provinsi yang terdapat kasus *TN* pada tahun 2020 yaitu Sumatera Selatan dan Papua, hanya di Papua terdapat kasus meninggal sebanyak 2 kasus kematian. Jumlah kasus *TN* pada tahun 2020 terbanyak juga di Provinsi Papua yaitu sebanyak 3 kasus, dengan *CFR* sebesar 66,7%. Penyebaran kasus *TN* dapat dilihat pada Gambar 6.27 di bawah ini.

GAMBAR 6.28
DISTRIBUSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2019 dan 2020

TAHUN 2019

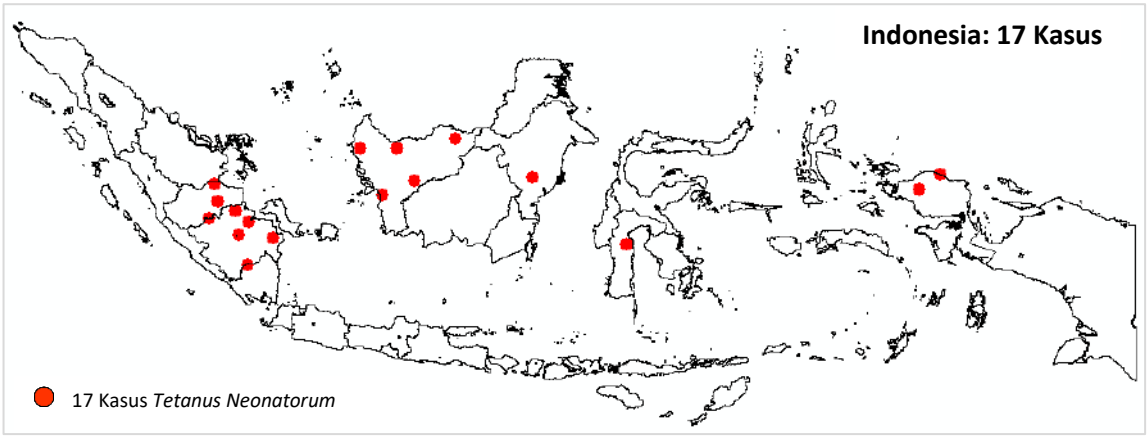

TAHUN 2020

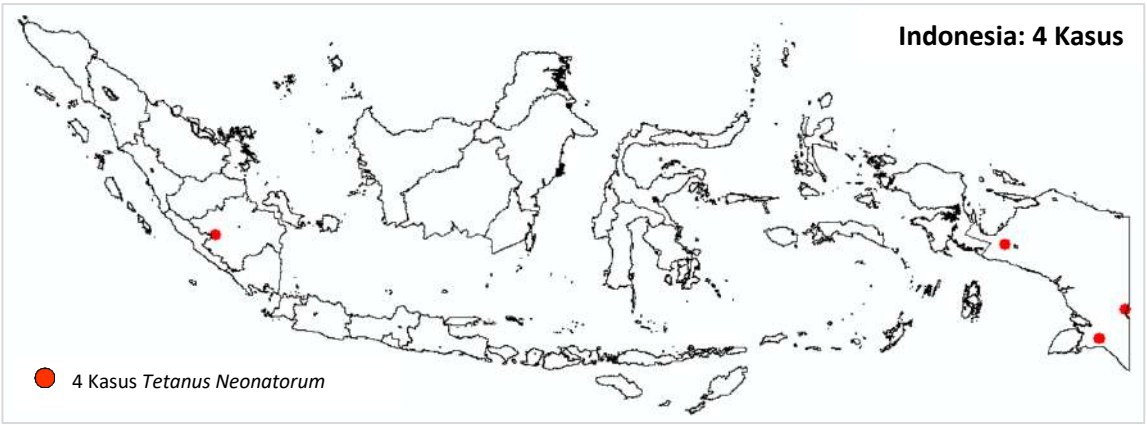

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan faktor risiko, sebanyak 4 kasus TN terjadi pada kelompok yang tidak diimunisasi, imunisasi TT2+, TT1, dan tidak diketahui status imunisasinya sebanyak 0 kasus. Menurut penolong persalinan, terdapat 2 dari 4 kasus TN ditolong oleh penolong persalinan tradisional (misalnya dukun), 1 kasus tidak diketahui, dan 1 kasus yang persalinannya ditolong oleh dokter. *Tetanus Neonatorum* juga mungkin disebabkan oleh cara perawatan tali pusat dan/atau alat pemotong tali pusat yang tidak benar. Pada 2020, terdapat 3 kasus yang tidak diketahui, dan 1 kasus dengan perawatan lain-lain, dan 0 kasus perawatan tali pusat secara

tradisional dan alkohol/iodin. Sementara itu, berdasarkan alat yang digunakan untuk pemotongan tali pusat, terdapat 2 kasus *TN* yang tali pusatnya dipotong dengan menggunakan bambu, sedangkan 1 kasus menggunakan alat lain, dan 3 kasus tidak diketahui alat yang digunakan, dan 0 kasus pemotongan tali pusat dengan gunting.

GAMBAR 6.29
PROPORSI KASUS *TETANUS NENONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO
TAHUN 2020

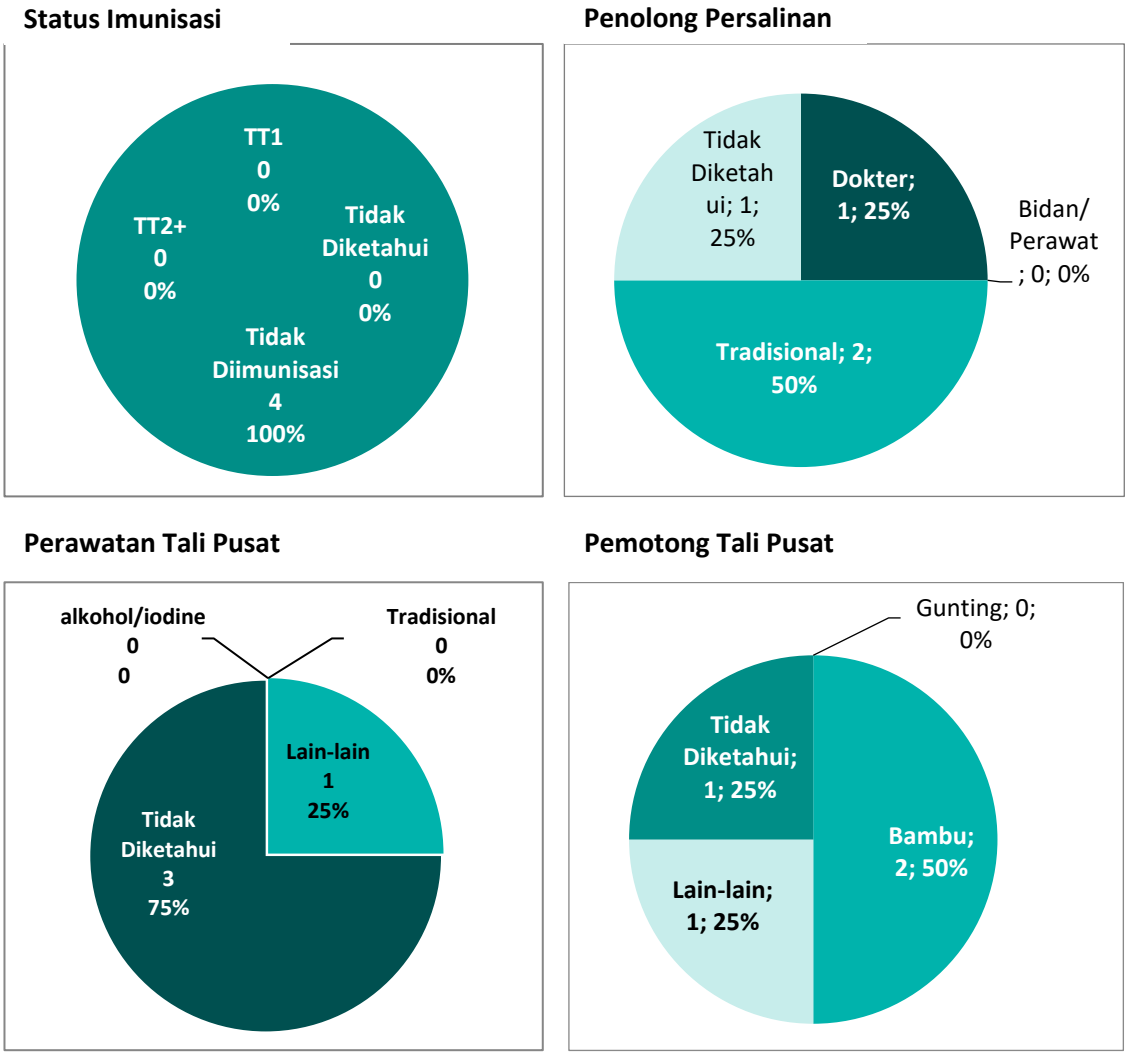

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

2. Campak

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari *genus Morbillivirus* dan termasuk golongan Paramyxovirus. Campak disebut juga morbili atau measles. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut.

Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada tahun 2020 penyebaran kasus suspek campak hampir terdapat di seluruh provinsi Indonesia, hanya 4 provinsi yang tidak terdapat kasus suspek campak. Pada tahun 2020, terdapat 3.382 kasus suspek campak, menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 8.819 kasus. Kasus suspek campak terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah (680 kasus), DKI Jakarta (596 kasus), dan DI Yogyakarta (408 kasus).

GAMBAR 6.30
SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2019 DAN 2020

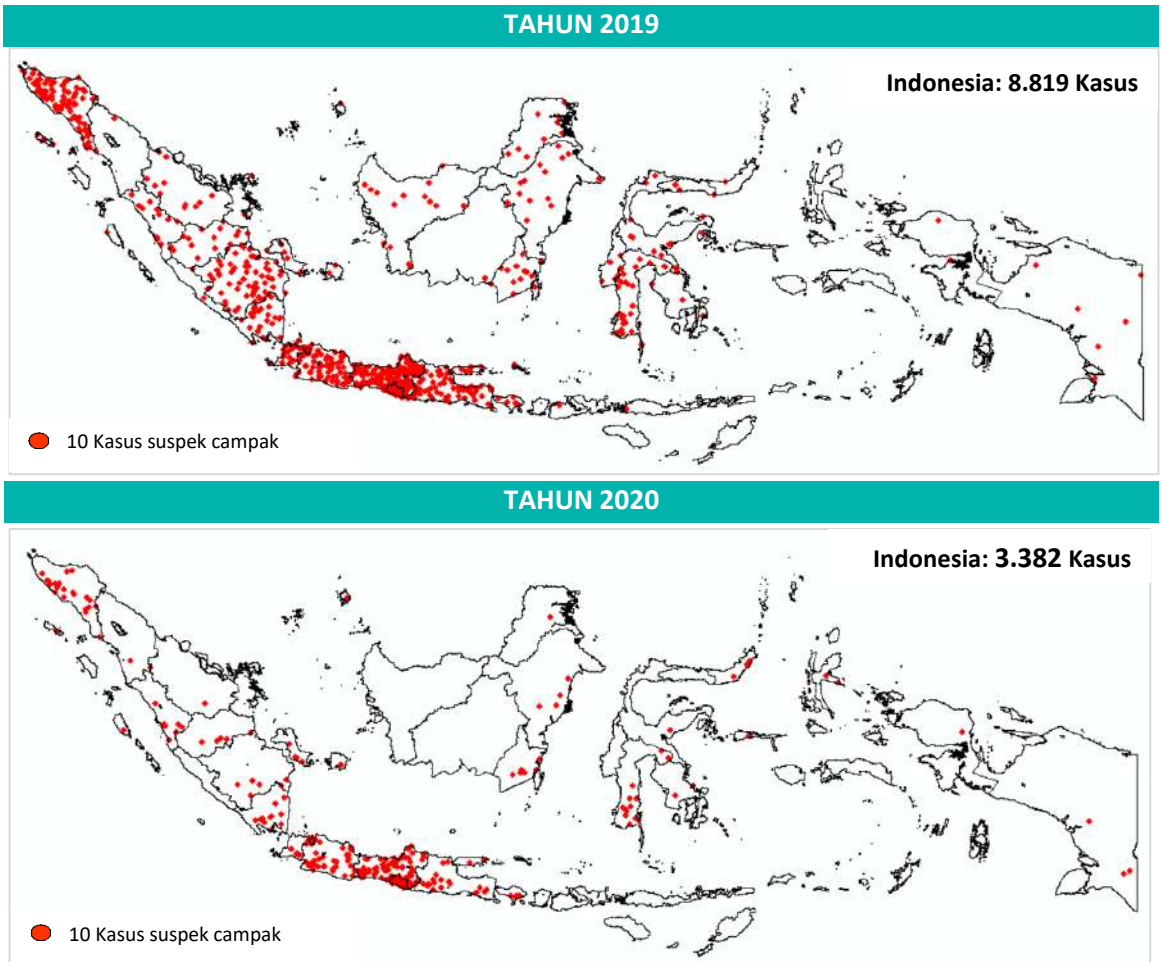

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Suspek campak pada tahun 2020 tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan *Incidence Rate* (*IR*) sebesar 1,25 per 100.000 penduduk. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,29 per 100.000 penduduk. Penurunan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2020 seiring dengan provinsi yang melaporkan tidak ada kasus suspek

campak meningkat menjadi 4 provinsi, yaitu Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur dimana pada tahun 2019 terdapat 1 provinsi melaporkan tidak ada kasus suspek campak.

Jika dilihat distribusi kasus suspek campak per bulan pada tahun 2020 (Gambar 6.29), dapat diketahui bahwa tren kasus suspek campak cenderung tinggi pada awal tahun dan menurun drastis pada bulan April dan seterusnya sampai akhir tahun. Jumlah kasus suspek campak tertinggi pada bulan Januari (920 kasus), sedangkan jumlah terendah terdapat pada bulan Desember (65 kasus). Penurunan jumlah kasus ini antara lain disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tenaga surveilans di semua level fokus untuk melakukan surveilans Covid-19 sehingga program surveilans lainnya termasuk surveilans PD3I tidak dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

GAMBAR 6.31
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
DI INDONESIA TAHUN 2020

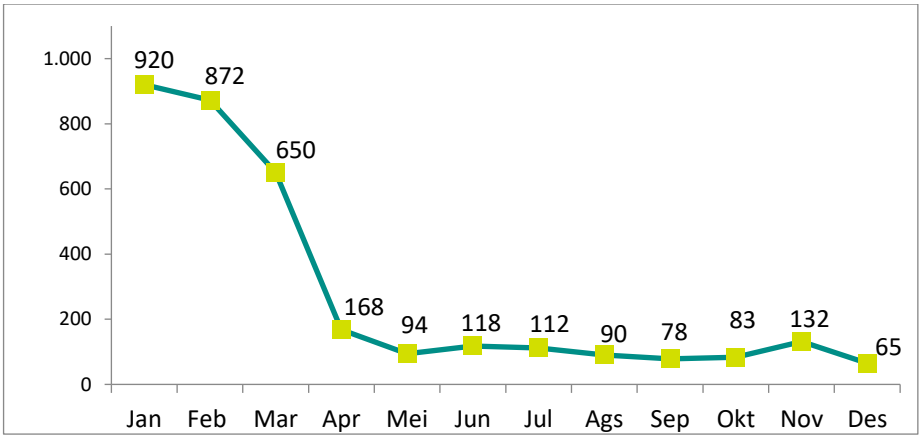

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Proporsi kasus suspek campak terbesar terdapat pada kelompok umur >14 tahun (28%), sedangkan proporsi kasus suspek terendah terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun dan suspek dengan umur yang tidak diketahui, dengan persentase masing-masing sebesar 11,6% dan 1,4%. Suspek campak yang divaksinasi (menerima minimal satu dosis imunisasi campak) tahun 2020 sebanyak 1.634 orang, dengan proporsi sebesar 48,3%. Proporsi kasus suspek yang divaksinasi terhadap kasus suspek terbesar terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun (36,3%). Gambar 6.31 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak per kelompok umur. Rincian kasus suspek campak. per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 62.a, 62.c, dan 62.d.

GAMBAR 6.32
PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA
TAHUN 2020

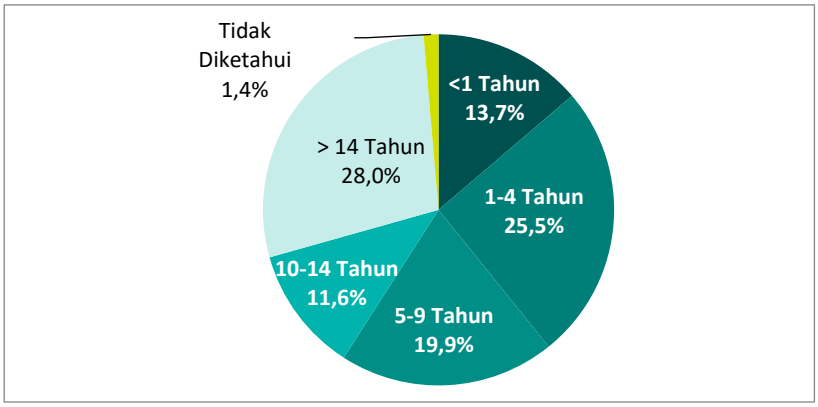

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan proporsi suspek divaksinasi terhadap total kasus suspek tertinggi yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku. Sedangkan provinsi dengan proporsi terendah yaitu Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Gambar 6.32 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak terhadap kasus suspek campak yang divaksinasi menurut provinsi.

GAMBAR 6.33
PROPORSI SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

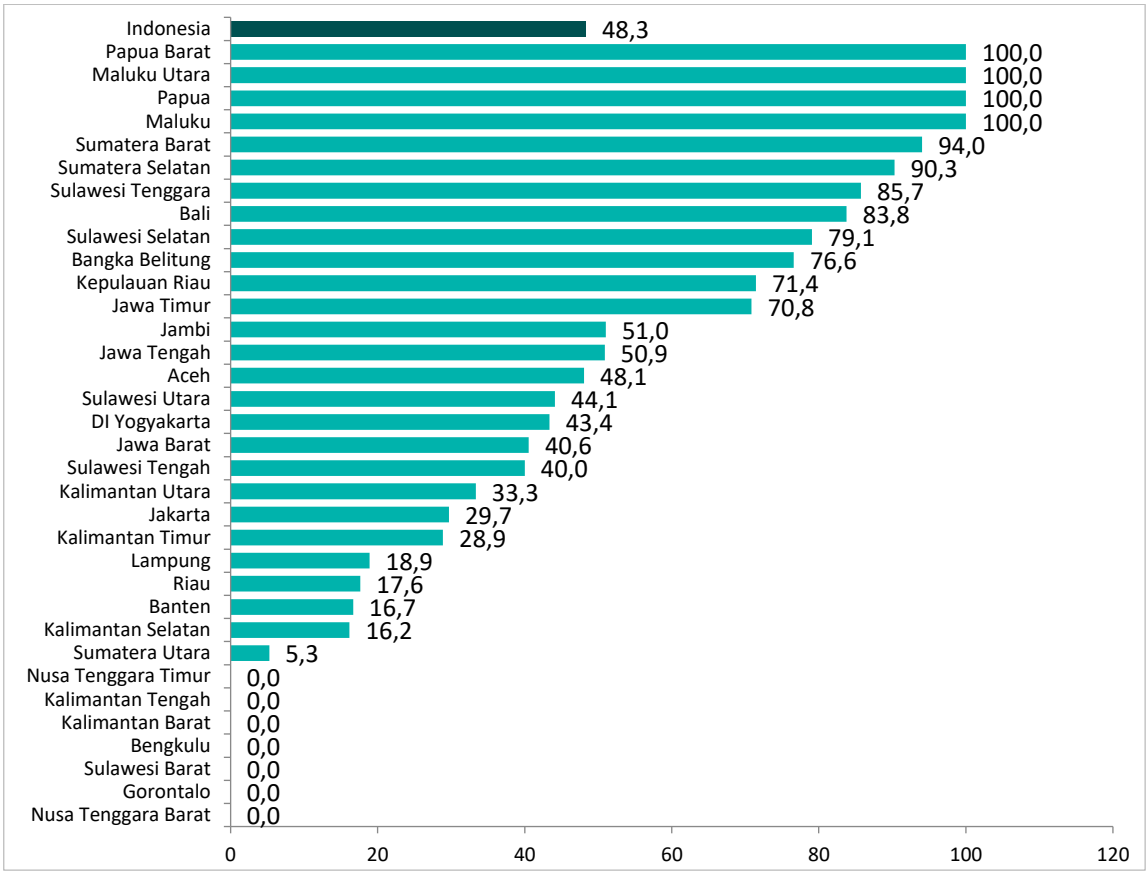

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan KLB suspek campak. Pada tahun 2020, dari 3.382 kasus suspek campak terdapat 6 kasus KLB suspek campak. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang terjadi sebanyak 32 KLB.

GAMBAR 6.34
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

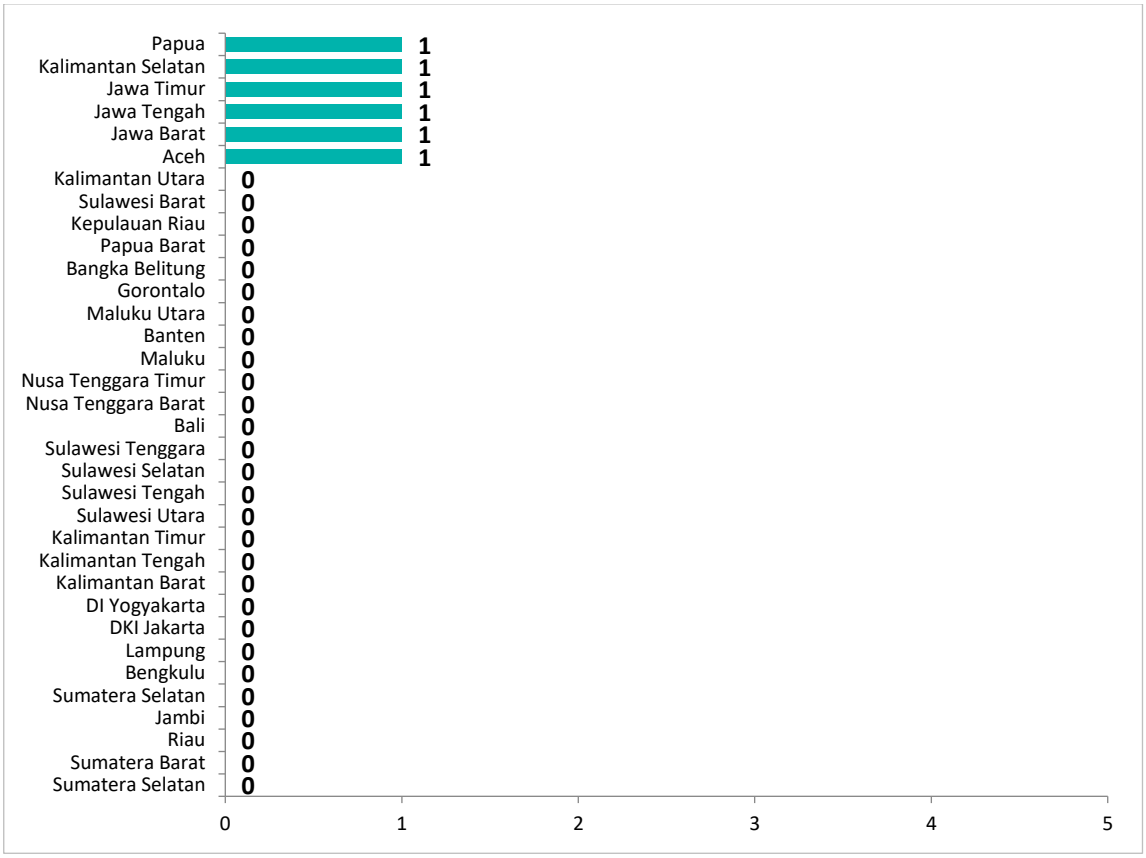

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

KLB suspek campak terdapat di Provinsi Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Aceh.Dengan total kasus terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 680 kasus dan Jawa Barat sebanyak 323 kasus. Semua KLB suspek campak yang terjadi pada tahun 2020 dilaporkan tidak ada kematian. Frekuensi dan jumlah kasus pada KLB suspek campak menurut provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 62.e.

Sebaran KLB suspek campak berdasarkan konfirmasi laboratorium dari 51 total darah (serum) sampel yang diterima Pusat pada tahun 2020, terdapat 5 kasus campak, 11 kasus rubella, 0 kasus gabungan (campak dan rubella), 35 kasus negatif, dan 0 kasus yang masih menunggu konfirmasi laboratorium.

3. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diptheriae strain toksigenik*. Manusia adalah satu-satunya *reservoir Corynebacterium diptheriae*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (*CDC Manual for the Surveilan of Vaccine Preventable Diseases*, 2017). Angka kematian Difteri rata rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Kasus Difteri pada tahun 2020 menyebar di hampir semua wilayah di Indonesia. Jumlah kasus difteri pada tahun 2020 sebanyak 259 kasus, jumlah kematian sebanyak 13 kasus, dengan *CFR* sebesar 5,02%. Jumlah kasus Difteri tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019 (529 kasus). Jumlah kematian akibat Difteri juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya (23 kasus). Tetapi, *CFR* pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 (4,5%). Berdasarkan provinsi, jumlah kasus terbanyak terdapat di Jawa Barat yakni sebanyak 75 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 terdapat 12 provinsi tidak ditemukan kasus Difteri.

GAMBAR 6.35
SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

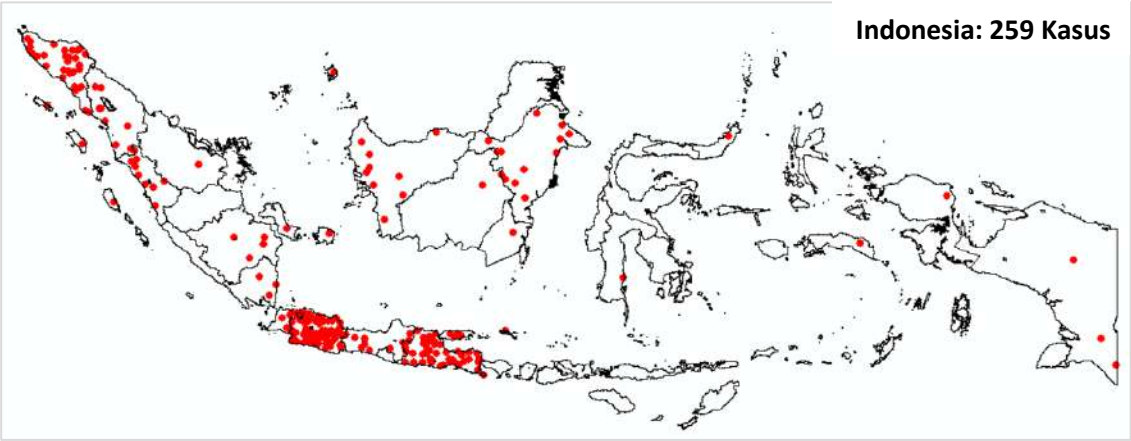

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah seperti tercantum dalam Permenkes 1501 tahun 2010. Kegiatan penanggulangan KLB Difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait.

KLB Difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB Difteri jika ditemukan satu suspek Difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek Difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan KLB Difteri antara lain:

1. Setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian

2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkanprinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri /isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek Difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis
5. Kontak erat diberikan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
6. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
7. Setiap suspek Difteri dilakukan ORI (respon pemberian imunisasi pada KLB) sesegera mungkin, sebaiknya luas wilayah ORI dilakukan untuk satu (1) kab/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka ORI minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval ORI 0-1-6 bulan
8. ORI dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB Difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir

4. Polio dan *AFP* (*Acute Flaccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut)

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai). Diantara mereka yang lumpuh, 5% hingga 10% akan berakhhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan mereka.

Pada pertemuan tahunan bulan Mei 1988, the *World Health Assembly* (*WHA*), suatu forum sidang tertinggi yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO), telah mengeluarkan resolusi untuk membasmi penyakit polio dari dunia ini.

Pada bulan Mei 2012, sidang *World Health Assembly* (*WHA*) mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategistrategi yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine* (*tOPV*) menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine* (*bOPV*), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV), dan penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV), surveilans *AFP* (*Acute Flaccid Paralysis*), dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan Virus Polio.

Sejak tahun 1999, virus polio liar tipe 2 tidak ditemukan lagi. Virus polio liar yang masih bersirkulasi sampai saat ini adalah virus polio liar tipe 1, sedangkan virus polio liar tipe 3 terakhir ditemukan pada 2012. Menghadapi Polio Endgame, maka diharapkan tidak hanya virus polio liar yang dibasmi, tetapi juga tidak boleh lagi ditemukan virus yang berasal dari vaksin (VDPV) sehingga dilakukan penarikan OPV secara bertahap yang dimulai dengan penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine* (*tOPV*) yang mengandung antigen virus polio tipe 1, 2, dan 3, menjadi

bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV) yang hanya mengandung virus polio tipe 1 dan 3. Penarikan OPV ini harus dilaksanakan untuk mencegah risiko munculnya kasus polio yang disebabkan oleh virus polio Sabin.

Polio telah berhasil dibasmi di 4 wilayah regional WHO dari total sejumlah 6 wilayah regional WHO: regional Amerika (1998), Pasifik Barat (2000), Eropa (2002), dan Asia Tenggara (2014). Di wilayah regional lainnya yaitu Mediterania Timur dan Afrika, kejadian polio telah sangat terfokus dan hanya terjadi di beberapa negara yang menjangkiti beberapa provinsi saja. Saat ini hanya ada 3 negara yang digolongkan sebagai negara endemis polio: Pakistan, Afganistan dan Nigeria.

Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat VDPV tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi sehingga kondisi ini dinyatakan sebagai KLB. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan *bOPV*. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layuh mendadak (*AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layuh akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans *AFP* juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Kasus lumpuh layuh akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari nonpolio *AFP*. Kementerian Kesehatan menetapkan target non polio *AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2020, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 0,64/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Hal itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,17/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Keadaan ini bisa disebabkan karena tahun 2020 di Indonesia dan juga dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang mengakibatkan petugas lebih fokus terkait penanganan COVID-19 sehingga temuan kasus dilapangan menjadi kecil.

Pada tahun 2020 ditemukan kasus NonPolio *AFP* hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak ada kasus. Hanya Provinsi Bali yang provinsi sudah mencapai standar minimal penemuan *non polio AFP rate* sebesar ≥2 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun (2,17) , dan masih terdapat 33 provinsi *dengan non polio AFP rate* yang belum mencapai standar minimal penemuan.

GAMBAR 6.36
PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK UMUR< 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 DAN 2020

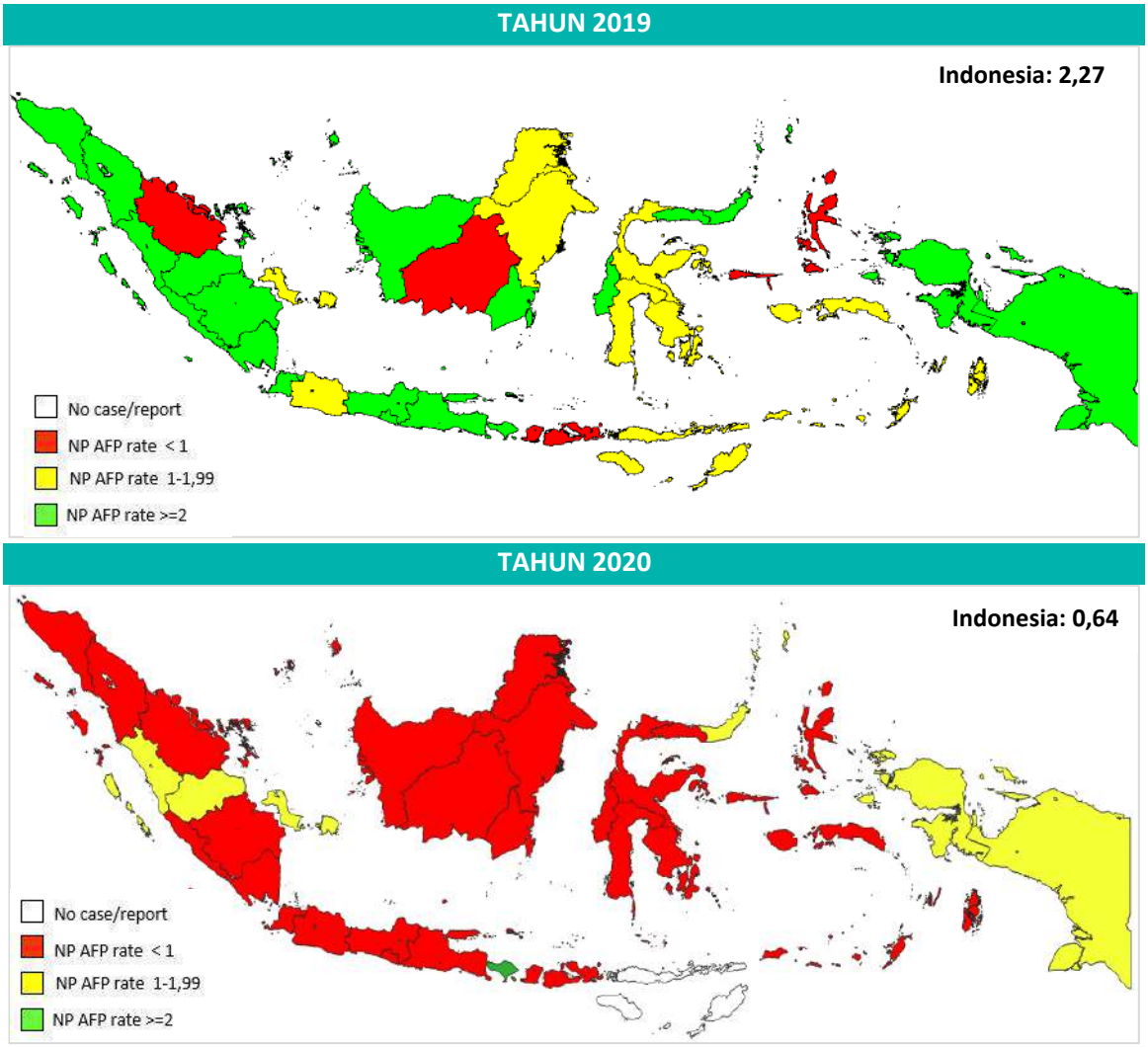

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021 (dibingkai)

Sejak tahun 2007 hingga 2019, secara umum target *Non Polio AFP rate* sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai. Pada tahun 2016 kinerja capaian tidak mencapai target dan bahkan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,64/100.000 penduduk berusia <15 tahun. Selanjutnya pada tahun 2017 – 2019 standar minimal Non Polio *AFP Rate* sebesar ≥2 telah dapat dipenuhi. Begitu juga dengan persentase spesimen adekuat yang secara umum sejak tahun 2007 telah mencapai target sebesar 80%. Dan pada tahun 2017, 2018, dan 2020 capaian kinerja berada sedikit di bawah target (79,5%, 78,4%, dan 78,4%). Dan pada tahun 2019 standar minimal spesimen adekuat sebesar ≥80% telah dapat dipenuhi.

GAMBAR 6.37

CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007-2020

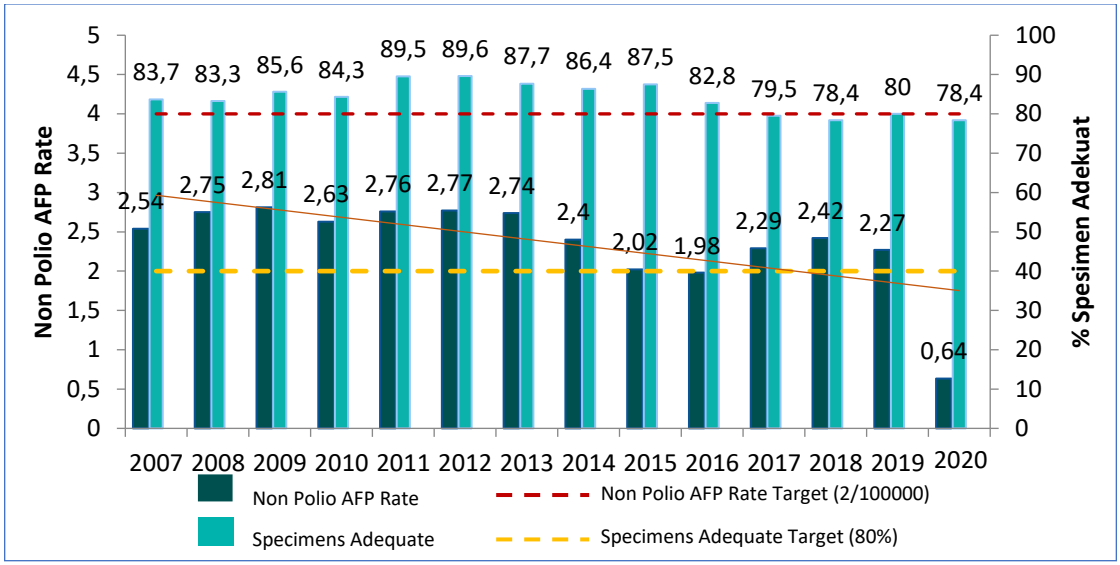

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan provinsi *dengan non polio AFP rate* per 100.000 penduduk umur <15 tahun tertinggi, yaitu sebesar 7,71 dan 6,5 per 100.000 penduduk, sedangkan provinsi terendah yaitu Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara yaitu sebesar 0,20 dan 0,49 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 6.38

NON POLIO *AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN

DI INDONESIA TAHUN 2020

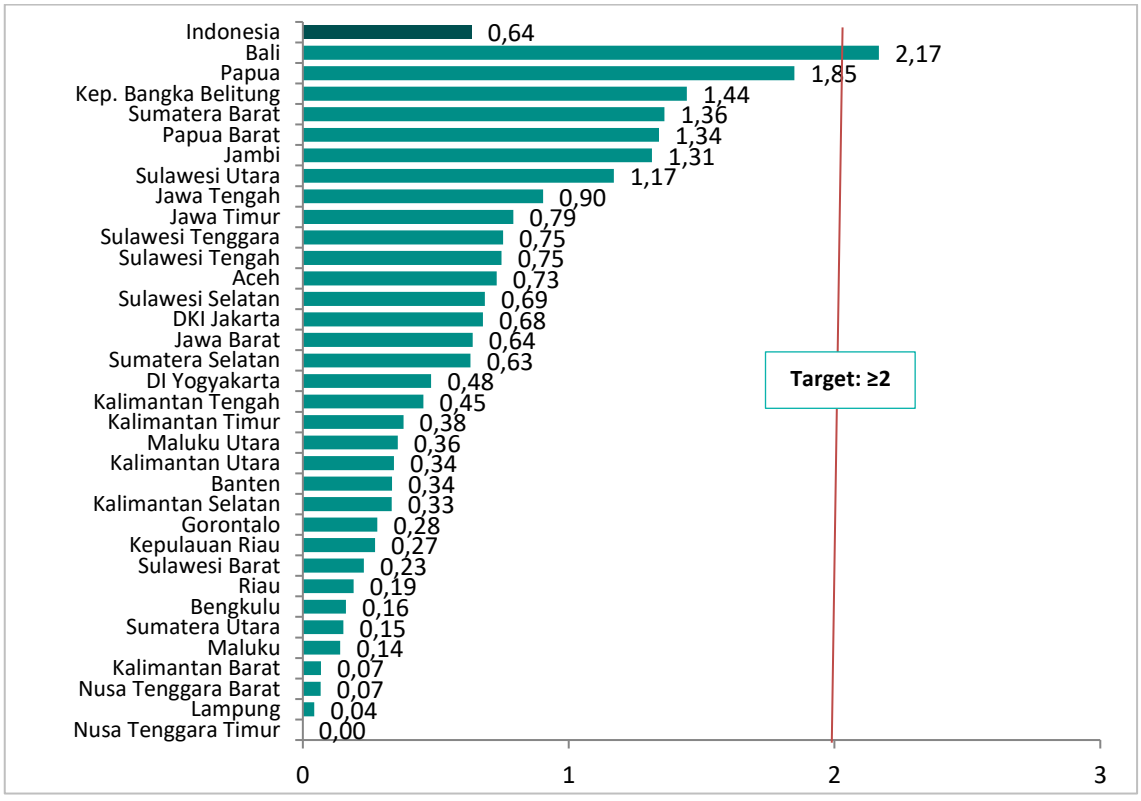

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans. Namun, tidak semua kasus AFP yang dilacak harus dikumpulkan spesimen tinjanya. Pengumpulan spesimen tinja tergantung dari lamanya kelumpuhan kasus AFP. Oleh karena itu, diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan.

GAMBAR 6.39
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019 DAN 2020

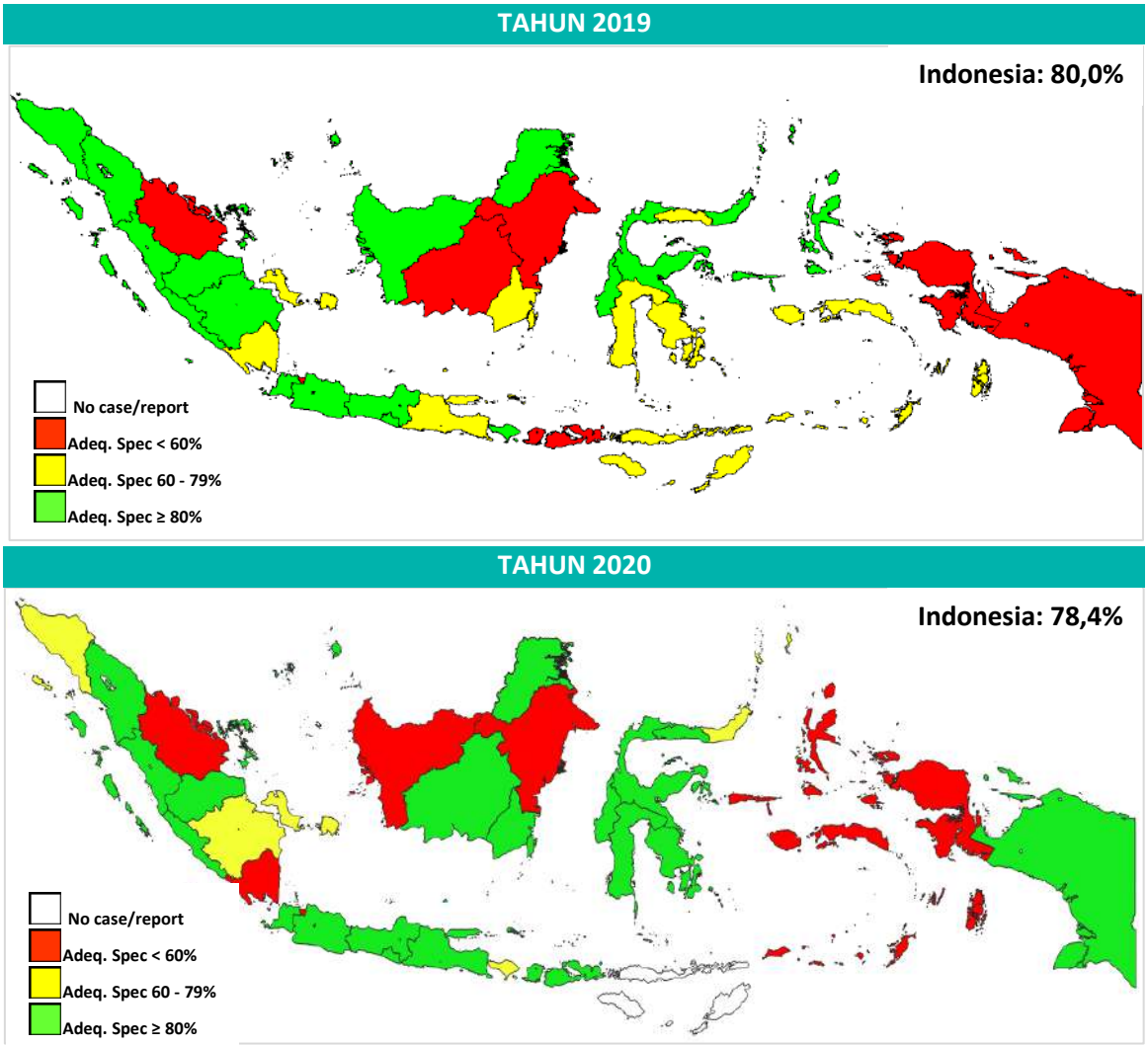

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat. Spesimen dinyatakan adekuat jika dua spesimen tinja diperiksa dengan kuantitas yang mencukupi untuk analisis laboratorium, setidaknya pengumpulan spesimen tinja 1 dan tinja 2 dengan rentang waktu 24 jam, dalam 14 hari pertama setelah kelumpuhan, dan dibawa ke laboratorium dengan menggunakan proses *cold chain* dan dokumen yang sesuai.

Spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2020 belum sesuai dengan standar, yaitu sebesar 78,4%. Meskipun demikian, sebanyak 20 provinsi telah mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2020, sedangkan 14 provinsi lainnya belum mencapai standar. Persentase spesimen adekuat *AFP* menurut provinsi tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 6.39

Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 61-63.

GAMBAR 6.40
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

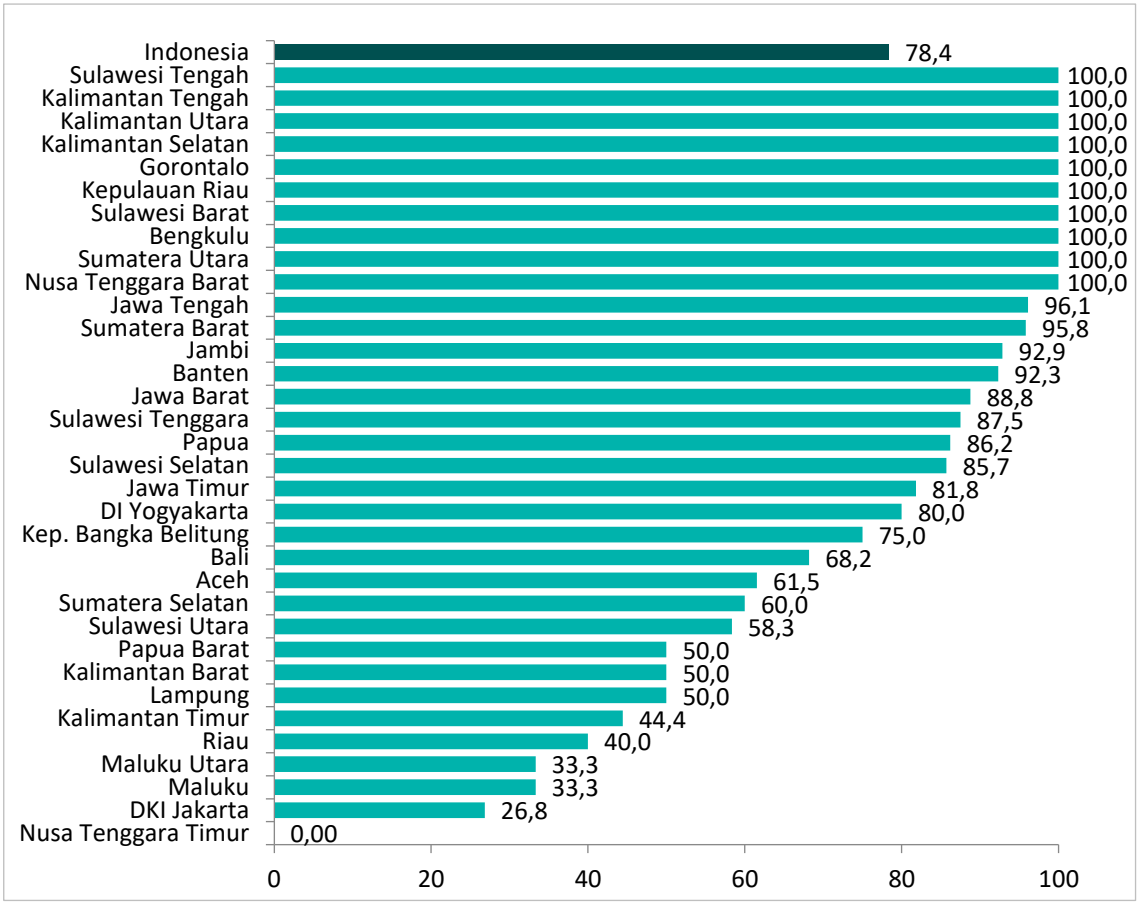

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). upaya-upaya tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
2. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan Imunisasi;
3. Melaksanakan peningkatan kapasitas PD3I dalam rangka meningkatkan cakupan surveilans *AFP* dan Campak-Rubella serta pengendalian Difteri;
4. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I selama pandemi Covid-19;

5. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program surveilans PD3I;
6. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komisi Ahli (Komli) Difteri, Komli Campak-Rubella/CRS, Komli surveilans AFP dan Komli Eradikasi Polio (ERAPO), untuk membahas hal-hal penting dan mendesak dalam rangka pengendalian PD3I;
7. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium Difteri, Campak-Rubella/CRS, dan Polio;
8. Melakukan pendampingan Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

C. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Di Indonesia terjadi 518 krisis kesehatan selama tahun 2020. Jumlah kejadian krisis kesehatan tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2019, yaitu sebanyak 448 krisis kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat definisi baru untuk krisis kesehatan pada Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi/fasilitas kesehatan rusak.

GAMBAR 6.41
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2020

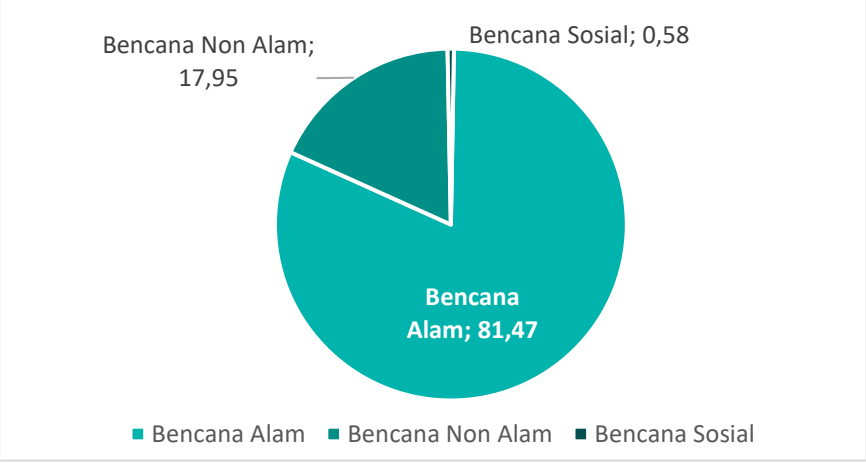

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Di Indonesia kejadian krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling sering terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 81,47%. Sisanya, sebanyak 17,95% bencana non alam dan 0,58% bencana sosial.

Pada tahun 2020, banjir merupakan krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 230 kejadian (54,5%) dan meliputi 27 dari 34 provinsi di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2020 adalah kebakaran sebanyak 53 kejadian (46,2%) yang meliputi 13 provinsi.

GAMBAR 6.42
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2020

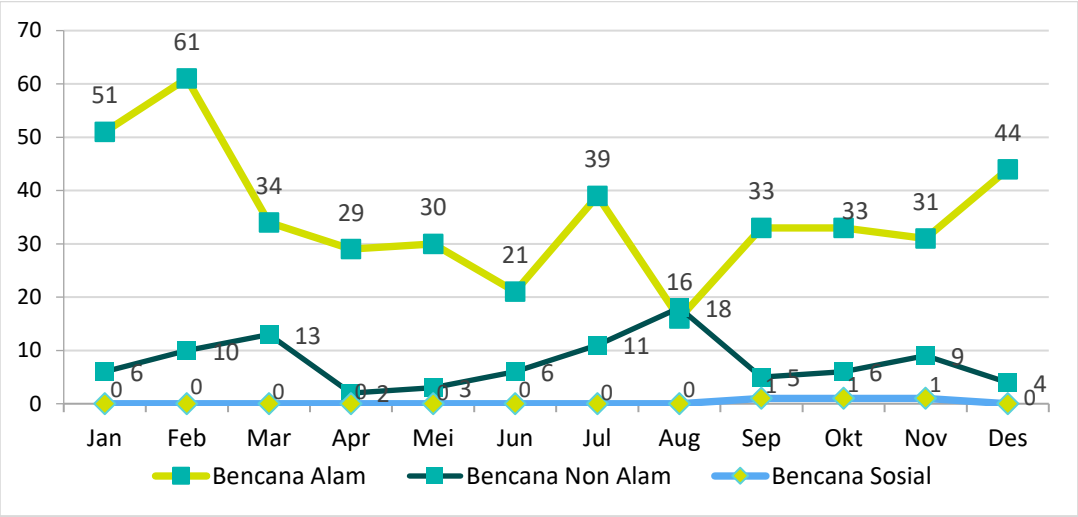

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah krisis kesehatan akibat bencana alam tertinggi terjadi pada bulan Februari yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan jumlah bencana non alam tertinggi di bulan Agustus yang sebagian besarnya adalah kebakaran, hal ini terjadi karena cuaca panas dan kering di musim kemarau pada bulan Agustus. Selain itu, bencana sosial tertinggi terjadi pada bulan November. Secara keseluruhan, jumlah bencana terbanyak terjadi di bulan Juli dan terendah di bulan April.

GAMBAR 6.43
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2020

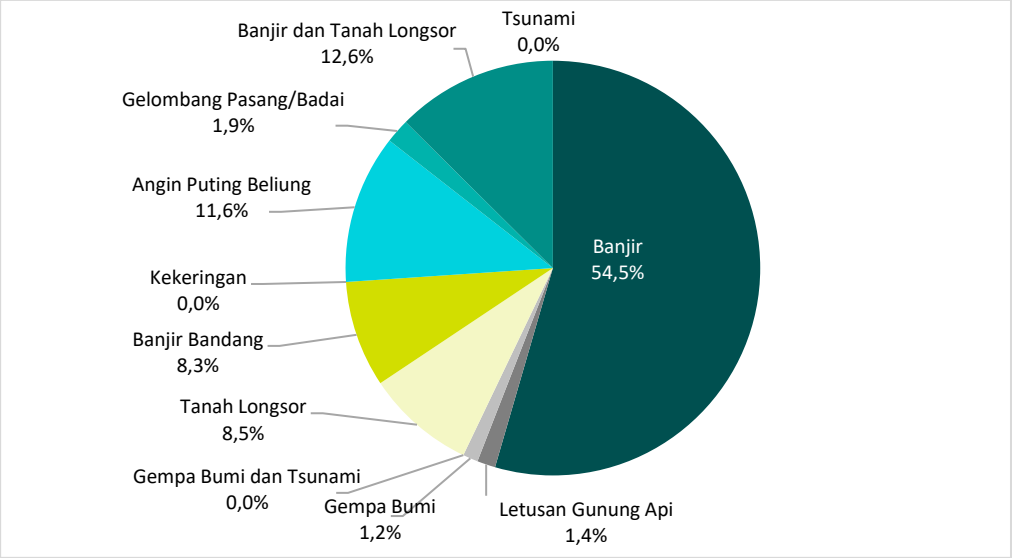

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia tahun 2020 yaitu bencana banjir (54,5%) diikuti banjir dan tanah longsor (12,6%), dan angin puting beliung (11,6%).

GAMBAR 6.44
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2020

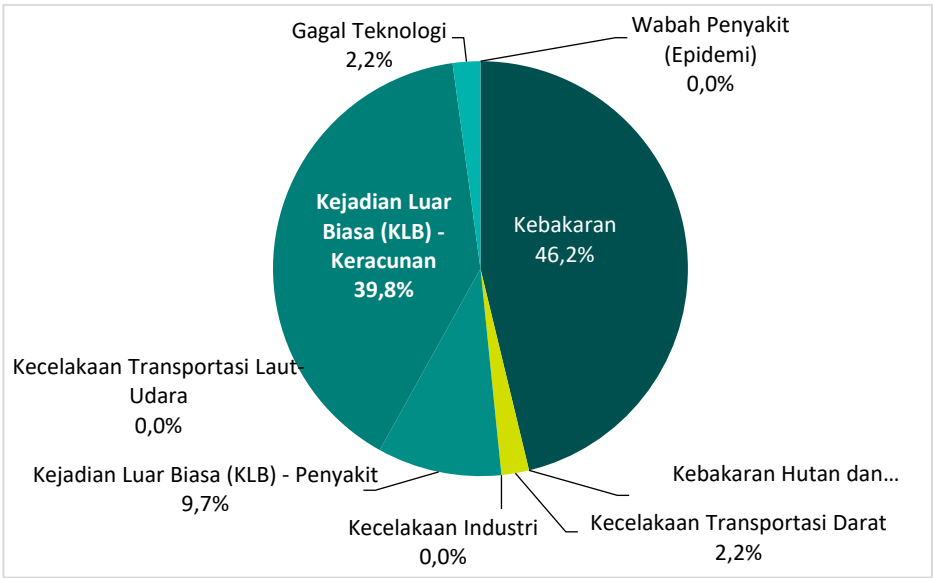

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2020 yaitu kebakaran hutan 46,2% dari total bencana non alam dan diikuti oleh kejadian luar biasa (KLB)-Keracunan (39,8%) dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit (9,7%).

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2020 terjadi 3 bencana sosial yang terdiri dari 2 konflik atau kerusuhan sosial dan 1 aksi teror dan sabotase.

GAMBAR 6.45

JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI

TAHUN 2020

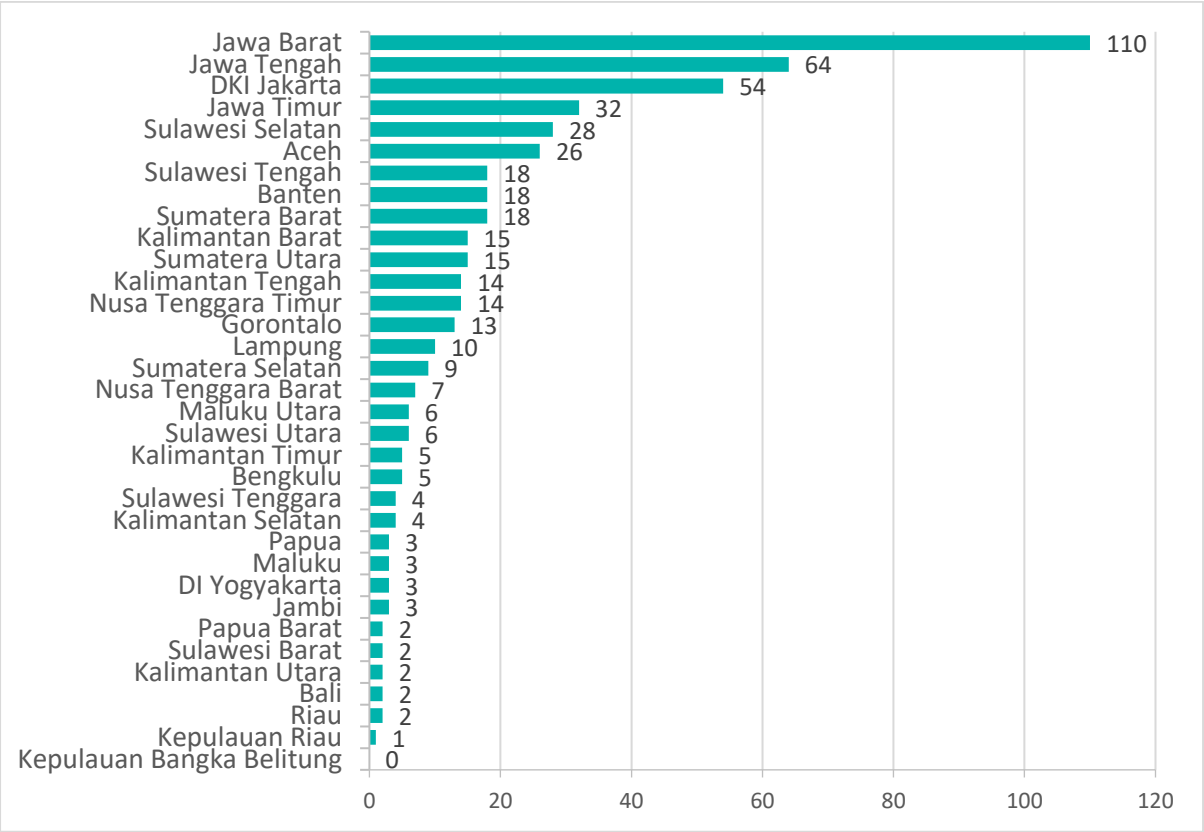

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Dari 34 provinsi di Indonesia, Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana di tahun 2020 yaitu sebanyak 110 kejadian, diikuti Jawa Tengah dengan 64 kejadian dan DKI Jakarta dengan 54 kejadian bencana. Pada tahun sebelumnya Jawa Barat dan Jawa Tengah juga termasuk provinsi tertinggi dengan kejadian bencana terbanyak di tahun 2019. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020.

GAMBAR 6.46
JUMLAH PROVINSI TERKENA KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2020

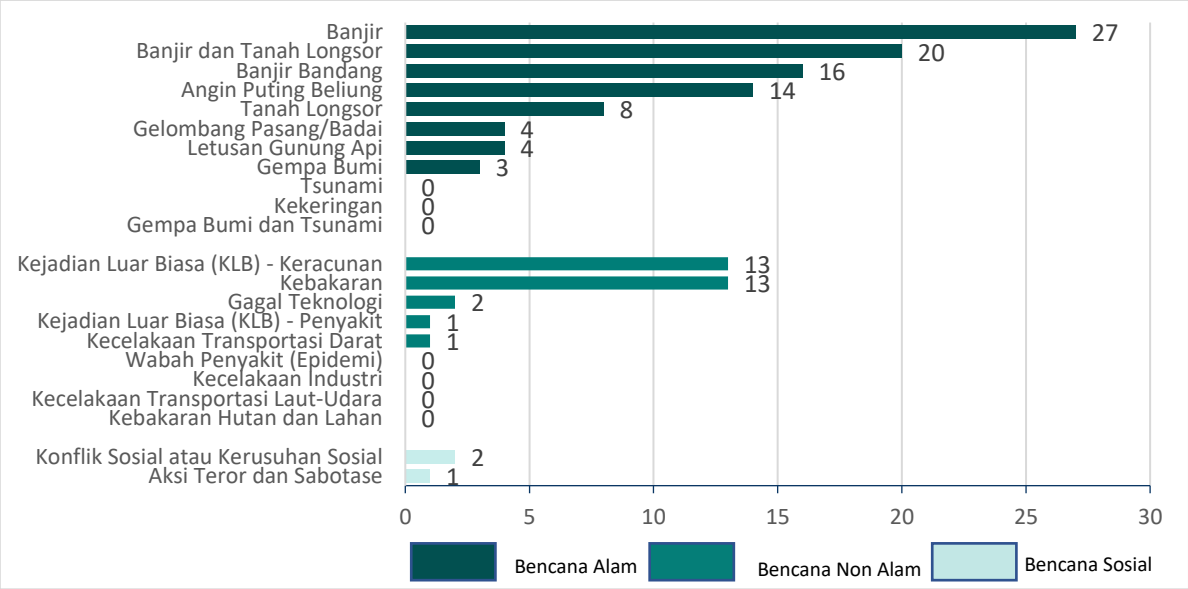

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2020

Krisis kesehatan akibat bencana alam dengan jumlah provinsi paling banyak yaitu bencana banjir sebanyak 27 provinsi. Bencana non alam terbanyak yaitu kebakaran yang terjadi di 13 provinsi, sedangkan bencana sosial yang terjadi di 2 provinsi yaitu konflik atau kerusuhan sosial.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2020

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Banjir	230	27	88	164	74.030		428.490
2	Letusan Gunung Api	6	4	0	104	4.706		11.357
3	Gempa Bumi	5	3	0	1	26		444
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0		0
5	Tanah Longsor	36	8	20	5	12		2.647
6	Banjir Bandang	35	16	49	32	1.803	4	30.655
7	Kekeringan	0	0	0	0	0		0
8	Angin Puting Beliung	49	14	12	20	51		720
9	Gelombang Pasang/Badai	8	4	0	0	0		1.340
10	Banjir dan Tanah Longsor	53	20	67	128	35.672		69.986
11	Tsunami	0	0	0	0	0		0

Jumlah Bencana Alam		**422**		**236**	**454**	**116.300**	**30**	**545.639**
1	Kebakaran	43	13	6	2	363		8.601
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0		0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	2	1	8	31	32		0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0		0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0		0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	9	1	30	1.795	0		0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	37	13	2	1.167	2.538		0
8	Gagal Teknologi	2	2	1	13	1		0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0		0
Jumlah Bencana Non Alam		**93**		**47**	**3.008**	**2.934**		**8.601**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	2	2	0	7	53		0
2	Aksi Teror dan Sabotase	1	1	4	0	0		196
Jumlah Bencana Sosial		**3**		**4**	**7**	**53**		**196**
Indonesia		**518**		**287**	**3.469**	**119.287**	**30**	**554.436**

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2021

Pada tahun 2020 kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah bencana alam sebanyak 236 orang, dari bencana alam tersebut, banjir dan tanah longsor menyebabkan kematian terbanyak sebesar 67 orang. Sedangkan, bencana yang paling banyak menimbulkan luka berat/rawat inap yaitu bencana non alam sebanyak 3.008 dan dan luka ringan sebanyak 2.934 orang. Dari bencana non alam tersebut KLB penyakit menyebabkan luka berat terbanyak sebesar 1.795 orang, kebakaran menyebabkan luka ringan terbanyak sebesar 363 orang. Bencana alam juga menyebabkan jumlah orang hilang dan pengungsi paling banyak sebesar 30 orang hilang dan 545.639 pengungsi. Banjir bandang menyebabkan orang hilang terbanyak sebesar 14 orang dan banjir menyebabkan pengungsi terbanyak sebesar 428.490 pengungsi.

D. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies *Aedes aegypti* atau *Aedes albopictus*. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Kasus DBD ditegakkan dengan diagnosa yang terdiri dari gejala klinis dan hasil laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit < 100.000/mm3 dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit > 20%. Kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 108.303 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 138.127 kasus. Sejalan dengan jumlah kasus, kematian karena DBD pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dari 919 menjadi 747 kematian. Kesakitan dan kematian dapat digambarkan dengan menggunakan indikator *incidence rate (IR)* per 100.000 penduduk dan *case fatality rate (CFR)* dalam bentuk persentase.

GAMBAR 6.47
***INCIDENCE RATE* PER 100.000 PENDUDUK**
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2011-2020

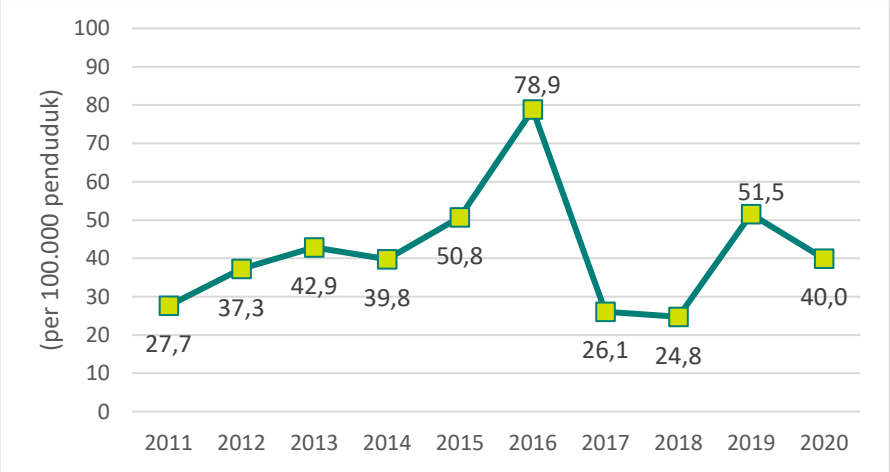

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Incidence Rate DBD pada tahun 2020 sebesar 40 per 100.000 penduduk. Relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019.

GAMBAR 6.48
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

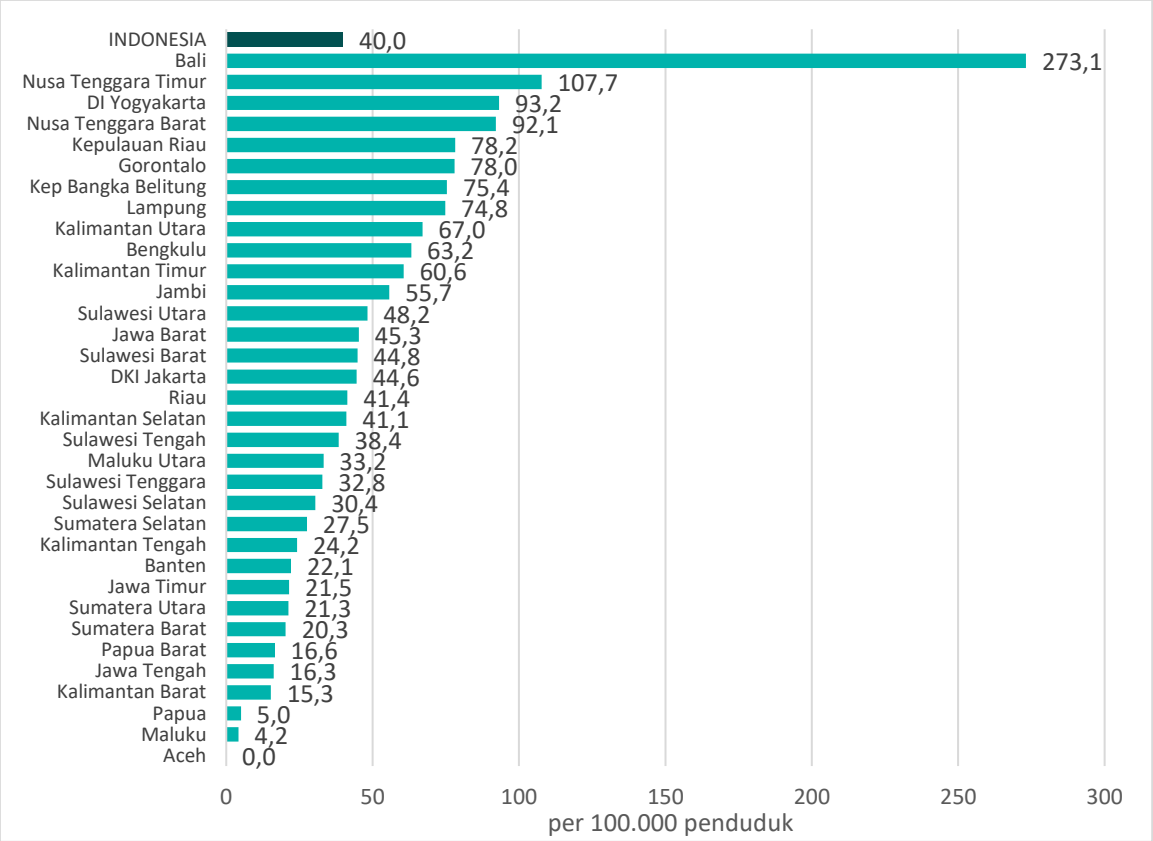

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan IR DBD tertinggi yaitu Bali (273,1), Nusa Tenggara Timur (107,7), dan DI Yogyakarta (93,2). Sedangkan provinsi dengan IR DBD terendah yaitu Aceh (0,0), Maluku (4,2), Papua (5,0).

Selain angka kesakitan, besaran masalah DBD juga dapat diketahui dari angka kematian atau *CFR* yang diperoleh dari proporsi kematian terhadap seluruh kasus yang dilaporkan. Secara nasional, *CFR* DBD di Indonesia sebesar 0,7%. Suatu provinsi dikatakan memiliki *CFR* tinggi jika telah melebihi 1%. Pada tahun 2020 terdapat sebelas provinsi dengan *CFR* di atas 1%. Tingginya *CFR* memerlukan langkah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Upaya edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar segera memeriksakan diri ke sarana kesehatan jika ada anggota keluarganya yang memiliki gejala DBD. Hal ini menjadi penting sebagai pertolongan segera untuk mencegah keparahan dan komplikasi yang berujung pada fatalitas.

GAMBAR 6.49
***CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE**
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

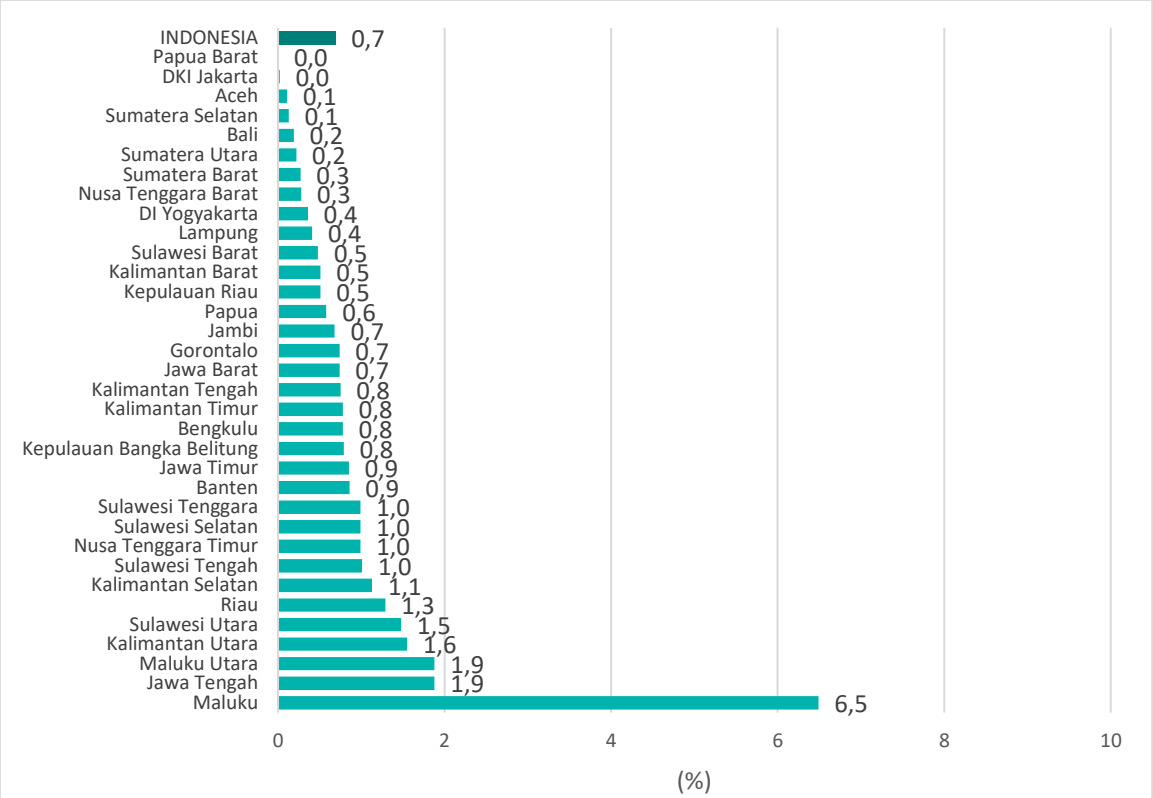

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Jumlah kabupaten kota terjangkit DBD pada tahun 2020 sebanyak 477 atau sebesar 92,8% dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD menujukkan kecenderungan peningkatan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019.

GAMBAR 6.50
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2011-2020

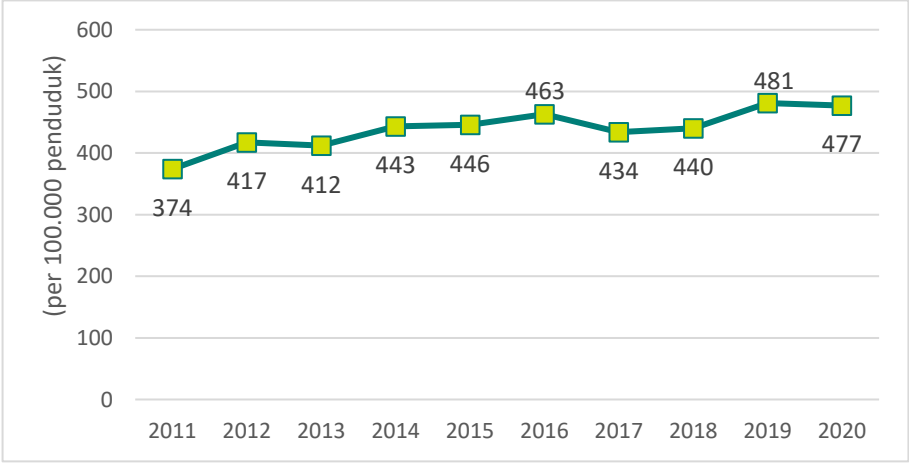

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki *IR* DBD <49 per 100.000 penduduk.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 376 kabupaten/kota (73,15%) yang mencapai *IR* DBD <49/100.000 penduduk. Target program tahun 2020 sebesar 70% kabupaten/kota dengan *IR* DBD <49 per 100.000 penduduk. Dengan demikian target program tahun 2020 telah tercapai.

Pada gambar 6.45 diketahui bahwa terdapat 10 provinsi pada tahun 2020 yang tidak memenuhi target, dan jumlah provinsi tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 23 provinsi. Namun masih ada provinsi yang tidak ada satupun kabupaten/kotanya yang mencapai *IR* DBD <49/100.000 penduduk yaitu Bali dan DI Yogyakarta.

GAMBAR 6.51
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN *IR* DBD <49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2020

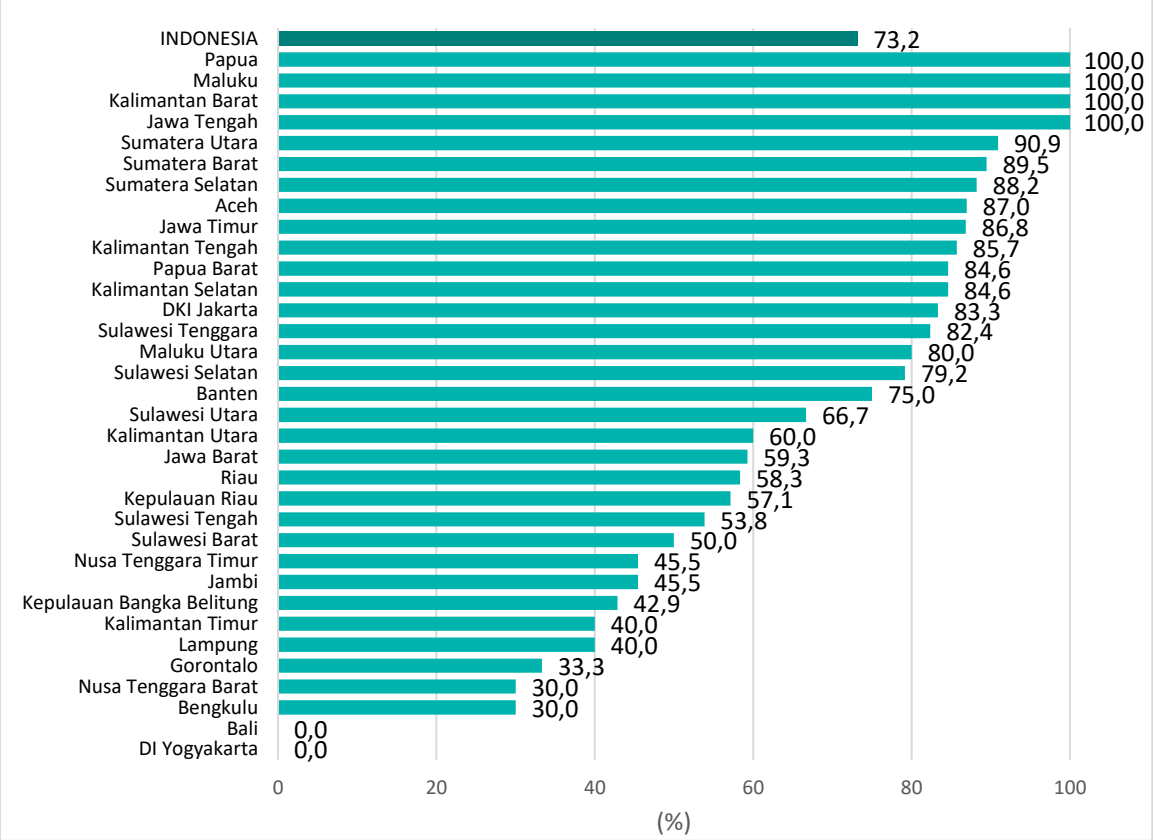

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

2. Chikungunya

Gejala utama demam Chikungunya (demam chik) adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD. Demam chik ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat

dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Pada tahun 2020 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 1.689 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 5.042 kasus. Hanya lima provinsi yang melaporkan data chikungunya pada tahun 2020, berbeda dengan tahun 2019 seluruh provinsi melaporkan data.

Kelima provinsi yang melaporkan kasus yaitu Jawa Timur (1.434), Jawa Barat (208), Jawa Tengah (27), DI Yogyakarta (12), dan DKI Jakarta (8).

Kecenderungan kasus Chikungunya pada tahun 2011-2020 disajikan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 6.52
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2011-2020

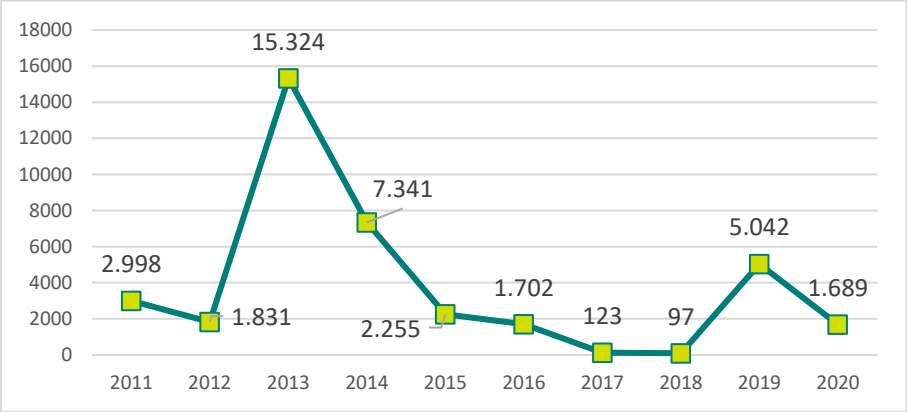

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya. Faktor penyebab meningkatnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit.

3. Filariasis

Filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan melalui nyamuk. Di Indonesia, cacing filaria terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital.

WHO menetapkan kesepakatan global sebagai upaya untuk mengeliminasi filariasis pada tahun 2020 (*The Global Goal of Elimination of Lymphatic Filariasis as a Public Health problem by The Year 2020*). Saat ini di dunia terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit filariasis atau yang dikenal juga dengan penyakit kaki gajah yang berada pada lebih dari 83 negara dan 60% kasus berada di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat 9.906 kasus filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

GAMBAR 6.53
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2020

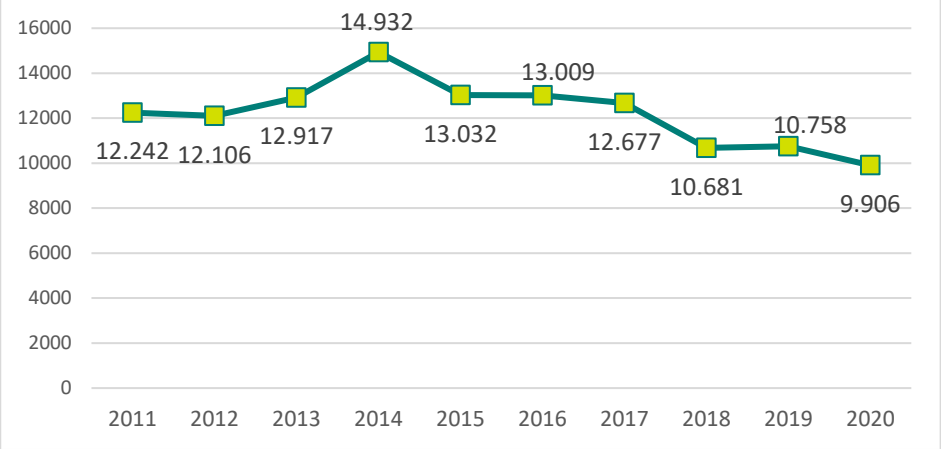

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.615, Nusa Tenggara Timur 1.534 kasus, dan Jawa Barat sebanyak 641 kasus. Provinsi dengan kasus filariasis < 5 kasus yaitu Bali, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Gorontalo.

GAMBAR 6.54
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

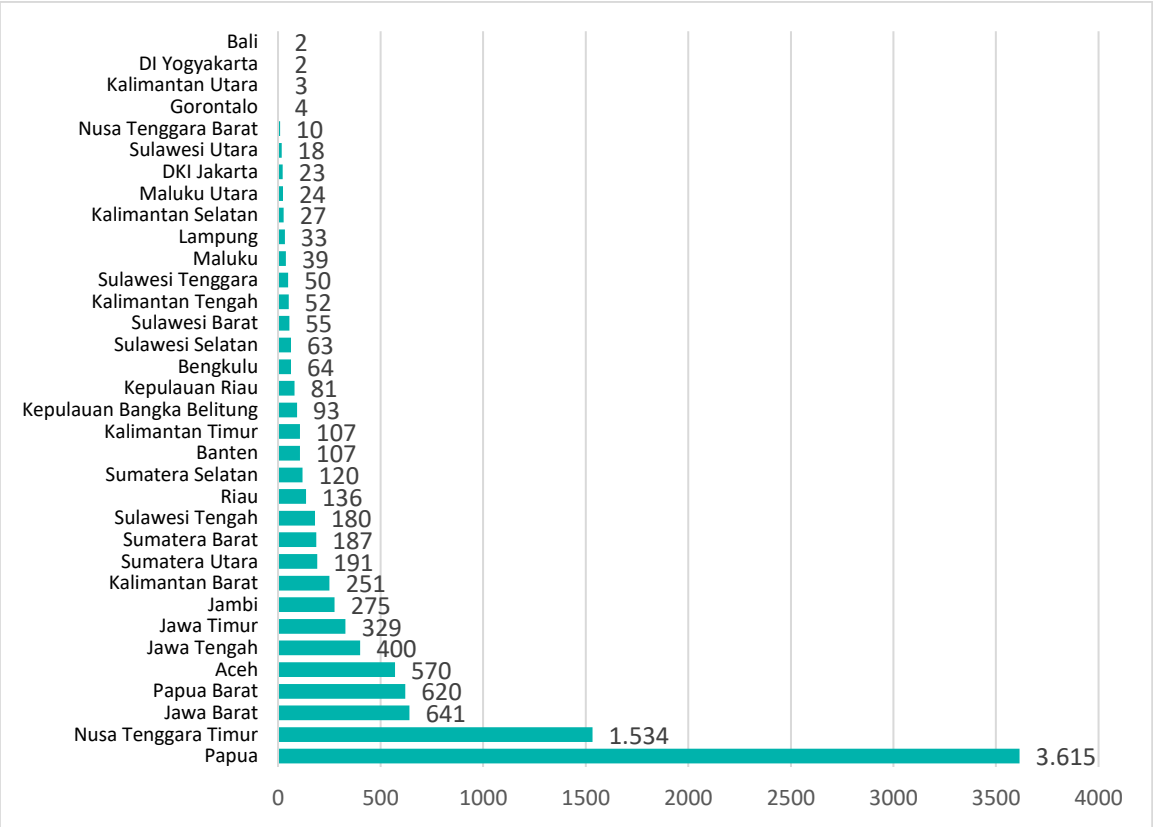

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Keberhasilan program pengendalian filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 236 kabupaten/kota (45,9%) yang merupakan wilayah endemis filariasis yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.

GAMBAR 6.55
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

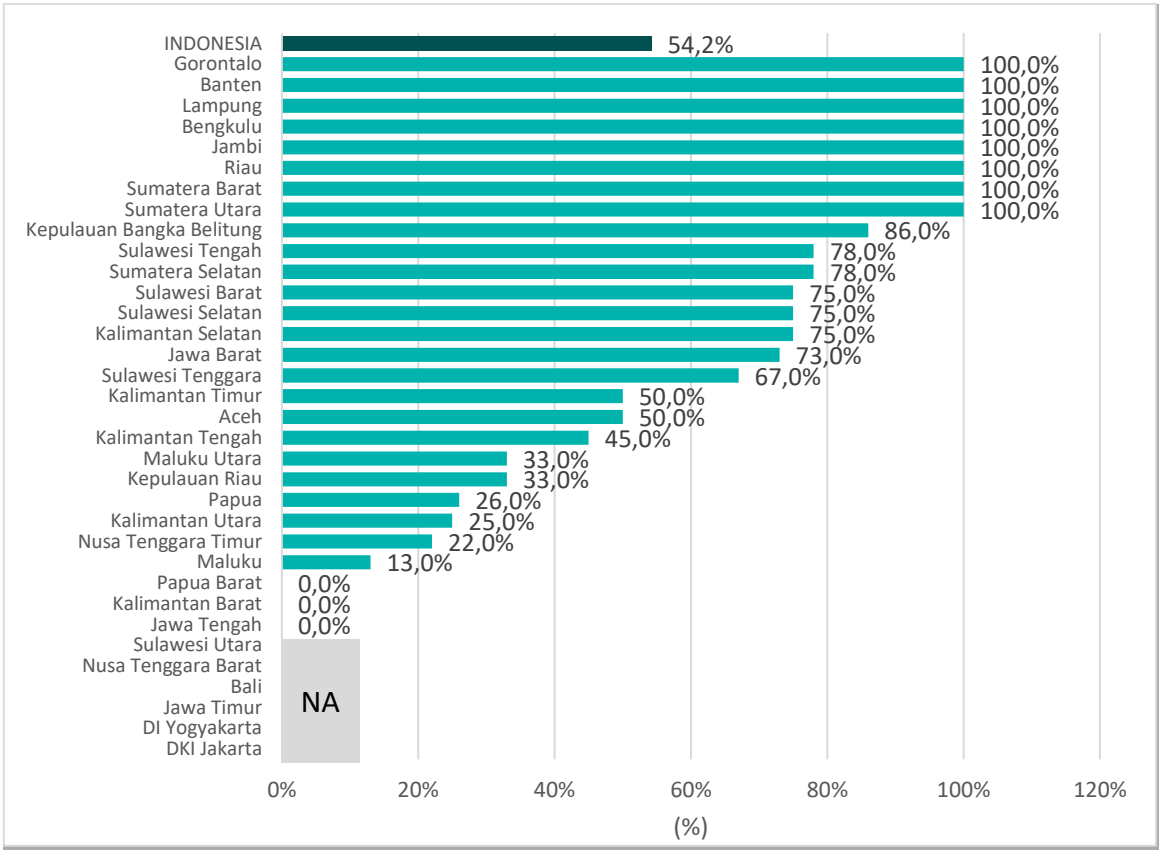

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Indikator keberhasilan pengendalian filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%. Jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% sebanyak 128 kabupaten/kota pada tahun 2020. Dengan demikian capaian indikator kinerja kementerian tersebut baru memenuhi 94.2% dari target indikator yaitu 136 kabupaten/kota. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% karena masih dalam fase Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Ketiga provinsi tersebut yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua Barat.

Upaya lain dari pengendalian penyakit filariasis adalah Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Pada tahun 2020 tidak semua provinsi melaksanakan POPM filariasis karena termasuk daerah non-endemis atau seluruh kabupaten/kota endemis di provinsi tersebut sedang berada pada fase surveilans pasca POPM filariasis atau kabupaten/kota. Sebanyak enam provinsi merupakan daerah non-endemis seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya, dan 12 provinsi seluruh kabupaten/kota endemisnya sedang menjalani surveilans pasca POPM filariasis.

Pada tahun 2020 sebanyak 74 (31%) kabupaten/kota endemis filariasis yang seharusnya masih melaksanakan POPM Filariasis. Namun demikian, hanya 70 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM Filariasis di tahun 2020. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 118 kabupaten/kota. Penurunan jumlah ini disebabkan beberapa kabupaten/kota endemis filariasis sudah menyelesaikan putaran POPM Filariasis dan masuk pada masa surveilans pasca POPM Filariasis, disamping terdapat 4 kabupaten/kota yang menunda pelaksanaan POPM Filariasis karena sedang berada pada status zona merah penularan Covid-19. Dari 16 provinsi yang masih melaksanakan POPM Filariasis, Provinsi Papua Barat memiliki persentase jumlah kabupaten/kota yang masih melaksanakan POPM Filariasis tertinggi sebesar 92%, sedangkan Sumatera Selatan memiliki persentase terendah sebesar 11%.

GAMBAR 6.56
CAKUPAN POPM FILARIASIS
TAHUN 2011-2020

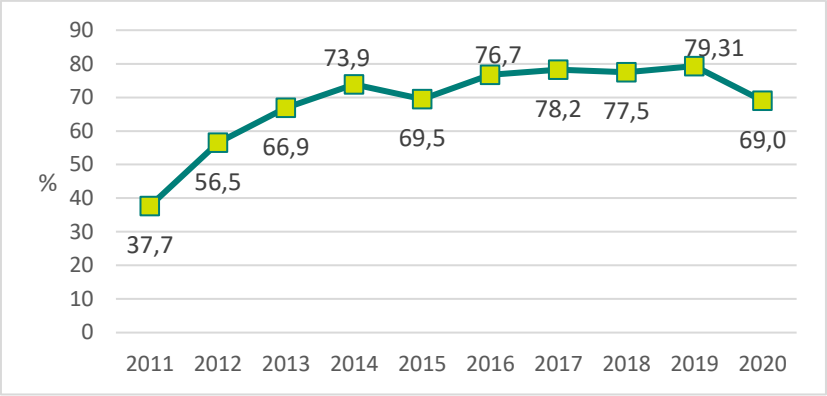

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2011 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Pada tahun 2020, POPM Filariasis dilakukan dengan menggunakan 2 macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC dan Albendazole di 69 kabupaten/kota dan kombinasi Ivermectine, DEC dan Albendazole di 1 kabupaten, yaitu Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya pandemi Covid-19, cakupan POPM Filariasis tahun 2020 secara nasional mengalami penurunan menjadi 69,0%.

Pada tahun yang sama terdapat 64 kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai status eliminasi filariasis. Dengan adanya pandemi, terdapat 34 kabupaten/kota yang telah selesai POPM filariasis lima tahun harus menunda pelaksanaan evaluasi penurunan mikrofilaria karena berada dalam zona merah penularan Covid-19.

4. Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular selain HIV AIDS dan Tuberkolusis yang pengendaliannya menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai komitmen global yang harus dicapai pada akhir tahun 2030. Pada tingkat nasional program eliminasi malaria ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia”. Target program eliminasi malaria adalah seluruh wilayah di Indonesia bebas dari malaria selambat-lambatnya tahun 2030.

Penilaian eliminasi malaria diawali dari tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2020 terdapat tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah dinyatakan bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Tiga provinsi di Indonesia bagian timur belum memiliki kabupaten/kota yang berstatus eliminasi malaria, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Meskipun belum ada kabupaten/kota yang eliminasi di tiga provinsi tersebut namun sudah ada beberapa kabupaten yang mencapai endemis rendah dan bersiap menuju eliminasi malaria.

GAMBAR 6.57
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

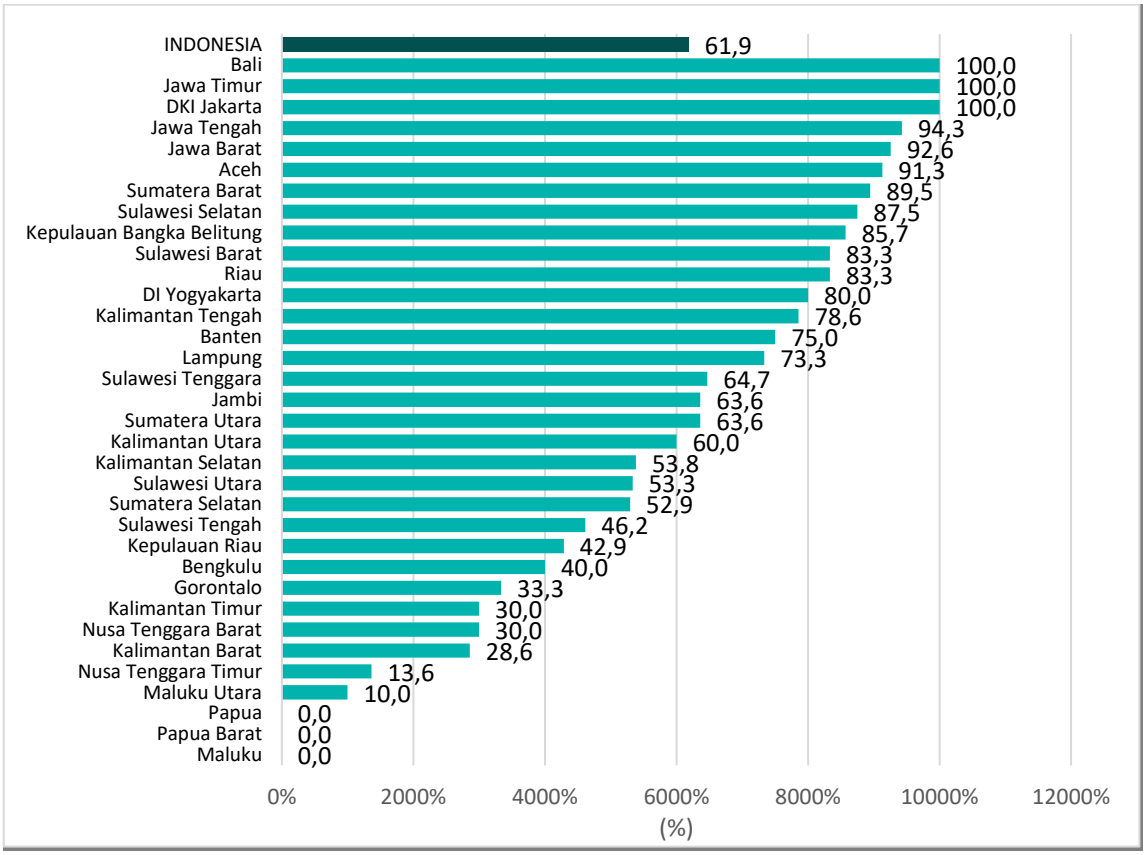

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional, terdapat 318 kabupaten/kota atau 61,9% yang telah dinyatakan bebas malaria pada tahun 2020. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 300 kabupaten/kota. Capaian indikator lain seperti persentase konfirmasi kesediaan darah dan persentase pengobatan standar merupakan beberapa upaya yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian eliminasi malaria.

GAMBAR 6.58
PETA ENDEMISITAS MALARIA
TAHUN 2020

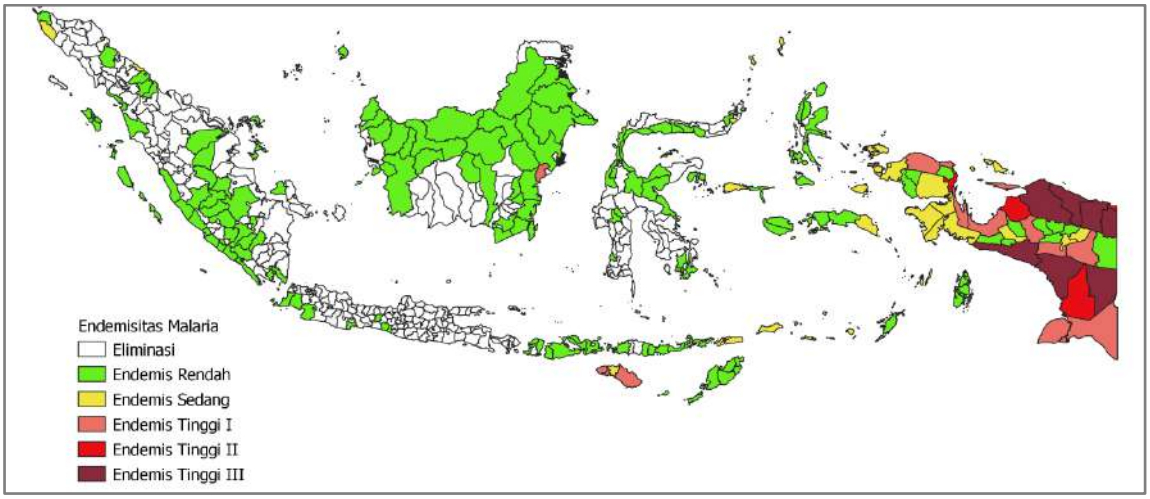

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar di atas menunjukkan persebaraan kabupaten/kota endemis malaria pada tahun 2020 di seluruh Indonesia. Warna putih menunjukkan kabupaten/kota eliminasi. Tingkat endemisitas digambarkan dengan warna hijau, kuning dan gradasi merah.

a. Angka Kesakitan Malaria

Angka kesakitan malaria digambarkan dengan indikator *Annual Parasite Incidence (API)* per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tersebut dengan konstanta 1.000. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir angka kesakitan malaria di bawah 1 per 1.000 penduduk, termasuk pada tahun 2020 yang sebesar 0,9%

GAMBAR 6.59
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2020

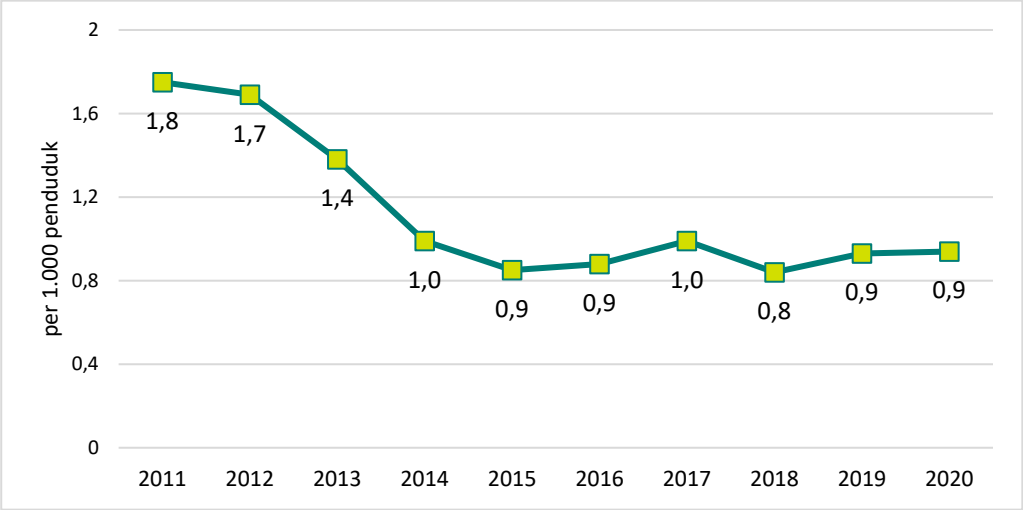

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Dari seluruh kasus malaria, sebanyak 96,9% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium. Sebanyak 74% diperiksa secara mikroskopis dan 26% lainnya *menggunakan rapid diagnostic test* (*RDT*).

Pada tingkat provinsi, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini.

GAMBAR 6.60
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

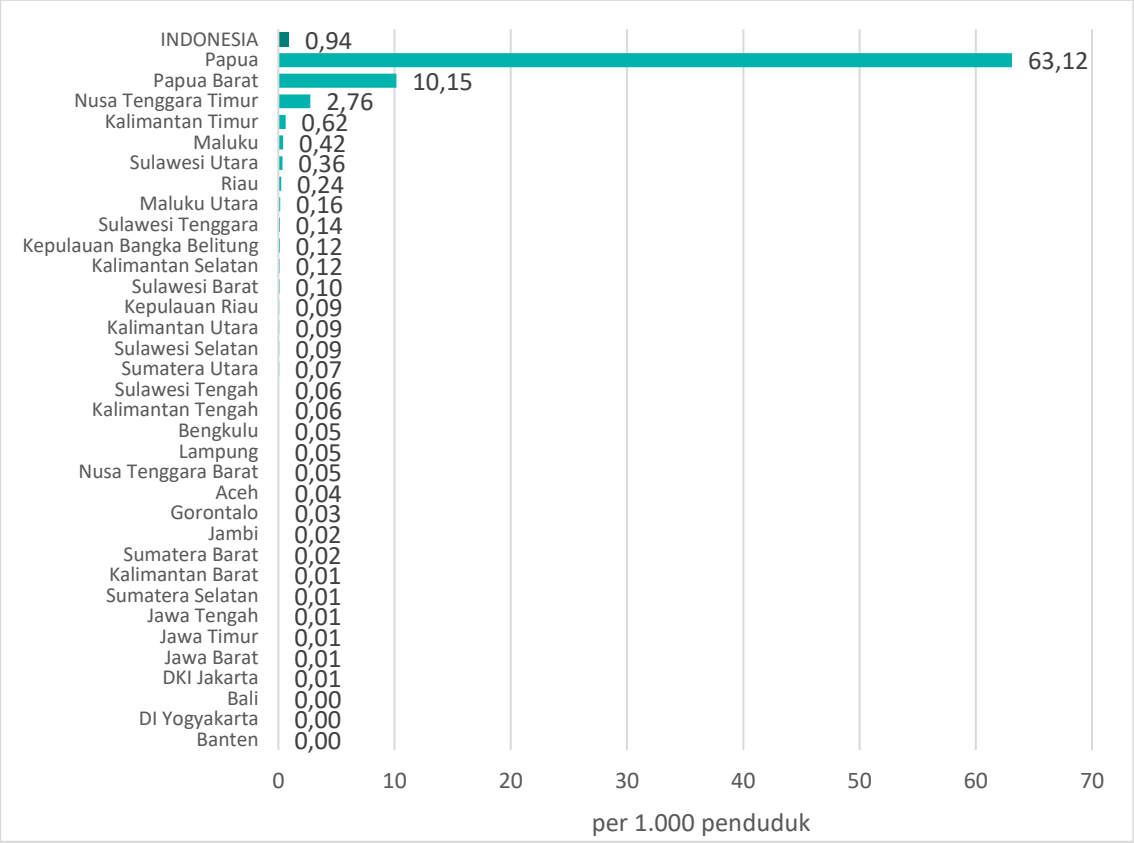

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Kondisi tahun 2020 pada tingkat provinsi sama dengan tahun sebelumnya. Papua merupakan provinsi tertinggi dengan angka kesakitan malaria sebesar 63,12 per 1.000 penduduk, jauh di atas provinsi yang lain. Sebagian besar provinsi (91,2%) telah mampu mengendalikan API malaria <1 per 1.000 penduduk.

API malaria per 1.000 penduduk juga menjadi landasan tingkat endemisitas malaria menjadi rendah (<1), sedang (1-5), dan tinggi (>5). Pada tahun 2020 terdapat 318 kabupaten/kota (62%) bebas malaria yang telah mendapat sertifikat eliminasi. Masih terdapat 29% kabupaten/kota endemis rendah, 4% endemis sedang, dan 5% endemis tinggi. Persentase kabupaten/kota berstatus endemis rendah menurut provinsi, disajikan pada gambar berikut ini.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria secara efektif dilakukan dengan pemberian *ACT* (*Artemicinin-based Combination Therapy*) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Persentase pengobatan *ACT* masuk dalam indikator prioritas yang dipantau dengan target 90%.

GAMBAR 6.61
PERSENTASE PENGOBATAN *ACT* MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

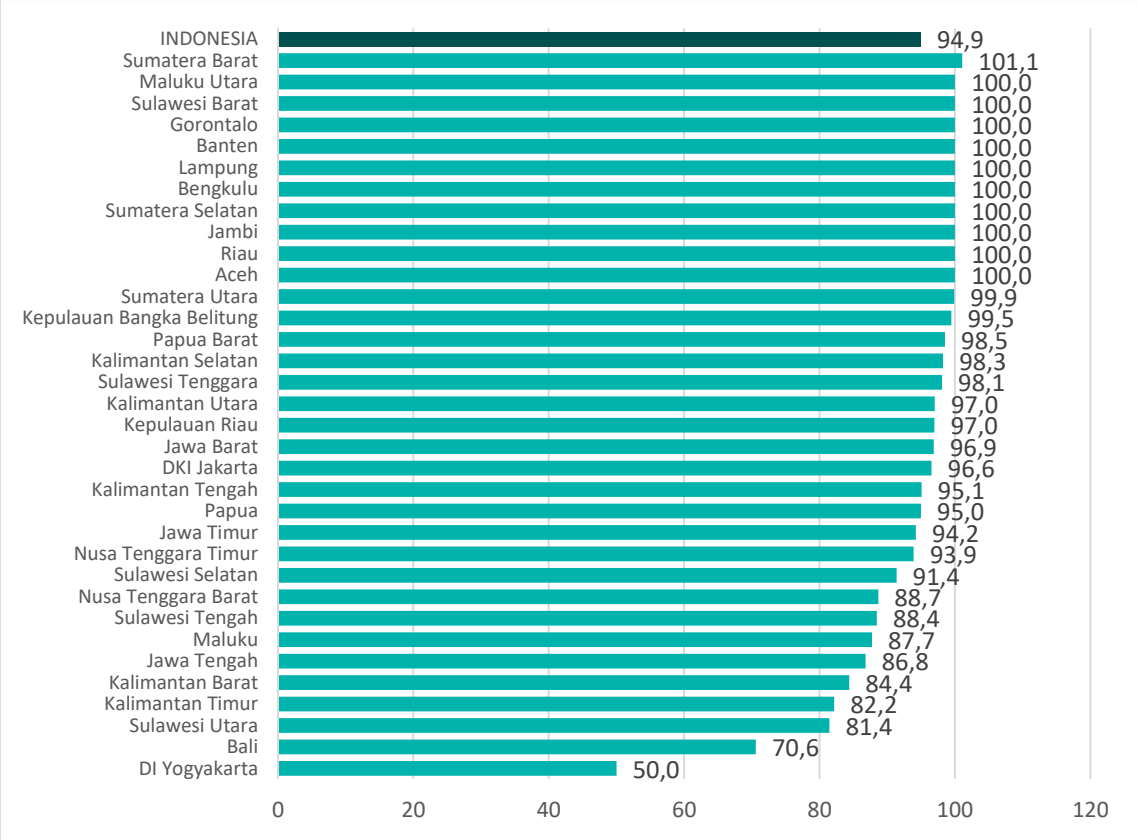

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Sebanyak 25 provinsi (73,5%) memiliki persentase pengobatan *ACT* di atas 90% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditetapkan. DI Yogyakarta merupakan provinsi terendah dengan persentase pengobatan *ACT* sebesar 50%. Data dan informasi lebih detail tentang penyakit Malaria, dapat dilihat pada Lampiran 66.a, 66.b, lan 66.c.

5. Rabies

Rabies adalah penyakit menular disebabkan oleh virus golongan *Rhabdovirus* yang ditularkan melalui gigitan hewan penular dan mematikan bagi hewan maupun manusia. Hewan penular rabies terdiri dari anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala.

Pada tahun 2020, dari 32 provinsi yang melaporkan adanya kasus gigitan hewan penular rabies, terdapat 40 kasus positif rabies dan meninggal. Terdapat 8 provinsi berstatus bebas Rabies, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.62
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2020

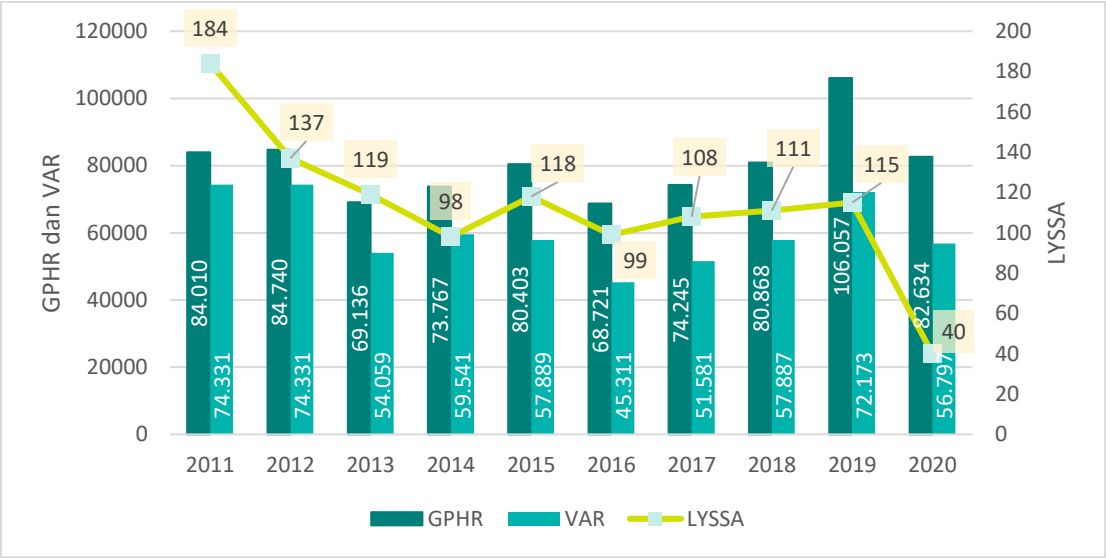

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada Gambar 6.60 menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir kasus tertinggi gigitan hewan penular rabies (GHPR) terjadi pada tahun 2019. Kasus kematian karena rabies (Lyssa) menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Secara nasional pada tahun 2020 terjadi sebanyak 82.634 kasus GPHR, 56.797 di antaranya diberikan vaksin anti rabies dan 40 kasus positif rabies dan meninggal (LYSSA).

Seperti tahun sebelumnya, provinsi yang melaporkan kasus GHPR tertinggi sepanjang tahun 2020 yaitu Bali sebanyak 26.979 kasus, Nusa Tenggara Timur sebanyak 11.262 kasus, dan Sumatera Utara sebanyak 6.802 kasus. Hal ini disebabkan tingginya kepemilikan anjing sebagai salah satu hewan penular rabies di provinsi tersebut.

6. Leptospirosis

Leptospirosis merupakan penyakit yang disebabkan bakteri *Leptospira sp*. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan urine hewan yang terinfeksi. Banyak kasus leptospirosis yang tidak terlaporkan karena sulitnya diagnosa klinis dan mahalnya biaya pemeriksaan laboratorium.

Pada tahun 2020 terdapat delapan provinsi yang melaporkan kasus leptopirosis, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Secara nasional terdapat 906 kasus Leptospirosis yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 2020.

GAMBAR 6.63
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2020

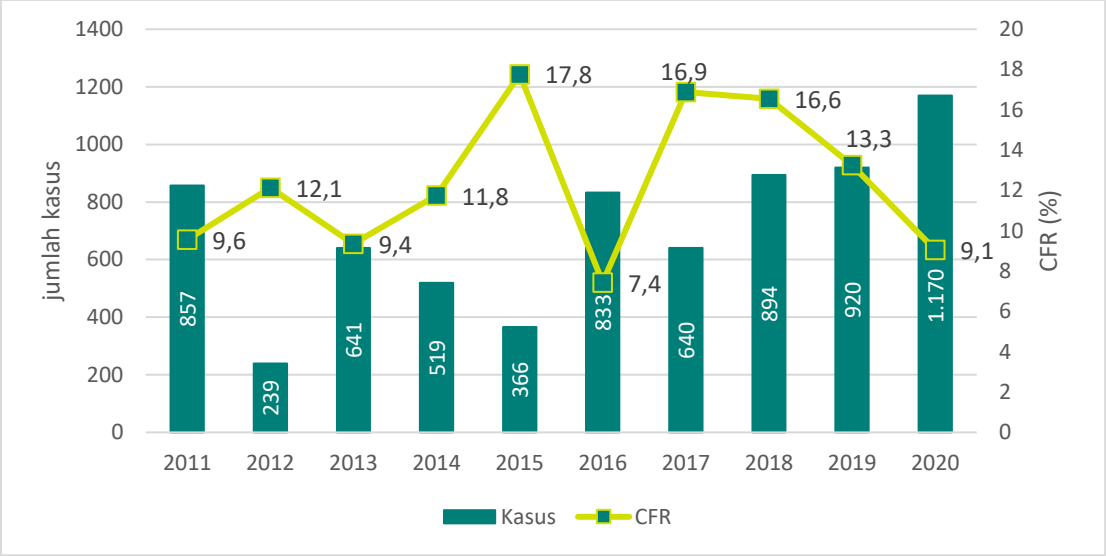

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Selama sepuluh tahun terakhir terdapat kecenderungan kenaikan kasus leptospirosis, terutama pada tiga tahun terakhir. Walaupun demikian, terjadi penurunan kematian selama periode tiga tahun tersebut.

Kematian (*CFR*) akibat leptospirosis tahun 2020 pada tingkat provinsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Pada 2020 terdapat tiga provinsi dengan *CFR* lebih dari 30%. Namun pada 2020 tidak ada satupun provinsi dengan *CFR* >30%, bahkan CFR tertinggi sebesar 16,4% yang terjadi di Jawa Barat.

GAMBAR 6.64
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2019 – 2020

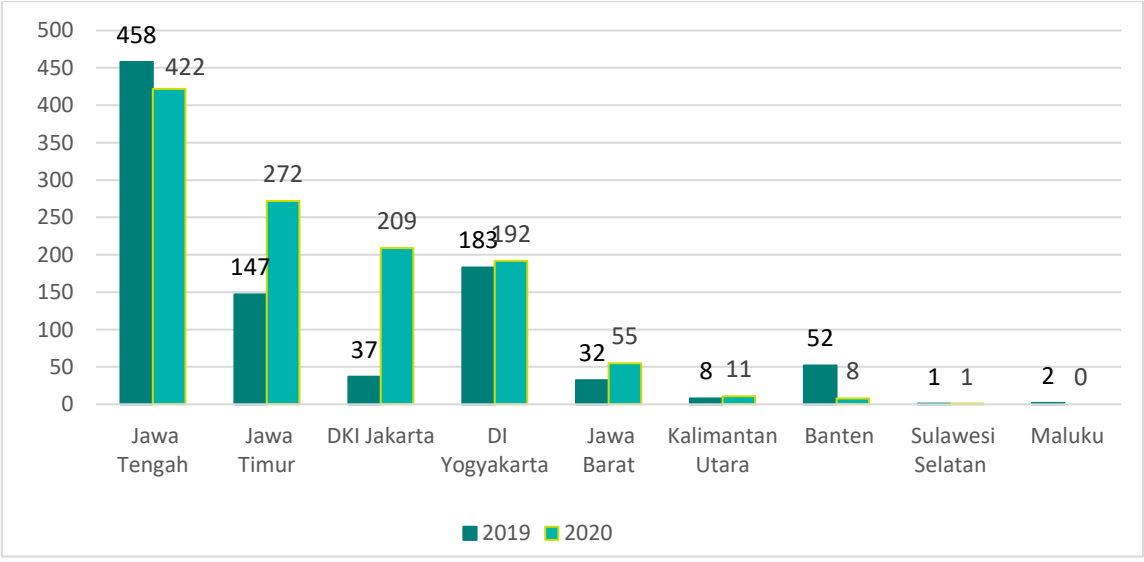

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat provinsi dengan peningkatan laporan kasus yang tinggi pada tahun 2020 yaitu DKI Jakarta yang pada tahun 2019 melaporkan 37 kasus meningkat menjadi 209 kasus pada 2020. Begitu juga dengan Jawa Timur yang meningkat dari 147 kasus pada 2019 menjadi 272 kasus pada 2020. Kasus leptospirosis tertinggi dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah.

7. Pengendalian Vektor Terpadu

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 yang disebut dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan vektor dapat dicegah.

Beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang dapat dilakukan diantaranya adalah : a) metode pengendalian fisik dan mekanis, misalnya mengubah salinitas dan /derajat keasaman (PH) air digunakan untuk pengendalian vektor malaria di daerah pantai; b) metode pengendalian dengan menggunakan agen biotik (biologi), misalnya predator pemakan jentik (ikan, dll); c) Pengelolaan lingkungan meliputi modifikasi dan manipulasi lingkungan tempat perindukan, pemberantasan sarang nyamuk, pemasangan kelambu; d) metode pengendalian secara kimia, misalnya surface spray (*Indoor Residual Spraying*) dan space spray (*fogging*), larvasida.

Sejak tahun 2020, indikator kinerja yang ditetapkan terkait pengendalian vektor ini yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% pusesmas melaksanakan surveilans vektor. Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor yang dimaksud pada indikator tersebut adalah puskesmas yang melaksanakan surveilans nyamuk Aedes dan/atau nyamuk Anopheles secara rutin setiap bulan yang dilaporkan melalui SILANTOR (Sistem Surveilans Vektor) berupa angka bebas jentik dan index habitat nasional. Target indikator pada tahun 2020 sebanyak 40 kabupaten/kota dan berhasil dicapai sebanyak 71 kabupaten/kota.

E. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Penyakit jenis ini bertanggungjawab terhadap sedikitnya 70% kematian di dunia. Meskipun tidak dapat ditularkan dari orang ke orang maupun dari binatang ke orang, lemahnya pengendalian faktor risiko dapat berpengaruh terhadap peningkatan kasus setiap tahun. Hal ini sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatnya urbanisasi, terjadinya perubahan iklim dan transisi pekerjaaan serta kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya pola hidup sedentary di masyarakat dan berdampak pada timbulnya beban ganda akibat PTM dan penyakit infeksi emerging. Gambaran beban ganda semakin terlihat nyata saat masa pandemi Covid-19 ini.

Menurut WHO meningkatnya penyakit tidak menular terutama didorong oleh empat faktor risiko utama yaitu pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, penggunaan tembakau, dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Penyakit tidak menular menimbulkan konsekuensi kesehatan yang berdampak bagi individu, keluarga dan komunitas, dan mengancam sistem kesehatan. Besarnya biaya sosial ekonomi yang disebabkan oleh PTM membuat pencegahan dan pengendalian penyakit ini menjadi hal yang penting pada saat ini.

Untuk menurunkan kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular tersebut, tentu saja dibutuhkan program pengendalian yang dalam hal ini telah dan terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM

a. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% puskesmas

Puskesmas berada di garda terdepan dalam penyediaan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang di dalamnya mencakup pengendalian PTM. Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas dilakukan dengan membentuk Puskesmas Pandu PTM. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Indikator yang terkait dengan pengendalian PTM yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular (PTM) ≥ 80% puskesmas. Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% Puskesmas telah melakukan PANDU PTM. Sedangkan Puskesmas yang memiliki standar Pandu PTM adalah puskesmas yang membina Posbindu PTM dan menerapkan PPK 1 serta carta prediksi faktor risiko PTM.

Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM ≥80% puskesmas sebanyak 70 kabupaten/kota dari 103 yang ditargetkan pada tahun 2020. Terdapat tujuh provinsi yang seluruh puskesmasnya belum melakukan pelayanan terpadu PTM ≥80% puskesmas. Secara nasional hanya 13,62% kabupaten/kota yang telah melakukan pelayanan terpadu PTM ≥80% puskesmas. Namun DKI Jakarta seluruh kabupaten/kotanya telah melakukan pelayanan terpadu PTM ≥80% puskesmas.

Sedangkan 31 provinsi lain, kurang dari 50% kabupaten/kotanya yang mencapai indikator ini. Bahkan terdapat tujuh provinsi yang tidak satupun kabupaten/kotanya mencapai indikator ini yaitu Bengkulu, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Provinsi Kepulauan Riau dan Banten masing-masing mencapai 57,14% dan 50% kabupaten/kotanya yang melaksanakan Pandu PTM pada ≥ 80% Puskesmas.

b. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau

Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan produktif.

Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). Dengan demikian target tahun 2020 tidak tercapai. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan belum semua pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR dan masih rendahnya dukungan dari pemerintah daerah dalam membuat regulasi KTR. Namun pencapaian indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas dalam implementasi kawasan tanpa rokok tetap didorong dengan melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.

GAMBAR 6.65
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

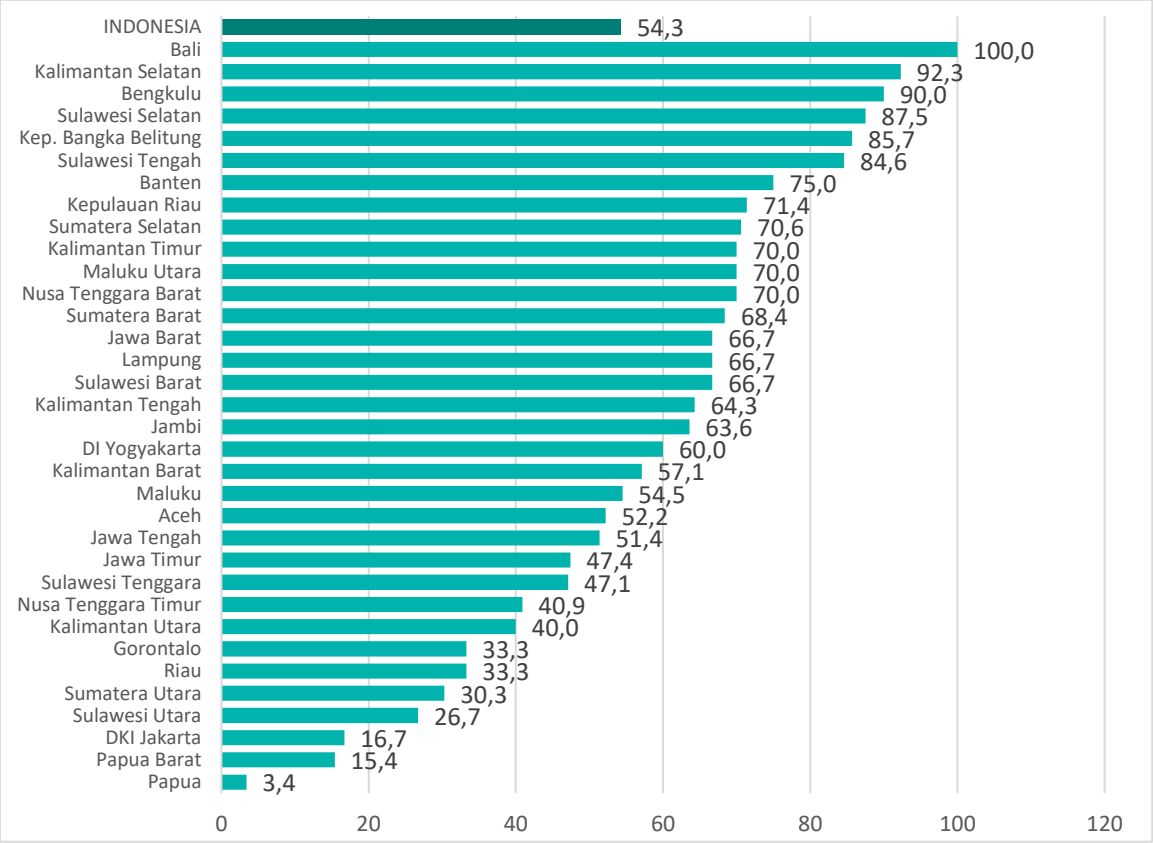

Sumber: Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Sebanyak 54,3% provinsi di Indonesia telah menerapkan KTR, bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali telah menerapkan peraturan tersebut. Kalimantan Selatan dan Bengkulu juga hampir seluruh kabupaten/kotanya menerapkan KTR dengan masing-masing

capaian 92,3% dan 90%. Namun terjadi kesenjangan antar provinsi, capaian terendah yaitu Papua hanya sebanyak 3,4% kabupaten/kota yang menerapkan KTR.

2. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap prevalensi kanker pada perempuan di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Penyintas kanker payudara dan leher rahim pada umumya terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metoda IVA dan papsmear. Sedangkan deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan program SADANIS yaitu pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Deteksi dini dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DAN PAYUDARA TAHUN 2018-2020

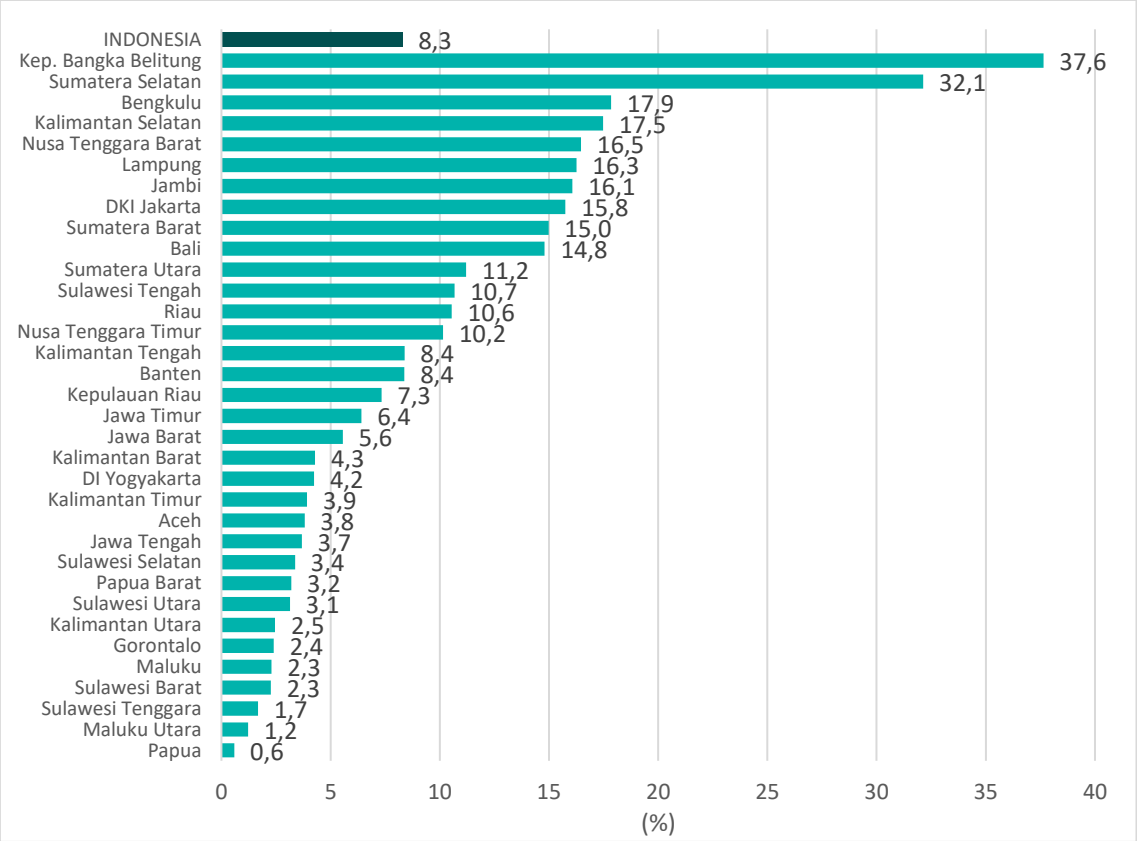

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional, sebanyak 8,3% perempuan usia 30-50 tahun telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim melalui metode IVA dan kanker leher rahim melalui sadanis. Provinsi dengan cakupan deteksi dini tertinggi yaitu Sulawesi Barat, diikuti oleh Kep. Bangka Belitung sebesar 37,6%, dan Sumatera Selatan sebanyak 32,1%. Sedangkan provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua sebesar 0,6%, Maluku Utara sebesar 1,2%, dan Sulawesi Tenggara sebesar 1,7%.

GAMBAR 6.67
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

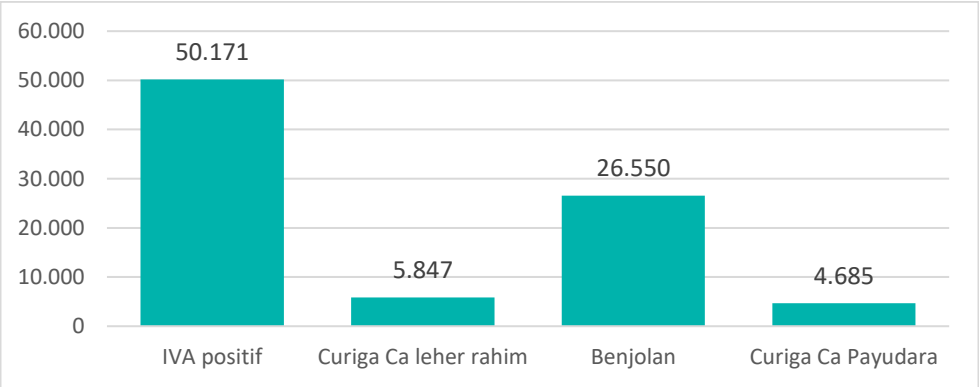

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Gambar menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2020 dari hasil pemeriksaan IVA telah ditemukan 50.171 IVA positif dan 5.847 curiga kanker leher rahim. Sedangkan hasil deteksi dini kanker payudara ditemukan 26.550 benjolan dan 4.685 curiga kanker payudara.

Informasi lebih rinci mengenai pengendalian penyakit tidak menular, dapat dilihat pada Lampiran 69-Lampiran 70.

F. KESEHATAN JIWA DAN NAPZA

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza

Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin cepat pula pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong perjalanan penyakit dan mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas.

Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahguna NAPZA di lakukan terhadap seluruh kelompok usia dengan menggunakan instrumen SDQ (untuk anak usia 4-18 tahun) dan/ atau SRQ 20 (usia diatas 18 tahun), serta ASSIST yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru terlatih.

Dari 330 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2020 terdapat 205 yang memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
TAHUN 2020

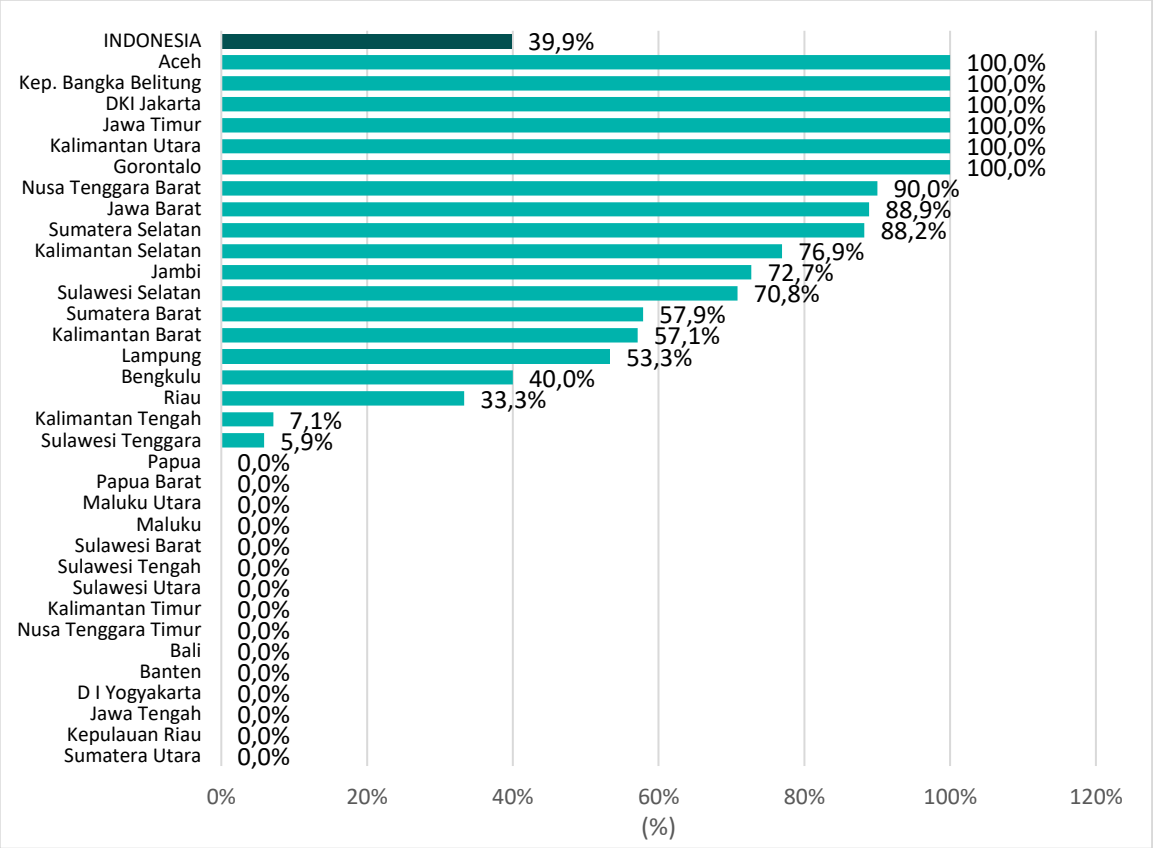

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza yaitu Aceh, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Gorontalo. Namun masih terdapat 15 dari 34 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki 25% puskesmas melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza.

2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Penyalahguna napza mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu puskesmas, rumah sakit umum, BNN, POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN. Berdasarkan peraturan No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 terdapat sebanyak 754 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan sebaran sebagai berikut:

GAMBAR 6.69
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

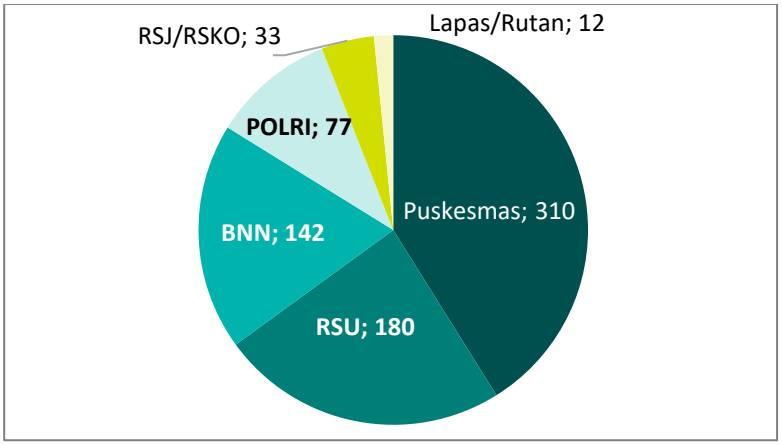

Dari 6 jenis IPWL tersebut, jumlah terbanyak yaitu puskesmas, rumah sakit umum, dan BNN. Pemerintah mentargetkan 500 orang penyalahguna napza yang mendapat layanan medis pada tahun 2020 dan berhasil dicapai 585 penyalahguna napza yang mendapat layanan medis dari 21 provinsi.

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa

a. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan

ODGJ adalah orang yang didiagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ).

ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), pemberian informasi dan edukasi, tatalaksana awal, pemberian pengobatan dasar dan atau melakukan rujukan bila diperlukan.

Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan tahun 2020 Persentase ODGJ yang mendapat layanan sebesar 58,9%. Dari 16 provinsi yang melaporkan, capaian tertinggi terdapat di Kep. Bangka Belitung sebesar 98% dan Sulawesi Tengah sebesar 97,6%. Sedangkan provinsi terendah yaitu Jawa Barat sebesar 37,6%.

b. Persentase penderita depresi pada penduduk 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan

Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai dengan gejala utama berupa: 1) afek depresif, 2) kehilangan minat, 3) kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah; dan dengan gejala tambahan lainnya, seperti: konsentrasi atau perhatian yang berkurang, harga diri maupun kepercayaan diri yang berkurang, rasa bersalah atau rasa tidak berguna, memiliki pandangan tentang masa depan yang suram serta pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang yang berlangsung terus menerus selama kurun waktu minimal 2 minggu (PPDGJ III).

Secara umum, capaian indikator ini masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari 10%. Dari sebanyak 26 provinsi yang melapor indikator persentase gangguan depresi pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Lampung masing-masing sebesar 9,51%, 8,43%, dan 7,85%.

c. Persentase Gangguan mental emosional pada penduduk diatas 15 tahun yang mendapatkan layanan

Gangguan mental emosional adalah suatu kondisi yang mengindikasikan seseorang mengalami perubahan psikologis yang mungkin merupakan sebuah kondisi normal, tetapi dapat juga merupakan kondisi patologis.

Berdasarkan laporan hasil Riskesdas 2018 diketahui prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia sebesar 9,8%. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya masalah gangguan mental emosional di Indonesia. Prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia > 75 tahun sebesar 15,8% dan terendah pada usia 25 – 24 tahun sebesar 8,5%. Sedangkan menurut jenis kelamin prevalensi pada perempuan (12,1%) lebih tinggi dibanding laki-laki (7,6%). Meskipun tidak menyebabkan kematian secara langsung namun gangguan mental emosional dapat memengaruhi aktifitas sehari-hari yang berdampak terhadap menurunnya produktifitas.

Secara umum, capaian indikator ini masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari 10%. Dari sebanyak 26 provinsi yang melapor indikator persentase gangguan mental emosional pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan DI yogyakarta masing-masing sebesar 5,17%, 4,25%, dan 4,15%.

***

Bab VII

Kesehatan Lingkungan

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan.

Program Lingkungan Sehat bertujuan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan dalam menggerakkan pembangunan lintas sektor berwawasan kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi berbagai pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks, kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum- Perumahan Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan. Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri *E.Colli* dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar *gross alpha activity* tidak boleh melebihi 0,1 *becquerel* per liter (Bq/l) dan kadar *gross beta activity* tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 pasal 4 ayat 4 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

GAMBAR 7.1

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI TAHUN 2020

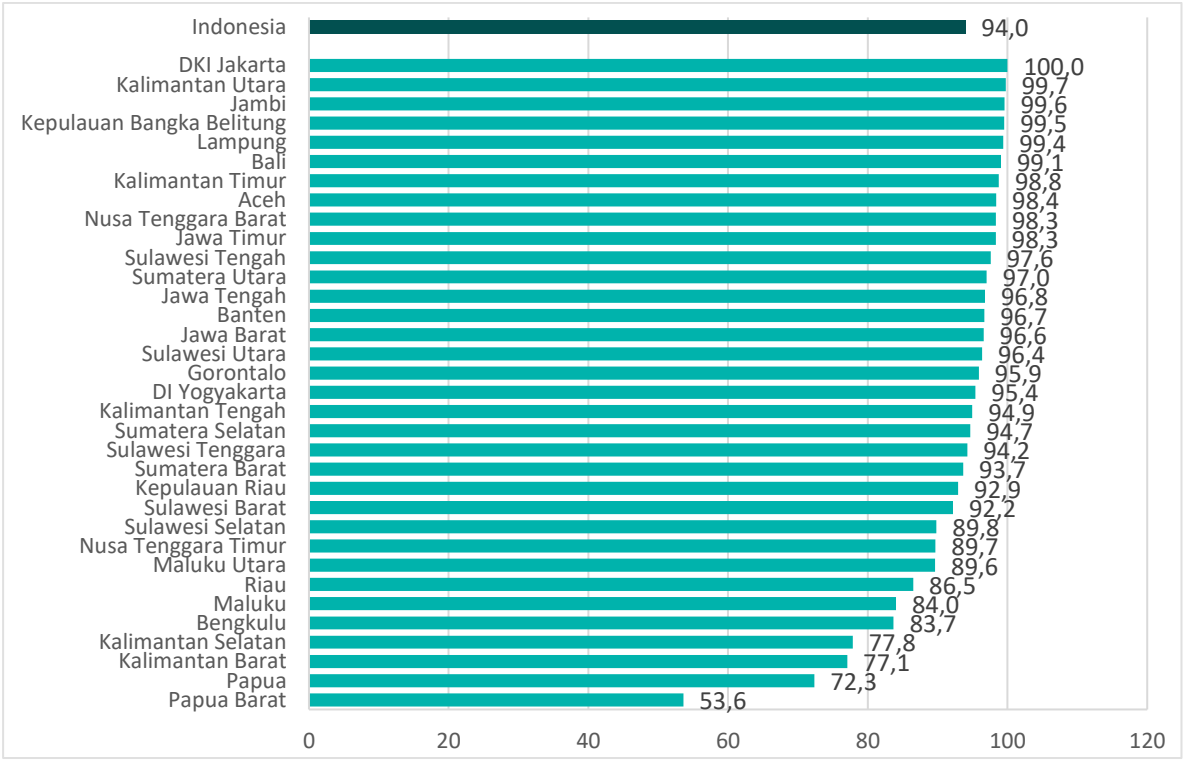

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional persentase sarana air minum yang diawasi tahun 2020 sebesar 84.102 (94%) dari jumlah keseluruhan total sarana air minum sebanyak 89.483 (Gambar7.1). Ada 1 (satu) provinsi yang memiliki 100% pengawasan pada seluruh sarana air minum yang ada yaitu DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi terendah dalam pengawasan air minum yaitu Papua Barat (53,6%).

GAMBAR 7.2
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR TAHUN 2020

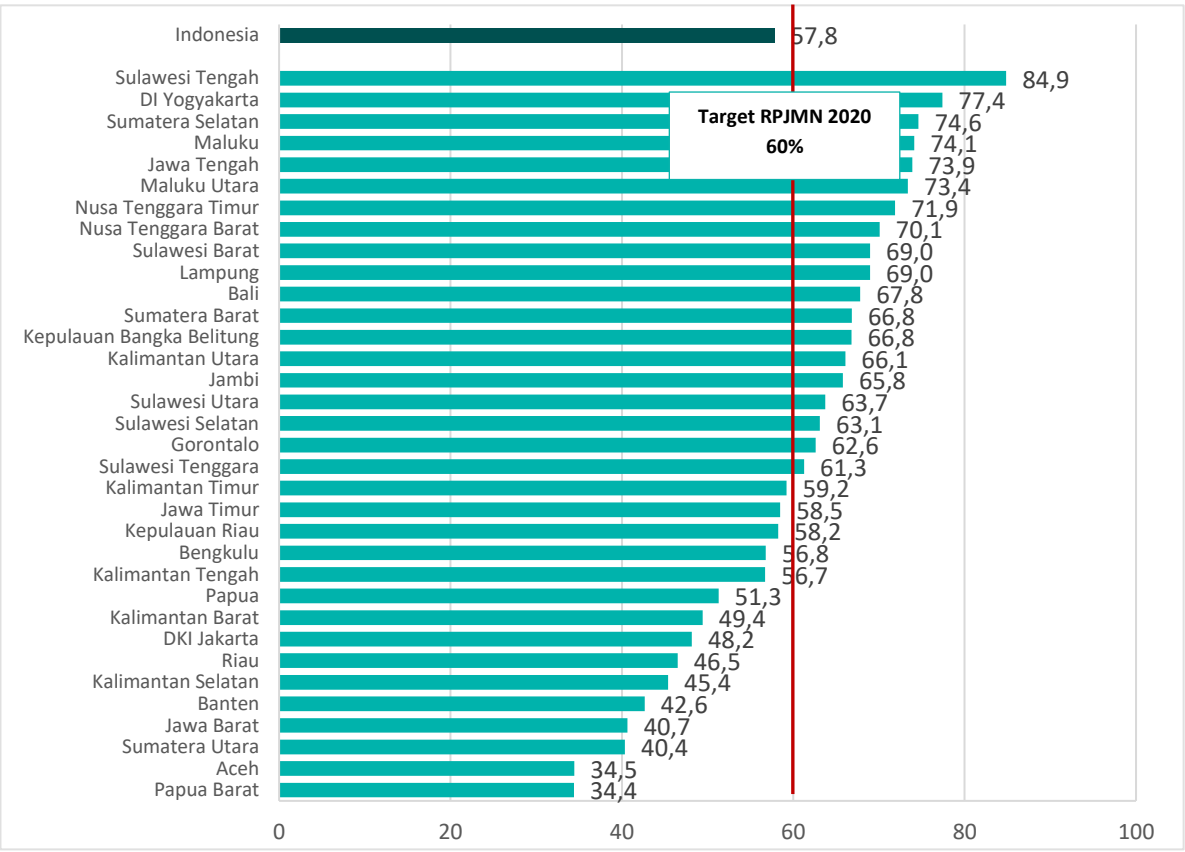

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebanyak 51.735 sarana (57,8%). Provinsi dengan persentase tertinggi sarana air minum yang diawasi sesuai standar yaitu Sulawesi Tengah (84,9%), DI Yogyakarta (77,4%) dan Sumatera Selatan (74,6%). Sedangkan Provinsi terendah yaitu Papua Barat (34,4%), Aceh (34,5%) dan Sumatera Utara (40,4%). Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tersebut belum memenuhi target RPJMN 2020 yaitu sebesar 60% (Gambar 7.2).

Akan tetapi dengan melihat persentase sarana air minum yang diawasi, rata-rata Provinsi di Indonesia telah melakukan pengawasan terhadap sarana air minum sebesar 94%, hal ini merupakan point penting bagi pemerintah provinsi untuk mendorong ke arah 100% pengawasan di seluruh sarana air minum, yang kemudian bertahap fokus kepada target RPJMN untuk mencapai kualitas air minum yang memenuhi standar pada sarana air minum yang dilakukan pengawasan di daerahnya agar mencapai air minum yang aman 15% tahun 2024. Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dapat dilihat di Lampiran 72.a.

Berdasarkan hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT) tahun 2020 yang dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), proporsi rumah tangga menurut akses air minum aman secara parameter fisik, kimia, dan biologi. Studi kualitas air minum dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia merupakan studi pertama yang dilakukan secara serempak tingkat nasional untuk memotret kualitas air minum di Indonesia untuk pertama kalinya. Dengan keterwakilan sampel yang diambil berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), hasil SKAM-RT ini dapat menggambarkan secara nasional. Berikut hasil SKAM-RT tahun 2020 yang telah diolah:

TABEL 7.1
PROPORSI RUMAH TANGGA
MENURUT AKSES AIR MINUM AMAN DARI PARAMETER *E. COLLI*
BERDASARKAN KARATERISTIK WILAYAH, SKAM-RT
TAHUN 2020

KARATERISTIK WILAYAH	AKSES AIR MINUM	
	Aman (%)	Tidak Aman (%)
Regional		
Sumatera	16,3	83,7
Jawa dan Bali	18,9	81,1
Nusa Tenggara	15,8	84,2
Kalimantan	21,5	78,5
Sulawesi	16,9	83,1
Maluku	9,2	90,8
Papua*	9,3	90,7
Klasifikasi Tempat Tinggal		
Perkotaan	21,3	78,7
Perdesaan	14,4	85,5
Total	18,1	81,9

*Tidak termasuk Papua Barat
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan karateristik wilayah menunjukkan proporsi rumah tangga menurut akses air minum aman dari parameter *E. Colli* di Indonesia tahun 2020 sebesar 18,1 % (tidak termasuk Papua Barat), dengan daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan (21,3%) dan (14,4%). Sedangkan berdasarkan regional tertinggi yaitu Kalimantan (21,5%) dan terendah Maluku (9,2%). Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1.

TABEL 7.2
PROPORSI RUMAH TANGGA MENURUT AKSES AIR MINUM AMAN DARI PARAMETER TDS, *E. COLLI*, PH, NITRAT, NITRIT BERDASARKAN KARATERISTIK WILAYAH, SKAM-RT TAHUN 2020

KARATERISTIK WILAYAH	AKSES AIR MINUM	
	Aman (%)	Tidak Aman (%)
Regional		
Sumatera	6,4	93,6
Jawa dan Bali	13,8	86,2
Nusa Tenggara	10,0	90,0
Kalimantan	16,9	83,1
Sulawesi	11,6	88,4
Maluku	7,5	92,5
Papua*	1,0	99,0
Klasifikasi Tempat Tinggal		
Perkotaan	15,1	84,9
Perdesaan	8,3	91,7
Total	11,9	88,1

*Tidak termasuk Papua Barat

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Berdasarkan karateristik wilayah menunjukkan proporsi rumah tangga menurut akses air minum aman berdasarkan parameter fisik (TDS), kimia (Nitrat, Nitrit, pH) dan biologi (*E.Colli*) di Indonesia tahun 2020 sebesar 11,9 % (tidak termasuk Papua Barat), dengan daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan (15,1%) dan (8,3%). Sedangkan berdasarkan regional tertinggi yaitu Kalimantan (16,9%) dan terendah Papua (1,0%). Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada tabel 7.2.

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) yang dipublikasikan melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akses air minum layak diantaranya adalah:

1. jenis sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga untuk diminum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa ,sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan;
2. jenis sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang namun sumber air utama untuk mandi, mencuci dan lain-lain yang digunakan berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Perbedaan klasifikasi dengan sebelumnya adalah tidak lagi memasukkan karakteristik jarak ke tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja terdekat.

TABEL 7.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2020

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Air kemasan bermerk	16,32	2,47	10,23
Air isi ulang	36,99	19,06	29,1
Leding	11,91	7,26	9,87
Sumur bor/pompa	18,61	19,7	19,09
Sumur terlindung	10,08	19,78	14,35
Sumur tak terlindung	1,44	6,47	3,65
Mata air terlindung	3,16	13,83	7,86
Mata air tak terlindung	0,48	4,85	2,4
Air permukaan (sungai, danau/waduk, kolam, irigasi)	0,17	2,54	1,21
Air hujan	0,79	3,95	2,18
Lainnya	0,03	0,08	0,06
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Data dari BPS yang dipublikasikan melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, secara nasional menunjukkan sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air isi ulang (29,1%), sumur bor/pompa (19,09%), dan sumur terlindungi (14,35%). Daerah perkotaan air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan (36,99%) sedangkan daerah perdesaan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan sumur terlindung (19,78%). Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada tabel 7.3.

GAMBAR 7.3
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2020

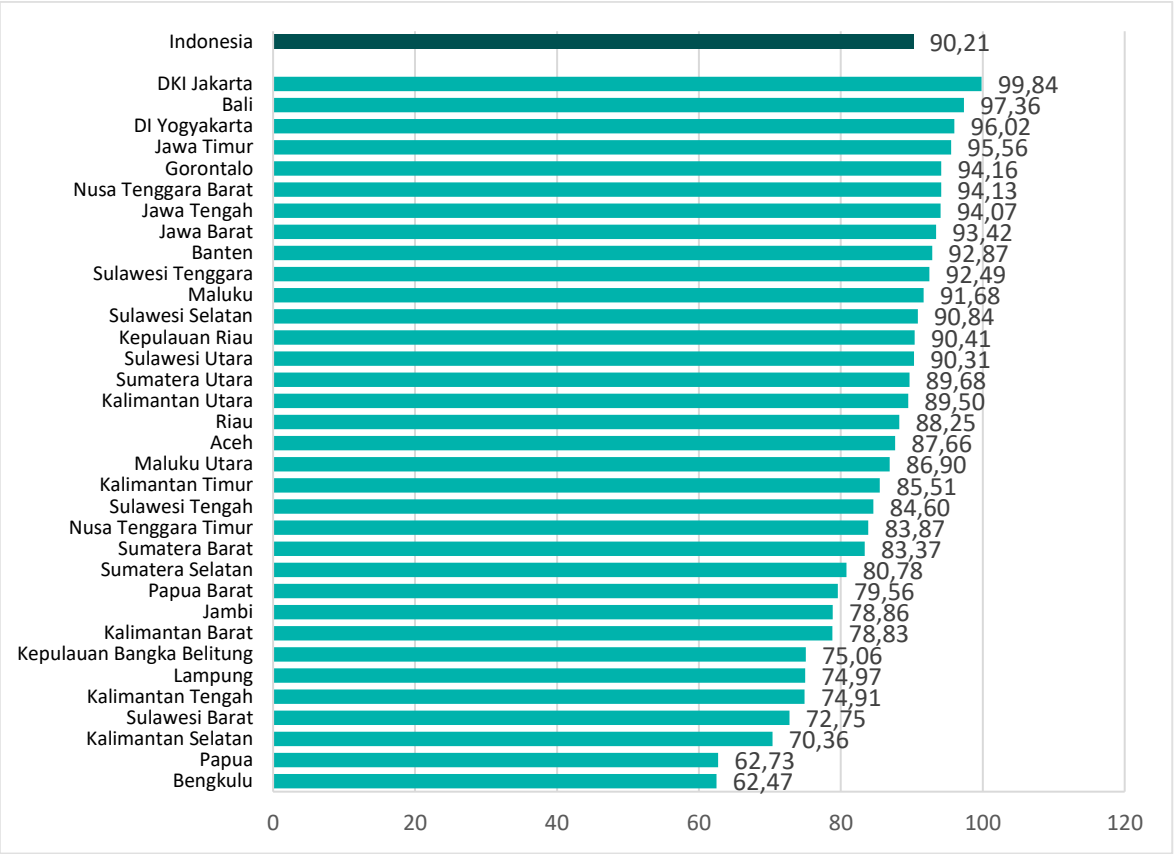

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan lingkungan 2020

Secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 90,21% (Gambar 7.3). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu DKI Jakarta (99,84%), Bali (97,36%) dan DI Yogyakarta (96,02%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Bengkulu (62,47%), Papua (62,73%), dan Kalimantan Selatan (70,36%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 72.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urine dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang

dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

a. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
   Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
b. Bangunan tengah jamban
   Lubang pembungan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa kontruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah (SPAL).
c. Bangunan bawah
   Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

GAMBAR 7.4
PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT
DI INDONESIA TAHUN 2020

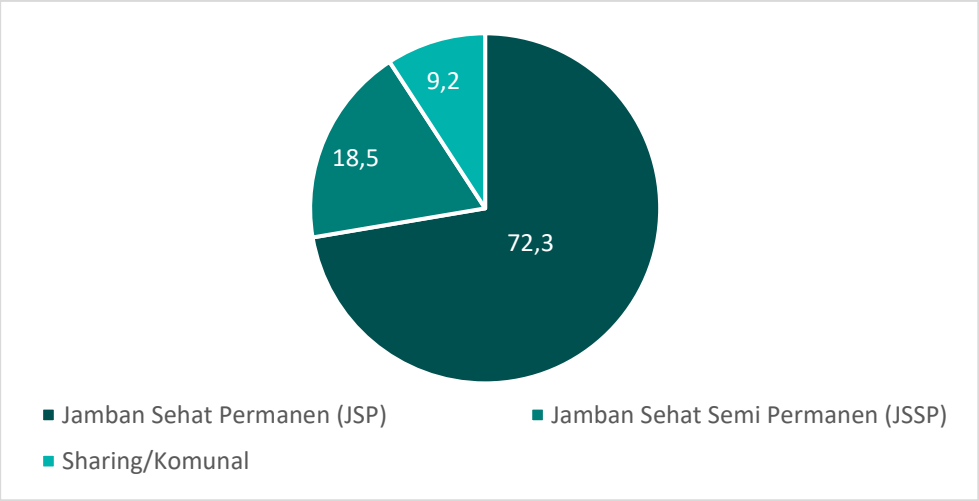

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban sharing/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen (JSP). Jamban sharing/komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). JSSP belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. JSP adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2020, 72,3% keluarga di Indonesia sudah menggunakan JSP (Gambar 7.4). Sisanya 18,5% menggunakan JSSP dan 9,2% menggunakan jamban sharing/komunal.

GAMBAR 7.5
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT)
TAHUN 2020

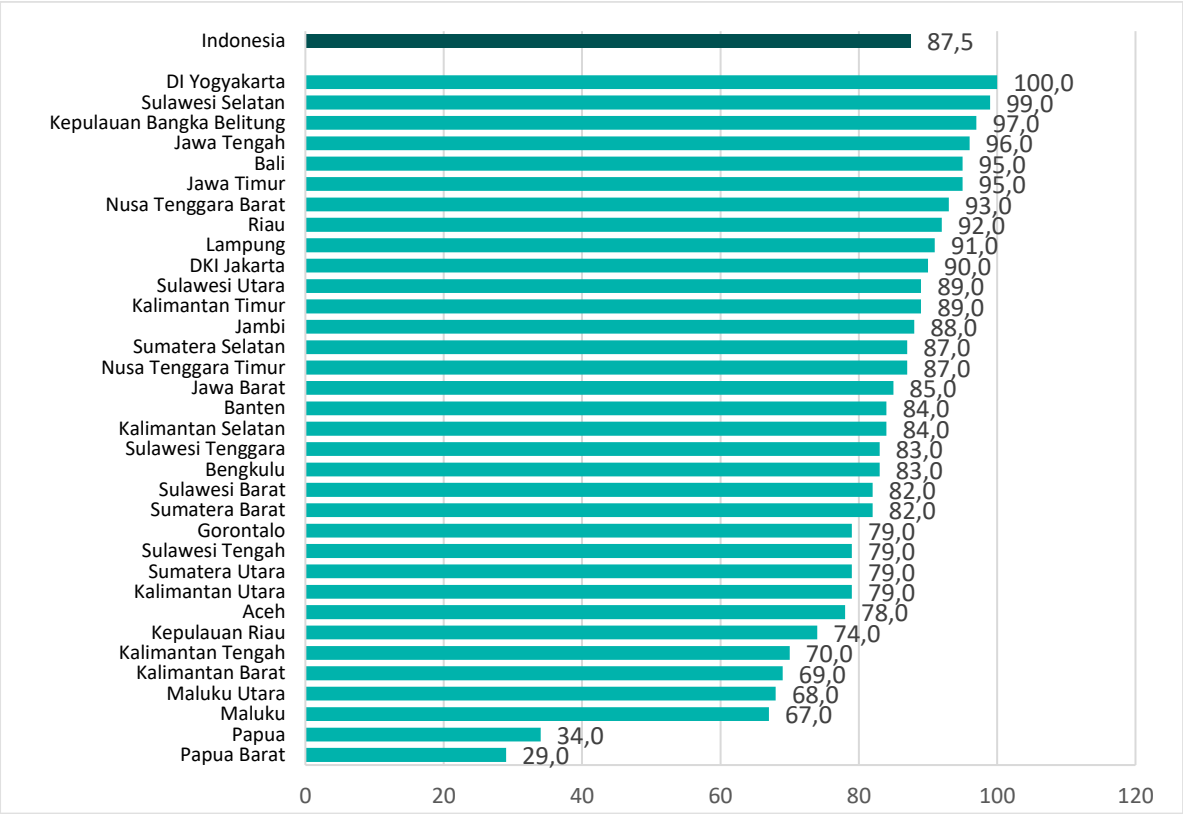

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia tahun 2020 adalah 87,5%. Provinsi dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (99%), dan Kepulauan Bangka Belitung (97%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua Barat (29%), Papua (34%), dan Maluku (67%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 73.a.

Menurut BPS yang dipublikasikan melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah

1. Jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan hanya oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) komunal;
2. Jenis kloset yang digunakan adalah jenis kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL);
3. Sanitasi layak khusus pada rumah tangga yang tinggal di perdesaan, jika menggunakan fasilitas buang air besar sendiri atau bersama rumah tangga lain dengan jenis kloset leher angsa namun tempat akhir pembuangan tinjanya menggunakan lubang tanah.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
TAHUN 2020

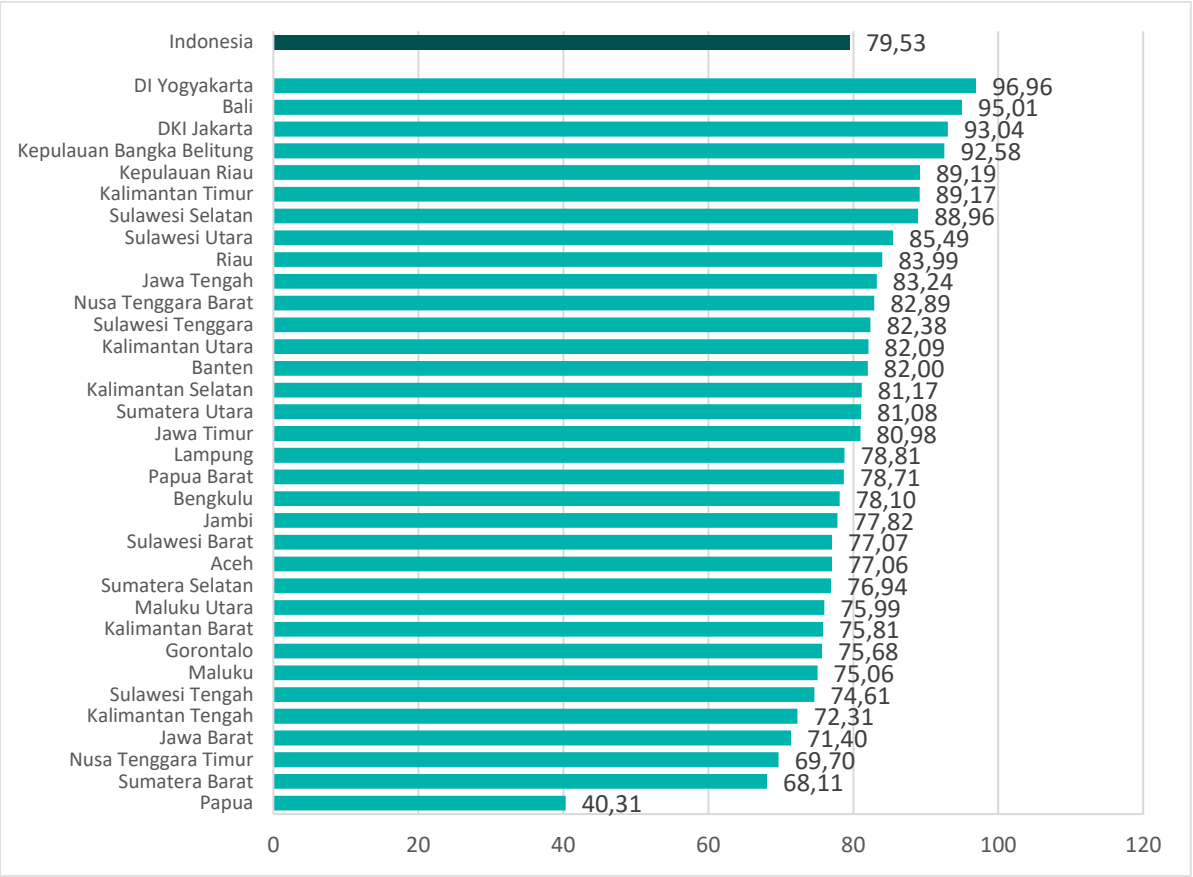

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 79,53% (Gambar 7.6). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu DI Yogyakarta (96,96%), Bali (95,01%), dan DKI Jakarta (93,04%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Papua (40,31%), Sumatera Barat (68,11%), dan Nusa Tenggara Timur (69,70%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Lampiran 73.b.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2018-2020

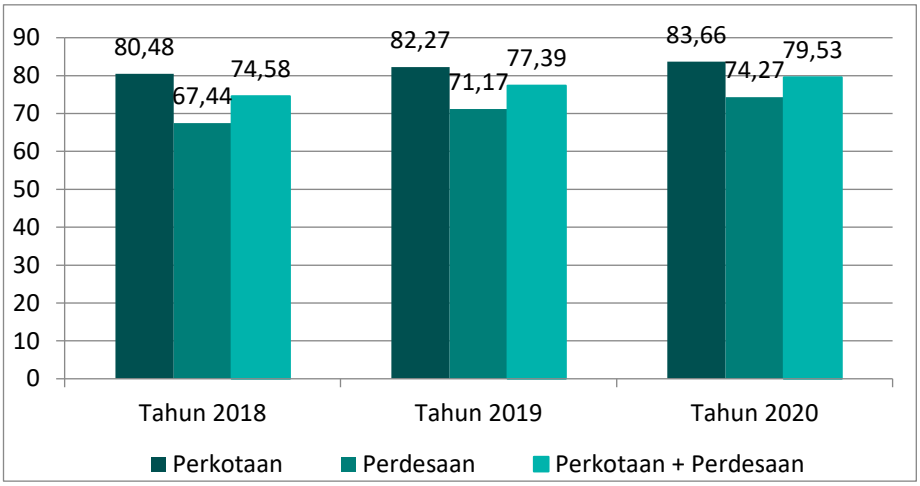

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Gambar 7.7 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 4,95%. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (83,66%) dan (74,27%). Selama periode ini, persentase untuk daerah perkotaan dan perdesaan mengalami kenaikan dengan daerah perdesaan kenaikan sebesar 6,83% dan daerah perkotaan sebesar 3,18%.

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 Komponen Sanitasi Total adalah sebagai berikut: 1.) Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*), 2.) Peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation), 3.) Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*).

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan *CLTS (Community-Led Total Sanitation)*.
2. Telah memiliki *natural leader* (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Pada tahun 2020, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sudah mencapai 61.000 dari total 83.441 desa/kelurahan di Indonesia.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

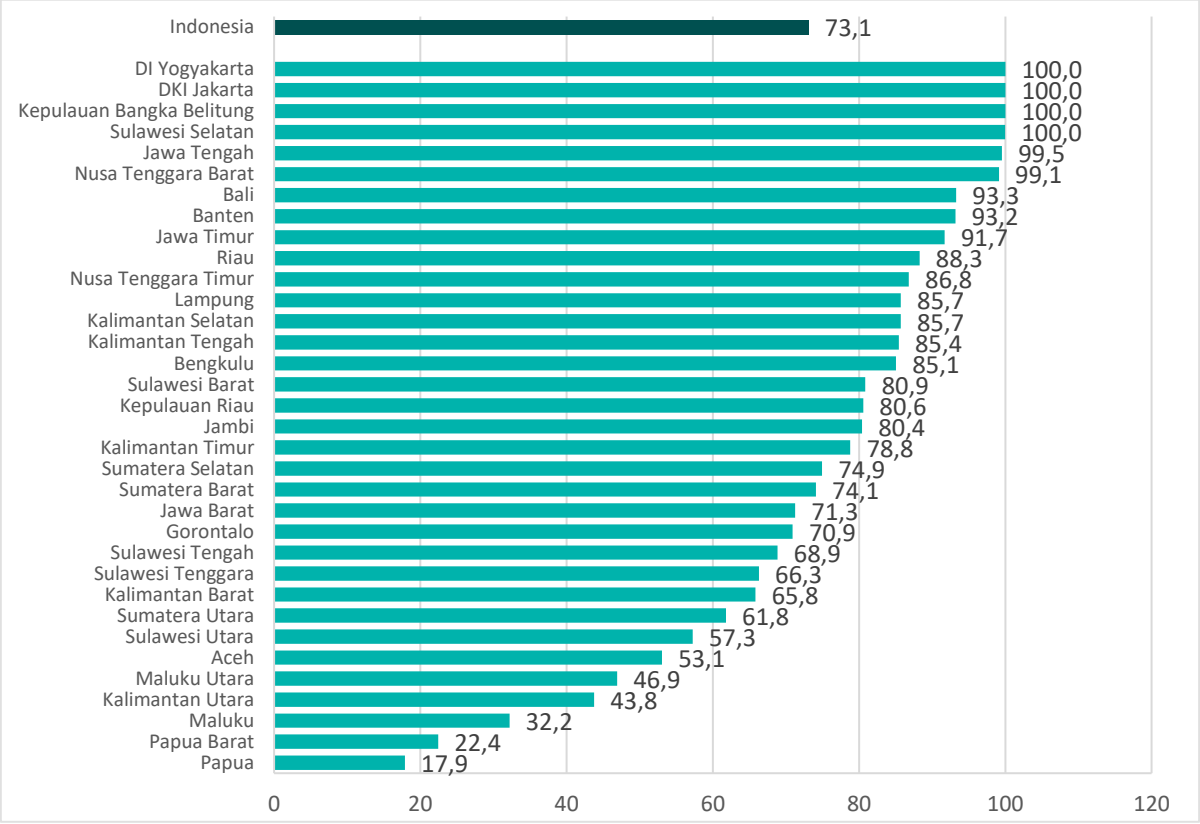

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2020 adalah 73,1%, meningkat dari capaian tahun 2019 yaitu 69,4% (Gambar 7.8). Ada empat (4) provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Papua (17,9%), Papua Barat (22,4%) dan Maluku (32,2%). Tiga (3) provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Jawa Tengah (8.523), Jawa Timur (7.797) dan Jawa Barat (4.246). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 74.

Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS) dalam pilar STBM dapat mencapai status SBS dengan indikator sebagai berikut:

a. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
b. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
c. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
d. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

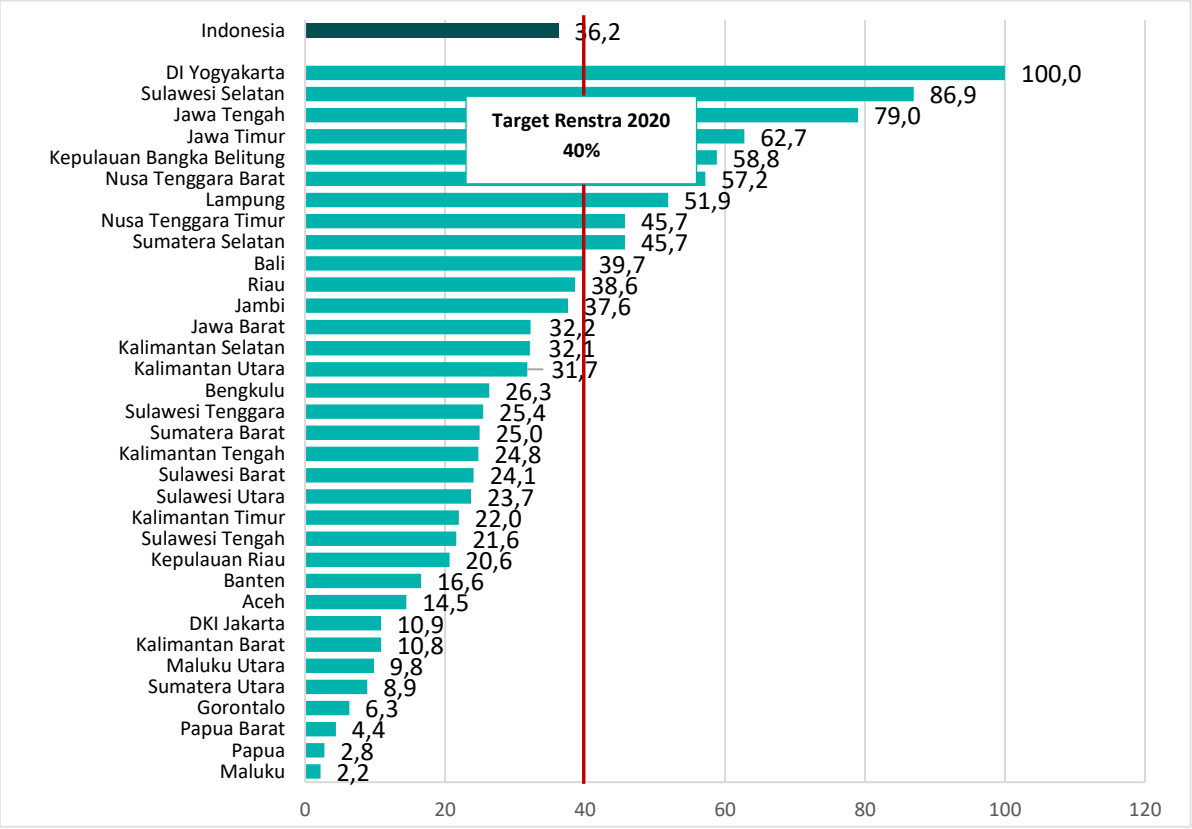

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional persentase desa/kelurahan SBS tahun 2020 adalah 36,2%. Provinsi dengan persentase desa/kelurahan SBS tertinggi yaitu DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (86,9%) dan Jawa Tengah (79,0%). Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan SBS adalah Maluku (2,2%), Papua (2,8%), dan Papua Barat (4,4%). Persentase desa/kelurahan SBS belum memenuhi target Renstra tahun 2020 sebesar 40%. Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan SBS tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 74.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (Sanitarian Kit) yang tersedia di Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU)
YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR TAHUN 2020

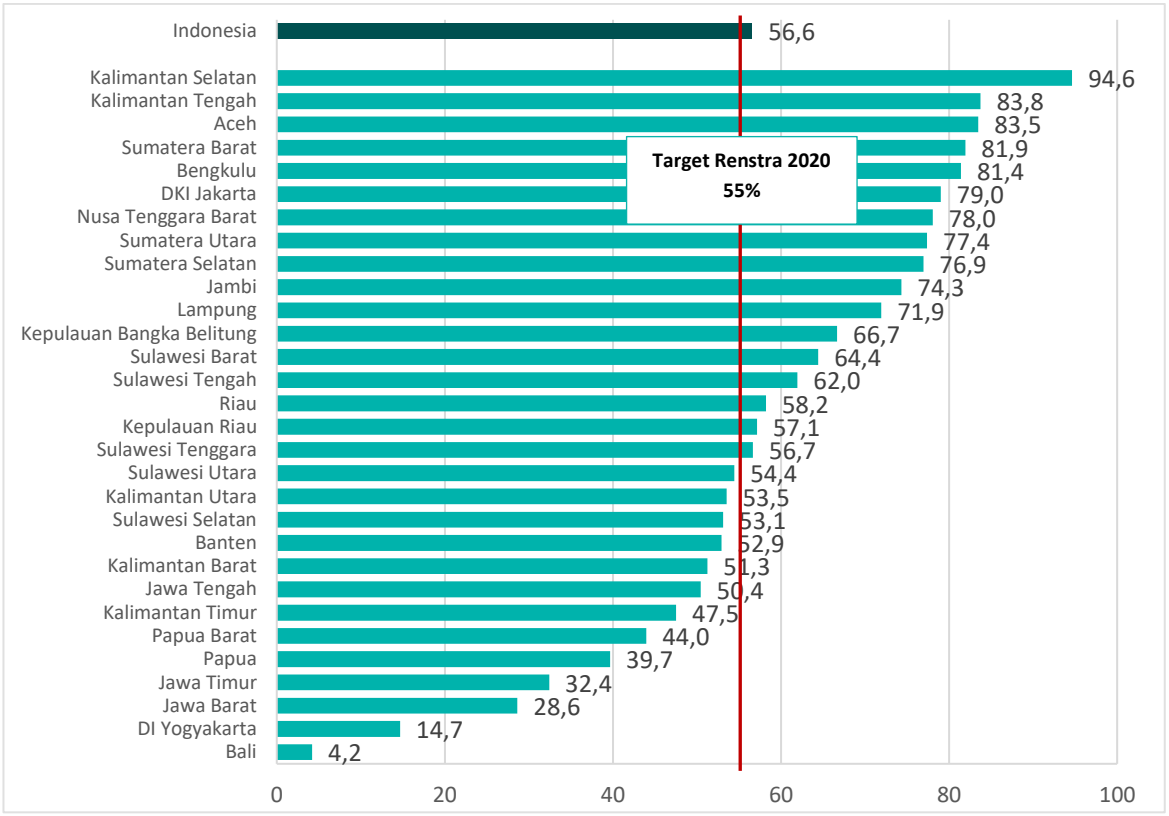

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kesmenkes RI, 2020

Secara nasional persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2020 adalah 56,6%. Angka ini sudah melebihi dari target Renstra tahun 2020 yaitu 55%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Selatan (94,6%), Kalimantan Tengah (83,8%), dan Aceh (83,5%). Provinsi dengan capaian terendah Bali (4,2%), DI Yogyakarta (14,7%), dan Jawa Barat (28,6%). Sedangkan provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara belum ada informasi TFU yang dilakukan pengawasan. Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 75.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasaboga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan terutama penyakit yang diakibatkan oleh pangan atau Food Borne Diseases. Setiap TPP harus menerapkan higiene sanitasi pangan agar pangan yang dihasilkan aman dan sehat untuk dikonsumsi, untuk itu perlu memperhatikan higiene sanitasi dalam pengelolaan pangan di TPP mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan bahan pangan, pengolahan pangan, penyimpanan pangan matang, sampai dengan penyajian, selain itu juga harus memperhatikan 4 (empat) aspek higiene sanitasi dalam bangunan, peralatan, penjamah pangan dan pangan yang dihasilkan.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan IKL oleh petugas puskemas, disamping itu TPP juga dapat melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi buku rapor yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan IKL.

Apabila TPP memenuhi syarat berdasarkan hasil IKL maka dapat mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi ke Dinas Kesehatan setempat dengan memenuhi persyaratan lainnya yaitu pemeriksaan sampel pangan dan penjamah pangan yang sudah dilatih higiene sanitasi pangan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR TAHUN 2020

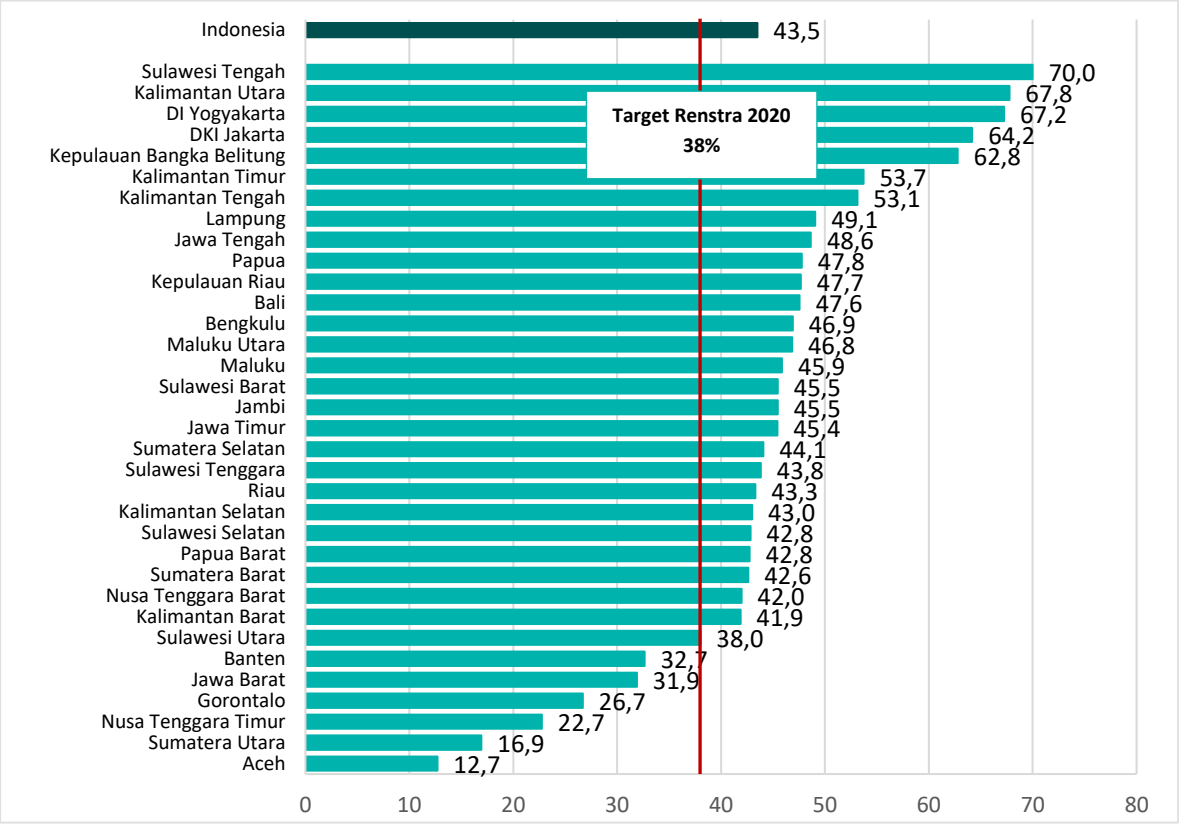

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar secara nasional pada tahun 2020 adalah 43,5%. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 untuk TPP yang memenuhi syarat sesuai standar yaitu sebesar 38%.

Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Sulawesi Tengah (70%), Kalimantan Utara (67,8%), dan DI Yogyakarta (67,2%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh (12,7%), Sumatera Utara (16,9%), dan Nusa Tenggara Timur (22,7%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.a.

F. KABUPATEN/ KOTA SEHAT

Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut "Forum Kabupaten/Kota Sehat" atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum;
2. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
3. kawasan industri dan perkantoran sehat;
4. kawasan pariwisata sehat;
5. ketahanan pangan dan gizi;
6. kehidupan masyarakat yang mandiri;
7. kehidupan sosial yang sehat.

Pengembangan KKS adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif di daerah tersebut. Pemerintah Pusat hanya berperan membina dan memfasilitasi potensial yang ada. Pencapaian KKS merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus menciptakan dan meningkatan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara mernberdayakan mereka agar cepat saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu Kota/Desa.

KKS yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi. Penghargaan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk taraf pemantapan, Wiwerda untuk taraf pembinaan, dan Wistara untuk taraf pengembangan.

GAMBAR 7.12
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT
TAHUN 2020

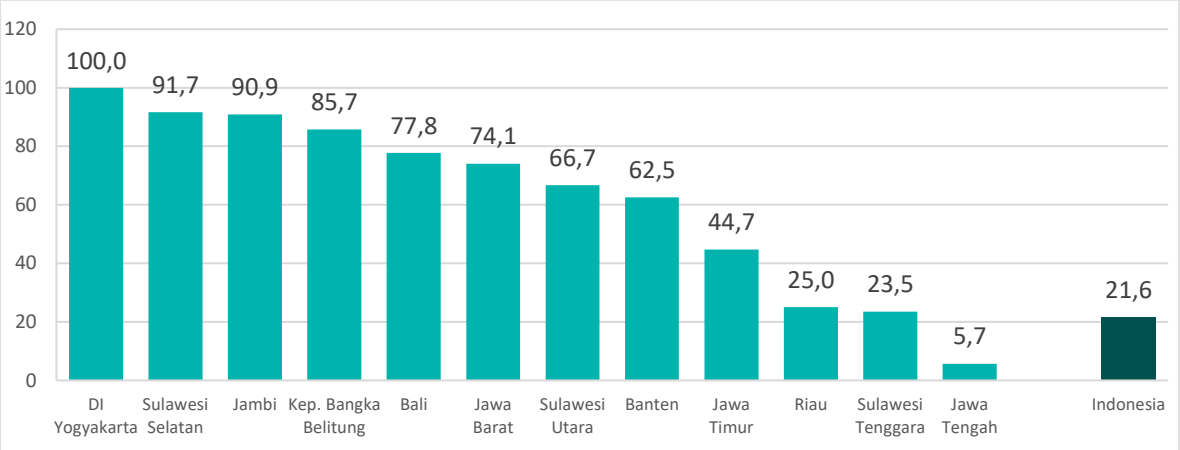

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%) (Gambar 7.12). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS. Kriteria menyelenggarakan KKS adalah 1) laporan dari Tim Pembina KKS Provinsi, 2) SK Tim Pembina KKS, 3) SK Forum KKS, 4) Rencana Kerja Tim Pembina, 5) Rencana Kerja Forum KKS. Provinsi yang mencapai 100% dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yaitu DI Yogyakarta. Provinsi dengan persentase penyelenggaraan KKS yang masih rendah adalah Jawa Tengah (5,7%). Sedangkan sebanyak 22 Provinsi tidak menyelenggarakan KKS. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota sehat tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.b.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya (1) indikator perlu di update mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan KKS, (2) masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan Kemenkes untuk mewujudkan KKS, (3) kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah, (4) kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, serta (5) masih kurangnya advokasi kegiatan KKS di provinsi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan KKS.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Definisi limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Pengelolaan limbah medis berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan (*reduce*), menggunakan kembali (reuse), dan daur ulang (*recycle*). Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

Tata laksana pengelolaan limbah medis sesuai standar tertuang dalam pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan rumah sakit yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang di antaranya terdiri dari beberapa upaya disesuaikan dengan jenis limbah, upaya tersebut diantaranya:

1. upaya minimisasi limbah ;
2. pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang;
3. tempat penampungan sementara;
4. transportasi (pengangkutan);
5. pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah cair dan limbah padat.

Definisi operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang mengelola limbah medis adalah RS dan Puskesmas yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin.

Pada tahun 2020, jumlah Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolahan limbah medis sesuai standar mencapai 2.431 dari total fasyankes 12.831. Hal ini belum mencapai target Renstra sebanyak 2.600 jumlah fasyankes yang melakukan pengelolahan limbah medis sesuai standar di tahun 2020.

GAMBAR 7.13
PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2020

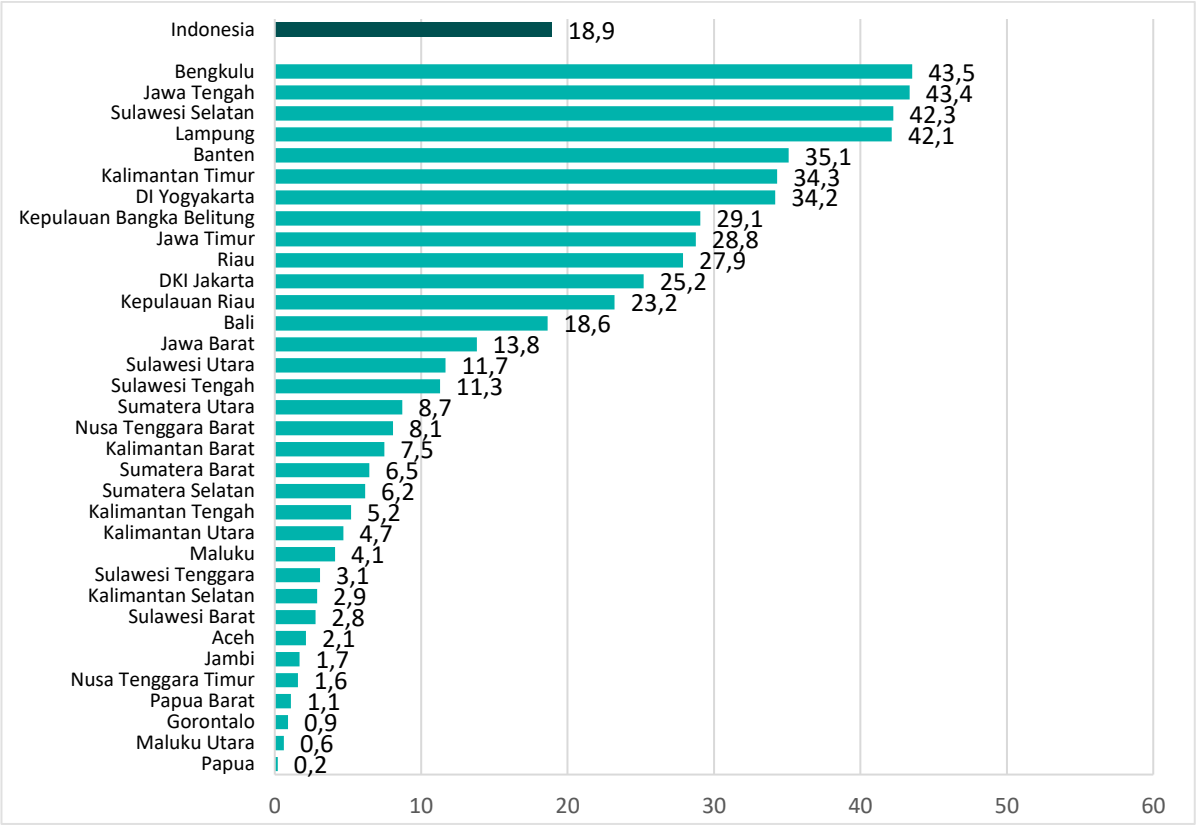

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021;
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2020 adalah 18,9% (Gambar 7.13). Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bengkulu (43,5%), Jawa Tengah (43,4%), dan Sulawesi Selatan (42,3%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (0,2%), Maluku Utara (0,6%), dan Gorontalo (0,9%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.c.

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

Sejak 2017, Pemerintah berinovasi dengan mengeluarkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017. Germas adalah perwujudan dari kebijakan berwawasan sehat dimana pelibatan lintas sektor diluar kesehatan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan. Di era saat ini Germas menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan kesehatan melalui pembudayaan Germas.

Kebijakan ini mengamanahkan agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mengimplementasikan kebijakan Germas dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif. Program Germas bertujuan antara lain 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena

meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan serta; 4) Penguatan sistem kesehatan; pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berfokus pada pemerataan layanan.

GAMBAR 7.14
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
TAHUN 2020

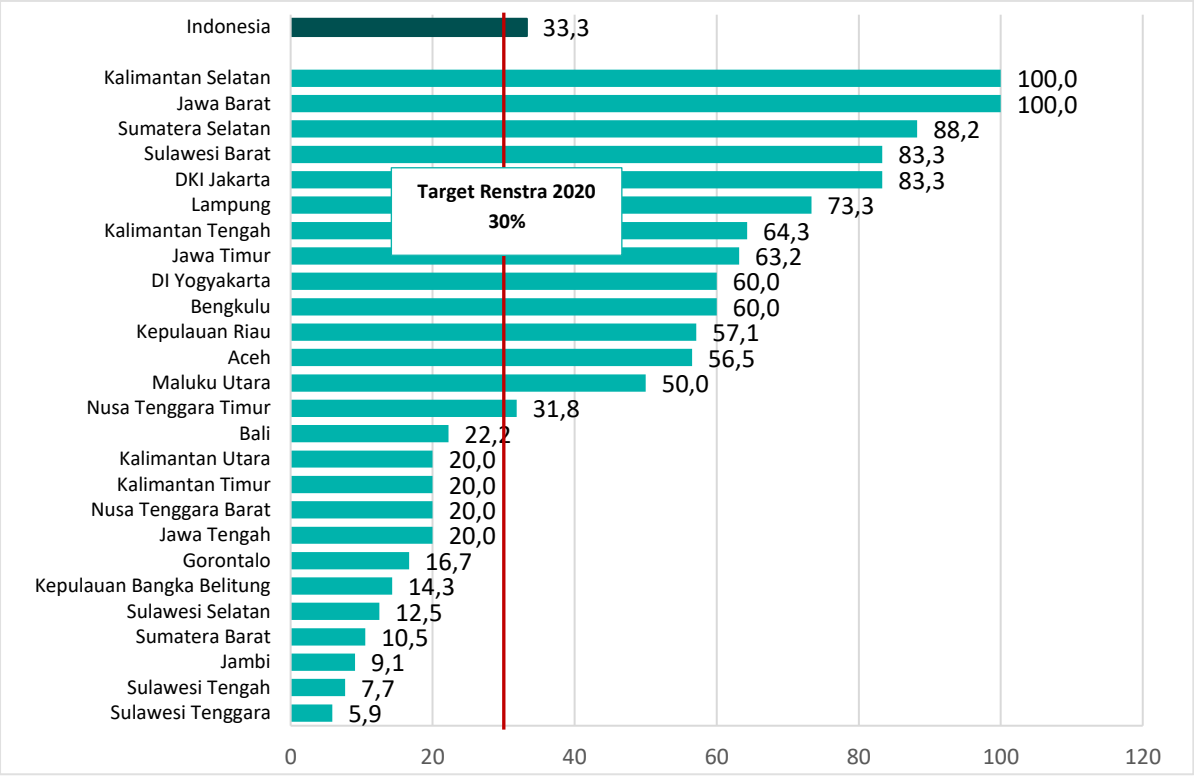

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan Germas pada tahun 2020 sebanyak 171 kabupaten/kota (33,3%) (Gambar 7.14). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 30% kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas. Ada 2 (dua) provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Kalimantan Selatan dan Jawa Barat. Provinsi dengan persentase kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas yang masih rendah adalah Sulawesi Tenggara (5,9%), Sulawesi Tengah (7,7%) dan Jambi (9,1%). Sedangkan sebanyak 8 provinsi belum melaksanakan Kebijakan Germas. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Germas tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.d.

I. PERUMAHAN

Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dan sehat, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat dimengerti sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati

kehidupan, beristirahat bersama keluarga. Rumah yang layak harus menjamin kepentingan keluarga salah satunya menjamin kesehatan keluarga.

Menurut WHO (World Health Organization), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Rumah layak huni mendukung terciptanya rumah yang sehat. Menurut BPS yang dipublikasikan melalui Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020, definisi rumah layak huni memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal *(sufficient living space)* minimal 7,2 m^2 perkapita,
2. Memiliki akses air minum layak,
3. Memiliki akses sanitasi layak,
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah.

GAMBAR 7.15
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

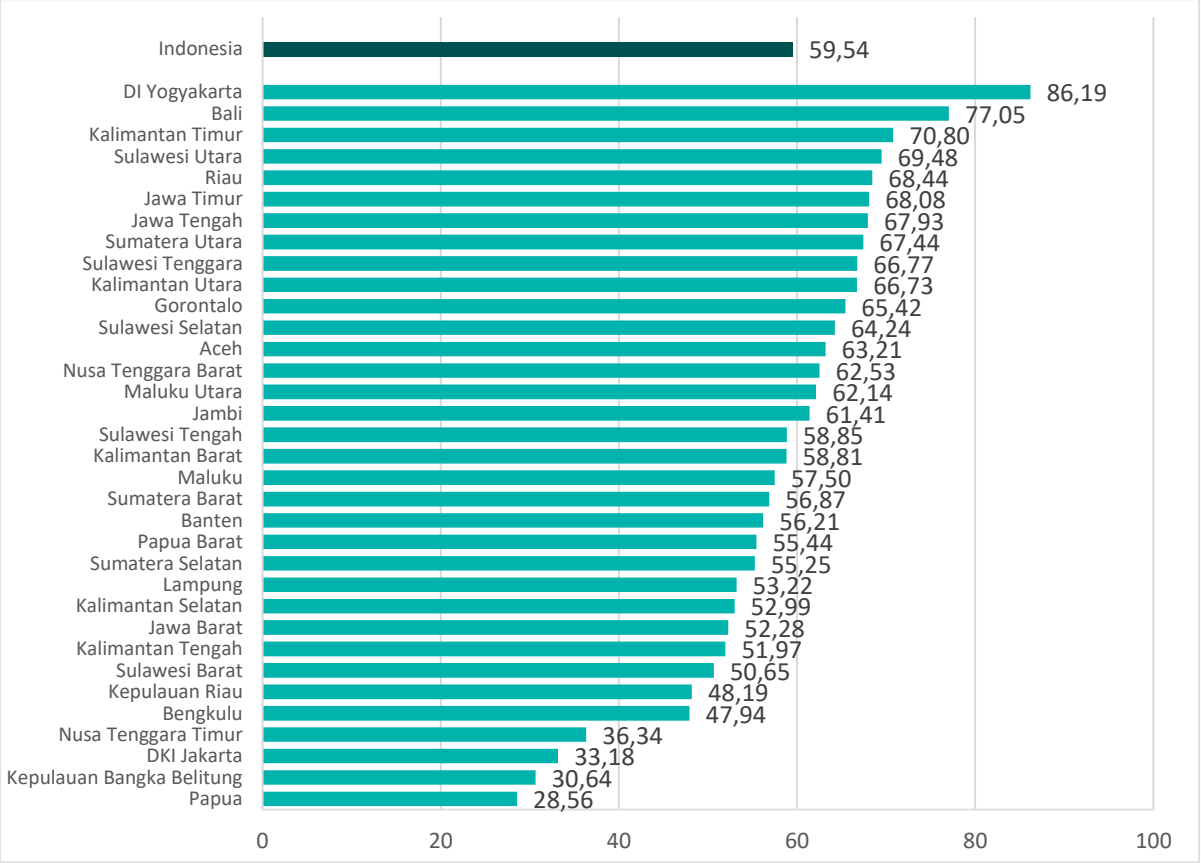

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Secara nasional persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 59,54% (Gambar 7.15). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni yaitu DI Yogyakarta (86,19%), Bali (77,05%) dan Kalimantan Timur (70,80%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (28,56%), Kepulauan Bangka Belitung (30,64%), dan DKI Jakarta (33,18%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.e.

Rumah tangga kumuh (kategori rumah tidak layak huni) merupakan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta memenuhi syarat bagi kesehatan penghuninya. Seperti halnya indikator rumah layak huni, indikator penilaian rumah kumuh merupakan indikator komposit. Indikator pembentuk rumah tangga kumuh sama dengan indikator pembentukan rumah layak huni.

GAMBAR 7.16
PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

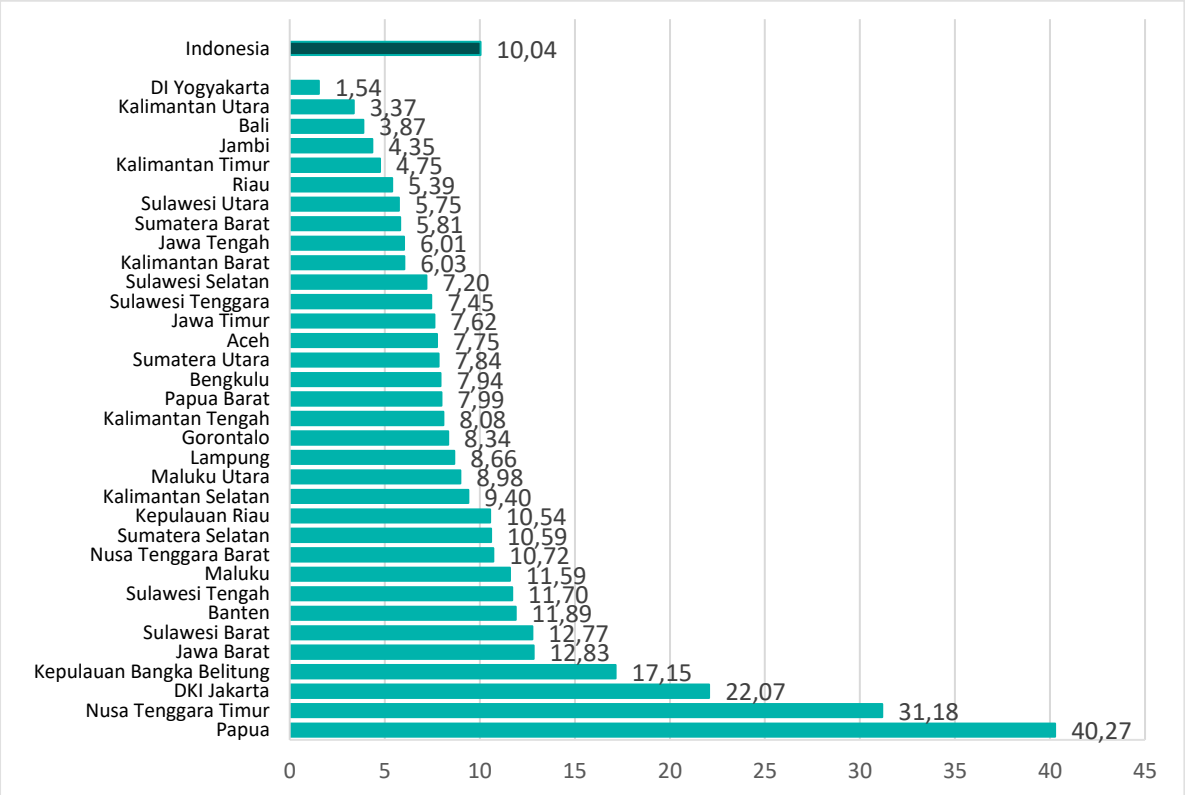

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Gambar 7.16 menunjukkan persentase rumah tangga kumuh menurut provinsi secara nasional pada tahun 2020 sebesar 10,04%. Terdapat 12 provinsi yang persentase rumah tangga kumuh lebih tinggi dari angka nasional. Provinsi dengan persentase rumah tangga kumuh terendah yaitu DI Yogyakarta (1,54%), Kalimantan Utara (3,37%), dan Bali (3,87%). Sedangkan provinsi dengan rumah tangga kumuh tertinggi yaitu Papua (40,27%), Nusa Tenggara Timur (31,18%), dan DKI Jakarta (22,07%). Rincian lengkap rumah tangga kumuh menurut provinsi pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Lampiran 76.f.

***

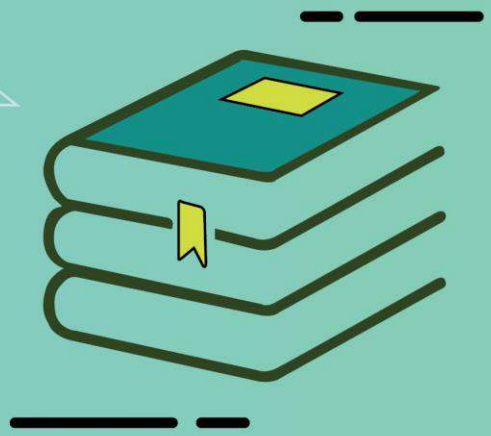

Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threeshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
- Ansar. 2017. *Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 2. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6850
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: UNPF.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Mei 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- CDC. 2021. *COVID-19 Calculating Percent Positivitity*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html [Accessed 17 Mei 2021].

- CDC. 2021. *COVID-19 Medical Conditions*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed 17 Mei 2021].
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2004. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP).* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015-2019.* Jakarta: kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2020. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/Huk/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020.* Jakarta: Kementerian Sosial
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianigsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- **Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018*. Jakarta : Kementrian Kesehatan.**
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia*. *Nomor 40 Tahun 2004* tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada*

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*, Nomor 184. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.* Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases.*
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication.*
- World Health Organization. 2020. *Global Tuberculosis Report 2020.* Geneva: WHO

* * *

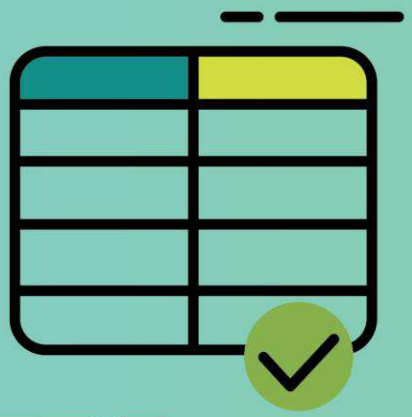

Lampiran

Lampiran 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Luas Wilayah	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
		(km^2)											*per* km^2
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	57.956,00	18	5	23	289		6.497	2.728.234	2.731.657	5.459.891	100	94,2
2	Sumatera Utara	72.981,23	25	8	33	450	693	5.417	7.335.882	7.367.650	14.703.532	100	201,5
3	Sumatera Barat	42.012,89	12	7	19	179	230	928	2.741.537	2.757.214	5.498.751	99	130,9
4	Riau	87.023,66	10	2	12	169	268	1.591	3.653.963	3.474.342	7.128.305	105	81,9
5	Jambi	50.058,16	9	2	11	141	163	1.399	1.875.781	1.802.113	3.677.894	104	73,5
6	Sumatera Selatan	91.592,43	13	4	17	241	387	2.853	4.352.141	4.215.782	8.567.923	103	93,5
7	Bengkulu	19.919,33	9	1	10	129	172	1.341	1.028.893	990.955	2.019.848	104	101,4
8	Lampung	34.623,80	13	2	15	228	205	2.435	4.359.897	4.161.304	8.521.201	105	246,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.424,06	6	1	7	47	82	309	789.708	727.882	1.517.590	108	92,4
10	Kepulauan Riau	8.201,72	5	2	7	75	142	275	1.141.702	1.100.496	2.242.198	104	273,4
11	DKI Jakarta	664,01	1	5	6	44	267	-	5.324.795	5.320.191	10.644.986	100	16.031,4
12	Jawa Barat	35.377,76	18	9	27	627	645	5.312	25.265.315	24.670.543	49.935.858	102	1.411,5
13	Jawa Tengah	32.800,69	29	6	35	576	753	7.809	17.320.113	17.619.965	34.940.078	98	1.065,2
14	DI Yogyakarta	3.133,15	4	1	5	78	46	392	1.921.605	1.960.683	3.882.288	98	1.239,1
15	Jawa Timur	47.803,49	29	9	38	666	777	7.724	19.693.755	20.192.533	39.886.288	98	834,4
16	Banten	9.662,92	4	4	8	155	313	1.238	6.700.054	6.460.442	13.160.496	104	1.362,0
17	Bali	5.780,06	8	1	9	57	80	636	2.206.238	2.174.586	4.380.824	101	757,9
18	Nusa Tenggara Barat	18.572,32	8	2	10	117	145	995	2.488.813	2.636.809	5.125.622	94	276,0
19	Nusa Tenggara Timur	48.718,10	21	1	22	309	327	3.026	2.744.159	2.797.235	5.541.394	98	113,7
20	Kalimantan Barat	147.307,00	12	2	14	174	99	2.031	2.610.428	2.524.332	5.134.760	103	34,9
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	13	1	14	136	139	1.432	1.449.304	1.319.852	2.769.156	110	18,0
22	Kalimantan Selatan	38.744,23	11	2	13	153	144	1.864	2.184.642	2.119.337	4.303.979	103	111,1
23	Kalimantan Timur	129.066,64	7	3	10	103	197	841	1.988.049	1.805.103	3.793.152	110	29,4
24	Kalimantan Utara	75.467,70	4	1	5	53	35	447	407.282	361.223	768.505	113	10,2
25	Sulawesi Utara	13.892,47	11	4	15	171	332	1.507	1.289.727	1.239.067	2.528.794	104	182,0
26	Sulawesi Tengah	61.841,29	12	1	13	175	175	1.842	1.579.629	1.517.347	3.096.976	104	50,1
27	Sulawesi Selatan	46.717,48	21	3	24	311	792	2.255	4.364.605	4.563.399	8.928.004	96	191,1
28	Sulawesi Tenggara	38.067,70	15	2	17	219	377	1.911	1.386.613	1.368.976	2.755.589	101	72,4
29	Gorontalo	11.257,07	5	1	6	77	72	657	610.900	608.676	1.219.576	100	108,3
30	Sulawesi Barat	16.787,18	6	0	6	69	73	575	705.360	699.652	1.405.012	101	83,7
31	Maluku	46.914,03	9	2	11	118	35	1.198	923.193	908.687	1.831.880	102	39,0
32	Maluku Utara	31.982,50	8	2	10	116	118	1.063	651.729	627.035	1.278.764	104	40,0
33	Papua Barat	102.955,15	12	1	13	218	95	1.742	516.242	465.580	981.822	111	9,5
34	Papua	319.036,05	28	1	29	560	110	5.411	1.802.213	1.633.217	3.435.430	111	10,8
Indonesia		**1.916.906,77**	**416**	**98**	**514**	**7.230**	**8.488**	**74.953**	**136.142.501**	**134.923.865**	**271.066.366**	**101**	**141,4**

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2020 (Permendagri 72 Tahun 2019)
Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 2.a

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2020

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	0 - 4	11.980.204	11.495.554	23.475.758	104,2
2	5 - 9	12.207.921	11.747.554	23.955.475	103,9
3	10 - 14	11.942.226	11.336.345	23.278.571	105,3
4	15 - 19	11.465.456	10.930.759	22.396.215	104,9
5	20 - 24	11.219.095	10.769.928	21.989.023	104,2
6	25 - 29	10.752.053	10.572.361	21.324.414	101,7
7	30 - 34	10.378.182	10.299.335	20.677.517	100,8
8	35 - 39	10.077.932	10.207.074	20.285.006	98,7
9	40 - 44	9.770.504	9.824.929	19.595.433	99,4
10	45 - 49	9.016.543	8.966.079	17.982.622	100,6
11	50 - 54	7.897.900	7.932.366	15.830.266	99,6
12	55 - 59	6.521.810	6.666.503	13.188.313	97,8
13	60 - 64	5.089.075	5.159.517	10.248.592	98,6
14	65 - 69	3.527.936	3.602.106	7.130.042	97,9
15	70 - 74	2.148.186	2.440.340	4.588.526	88,0
16	75+	2.147.478	2.973.115	5.120.593	72,2
Indonesia		**136.142.501**	**134.923.865**	**271.066.366**	**100,9**
Angka Beban Tanggungan *(Dependency Ratio)*				**47,71**	

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 2.b

ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), DAN JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Bayi (0 tahun)			Jumlah Batita (0-2 tahun)			Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)			Jumlah Balita (0 - 4 tahun)		
			Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	114.623	57.654	55.310	112.964	173.055	166.266	339.321	230.856	222.076	452.932	288.510	277.386	565.896
2	Sumatera Utara	299.198	149.341	143.549	292.890	450.442	433.824	884.266	607.258	585.911	1.193.169	756.599	729.460	1.486.059
3	Sumatera Barat	108.653	54.361	52.166	106.527	163.035	156.733	319.768	217.791	209.722	427.513	272.152	261.888	534.040
4	Riau	155.322	77.649	74.415	152.064	230.956	221.597	452.553	304.039	292.051	596.090	381.688	366.466	748.154
5	Jambi	65.427	32.608	31.227	63.835	97.737	93.705	191.442	130.314	125.065	255.379	162.922	156.292	319.214
6	Sumatera Selatan	158.251	78.990	75.846	154.836	238.410	229.312	467.722	321.169	309.410	630.579	400.159	385.256	785.415
7	Bengkulu	36.917	18.354	17.623	35.977	55.194	53.096	108.290	73.996	71.303	145.299	92.350	88.926	181.276
8	Lampung	147.694	73.960	70.987	144.947	224.690	215.987	440.677	305.640	294.228	599.868	379.600	365.215	744.815
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.476	13.758	13.190	26.948	41.276	39.627	80.903	55.059	52.931	107.990	68.817	66.121	134.938
10	Kepulauan Riau	40.568	20.683	19.882	40.565	63.491	61.150	124.641	87.644	84.579	172.223	108.327	104.461	212.788
11	DKI Jakarta	163.138	84.176	80.749	164.925	259.314	249.036	508.350	359.541	345.720	705.261	443.717	426.469	870.186
12	Jawa Barat	868.555	438.968	419.530	858.498	1.318.937	1.261.425	2.580.362	1.762.852	1.687.254	3.450.106	2.201.820	2.106.784	4.308.604
13	Jawa Tengah	522.802	264.349	251.281	515.630	796.395	756.044	1.552.439	1.071.149	1.015.913	2.087.062	1.335.498	1.267.194	2.602.692
14	DI Yogyakarta	54.020	27.766	26.535	54.301	84.313	80.623	164.936	114.253	109.326	223.579	142.019	135.861	277.880
15	Jawa Timur	562.006	282.804	271.041	553.845	851.043	816.658	1.667.701	1.142.500	1.097.626	2.240.126	1.425.304	1.368.667	2.793.971
16	Banten	237.844	119.818	115.073	234.891	363.581	349.787	713.368	493.287	475.341	968.628	613.105	590.414	1.203.519
17	Bali	64.417	32.456	31.110	63.566	97.815	93.879	191.694	131.532	126.410	257.942	163.988	157.520	321.508
18	Nusa Tenggara Barat	102.477	50.385	48.361	98.746	150.481	144.836	295.317	200.463	193.366	393.829	250.848	241.727	492.575
19	Nusa Tenggara Timur	140.603	68.712	66.028	134.740	201.971	194.604	396.575	262.856	253.823	516.679	331.568	319.851	651.419
20	Kalimantan Barat	99.378	49.540	47.484	97.024	149.062	143.071	292.133	199.777	191.990	391.767	249.317	239.474	488.791
21	Kalimantan Tengah	53.783	26.387	25.426	51.813	78.478	75.793	154.271	103.514	100.167	203.681	129.901	125.593	255.494
22	Kalimantan Selatan	79.621	39.463	37.877	77.340	119.071	114.521	233.592	160.712	154.852	315.564	200.175	192.729	392.904
23	Kalimantan Timur	75.011	36.047	34.453	70.500	107.707	102.993	210.700	142.653	136.491	279.144	178.700	170.944	349.644
24	Kalimantan Utara	12.146	7.938	7.561	15.499	23.719	22.607	46.326	31.416	29.961	61.377	39.354	37.522	76.876
25	Sulawesi Utara	40.496	20.364	19.510	39.874	61.498	58.986	120.484	82.929	79.633	162.562	103.293	99.143	202.436
26	Sulawesi Tengah	62.469	30.843	29.561	60.404	91.876	88.232	180.108	121.611	116.979	238.590	152.454	146.540	298.994
27	Sulawesi Selatan	167.083	83.416	79.920	163.336	250.658	240.494	491.152	335.549	322.354	657.903	418.965	402.274	821.239
28	Sulawesi Tenggara	62.744	31.159	29.807	60.966	92.892	88.965	181.857	122.911	117.828	240.739	154.070	147.635	301.705
29	Gorontalo	23.894	11.797	11.297	23.094	35.047	33.630	68.677	46.248	44.448	90.696	58.045	55.745	113.790
30	Sulawesi Barat	33.034	16.033	15.415	31.448	47.262	45.598	92.860	61.808	59.794	121.602	77.841	75.209	153.050
31	Maluku	44.803	21.804	20.954	42.758	64.359	62.026	126.385	84.236	81.367	165.603	106.040	102.321	208.361
32	Maluku Utara	29.282	14.411	13.828	28.239	42.859	41.216	84.075	56.707	54.635	111.342	71.118	68.463	139.581
33	Papua Barat	21.990	10.699	10.319	21.018	31.501	30.480	61.981	40.991	39.772	80.763	51.690	50.091	101.781
34	Papua	71.352	34.716	33.654	68.370	102.995	100.188	203.183	135.534	132.259	267.793	170.250	165.913	336.163
Indonesia		**4.747.077**	**2.381.409**	**2.280.969**	**4.662.378**	**7.161.120**	**6.866.989**	**14.028.109**	**9.598.795**	**9.214.585**	**18.813.380**	**11.980.204**	**11.495.554**	**23.475.758**

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI

Lampiran 2.c

ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)			Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)			Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	115.177	110.947	226.124	57.397	55.328	112.725	339.090	325.750	664.840
2	Sumatera Utara	311.179	300.888	612.067	157.316	152.254	309.570	938.950	903.790	1.842.740
3	Sumatera Barat	109.757	105.913	215.670	55.135	53.261	108.396	329.094	316.913	646.007
4	Riau	148.198	142.579	290.777	73.210	70.484	143.694	423.149	403.723	826.872
5	Jambi	65.379	62.830	128.209	32.809	31.553	64.362	194.860	188.591	383.451
6	Sumatera Selatan	163.517	157.839	321.356	82.198	79.411	161.609	488.356	466.674	955.030
7	Bengkulu	37.386	36.083	73.469	18.745	18.101	36.846	111.806	106.559	218.365
8	Lampung	159.072	153.456	312.528	81.007	78.243	159.250	485.653	463.858	949.511
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.433	26.418	53.851	13.630	13.142	26.772	80.484	77.042	157.526
10	Kepulauan Riau	45.839	44.360	90.199	22.905	22.200	45.105	134.024	128.682	262.706
11	DKI Jakarta	190.730	183.821	374.551	96.323	92.977	189.300	548.025	526.858	1.074.883
12	Jawa Barat	885.923	849.093	1.735.016	444.491	426.407	870.898	2.636.769	2.509.362	5.146.131
13	Jawa Tengah	549.078	520.500	1.069.578	279.296	264.754	544.050	1.703.408	1.609.533	3.312.941
14	DI Yogyakarta	58.112	55.673	113.785	28.981	27.776	56.757	171.275	163.225	334.500
15	Jawa Timur	582.970	560.974	1.143.944	295.705	284.795	580.500	1.819.845	1.743.491	3.563.336
16	Banten	253.515	244.837	498.352	127.637	123.417	251.054	748.941	716.388	1.465.329
17	Bali	66.715	64.246	130.961	33.473	32.267	65.740	207.604	197.124	404.728
18	Nusa Tenggara Barat	100.987	97.647	198.634	50.813	49.194	100.007	305.125	293.156	598.281
19	Nusa Tenggara Timur	126.763	122.682	249.445	62.541	60.587	123.128	368.356	360.637	728.993
20	Kalimantan Barat	100.855	97.090	197.945	50.625	48.792	99.417	297.410	284.811	582.221
21	Kalimantan Tengah	50.817	49.271	100.088	25.176	24.427	49.603	147.937	141.472	289.409
22	Kalimantan Selatan	82.621	79.790	162.411	41.867	40.486	82.353	248.155	238.029	486.184
23	Kalimantan Timur	70.041	66.982	137.023	34.771	33.280	68.051	202.366	191.352	393.718
24	Kalimantan Utara	15.696	15.097	30.793	7.792	7.502	15.294	45.088	43.047	88.135
25	Sulawesi Utara	42.494	40.860	83.354	21.520	20.706	42.226	127.929	122.323	250.252
26	Sulawesi Tengah	60.370	58.188	118.558	30.216	29.163	59.379	175.918	168.237	344.155
27	Sulawesi Selatan	169.012	162.644	331.656	84.659	81.544	166.203	501.387	482.023	983.410
28	Sulawesi Tenggara	60.542	58.107	118.649	30.002	28.817	58.819	181.819	173.076	354.895
29	Gorontalo	22.703	21.842	44.545	11.229	10.809	22.038	66.431	63.476	129.907
30	Sulawesi Barat	29.884	28.990	58.874	14.666	14.242	28.908	85.574	81.928	167.502
31	Maluku	40.906	39.600	80.506	20.163	19.545	39.708	117.675	112.093	229.768
32	Maluku Utara	28.108	27.126	55.234	13.992	13.514	27.506	82.602	79.420	162.022
33	Papua Barat	19.708	19.176	38.884	9.706	9.457	19.163	56.937	54.396	111.333
34	Papua	66.372	64.998	131.370	32.885	32.242	65.127	195.939	190.480	386.419
Indonesia		**4.857.859**	**4.670.547**	**9.528.406**	**2.442.881**	**2.350.677**	**4.793.558**	**14.567.981**	**13.927.519**	**28.495.500**

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 2.d

ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)	Jumlah WUS Imunisasi (15-39 tahun)	Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Ibu Bersalin/ Nifas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	2.940.407	2.267.032	126.085	120.354
2	Sumatera Utara	7.563.031	5.777.358	329.118	314.158
3	Sumatera Barat	2.802.950	2.122.416	119.518	114.086
4	Riau	3.960.501	2.994.625	170.854	163.088
5	Jambi	2.063.169	1.535.938	71.970	68.698
6	Sumatera Selatan	4.654.187	3.497.757	174.076	166.164
7	Bengkulu	1.118.799	837.143	40.609	38.763
8	Lampung	4.529.412	3.326.403	162.463	155.079
9	Kepulauan Bangka Belitung	850.587	633.597	30.224	28.850
10	Kepulauan Riau	1.305.781	945.589	44.625	42.596
11	DKI Jakarta	5.989.952	4.358.562	179.452	171.295
12	Jawa Barat	26.998.320	19.945.438	955.411	911.983
13	Jawa Tengah	17.619.629	12.796.641	575.082	548.942
14	DI Yogyakarta	1.993.379	1.464.085	59.422	56.721
15	Jawa Timur	20.589.499	14.733.386	618.207	590.106
16	Banten	7.410.172	5.506.234	261.628	249.736
17	Bali	2.334.554	1.673.753	70.859	67.638
18	Nusa Tenggara Barat	2.716.685	2.049.732	112.725	107.601
19	Nusa Tenggara Timur	2.752.836	2.156.513	154.663	147.633
20	Kalimantan Barat	2.778.000	2.096.838	109.316	104.347
21	Kalimantan Tengah	1.595.375	1.178.586	59.161	56.472
22	Kalimantan Selatan	2.329.161	1.707.687	87.583	83.602
23	Kalimantan Timur	2.155.038	1.593.631	82.512	78.762
24	Kalimantan Utara	421.080	318.561	13.361	12.753
25	Sulawesi Utara	1.321.198	972.812	44.546	42.521
26	Sulawesi Tengah	1.665.785	1.234.115	68.716	65.592
27	Sulawesi Selatan	4.703.009	3.545.952	183.791	175.437
28	Sulawesi Tenggara	1.442.115	1.107.339	69.018	65.881
29	Gorontalo	667.551	501.812	26.283	25.089
30	Sulawesi Barat	761.000	575.379	36.337	34.686
31	Maluku	956.370	748.821	49.283	47.043
32	Maluku Utara	682.898	523.492	32.210	30.746
33	Papua Barat	563.658	432.102	24.189	23.090
34	Papua	2.014.142	1.512.846	78.487	74.920
Indonesia		**144.250.230**	**106.672.175**	**5.221.784**	**4.984.432**

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 3.a

ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDUDUK USIA MUDA, USIA PRODUKTIF, DAN USIA NON PRODUKTIF MENURUT DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)			Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)			Angka Beban Ketergantungan (ABK)
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	848.421	814.725	1.663.146	1.771.664	1.785.862	3.557.526	95.845	118.146	213.991	52,8
2	Sumatera Utara	2.304.936	2.217.337	4.522.273	4.713.124	4.755.875	9.468.999	278.951	351.760	630.711	54,4
3	Sumatera Barat	817.158	786.639	1.603.797	1.772.078	1.782.638	3.554.716	135.113	169.286	304.399	53,7
4	Riau	1.084.391	1.036.931	2.121.322	2.448.073	2.313.919	4.761.992	106.598	109.747	216.345	49,1
5	Jambi	489.309	471.368	960.677	1.300.676	1.242.806	2.543.482	75.877	78.704	154.581	43,8
6	Sumatera Selatan	1.209.176	1.158.428	2.367.604	2.939.701	2.833.903	5.773.604	179.904	200.487	380.391	47,6
7	Bengkulu	278.349	266.266	544.615	705.169	677.955	1.383.124	40.016	41.832	81.848	45,3
8	Lampung	1.178.123	1.128.593	2.306.716	2.943.384	2.790.210	5.733.594	212.463	218.556	431.019	47,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	203.054	194.609	397.663	551.299	496.182	1.047.481	31.163	33.065	64.228	44,1
10	Kepulauan Riau	330.183	317.141	647.324	780.600	750.779	1.531.379	27.123	28.801	55.924	45,9
11	DKI Jakarta	1.340.558	1.285.396	2.625.954	3.739.898	3.762.082	7.501.980	215.033	241.595	456.628	41,1
12	Jawa Barat	6.580.124	6.275.265	12.855.389	17.254.396	16.814.713	34.069.109	1.279.992	1.432.430	2.712.422	45,7
13	Jawa Tengah	4.160.184	3.941.325	8.101.509	11.705.255	11.952.829	23.658.084	1.315.158	1.580.682	2.895.840	46,5
14	DI Yogyakarta	426.745	407.035	833.780	1.326.701	1.342.593	2.669.294	152.643	194.195	346.838	44,2
15	Jawa Timur	4.451.247	4.267.757	8.719.004	13.698.316	14.057.029	27.755.345	1.382.957	1.699.876	3.082.833	42,5
16	Banten	1.843.845	1.767.913	3.611.758	4.614.489	4.435.631	9.050.120	211.625	228.798	440.423	44,8
17	Bali	511.603	487.802	999.405	1.545.147	1.510.558	3.055.705	135.037	160.705	295.742	42,4
18	Nusa Tenggara Barat	755.002	725.956	1.480.958	1.606.449	1.761.287	3.367.736	114.236	134.980	249.216	51,4
19	Nusa Tenggara Timur	947.778	920.933	1.868.711	1.665.695	1.723.596	3.389.291	117.570	138.361	255.931	62,7
20	Kalimantan Barat	741.969	711.217	1.453.186	1.744.686	1.683.281	3.427.967	110.284	116.501	226.785	49,0
21	Kalimantan Tengah	377.478	362.334	739.812	1.021.992	909.596	1.931.588	43.600	42.482	86.082	42,8
22	Kalimantan Selatan	608.226	583.558	1.191.784	1.484.938	1.428.583	2.913.521	80.465	96.271	176.736	47,0
23	Kalimantan Timur	515.594	489.536	1.005.130	1.395.803	1.246.431	2.642.234	67.258	61.344	128.602	42,9
24	Kalimantan Utara	114.419	109.193	223.612	275.999	238.224	514.223	14.728	12.182	26.910	48,7
25	Sulawesi Utara	316.083	302.848	618.931	889.006	839.698	1.728.704	75.221	86.961	162.182	45,2
26	Sulawesi Tengah	443.611	424.436	868.047	1.057.550	1.010.696	2.068.246	70.128	74.177	144.305	48,9
27	Sulawesi Selatan	1.253.357	1.203.857	2.457.214	2.867.619	3.032.215	5.899.834	220.009	299.241	519.250	50,4
28	Sulawesi Tenggara	454.330	433.473	887.803	874.753	869.303	1.744.056	51.581	60.074	111.655	57,3
29	Gorontalo	168.987	161.713	330.700	413.526	412.789	826.315	25.244	30.778	56.022	46,8
30	Sulawesi Barat	220.551	211.776	432.327	457.433	455.620	913.053	24.573	29.223	53.796	53,2
31	Maluku	301.979	289.129	591.108	582.363	576.035	1.158.398	34.637	39.080	73.717	57,4
32	Maluku Utara	208.774	200.747	409.521	418.252	401.308	819.560	21.827	22.225	44.052	55,3
33	Papua Barat	147.075	141.265	288.340	355.127	312.347	667.474	12.163	10.372	22.535	46,6
34	Papua	497.732	482.952	980.684	1.267.389	1.122.278	2.389.667	31.612	23.981	55.593	43,4
Indonesia		**36.130.351**	**34.579.453**	**70.709.804**	**92.188.550**	**91.328.851**	**183.517.401**	**6.990.634**	**8.166.898**	**15.157.532**	46,8

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 3.b

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	2001	8,6	29,3	37,9	9,8	24,8	18,4	100.011,00	80.382,00
2	2002	13,3	25,1	38,4	14,5	21,1	18,2	130.499,00	96.512,00
3	2003	12,3	25,1	37,3	13,6	20,2	17,4	138.803,00	105.888,00
4	2004	11,4	24,8	36,2	12,1	20,1	16,7	143.455,00	108.725,00
5	2005	12,4	22,7	35,1	11,7	20,0	16,0	165.565,00	117.365,00
6	2006	14,5	24,8	39,3	13,5	21,8	17,8	174.290,00	130.584,00
7	2007	13,6	23,6	37,2	12,5	20,4	16,6	187.942,00	146.837,00
8	2008	12,8	22,2	35,0	11,7	18,9	15,4	204.895,99	161.830,79
9	2009	11,9	20,6	32,5	10,7	17,4	14,2	222.123,10	179.834,57
10	2010	11,1	19,9	31,0	9,9	16,6	13,3	232.989,00	192.353,83
11	Maret 2011	11,1	19,0	30,0	9,2	15,7	12,5	253.015,51	213.394,51
12	September 2011	11,0	18,9	29,9	9,1	15,6	12,4	263.593,84	223.180,69
13	Maret 2012	10,7	18,5	29,1	8,8	15,1	12,0	267.407,53	229.225,78
14	September 2012	10,5	18,1	28,6	8,6	14,7	11,7	277.381,99	240.441,35
15	Maret 2013	10,3	17,7	28,1	8,4	14,3	11,4	289.042,00	253.273,00
16	September 2013	10,6	17,9	28,6	8,5	14,4	11,5	308.626,00	275.779,00
17	Maret 2014	10,5	17,8	28,3	8,3	14,2	11,3	318.514,00	286.097,00
18	September 2014	10,4	17,4	27,7	8,2	13,8	11,0	326.853,00	296.681,00
19	Maret 2015	10,7	17,9	28,6	8,3	14,2	11,2	342.541,00	317.881,00
20	September 2015	10,6	17,9	28,5	8,2	14,1	11,1	356.378,00	333.034,00
21	Maret 2016	10,3	17,7	28,0	7,79	14,11	10,86	364.527,00	343.647,00
22	September 2016	10,5	17,3	27,8	7,73	13,96	10,70	372.114,00	350.420,00
23	Maret 2017	10,7	17,1	27,8	7,7	13,9	10,6	385.621,00	361.496,00
24	September 2017	10,3	16,3	26,6	7,3	13,5	10,1	400.995,00	370.910,00
25	Maret 2018	10,1	15,8	26,0	7,0	13,2	9,8	415.614,00	383.908,00
26	September 2018	10,1	15,5	25,7	6,9	13,1	9,7	425.770,00	392.154,00
27	Maret 2019	10,0	15,2	25,1	6,7	12,9	9,4	442.063,00	404.398,00
28	September 2019	9,9	14,9	24,8	6,6	12,6	9,2	458.380,00	418.515,00
29	Maret 2020	11,2	15,3	26,4	7,4	12,8	9,8	471.882,00	433.281,00
30	September 2020	12,0	15,5	27,6	7,9	13,2	10,2	475.477,00	437.902,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.c

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2020

No	Provinsi	Semester II (September)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	543.685	184.89	10,31	514.663	649.02	17,96	833,9	184.89	15,43
2	Sumatera Utara	520.529	756.24	9,25	486.642	600.48	9,02	1.356,7	756.24	9,14
3	Sumatera Barat	565.531	141.31	5,22	529.673	223.47	7,83	364,8	141.31	6,56
4	Riau	572.856	178.46	6,39	528.735	312.76	7,47	491,2	178.46	7,04
5	Jambi	552.498	132.60	11,22	454.754	155.50	6,40	288,1	132.60	7,97
6	Sumatera Selatan	470.800	404.43	12,52	424.369	715.22	13,25	1.119,7	404.43	12,98
7	Bengkulu	576.921	99.40	15,06	509.487	206.60	15,42	306,0	99.40	15,30
8	Lampung	504.330	259.28	9,59	437.107	831.86	14,22	1.091,1	259.28	12,76
9	Kepulauan Bangka Belitung	716.460	28.38	3,43	736.850	43.67	6,75	72,1	28.38	4,89
10	Kepulauan Riau	619.461	121.82	5,69	597.899	20.79	11,25	142,6	121.82	6,13
11	DKI Jakarta	683.339	496.84	4,69	-	-	-	496,8	496.84	4,69
12	Jawa Barat	416.699	3004.95	7,79	411.342	1183.57	10,64	4.188,5	3004.95	8,43
13	Jawa Tengah	404.451	1890.49	10,57	392.216	2229.44	13,20	4.119,9	1890.49	11,84
14	DI Yogyakarta	488.461	353.21	12,17	404.035	149.93	14,57	503,1	353.21	12,80
15	Jawa Timur	428.593	1820.13	8,37	406.206	2765.84	15,16	4.586,0	1820.13	11,46
16	Banten	532.096	540.15	5,85	474.487	317.49	8,57	857,6	540.15	6,63
17	Bali	451.634	125.48	4,04	407.316	71.44	5,40	196,9	125.48	4,45
18	Nusa Tenggara Barat	419.924	389.60	15,05	396.500	356.44	13,42	746,0	389.60	14,23
19	Nusa Tenggara Timur	496.191	118.88	8,76	377.246	1054.65	25,26	1.173,5	118.88	21,21
20	Kalimantan Barat	504.445	89.11	4,86	458.524	281.61	8,57	370,7	89.11	7,24
21	Kalimantan Tengah	478.873	54.34	4,92	498.959	87.45	5,50	141,8	54.34	5,26
22	Kalimantan Selatan	508.852	78.84	3,83	495.715	128.08	5,76	206,9	78.84	4,83
23	Kalimantan Timur	675.399	128.11	5,10	656.069	115.88	9,98	244,0	128.11	6,64
24	Kalimantan Utara	723.478	25.16	5,74	649.761	27.54	10,07	52,7	25.16	7,41
25	Sulawesi Utara	402.502	71.66	5,31	392.818	124.19	10,64	195,9	71.66	7,78
26	Sulawesi Tengah	492.758	87.43	9,21	478.687	316.31	14,76	403,7	87.43	13,06
27	Sulawesi Selatan	375.463	195.08	4,92	350.791	605.16	12,25	800,2	195.08	8,99
28	Sulawesi Tenggara	383.839	73.22	7,62	360.123	244.10	13,93	317,3	73.22	11,69
29	Gorontalo	375.740	21.55	4,18	373.911	163.76	24,32	185,3	21.55	15,59
30	Sulawesi Barat	356.967	28.13	9,98	352.269	130.91	11,89	159,1	28.13	11,50
31	Maluku	584.061	49.87	6,36	566.497	272.53	27,06	322,4	49.87	17,99
32	Maluku Utara	494.703	18,00	5,03	459.580	69.52	7,74	87,5	18,00	6,97
33	Papua Barat	635.539	26.75	6,31	602.290	188.47	33,20	215,2	26.75	21,70
34	Papua	622.346	44.73	4,59	562.412	867.50	35,69	912,2	44.73	26,80
Indonesia		**475.477**	**12038.50**	**7,88**	**437.902**	**15511.19**	**13,20**	**27.549,7**	**12038.50**	**10,19**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.d

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Semester II (September)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	1,61	3,46	2,85	0,38	1,06	0,83
2	Sumatera Utara	1,54	1,67	1,60	0,39	0,53	0,45
3	Sumatera Barat	0,80	1,17	0,99	0,24	0,28	0,26
4	Riau	1,02	1,53	1,32	0,27	0,54	0,43
5	Jambi	1,77	0,89	1,18	0,46	0,18	0,27
6	Sumatera Selatan	2,38	2,19	2,26	0,72	0,57	0,63
7	Bengkulu	2,49	2,52	2,51	0,59	0,67	0,64
8	Lampung	1,30	2,48	2,11	0,29	0,70	0,57
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,64	0,94	0,77	0,16	0,18	0,17
10	Kepulauan Riau	1,16	1,89	1,21	0,41	0,51	0,42
11	DKI Jakarta	0,67	-	0,67	0,15	-	0,15
12	Jawa Barat	1,18	1,63	1,28	0,26	0,40	0,29
13	Jawa Tengah	1,61	2,07	1,84	0,39	0,48	0,43
14	DI Yogyakarta	1,98	2,37	2,08	0,47	0,57	0,50
15	Jawa Timur	1,37	2,69	1,97	0,37	0,72	0,53
16	Banten	0,98	1,54	1,14	0,30	0,46	0,34
17	Bali	0,55	0,75	0,61	0,11	0,14	0,12
18	Nusa Tenggara Barat	2,85	2,64	2,74	0,71	0,75	0,73
19	Nusa Tenggara Timur	1,28	5,09	4,16	0,28	1,55	1,24
20	Kalimantan Barat	0,81	1,31	1,13	0,21	0,37	0,31
21	Kalimantan Tengah	0,91	0,86	0,88	0,24	0,21	0,22
22	Kalimantan Selatan	0,76	0,78	0,77	0,19	0,17	0,18
23	Kalimantan Timur	0,68	1,80	1,03	0,17	0,57	0,29
24	Kalimantan Utara	0,60	1,27	0,86	0,13	0,27	0,19
25	Sulawesi Utara	0,90	1,60	1,23	0,20	0,42	0,30
26	Sulawesi Tengah	1,83	3,20	2,78	0,43	1,07	0,87
27	Sulawesi Selatan	0,81	2,32	1,65	0,18	0,68	0,46
28	Sulawesi Tenggara	1,66	2,55	2,23	0,61	0,70	0,67
29	Gorontalo	0,43	4,72	2,86	0,09	1,33	0,79
30	Sulawesi Barat	2,00	1,94	1,95	0,60	0,54	0,55
31	Maluku	0,94	5,95	3,76	0,21	1,93	1,18
32	Maluku Utara	0,65	1,26	1,09	0,11	0,28	0,23
33	Papua Barat	1,15	9,74	6,07	0,35	3,95	2,41
34	Papua	0,82	9,34	6,90	0,17	3,22	2,35
Indonesia		**1,26**	**2,39**	**1,75**	**0,31**	**0,68**	**0,47**

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.e

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2014 - 2020

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0,34	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32
2	Sumatera Utara	0,33	0,31	0,34	0,31	0,32	0,31
3	Sumatera Barat	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30
4	Riau	0,37	0,35	0,33	0,35	0,33	0,32
5	Jambi	0,34	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32
6	Sumatera Selatan	0,33	0,36	0,37	0,34	0,33	0,34
7	Bengkulu	0,37	0,35	0,35	0,36	0,34	0,32
8	Lampung	0,35	0,36	0,33	0,33	0,33	0,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,28	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26
10	Kepulauan Riau	0,34	0,35	0,36	0,34	0,34	0,33
11	DKI Jakarta	0,42	0,40	0,41	0,39	0,39	0,40
12	Jawa Barat	0,43	0,40	0,39	0,41	0,40	0,40
13	Jawa Tengah	0,38	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36
14	DI Yogyakarta	0,42	0,43	0,44	0,42	0,42	0,44
15	Jawa Timur	0,40	0,40	0,42	0,37	0,37	0,36
16	Banten	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37
17	Bali	0,40	0,37	0,38	0,36	0,37	0,37
18	Nusa Tenggara Barat	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38	0,39
19	Nusa Tenggara Timur	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
20	Kalimantan Barat	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
21	Kalimantan Tengah	0,30	0,35	0,33	0,34	0,34	0,32
22	Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,35	0,34	0,33	0,35
23	Kalimantan Timur	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34
24	Kalimantan Utara	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30
25	Sulawesi Utara	0,37	0,38	0,39	0,37	0,37	0,37
26	Sulawesi Tengah	0,37	0,35	0,35	0,32	0,33	0,32
27	Sulawesi Selatan	0,40	0,40	0,43	0,39	0,39	0,38
28	Sulawesi Tenggara	0,38	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39
29	Gorontalo	0,40	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41
30	Sulawesi Barat	0,36	0,37	0,34	0,37	0,37	0,36
31	Maluku	0,34	0,34	0,32	0,33	0,32	0,33
32	Maluku Utara	0,29	0,31	0,33	0,34	0,31	0,29
33	Papua Barat	0,43	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38
34	Papua	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40
Indonesia		**0,40**	**0,39**	**0,39**	**0,38**	**0,38**	**0,39**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.f

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN TIPE DAERAH SEPTEMBER 2020

No	Kelompok Barang	Persentase (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Padi-padian	4,19	7,94	5,45
2	Umbi-umbian	0,39	0,77	0,52
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,44	4,51	3,80
4	Daging	2,15	2,16	2,16
5	Telur dan susu	2,89	2,76	2,84
6	Sayur-sayuran	3,18	4,74	3,70
7	Kacang-kacangan	0,85	1,15	0,95
8	Buah-buahan	2,40	2,57	2,46
9	Minyak dan kelapa	0,95	1,56	1,15
10	Bahan minuman	1,22	2,04	1,50
11	Bumbu-bumbuan	0,84	1,20	0,96
12	Bahan Makanan Lainnya	0,78	1,02	0,86
13	Makanan dan minuman Jadi	17,72	15,18	16,87
14	Rokok dan Tembakau	5,05	7,86	5,99
	Makanan	**46,05**	**55,49**	**49,22**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,80	22,01	25,19
16	Aneka barang dan jasa	13,67	9,93	12,42
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	2,90	3,04	2,95
18	Barang tahan lama	5,03	4,83	4,96
19	Pajak, pungutan dan asuransi	3,58	2,97	3,38
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,98	1,72	1,90
	Bukan Makanan	**53,95**	**44,51**	**50,78**
	Total Pengeluaran	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (Susenas Maret 2020)

Lampiran 3.g

RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka komoditas dan jasa	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Komoditas tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	221.637	110.563	49.762	47.258	43.163	12.154	484.536
2	Sumatera Utara	248.333	143.394	38.825	38.350	42.606	14.500	526.008
3	Sumatera Barat	260.524	146.459	53.208	67.511	39.955	22.541	590.197
4	Riau	331.185	155.868	50.230	62.745	46.350	25.995	672.373
5	Jambi	282.392	112.114	42.103	49.280	33.664	16.963	536.516
6	Sumatera Selatan	257.686	114.894	29.206	34.406	32.624	18.077	486.894
7	Bengkulu	267.989	132.410	40.184	73.780	38.212	14.000	566.575
8	Lampung	227.841	111.535	32.280	48.431	31.683	18.678	470.448
9	Kepulauan Bangka Belitung	394.507	157.285	47.383	62.730	48.389	20.429	730.723
10	Kepulauan Riau	523.078	243.243	55.352	69.631	63.386	18.407	973.097
11	DKI Jakarta	730.930	334.799	54.560	77.202	83.831	31.983	1.313.304
12	Jawa Barat	331.566	169.601	38.363	61.282	39.892	28.418	669.122
13	Jawa Tengah	232.303	136.351	29.147	64.189	37.383	22.942	522.314
14	DI Yogyakarta	351.368	235.387	40.060	123.704	52.267	29.907	832.693
15	Jawa Timur	250.907	137.739	29.366	66.983	36.326	21.484	542.805
16	Banten	398.132	182.335	43.040	59.404	49.672	27.787	760.371
17	Bali	437.947	172.225	26.009	72.783	55.428	70.128	834.520
18	Nusa Tenggara Barat	249.984	122.605	32.432	65.866	31.798	12.876	515.561
19	Nusa Tenggara Timur	187.131	83.910	18.553	29.144	24.460	8.463	351.661
20	Kalimantan Barat	303.537	116.401	31.383	42.212	36.161	11.109	540.804
21	Kalimantan Tengah	356.364	141.289	32.126	58.487	49.061	20.043	657.370
22	Kalimantan Selatan	328.453	145.541	40.689	80.726	43.100	20.971	659.478
23	Kalimantan Timur	512.642	221.706	45.166	85.288	62.388	36.536	963.725
24	Kalimantan Utara	419.050	185.898	37.107	82.814	53.409	23.517	801.796
25	Sulawesi Utara	302.347	148.537	43.092	63.686	42.345	21.770	621.777
26	Sulawesi Tengah	272.684	100.790	32.076	55.734	39.497	18.157	518.938
27	Sulawesi Selatan	266.482	105.987	35.241	67.633	38.991	27.347	541.681
28	Sulawesi Tenggara	271.416	104.599	32.090	69.153	35.576	18.226	531.060
29	Gorontalo	292.510	130.555	39.631	70.988	38.651	19.878	592.213
30	Sulawesi Barat	217.122	83.691	27.350	56.307	35.616	16.616	436.701
31	Maluku	307.297	134.050	31.097	36.612	33.591	9.138	551.786
32	Maluku Utara	323.804	121.837	31.092	32.180	33.644	12.662	555.218
33	Papua Barat	410.595	161.292	28.471	48.340	39.909	18.462	707.070
34	Papua	359.983	119.947	28.572	33.462	29.581	14.349	585.893
Indonesia		**308.739**	**152.171**	**36.104**	**60.813**	**41.384**	**23.238**	**622.449**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.h

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	6,54	6,34	5,48	6,17	5,40	6,59
2	Sumatera Utara	5,61	5,55	5,57	5,39	4,71	6,91
3	Sumatera Barat	5,68	5,66	5,38	5,38	5,25	6,88
4	Riau	5,55	5,98	5,36	5,76	4,92	6,32
5	Jambi	3,56	3,73	3,52	4,06	4,26	5,13
6	Sumatera Selatan	4,08	4,27	4,02	4,53	3,90	5,51
7	Bengkulu	2,63	3,35	2,41	3,26	3,08	4,07
8	Lampung	4,32	4,04	3,95	4,03	4,26	4,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,61	3,32	3,58	3,35	5,25
10	Kepulauan Riau	7,30	8,04	7,02	7,50	5,98	10,34
11	DKI Jakarta	5,73	6,65	5,50	6,54	5,15	10,95
12	Jawa Barat	8,22	8,23	7,78	8,04	7,71	10,46
13	Jawa Tengah	4,19	4,47	4,19	4,44	4,20	6,48
14	DI Yogyakarta	3,00	3,37	2,89	3,18	3,38	4,57
15	Jawa Timur	3,77	3,91	3,77	3,82	3,60	5,84
16	Banten	7,72	8,47	7,55	8,11	7,99	10,64
17	Bali	0,88	1,40	1,22	1,57	1,25	5,63
18	Nusa Tenggara Barat	3,28	3,58	3,15	3,28	3,04	4,22
19	Nusa Tenggara Timur	2,82	2,85	2,98	3,14	2,64	4,28
20	Kalimantan Barat	4,09	4,18	4,06	4,35	4,47	5,81
21	Kalimantan Tengah	3,14	3,91	3,21	4,04	3,33	4,58
22	Kalimantan Selatan	3,72	4,35	3,41	4,18	3,67	4,74
23	Kalimantan Timur	6,79	6,41	6,65	5,94	6,72	6,87
24	Kalimantan Utara	4,70	5,11	5,84	4,49	5,71	4,97
25	Sulawesi Utara	5,86	6,61	5,17	6,01	5,34	7,37
26	Sulawesi Tengah	3,12	3,37	3,46	3,11	2,93	3,77
27	Sulawesi Selatan	5,04	4,94	5,10	4,62	5,70	6,31
28	Sulawesi Tenggara	2,77	3,19	2,88	3,52	3,10	4,58
29	Gorontalo	3,38	3,70	3,25	3,76	3,29	4,28
30	Sulawesi Barat	2,33	3,01	1,29	2,98	2,39	3,32
31	Maluku	7,07	6,95	6,61	6,69	6,71	7,57
32	Maluku Utara	4,56	4,63	4,96	4,81	4,09	5,15
33	Papua Barat	6,27	6,45	5,81	6,43	6,78	6,80
34	Papua	2,75	3,00	3,22	3,51	3,42	4,28
Indonesia		**5,10**	**5,30**	**4,98**	**5,23**	**4,94**	**7,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.i

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Aceh	9,71
2	Sumatera Utara	9,83
3	Sumatera Barat	9,34
4	Riau	9,47
5	Jambi	8,97
6	Sumatera Selatan	8,68
7	Bengkulu	9,20
8	Lampung	8,51
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,49
10	Kepulauan Riau	10,22
11	DKI Jakarta	11,17
12	Jawa Barat	8,96
13	Jawa Tengah	8,19
14	DI Yogyakarta	9,95
15	Jawa Timur	8,31
16	Banten	9,22
17	Bali	9,31
18	Nusa Tenggara Barat	8,08
19	Nusa Tenggara Timur	8,09
20	Kalimantan Barat	7,90
21	Kalimantan Tengah	8,95
22	Kalimantan Selatan	8,69
23	Kalimantan Timur	9,99
24	Kalimantan Utara	9,30
25	Sulawesi Utara	9,74
26	Sulawesi Tengah	9,09
27	Sulawesi Selatan	8,86
28	Sulawesi Tenggara	9,41
29	Gorontalo	8,26
30	Sulawesi Barat	8,33
31	Maluku	10,20
32	Maluku Utara	9,42
33	Papua Barat	10,00
34	Papua	6,96
Indonesia		**8,90**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.j

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2016 - 2020

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	99,6	99,5	99,7	99,8	99,7	98,4	98,7	98,7	99,0	99,1	99,0	99,1	99,2	99,4	99,4
2	Sumatera Utara	99,8	99,8	99,8	99,9	99,8	99,2	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6
3	Sumatera Barat	99,6	99,8	99,6	99,6	99,7	99,0	99,1	99,2	99,3	99,2	99,3	99,5	99,4	99,5	99,4
4	Riau	99,9	99,7	99,9	99,7	99,8	99,3	99,3	99,2	99,3	99,4	99,6	99,5	99,6	99,6	99,6
5	Jambi	99,2	99,7	99,6	99,8	99,3	98,8	98,9	98,4	98,3	98,9	99,0	99,3	99,0	99,1	99,1
6	Sumatera Selatan	99,6	99,8	99,8	99,7	99,7	98,5	99,2	99,2	99,4	99,4	99,0	99,5	99,5	99,6	99,5
7	Bengkulu	99,6	99,5	99,3	99,6	99,7	98,9	98,5	98,9	98,7	98,6	99,3	99,0	99,1	99,2	99,2
8	Lampung	98,8	99,3	99,2	99,2	99,3	98,0	97,8	97,3	97,5	97,7	98,4	98,5	98,2	98,4	98,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,6	99,0	99,0	99,5	99,1	97,7	97,9	97,7	97,8	98,2	98,7	98,5	98,4	98,7	98,7
10	Kepulauan Riau	99,6	99,4	99,6	99,5	99,7	99,1	99,0	98,9	99,1	98,9	99,4	99,2	99,3	99,3	99,3
11	DKI Jakarta	99,8	99,8	99,9	99,9	99,8	99,4	99,6	99,5	99,6	99,6	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7
12	Jawa Barat	99,1	99,3	99,3	99,3	99,5	98,0	98,3	98,1	98,2	98,2	98,6	98,8	98,7	98,8	98,9
13	Jawa Tengah	97,5	97,9	97,6	97,4	97,4	92,8	93,5	93,1	93,3	93,4	95,1	95,6	95,3	95,3	95,4
14	DI Yogyakarta	98,7	98,4	98,2	98,7	98,5	94,2	95,2	95,1	94,8	95,2	96,4	96,8	96,6	96,7	96,9
15	Jawa Timur	97,6	97,8	97,3	97,3	97,5	93,4	94,1	93,3	93,8	94,1	95,5	95,9	95,2	95,5	95,8
16	Banten	99,1	99,1	99,1	99,2	99,3	97,2	97,2	97,2	97,1	97,6	98,2	98,1	98,2	98,2	98,5
17	Bali	98,1	98,2	98,0	98,5	98,6	92,6	93,6	93,3	95,5	95,7	95,4	95,9	95,6	97,0	97,2
18	Nusa Tenggara Barat	93,3	94,1	93,8	93,8	92,7	86,3	87,3	86,3	86,3	87,6	89,6	90,5	89,8	89,9	90,1
19	Nusa Tenggara Timur	98,5	98,5	97,5	98,6	98,1	96,5	96,9	96,4	97,3	97,0	97,5	97,7	96,9	97,9	97,5
20	Kalimantan Barat	97,8	97,7	97,6	97,7	97,9	93,1	94,6	93,7	94,5	94,7	95,4	96,2	95,7	96,1	96,3
21	Kalimantan Tengah	99,9	99,8	99,7	99,8	99,9	98,8	99,1	99,3	99,1	99,0	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5
22	Kalimantan Selatan	99,6	99,6	99,5	99,3	99,4	98,1	98,6	98,5	98,8	98,7	98,8	99,2	99,0	99,1	99,1
23	Kalimantan Timur	99,6	99,6	99,5	99,6	99,6	99,0	98,8	98,9	98,9	98,8	99,3	99,2	99,2	99,3	99,2
24	Kalimantan Utara	97,3	97,6	97,2	98,6	98,6	96,3	97,0	95,7	96,7	97,0	96,8	97,3	96,5	97,7	97,8
25	Sulawesi Utara	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,7	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9
26	Sulawesi Tengah	99,5	99,6	99,5	99,9	99,8	98,7	99,0	99,4	99,3	99,4	99,1	99,3	99,5	99,6	99,6
27	Sulawesi Selatan	97,5	97,7	97,5	97,8	97,2	95,8	96,4	95,2	96,0	96,3	96,6	97,0	96,3	96,9	96,8
28	Sulawesi Tenggara	98,5	98,0	97,8	98,4	97,9	96,8	94,8	95,6	96,5	96,1	97,6	96,4	96,7	97,5	97,0
29	Gorontalo	99,0	99,0	99,2	99,3	99,4	98,8	99,2	99,5	99,7	99,5	98,9	99,1	99,3	99,5	99,5
30	Sulawesi Barat	96,2	95,7	96,4	96,9	97,4	94,3	95,0	93,6	95,2	93,1	95,2	95,4	94,9	96,1	95,3
31	Maluku	99,7	99,7	99,8	99,8	99,9	99,5	99,5	99,5	99,6	99,6	99,6	99,6	99,7	99,7	99,8
32	Maluku Utara	99,8	99,8	99,9	99,9	99,7	99,2	99,2	99,1	99,2	99,4	99,5	99,5	99,5	99,6	99,5
33	Papua Barat	99,6	99,7	99,5	99,5	99,3	99,2	99,6	98,7	99,3	99,0	99,5	99,6	99,1	99,4	99,2
34	Papua	98,6	97,0	98,6	99,1	99,2	96,2	96,5	98,0	98,2	97,5	97,5	96,8	98,3	95,7	98,5
Indonesia		**98,7**	**98,8**	**98,7**	**98,7**	**98,7**	**96,4**	**96,8**	**96,5**	**96,7**	**96,9**	**97,5**	**97,8**	**97,6**	**97,7**	**97,8**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.k

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	2018				2019				2020			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	99,9	98,5	82,9	32,6	99,8	98,5	83,3	32,5	99,8	98,5	83,3	32,5
2	Sumatera Utara	99,5	96,8	77,4	25,3	99,4	96,9	77,7	25,8	99,4	97,0	78,2	27,0
3	Sumatera Barat	99,5	96,4	83,1	33,9	99,5	96,2	83,6	35,7	99,6	96,6	83,7	36,0
4	Riau	99,1	95,0	77,3	27,2	99,4	95,4	77,3	28,2	99,5	95,5	77,4	28,4
5	Jambi	99,7	96,1	71,9	22,2	99,7	96,4	72,0	23,3	99,8	96,4	72,4	23,8
6	Sumatera Selatan	99,7	94,4	69,7	17,2	99,7	94,5	70,3	18,1	99,7	94,6	70,9	18,5
7	Bengkulu	99,9	97,4	79,3	29,2	99,8	97,2	79,4	30,7	99,8	97,5	79,7	30,0
8	Lampung	99,9	95,0	70,8	20,6	99,8	94,9	71,1	20,7	99,7	95,2	71,3	21,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,9	92,7	67,1	16,0	99,8	92,9	67,8	17,0	99,7	93,3	67,8	17,5
10	Kepulauan Riau	99,5	99,2	83,8	18,2	99,5	98,5	84,0	19,0	99,6	98,8	84,6	19,7
11	DKI Jakarta	99,8	97,8	71,8	24,4	99,6	98,3	72,0	24,5	99,6	98,3	72,1	25,0
12	Jawa Barat	99,5	94,2	67,2	22,0	99,5	94,2	67,3	22,7	99,7	94,5	67,7	22,8
13	Jawa Tengah	99,8	95,8	69,0	21,9	99,8	96,1	69,7	22,4	99,7	96,4	70,1	22,4
14	DI Yogyakarta	99,9	99,7	88,4	51,7	99,9	99,6	89,0	51,9	99,9	99,5	89,0	51,8
15	Jawa Timur	99,6	97,0	72,2	22,9	99,7	97,4	72,7	24,8	99,5	97,7	73,1	25,8
16	Banten	99,4	95,8	68,4	20,4	99,4	95,8	68,7	21,4	99,4	95,8	68,8	21,6
17	Bali	99,6	97,9	82,4	27,2	99,7	97,7	82,8	27,9	99,6	98,2	83,0	28,7
18	Nusa Tenggara Barat	99,4	97,7	76,9	25,7	99,5	97,9	77,5	25,6	99,5	98,3	77,6	26,0
19	Nusa Tenggara Timur	98,3	95,0	74,8	28,3	98,5	95,1	75,4	29,3	98,6	95,3	75,5	29,5
20	Kalimantan Barat	98,4	92,8	68,4	23,9	98,5	92,9	68,4	23,7	98,6	92,9	69,0	24,1
21	Kalimantan Tengah	99,7	93,9	67,0	24,3	99,7	94,1	67,0	24,0	99,5	94,9	66,9	24,3
22	Kalimantan Selatan	99,6	92,4	68,7	23,8	99,5	92,8	69,2	24,3	99,5	93,0	69,4	24,6
23	Kalimantan Timur	99,8	98,9	81,6	29,8	99,7	98,8	81,8	29,9	99,7	99,1	81,9	29,7
24	Kalimantan Utara	98,2	96,4	75,6	23,0	98,8	96,5	76,1	23,1	98,9	96,5	76,1	23,8
25	Sulawesi Utara	99,4	95,0	73,7	21,5	99,4	95,2	74,0	22,6	99,6	95,3	74,1	23,2
26	Sulawesi Tengah	98,2	92,7	75,1	27,2	98,4	93,0	75,7	27,4	98,4	93,1	75,9	27,6
27	Sulawesi Selatan	99,3	93,1	70,8	33,7	99,2	93,2	70,9	34,4	99,3	93,3	70,9	34,5
28	Sulawesi Tenggara	99,3	94,3	73,5	30,0	99,1	94,8	74,0	31,3	99,1	95,0	74,5	31,8
29	Gorontalo	98,8	91,4	70,8	30,6	99,0	91,6	71,4	31,0	98,9	91,8	71,4	31,0
30	Sulawesi Barat	98,3	90,0	68,7	24,1	98,3	89,9	69,3	23,6	98,3	90,1	69,8	23,2
31	Maluku	99,7	97,1	79,1	37,8	99,6	97,3	79,7	38,6	99,5	97,4	79,9	38,6
32	Maluku Utara	99,1	97,5	76,4	31,4	99,0	97,0	76,4	31,2	99,0	97,2	76,8	31,4
33	Papua Barat	97,3	97,1	80,8	30,8	97,7	96,6	81,5	31,5	97,9	96,9	81,5	31,5
34	Papua	82,4	80,0	63,5	23,4	82,7	80,1	63,5	22,9	83,0	80,5	64,8	23,2
Indonesia		**99,2**	**95,4**	**72,0**	**24,4**	**99,2**	**95,5**	**72,4**	**25,2**	**99,3**	**95,7**	**72,7**	**97,7**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.1

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 - 2020

No	Provinsi	2016			2017			2018			2019			2020		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	111,3	99,2	87,5	110,3	98,7	87,5	113,9	99,3	84,8	109,9	97,4	90,1	108,7	97,8	90,9
2	Sumatera Utara	110,9	90,7	93,3	109,5	90,7	93,6	111,1	90,0	91,6	109,5	90,4	94,0	108,5	91,7	94,7
3	Sumatera Barat	110,4	91,1	84,7	110,5	90,4	88,4	111,0	90,9	84,0	109,3	91,4	88,9	108,7	92,3	90,0
4	Riau	110,0	93,8	78,3	108,3	92,4	85,1	106,9	94,2	83,9	106,8	94,0	84,2	105,9	94,9	84,6
5	Jambi	113,0	90,8	80,4	112,4	86,4	83,5	112,0	87,6	78,9	111,1	87,3	82,5	109,4	88,9	83,7
6	Sumatera Selatan	114,3	88,5	82,5	112,1	89,1	83,4	114,1	86,5	77,4	113,3	87,0	80,9	111,6	88,8	81,7
7	Bengkulu	113,1	90,4	83,6	112,7	90,5	87,1	113,5	92,1	85,6	110,0	89,5	93,8	109,2	91,3	94,1
8	Lampung	111,4	93,6	83,0	109,8	91,0	85,2	110,1	94,2	81,6	107,4	91,1	85,7	105,9	92,6	85,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	111,8	84,4	79,1	110,6	84,5	82,9	111,2	85,9	82,2	108,4	85,3	87,1	107,4	88,2	87,2
10	Kepulauan Riau	108,9	90,4	89,5	106,8	90,5	95,8	107,3	92,4	91,0	107,6	92,8	86,7	106,3	94,0	87,5
11	DKI Jakarta	104,3	90,9	73,1	103,4	93,9	79,5	105,3	94,9	74,0	104,8	91,0	74,8	103,4	91,7	76,9
12	Jawa Barat	108,1	89,6	70,6	107,5	88,8	76,5	106,2	91,0	75,3	105,5	90,8	77,8	104,7	91,8	78,3
13	Jawa Tengah	109,5	90,0	86,3	108,4	91,1	84,4	108,2	92,0	84,2	107,7	91,7	86,8	106,3	93,2	86,8
14	DI Yogyakarta	106,8	93,2	91,9	106,3	94,8	93,4	105,8	97,0	87,4	106,2	95,0	89,1	106,0	95,4	89,3
15	Jawa Timur	108,2	92,5	81,2	106,8	92,2	81,4	106,7	94,9	79,1	105,6	94,2	84,8	104,4	96,4	85,2
16	Banten	109,1	92,2	71,7	109,6	91,1	75,9	109,5	91,7	71,7	107,9	91,6	72,9	107,2	92,8	73,4
17	Bali	105,0	96,2	86,4	104,4	96,3	90,0	103,0	96,1	87,7	103,5	97,3	88,0	102,9	97,4	88,7
18	Nusa Tenggara Barat	110,8	93,4	91,3	109,6	95,0	93,9	108,8	93,8	89,6	108,5	92,1	90,9	107,0	93,6	91,8
19	Nusa Tenggara Timur	114,1	89,6	79,3	114,1	91,4	78,8	116,6	88,5	77,8	115,0	87,8	84,6	113,4	89,9	84,7
20	Kalimantan Barat	113,8	79,8	87,0	115,1	81,2	82,5	117,0	83,0	79,3	112,6	83,3	82,5	111,5	85,2	84,5
21	Kalimantan Tengah	114,0	86,3	78,4	112,5	87,3	80,4	110,0	95,8	74,8	110,1	88,7	82,3	108,5	90,6	82,3
22	Kalimantan Selatan	111,6	85,8	76,9	110,3	85,7	77,4	110,2	86,2	75,7	108,7	83,8	78,9	107,3	86,3	79,1
23	Kalimantan Timur	110,0	95,3	95,4	108,1	91,5	99,5	108,0	92,6	96,1	106,8	91,0	95,0	105,8	92,2	95,2
24	Kalimantan Utara	104,0	96,6	89,9	103,9	98,1	87,7	102,3	103,0	89,2	101,2	98,3	97,9	100,5	101,5	98,3
25	Sulawesi Utara	110,3	89,5	86,3	108,7	88,5	91,7	109,0	88,5	82,3	108,2	89,2	86,6	106,6	90,6	86,8
26	Sulawesi Tengah	105,8	89,5	83,5	104,2	91,9	84,9	105,3	92,9	83,5	105,1	90,6	87,4	104,0	92,0	88,4
27	Sulawesi Selatan	109,7	83,4	83,7	109,6	84,0	83,1	110,3	87,0	81,7	108,5	84,2	86,1	107,0	86,2	86,4
28	Sulawesi Tenggara	110,0	86,7	81,8	112,1	88,1	80,0	110,8	85,2	84,8	109,3	85,3	86,8	108,0	87,1	87,7
29	Gorontalo	108,3	83,7	88,7	111,3	81,7	80,9	112,0	80,2	84,3	110,9	79,0	88,6	109,5	79,3	88,7
30	Sulawesi Barat	106,2	81,0	83,5	110,2	83,0	80,3	108,6	82,4	84,5	107,3	82,7	84,1	106,1	84,7	84,4
31	Maluku	110,3	90,6	92,1	112,1	95,0	89,7	112,3	95,6	87,2	112,2	90,4	95,3	110,1	91,1	96,0
32	Maluku Utara	113,7	89,1	83,7	113,1	87,1	91,6	113,7	91,1	88,0	109,7	86,5	93,2	108,7	88,3	93,4
33	Papua Barat	111,5	92,4	89,6	110,2	91,0	89,7	110,7	89,7	90,7	111,2	88,5	96,4	110,2	90,8	97,7
34	Papua	94,7	72,1	66,9	92,9	82,2	67,9	94,5	87,8	65,1	91,9	78,1	76,3	91,3	81,2	76,6
Indonesia		**109,3**	**90,1**	**80,9**	**108,5**	**90,2**	**82,8**	**108,6**	**91,5**	**80,7**	**107,5**	**95,7**	**84,0**	**97,7**	**92,1**	**84,5**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.m

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)	SD/MI/Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/MA/ Paket C	PT (19-24)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	107,9	99,5	88,6	36,4	109,6	96,0	93,4	37,9	108,7	97,8	90,9	37,2
2	Sumatera Utara	107,8	91,0	95,7	23,4	109,4	92,4	93,6	28,2	108,5	91,7	94,7	25,8
3	Sumatera Barat	109,7	91,0	86,6	31,1	107,6	93,8	93,4	42,1	108,7	92,3	90,0	36,6
4	Riau	106,3	94,9	82,2	29,1	105,4	94,9	87,1	28,3	105,9	94,9	84,6	28,7
5	Jambi	109,8	90,3	81,8	25,0	109,0	87,6	85,8	26,5	109,4	88,9	83,7	25,7
6	Sumatera Selatan	111,5	87,9	84,4	19,6	111,7	89,8	79,0	24,1	111,6	88,8	81,7	21,8
7	Bengkulu	108,1	95,8	92,3	29,0	110,4	86,4	96,0	34,2	109,2	91,3	94,1	31,4
8	Lampung	105,6	96,1	83,1	16,9	106,3	89,0	88,8	21,1	105,9	92,6	85,8	18,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,1	88,1	86,9	11,5	107,8	88,3	87,4	13,4	107,4	88,2	87,2	12,4
10	Kepulauan Riau	107,5	93,4	88,6	18,2	105,0	94,6	86,5	24,8	106,3	94,0	87,5	21,4
11	DKI Jakarta	103,7	90,6	81,2	33,9	103,2	93,0	72,3	33,4	103,4	91,7	76,9	33,6
12	Jawa Barat	104,8	92,3	77,9	20,7	104,6	91,2	78,7	21,6	104,7	91,8	78,3	21,2
13	Jawa Tengah	105,8	94,7	85,6	16,5	106,9	91,5	88,2	20,7	106,3	93,2	86,8	18,6
14	DI Yogyakarta	105,4	98,7	87,7	64,7	106,5	91,6	91,2	60,0	106,0	95,4	89,3	62,3
15	Jawa Timur	104,5	96,8	86,6	23,7	104,2	95,9	83,9	25,2	104,4	96,4	85,2	24,4
16	Banten	107,4	91,6	74,3	29,3	107,0	94,1	72,4	26,3	107,2	92,8	73,4	27,8
17	Bali	102,7	97,4	93,1	31,2	103,0	97,4	84,1	29,8	102,9	97,4	88,7	30,6
18	Nusa Tenggara Barat	106,0	95,0	94,7	26,0	108,1	92,1	88,8	26,7	107,0	93,6	91,8	26,4
19	Nusa Tenggara Timur	114,0	89,9	76,7	25,3	112,8	89,8	93,0	26,2	113,4	89,9	84,7	25,7
20	Kalimantan Barat	111,2	85,4	81,0	18,4	111,9	85,0	88,2	23,6	111,5	85,2	84,5	20,9
21	Kalimantan Tengah	108,8	92,6	80,5	21,2	108,2	88,5	84,3	21,9	108,5	90,6	82,3	21,5
22	Kalimantan Selatan	108,2	86,6	81,7	20,2	106,4	86,1	76,4	25,9	107,3	86,3	79,1	22,9
23	Kalimantan Timur	106,1	95,5	93,5	29,9	105,3	89,0	97,1	33,1	105,8	92,2	95,2	31,3
24	Kalimantan Utara	101,4	101,5	100,0	18,8	99,5	101,5	96,6	19,4	100,5	101,5	98,3	19,1
25	Sulawesi Utara	107,1	87,4	85,5	28,0	106,1	94,2	88,2	28,6	106,6	90,6	86,8	28,3
26	Sulawesi Tengah	104,6	89,2	85,0	32,5	103,3	95,1	91,9	33,5	104,0	92,0	88,4	33,0
27	Sulawesi Selatan	107,2	88,3	84,2	33,2	106,8	84,2	88,7	38,4	107,0	86,2	86,4	35,7
28	Sulawesi Tenggara	109,5	86,1	87,4	37,8	106,4	88,3	88,1	40,6	108,0	87,1	87,7	39,2
29	Gorontalo	106,7	76,5	86,8	26,6	112,7	82,0	90,7	36,0	109,5	79,3	88,7	31,4
30	Sulawesi Barat	106,6	83,8	80,8	23,9	105,5	85,6	88,2	26,2	106,1	84,7	84,4	25,0
31	Maluku	111,0	87,2	94,8	38,5	109,1	95,3	97,3	43,0	110,1	91,1	96,0	40,6
32	Maluku Utara	109,8	90,5	85,2	36,4	107,6	86,2	102,9	36,3	108,7	88,3	93,4	36,3
33	Papua Barat	112,0	87,5	98,4	28,4	108,3	94,3	97,0	30,2	110,2	90,8	97,7	29,3
34	Papua	92,2	79,8	80,1	18,1	90,3	82,9	72,7	17,7	91,3	81,2	76,6	17,9
Indonesia		**106,3**	**92,5**	**84,2**	**24,4**	**106,3**	**91,6**	**84,9**	**26,6**	**106,3**	**92,1**	**84,5**	**25,5**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.n

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 - 2020

No	Provinsi	2016			2017			2018			2019			2020		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	98,2	85,7	70,0	98,5	86,3	70,2	99,1	86,4	70,3	99,1	86,5	70,4	99,0	86,9	70,7
2	Sumatera Utara	96,6	78,7	66,9	97,2	79,1	67,1	97,6	79,3	67,3	97,7	80,3	67,5	97,7	80,6	68,0
3	Sumatera Barat	98,2	76,2	67,1	98,6	76,5	67,3	98,7	77,1	67,5	98,7	78,1	68,5	98,8	78,4	68,9
4	Riau	96,7	78,5	62,8	97,1	78,9	63,0	97,3	79,1	63,5	97,3	79,9	63,6	97,7	80,5	64,0
5	Jambi	97,8	78,1	59,5	98,4	78,6	60,0	99,0	79,4	60,9	99,1	79,5	60,9	99,1	79,9	61,4
6	Sumatera Selatan	96,6	76,4	58,6	97,2	76,9	59,1	97,9	76,9	59,9	97,9	77,6	59,9	97,9	78,0	60,5
7	Bengkulu	98,2	77,0	65,3	98,6	77,9	65,3	98,6	78,0	65,5	98,7	78,8	65,5	98,7	79,8	65,8
8	Lampung	98,5	78,3	58,9	99,0	79,2	59,0	99,2	80,2	59,2	99,2	80,4	59,4	99,2	81,2	59,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	96,8	72,8	57,2	97,4	73,1	57,7	97,7	74,0	57,9	97,7	74,1	58,4	97,7	74,6	58,8
10	Kepulauan Riau	98,8	84,1	71,6	98,9	84,3	72,0	99,1	84,6	72,9	99,1	85,5	73,0	99,2	86,5	73,5
11	DKI Jakarta	97,0	80,4	59,3	97,6	80,7	59,5	98,0	80,8	60,0	98,1	81,7	60,2	98,1	82,5	60,4
12	Jawa Barat	97,8	79,8	56,9	98,1	80,3	57,2	98,3	81,0	57,3	98,3	81,3	57,5	98,4	82,1	57,9
13	Jawa Tengah	96,6	78,9	58,5	97,1	79,1	59,2	97,8	79,3	59,3	97,8	79,8	59,4	97,9	80,5	59,7
14	DI Yogyakarta	99,2	83,1	69,0	99,3	83,3	69,7	99,5	83,6	70,2	99,5	84,0	70,5	99,6	84,0	71,0
15	Jawa Timur	97,5	81,4	60,8	97,8	81,5	61,5	97,9	82,0	61,5	98,0	82,8	61,8	98,0	83,5	62,2
16	Banten	97,2	79,9	57,2	97,6	80,6	57,9	98,0	80,9	58,7	98,0	81,9	58,8	98,0	82,7	59,1
17	Bali	95,8	85,0	71,7	96,1	85,3	72,4	96,2	86,0	73,0	96,8	86,8	73,0	96,8	87,3	73,3
18	Nusa Tenggara Barat	97,9	83,2	65,2	98,1	83,6	65,7	98,9	83,9	65,8	98,9	83,9	66,0	98,8	85,0	66,8
19	Nusa Tenggara Timur	95,2	66,6	52,9	95,4	67,2	53,3	96,1	68,1	53,7	96,2	69,2	53,7	96,1	69,8	54,1
20	Kalimantan Barat	96,2	64,7	50,4	96,6	65,2	51,0	97,1	65,9	51,2	97,1	66,7	51,2	97,4	67,4	51,7
21	Kalimantan Tengah	98,7	75,9	52,5	98,9	76,1	53,9	99,1	76,7	53,7	99,1	77,7	53,8	99,1	78,5	54,1
22	Kalimantan Selatan	98,1	72,7	55,9	98,5	73,4	57,2	98,8	73,8	57,8	98,8	74,8	57,8	98,8	75,5	58,3
23	Kalimantan Timur	97,1	79,2	67,9	97,4	79,6	68,2	98,4	79,7	68,4	98,4	80,4	68,6	98,4	81,3	69,0
24	Kalimantan Utara	92,2	77,5	62,8	92,5	77,7	63,2	92,7	78,2	64,1	93,2	78,4	64,4	93,5	79,1	64,8
25	Sulawesi Utara	94,1	73,2	62,5	94,5	73,9	62,8	94,9	74,2	62,8	95,0	74,3	63,0	95,1	74,8	63,4
26	Sulawesi Tengah	92,5	71,3	63,6	92,8	72,3	63,8	92,8	73,2	64,3	93,2	73,8	64,7	93,2	74,4	65,0
27	Sulawesi Selatan	97,0	73,7	59,6	97,5	74,4	59,9	98,0	75,1	60,0	98,1	75,8	60,1	98,0	76,2	60,3
28	Sulawesi Tenggara	96,3	75,5	62,6	96,6	76,5	62,7	97,5	76,6	62,9	97,5	77,0	62,9	97,7	77,6	63,4
29	Gorontalo	97,2	68,9	56,4	97,5	69,2	56,8	98,4	69,3	57,4	98,4	70,3	57,5	98,5	70,7	57,9
30	Sulawesi Barat	95,4	69,1	57,1	95,5	69,4	57,5	95,8	69,4	57,6	95,9	69,4	57,6	95,8	70,0	58,1
31	Maluku	94,5	73,4	63,5	95,5	74,0	63,7	95,8	74,1	63,7	96,2	74,7	64,2	96,9	75,2	64,8
32	Maluku Utara	96,8	75,7	63,5	97,0	76,3	63,5	97,1	76,3	63,9	97,1	76,2	64,0	97,2	76,9	64,3
33	Papua Barat	93,1	68,6	62,6	93,6	68,9	62,7	93,7	69,1	63,1	93,8	69,9	63,2	93,9	70,5	63,6
34	Papua	78,7	54,3	43,3	78,8	56,1	43,5	79,1	57,1	44,3	79,2	57,2	44,3	79,3	58,0	44,7
Indonesia		**96,8**	**78,0**	**60,0**	**97,2**	**78,4**	**60,4**	**97,6**	**78,8**	**60,7**	**97,6**	**95,7**	**60,8**	**97,7**	**80,1**	**61,3**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.o

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2016-2020

No	Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	70,00	11	70.60	11	71.19	11	71.90	11	71.99	11
2	Sumatera Utara	70,00	11	70.57	12	71.18	12	71.74	12	71.77	12
3	Sumatera Barat	70,73	9	71.24	9	71.73	9	72.39	9	72.38	9
4	Riau	71,20	6	71.79	6	72.44	6	73,00	6	72.71	6
5	Jambi	69,62	15	69.99	16	70.65	17	71.26	17	71.29	17
6	Sumatera Selatan	68,24	22	68.86	23	69.39	23	70.02	23	70.01	23
7	Bengkulu	69,33	17	69.95	18	70.64	18	71.21	18	71.40	18
8	Lampung	67,65	23	68.25	24	69.02	24	69.57	24	69.69	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,55	16	69.99	17	70.67	16	71.30	16	71.47	16
10	Kepulauan Riau	73,99	4	74.45	4	74.84	4	75.48	4	75.59	4
11	DKI Jakarta	79,60	1	80.06	1	80.47	1	80.76	1	80.77	1
12	Jawa Barat	70,05	10	70.69	10	71.30	10	72.03	10	72.09	10
13	Jawa Tengah	69,98	12	70.52	13	71.12	13	71.73	13	71.87	13
14	DI Yogyakarta	78,38	2	78.89	2	79.53	2	79.99	2	79.97	2
15	Jawa Timur	69,74	14	70.27	15	70.77	15	71.50	15	71.71	15
16	Banten	70,96	8	71.42	8	71.95	8	72.44	8	72.45	8
17	Bali	73,65	5	74.30	5	74.77	5	75.38	5	75.50	5
18	Nusa Tenggara Barat	65,81	29	66.58	29	67.30	29	68.14	29	68.25	29
19	Nusa Tenggara Timur	63,13	31	63.73	32	64.39	32	65.23	32	65.19	32
20	Kalimantan Barat	65,88	28	66.26	30	66.98	30	67.65	30	67.66	30
21	Kalimantan Tengah	69,13	20	69.79	21	70.42	21	70.91	21	71.05	21
22	Kalimantan Selatan	69,05	21	69.65	22	70.17	22	70.72	22	70.91	22
23	Kalimantan Timur	74,59	3	75.12	3	75.83	3	76.61	3	76.24	3
24	Kalimantan Utara	69,20	19	69.84	20	70.56	20	71.15	20	70.63	20
25	Sulawesi Utara	71,05	7	71.66	7	72.20	7	72.99	7	72.93	7
26	Sulawesi Tengah	67,47	25	68.11	26	68.88	25	69.50	25	69.55	25
27	Sulawesi Selatan	69,76	13	70.34	14	70.90	14	71.66	14	71.93	14
28	Sulawesi Tenggara	69,31	18	69.86	19	70.61	19	71.20	19	71.45	19
29	Gorontalo	66,29	27	67.01	28	67.71	28	68.49	28	68.68	28
30	Sulawesi Barat	63,60	30	64.30	31	65.10	31	65.73	31	66.11	31
31	Maluku	67,60	24	68.19	25	68.87	26	69.45	26	69.49	26
32	Maluku Utara	66,63	26	67.20	27	67.76	27	68.70	27	68.49	27
33	Papua Barat	62,21	32	62.99	33	63.74	33	64.70	33	65.09	33
34	Papua	58,05	33	59.09	34	60.06	34	60.84	34	60.44	34
Indonesia		**70,18**		**70.81**		**71.39**		**71.92**	**95,74**	**71.94**	**97,69**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 3.p

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2020

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		Capaian		Pertumbuhan
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019-2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	69,87	69,93	14,30	14,31	9,18	9,33	9.603	9.492	71,90	71,99	0,09
2	Sumatera Utara	68,95	69,10	13,15	13,23	9,45	9,54	10.649	10.420	71,74	71,77	0,03
3	Sumatera Barat	69,31	69,47	14,01	14,02	8,92	8,99	10.925	10.733	72,39	72,38	-0,01
4	Riau	71,48	71,60	13,14	13,20	9,03	9,14	11.255	10.675	73,00	72,71	-0,29
5	Jambi	71,06	71,16	12,93	12,98	8,45	8,55	10.592	10.392	71,26	71,29	0,03
6	Sumatera Selatan	69,65	69,88	12,39	12,45	8,18	8,24	10.937	10.652	70,02	70,01	-0,01
7	Bengkulu	69,21	69,35	13,59	13,61	8,73	8,84	10.409	10.380	71,21	71,40	0,19
8	Lampung	70,51	70,65	12,63	12,65	7,92	8,05	10.114	9.982	69,57	69,69	0,12
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,50	70,64	11,94	12,05	7,98	8,06	12.959	12.794	71,30	71,47	0,17
10	Kepulauan Riau	69,80	69,96	12,83	12,87	9,99	10,12	14.466	14.209	75,48	75,59	0,11
11	DKI Jakarta	72,79	72,91	12,97	12,98	11,06	11,13	18.527	18.227	80,76	80,77	0,01
12	Jawa Barat	72,85	73,04	12,48	12,50	8,37	8,55	11.152	10.845	72,03	72,09	0,06
13	Jawa Tengah	74,23	74,37	12,68	12,70	7,53	7,69	11.102	10.930	71,73	71,87	0,14
14	DI Yogyakarta	74,92	74,99	15,58	15,59	9,38	9,55	14.394	14.015	79,99	79,97	-0,02
15	Jawa Timur	71,18	71,30	13,16	13,19	7,59	7,78	11.739	11.601	71,50	71,71	0,21
16	Banten	69,84	69,96	12,88	12,89	8,74	8,89	12.267	11.964	72,44	72,45	0,01
17	Bali	71,99	72,13	13,27	13,33	8,84	8,95	14.146	13.929	75,38	75,50	0,12
18	Nusa Tenggara Barat	66,28	66,51	13,48	13,70	7,27	7,31	10.640	10.351	68,14	68,25	0,11
19	Nusa Tenggara Timur	66,85	67,01	13,15	13,18	7,55	7,63	7.769	7.598	65,23	65,19	-0,04
20	Kalimantan Barat	70,56	70,69	12,58	12,60	7,31	7,37	9.055	8.930	67,65	67,66	0,01
21	Kalimantan Tengah	69,69	69,74	12,57	12,66	8,51	8,59	11.236	11.154	70,91	71,05	0,14
22	Kalimantan Selatan	68,49	68,66	12,52	12,68	8,20	8,29	12.253	12.032	70,72	70,91	0,19
23	Kalimantan Timur	74,22	74,33	13,69	13,72	9,70	9,77	12.359	11.728	76,61	76,24	-0,37
24	Kalimantan Utara	72,54	72,59	12,84	12,93	8,94	9,00	9.343	8.756	71,15	70,63	-0,52
25	Sulawesi Utara	71,58	71,69	12,73	12,85	9,43	9,49	11.115	10.791	72,99	72,93	-0,06
26	Sulawesi Tengah	68,23	68,69	13,14	13,17	8,75	8,83	9.604	9.335	69,50	69,55	0,05
27	Sulawesi Selatan	70,43	70,57	13,36	13,45	8,26	8,38	11.118	11.079	71,66	71,93	0,27
28	Sulawesi Tenggara	70,97	71,22	13,55	13,65	8,91	9,04	9.436	9.331	71,20	71,45	0,25
29	Gorontalo	67,93	68,07	13,06	13,08	7,69	7,82	10.075	10.020	68,49	68,68	0,19
30	Sulawesi Barat	64,82	65,06	12,62	12,77	7,73	7,89	9.235	9.168	65,73	66,11	0,38
31	Maluku	65,82	65,98	13,94	13,96	9,81	9,93	8.887	8.732	69,45	69,49	0,04
32	Maluku Utara	68,18	68,33	13,63	13,67	9,00	9,04	8.308	8.032	68,70	68,49	-0,21
33	Papua Barat	65,90	66,02	12,72	12,91	7,44	7,60	8.125	8.086	64,70	65,09	0,39
34	Papua	65,65	65,79	11,05	11,08	6,65	6,69	7.336	6.954	60,84	60,44	-0,40
Indonesia		**71,34**	**71,47**	**12,95**	**12,98**	**8,34**	**8,48**	**11.299**	**11.013**	**71,92**	**71,94**	**0,02**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 4.a

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2016 - 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	340	341	348	359	359
2	Sumatera Utara	571	571	581	601	608
3	Sumatera Barat	264	269	275	275	276
4	Riau	213	215	216	228	231
5	Jambi	183	186	195	205	207
6	Sumatera Selatan	322	322	332	341	343
7	Bengkulu	180	180	180	179	179
8	Lampung	292	297	302	310	312
9	Kepulauan Bangka Belitung	62	63	64	64	64
10	Kepulauan Riau	73	74	83	86	88
11	DKI Jakarta	340	340	321	315	315
12	Jawa Barat	1.050	1.056	1.069	1.072	1.083
13	Jawa Tengah	875	876	881	878	878
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	960	963	967	968	968
16	Banten	233	233	242	243	245
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	158	160	166	169	174
19	Nusa Tenggara Timur	371	372	381	402	410
20	Kalimantan Barat	238	241	244	246	246
21	Kalimantan Tengah	195	196	200	203	205
22	Kalimantan Selatan	230	230	233	235	236
23	Kalimantan Timur	175	179	183	186	187
24	Kalimantan Utara	49	49	56	55	55
25	Sulawesi Utara	188	189	193	195	195
26	Sulawesi Tengah	189	193	202	206	207
27	Sulawesi Selatan	448	451	458	459	461
28	Sulawesi Tenggara	269	274	284	290	292
29	Gorontalo	93	93	93	93	93
30	Sulawesi Barat	94	94	94	95	96
31	Maluku	199	199	208	209	215
32	Maluku Utara	128	129	134	147	147
33	Papua Barat	151	155	159	159	161
34	Papua	393	394	408	420	428
Indonesia		**9.767**	**9.825**	**9.993**	**10.134**	**10.205**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2021

Lampiran 4.b

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2016 - 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	143	143	148	179	181	197	198	200	180	178
2	Sumatera Utara	164	163	175	184	188	407	408	406	417	420
3	Sumatera Barat	91	91	91	108	111	173	178	184	167	165
4	Riau	79	80	81	102	102	134	135	135	126	129
5	Jambi	68	71	74	81	88	115	115	121	124	119
6	Sumatera Selatan	95	95	95	98	113	227	227	237	243	230
7	Bengkulu	46	46	47	52	52	134	134	133	127	127
8	Lampung	112	115	119	136	140	180	182	183	174	172
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	21	21	21	26	41	42	43	43	38
10	Kepulauan Riau	28	29	32	36	35	45	45	51	50	53
11	DKI Jakarta	30	30	28	28	6	310	310	293	287	309
12	Jawa Barat	182	185	186	291	299	868	871	883	781	784
13	Jawa Tengah	320	322	361	368	371	555	554	520	510	507
14	DI Yogyakarta	43	43	49	49	49	78	78	72	72	72
15	Jawa Timur	519	520	534	553	575	441	443	433	415	393
16	Banten	56	56	56	82	81	177	177	186	161	164
17	Bali	35	35	38	42	41	85	85	82	78	79
18	Nusa Tenggara Barat	109	110	111	122	142	49	50	55	47	32
19	Nusa Tenggara Timur	137	137	151	163	164	234	235	230	239	246
20	Kalimantan Barat	95	95	118	125	129	143	146	126	121	117
21	Kalimantan Tengah	73	73	75	88	86	122	123	125	115	119
22	Kalimantan Selatan	50	50	50	50	52	180	180	183	185	184
23	Kalimantan Timur	95	96	97	102	98	80	83	86	84	89
24	Kalimantan Utara	32	32	32	27	22	17	17	24	28	33
25	Sulawesi Utara	92	92	92	94	95	96	97	101	101	100
26	Sulawesi Tengah	79	79	84	102	104	110	114	118	104	103
27	Sulawesi Selatan	227	257	269	301	304	221	194	189	158	157
28	Sulawesi Tenggara	82	81	82	93	91	187	193	202	197	201
29	Gorontalo	23	26	28	32	26	70	67	65	61	67
30	Sulawesi Barat	45	45	45	58	60	49	49	49	37	36
31	Maluku	64	64	64	77	64	135	135	144	132	151
32	Maluku Utara	27	27	36	45	53	101	102	98	102	94
33	Papua Barat	44	45	44	44	45	107	110	115	115	116
34	Papua	105	105	110	115	126	288	289	298	305	302
Indonesia		**3.411**	**3.459**	**3.623**	**4.048**	**4.119**	**6.356**	**6.366**	**6.370**	**6.086**	**6.086**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 4.c

RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	359	289	1,2
2	Sumatera Utara	608	450	1,4
3	Sumatera Barat	276	179	1,5
4	Riau	231	169	1,4
5	Jambi	207	141	1,5
6	Sumatera Selatan	343	241	1,4
7	Bengkulu	179	129	1,4
8	Lampung	312	228	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,4
10	Kepulauan Riau	88	75	1,2
11	DKI Jakarta	315	44	7,2
12	Jawa Barat	1.083	627	1,7
13	Jawa Tengah	878	576	1,5
14	DI Yogyakarta	121	78	1,6
15	Jawa Timur	968	666	1,5
16	Banten	245	155	1,6
17	Bali	120	57	2,1
18	Nusa Tenggara Barat	174	117	1,5
19	Nusa Tenggara Timur	410	309	1,3
20	Kalimantan Barat	246	174	1,4
21	Kalimantan Tengah	205	136	1,5
22	Kalimantan Selatan	236	153	1,5
23	Kalimantan Timur	187	103	1,8
24	Kalimantan Utara	55	53	1,0
25	Sulawesi Utara	195	171	1,1
26	Sulawesi Tengah	207	175	1,2
27	Sulawesi Selatan	461	311	1,5
28	Sulawesi Tenggara	292	219	1,3
29	Gorontalo	93	77	1,2
30	Sulawesi Barat	96	69	1,4
31	Maluku	215	118	1,8
32	Maluku Utara	147	116	1,3
33	Papua Barat	161	218	0,7
34	Papua	428	560	0,8
Indonesia		**10.205**	**7.230**	**1,4**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021;
Jumlah kecamatan berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017.

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	359	333	23	92,8	100	203	28	2	26
2	Sumatera Utara	608	559	33	91,9	236	293	29	1	49
3	Sumatera Barat	276	271	19	98,2	61	164	41	5	5
4	Riau	231	214	12	92,6	66	120	28	0	17
5	Jambi	207	188	11	90,8	54	112	19	3	19
6	Sumatera Selatan	343	333	17	97,1	90	196	42	5	10
7	Bengkulu	179	179	10	100,0	70	100	9	0	0
8	Lampung	312	296	15	94,9	25	208	59	4	16
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	8	36	19	1	0
10	Kepulauan Riau	88	83	7	94,3	20	42	20	1	5
11	DKI Jakarta	315	151	6	47,9	11	89	20	31	164
12	Jawa Barat	1.083	1.028	27	94,9	179	617	205	27	55
13	Jawa Tengah	878	873	35	99,4	97	467	270	39	5
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	43	64	14	0
15	Jawa Timur	968	963	38	99,5	72	530	316	45	5
16	Banten	245	231	8	94,3	44	138	47	2	14
17	Bali	120	120	9	100,0	13	66	31	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	174	163	10	93,7	34	94	31	4	11
19	Nusa Tenggara Timur	410	367	22	89,5	166	180	21	0	43
20	Kalimantan Barat	246	230	14	93,5	68	133	24	5	16
21	Kalimantan Tengah	205	194	14	94,6	72	99	21	2	11
22	Kalimantan Selatan	236	233	13	98,7	73	125	32	3	3
23	Kalimantan Timur	187	182	10	97,3	36	102	38	6	5
24	Kalimantan Utara	55	55	5	100,0	21	24	9	1	0
25	Sulawesi Utara	195	169	15	86,7	76	74	18	1	26
26	Sulawesi Tengah	207	198	13	95,7	70	109	19	0	9
27	Sulawesi Selatan	461	454	24	98,5	80	235	118	21	7
28	Sulawesi Tenggara	292	263	17	90,1	94	140	27	2	29
29	Gorontalo	93	92	6	98,9	22	50	17	3	1
30	Sulawesi Barat	96	85	6	88,5	18	54	13	0	11
31	Maluku	215	156	11	72,6	69	77	10	0	59
32	Maluku Utara	147	113	10	76,9	42	64	6	1	34
33	Papua Barat	161	72	13	44,7	35	32	5	0	89
34	Papua	428	120	20	28,0	55	52	13	0	308
Indonesia		**10.205**	**9.153**	**505**	**89,7**	**2.177**	**5.068**	**1.669**	**239**	**1052**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 4.e

JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI LIMA JENIS TENAGA KESEHATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2020

No	Provinsi	2019		2020	
		Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif	Jumlah Puskesmas*)	Jumlah Puskesmas Memiliki 5 Jenis Tenaga Kesehatan Promotif Preventif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	359	163	359	225
2	Sumatera Utara	601	191	609	207
3	Sumatera Barat	275	172	278	205
4	Riau	228	95	236	115
5	Jambi	205	95	206	114
6	Sumatera Selatan	341	146	343	156
7	Bengkulu	179	56	179	78
8	Lampung	310	148	314	164
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	59	64	59
10	Kepulauan Riau	86	36	90	48
11	DKI Jakarta	315	43	333	46
12	Jawa Barat	1.072	406	1.092	526
13	Jawa Tengah	878	613	879	714
14	DI Yogyakarta	121	102	121	108
15	Jawa Timur	968	437	968	556
16	Banten	243	80	244	134
17	Bali	120	45	120	62
18	Nusa Tenggara Barat	169	110	173	133
19	Nusa Tenggara Timur	402	179	414	239
20	Kalimantan Barat	246	133	246	149
21	Kalimantan Tengah	203	80	203	88
22	Kalimantan Selatan	235	163	236	191
23	Kalimantan Timur	186	89	187	122
24	Kalimantan Utara	55	30	58	40
25	Sulawesi Utara	195	45	198	71
26	Sulawesi Tengah	206	100	207	123
27	Sulawesi Selatan	459	235	463	274
28	Sulawesi Tenggara	290	127	292	139
29	Gorontalo	93	53	93	49
30	Sulawesi Barat	95	42	97	54
31	Maluku	209	31	226	75
32	Maluku Utara	147	67	146	65
33	Papua Barat	159	41	164	27
34	Papua	420	73	413	75
Indonesia		**10.134**	**4.485**	**10.251**	**5.431**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:
*) Puskesmas yang melapor

Lampiran 4.f

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas	% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	196	163	359	54,6
2	Sumatera Utara	168	441	609	27,6
3	Sumatera Barat	190	88	278	68,3
4	Riau	100	136	236	42,4
5	Jambi	86	120	206	41,7
6	Sumatera Selatan	100	243	343	29,2
7	Bengkulu	41	138	179	22,9
8	Lampung	83	231	314	26,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	52	12	64	81,3
10	Kepulauan Riau	43	47	90	47,8
11	DKI Jakarta	46	287	333	13,8
12	Jawa Barat	400	692	1.092	36,6
13	Jawa Tengah	621	258	879	70,6
14	DI Yogyakarta	107	14	121	88,4
15	Jawa Timur	524	444	968	54,1
16	Banten	126	118	244	51,6
17	Bali	62	58	120	51,7
18	Nusa Tenggara Barat	95	78	173	54,9
19	Nusa Tenggara Timur	95	319	414	22,9
20	Kalimantan Barat	70	176	246	28,5
21	Kalimantan Tengah	42	161	203	20,7
22	Kalimantan Selatan	127	109	236	53,8
23	Kalimantan Timur	96	91	187	51,3
24	Kalimantan Utara	28	30	58	48,3
25	Sulawesi Utara	35	163	198	17,7
26	Sulawesi Tengah	55	152	207	26,6
27	Sulawesi Selatan	241	222	463	52,1
28	Sulawesi Tenggara	75	217	292	25,7
29	Gorontalo	25	68	93	26,9
30	Sulawesi Barat	42	55	97	43,3
31	Maluku	24	202	226	10,6
32	Maluku Utara	25	121	146	17,1
33	Papua Barat	14	150	164	8,5
34	Papua	25	388	413	6,1
Indonesia		**4.059**	**6.192**	**10.251**	**39,6**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

*) Puskesmas yang melapor

Lampiran 4.g

PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas *)	% Tanpa Dokter
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	4	355	359	1,1
2	Sumatera Utara	21	588	609	3,4
3	Sumatera Barat	3	275	278	1,1
4	Riau	3	233	236	1,3
5	Jambi	1	205	206	0,5
6	Sumatera Selatan	32	311	343	9,3
7	Bengkulu	10	169	179	5,6
8	Lampung	4	310	314	1,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	64	0,0
10	Kepulauan Riau	1	89	90	1,1
11	DKI Jakarta	0	333	333	0,0
12	Jawa Barat	7	1.085	1.092	0,6
13	Jawa Tengah	0	879	879	0,0
14	DI Yogyakarta	0	121	121	0,0
15	Jawa Timur	11	957	968	1,1
16	Banten	1	243	244	0,4
17	Bali	0	120	120	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	2	171	173	1,2
19	Nusa Tenggara Timur	96	318	414	23,2
20	Kalimantan Barat	5	241	246	2,0
21	Kalimantan Tengah	22	181	203	10,8
22	Kalimantan Selatan	12	224	236	5,1
23	Kalimantan Timur	5	182	187	2,7
24	Kalimantan Utara	3	55	58	5,2
25	Sulawesi Utara	6	192	198	3,0
26	Sulawesi Tengah	16	191	207	7,7
27	Sulawesi Selatan	28	435	463	6,0
28	Sulawesi Tenggara	53	239	292	18,2
29	Gorontalo	12	81	93	12,9
30	Sulawesi Barat	5	92	97	5,2
31	Maluku	53	173	226	23,5
32	Maluku Utara	24	122	146	16,4
33	Papua Barat	69	95	164	42,1
34	Papua	199	214	413	48,2
Indonesia		**708**	**9.543**	**10.251**	**6,9**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:
*) Puskesmas yang melapor

Lampiran 4.h

JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan yang Sudah Dilatih				Puskesmas yang melakukan Pembinaan Penyehat Tradisional (HATTRA)
					Dilatih Ramuan	Dilatih Akupunktur	Dilatih Akupressur	Asuhan Mandiri (ASMAN), Pemanfaatan TOGA, dan Akrupresur	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	359		0,0	21	2	107	128	305
2	Sumatera Utara	608		0,0	44	0	74	21	227
3	Sumatera Barat	276		0,0	10	0	88	5	73
4	Riau	231		0,0	29	3	111	5	17
5	Jambi	207		0,0	17	1	41		92
6	Sumatera Selatan	341		0,0	9	0	72	4	79
7	Bengkulu	179		0,0	30	7	96		50
8	Lampung	312		0,0	14	3	81	1	262
9	Kepulauan Bangka Belitung	64		0,0	0	0	32	4	63
10	Kepulauan Riau	88	14	15,9	40	4	58	8	52
11	DKI Jakarta	315	13	4,1	22	18	52	25	128
12	Jawa Barat	1.083		0,0	6	3	73	1	1
13	Jawa Tengah	878		0,0	12	3	89	159	440
14	DI Yogyakarta	121		0,0	31	0	31	6	53
15	Jawa Timur	968	1	0,1	38	3	142	154	267
16	Banten	245		0,0	1	1	50	22	54
17	Bali	120	52	43,3	48	2	114	70	117
18	Nusa Tenggara Barat	174		0,0	26	0	80	32	124
19	Nusa Tenggara Timur	410		0,0	5	0	73	1	29
20	Kalimantan Barat	246		0,0	17	10	196	19	90
21	Kalimantan Tengah	205		0,0	6	5	15		35
22	Kalimantan Selatan	236	3	1,3	23	0	61	152	193
23	Kalimantan Timur	187		0,0	21	2	25	90	134
24	Kalimantan Utara	55	1	1,8	9	2	41	11	21
25	Sulawesi Utara	195		0,0	22	0	77	2	1
26	Sulawesi Tengah	207	8	3,9	10	0	96	36	85
27	Sulawesi Selatan	461	22	4,8	10	4	122	142	284
28	Sulawesi Tenggara	292	2	0,7	26	1	70	70	166
29	Gorontalo	93		0,0	18	4	43	13	63
30	Sulawesi Barat	96		0,0	10	1	29		
31	Maluku	215		0,0	23	1	98	64	111
32	Maluku Utara	147	13	8,8	9	2	42	30	93
33	Papua Barat	161		0,0	4	1	24	2	12
34	Papua	428	1	0,2	13	0	15	1	6
Indonesia		**10.203**	**130**	**1,3**	**624**	**83**	**2.418**	**1.278**	**3.727**

Keterangan: 1) Puskesmas yang menyelenggarakan menyelenggarakan yankestrad adalah puskesmas yang melakukan yankestrad, pembinaan kelompok asman, pendataan hattra, dan memiliki RTH dlm bentuk TOGA. 2) Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih puskesmas bisa lebih dari satu jenis pelatihan

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 4.i

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama											
		Pemerintah		Pemerintah Daerah		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	2		3		8		5		99	4	117	4
2	Sumatera Utara	48	2	3	1	28		34		1378	71	1491	74
3	Sumatera Barat	11		1		8		5		200	19	225	19
4	Riau	1				4		1		154	16	160	16
5	Jambi	7		1	1	5		4		140	9	157	10
6	Sumatera Selatan	25		7		10		16		337	16	395	16
7	Bengkulu	3				2				54	6	59	6
8	Lampung	24				10		8		366	13	408	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	4		3		3		5		63	16	78	16
10	Kepulauan Riau	22		4		11		7		248	19	292	19
11	DKI Jakarta	49	2	4		9		6		718	280	786	282
12	Jawa Barat	38	8	1		21		10		1018	167	1088	175
13	Jawa Tengah	30		4		31	1	29	1	1281	140	1375	142
14	DI Yogyakarta	8	1	2	1	4		4		175	20	193	22
15	Jawa Timur	30				23		19	1	778	44	850	45
16	Banten	11		1		1		1		939	32	953	32
17	Bali	9	1	3		3		12		210	41	237	42
18	Nusa Tenggara Barat	4		3		5		9		74	26	95	26
19	Nusa Tenggara Timur	5				3		5		85	4	98	4
20	Kalimantan Barat	12		1				2		81	8	96	8
21	Kalimantan Tengah	11				8		18		152	18	189	18
22	Kalimantan Selatan	1		2		1		1		35	6	40	6
23	Kalimantan Timur	16		8		2				253	6	279	6
24	Kalimantan Utara	3				2		1		4		10	0
25	Sulawesi Utara							1	1	22	2	23	3
26	Sulawesi Tengah	3		1		6		5		35	16	50	16
27	Sulawesi Selatan	24	7	2	2	20	2	15	2	159	54	220	67
28	Sulawesi Tenggara	1		1		6		10		41	6	59	6
29	Gorontalo	6				3		3		23	3	35	3
30	Sulawesi Barat			1				1				2	0
31	Maluku	2		1	2	9		5		21	2	38	4
32	Maluku Utara	1				1				1		3	0
33	Papua Barat	1		3				3		26	3	33	3
34	Papua	7		1		19		8		69	6	104	6
Indonesia		**419**	**21**	**61**	**7**	**266**	**3**	**253**	**5**	**9.239**	**1.073**	**10.238**	**1.109**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021

Lampiran 4.j

JUMLAH PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Praktik Mandiri Dokter Umum	Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	69	3
2	Sumatera Utara	116	8
3	Sumatera Barat	104	33
4	Riau	78	19
5	Jambi	70	17
6	Sumatera Selatan	220	40
7	Bengkulu	84	16
8	Lampung	122	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	29	5
10	Kepulauan Riau	8	1
11	DKI Jakarta	15	1
12	Jawa Barat	465	63
13	Jawa Tengah	1059	303
14	D.I. Yogyakarta	104	32
15	Jawa Timur	662	212
16	Banten	9	4
17	Bali	287	87
18	Nusa Tenggara Barat	91	10
19	Nusa Tenggara Timur	87	27
20	Kalimantan Barat	75	13
21	Kalimantan Tengah	67	8
22	Kalimantan Selatan	137	34
23	Kalimantan Timur	113	42
24	Kalimantan Utara	29	6
25	Sulawesi Utara	155	29
26	Sulawesi Tengah	40	12
27	Sulawesi Selatan	167	72
28	Sulawesi Tenggara	59	13
29	Gorontalo	27	8
30	Sulawesi Barat	27	4
31	Maluku	28	6
32	Maluku Utara	27	9
33	Papua Barat	18	3
34	Papua	56	10
Indonesia		**4.704**	**1.158**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021 (Data BPJS)

Lampiran 4.k

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola								
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				Jumlah
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupatwn/Kota	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	'(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	-	1	2	1		-	4	4	12
2	Sumatera Utara	-	1	1	6	-		4	38	50
3	Sumatera Barat	-	1	6	2	-		1	27	37
4	Riau	-	1	4	1	-		2	6	14
5	Jambi	-	1	4	1	-		2	6	14
6	Sumatera Selatan	1	-	8	2	-		1	18	30
7	Bengkulu	-	1	2	1	-		3	28	35
8	Lampung	-	1	1	3	-		2	12	19
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	1	3	-	-	-		6	10
10	Kepulauan Riau	-	-	-	1	-	-		12	13
11	DKI Jakarta	1	-	2	31	-	1		193	228
12	Jawa Barat	-	1	20	42	-		7	242	312
13	Jawa Tengah	-	1	28	21	-		6	96	152
14	DI Yogyakarta	-	1	2	3	-		3	17	26
15	Jawa Timur	1	-	19	23	-		11	161	215
16	Banten	-	1	7	10	-		1	1	20
17	Bali	-	1	3	2	-		2	25	33
18	Nusa Tenggara Barat	-	1	1	1	-		4	13	20
19	Nusa Tenggara Timur	-	1	2	1	-		7	52	63
20	Kalimantan Barat	-	1	4	2	-		1	17	25
21	Kalimantan Tengah	-	1	3	2	-		4	18	28
22	Kalimantan Selatan	-	1	2	2	-		2	37	44
23	Kalimantan Timur	-	1	2	8			4	17	32
24	Kalimantan Utara	-	-	2	-	-	1	2	3	8
25	Sulawesi Utara	-	1	-	1	-		1	5	8
26	Sulawesi Tengah	-	1		1	-	-		1	3
27	Sulawesi Selatan	-	-	5	4	1		7	12	29
28	Sulawesi Tenggara	-	1	1	1	-		7	5	15
29	Gorontalo	-	1	1	1	-	-	1	4	8
30	Sulawesi Barat	-	-	1	-	-	1		2	4
31	Maluku	-	1	1	-	-		1	3	6
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-		1	6	7
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-		2	2
34	Papua	-	1	-	-	-	-		12	13
Indonesia		**3**	**25**	**137**	**174**		**3**	**91**	**1.101**	**1.535**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2021

Lampiran 4.l

JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	18	4	22
2	Sumatera Utara	21	8	29
3	Sumatera Barat	13	4	17
4	Riau	7	5	12
5	Jambi	8	1	9
6	Sumatera Selatan	11	5	16
7	Bengkulu	6	3	9
8	Lampung	4	7	11
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	3	8
10	Kepulauan Riau	3	3	6
11	DKI Jakarta	3	3	6
12	Jawa Barat	3	23	26
13	Jawa Tengah	1	36	37
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	2	37	39
16	Banten	0	7	7
17	Bali	0	10	10
18	Nusa Tenggara Barat	4	3	7
19	Nusa Tenggara Timur	11	7	18
20	Kalimantan Barat	9	4	13
21	Kalimantan Tengah	10	3	13
22	Kalimantan Selatan	10	3	13
23	Kalimantan Timur	4	7	11
24	Kalimantan Utara	1	3	4
25	Sulawesi Utara	4	5	9
26	Sulawesi Tengah	7	4	11
27	Sulawesi Selatan	19	7	26
28	Sulawesi Tenggara	9	2	11
29	Gorontalo	3	3	6
30	Sulawesi Barat	3	2	5
31	Maluku	10	1	11
32	Maluku Utara	8	1	9
33	Papua Barat	8	2	10
34	Papua	9	4	13
Indonesia		**235**	**225**	**460**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.a

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain*		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh			1	2	24		5		2		32	4	64	6
2	Sumatera Utara	1		2	4	36		9		10	1	139	20	197	25
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	20	1	4		2		19	26	49	30
4	Riau			2	1	16		4		3		33	14	58	15
5	Jambi			1	1	14		2				21	3	38	4
6	Sumatera Selatan	2		1	4	30		4		3		28	15	68	19
7	Bengkulu			1	1	12		3				7	1	23	2
8	Lampung			2	1	16		2				39	20	59	21
9	Kepulauan Bangka Belitung			1	1	10						10	3	21	4
10	Kepulauan Riau			2		11		3		1	1	13	5	30	6
11	DKI Jakarta	3	7	30	1			9	2	9	1	91	40	142	51
12	Jawa Barat	1	4	4	2	49	3	15		4	1	239	55	312	65
13	Jawa Tengah	3	3	4	3	56		11		3	1	198	37	275	44
14	DI Yogyakarta	1			2	9		3			1	48	21	61	24
15	Jawa Timur		1	11	5	61		23	2	5	2	206	79	306	89
16	Banten	1		2		11		3		1		68	34	86	34
17	Bali	1		1	2	15		3		1		40	9	61	11
18	Nusa Tenggara Barat			2	2	14		2				16	3	34	5
19	Nusa Tenggara Timur			1	1	24		5				21	2	51	3
20	Kalimantan Barat			1	2	22		5		1		17	7	46	9
21	Kalimantan Tengah			1	1	16		2				6	2	25	3
22	Kalimantan Selatan			2	2	15		4		2		16	6	39	8
23	Kalimantan Timur			3	2	16	1	4		1		22	8	46	11
24	Kalimantan Utara			1		8		1				1		11	0
25	Sulawesi Utara	2		3	2	15		4			1	21	3	45	6
26	Sulawesi Tengah			2		23		3		1		6	5	35	5
27	Sulawesi Selatan	2		3	4	35	1	7	1	1	1	39	22	87	29
28	Sulawesi Tenggara			1	1	17		2		1		15		36	1
29	Gorontalo			1		10						4	1	15	1
30	Sulawesi Barat			1		7		1				3	1	12	1
31	Maluku	1		2	2	16		4				8		31	2
32	Maluku Utara			2	1	11		2				5		20	1
33	Papua Barat			1		10		5		1		3		20	0
34	Papua			2	1	27		6				11		46	1
Indonesia		**19**	**16**	**97**	**53**	**676**	**6**	**160**	**5**	**52**	**10**	**1.445**	**446**	**2.449**	**536**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021 per 2 Januari 2021
Keterangan: *RS BUMN/KL termasuk RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet

Lampiran 8.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D dan Kelas D Pratama			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,9	1.196	10	14,3	2.645	33	47,1	4.123	24	34,3	1.305	1	1,4	42
2	Sumatera Utara	2	0,9	1.247	31	14,0	8.006	119	53,6	12.501	60	27,0	2.671	10	4,5	413
3	Sumatera Barat	2	2,5	1.381	6	7,6	992	50	63,3	4.779	17	21,5	940	4	5,1	0
4	Riau	1	1,4	282	7	9,6	2.106	43	58,9	4.994	22	30,1	1.085		0,0	
5	Jambi		0,0		4	9,5	1.007	25	59,5	3.156	13	31,0	538		0,0	
6	Sumatera Selatan	2	2,3	1.382	8	9,2	1.965	48	55,2	5.575	28	32,2	1.650	1	1,1	11
7	Bengkulu		0,0		2	8,0	668	14	56,0	1.787	9	36,0	449		0,0	
8	Lampung	1	1,3	658	5	6,3	1.326	55	68,8	5.324	19	23,8	1.083		0,0	
9	Kep. Bangka Belitung		0,0		2	8,0	264	15	60,0	1.579	8	32,0	317		0,0	
10	Kepulauan Riau		0,0		6	16,7	1.389	20	55,6	1.895	9	25,0	428	1	2,8	0
11	DKI Jakarta	17	8,8	7.406	70	36,3	14.138	76	39,4	6.124	27	14,0	4.497	3	1,6	119
12	Jawa Barat	8	2,1	2.874	69	18,3	20.992	226	59,9	25.935	70	18,6	4.084	4	1,1	252
13	Jawa Tengah	9	2,8	4.847	34	10,7	12.437	141	44,2	20.520	133	41,7	10.082	2	0,6	37
14	DI Yogyakarta	2	2,4	941	13	15,3	2.679	33	38,8	2.017	35	41,2	1.582	2	2,4	0
15	Jawa Timur	5	1,3	4.588	60	15,2	17.696	192	48,6	19.457	132	33,4	9.236	6	1,5	527
16	Banten		0,0		23	19,2	5.912	86	71,7	7.357	8	6,7	562	3	2,5	50
17	Bali	3	4,2	1.195	11	15,3	2.122	46	63,9	4.253	12	16,7	613		0,0	
18	Nusa Tenggara Barat		0,0		4	10,3	1.243	18	46,2	2.136	17	43,6	1.131		0,0	
19	Nusa Tenggara Timur		0,0		2	3,7	440	26	48,1	3.091	25	46,3	1.503	1	1,9	18
20	Kalimantan Barat		0,0		5	9,1	1.537	31	56,4	3.531	18	32,7	844	1	1,8	10
21	Kalimantan Tengah		0,0		4	14,3	1.315	16	57,1	2.010	7	25,0	472	1	3,6	88
22	Kalimantan Selatan	2	4,3	1.027	6	12,8	1.289	29	61,7	3.410	10	21,3	461		0,0	
23	Kalimantan Timur	1	1,8	190	5	8,8	2.547	32	56,1	3.773	19	33,3	1.041		0,0	
24	Kalimantan Utara		0,0		1	9,1	314	4	36,4	665	6	54,5	198		0,0	
25	Sulawesi Utara	1	2,0	1.057	4	7,8	650	28	54,9	3.713	16	31,4	1.259	2	3,9	27
26	Sulawesi Tengah		0,0		4	10,0	1.446	24	60,0	2.927	12	30,0	460		0,0	
27	Sulawesi Selatan	2	1,7	2.131	29	25,0	6.930	59	50,9	6.634	23	19,8	1.017	3	2,6	11
28	Sulawesi Tenggara		0,0		2	5,4	785	15	40,5	1.943	17	45,9	708	3	8,1	60
29	Gorontalo		0,0		2	12,5	679	6	37,5	982	8	50,0	674		0,0	
30	Sulawesi Barat		0,0			0,0		6	46,2	1.193	5	38,5	303	2	15,4	0
31	Maluku		0,0		4	12,1	998	8	24,2	1.005	19	57,6	1.046	2	6,1	60
32	Maluku Utara		0,0		1	4,8	276	5	23,8	639	13	61,9	659	2	9,5	34
33	Papua Barat		0,0			0,0		7	35,0	1.234	11	55,0	868	2	10,0	58
34	Papua		0,0		2	4,3	498	14	29,8	2.686	25	53,2	1.101	6	12,8	223
Indonesia		**60**	**2,0**	**32.402**	**436**	**14,6**	**117.291**	**1.550**	**51,9**	**172.948**	**877**	**29,4**	**54.867**	**62**	**2,1**	**2.040**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021 per 2 Januari 2021

Lampiran 8.c

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2020

No	Provinsi	2019				2020			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2019	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2020	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	5.371.532	69	8.576	1,6	5.371.532	70	9.311	1,7
2	Sumatera Utara	14.562.549	217	21.979	1,5	14.562.549	222	24.838	1,7
3	Sumatera Barat	5.441.197	78	7.043	1,3	5.441.197	79	8.092	1,5
4	Riau	6.971.745	74	6.811	1,0	6.971.745	73	8.467	1,2
5	Jambi	3.624.579	40	4.038	1,1	3.624.579	42	4.701	1,3
6	Sumatera Selatan	8.470.683	84	8.996	1,1	8.470.683	87	10.583	1,2
7	Bengkulu	1.991.838	24	2.618	1,3	1.991.838	25	2.904	1,5
8	Lampung	8.447.737	78	7.640	0,9	8.447.737	80	8.391	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.488.792	25	2.061	1,4	1.488.792	25	2.160	1,5
10	Kepulauan Riau	2.189.653	33	3.048	1,4	2.189.653	36	3.712	1,7
11	DKI Jakarta	10.557.810	190	23.664	2,2	10.557.810	193	32.284	3,1
12	Jawa Barat	49.316.712	361	43.042	0,9	49.316.712	377	54.137	1,1
13	Jawa Tengah	34.718.204	304	40.921	1,2	34.718.204	319	47.923	1,4
14	DI Yogyakarta	3.842.932	83	6.578	1,7	3.842.932	85	7.219	1,9
15	Jawa Timur	39.698.631	384	44.069	1,1	39.698.631	395	51.504	1,3
16	Banten	12.927.316	116	11.222	0,9	12.927.316	120	13.881	1,1
17	Bali	4.336.923	68	6.913	1,6	4.336.923	72	8.183	1,9
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	37	3.767	0,7	5.070.385	39	4.510	0,9
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	52	4.531	0,8	5.456.203	54	5.052	0,9
20	Kalimantan Barat	5.069.127	51	5.507	1,1	5.069.127	55	5.922	1,2
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	26	2.556	0,9	2.714.859	28	3.885	1,4
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	46	5.130	1,2	4.244.096	47	6.187	1,5
23	Kalimantan Timur	3.721.389	55	6.091	1,6	3.721.389	57	7.551	2,0
24	Kalimantan Utara	742.245	10	1.085	1,5	742.245	11	1.177	1,6
25	Sulawesi Utara	2.506.981	47	5.378	2,1	2.506.981	51	6.706	2,7
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	38	4.409	1,4	3.054.023	40	4.833	1,6
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	111	14.233	1,6	8.851.240	116	16.723	1,9
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	36	2.822	1,0	2.704.737	37	3.496	1,3
29	Gorontalo	1.202.631	14	2.001	1,7	1.202.631	16	2.335	1,9
30	Sulawesi Barat	1.380.256	12	1.266	0,9	1.380.256	13	1.496	1,1
31	Maluku	1.802.870	30	2.126	1,2	1.802.870	33	3.109	1,7
32	Maluku Utara	1.255.771	21	1.418	1,1	1.255.771	21	1.608	1,3
33	Papua Barat	959.617	19	1.402	1,5	959.617	20	2.160	2,3
34	Papua	3.379.302	44	4.055	1,2	3.379.302	47	4.508	1,3
Indonesia		**268.074.565**	**2.877**	**316.996**	**1,2**	**268.074.565**	**2.985**	**379.548**	**1,4**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020 per 2 Januari 2021

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS
2. Estimasi Jumlah Penduduk 2020: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2020 (BPS di Olah Pusdatin)
3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 8.d

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	70	32	33	65	92,9
2	Sumatera Utara	222	46	118	164	73,9
3	Sumatera Barat	79	28	37	65	82,3
4	Riau	73	21	41	62	84,9
5	Jambi	42	16	17	33	78,6
6	Sumatera Selatan	87	32	33	65	74,7
7	Bengkulu	25	15	6	21	84,0
8	Lampung	80	18	48	66	82,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	10	8	18	72,0
10	Kepulauan Riau	36	14	15	29	80,6
11	DKI Jakarta	193	55	114	169	87,6
12	Jawa Barat	377	69	255	324	85,9
13	Jawa Tengah	319	75	204	279	87,5
14	DI Yogyakarta	85	14	54	68	80,0
15	Jawa Timur	395	100	254	354	89,6
16	Banten	120	14	84	98	81,7
17	Bali	72	21	43	64	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	39	18	15	33	84,6
19	Nusa Tenggara Timur	54	24	21	45	83,3
20	Kalimantan Barat	55	25	20	45	81,8
21	Kalimantan Tengah	28	19	3	22	78,6
22	Kalimantan Selatan	47	22	20	42	89,4
23	Kalimantan Timur	57	20	23	43	75,4
24	Kalimantan Utara	11	7	1	8	72,7
25	Sulawesi Utara	51	22	19	41	80,4
26	Sulawesi Tengah	40	21	10	31	77,5
27	Sulawesi Selatan	116	46	48	94	81,0
28	Sulawesi Tenggara	37	21	9	30	81,1
29	Gorontalo	16	8	4	12	75,0
30	Sulawesi Barat	13	8	1	9	69,2
31	Maluku	33	18	5	23	69,7
32	Maluku Utara	21	12	4	16	76,2
33	Papua Barat	20	11	3	14	70,0
34	Papua	47	26	6	32	68,1
Indonesia		**2.985**	**908**	**1.576**	**2.484**	**83,2**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan), Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.e

PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Melaporkan Data	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	24	23	95,8
2	Sumatera Utara	33	27	81,8
3	Sumatera Barat	21	15	71,4
4	Riau	16	10	62,5
5	Jambi	13	8	61,5
6	Sumatera Selatan	28	16	57,1
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	16	13	81,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	7	87,5
10	Kepulauan Riau	8	2	25,0
11	DKI Jakarta*	0	0	0,0
12	Jawa Barat	43	34	79,1
13	Jawa Tengah	56	51	91,1
14	DI Yogyakarta	9	8	88,9
15	Jawa Timur	51	41	80,4
16	Banten	9	8	88,9
17	Bali	4	3	75,0
18	Nusa Tenggara Barat	12	9	75,0
19	Nusa Tenggara Timur	20	8	40,0
20	Kalimantan Barat	18	11	61,1
21	Kalimantan Tengah	12	8	66,7
22	Kalimantan Selatan	15	13	86,7
23	Kalimantan Timur	14	10	71,4
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	16	6	37,5
26	Sulawesi Tengah	20	11	55,0
27	Sulawesi Selatan	30	22	73,3
28	Sulawesi Tenggara	14	5	35,7
29	Gorontalo	8	5	62,5
30	Sulawesi Barat	7	3	42,9
31	Maluku	10	4	40,0
32	Maluku Utara	6	2	33,3
33	Papua Barat	8	2	25,0
34	Papua	5	1	20,0
Indonesia		**569**	**397**	**69,8**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.f

JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	Jumlah RS Pemerintah yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Persentase RS Pemerintah yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Tenaga Kesehatan yang Sudah Dilatih	
					Dilatih Akupunktur	Dilatih Herbal Medik
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	34	2	5,9	10	2
2	Sumatera Utara	62	0	0,0	8	2
3	Sumatera Barat	33	0	0,0	5	3
4	Riau	26	0	0,0	8	3
5	Jambi	18	0	0,0	8	0
6	Sumatera Selatan	44	0	0,0	8	2
7	Bengkulu	17	0	0,0	4	1
8	Lampung	20	0	0,0	7	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	0	0,0	6	1
10	Kepulauan Riau	16	0	0,0	5	1
11	DKI Jakarta	61	0	0,0	15	0
12	Jawa Barat	81	0	0,0	15	4
13	Jawa Tengah	82	2	2,4	17	5
14	DI Yogyakarta	15	1	6,7	6	1
15	Jawa Timur	106	2	1,9	18	3
16	Banten	18	0	0,0	6	2
17	Bali	23	2	8,7	4	3
18	Nusa Tenggara Barat	20	0	0,0	5	1
19	Nusa Tenggara Timur	29	0	0,0	7	0
20	Kalimantan Barat	31	0	0,0	6	1
21	Kalimantan Tengah	20	0	0,0	5	2
22	Kalimantan Selatan	25	0	0,0	2	2
23	Kalimantan Timur	27	0	0,0	5	1
24	Kalimantan Utara	10	0	0,0	1	0
25	Sulawesi Utara	27	0	0,0	6	1
26	Sulawesi Tengah	28	0	0,0	5	1
27	Sulawesi Selatan	53	0	0,0	7	1
28	Sulawesi Tenggara	22	0	0,0	5	0
29	Gorontalo	11	0	0,0	5	2
30	Sulawesi Barat	9	0	0,0	4	1
31	Maluku	23	1	4,3	3	1
32	Maluku Utara	16	0	0,0	5	0
33	Papua Barat	16	0	0,0	3	0
34	Papua	36	0	0,0	4	1
Indonesia		**1.071**	**10**	**0,9**	**228**	**49**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2020

Keterangan: 1.) RS yang menyelenggarakan yankestrad integrasi merupakan RS yang telah memiliki SK Penetapan Penyelenggaraan Yankestrad Integrasi, 2)Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih RS bisa lebih dari satu jenis pelatihan

Lampiran 8.g

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja		Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga	
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	23	6	26,1	0	0,0
2	Sumatera Utara	33	30	90,9	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	15	78,9	5	26,3
4	Riau	12	7	58,3	0	0,0
5	Jambi	11	10	90,9	5	45,5
6	Sumatera Selatan	17	10	58,8	3	17,6
7	Bengkulu	10	10	100,0	5	50,0
8	Lampung	15	7	46,7	6	40,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	6	85,7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7	4	57,1
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	5	83,3
12	Jawa Barat	27	27	100,0	21	77,8
13	Jawa Tengah	35	26	74,3	22	62,9
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	100,0
15	Jawa Timur	38	31	81,6	22	57,9
16	Banten	8	7	87,5	7	87,5
17	Bali	9	2	22,2	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	4	40,0	2	20,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,3	5	22,7
20	Kalimantan Barat	14	6	42,9	1	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6	7	50,0
22	Kalimantan Selatan	13	1	7,7	1	7,7
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	1	10,0
24	Kalimantan Utara	5	5	100,0	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,0	5	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	19	79,2	12	50,0
28	Sulawesi Tenggara	17	11	64,7	4	23,5
29	Gorontalo	6	6	100,0	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	5	83,3	1	16,7
31	Maluku	11	1	9,1	0	0,0
32	Maluku Utara	10	7	70,0	0	0,0
33	Papua Barat	13	0	0,0	0	0,0
34	Papua	29	0	0,0	0	0,0
Indonesia		**514**	**329**	**64,0**	**193**	**37,5**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.h

JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja				Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	Jumlah Kelompok Olah Raga
		Puskesmas	Perusahaan	POS UKK	GP2SP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	49	5	53	0	28	1964	174
2	Sumatera Utara	304	20	141	4	593	4634	987
3	Sumatera Barat	181	13	284	3	45	2425	190
4	Riau	78	10	230	3	25	3476	118
5	Jambi	109	18	153	4	153	968	537
6	Sumatera Selatan	105	2	174	7	88	3593	322
7	Bengkulu	148	22	246	0	92	1110	175
8	Lampung	122	66	190	8	237	5729	1087
9	Kep. Bangka Belitung	44	7	88	5	113	989	267
10	Kepulauan Riau	55	29	201	18	120	940	378
11	DKI Jakarta	245	9	99	42	155	5175	706
12	Jawa Barat	686	74	1045	74	1097	20783	3248
13	Jawa Tengah	488	89	789	264	526	3112	3926
14	DI Yogyakarta	98	38	107	8	303	1729	525
15	Jawa Timur	452	15	1485	45	340	21144	2908
16	Banten	122	2	194	35	241	2981	452
17	Bali	17	0	98	38	23	174	102
18	Nusa Tenggara Barat	57	4	360	1	40	4384	176
19	Nusa Tenggara Timur	227	3	300	0	97	313	173
20	Kalimantan Barat	59	1	203	3	55	1289	110
21	Kalimantan Tengah	103	14	94	19	80	1422	240
22	Kalimantan Selatan	18	0	188	24	5	3165	27
23	Kalimantan Timur	103	110	57	46	106	1102	220
24	Kalimantan Utara	41	14	44	2	53	249	97
25	Sulawesi Utara	20	7	64	0	2	23	20
26	Sulawesi Tengah	178	20	136	0	464	319	641
27	Sulawesi Selatan	261	28	911	18	410	120	1308
28	Sulawesi Tenggara	129	49	36	0	207	791	510
29	Gorontalo	71	3	46	0	75	362	985
30	Sulawesi Barat	32	2	163	0	30	0	81
31	Maluku	6	0	107	0	37	119	0
32	Maluku Utara	36	4	60	0	7	515	140
33	Papua Barat	4	0	158	0	0	123	20
34	Papua	3	0	49	0	3	598	0
Indonesia		4.651	678	8.553	671	5.850	95.820	20.850

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 9.a

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	356	356	335	94,1
2	Sumatera Utara	596	596	534	89,6
3	Sumatera Barat	275	275	264	96,0
4	Riau	226	226	203	89,8
5	Jambi	202	202	185	91,6
6	Sumatera Selatan	341	341	282	82,7
7	Bengkulu	179	179	160	89,4
8	Lampung	309	309	239	77,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	89	89	87	97,8
11	DKI Jakarta	326	326	314	96,3
12	Jawa Barat	1079	1079	1007	93,3
13	Jawa Tengah	878	765	734	95,9
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,0
15	Jawa Timur	968	475	459	96,6
16	Banten	242	242	191	78,9
17	Bali	120	120	110	91,7
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	168	99,4
19	Nusa Tenggara Timur	417	417	393	94,2
20	Kalimantan Barat	246	246	240	97,6
21	Kalimantan Tengah	200	200	174	87,0
22	Kalimantan Selatan	234	234	230	98,3
23	Kalimantan Timur	187	187	185	98,9
24	Kalimantan Utara	56	56	56	100,0
25	Sulawesi Utara	193	193	193	100,0
26	Sulawesi Tengah	210	206	186	90,3
27	Sulawesi Selatan	458	458	416	90,8
28	Sulawesi Tenggara	290	290	239	82,4
29	Gorontalo	93	93	80	86,0
30	Sulawesi Barat	95	95	95	100,0
31	Maluku	209	209	196	93,8
32	Maluku Utara	144	144	128	88,9
33	Papua Barat	159	149	134	89,9
34	Papua	408	403	362	89,8
Indonesia		**10.139**	**9.514**	**8.764**	**92,1**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial ≥80%

Lampiran 9.b

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melapor	Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	23	15	65,2
2	Sumatera Utara	33	33	27	81,8
3	Sumatera Barat	19	19	17	89,5
4	Riau	12	12	9	75,0
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	9	52,9
7	Bengkulu	10	10	9	90,0
8	Lampung	15	15	12	80,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	0	0	0,0
12	Jawa Barat	27	27	22	81,5
13	Jawa Tengah	35	28	20	71,4
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	35	24	68,6
16	Banten	8	8	4	50,0
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	21	95,5
20	Kalimantan Barat	14	14	12	85,7
21	Kalimantan Tengah	14	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	13	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	10	10	100,0
24	Kalimantan Utara	5	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	15	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	7	7	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	13	76,5
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
31	Maluku	11	11	10	90,9
32	Maluku Utara	10	10	9	90,0
33	Papua Barat	13	12	11	91,7
34	Papua	29	29	29	100,0
Indonesia		**514**	**480**	**402**	**83,8**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: *) isi dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki obat esensial ≥85%

Lampiran 9.c

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Vaksin IDL	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	356	356	314	88,2
2	Sumatera Utara	596	596	569	95,5
3	Sumatera Barat	275	275	275	100,0
4	Riau	226	226	226	100,0
5	Jambi	202	202	202	100,0
6	Sumatera Selatan	341	341	341	100,0
7	Bengkulu	179	179	179	100,0
8	Lampung	309	309	296	95,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	89	89	88	98,9
11	DKI Jakarta	326	326	325	99,7
12	Jawa Barat	1079	1079	1078	99,9
13	Jawa Tengah	878	764	675	88,4
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,0
15	Jawa Timur	968	475	473	99,6
16	Banten	242	242	242	100,0
17	Bali	120	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	169	169	169	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	417	417	411	98,6
20	Kalimantan Barat	246	246	246	100,0
21	Kalimantan Tengah	200	200	200	100,0
22	Kalimantan Selatan	234	234	234	100,0
23	Kalimantan Timur	187	187	187	100,0
24	Kalimantan Utara	56	56	56	100,0
25	Sulawesi Utara	193	193	193	100,0
26	Sulawesi Tengah	210	210	210	100,0
27	Sulawesi Selatan	458	452	391	86,5
28	Sulawesi Tenggara	290	290	286	98,6
29	Gorontalo	93	93	93	100,0
30	Sulawesi Barat	95	95	95	100,0
31	Maluku	209	209	209	100,0
32	Maluku Utara	144	144	144	100,0
33	Papua Barat	159	149	122	81,9
34	Papua	408	403	390	96,8
Indonesia		**10.139**	**9.511**	**9.224**	**97,0**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

Lampiran 9.d

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alat (IOT/IEBA)	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0	0	5	2	0	3
2	Sumatera Utara	3	1	104	22	32	19
3	Sumatera Barat	1	0	10	1	1	3
4	Riau	0	0	3	0	1	0
5	Jambi	0	0	2	0	4	0
6	Sumatera Selatan	2	1	3	3	4	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	13	0	7	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	3	15	3	2
11	DKI Jakarta	82	18	531	104	126	90
12	Jawa Barat	67	56	571	178	189	87
13	Jawa Tengah	20	22	242	85	87	48
14	D.I. Yogyakarta	1	1	44	7	10	15
15	Jawa Timur	31	17	204	96	125	69
16	Banten	23	22	79	78	138	62
17	Bali	0	2	31	2	2	22
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	12	2	0	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	5	2	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	6	0	3	1
23	Kalimantan Timur	0	0	3	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	4	0	2	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	1	37	2	4	4
28	Sulawesi Tenggara	0	0	2	0	0	1
29	Gorontalo	0	1	2	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	25	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**230**	**144**	**1.949**	**599**	**738**	**435**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 9.e

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	27	492	584	34
2	Sumatera Utara	87	1431	1501	107
3	Sumatera Barat	41	571	266	63
4	Riau	44	771	513	54
5	Jambi	33	418	172	31
6	Sumatera Selatan	57	614	193	80
7	Bengkulu	16	288	119	19
8	Lampung	52	655	114	44
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	200	81	14
10	Kepulauan Riau	36	305	260	44
11	DKI Jakarta	312	2055	554	1155
12	Jawa Barat	308	4874	1720	417
13	Jawa Tengah	277	3768	355	220
14	D.I. Yogyakarta	49	603	45	69
15	Jawa Timur	281	4250	490	327
16	Banten	96	1632	448	250
17	Bali	59	885	87	69
18	Nusa Tenggara Barat	25	530	104	25
19	Nusa Tenggara Timur	33	379	78	38
20	Kalimantan Barat	36	339	309	37
21	Kalimantan Tengah	7	153	54	8
22	Kalimantan Selatan	39	494	531	48
23	Kalimantan Timur	52	724	226	65
24	Kalimantan Utara	3	86	40	2
25	Sulawesi Utara	33	284	95	33
26	Sulawesi Tengah	33	437	204	25
27	Sulawesi Selatan	105	1329	275	127
28	Sulawesi Tenggara	37	489	73	18
29	Gorontalo	11	183	35	5
30	Sulawesi Barat	1	130	52	1
31	Maluku	14	175	86	18
32	Maluku Utara	6	145	19	7
33	Papua Barat	16	169	16	4
34	Papua	49	341	53	75
Indonesia		**2.291**	**30.199**	**9.752**	**3.533**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 10

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif*		% Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif*		Jumlah Posbindu PTM**
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	23	21	91,3	11	47,8	4.286
2	Sumatera Utara	33	-	-	-	-	3.256
3	Sumatera Barat	19	-	-	-	-	2.302
4	Riau	12	-	-	-	-	1.019
5	Jambi	11	-	-	-	-	956
6	Sumatera Selatan	17	4	23,5	7	41,2	2.527
7	Bengkulu	10	1	10,0	3	30,0	954
8	Lampung	15	3	20,0	-	-	2.319
9	Kep. Bangka Belitung	7	-	-	-	-	588
10	Kepulauan Riau	7	-	-	2	28,6	483
11	DKI Jakarta	6	-	-	-	-	1.857
12	Jawa Barat	27	3	11,1	7	25,9	7.262
13	Jawa Tengah	35	13	37,1	18	51,4	7.913
14	D.I. Yogyakarata	5	-	-	-	-	1.161
15	Jawa Timur	38	15	39,5	21	55,3	10.208
16	Banten	8	-	-	-	-	1.511
17	Bali	9	2	22,2	1	11,1	687
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	20,0	4	40,0	2.058
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,5	6	27,3	2.568
20	Kalimantan Barat	14	-	-	-	-	1.577
21	Kalimantan Tengah	14	2	14,3	4	28,6	1.014
22	Kalimantan Selatan	13	5	38,5	1	7,7	1.658
23	Kalimantan Timur	10	-	-	-	-	780
24	Kalimantan Utara	5	-	-	-	-	125
25	Sulawesi Utara	15	-	-	-	-	526
26	Sulawesi Tengah	13	-	-	-	-	1.522
27	Sulawesi Selatan	24	-	-	10	41,7	3.584
28	Sulawesi Tenggara	17	-	-	-	-	803
29	Gorontalo	6	-	-	-	-	547
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7	2	33,3	695
31	Maluku	11	-	-	-	-	372
32	Maluku Utara	10	1	10,0	-	-	703
33	Papua Barat	13	-	-	-	-	331
34	Papua	29	-	-	11	37,9	168
Indonesia		**514**	**74**	**14,4**	**108**	**21,0**	**68.320**

Sumber: *Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, 2020

**Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, 2021

Ket: PTM: Penyakit Tidak Menular

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter Spesialis [a]			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	405	390	795	553	1.335	1.888	958	1.725	2.683	7	13	20	78	325	403	85	338	423
2	Sumatera Utara	1.153	745	1.898	1.240	2.473	3.713	2.393	3.218	5.611	19	40	59	145	682	827	164	722	886
3	Sumatera Barat	484	448	932	458	1.236	1.694	942	1.684	2.626	7	14	21	72	403	475	79	417	496
4	Riau	492	325	817	603	1.214	1.817	1.095	1.539	2.634	10	16	26	84	393	477	94	409	503
5	Jambi	242	155	397	365	771	1.136	607	926	1.533	8	10	18	47	190	237	55	200	255
6	Sumatera Selatan	510	407	917	498	1.049	1.547	1.008	1.456	2.464	10	19	29	77	224	301	87	243	330
7	Bengkulu	116	89	205	204	378	582	320	467	787	2	6	8	28	109	137	30	115	145
8	Lampung	453	222	675	590	1.127	1.717	1.043	1.349	2.392	5	15	20	41	168	209	46	183	229
9	Kep. Bangka Belitung	122	88	210	205	336	541	327	424	751	6	11	17	32	66	98	38	77	115
10	Kepulauan Riau	247	138	385	296	507	803	543	645	1.188	16	10	26	43	125	168	59	135	194
11	DKI Jakarta	3.196	2.727	5.923	2.634	5.364	7.998	5.830	8.091	13.921	221	502	723	422	1.688	2.110	643	2.190	2.833
12	Jawa Barat	3.266	2.340	5.606	3.490	5.688	9.178	6.756	8.028	14.784	141	244	385	365	1.498	1.863	506	1.742	2.248
13	Jawa Tengah	2.569	1.613	4.182	3.034	4.758	7.792	5.603	6.371	11.974	82	126	208	348	1.220	1.568	430	1.346	1.776
14	DI Yogyakarta	617	506	1.123	698	1.196	1.894	1.315	1.702	3.017	61	126	187	92	393	485	153	519	672
15	Jawa Timur	3.171	2.154	5.325	3.117	4.448	7.565	6.288	6.602	12.890	145	240	385	451	1.670	2.121	596	1.910	2.506
16	Banten	908	764	1.672	985	1.788	2.773	1.893	2.552	4.445	22	63	85	92	572	664	114	635	749
17	Bali	964	544	1.508	1.008	1.091	2.099	1.972	1.635	3.607	27	28	55	163	423	586	190	451	641
18	Nusa Tenggara Barat	238	172	410	392	610	1.002	630	782	1.412	3	12	15	32	133	165	35	145	180
19	Nusa Tenggara Timur	110	123	233	308	528	836	418	651	1.069	2	1	3	37	132	169	39	133	172
20	Kalimantan Barat	218	120	338	399	505	904	617	625	1.242	7	8	15	47	112	159	54	120	174
21	Kalimantan Tengah	162	122	284	277	412	689	439	534	973	5	6	11	26	95	121	31	101	132
22	Kalimantan Selatan	341	217	558	344	627	971	685	844	1.529	11	19	30	81	181	262	92	200	292
23	Kalimantan Timur	403	288	691	449	776	1.225	852	1.064	1.916	15	34	49	61	217	278	76	251	327
24	Kalimantan Utara	75	52	127	138	155	293	213	207	420	3	4	7	18	38	56	21	42	63
25	Sulawesi Utara	280	243	523	601	921	1.522	881	1.164	2.045	4	7	11	42	106	148	46	113	159
26	Sulawesi Tengah	137	151	288	264	447	711	401	598	999	1	6	7	41	112	153	42	118	160
27	Sulawesi Selatan	651	755	1.406	568	1.293	1.861	1.219	2.048	3.267	24	64	88	121	605	726	145	669	814
28	Sulawesi Tenggara	122	98	220	216	411	627	338	509	847	3	6	9	40	165	205	43	171	214
29	Gorontalo	71	65	136	130	229	359	201	294	495	2	1	3	16	50	66	18	51	69
30	Sulawesi Barat	48	55	103	95	187	282	143	242	385	3	5	8	20	76	96	23	81	104
31	Maluku	68	62	130	168	351	519	236	413	649	3	4	7	14	52	66	17	56	73
32	Maluku Utara	46	41	87	142	209	351	188	250	438	3	1	4	18	35	53	21	36	57
33	Papua Barat	64	34	98	129	208	337	193	242	435	0	0	0	15	34	49	15	34	49
34	Papua	115	83	198	262	428	690	377	511	888	3	3	6	19	68	87	22	71	93
Indonesia		**22.064**	**16.336**	**38.400**	**24.860**	**43.056**	**67.916**	**46.924**	**59.392**	**106.316**	**881**	**1.664**	**2.545**	**3.228**	**12.360**	**15.588**	**4.109**	**14.024**	**18.133**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali;

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 11.b

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter Spesialis [a]			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	1	1	2	259	780	1.039	260	781	1.041	0	0	0	57	262	319	57	262	319
2	Sumatera Utara	5	5	10	531	1.309	1.840	536	1.314	1.850	0	3	3	89	498	587	89	501	590
3	Sumatera Barat	2	3	5	152	541	693	154	544	698	0	1	1	39	296	335	39	297	336
4	Riau	0	0	0	222	625	847	222	625	847	0	0	0	49	270	319	49	270	319
5	Jambi	0	0	0	138	362	500	138	362	500	0	0	0	29	117	146	29	117	146
6	Sumatera Selatan	0	6	6	164	463	627	164	469	633	0	1	1	46	131	177	46	132	178
7	Bengkulu	0	0	0	98	214	312	98	214	312	0	0	0	16	64	80	16	64	80
8	Lampung	0	1	1	227	563	790	227	564	791	0	0	0	17	118	135	17	118	135
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	80	146	226	80	146	226	0	0	0	21	46	67	21	46	67
10	Kepulauan Riau	2	0	2	111	260	371	113	260	373	0	0	0	22	76	98	22	76	98
11	DKI Jakarta	0	0	0	401	1.410	1.811	401	1.410	1.811	0	0	0	77	400	477	77	400	477
12	Jawa Barat	1	2	3	925	1.941	2.866	926	1.943	2.869	0	0	0	144	741	885	144	741	885
13	Jawa Tengah	0	0	0	892	1.667	2.559	892	1.667	2.559	0	2	2	142	671	813	142	673	815
14	DI Yogyakarta	0	0	0	126	347	473	126	347	473	0	3	3	14	157	171	14	160	174
15	Jawa Timur	1	0	1	782	1.569	2.351	783	1.569	2.352	1	3	4	197	922	1.119	198	925	1.123
16	Banten	0	2	2	200	572	772	200	574	774	0	0	0	38	270	308	38	270	308
17	Bali	0	0	0	243	276	519	243	276	519	0	0	0	76	201	277	76	201	277
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	151	272	423	151	272	423	0	0	0	24	91	115	24	91	115
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	1	161	305	466	161	306	467	0	0	0	31	100	131	31	100	131
20	Kalimantan Barat	0	0	0	202	276	478	202	276	478	0	1	1	21	81	102	21	82	103
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	121	204	325	121	204	325	0	0	0	16	67	83	16	67	83
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	127	330	457	127	330	457	0	0	0	46	118	164	46	118	164
23	Kalimantan Timur	0	0	0	161	341	502	161	341	502	0	0	0	38	155	193	38	155	193
24	Kalimantan Utara	0	0	0	59	77	136	59	77	136	0	0	0	13	26	39	13	26	39
25	Sulawesi Utara	1	3	4	165	424	589	166	427	593	0	0	0	24	55	79	24	55	79
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	123	218	341	123	218	341	0	1	1	26	73	99	26	74	100
27	Sulawesi Selatan	0	3	3	199	645	844	199	648	847	0	1	1	75	411	486	75	412	487
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	101	263	364	101	263	364	0	0	0	24	123	147	24	123	147
29	Gorontalo	0	0	0	36	84	120	36	84	120	0	0	0	10	39	49	10	39	49
30	Sulawesi Barat	0	0	0	54	113	167	54	113	167	0	0	0	15	62	77	15	62	77
31	Maluku	0	0	0	81	184	265	81	184	265	0	1	1	6	35	41	6	36	42
32	Maluku Utara	0	1	1	70	121	191	70	122	192	0	0	0	13	29	42	13	29	42
33	Papua Barat	0	0	0	56	92	148	56	92	148	0	0	0	5	19	24	5	19	24
34	Papua	0	2	2	119	219	338	119	221	340	0	0	0	8	43	51	8	43	51
Indonesia		**13**	**30**	**43**	**7.537**	**17.213**	**24.750**	**7.550**	**17.243**	**24.793**	**1**	**17**	**18**	**1.468**	**6.767**	**8.235**	**1.469**	**6.784**	**8.253**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 11.c

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter Spesialis [a]			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	405	389	794	302	569	871	707	958	1.665	7	13	20	26	71	97	33	84	117
2	Sumatera Utara	1.160	749	1.909	708	1.165	1.873	1.868	1.914	3.782	19	40	59	57	195	252	76	235	311
3	Sumatera Barat	481	444	925	294	666	960	775	1.110	1.885	7	13	20	26	101	127	33	114	147
4	Riau	488	329	817	353	550	903	841	879	1.720	10	16	26	36	117	153	46	133	179
5	Jambi	239	155	394	172	334	506	411	489	900	8	10	18	15	62	77	23	72	95
6	Sumatera Selatan	510	408	918	329	575	904	839	983	1.822	10	18	28	30	95	125	40	113	153
7	Bengkulu	116	89	205	97	160	257	213	249	462	2	6	8	7	36	43	9	42	51
8	Lampung	452	219	671	346	536	882	798	755	1.553	5	15	20	21	50	71	26	65	91
9	Kep. Bangka Belitung	120	87	207	98	150	248	218	237	455	6	11	17	8	16	24	14	27	41
10	Kepulauan Riau	246	138	384	176	245	421	422	383	805	14	10	24	18	42	60	32	52	84
11	DKI Jakarta	3.133	2.648	5.781	1.411	2.319	3.730	4.544	4.967	9.511	202	445	647	121	520	641	323	965	1.288
12	Jawa Barat	3.237	2.336	5.573	2.027	2.865	4.892	5.264	5.201	10.465	142	242	384	160	532	692	302	774	1.076
13	Jawa Tengah	2.545	1.584	4.129	1.649	2.202	3.851	4.194	3.786	7.980	82	118	200	156	401	557	238	519	757
14	DI Yogyakarta	613	504	1.117	466	610	1.076	1.079	1.114	2.193	55	107	162	50	114	164	105	221	326
15	Jawa Timur	3.084	2.091	5.175	1.785	2.148	3.933	4.869	4.239	9.108	141	230	371	177	447	624	318	677	995
16	Banten	913	767	1.680	580	888	1.468	1.493	1.655	3.148	25	65	90	33	181	214	58	246	304
17	Bali	943	534	1.477	561	614	1.175	1.504	1.148	2.652	27	27	54	62	148	210	89	175	264
18	Nusa Tenggara Barat	236	171	407	227	313	540	463	484	947	3	12	15	7	37	44	10	49	59
19	Nusa Tenggara Timur	110	121	231	150	222	372	260	343	603	2	1	3	7	32	39	9	33	42
20	Kalimantan Barat	216	120	336	188	232	420	404	352	756	7	7	14	24	34	58	31	41	72
21	Kalimantan Tengah	162	121	283	151	199	350	313	320	633	5	6	11	10	29	39	15	35	50
22	Kalimantan Selatan	338	215	553	207	286	493	545	501	1.046	11	19	30	32	59	91	43	78	121
23	Kalimantan Timur	402	287	689	276	397	673	678	684	1.362	15	34	49	23	55	78	38	89	127
24	Kalimantan Utara	75	50	125	68	71	139	143	121	264	3	3	6	3	11	14	6	14	20
25	Sulawesi Utara	279	240	519	438	501	939	717	741	1.458	4	7	11	21	55	76	25	62	87
26	Sulawesi Tengah	138	151	289	132	225	357	270	376	646	1	5	6	14	40	54	15	45	60
27	Sulawesi Selatan	651	747	1.398	368	626	994	1.019	1.373	2.392	24	62	86	40	184	224	64	246	310
28	Sulawesi Tenggara	122	98	220	122	158	280	244	256	500	3	6	9	16	44	60	19	50	69
29	Gorontalo	71	66	137	91	136	227	162	202	364	2	1	3	7	12	19	9	13	22
30	Sulawesi Barat	47	52	99	41	74	115	88	126	214	3	5	8	4	12	16	7	17	24
31	Maluku	67	62	129	85	166	251	152	228	380	3	3	6	8	15	23	11	18	29
32	Maluku Utara	46	42	88	72	86	158	118	128	246	3	1	4	5	6	11	8	7	15
33	Papua Barat	63	34	97	79	116	195	142	150	292	0	0	0	10	15	25	10	15	25
34	Papua	115	81	196	135	197	332	250	278	528	3	3	6	11	26	37	14	29	43
Indonesia		**21.823**	**16.129**	**37.952**	**14.184**	**20.601**	**34.785**	**36.007**	**36.730**	**72.737**	**854**	**1.561**	**2.415**	**1.245**	**3.794**	**5.039**	**2.099**	**5.355**	**7.454**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 11.d

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	125	95	93	67	27	56	43	9	7	271	22	815
2	Sumatera Utara	299	257	242	162	54	124	112	35	5	714	68	2.072
3	Sumatera Barat	138	103	107	83	27	64	56	16	3	397	24	1.018
4	Riau	121	134	108	77	30	54	36	17	3	294	29	903
5	Jambi	81	58	42	38	16	35	21	9	1	159	22	482
6	Sumatera Selatan	174	140	115	101	33	59	26	27	8	314	37	1.034
7	Bengkulu	37	36	27	31	8	16	15	2	1	59	10	242
8	Lampung	102	120	78	74	39	54	35	11	2	251	21	787
9	Kep. Bangka Belitung	28	35	31	23	12	12	14	5	0	82	18	260
10	Kepulauan Riau	41	55	42	40	19	31	17	10	1	171	32	459
11	DKI Jakarta	724	724	655	276	266	455	187	95	46	2.916	831	7.175
12	Jawa Barat	794	718	703	412	278	444	202	68	56	2.218	417	6.310
13	Jawa Tengah	622	532	480	369	219	332	140	57	28	1.736	228	4.743
14	DI Yogyakarta	167	121	152	87	61	80	52	21	4	532	230	1.507
15	Jawa Timur	710	668	532	372	268	360	224	97	39	2.458	413	6.141
16	Banten	219	243	206	119	77	134	68	18	15	642	96	1.837
17	Bali	210	221	180	133	53	101	28	30	6	637	60	1.659
18	Nusa Tenggara Barat	50	63	50	40	22	29	18	6	1	172	16	467
19	Nusa Tenggara Timur	56	41	31	30	13	18	16	2	5	43	4	259
20	Kalimantan Barat	50	61	45	44	18	27	17	4	2	106	17	391
21	Kalimantan Tengah	46	44	34	38	12	29	19	4	2	100	11	339
22	Kalimantan Selatan	88	72	56	47	24	41	30	7	4	236	35	640
23	Kalimantan Timur	93	91	75	64	34	65	28	11	7	276	53	797
24	Kalimantan Utara	14	15	21	13	6	9	8	2	2	50	8	148
25	Sulawesi Utara	110	67	74	45	17	34	13	1	3	185	12	561
26	Sulawesi Tengah	54	45	44	33	20	21	14	3	1	123	7	365
27	Sulawesi Selatan	202	164	121	128	84	91	82	32	6	582	99	1.591
28	Sulawesi Tenggara	31	28	28	21	23	19	13	2	1	78	10	254
29	Gorontalo	25	14	19	12	7	12	6	2	0	54	3	154
30	Sulawesi Barat	13	12	12	14	5	11	6	0	0	36	9	118
31	Maluku	19	20	14	17	9	9	6	3	1	39	7	144
32	Maluku Utara	24	18	11	17	5	12	7	0	0	21	9	124
33	Papua Barat	26	28	16	20	11	8	3	0	0	23	1	136
34	Papua	25	42	26	25	11	17	17	0	2	55	6	226
Indonesia		**5.518**	**5.085**	**4.470**	**3.072**	**1.808**	**2.863**	**1.579**	**606**	**262**	**16.030**	**2.865**	**44.158**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	18,9	5,3	75,8	63,0	25,1	12,0	7,8	4,2	88,0	6,1	0,3	93,6
2	Sumatera Utara	25,1	6,9	68,0	52,2	31,9	15,9	15,8	11,3	72,9	11,2	1,0	87,8
3	Sumatera Barat	32,0	5,8	62,2	73,4	8,3	18,3	22,3	14,0	63,7	11,9	0,4	87,8
4	Riau	17,8	4,7	77,5	54,2	17,4	28,4	14,4	8,5	77,1	11,9	1,3	86,9
5	Jambi	29,6	5,3	65,0	61,2	34,0	4,9	10,7	2,9	86,4	5,3	0,0	94,7
6	Sumatera Selatan	38,2	18,1	43,7	49,0	48,1	2,9	11,1	3,2	85,7	9,0	1,5	89,5
7	Bengkulu	50,3	12,8	36,9	41,3	55,9	2,8	5,6	5,6	88,8	4,5	0,0	95,5
8	Lampung	36,3	3,2	60,5	36,9	60,5	2,5	15,3	3,8	80,9	12,1	0,0	87,9
9	Kep. Bangka Belitung	10,9	6,3	82,8	76,6	10,9	12,5	12,5	0,0	87,5	9,4	0,0	90,6
10	Kepulauan Riau	10,0	7,8	82,2	64,4	17,8	17,8	16,7	4,4	78,9	13,3	0,0	86,7
11	DKI Jakarta	10,2	0,0	89,8	87,1	3,0	9,9	12,3	77,8	9,9	18,3	69,4	12,3
12	Jawa Barat	21,0	1,9	77,1	57,4	31,9	10,7	15,2	18,2	66,6	10,7	3,5	85,8
13	Jawa Tengah	22,9	2,2	75,0	78,2	15,4	6,5	18,7	9,7	71,7	12,2	1,1	86,7
14	DI Yogyakarta	7,4	0,0	92,6	68,6	1,7	29,8	24,8	13,2	62,0	14,9	11,6	73,6
15	Jawa Timur	37,4	11,1	51,5	78,1	7,3	14,6	27,2	3,2	69,6	24,4	0,5	75,1
16	Banten	19,7	1,6	78,7	52,9	16,4	30,7	16,0	12,3	71,7	12,3	0,4	87,3
17	Bali	7,5	1,7	90,8	34,2	3,3	62,5	7,5	1,7	90,8	6,7	0,0	93,3
18	Nusa Tenggara Barat	35,3	13,3	51,4	61,8	36,4	1,7	5,8	2,3	91,9	6,4	1,2	92,5
19	Nusa Tenggara Timur	43,0	40,3	16,7	39,9	58,7	1,4	21,0	8,5	70,5	21,3	4,6	74,2
20	Kalimantan Barat	43,9	12,2	43,9	37,8	60,2	2,0	8,1	7,3	84,6	8,9	1,2	89,8
21	Kalimantan Tengah	34,0	31,0	35,0	32,0	63,5	4,4	3,4	0,0	96,6	3,0	1,5	95,6
22	Kalimantan Selatan	39,0	11,9	49,2	61,0	34,7	4,2	7,2	4,2	88,6	4,2	0,8	94,9
23	Kalimantan Timur	28,9	16,6	54,5	63,6	19,8	16,6	29,4	9,6	61,0	31,0	5,3	63,6
24	Kalimantan Utara	37,9	24,1	37,9	72,4	25,9	1,7	32,8	6,9	60,3	36,2	5,2	58,6
25	Sulawesi Utara	27,8	11,1	61,1	35,9	61,6	2,5	18,7	7,1	74,2	19,2	21,7	59,1
26	Sulawesi Tengah	50,2	20,8	29,0	40,6	56,0	3,4	4,3	2,4	93,2	1,9	0,5	97,6
27	Sulawesi Selatan	42,1	22,2	35,6	66,5	18,4	15,1	14,7	5,6	79,7	11,4	4,1	84,4
28	Sulawesi Tenggara	49,7	28,4	21,9	48,6	49,3	2,1	16,4	16,8	66,8	14,0	8,9	77,1
29	Gorontalo	59,1	20,4	20,4	58,1	41,9	0,0	16,1	7,5	76,3	12,9	1,1	86,0
30	Sulawesi Barat	36,1	26,8	37,1	61,9	30,9	7,2	13,4	3,1	83,5	9,3	2,1	88,7
31	Maluku	38,9	37,6	23,5	22,6	77,0	0,4	11,1	16,4	72,6	15,5	32,7	51,8
32	Maluku Utara	52,7	21,2	26,0	32,2	66,4	1,4	24,0	13,7	62,3	17,1	2,7	80,1
33	Papua Barat	34,1	48,8	17,1	24,4	75,6	0,0	17,7	25,6	56,7	23,8	29,9	46,3
34	Papua	30,3	57,4	12,3	23,7	75,5	0,7	23,0	31,2	45,8	23,7	41,4	34,9
Indonesia		**31,0**	**14,1**	**55,0**	**56,3**	**33,8**	**9,9**	**16,2**	**12,0**	**71,8**	**13,7**	**7,3**	**79,0**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.f

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	Sumatera Utara	4	19	124	0	15		1.989	1.991	161	217	46	110	20	58	88		4.838	627	627
2	Sumatera Barat	1	5	31	0	14		346	260	41	39	13	30	2	18	18		817	452	452
3	Sumatera Selatan	1	5	41	0	6		367	449	68	43	21	21	3	18	25		1.067	286	286
4	Lampung	1	3	23	1	2		176	338	22	18	16	19		18	17		653	196	196
5	Nusa Tenggara Barat	1	14	59	0	10	1	441	273	81	25	19	36	2	43	53		1.057	386	386
6	Nusa Tenggara Timur	13	80	448	1	72	6	5.303	3.692	583	636	463	576	41	556	521	1	12.979	3.338	16.317
7	Sulawesi Tengah	3	27	120	1	30	2	1.262	1.174	212	281	143	79	7	41	85		3.464	730	4.194
8	Maluku	6	25	179	1	13	1	2.546	1.033	141	316	249	280	10	28	143		4.965	867	5.832
9	Maluku Utara	2	7	36	0	3		362	286	43	113	26	34	2	4	16		932	110	1.042
10	Papua Barat	8	48	334	2	35	4	3.438	1.667	353	375	165	201	16	76	317	68	7.099	2.341	9.440
11	Papua	22	32	115	0	11		1.334	661	119	130	50	87	9	20	97		2.665	790	3.455
Indonesia		**62**	**265**	**1.510**	**6**	**211**	**14**	**17.564**	**11.824**	**1.824**	**2.193**	**1.211**	**1.473**	**112**	**880**	**1.380**	**69**	**40.536**	**10.123**	**42.227**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 11.g

JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter	Dokter Spesialis	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(6)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*
1	Aceh	4.040	786	684	41	5.551
2	Sumatera Utara	11.633	2.635	2.179	169	16.616
3	Sumatera Barat	3.913	1.014	1.031	41	5.999
4	Riau	4.758	815	915	49	6.537
5	Jambi	2.083	343	306	15	2.747
6	Sumatera Selatan	4.042	1.104	700	44	5.890
7	Bengkulu	1.022	160	160	8	1.350
8	Lampung	2.979	543	316	19	3.857
9	Kepulauan Bangka Belitung	572	162	131	15	880
10	Kepulauan Riau	1.259	317	309	23	1.908
11	DKI Jakarta	20.062	8.054	6.003	1.167	35.286
12	Jawa Barat	23.078	5.696	5.302	732	34.808
13	Jawa Tengah	14.122	4.215	2.507	246	21.090
14	DI Yogyakarta	4.276	1.588	1.149	325	7.338
15	Jawa Timur	17.531	5.960	5.078	917	29.486
16	Banten	7.537	1.820	2.153	223	11.733
17	Bali	4.829	1.688	1.215	74	7.806
18	Nusa Tenggara Barat	1.615	319	240	19	2.193
19	Nusa Tenggara Timur	1.139	204	232	9	1.584
20	Kalimantan Barat	1.532	331	245	21	2.129
21	Kalimantan Tengah	959	214	157	14	1.344
22	Kalimantan Selatan	1.658	492	402	30	2.582
23	Kalimantan Timur	2.252	669	546	54	3.521
24	Kalimantan Utara	295	87	80	8	470
25	Sulawesi Utara	3.068	677	308	13	4.066
26	Sulawesi Tengah	1.126	223	168	6	1.523
27	Sulawesi Selatan	5.649	1.915	1.619	167	9.350
28	Sulawesi Tenggara	814	188	231	10	1.243
29	Gorontalo	353	112	66	4	535
30	Sulawesi Barat	183	54	85	9	331
31	Maluku	620	112	89	9	830
32	Maluku Utara	298	57	49	6	410
33	Papua Barat	374	80	55	3	512
34	Papua	1.200	222	127	10	1.559
Indonesia		**150.871**	**42.856**	**34.837**	**4.500**	**233.064**

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2021

Lampiran 11.h

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2018- 2020

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	18	15	2
2	Sumatera Utara	43	34	2
3	Sumatera Barat	11	16	7
4	Riau	24	12	4
5	Jambi	10	5	1
6	Sumatera Selatan	23	8	5
7	Bengkulu	9	4	2
8	Lampung	11	6	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	8	3
10	Kepulauan Riau	3	8	4
11	DKI Jakarta	1	0	0
12	Jawa Barat	52	27	5
13	Jawa Tengah	7	13	3
14	DI Yogyakarta	1	1	0
15	Jawa Timur	11	14	6
16	Banten	6	6	1
17	Bali	5	12	0
18	Nusa Tenggara Barat	14	13	4
19	Nusa Tenggara Timur	21	14	14
20	Kalimantan Barat	11	4	9
21	Kalimantan Tengah	20	8	7
22	Kalimantan Selatan	20	11	4
23	Kalimantan Timur	5	5	1
24	Kalimantan Utara	11	7	0
25	Sulawesi Utara	3	4	0
26	Sulawesi Tengah	14	15	12
27	Sulawesi Selatan	14	10	0
28	Sulawesi Tenggara	25	5	7
29	Gorontalo	7	3	0
30	Sulawesi Barat	7	2	0
31	Maluku	5	7	2
32	Maluku Utara	23	15	6
33	Papua Barat	17	12	4
34	Papua	30	15	11
Indonesia		**490**	**339**	**127**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.i

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM BATCH XV-XVI (PERIODE I-III TAHUN 2020)

No	Provinsi	Batch XV (Peride I Tahun 2020)		Batch XVI (Periode II Tahun 2020)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh			2	2
2	Sumatera Utara	1	1	1	2
3	Sumatera Barat				
4	Riau				
5	Jambi				
6	Sumatera Selatan				
7	Bengkulu				
8	Lampung	1	2		
9	Kepulauan Bangka Belitung				
10	Kepulauan Riau				
11	Jawa Barat				
12	Jawa Timur				
13	Nusa Tenggara Barat				
14	Nusa Tenggara Timur	4	4		
15	Kalimantan Barat				
16	Kalimantan Tengah	1	2		
17	Kalimantan Selatan				
18	Kalimantan Timur				
19	Kalimantan Utara				
20	Sulawesi Utara				
21	Sulawesi Tengah	1	1	1	2
22	Sulawesi Selatan	1	1	1	1
23	Sulawesi Tenggara			1	1
24	Gorontalo				
25	Sulawesi Barat				
26	Maluku	1	3	2	4
27	Maluku Utara	1	2		
28	Papua Barat	1	1		
29	Papua	1	1	1	2
Indonesia		**13**	**18**	**9**	**14**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.j

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XV SAMPAI DENGAN BATCH XVI/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	1	1	2	1	1	2	2	2	2	14
2	Sumatera Utara	3	2	3	3	3	1	3	3	1	22
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	2	2	1	1	2	1	2	2	2	15
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	4	3	2	3	4	0	4	3	4	27
15	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kalimantan Tengah	2	0	2	2	2	1	2	1	2	14
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Sulawesi Tengah	1	0	3	2	3	1	2	3	3	18
22	Sulawesi Selatan	2	0	2	2	2	1	2	1	2	14
23	Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	0	0	0	1	0	5
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	3	2	6	7	7	5	5	6	7	48
27	Maluku Utara	2	1	1	2	1	2	2	0	2	13
28	Papua Barat	1	0	1	0	1	1	1	1	1	7
29	Papua	0	1	3	3	3	2	3	3	3	21
Indonesia		**22**	**13**	**27**	**27**	**29**	**17**	**28**	**26**	**29**	**218**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.k

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2020

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	3	10					11	57	11	25
2	Sumatera Utara	2	11					9	22	6	11
3	Sumatera Barat	2	3					11	42	2	2
4	Riau									10	22
5	Jambi	1	3							9	39
6	Sumatera Selatan	4	13							1	3
7	Bengkulu	3	5					5	17	7	23
8	Lampung	1	2					2	7	3	7
9	Kep. Bangka Belitung										
10	Kepulauan Riau	3	9					4	9	4	9
11	Jawa Barat							1	4	1	4
12	Jawa Tengah	1	1							1	1
13	Jawa Timur	2	2					1	3	3	6
14	Banten									1	8
15	Nusa Tenggara Barat							4	9	3	5
16	Nusa Tenggara Timur	4	9					6	14	11	49
17	Kalimantan Barat	1	1							6	27
18	Kalimantan Tengah	2	2					6	10	2	6
19	Kalimantan Selatan									1	2
20	Kalimantan Timur	1	3					4	9	2	5
21	Kalimantan Utara							2	2		
22	Sulawesi Utara	4	15					3	8	5	13
23	Sulawesi Tengah	8	18					6	20	7	13
24	Sulawesi Selatan	1	2					14	57	13	29
25	Sulawesi Tenggara	3	5					9	41	8	17
26	Gorontalo	2	2					3	12	3	6
27	Sulawesi Barat	2	2					3	14	3	12
28	Maluku	2	5					6	26	6	40
29	Maluku Utara	3	7					4	18	3	6
30	Papua Barat	1	2					2	4	2	4
31	Papua	1	1	3	11	1	5	3	7	3	9
Indonesia		**57**	**133**	**3**	**11**	**1**	**5**	**119**	**412**	**137**	**403**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.l

JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-V TAHUN 2020) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Tenaga											Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Psikologi Klinis	Elektromedik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	14	15	15	12	26	23	17	40	27			189
2	Sumatera Utara	7	4	10	2	8	9	15	11	10			76
3	Sumatera Barat	10	2	20	7	13	5	8	7	6			78
4	Riau	3	1	2	13	3	8	8	7	3			48
5	Jambi	13	0	15	5	8	5	12	15	8			81
6	Sumatera Selatan	2	0	2	2	5	0	0	7	2			20
7	Bengkulu	8	7	7	2	18	0	15	13	25			95
8	Lampung	1	0	1	0	3	2	4	7	5			23
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
10	Kepulauan Riau	20	1	37	5	13	10	8	12	15	3		124
11	DKI Jakarta	47		176		94	3	29	4	67	3	3	426
12	Jawa Barat	9	1	6	0	4	1	4	5	3			33
13	Jawa Tengah	1	0	12	3	0	0	0	1	24			41
14	Jawa Timur	3	3	0	2	3	1	3	3	0			18
15	Banten	0	0	8	0	0	0	0	0	0			8
16	Nusa Tenggara Barat	5	2	6	2	12	6	3	2	7			45
17	Nusa Tenggara Timur	17	1	13	25	19	12	2	18	14			121
18	Kalimantan Barat	2	1	13	14	2	7	5	5	4			53
19	Kalimantan Tengah	2	0	2	2	3	8	4	1	3			25
20	Kalimantan Selatan	0	0	1	2	1	0	0	0	0			4
21	Kalimantan Timur	5	0	1	3	3	2	4	5	0			23
22	Kalimantan Utara	0	0	0	1	0	0	1	0	0			2
23	Sulawesi Utara	7	3	17	8	9	9	2	16	16			87
24	Sulawesi Tengah	16	3	5	8	5	5	10	11	5			68
25	Sulawesi Selatan	18	4	41	12	32	22	27	41	48			245
26	Sulawesi Tenggara	10	3	23	15	15	3	12	15	18			114
27	Gorontalo	2	0	7	3	3	2	1	3	5			26
28	Sulawesi Barat	0	2	3	16	3	2	2	6	6			40
29	Maluku	9	1	16	17	16	25	12	10	11			117
30	Maluku Utara	8	0	8	3	5	3	6	7	3			43
31	Papua Barat	2	0	0	0	4	3	0	2	3			14
32	Papua	1	1	6	7	12	13	6	9	3			58
Indonesia		**242**	**55**	**473**	**191**	**342**	**189**	**220**	**283**	**341**	**6**	**3**	**2.345**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.m

JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSHIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Pemberangkatan				Jumlah
		Februari	Mei	Agustus-September	November	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	14	0	140	63	217
2	Sumatera Utara	126	65	152	96	439
3	Sumatera Barat	69	71	83	72	295
4	Riau	83	69	117	60	329
5	Jambi	70	20	87	24	201
6	Sumatera Selatan	104	45	129	121	399
7	Bengkulu	96	25	42	60	223
8	Lampung	28	56	109	24	217
9	Kepulauan Bangka Belitung	42	5	37	38	122
10	Kepulauan Riau	42	40	54	70	206
11	DKI Jakarta	112	101	198	153	564
12	Jawa Barat	235	203	479	276	1.193
13	Jawa Tengah	278	145	365	366	1.154
14	DI Yogyakarta	28	67	116	90	301
15	Jawa Timur	579	100	334	301	1.314
16	Banten	96	0	190	39	325
17	Bali	135	72	78	69	354
18	Nusa Tenggara Barat	26	24	54	25	129
19	Nusa Tenggara Timur	102	27	67	43	239
20	Kalimantan Barat	58	19	44	20	141
21	Kalimantan Tengah	24	15	30	32	101
22	Kalimantan Selatan	55	26	26	39	146
23	Kalimantan Timur	84	37	75	81	277
24	Kalimantan Utara	14	0	15	9	38
25	Sulawesi Utara	74	71	48	8	201
26	Sulawesi Tengah	60	45	28	22	155
27	Sulawesi Selatan	84	85	156	90	415
28	Sulawesi Tenggara	40	22	32	33	127
29	Gorontalo	42	12	32	35	121
30	Sulawesi Barat	14		5	24	43
31	Maluku	18	28	35	27	108
32	Maluku Utara	7	14	11	17	49
33	Papua Barat	23	28	47	28	126
34	Papua	48	7	21	15	91
Indonesia		**2.910**	**1.544**	**3.436**	**2.470**	**10.360**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 11.n

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Patologi Klinik	Total
		PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	1	0	2	1	4	0	7	1	3	0	1	20
2	Sumatera Utara	6	0	3	1	7	0	3	2	1	0	0	23
3	Sumatera Barat	3	0	1	5	1	0	0	1	2	1	0	14
4	Riau	0	2	1	2	1	4	2	2	2	0	0	16
5	Jambi	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	0	7
6	Sumatera Selatan	4	1	4	0	5	0	1	3	0	2	0	20
7	Bengkulu	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	8
8	Lampung	0	2	3	2	2	2	2	1	4	1	0	19
9	Kep. Bangka Belitung	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4
10	Kepulauan Riau	0	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	6
11	DKI Jakarta	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
12	Jawa Barat	0	5	2	5	3	3	0	3	1	1	0	23
13	Jawa Tengah	6	3	1	5	3	1	1	0	0	2	0	22
14	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
15	Jawa Timur	12	3	4	2	4	3	7	0	2	0	0	37
16	Banten	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	4
17	Bali	1	2	1	2	3	2	1	3	0	2	1	18
18	Nusa Tenggara Barat	1	4	0	3	3	5	0	2	0	0	1	19
19	Nusa Tenggara Timur	2	4	3	3	4	3	5	3	0	0	0	27
20	Kalimantan Barat	2	1	0	3	2	3	1	1	0	2	0	15
21	Kalimantan Tengah	1	2	1	3	1	4	4	5	0	3	1	25
22	Kalimantan Selatan	3	2	1	1	4	0	3	1	3	1	1	20
23	Kalimantan Timur	2	1	0	1	1	1	2	1	1	0	1	11
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
25	Sulawesi Utara	2	2	0	0	4	1	2	1	2	0	0	14
26	Sulawesi Tengah	2	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	9
27	Sulawesi Selatan	0	0	2	0	3	1	0	1	1	0	0	8
28	Sulawesi Tenggara	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	2	10
29	Gorontalo	2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6
30	Sulawesi Barat	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	7
31	Maluku	3	3	1	2	1	3	2	2	1	0	2	20
32	Maluku Utara	2	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	7
33	Papua Barat	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	6
34	Papua	7	1	5	1	3	1	4	2	2	1	0	27
35	TNI/POLRI	4	0	6	0	6	0	2	0	4	0	1	23
Indonesia		**81**	**45**	**51**	**50**	**72**	**48**	**55**	**40**	**36**	**19**	**13**	**510**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 12.a

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat[a]			Bidan	Perawat[a]			Bidan	Perawat[a]			Bidan	Perawat[a]			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2.107	5.202	7.309	13.305	2.502	4.984	7.486	3.500	131	104	235	166	4.740	10.290	15.030	16.971
2	Sumatera Utara	2.085	5.237	7.322	15.630	3.017	8.885	11.902	4.072	130	183	313	254	5.232	14.305	19.537	19.956
3	Sumatera Barat	487	2.315	2.802	5.360	1.172	5.393	6.565	1.371	50	162	212	145	1.709	7.870	9.579	6.876
4	Riau	903	2.535	3.438	4.898	1.451	4.046	5.497	1.795	52	97	149	149	2.406	6.678	9.084	6.842
5	Jambi	1.032	2.384	3.416	4.913	1.027	2.857	3.884	1.181	123	177	300	266	2.182	5.418	7.600	6.360
6	Sumatera Selatan	1.503	4.414	5.917	9.773	1.641	5.960	7.601	2.400	113	156	269	184	3.257	10.530	13.787	12.357
7	Bengkulu	585	1.465	2.050	2.848	746	1.621	2.367	860	57	88	145	96	1.388	3.174	4.562	3.804
8	Lampung	1.710	2.550	4.260	7.461	2.096	3.701	5.797	1.669	112	147	259	254	3.918	6.398	10.316	9.384
9	Kep. Bangka Belitung	307	703	1.010	940	618	1.386	2.004	424	104	163	267	102	1.029	2.252	3.281	1.466
10	Kepulauan Riau	291	867	1.158	1.309	716	2.158	2.874	693	51	78	129	51	1.058	3.103	4.161	2.053
11	DKI Jakarta	500	1.449	1.949	1.867	5.452	23.174	28.626	3.436	614	1.038	1.652	1.017	6.566	25.661	32.227	6.320
12	Jawa Barat	4.705	6.058	10.763	15.888	12.963	28.801	41.764	7.517	618	927	1.545	1.618	18.286	35.786	54.072	25.023
13	Jawa Tengah	3.564	5.858	9.422	16.096	12.132	27.407	39.539	6.976	1.055	2.622	3.677	2.537	16.751	35.887	52.638	25.609
14	DI Yogyakarta	281	647	928	953	1.758	5.964	7.722	1.064	99	415	514	313	2.138	7.026	9.164	2.330
15	Jawa Timur	6.373	8.568	14.941	16.394	13.023	25.224	38.247	7.514	952	1.693	2.645	1.318	20.348	35.485	55.833	25.226
16	Banten	1.045	1.356	2.401	3.884	2.648	7.703	10.351	2.133	157	236	393	445	3.850	9.295	13.145	6.462
17	Bali	539	1.115	1.654	2.368	2.431	5.736	8.167	2.123	216	508	724	407	3.186	7.359	10.545	4.898
18	Nusa Tenggara Barat	1.842	2.769	4.611	4.310	1.507	2.561	4.068	1.167	175	142	317	90	3.524	5.472	8.996	5.567
19	Nusa Tenggara Timur	1.671	3.841	5.512	5.640	780	2.709	3.489	1.173	73	82	155	48	2.524	6.632	9.156	6.861
20	Kalimantan Barat	1.868	2.104	3.972	3.694	1.522	2.737	4.259	1.024	96	95	191	119	3.486	4.936	8.422	4.837
21	Kalimantan Tengah	1.550	2.099	3.649	3.020	963	1.829	2.792	732	104	94	198	76	2.617	4.022	6.639	3.828
22	Kalimantan Selatan	1.090	1.492	2.582	3.370	2.170	3.084	5.254	1.303	144	99	243	88	3.404	4.675	8.079	4.761
23	Kalimantan Timur	797	1.595	2.392	2.292	1.762	4.256	6.018	1.253	39	88	127	67	2.598	5.939	8.537	3.612
24	Kalimantan Utara	321	594	915	713	297	693	990	271	37	50	87	25	655	1.337	1.992	1.009
25	Sulawesi Utara	409	2.080	2.489	1.467	1.030	3.451	4.481	659	74	165	239	33	1.513	5.696	7.209	2.159
26	Sulawesi Tengah	972	2.187	3.159	3.946	953	2.576	3.529	1.209	118	130	248	60	2.043	4.893	6.936	5.215
27	Sulawesi Selatan	1.369	5.488	6.857	8.203	2.395	9.214	11.609	2.933	168	337	505	246	3.932	15.039	18.971	11.382
28	Sulawesi Tenggara	961	2.709	3.670	3.879	752	2.084	2.836	965	48	90	138	69	1.761	4.883	6.644	4.913
29	Gorontalo	257	691	948	1.027	417	1.052	1.469	455	39	52	91	46	713	1.795	2.508	1.528
30	Sulawesi Barat	486	1.341	1.827	2.405	307	874	1.181	445	24	56	80	56	817	2.271	3.088	2.906
31	Maluku	695	1.871	2.566	1.415	434	1.522	1.956	474	72	116	188	45	1.201	3.509	4.710	1.934
32	Maluku Utara	448	872	1.320	1.919	303	856	1.159	453	35	47	82	33	786	1.775	2.561	2.405
33	Papua Barat	575	1.079	1.654	1.063	396	965	1.361	365	25	22	47	17	996	2.066	3.062	1.445
34	Papua	1.374	2.116	3.490	2.201	669	1.819	2.488	632	100	85	185	72	2.143	4.020	6.163	2.905
Indonesia		**44.702**	**87.651**	**132.353**	**174.451**	**82.050**	**207.282**	**289.332**	**64.241**	**6.005**	**10.544**	**16.549**	**10.512**	**132.757**	**305.477**	**438.234**	**249.204**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Jumlah termasuk S3;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 12.b

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	1.137	654	5	1	4	0	21	86	7	0	0	0	22	0	5	21	0	0	109	0	25	5	14	0	0	0	4	2.120
2	Sumatera Utara	1.438	1.625	17	11	13	1	43	130	10	3	4	0	74	0	0	54	0	14	4	0	95	27	90	0	0	0	11	3.664
3	Sumatera Barat	695	375	7	2	1	0	20	85	15	2	1	0	49	0	3	23	1	2	3	0	10	16	37	0	1	0	8	1.356
4	Riau	497	401	4	17	1	2	41	59	23	0	0	1	16	0	1	3	0	0	33	0	5	2	18	0	0	0	3	1.127
5	Jambi	633	496	4	1	0	0	9	97	29	2	2	0	60	0	0	10	4	0	5	0	12	5	93	0	0	0	6	1.468
6	Sumatera Selatan	300	203	1	2	2	3	5	8	8	1	2	0	10	0	1	5	2	2	2	0	7	1	9	0	0	0	3	577
7	Bengkulu	156	64	3	4	0	5	0	12	6	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	9	2	6	0	0	0	3	276
8	Lampung	1.046	810	8	10	1	0	29	44	43	3	0	0	23	0	2	4	0	1	13	0	18	0	53	0	0	0	6	2.114
9	Kep. Bangka Belitung	299	343	6	64	0	1	29	80	5	1	0	0	16	0	0	1	0	0	3	0	6	0	45	0	0	0	1	900
10	Kepulauan Riau	927	739	6	9	0	0	36	28	11	3	0	2	32	0	3	3	4	1	43	0	49	7	131	0	0	0	1	2.035
11	DKI Jakarta	866	745	6	4	4	1	3	85	30	8	2	1	52	8	13	23	3	1	6	0	6	10	54	0	1	0	20	1.952
12	Jawa Barat	1.309	472	17	5	7	11	19	151	99	17	4	7	100	2	26	103	4	0	27	0	16	86	175	9	2	1	49	2.718
13	Jawa Tengah	3.806	1.676	22	84	23	3	46	255	137	31	19	5	291	8	23	75	1	145	87	0	48	26	425	5	4	0	44	7.289
14	DI Yogyakarta	3.584	805	16	30	10	5	33	297	268	61	44	33	439	0	54	35	0	13	14	0	28	121	355	0	29	6	29	6.309
15	Jawa Timur	586	296	7	3	3	1	7	69	41	1	5	1	114	0	8	3	2	26	4	0	24	19	32	0	0	0	22	1.274
16	Banten	9.364	4.156	5	2	3	4	83	656	345	10	10	21	383	0	19	73	13	7	57	0	179	44	1.329	8	3	37	34	16.845
17	Bali	883	199	0	1	0	0	13	35	54	0	2	3	12	0	6	16	1	1	9	0	3	3	11	0	0	0	7	1.259
18	Nusa Tenggara Barat	790	374	2	6	3	1	12	57	36	1	1	0	75	0	11	4	0	0	3	0	23	8	90	0	3	0	3	1.503
19	Nusa Tenggara Timur	867	767	9	4	8	0	27	69	6	0	0	0	25	0	11	4	1	0	26	0	11	7	48	0	0	0	0	1.890
20	Kalimantan Barat	662	512	7	1	3	1	15	48	14	0	2	0	35	0	1	4	0	0	28	0	6	5	96	0	0	0	8	1.448
21	Kalimantan Tengah	430	274	4	6	1	1	13	18	27	0	1	1	13	0	0	19	0	1	9	0	13	8	87	0	0	0	8	934
22	Kalimantan Selatan	589	282	2	5	5	0	18	25	22	5	2	0	12	0	2	3	1	1	9	0	14	5	41	1	0	0	13	1.057
23	Kalimantan Timur	373	236	2	0	4	0	3	14	14	0	0	0	9	0	0	2	0	0	1	0	5	3	46	0	0	0	0	712
24	Kalimantan Utara	700	271	0	0	0	0	17	29	9	0	0	0	3	0	3	4	1	0	10	0	7	1	16	0	0	0	1	1.072
25	Sulawesi Utara	379	294	0	4	2	2	0	22	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	5	1	3	1	0	0	0	718
26	Sulawesi Tengah	616	587	10	0	28	0	27	43	11	1	0	0	3	0	5	0	0	1	3	0	8	3	34	1	0	0	2	1.383
27	Sulawesi Selatan	130	169	1	1	0	0	7	18	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	1	343
28	Sulawesi Tenggara	1.632	1.681	3	5	22	1	69	24	122	3	0	0	113	1	2	14	0	2	53	0	61	14	147	1	0	0	6	3.976
29	Gorontalo	512	432	6	16	56	1	40	52	11	0	0	0	20	1	2	2	1	0	31	0	8	11	59	0	0	0	1	1.262
30	Sulawesi Barat	234	240	1	0	0	0	14	20	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	4	1	33	0	0	0	0	553
31	Maluku	394	226	2	0	4	0	19	24	6	0	0	0	5	0	2	0	0	0	9	0	4	0	34	0	0	0	1	730
32	Maluku Utara	223	120	0	1	4	0	7	15	2	0	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	3	2	12	0	0	0	1	398
33	Papua Barat	310	217	17	0	2	0	4	24	2	0	0	0	5	0	0	2	0	0	2	0	5	2	54	0	0	0	0	646
34	Papua	139	69	0	0	0	0	5	5	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	6	0	0	0	3	235
Indonesia		**36.506**	**20.810**	**200**	**299**	**214**	**44**	**734**	**2.684**	**1.425**	**153**	**101**	**75**	**2.022**	**20**	**205**	**515**	**40**	**218**	**611**	**0**	**722**	**446**	**3.687**	**26**	**43**	**44**	**299**	**72.143**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2021

Keterangan: registrasi baru adalah tenaga kesehatan yang baru teregistrasi pada tahun 2020.

Lampiran 12.c

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	2.935	3.706	7	55	1	0	89	120	33	0	1	0	24	0	4	9	0	5	142	0	26	27	303	0	0	0	4	7.491
2	Sumatera Utara	4.703	7.440	3	34	6	0	66	182	86	0	1	0	62	3	7	28	1	17	264	0	78	37	441	2	0	0	4	13.465
3	Sumatera Barat	1.300	2.181	0	16	3	0	49	64	23	0	0	0	29	1	2	30	0	13	44	0	25	12	178	4	0	0	4	3.978
4	Riau	1.506	1.999	0	43	0	0	84	43	24	0	0	0	16	0	2	5	2	5	96	0	15	3	227	0	0	0	2	4.072
5	Jambi	1.264	1.478	2	8	1	0	25	75	32	1	1	0	70	1	6	12	2	8	79	0	42	6	152	1	0	0	0	3.266
6	Sumatera Selatan	352	284	0	2	0	2	12	11	3	0	1	0	22	0	3	4	0	0	40	0	24	5	34	0	0	0	0	799
7	Bengkulu	674	216	0	5	1	6	7	31	7	0	0	0	21	0	2	8	0	5	14	0	12	0	55	0	0	0	1	1.065
8	Lampung	2.309	3.075	2	17	3	0	109	89	25	0	4	1	20	0	9	17	1	9	62	0	73	7	253	0	0	0	6	6.091
9	Kep. Bangka Belitung	496	813	0	43	0	0	19	34	1	0	0	1	0	0	0	3	0	3	44	0	15	0	54	0	0	0	0	1.526
10	Kepulauan Riau	1.642	3.037	2	32	0	2	33	27	16	0	0	0	15	0	5	3	0	3	169	0	36	0	138	0	0	0	0	5.160
11	DKI Jakarta	1.988	1.462	2	1	4	1	10	21	23	1	6	0	40	4	18	19	0	9	38	0	65	1	150	4	0	0	0	3.867
12	Jawa Barat	5.523	1.391	0	13	5	4	39	301	110	17	28	2	167	16	71	38	7	6	189	0	166	12	413	18	3	0	18	8.557
13	Jawa Tengah	10.970	7.250	0	57	9	7	108	197	131	3	26	0	171	0	34	66	5	69	219	0	194	14	787	11	2	0	8	20.338
14	DI Yogyakarta	7.945	4.090	4	66	15	2	202	282	305	20	17	12	424	2	65	33	1	49	130	0	285	56	635	3	10	0	39	14.692
15	Jawa Timur	1.841	756	1	15	5	4	38	102	73	2	6	4	71	0	102	9	0	2	76	0	32	14	190	5	0	0	19	3.367
16	Banten	2.127	3.748	4	16	2	6	34	84	57	8	7	2	182	0	82	48	10	27	96	0	50	86	272	1	0	2	10	6.961
17	Bali	1.388	1.146	3	3	0	0	25	24	26	0	1	0	16	0	10	5	1	13	70	0	78	3	171	2	0	0	2	2.987
18	Nusa Tenggara Barat	948	1.242	0	40	1	0	20	70	54	1	0	0	43	0	4	3	0	7	109	0	24	10	203	1	0	0	0	2.780
19	Nusa Tenggara Timur	514	1.470	0	22	2	0	13	22	9	0	0	0	23	0	10	6	0	4	71	0	1	2	109	0	0	0	0	2.278
20	Kalimantan Barat	880	1.291	0	5	6	3	39	24	18	0	2	0	25	0	3	5	0	4	96	0	13	3	75	0	0	0	0	2.492
21	Kalimantan Tengah	1.208	705	0	30	3	1	41	80	12	0	0	0	52	0	6	5	2	7	86	0	22	9	120	0	0	0	4	2.393
22	Kalimantan Selatan	1.891	1.073	0	46	5	0	20	35	30	0	4	0	27	0	4	5	1	7	38	0	32	1	175	2	0	0	3	3.399
23	Kalimantan Timur	695	489	0	7	0	2	20	26	6	0	0	0	9	0	0	1	0	2	75	0	18	0	137	0	0	0	1	1.488
24	Kalimantan Utara	661	618	0	5	4	0	19	63	3	0	1	0	3	0	10	0	0	17	36	0	13	0	34	0	1	0	0	1.488
25	Sulawesi Utara	385	58	0	2	20	4	15	59	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	18	0	8	2	17	0	0	0	0	594
26	Sulawesi Tengah	1.058	1.084	0	5	11	0	22	27	8	0	0	0	0	0	0	2	0	2	41	0	12	1	55	0	0	0	0	2.328
27	Sulawesi Selatan	238	462	0	2	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	4	0	21	0	0	0	0	741
28	Sulawesi Tenggara	3.769	2.654	0	19	24	0	48	97	167	3	0	0	105	0	5	6	2	18	180	0	60	15	412	0	2	0	0	7.586
29	Gorontalo	1.190	1.495	1	99	163	0	36	137	16	1	0	0	13	0	1	0	0	3	54	0	23	0	74	0	0	0	0	3.306
30	Sulawesi Barat	252	462	0	4	1	0	5	8	7	0	0	0	1	0	0	0	3	6	2	0	10	1	41	0	0	0	0	803
31	Maluku	155	212	0	4	3	0	8	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	2	0	14	0	0	0	0	436
32	Maluku Utara	179	103	0	2	3	0	5	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	308
33	Papua Barat	272	399	0	1	4	0	8	37	5	0	0	0	4	0	1	1	0	2	8	0	10	1	68	0	0	0	0	821
34	Papua	284	146	0	0	1	0	3	5	2	0	0	0	4	0	2	1	0	1	8	0	9	2	15	0	0	0	0	483
Indonesia		**63.542**	**58.035**	**31**	**719**	**307**	**44**	**1.272**	**2.405**	**1.322**	**57**	**106**	**22**	**1.662**	**27**	**470**	**372**	**39**	**328**	**2.606**	**0**	**1.481**	**330**	**6.030**	**54**	**18**	**2**	**125**	**141.406**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2021

Keterangan: registrasi ulang terdiri dari perpanjangan, naik level, alih profesi, dan rekognisi pembelajaran lampau.

Lampiran 12.d

JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2020

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1	2		3
2	Sumatera Utara	5	4		9
3	Sumatera Barat			1	1
4	Riau				0
5	Jambi				0
6	Sumatera Selatan				0
7	Bengkulu		1		1
8	Lampung	2	1	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung				0
10	Kepulauan Riau		1		1
11	DKI Jakarta				0
12	Jawa Barat	6			6
13	Jawa Tengah	3			3
14	DI Yogyakarta				0
15	Jawa Timur	5			5
16	Banten				0
17	Bali				0
18	Nusa Tenggara Barat				0
19	Nusa Tenggara Timur		1		1
20	Kalimantan Barat				0
21	Kalimantan Tengah				0
22	Kalimantan Selatan				0
23	Kalimantan Timur				0
24	Kalimantan Utara				0
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah				0
27	Sulawesi Selatan			1	1
28	Sulawesi Tenggara		1		1
29	Gorontalo				0
30	Sulawesi Barat				0
31	Maluku			1	1
32	Maluku Utara				0
33	Papua Barat			6	6
34	Papua				0
Indonesia		**23**	**13**	**11**	**47**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	692	2.122	2.814	286	956	1.242	93	924	1.017
2	Sumatera Utara	517	1.984	2.501	271	519	790	126	1.146	1.272
3	Sumatera Barat	172	647	819	151	413	564	83	858	941
4	Riau	242	665	907	108	228	336	38	552	590
5	Jambi	235	516	751	161	307	468	43	399	442
6	Sumatera Selatan	402	1.252	1.654	157	601	758	71	740	811
7	Bengkulu	278	672	950	127	152	279	55	413	468
8	Lampung	260	567	827	202	408	610	86	540	626
9	Kepulauan Bangka Belitung	91	206	297	41	120	161	40	197	237
10	Kepulauan Riau	101	177	278	103	185	288	22	199	221
11	DKI Jakarta	101	279	380	236	402	638	165	1.204	1.369
12	Jawa Barat	878	1.680	2.558	544	1.018	1.562	412	2.376	2.788
13	Jawa Tengah	495	1.782	2.277	659	1.187	1.846	311	2.640	2.951
14	DI Yogyakarta	75	267	342	160	221	381	87	563	650
15	Jawa Timur	375	1.599	1.974	547	1.120	1.667	451	2.962	3.413
16	Banten	186	422	608	129	237	366	68	497	565
17	Bali	121	284	405	219	292	511	97	573	670
18	Nusa Tenggara Barat	209	391	600	179	393	572	123	646	769
19	Nusa Tenggara Timur	434	709	1.143	361	523	884	222	768	990
20	Kalimantan Barat	215	404	619	266	293	559	120	537	657
21	Kalimantan Tengah	163	309	472	101	148	249	61	434	495
22	Kalimantan Selatan	213	394	607	236	338	574	156	750	906
23	Kalimantan Timur	160	389	549	129	227	356	75	300	375
24	Kalimantan Utara	85	156	241	49	67	116	21	108	129
25	Sulawesi Utara	133	535	668	198	330	528	106	479	585
26	Sulawesi Tengah	504	1.313	1.817	236	402	638	70	436	506
27	Sulawesi Selatan	599	2.052	2.651	288	863	1.151	127	1.287	1.414
28	Sulawesi Tenggara	421	1.405	1.826	162	374	536	110	734	844
29	Gorontalo	122	525	647	65	148	213	66	369	435
30	Sulawesi Barat	100	393	493	70	123	193	20	237	257
31	Maluku	202	490	692	231	311	542	91	522	613
32	Maluku Utara	179	650	829	68	125	193	37	303	340
33	Papua Barat	93	222	315	69	63	132	29	179	208
34	Papua	242	470	712	199	212	411	87	375	462
Indonesia		**9.295**	**25.928**	**35.223**	**7.008**	**13.306**	**20.314**	**3.769**	**25.247**	**29.016**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 13.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	403	1.524	1.927	169	725	894	55	586	641
2	Sumatera Utara	319	1.373	1.692	145	352	497	76	653	729
3	Sumatera Barat	96	420	516	91	293	384	25	446	471
4	Riau	148	402	550	71	154	225	20	270	290
5	Jambi	147	333	480	77	213	290	30	239	269
6	Sumatera Selatan	264	840	1.104	88	423	511	41	380	421
7	Bengkulu	179	420	599	77	105	182	25	201	226
8	Lampung	200	407	607	138	298	436	63	328	391
9	Kepulauan Bangka Belitung	54	130	184	27	75	102	27	116	143
10	Kepulauan Riau	38	93	131	48	103	151	10	102	112
11	DKI Jakarta	17	86	103	118	237	355	31	365	396
12	Jawa Barat	499	1.127	1.626	336	731	1.067	137	996	1.133
13	Jawa Tengah	295	1.268	1.563	363	799	1.162	150	1.140	1.290
14	DI Yogyakarta	47	166	213	66	106	172	38	206	244
15	Jawa Timur	197	935	1.132	291	697	988	243	1.137	1.380
16	Banten	104	261	365	62	173	235	26	247	273
17	Bali	43	103	146	115	134	249	36	168	204
18	Nusa Tenggara Barat	142	280	422	111	287	398	102	413	515
19	Nusa Tenggara Timur	330	528	858	273	417	690	186	548	734
20	Kalimantan Barat	140	255	395	174	218	392	79	360	439
21	Kalimantan Tengah	106	195	301	75	105	180	41	283	324
22	Kalimantan Selatan	140	285	425	136	252	388	116	508	624
23	Kalimantan Timur	109	315	424	64	162	226	50	167	217
24	Kalimantan Utara	42	89	131	31	38	69	11	62	73
25	Sulawesi Utara	76	346	422	141	238	379	71	291	362
26	Sulawesi Tengah	271	731	1.002	143	275	418	50	279	329
27	Sulawesi Selatan	329	1.177	1.506	166	586	752	64	718	782
28	Sulawesi Tenggara	268	942	1.210	113	276	389	84	518	602
29	Gorontalo	63	339	402	39	105	144	43	239	282
30	Sulawesi Barat	71	302	373	57	101	158	18	155	173
31	Maluku	102	286	388	151	203	354	61	336	397
32	Maluku Utara	106	411	517	43	92	135	31	191	222
33	Papua Barat	48	132	180	45	38	83	20	123	143
34	Papua	138	274	412	111	127	238	60	223	283
Indonesia		**5.531**	**16.775**	**22.306**	**4.155**	**9.138**	**13.293**	**2.120**	**12.994**	**15.114**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 13.c

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	155	378	533	84	181	265	28	331	359
2	Sumatera Utara	99	360	459	78	114	192	41	465	506
3	Sumatera Barat	37	110	147	41	86	127	53	389	442
4	Riau	54	157	211	14	45	59	16	271	287
5	Jambi	36	75	111	51	66	117	13	146	159
6	Sumatera Selatan	53	180	233	44	117	161	27	335	362
7	Bengkulu	46	137	183	35	26	61	24	199	223
8	Lampung	28	88	116	35	79	114	20	196	216
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	32	44	10	23	33	10	73	83
10	Kepulauan Riau	19	33	52	23	51	74	12	97	109
11	DKI Jakarta	52	140	192	88	126	214	132	826	958
12	Jawa Barat	249	321	570	139	218	357	268	1.318	1.586
13	Jawa Tengah	56	172	228	195	285	480	140	1.359	1.499
14	DI Yogyakarta	7	38	45	74	84	158	46	344	390
15	Jawa Timur	95	395	490	195	327	522	191	1.708	1.899
16	Banten	46	113	159	41	58	99	39	246	285
17	Bali	33	90	123	63	108	171	59	376	435
18	Nusa Tenggara Barat	21	47	68	31	66	97	16	209	225
19	Nusa Tenggara Timur	41	86	127	46	66	112	29	193	222
20	Kalimantan Barat	27	76	103	55	51	106	34	160	194
21	Kalimantan Tengah	15	42	57	17	27	44	15	135	150
22	Kalimantan Selatan	32	54	86	64	68	132	38	239	277
23	Kalimantan Timur	19	40	59	42	37	79	25	130	155
24	Kalimantan Utara	15	28	43	9	14	23	9	45	54
25	Sulawesi Utara	29	104	133	32	60	92	33	179	212
26	Sulawesi Tengah	107	310	417	50	87	137	19	136	155
27	Sulawesi Selatan	118	441	559	56	162	218	52	522	574
28	Sulawesi Tenggara	46	210	256	28	59	87	17	177	194
29	Gorontalo	14	83	97	8	18	26	14	102	116
30	Sulawesi Barat	5	28	33	9	14	23	3	79	82
31	Maluku	29	94	123	36	66	102	20	148	168
32	Maluku Utara	31	128	159	12	12	24	5	92	97
33	Papua Barat	17	45	62	11	14	25	8	54	62
34	Papua	35	90	125	53	47	100	21	136	157
Indonesia		**1.678**	**4.725**	**6.403**	**1.769**	**2.862**	**4.631**	**1.477**	**11.415**	**12.892**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	122	999	1.121	260	251	511	72	301	373	233	960	1.193
2	Sumatera Utara	216	1.282	1.498	267	352	619	114	208	322	233	856	1.089
3	Sumatera Barat	180	889	1.069	245	188	433	65	148	213	248	1.149	1.397
4	Riau	131	761	892	139	161	300	52	163	215	174	455	629
5	Jambi	131	639	770	84	85	169	32	112	144	95	440	535
6	Sumatera Selatan	165	972	1.137	178	215	393	57	192	249	208	849	1.057
7	Bengkulu	112	358	470	89	58	147	15	33	48	68	152	220
8	Lampung	206	732	938	198	161	359	48	88	136	170	446	616
9	Kepulauan Bangka Belitung	81	267	348	87	48	135	13	64	77	82	242	324
10	Kepulauan Riau	80	262	342	94	76	170	24	50	74	79	174	253
11	DKI Jakarta	942	2.538	3.480	1.016	794	1.810	440	697	1.137	869	1.938	2.807
12	Jawa Barat	1.233	3.707	4.940	1.181	801	1.982	406	840	1.246	1.442	2.878	4.320
13	Jawa Tengah	969	3.882	4.851	1.153	966	2.119	526	1.016	1.542	1.216	3.634	4.850
14	DI Yogyakarta	207	794	1.001	257	223	480	135	238	373	255	974	1.229
15	Jawa Timur	947	3.890	4.837	1.009	824	1.833	403	653	1.056	1.143	2.609	3.752
16	Banten	231	828	1.059	269	255	524	111	265	376	215	524	739
17	Bali	232	679	911	320	161	481	88	75	163	170	493	663
18	Nusa Tenggara Barat	225	692	917	204	114	318	51	106	157	281	475	756
19	Nusa Tenggara Timur	253	704	957	111	91	202	37	87	124	255	758	1.013
20	Kalimantan Barat	219	554	773	119	60	179	30	63	93	271	527	798
21	Kalimantan Tengah	151	432	583	113	50	163	22	46	68	141	270	411
22	Kalimantan Selatan	233	771	1.004	164	97	261	48	67	115	232	621	853
23	Kalimantan Timur	217	616	833	139	95	234	63	96	159	125	221	346
24	Kalimantan Utara	54	129	183	48	25	73	8	16	24	52	69	121
25	Sulawesi Utara	103	239	342	55	22	77	39	82	121	83	319	402
26	Sulawesi Tengah	129	333	462	62	65	127	14	63	77	106	177	283
27	Sulawesi Selatan	306	1.219	1.525	255	371	626	100	246	346	271	1.083	1.354
28	Sulawesi Tenggara	119	436	555	69	75	144	17	76	93	99	334	433
29	Gorontalo	47	108	155	38	27	65	12	10	22	25	78	103
30	Sulawesi Barat	58	133	191	21	33	54	8	30	38	31	93	124
31	Maluku	74	268	342	38	37	75	4	31	35	33	76	109
32	Maluku Utara	67	227	294	23	50	73	10	21	31	29	54	83
33	Papua Barat	71	172	243	22	28	50	6	17	23	21	62	83
34	Papua	214	500	714	52	30	82	15	24	39	56	101	157
Indonesia		**8.725**	**31.012**	**39.737**	**8.379**	**6.889**	**15.268**	**3.085**	**6.224**	**9.309**	**9.011**	**24.091**	**33.102**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	42	413	455	6	15	21	15	97	112	95	524	619
2	Sumatera Utara	77	440	517	7	10	17	9	15	24	63	419	482
3	Sumatera Barat	57	320	377	3	3	6	6	17	23	76	514	590
4	Riau	42	254	296	0	1	1	2	23	25	25	177	202
5	Jambi	41	233	274	0	0	0	2	12	14	50	264	314
6	Sumatera Selatan	55	356	411	1	9	10	4	19	23	53	415	468
7	Bengkulu	33	141	174	5	4	9	1	1	2	2	53	55
8	Lampung	77	270	347	5	3	8	1	3	4	76	288	364
9	Kepulauan Bangka Belitung	25	92	117	1	0	1	1	0	1	30	114	144
10	Kepulauan Riau	17	63	80	1	0	1	0	1	1	7	61	68
11	DKI Jakarta	128	229	357	3	1	4	1	6	7	80	309	389
12	Jawa Barat	231	878	1.109	9	18	27	8	16	24	300	1.081	1.381
13	Jawa Tengah	227	977	1.204	20	21	41	58	146	204	317	1.178	1.495
14	DI Yogyakarta	36	190	226	1	5	6	18	27	45	55	299	354
15	Jawa Timur	235	1.061	1.296	17	20	37	34	55	89	282	881	1.163
16	Banten	42	177	219	3	1	4	4	12	16	53	162	215
17	Bali	34	109	143	5	1	6	2	2	4	66	194	260
18	Nusa Tenggara Barat	90	315	405	18	4	22	2	6	8	112	224	336
19	Nusa Tenggara Timur	163	421	584	4	3	7	7	22	29	135	461	596
20	Kalimantan Barat	99	262	361	2	1	3	1	2	3	151	328	479
21	Kalimantan Tengah	58	186	244	1	0	1	1	0	1	70	164	234
22	Kalimantan Selatan	68	319	387	3	0	3	2	3	5	99	353	452
23	Kalimantan Timur	54	233	287	0	1	1	1	3	4	45	105	150
24	Kalimantan Utara	20	41	61	0	0	0	0	1	1	26	37	63
25	Sulawesi Utara	32	63	95	2	1	3	4	22	26	41	220	261
26	Sulawesi Tengah	59	145	204	2	0	2	0	2	2	51	87	138
27	Sulawesi Selatan	77	464	541	4	8	12	5	16	21	119	544	663
28	Sulawesi Tenggara	60	219	279	3	3	6	3	13	16	40	163	203
29	Gorontalo	15	47	62	0	0	0	0	0	0	4	29	33
30	Sulawesi Barat	26	71	97	0	0	0	1	5	6	14	48	62
31	Maluku	33	125	158	2	4	6	1	3	4	12	28	40
32	Maluku Utara	35	114	149	1	5	6	1	3	4	9	29	38
33	Papua Barat	38	82	120	0	0	0	0	2	2	10	24	34
34	Papua	121	263	384	1	2	3	0	3	3	14	46	60
Indonesia		**2.447**	**9.573**	**12.020**	**130**	**144**	**274**	**195**	**558**	**753**	**2.582**	**9.823**	**12.405**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 14.c

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	75	552	627	239	234	473	56	204	260	136	420	556
2	Sumatera Utara	116	773	889	254	341	595	104	192	296	165	438	603
3	Sumatera Barat	114	509	623	239	185	424	58	130	188	166	622	788
4	Riau	82	474	556	139	159	298	50	141	191	145	272	417
5	Jambi	73	333	406	84	85	169	30	100	130	42	164	206
6	Sumatera Selatan	101	580	681	175	204	379	53	173	226	156	431	587
7	Bengkulu	71	180	251	84	54	138	14	32	46	66	99	165
8	Lampung	112	424	536	190	155	345	46	84	130	95	152	247
9	Kepulauan Bangka Belitung	45	139	184	83	45	128	12	60	72	49	124	173
10	Kepulauan Riau	54	172	226	92	75	167	23	48	71	69	113	182
11	DKI Jakarta	706	1.937	2.643	989	773	1.762	383	599	982	742	1.469	2.211
12	Jawa Barat	893	2.482	3.375	1.138	758	1.896	389	800	1.189	1.086	1.688	2.774
13	Jawa Tengah	608	2.331	2.939	1.095	880	1.975	438	790	1.228	851	2.239	3.090
14	DI Yogyakarta	129	487	616	247	210	457	117	203	320	188	603	791
15	Jawa Timur	609	2.368	2.977	969	782	1.751	358	565	923	809	1.640	2.449
16	Banten	167	592	759	259	247	506	104	249	353	152	356	508
17	Bali	163	464	627	301	148	449	74	60	134	95	263	358
18	Nusa Tenggara Barat	115	330	445	182	108	290	46	92	138	162	232	394
19	Nusa Tenggara Timur	83	264	347	105	85	190	30	65	95	118	292	410
20	Kalimantan Barat	107	268	375	112	59	171	28	59	87	117	195	312
21	Kalimantan Tengah	77	211	288	108	50	158	21	46	67	69	106	175
22	Kalimantan Selatan	140	388	528	161	97	258	45	62	107	132	254	386
23	Kalimantan Timur	148	338	486	135	94	229	62	93	155	76	112	188
24	Kalimantan Utara	31	70	101	44	23	67	8	15	23	26	32	58
25	Sulawesi Utara	54	123	177	51	21	72	35	59	94	41	88	129
26	Sulawesi Tengah	63	167	230	57	63	120	14	60	74	53	89	142
27	Sulawesi Selatan	204	685	889	244	356	600	94	225	319	145	518	663
28	Sulawesi Tenggara	55	186	241	62	69	131	14	62	76	57	172	229
29	Gorontalo	32	58	90	36	27	63	12	10	22	16	47	63
30	Sulawesi Barat	27	47	74	21	33	54	7	24	31	16	45	61
31	Maluku	40	120	160	30	29	59	3	28	31	21	45	66
32	Maluku Utara	32	111	143	22	45	67	9	18	27	20	24	44
33	Papua Barat	32	85	117	22	27	49	6	15	21	11	37	48
34	Papua	82	191	273	51	27	78	15	21	36	42	55	97
Indonesia		**5.440**	**18.439**	**23.879**	**8.020**	**6.548**	**14.568**	**2.758**	**5.384**	**8.142**	**6.134**	**13.436**	**19.570**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 15.a

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	180	1.381	1.561	72	414	486	252	1.795	2.047
2	Sumatera Utara	260	1.728	1.988	131	636	767	391	2.364	2.755
3	Sumatera Barat	145	1.110	1.255	72	420	492	217	1.530	1.747
4	Riau	149	904	1.053	84	423	507	233	1.327	1.560
5	Jambi	89	697	786	74	326	400	163	1.023	1.186
6	Sumatera Selatan	208	1.245	1.453	104	394	498	312	1.639	1.951
7	Bengkulu	76	425	501	41	200	241	117	625	742
8	Lampung	176	665	841	92	313	405	268	978	1.246
9	Kepulauan Bangka Belitung	90	382	472	59	195	254	149	577	726
10	Kepulauan Riau	85	278	363	62	207	269	147	485	632
11	DKI Jakarta	1.005	4.425	5.430	514	1.638	2.152	1.519	6.063	7.582
12	Jawa Barat	1.552	5.916	7.468	818	2.699	3.517	2.370	8.615	10.985
13	Jawa Tengah	975	6.485	7.460	645	3.401	4.046	1.620	9.886	11.506
14	DI Yogyakarta	171	1.285	1.456	146	980	1.126	317	2.265	2.582
15	Jawa Timur	964	5.923	6.887	630	2.732	3.362	1.594	8.655	10.249
16	Banten	310	1.310	1.620	157	704	861	467	2.014	2.481
17	Bali	171	861	1.032	200	321	521	371	1.182	1.553
18	Nusa Tenggara Barat	241	479	720	102	302	404	343	781	1.124
19	Nusa Tenggara Timur	151	688	839	68	241	309	219	929	1.148
20	Kalimantan Barat	162	504	666	84	228	312	246	732	978
21	Kalimantan Tengah	114	375	489	64	255	319	178	630	808
22	Kalimantan Selatan	204	800	1.004	107	315	422	311	1.115	1.426
23	Kalimantan Timur	256	701	957	118	348	466	374	1.049	1.423
24	Kalimantan Utara	58	192	250	52	115	167	110	307	417
25	Sulawesi Utara	130	449	579	59	213	272	189	662	851
26	Sulawesi Tengah	152	637	789	83	305	388	235	942	1.177
27	Sulawesi Selatan	273	1.393	1.666	202	1.065	1.267	475	2.458	2.933
28	Sulawesi Tenggara	108	533	641	90	397	487	198	930	1.128
29	Gorontalo	37	203	240	28	113	141	65	316	381
30	Sulawesi Barat	41	206	247	40	132	172	81	338	419
31	Maluku	41	154	195	26	193	219	67	347	414
32	Maluku Utara	32	170	202	38	151	189	70	321	391
33	Papua Barat	43	139	182	32	132	164	75	271	346
34	Papua	137	331	468	52	217	269	189	548	737
Indonesia		**8.786**	**42.974**	**51.760**	**5.146**	**20.725**	**25.871**	**13.932**	**63.699**	**77.631**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

c) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	67	634	701	25	135	160	92	769	861
2	Sumatera Utara	96	595	691	39	210	249	135	805	940
3	Sumatera Barat	42	326	368	20	109	129	62	435	497
4	Riau	38	289	327	26	116	142	64	405	469
5	Jambi	26	243	269	13	91	104	39	334	373
6	Sumatera Selatan	60	440	500	38	127	165	98	567	665
7	Bengkulu	26	137	163	11	48	59	37	185	222
8	Lampung	59	201	260	23	101	124	82	302	384
9	Kepulauan Bangka Belitung	12	90	102	18	50	68	30	140	170
10	Kepulauan Riau	16	68	84	25	64	89	41	132	173
11	DKI Jakarta	149	483	632	40	129	169	189	612	801
12	Jawa Barat	227	940	1.167	183	568	751	410	1.508	1.918
13	Jawa Tengah	158	920	1.078	109	482	591	267	1.402	1.669
14	DI Yogyakarta	24	144	168	18	103	121	42	247	289
15	Jawa Timur	154	902	1.056	75	340	415	229	1.242	1.471
16	Banten	51	166	217	37	189	226	88	355	443
17	Bali	27	121	148	32	53	85	59	174	233
18	Nusa Tenggara Barat	95	207	302	28	113	141	123	320	443
19	Nusa Tenggara Timur	82	375	457	33	100	133	115	475	590
20	Kalimantan Barat	53	219	272	29	77	106	82	296	378
21	Kalimantan Tengah	55	173	228	30	116	146	85	289	374
22	Kalimantan Selatan	59	269	328	49	131	180	108	400	508
23	Kalimantan Timur	58	247	305	41	123	164	99	370	469
24	Kalimantan Utara	14	60	74	16	38	54	30	98	128
25	Sulawesi Utara	42	186	228	20	71	91	62	257	319
26	Sulawesi Tengah	60	315	375	31	127	158	91	442	533
27	Sulawesi Selatan	66	478	544	51	346	397	117	824	941
28	Sulawesi Tenggara	49	250	299	42	185	227	91	435	526
29	Gorontalo	7	89	96	7	41	48	14	130	144
30	Sulawesi Barat	22	114	136	23	67	90	45	181	226
31	Maluku	18	64	82	12	77	89	30	141	171
32	Maluku Utara	17	76	93	22	76	98	39	152	191
33	Papua Barat	13	62	75	9	51	60	22	113	135
34	Papua	68	157	225	18	84	102	86	241	327
Indonesia		**2.010**	**10.040**	**12.050**	**1.193**	**4.738**	**5.931**	**3.203**	**14.778**	**17.981**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 15.c

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	103	685	788	44	255	299	147	940	1.087
2	Sumatera Utara	140	1.065	1.205	82	387	469	222	1.452	1.674
3	Sumatera Barat	90	689	779	46	269	315	136	958	1.094
4	Riau	104	574	678	49	276	325	153	850	1.003
5	Jambi	46	349	395	38	150	188	84	499	583
6	Sumatera Selatan	127	737	864	63	243	306	190	980	1.170
7	Bengkulu	36	241	277	20	96	116	56	337	393
8	Lampung	97	374	471	54	157	211	151	531	682
9	Kepulauan Bangka Belitung	48	161	209	21	76	97	69	237	306
10	Kepulauan Riau	65	186	251	36	125	161	101	311	412
11	DKI Jakarta	736	3.260	3.996	277	925	1.202	1.013	4.185	5.198
12	Jawa Barat	1.075	3.964	5.039	374	1.449	1.823	1.449	5.413	6.862
13	Jawa Tengah	637	3.773	4.410	277	1.440	1.717	914	5.213	6.127
14	DI Yogyakarta	94	741	835	57	382	439	151	1.123	1.274
15	Jawa Timur	672	3.953	4.625	298	1.443	1.741	970	5.396	6.366
16	Banten	232	1.013	1.245	95	448	543	327	1.461	1.788
17	Bali	122	603	725	86	190	276	208	793	1.001
18	Nusa Tenggara Barat	131	245	376	67	161	228	198	406	604
19	Nusa Tenggara Timur	50	256	306	29	124	153	79	380	459
20	Kalimantan Barat	93	254	347	49	125	174	142	379	521
21	Kalimantan Tengah	45	162	207	33	118	151	78	280	358
22	Kalimantan Selatan	125	458	583	48	149	197	173	607	780
23	Kalimantan Timur	188	429	617	66	203	269	254	632	886
24	Kalimantan Utara	36	119	155	26	53	79	62	172	234
25	Sulawesi Utara	78	232	310	36	115	151	114	347	461
26	Sulawesi Tengah	69	285	354	45	155	200	114	440	554
27	Sulawesi Selatan	175	788	963	112	547	659	287	1.335	1.622
28	Sulawesi Tenggara	48	234	282	35	179	214	83	413	496
29	Gorontalo	29	99	128	15	59	74	44	158	202
30	Sulawesi Barat	18	75	93	12	51	63	30	126	156
31	Maluku	17	72	89	9	80	89	26	152	178
32	Maluku Utara	11	79	90	13	60	73	24	139	163
33	Papua Barat	26	67	93	13	63	76	39	130	169
34	Papua	58	153	211	30	113	143	88	266	354
Indonesia		**5.621**	**26.375**	**31.996**	**2.555**	**10.666**	**13.221**	**8.176**	**37.041**	**45.217**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

b) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	560	523	1.083	8	12	20	4.671	5.237	9.908	5.239	5.772	11.011
2	Sumatera Utara	617	936	1.553	6	14	20	4.913	6.420	11.333	5.536	7.370	12.906
3	Sumatera Barat	341	718	1.059	1	8	9	3.146	4.079	7.225	3.488	4.805	8.293
4	Riau	374	421	795	4	7	11	3.721	4.078	7.799	4.099	4.506	8.605
5	Jambi	403	334	737	2	4	6	2.208	2.782	4.990	2.613	3.120	5.733
6	Sumatera Selatan	473	656	1.129	5	8	13	4.652	5.491	10.143	5.130	6.155	11.285
7	Bengkulu	287	269	556	3	5	8	1.213	1.484	2.697	1.503	1.758	3.261
8	Lampung	489	508	997	6	24	30	4.262	5.084	9.346	4.757	5.616	10.373
9	Kepulauan Bangka Belitung	185	241	426	0	0	0	1.717	1.867	3.584	1.902	2.108	4.010
10	Kepulauan Riau	251	259	510	14	52	66	1.900	1.977	3.877	2.165	2.288	4.453
11	DKI Jakarta	812	1.082	1.894	16	5	21	18.936	16.466	35.402	19.764	17.553	37.317
12	Jawa Barat	1.936	1.843	3.779	10	20	30	25.678	21.168	46.846	27.624	23.031	50.655
13	Jawa Tengah	1.859	1.769	3.628	46	112	158	25.150	23.955	49.105	27.055	25.836	52.891
14	DI Yogyakarta	309	370	679	4	5	9	4.648	4.937	9.585	4.961	5.312	10.273
15	Jawa Timur	1.637	1.870	3.507	43	32	75	26.579	24.399	50.978	28.259	26.301	54.560
16	Banten	384	546	930	2	3	5	6.109	5.496	11.605	6.495	6.045	12.540
17	Bali	463	417	880	5	9	14	5.430	6.463	11.893	5.898	6.889	12.787
18	Nusa Tenggara Barat	493	255	748	53	86	139	3.938	2.718	6.656	4.484	3.059	7.543
19	Nusa Tenggara Timur	380	408	788	3	6	9	2.573	2.385	4.958	2.956	2.799	5.755
20	Kalimantan Barat	436	265	701	1	0	1	2.384	2.715	5.099	2.821	2.980	5.801
21	Kalimantan Tengah	393	258	651	0	1	1	1.928	2.205	4.133	2.321	2.464	4.785
22	Kalimantan Selatan	544	373	917	9	7	16	3.685	3.609	7.294	4.238	3.989	8.227
23	Kalimantan Timur	444	369	813	2	2	4	4.090	4.148	8.238	4.536	4.519	9.055
24	Kalimantan Utara	123	108	231	1	0	1	1.172	1.025	2.197	1.296	1.133	2.429
25	Sulawesi Utara	238	362	600	2	6	8	1.713	2.107	3.820	1.953	2.475	4.428
26	Sulawesi Tengah	316	329	645	0	11	11	1.878	2.300	4.178	2.194	2.640	4.834
27	Sulawesi Selatan	552	723	1.275	7	9	16	3.621	4.504	8.125	4.180	5.236	9.416
28	Sulawesi Tenggara	345	364	709	4	5	9	1.171	1.547	2.718	1.520	1.916	3.436
29	Gorontalo	140	197	337	0	2	2	877	1.262	2.139	1.017	1.461	2.478
30	Sulawesi Barat	134	157	291	0	0	0	704	803	1.507	838	960	1.798
31	Maluku	192	203	395	2	5	7	833	1.057	1.890	1.027	1.265	2.292
32	Maluku Utara	176	164	340	0	0	0	467	599	1.066	643	763	1.406
33	Papua Barat	240	150	390	0	0	0	716	702	1.418	956	852	1.808
34	Papua	472	359	831	8	9	17	1.722	1.759	3.481	2.202	2.127	4.329
Indonesia		**16.998**	**17.806**	**34.804**	**267**	**469**	**736**	**178.405**	**176.828**	**355.233**	**195.670**	**195.103**	**390.773**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	128	151	279	0	3	3	1.174	1.479	2.653	1.302	1.633	2.935
2	Sumatera Utara	119	212	331	2	3	5	743	870	1.613	864	1.085	1.949
3	Sumatera Barat	71	147	218	0	0	0	854	867	1.721	925	1.014	1.939
4	Riau	83	62	145	1	0	1	727	591	1.318	811	653	1.464
5	Jambi	131	93	224	1	1	2	391	426	817	523	520	1.043
6	Sumatera Selatan	166	175	341	1	1	2	789	944	1.733	956	1.120	2.076
7	Bengkulu	85	99	184	0	1	1	242	261	503	327	361	688
8	Lampung	160	133	293	0	2	2	941	1.137	2.078	1.101	1.272	2.373
9	Kepulauan Bangka Belitung	33	39	72	0	0	0	331	357	688	364	396	760
10	Kepulauan Riau	69	71	140	0	0	0	434	377	811	503	448	951
11	DKI Jakarta	34	51	85	0	0	0	2.870	1.268	4.138	2.904	1.319	4.223
12	Jawa Barat	553	356	909	1	1	2	4.945	3.900	8.845	5.499	4.257	9.756
13	Jawa Tengah	443	392	835	0	0	0	5.218	4.301	9.519	5.661	4.693	10.354
14	DI Yogyakarta	51	63	114	0	0	0	859	729	1.588	910	792	1.702
15	Jawa Timur	304	268	572	1	0	1	6.002	4.954	10.956	6.307	5.222	11.529
16	Banten	124	153	277	0	0	0	1.737	862	2.599	1.861	1.015	2.876
17	Bali	71	40	111	0	1	1	1.449	1.408	2.857	1.520	1.449	2.969
18	Nusa Tenggara Barat	184	71	255	0	2	2	1.078	692	1.770	1.262	765	2.027
19	Nusa Tenggara Timur	108	72	180	1	0	1	1.007	739	1.746	1.116	811	1.927
20	Kalimantan Barat	154	77	231	1	0	1	678	767	1.445	833	844	1.677
21	Kalimantan Tengah	144	54	198	0	0	0	447	505	952	591	559	1.150
22	Kalimantan Selatan	200	115	315	0	1	1	670	670	1.340	870	786	1.656
23	Kalimantan Timur	157	101	258	0	0	0	870	956	1.826	1.027	1.057	2.084
24	Kalimantan Utara	24	24	48	0	0	0	282	203	485	306	227	533
25	Sulawesi Utara	23	23	46	0	0	0	266	317	583	289	340	629
26	Sulawesi Tengah	75	40	115	0	0	0	420	467	887	495	507	1.002
27	Sulawesi Selatan	119	136	255	0	0	0	784	923	1.707	903	1.059	1.962
28	Sulawesi Tenggara	116	126	242	1	0	1	240	321	561	357	447	804
29	Gorontalo	32	52	84	0	2	2	203	362	565	235	416	651
30	Sulawesi Barat	49	54	103	0	0	0	220	202	422	269	256	525
31	Maluku	44	39	83	0	0	0	213	232	445	257	271	528
32	Maluku Utara	64	40	104	0	0	0	119	133	252	183	173	356
33	Papua Barat	54	30	84	0	0	0	141	128	269	195	158	353
34	Papua	149	103	252	0	3	3	483	488	971	632	594	1.226
Indonesia		**4.321**	**3.662**	**7.983**	**10**	**21**	**31**	**37.827**	**32.836**	**70.663**	**42.158**	**36.519**	**78.677**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.c

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	231	174	405	2	0	2	2.785	2.834	5.619	3.018	3.008	6.026
2	Sumatera Utara	244	383	627	0	3	3	3.443	4.572	8.015	3.687	4.958	8.645
3	Sumatera Barat	144	317	461	0	1	1	1.848	2.469	4.317	1.992	2.787	4.779
4	Riau	158	192	350	1	1	2	2.402	2.655	5.057	2.561	2.848	5.409
5	Jambi	116	131	247	0	0	0	1.391	1.680	3.071	1.507	1.811	3.318
6	Sumatera Selatan	144	293	437	1	2	3	3.315	3.597	6.912	3.460	3.892	7.352
7	Bengkulu	84	88	172	2	0	2	713	799	1.512	799	887	1.686
8	Lampung	154	230	384	2	2	4	2.658	2.984	5.642	2.814	3.216	6.030
9	Kepulauan Bangka Belitung	80	93	173	0	0	0	1.047	965	2.012	1.127	1.058	2.185
10	Kepulauan Riau	84	87	171	1	2	3	1.116	1.074	2.190	1.201	1.163	2.364
11	DKI Jakarta	713	939	1.652	1	1	2	14.935	13.530	28.465	15.649	14.470	30.119
12	Jawa Barat	910	974	1.884	3	10	13	18.371	14.752	33.123	19.284	15.736	35.020
13	Jawa Tengah	930	896	1.826	3	11	14	16.362	14.993	31.355	17.295	15.900	33.195
14	DI Yogyakarta	185	189	374	2	0	2	3.136	3.019	6.155	3.323	3.208	6.531
15	Jawa Timur	922	1.096	2.018	16	10	26	17.401	15.339	32.740	18.339	16.445	34.784
16	Banten	190	274	464	1	2	3	3.806	3.988	7.794	3.997	4.264	8.261
17	Bali	251	271	522	1	1	2	3.258	4.206	7.464	3.510	4.478	7.988
18	Nusa Tenggara Barat	159	94	253	5	8	13	2.320	1.600	3.920	2.484	1.702	4.186
19	Nusa Tenggara Timur	94	130	224	0	3	3	1.122	1.184	2.306	1.216	1.317	2.533
20	Kalimantan Barat	124	95	219	0	0	0	1.294	1.559	2.853	1.418	1.654	3.072
21	Kalimantan Tengah	100	92	192	0	1	1	1.077	1.231	2.308	1.177	1.324	2.501
22	Kalimantan Selatan	163	128	291	0	0	0	2.492	2.351	4.843	2.655	2.479	5.134
23	Kalimantan Timur	171	156	327	0	0	0	2.689	2.601	5.290	2.860	2.757	5.617
24	Kalimantan Utara	40	39	79	1	0	1	718	650	1.368	759	689	1.448
25	Sulawesi Utara	115	189	304	0	2	2	1.187	1.386	2.573	1.302	1.577	2.879
26	Sulawesi Tengah	120	138	258	0	0	0	1.115	1.349	2.464	1.235	1.487	2.722
27	Sulawesi Selatan	230	316	546	5	2	7	2.298	2.890	5.188	2.533	3.208	5.741
28	Sulawesi Tenggara	84	96	180	1	0	1	630	768	1.398	715	864	1.579
29	Gorontalo	48	76	124	0	0	0	526	656	1.182	574	732	1.306
30	Sulawesi Barat	23	38	61	0	0	0	322	387	709	345	425	770
31	Maluku	81	90	171	0	4	4	416	624	1.040	497	718	1.215
32	Maluku Utara	30	42	72	0	0	0	238	328	566	268	370	638
33	Papua Barat	50	30	80	0	0	0	397	396	793	447	426	873
34	Papua	67	80	147	0	0	0	668	710	1.378	735	790	1.525
Indonesia		**7.239**	**8.456**	**15.695**	**48**	**66**	**114**	**117.496**	**114.126**	**231.622**	**124.783**	**122.648**	**247.431**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	8	51	59	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	3	19	22	0	0	0	0	2	2
3	Sumatera Barat	3	15	18	0	1	1	0	0	0
4	Riau	1	16	17	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	0	8	8	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	6	31	37	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	6	8	0	0	0	1	0	1
8	Lampung	3	5	8	0	3	3	0	13	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	6	7	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	8	9	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	10	73	83	20	21	41	26	73	99
12	Jawa Barat	5	56	61	0	0	0	10	1	11
13	Jawa Tengah	22	108	130	2	1	3	1	7	8
14	DI Yogyakarta	6	69	75	0	1	1	0	0	0
15	Jawa Timur	22	96	118	6	32	38	9	29	38
16	Banten	3	14	17	0	0	0	0	0	0
17	Bali	3	20	23	1	0	1	0	5	5
18	Nusa Tenggara Barat	2	11	13	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	1	5	6	0	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	14	19	0	0	0	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	3	7	10	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	2	26	28	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	6	7	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	3	4	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	5	9	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	8	16	24	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	3	8	11	0	1	1	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	3	5	8	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	2	6	8	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1	0	0	0	0	2	2
33	Papua Barat	0	4	4	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	2	3	0	1	1	29	35	64
Indonesia		**135**	**720**	**855**	**30**	**62**	**92**	**77**	**168**	**245**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

b) Fasilitas Kesehatan terdiri dari, puskesmas, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Lampiran 16.e

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	3	15	18	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	1	1	0	1	1	0	0	0
4	Riau	0	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	6	8	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	2	2	0	0	0	1	0	1
8	Lampung	0	1	1	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	4	20	24	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	1	1	0	1	1	0	0	0
14	DI Yogyakarta	3	47	50	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	10	45	55	4	28	32	5	24	29
16	Banten	0	1	1	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	1	1	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	2	2	0	0	0	1	0	1
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	3	4	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	5	5	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	0	1	0	1	1	28	34	62
Indonesia		**25**	**157**	**182**	**4**	**32**	**36**	**35**	**59**	**94**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.f

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	5	31	36	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	3	18	21	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	3	14	17	0	0	0	0	0	0
4	Riau	1	15	16	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	0	8	8	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	4	24	28	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	2	4	6	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	3	4	7	0	0	0	0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	6	6	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	8	8	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	5	52	57	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	45	50	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	21	103	124	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	3	19	22	0	1	1	0	0	0
15	Jawa Timur	12	50	62	1	4	5	3	2	5
16	Banten	3	12	15	0	0	0	0	0	0
17	Bali	3	16	19	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	2	11	13	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	1	5	6	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	4	12	16	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	7	9	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	25	26	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	5	6	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	2	3	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	3	5	8	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	7	10	17	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	3	3	6	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	3	5	8	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	2	6	8	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	4	4	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	2	2	0	0	0	1	1	2
Indonesia		**103**	**531**	**634**	**2**	**5**	**7**	**4**	**3**	**7**

Sumber: Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

a) Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali

Lampiran 16.g

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2020

No	Nama Poltekkes	Program Studi																		Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Analis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Asuransi Kesehatan	Teknik Gigi	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknik Elektro Medik	Ortetik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Aceh	256	114	47	-	66	-	35	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560
2	Medan	151	207	97	-	111		84	105	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	-	868
3	Padang	182	129	76	-	-	-	72	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523
4	Riau	76	75	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225
5	Jambi	79	62	47	-	41	-	46	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	300
6	Palembang	258	95	60	-	75	-		76	-				80	-	-	-	-	-	-	644
7	Bengkulu	161	144	-	-	-	-	65	78	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	534
8	Tanjung Karang	201	188	51	-	49	-	84	54	-				97	-	46	-	-	-	-	770
9	Tanjung Pinang	73	76	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212
10	Pangkal Pinang	27	25	-	-	30	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
11	Jakarta I	77	78	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221
12	Jakarta II	-	-	-	73	109		77	73	-	-	-	-	-	-	53	51	-	37	-	473
13	Jakarta III	155	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	296
14	Bandung	206	207	72	-	54	-	67	73	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	762
15	Tasikmalaya	152	80	40	-	38	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	466
16	Semarang	548	181	83	-	-	-	104	46	-	-	-	-	110	-		255	137	-	-	1.464
17	Surakarta	82	47	-	11		144			93	111	82	90	-	-	-	-	-	-	75	735
18	Yogyakarta	41	38	25	-	-	-	39	48	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	267
19	Surabaya	270	190	36	-	-	-	140	91	-	-	-	-	38	-	-	-	-	42	-	807
20	Malang	336	123	-	35	-	-	-	91	-	-	-	-	-	29	-	-	67	-	-	681
21	Banten	86	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-	308
22	Denpasar	191	42	60	-	-	-	52	53	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	484
23	Mataram	141	72	-	-	-	-		48	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	350
24	Kupang	323	152	89	-	82		80	87	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	886
25	Pontianak	46	36	68	-	-	-	20	39	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	255
26	Palangkaraya	39	38	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103
27	Banjarmasin	36	47	34	-	-	-	43	45	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	254
28	Kalimantan Timur	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	232
29	Manado	80	46	43	-	48	-	37	63	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	367
30	Palu	181	85	-	-	-	-	47	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
31	Makassar	268	38	49	-	90	-	39	50	52	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	638
32	Kendari	79	102	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	305
33	Gorontalo	87	56	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223
34	Mamuju	12	27	-	-	-	-	21	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
35	Maluku	256	172	-	-	-	-	65	74	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	664
36	Ternate	76	94	-	-	-	-	32	33	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	271
37	Jayapura	372	176	-	-	38	-	65	17	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	739
38	Sorong	121	72	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241
Total		**5.802**	**3.579**	**1.043**	**119**	**831**	**144**	**1.377**	**1.805**	**145**	**111**	**82**	**90**	**1.700**	**29**	**99**	**306**	**282**	**79**	**75**	**17.698**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021
Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.h

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2020

No	Nama Poltekkes	Program Studi								Total
		Keperawatan	Kebidanan	Keperawatan Gigi	Farmasi	Sanitasi	Gizi	Teknologi Laboratorium Medis	Rekam dan Informasi Kesehatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	209	23	-	162	-	-	153	-	547
2	Medan	80	71	35	115	-	24	109		434
3	Padang	33	10	35	-	-	-	-	-	78
4	Riau	75	-	-	-	-	-	-	-	75
5	Jambi	72	16	9	-	16	-	17	-	130
6	Palembang	35	7	26	54	32	5	14	-	173
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Tanjung Karang	194	20	15	-	4	-	31	-	264
9	Tanjung Pinang	3	-	-	-	-	-	-	-	3
10	Pangkal Pinang	111	15	-	39	-	-	-	-	165
11	Jakarta I	39	-	62	-	-	-	-	-	101
12	Jakarta II	-	-	-	182	-	1	-	-	183
13	Jakarta III	-	26	-	-	-	-	19	-	45
14	Bandung	87	11	35	55	7	28	183	-	406
15	Tasikmalaya	69	6	-	25	-	-	-	-	100
16	Semarang	70	19	24	-	-	-	27	19	159
17	Surakarta	18	-	-	-	-	-	-	-	18
18	Yogyakarta	31	16	4	-	3	2	18	-	74
19	Surabaya	89	17	106	-	8	8	72	-	300
20	Malang	31	-	-	-	-	-	-	-	31
21	Banten	41	-	-	-	-	-	42	-	83
22	Denpasar	-	16	31	-	-	-	8	-	55
23	Mataram	62	13	-	-	-	1	24	-	100
24	Kupang	103	50	6	17	1	4	3	-	184
25	Pontianak	33	8	5	-	4	2	12	-	64
26	Palangkaraya	24	-	-	-	-	-	-	-	24
27	Banjarmasin	25	-	151	-	22	9	13	-	220
28	Kalimantan Timur	6	4	-	-	-	-	15	-	25
29	Manado	99	88	30	53	26		13	-	309
30	Palu	86	36	-	-	1	1	-	-	124
31	Makassar	130	6	34	38	-	-	28	-	236
32	Kendari	107	-	-	-	-	9	-	-	116
33	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	324	293	-	-	49	-	-	-	666
36	Ternate	103	-	-	-	-	1	-	-	104
37	Jayapura	161	61	-	37	4	11	69	-	343
38	Sorong	53	32	-	-	-	-	-	-	85
Total		**2.603**	**864**	**608**	**777**	**177**	**106**	**870**	**19**	**6.024**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.i

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan		Kefarmasian	Sanitasi Lingkungan	Promosi Kesehatan	Gizi	Keterapian Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
			Keperawatan	Terapis Gigi	Farmasi			Gizi & Dietetika	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Rekayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pencitraan	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	70	79	35	-	58	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	302
2	Medan	93	56	-	-	6	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	229
3	Padang	148	-	-	-	39	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	224
4	Riau	63	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
5	Jambi	106	16	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
6	Palembang	37	31	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	102
7	Bengkulu	154	42	-	-		48	39	-	-	-	-	-	-	-	-	283
8	Tanjung Karang	92	47	-	-	42	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	221
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
12	Jakarta II	-	-	-	-	35	-	66	-	-	-	-	-	32	92	-	225
13	Jakarta III	48	60	-	-	-	-	-	45	-	-	-	40	-	-	-	193
14	Bandung	-	-	-	-	47	37	79	-				102	-	-	-	265
15	Tasikmalaya	192	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270
16	Semarang	406	124	109	-	69	-	83	-	-	-	-	-	-	83	-	874
17	Surakarta	186	88	-	-	-	-	-	150	157	78	46	-	-	-	54	759
18	Yogyakarta	134	75	84	-	56	-	74	-	-	-	-	35	-	-	-	458
19	Surabaya	215	39	64	-	58	-	-	-	-	-	-	107	66	-	-	549
20	Malang	316	116	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	489
21	Banten	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
22	Denpasar	57	78	-	-	54	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	257
23	Mataram	59	90	-	-	-	-	48	-	-	-	-	59	-	-	-	256
24	Kupang	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
25	Pontianak	178	148	-	-	47	-	87	-	-	-	-	65	-	-	-	525
26	Palangkaraya	83	47	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	164
27	Banjarmasin	30	31	37	-	44	-	45	-	-	-	-	47	-	-	-	234
28	Kalimantan Timur	118	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228
29	Manado	114	53	-	-	38	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	247
30	Palu	75	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
31	Makassar	42	87	130	51	61	-	89	88	-	-	-	65	-	-	-	613
32	Kendari	51	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	100
33	Gorontalo	151	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
36	Ternate	43	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
37	Jayapura	78	61	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	163
38	Sorong	137	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
Total		**3.476**	**1.885**	**599**	**51**	**654**	**85**	**1.089**	**283**	**157**	**78**	**46**	**560**	**98**	**175**	**74**	**9.310**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021
Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.j

JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterapian Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	-	-	-	-	0
2	Medan	-	-	-	-	0
3	Padang	-	-	-	-	0
4	Riau	-	-	-	-	0
5	Jambi	-	-	-	-	0
6	Palembang	-	-	-	-	0
7	Bengkulu	-	-	-	-	0
8	Tanjung Karang	-	47	-	-	47
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	0
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	0
11	Jakarta I	-	-	-	-	0
12	Jakarta II	-	-	-	-	0
13	Jakarta III	46	-	-	47	93
14	Bandung	-	-	-	-	0
15	Tasikmalaya	-	-	-	-	0
16	Semarang	233	127	-	-	360
17	Surakarta	90	132	-	243	465
18	Yogyakarta	40	12	17	-	69
19	Surabaya	-	-	-	-	0
20	Malang	28	107	-	-	135
21	Banten	-	34	-	-	34
22	Denpasar	37	100	-	-	137
23	Mataram	-	30	-	-	30
24	Kupang	-	21	-	-	21
25	Pontianak	-	-	-	-	0
26	Palangkaraya	-	-	-	-	0
27	Banjarmasin	-	-	-	-	0
28	Kalimantan Timur	-	-	-	-	0
29	Manado	-	28	-	-	28
30	Palu	-	104	-	-	104
31	Makassar	-	-	-	-	0
32	Kendari	-	-	-	-	0
33	Gorontalo	-	-	-	-	0
34	Mamuju	-	-	-	-	0
35	Maluku	-	-	-	-	0
36	Ternate	-	-	-	-	0
37	Jayapura	-	-	-	-	0
38	Sorong	-	-	-	-	0
Total		**474**	**742**	**17**	**290**	**1.523**

Sumber : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.k

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan												Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	515	178	4.081	1.500	603	584	218	256	262	7	340	-	8.544
2	Sumatera Utara	1.582	512	5.655	4.096	2.676	2.214	214	421	106	240	1.015	-	18.731
3	Sumatera Barat	834	317	2.988	1.226	1.278	477	114	262	233	24	328	-	8.081
4	Riau	368	-	2.269	1.043	615	488	-	122	96	53	156	-	5.210
5	Jambi	221	-	1.263	412	298	199	69	28	25	43	42	-	2.600
6	Sumatera Selatan	191	99	3.280	1.437	598	774	121	135	49	104	451	-	7.239
7	Bengkulu	81	-	1.546	1.051	380	248	144	229	38	-	292	-	4.009
8	Lampung	1.226	-	2.698	1.413	285	223	127	68	72	-	337	-	6.449
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	409	115	100	58	-	54	-	-	-	-	736
10	Kepulauan Riau	219	-	460	281	-	3	9	-	-	-	31	-	1.003
11	DKI Jakarta	3.080	1.028	6.545	1.781	4.702	3.377	269	890	477	643	769	-	23.561
12	Jawa Barat	1.444	493	13.904	3.243	5.562	1.168	280	599	654	232	1.659	-	29.238
13	Jawa Tengah	1.464	451	14.843	3.788	6.199	1.863	216	860	907	1.565	1.790	-	33.946
14	DI Yogyakarta	1.014	499	2.814	2.362	2.563	900	99	396	555	413	410	-	12.025
15	Jawa Timur	2.265	1.150	17.445	5.249	4.896	1.812	257	866	1.047	483	1.580	58	37.108
16	Banten	707	-	5.105	1.158	318	505	-	-	244	-	190	-	8.227
17	Bali	566	176	3.255	291	980	303	123	189	132	213	196	7	6.431
18	Nusa Tenggara Barat	204	-	1.369	538	393	31	38	101	141	-	212	-	3.027
19	Nusa Tenggara Timur	106	-	1.973	630	327	120	80	149	-	-	70	-	3.455
20	Kalimantan Barat	157	-	1.502	603	519	321	79	155	71	-	123	-	3.530
21	Kalimantan Tengah	108	-	804	696	256	-	-	60	-	-	122	-	2.046
22	Kalimantan Selatan	175	248	2.243	586	1.001	477	143	112	107	41	354	-	5.487
23	Kalimantan Timur	113	-	1.395	333	548	734	96	-	-	-	184	-	3.403
24	Kalimantan Utara	-	-	87	113	-	-	-	-	-	-	-	-	200
25	Sulawesi Utara	484	124	3.020	443	303	473	166	70	-	42	42	-	5.167
26	Sulawesi Tengah	245	-	1.018	543	439	506	94	66	-	-	-	-	2.911
27	Sulawesi Selatan	1.234	353	8.116	3.416	3.275	1.604	112	254	388	422	1.169	-	20.343
28	Sulawesi Tenggara	123	-	1.409	744	422	302	49	96	-	-	253	-	3.398
29	Gorontalo	-	-	696	425	111	200	-	110	24	-	24	-	1.590
30	Sulawesi Barat	-	-	423	223	-	21	36	70	-	-	-	-	773
31	Maluku	31	-	1.593	569	39	203	79	85	-	-	9	-	2.608
32	Maluku Utara	28	-	413	286	12	100	69	76	-	-	79	-	1.063
33	Papua Barat	29	-	450	205	45	28	-	83	-	-	17	-	857
34	Papua	114	-	1.414	513	164	120	61	57	-	-	231	-	2.674
Indonesia		**18.928**	**5.628**	**116.485**	**41.312**	**39.907**	**20.436**	**3.362**	**6.919**	**5.628**	**4.525**	**12.475**	**65**	**275.670**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Catatan : * = lulusan jenjang DIII, DIV, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

- = tidak ada lulusan

Lampiran 16.l

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	4	6	-	7	-	-	-	-	-	-	-	17
2	Sumatera Utara	2	1	-	-	-	-	1	4	-	7	24	39
3	Sumatera Barat	15	10	6	4	-	-	8	3	-	36	-	82
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Sumatera Selatan	20	8	3	7	-	19	-	6	-	25	-	88
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	DKI Jakarta	87	61	78	88	9	38	9	10	22	266	71	739
12	Jawa Barat	16	16	15	64	15	14	12	8	15	82	72	329
13	Jawa Tengah	35	19	43	38	15	27	31	4	12	149	-	373
14	DI Yogyakarta	53	17	40	73	20	23	7	9	-	74	57	373
15	Jawa Timur	68	13	48	27	1	21	15	8	4	113	69	387
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Bali	29	16	24	45	5	17	2	4	-	76	-	218
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25	Sulawesi Utara	11	21	16	14	-	-	-	-	9	30	-	101
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	Sulawesi Selatan	14	8	13	20	6	15	6	6	-	84	26	198
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Indonesia		**354**	**196**	**286**	**387**	**71**	**174**	**91**	**62**	**62**	**942**	**319**	**2.944**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Catatan : - = tidak ada lulusan

Lampiran 17.a

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI			Total	%
					Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	5.459.891	2.108.770	2.387.169	823.679	31.503	91.373	5.442.494	99,68
2	Sumatera Utara	14.703.532	4.742.763	1.384.591	2.509.214	2.087.475	289.731	11.013.774	74,91
3	Sumatera Barat	5.498.751	1.921.453	730.037	864.616	813.244	91.421	4.420.771	80,40
4	Riau	7.128.305	1.705.139	698.375	1.470.344	856.264	62.881	4.793.003	67,24
5	Jambi	3.677.894	973.911	308.231	654.998	622.640	44.990	2.604.770	70,82
6	Sumatera Selatan	8.567.923	2.728.784	1.500.371	1.235.256	853.959	85.043	6.403.413	74,74
7	Bengkulu	2.019.848	737.119	176.400	345.035	300.453	20.380	1.579.387	78,19
8	Lampung	8.521.201	3.829.431	747.110	954.524	924.857	94.466	6.550.388	76,87
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	232.240	297.222	277.281	314.511	17.262	1.138.516	75,02
10	Kepulauan Riau	2.242.198	334.190	239.406	827.545	381.405	14.744	1.797.290	80,16
11	DKI Jakarta	10.644.986	1.008.570	4.979.802	10.090.162	983.916	281.172	17.343.622	162,93
12	Jawa Barat	49.935.858	16.920.846	4.552.997	8.621.833	6.482.365	710.988	37.289.029	74,67
13	Jawa Tengah	34.940.078	16.302.342	2.598.378	5.489.742	3.811.459	640.835	28.842.756	82,55
14	D I Yogyakarta	3.882.288	1.545.271	441.957	791.886	375.035	133.396	3.287.545	84,68
15	Jawa Timur	39.886.288	15.564.637	3.895.985	5.813.576	3.909.638	638.417	29.822.253	74,77
16	Banten	13.160.496	3.251.035	1.132.293	3.520.475	1.625.014	111.999	9.640.816	73,26
17	Bali	4.380.824	945.157	1.276.079	1.134.078	585.683	60.257	4.001.254	91,34
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	2.940.069	485.059	549.894	309.654	44.934	4.329.610	84,47
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	2.962.574	661.528	579.259	260.075	73.478	4.536.914	81,87
20	Kalimantan Barat	5.134.760	1.789.261	352.662	1.033.063	637.142	57.653	3.869.781	75,36
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	554.934	690.321	822.584	281.140	38.654	2.387.633	86,22
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	1.022.133	807.056	841.977	475.557	76.180	3.222.903	74,88
23	Kalimantan Timur	3.793.152	705.872	464.330	1.454.704	858.224	40.028	3.523.158	92,88
24	Kalimantan Utara	768.505	171.021	171.098	210.506	124.943	6.603	684.171	89,03
25	Sulawesi Utara	2.528.794	908.920	599.853	443.842	404.426	68.059	2.425.100	95,90
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	1.206.493	462.912	507.554	303.452	31.569	2.511.980	81,11
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	3.614.134	2.128.787	1.229.184	1.077.367	145.216	8.194.688	91,79
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	1.145.261	505.470	408.448	185.030	29.385	2.273.594	82,51
29	Gorontalo	1.219.576	578.180	183.761	168.453	62.518	10.801	1.003.713	82,30
30	Sulawesi Barat	1.405.012	666.261	306.034	170.977	132.662	18.824	1.294.758	92,15
31	Maluku	1.831.880	719.467	232.198	306.521	111.492	32.458	1.402.136	76,54
32	Maluku Utara	1.278.764	389.667	155.834	238.641	67.614	10.566	862.322	67,43
33	Papua Barat	981.822	612.636	226.367	228.909	57.129	10.163	1.135.204	115,62
34	Papua	3.435.430	1.718.002	384.722	524.580	128.497	22.261	2.778.062	80,87
Indonesia		**271.066.366**	**96.556.543**	**36.164.395**	**55.143.340**	**30.436.343**	**4.106.187**	**222.406.808**	**82,05**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020 unaudited

Lampiran 17.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama					Total
		Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	78	179	358	0	3	618
2	Sumatera Utara	125	534	601	2	8	1.270
3	Sumatera Barat	108	145	275	2	34	564
4	Riau	81	273	228	0	23	605
5	Jambi	71	71	198	0	16	356
6	Sumatera Selatan	232	220	341	2	42	837
7	Bengkulu	89	44	179	1	16	329
8	Lampung	129	184	310	0	10	633
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	32	64	1	5	133
10	Kepulauan Riau	8	119	84	0	1	212
11	DKI Jakarta	16	342	323	0	1	682
12	Jawa Barat	495	1344	1079	0	63	2.981
13	Jawa Tengah	1089	718	878	0	305	2.990
14	D I Yogyakarta	105	120	121	0	34	380
15	Jawa Timur	701	779	969	0	218	2.667
16	Banten	10	416	244	0	4	674
17	Bali	304	120	120	2	91	637
18	Nusa Tenggara Barat	96	56	171	1	12	336
19	Nusa Tenggara Timur	91	82	407	2	32	614
20	Kalimantan Barat	79	86	246	0	14	425
21	Kalimantan Tengah	72	63	201	0	7	343
22	Kalimantan Selatan	150	101	236	0	36	523
23	Kalimantan Timur	114	152	186	3	43	498
24	Kalimantan Utara	29	23	54	3	6	115
25	Sulawesi Utara	157	59	191	1	29	437
26	Sulawesi Tengah	43	48	206	4	12	313
27	Sulawesi Selatan	186	212	459	1	75	933
28	Sulawesi Tenggara	65	38	289	1	12	405
29	Gorontalo	27	33	93	0	8	161
30	Sulawesi Barat	29	21	96	1	6	153
31	Maluku	30	25	208	0	8	271
32	Maluku Utara	29	20	144	2	9	204
33	Papua Barat	19	21	155	0	3	198
34	Papua	60	57	416	3	10	546
Indonesia		**4.948**	**6.737**	**10.130**	**32**	**1.196**	**23.043**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020 unaudited

Lampiran 17.c

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2020

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut					Total
		RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	26	32	5	3	9	75
2	Sumatera Utara	36	86	8	9	3	142
3	Sumatera Barat	22	19	5	15	4	65
4	Riau	16	28	3	8	4	59
5	Jambi	13	9	2	2	2	28
6	Sumatera Selatan	24	29	4	8	2	67
7	Bengkulu	11	6	2	1	2	22
8	Lampung	15	33	1	13	4	66
9	Kepulauan Bangka Belitung	9	7	0	2	4	22
10	Kepulauan Riau	12	12	2	2	7	35
11	DKI Jakarta	36	64	10	18	18	146
12	Jawa Barat	46	208	14	36	49	353
13	Jawa Tengah	58	166	10	23	27	284
14	D I Yogyakarta	9	41	3	9	4	66
15	Jawa Timur	68	180	23	38	30	339
16	Banten	12	54	3	16	6	91
17	Bali	14	34	3	5	8	64
18	Nusa Tenggara Barat	15	9	2	3	3	32
19	Nusa Tenggara Timur	23	19	3	1	1	47
20	Kalimantan Barat	16	10	6	9	7	48
21	Kalimantan Tengah	16	2	1	1	1	21
22	Kalimantan Selatan	16	11	4	5	7	43
23	Kalimantan Timur	15	18	3	8	6	50
24	Kalimantan Utara	5	0	1	0	0	6
25	Sulawesi Utara	16	18	4	4	5	47
26	Sulawesi Tengah	17	5	3	4	5	34
27	Sulawesi Selatan	34	32	6	17	21	110
28	Sulawesi Tenggara	17	8	2	1	2	30
29	Gorontalo	11	4	0	1	2	18
30	Sulawesi Barat	7	1	1	0	1	10
31	Maluku	14	5	3	1	3	26
32	Maluku Utara	10	3	2	0	1	16
33	Papua Barat	9	3	2	0	0	14
34	Papua	19	6	5	1	0	31
Indonesia		**687**	**1.162**	**146**	**264**	**248**	**2.507**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020 unaudited

Lampiran 17.c

FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2020

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Penunjang		Total
		Apotek	Optik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	51	35	86
2	Sumatera Utara	193	58	251
3	Sumatera Barat	99	55	154
4	Riau	93	30	123
5	Jambi	48	17	65
6	Sumatera Selatan	80	28	108
7	Bengkulu	30	11	41
8	Lampung	78	15	93
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	10	41
10	Kepulauan Riau	61	15	76
11	DKI Jakarta	188	35	223
12	Jawa Barat	482	109	591
13	Jawa Tengah	531	160	691
14	D I Yogyakarta	89	7	96
15	Jawa Timur	530	213	743
16	Banten	170	15	185
17	Bali	71	24	95
18	Nusa Tenggara Barat	36	26	62
19	Nusa Tenggara Timur	58	17	75
20	Kalimantan Barat	62	23	85
21	Kalimantan Tengah	40	10	50
22	Kalimantan Selatan	87	28	115
23	Kalimantan Timur	82	8	90
24	Kalimantan Utara	15	8	23
25	Sulawesi Utara	69	24	93
26	Sulawesi Tengah	53	13	66
27	Sulawesi Selatan	156	41	197
28	Sulawesi Tenggara	26	8	34
29	Gorontalo	24	6	30
30	Sulawesi Barat	13	4	17
31	Maluku	12	5	17
32	Maluku Utara	17	6	23
33	Papua Barat	13	7	20
34	Papua	28	14	42
Indonesia		**3.616**	**1.085**	**4.701**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2020 unaudited

Lampiran 19.a

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	**106.787.577.923.000**	60,45
	a. Rupiah Murni	91.033.986.010.000	
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	357.892.647.000	
	c. Badan Layanan Umum (BLU)	14.213.434.117.000	
	d. Pinjaman Luar Negeri (PLN)	232.975.000.000	
	e. Hibah Langsung Luar Negeri (HLL)	949.290.149.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	**246.030.542.000**	0,14
3	DANA ALOKASI KHUSUS	**29.811.420.121.000**	16,88
	a. DAK Fisik	20.161.000.000.000	
	b. DAK Nonfisik	9.650.420.121.000	
5	SUMBER PEMERINTAH LAIN*	**39.809.708.880.950**	22,54
	Total Anggaran Kesehatan	**176.654.737.466.950**	
	Total APBN	**2.540.422.500.599.000**	
	% APBN Kesehatan THD APBN Indonesia		**6,95**

Sumber:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
- Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Lampiran 19.b

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2020

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Sekretariat Jenderal	51127677280000,00	50.209.604.357.959	98,20			0,00	43.700.166.000	30.463.229.779	69,71	51.171.377.446.000	50.240.067.587.738	98,18
2	Inspektorat Jenderal	81.480.999.000	78.736.761.553	96,63			0,00			0,00	81.480.999.000	78.736.761.553	96,63
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	816.030.527.000	795.787.174.052	97,52	17.254.927.000	16.674.025.967	96,63	78.992.836.000	73.320.737.830	92,82	912.278.290.000	885.781.937.849	97,10
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	16.382.603.373.000	16.097.556.657.698	98,26	21.017.508.498.000	18.365.485.343.028	87,38	15.304.178.000	11.903.197.316	77,78	37.415.416.049.000	34.474.945.198.042	92,14
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	3.153.730.554.000	2.874.567.474.933	91,15	975.290.791.000	900.718.591.874	92,35	74.921.865.000	62.790.234.851	83,81	4.203.943.210.000	3.838.076.301.658	91,30
6	Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.170.702.528.000	4.043.688.711.837	96,95			0,00	11.574.523.000	10.975.165.921	94,82	4.182.277.051.000	4.054.663.877.758	96,95
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	396.245.929.000	347.677.409.565	87,74	186.260.084.000	175.845.052.121	94,41			0,00	582.506.013.000	523.522.461.686	89,87
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	5.776.406.020.000	5.636.138.088.029	97,57	2.686.386.413.000	2.456.839.037.927	91,46	21.536.974.000	18.628.494.253	86,50	8.484.329.407.000	8.111.605.620.209	95,61
Kementerian Kesehatan		**81.904.877.210.000**	**80.083.756.635.626**	**97,78**	**24.882.700.713.000**	**21.915.562.050.917**	**88,08**	**246.030.542.000**	**208.081.059.950**	**84,58**	**107.033.608.465.000**	**102.207.399.746.493**	**95,49**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 19.c

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	939.817.403.000	38.727.188.000	66.758.069.000	2.390.412.064.000	557.116.807.000	33.288.024.000	168.092.855.000	1.077.609.899.000	5.271.822.309.000
	Realisasi	917.355.010.701	38.181.748.537	65.009.794.775	2.233.243.900.905	513.644.179.202	32.406.805.078	164.109.457.018	1.046.627.734.221	5.010.578.630.437
	%	97,61	98,59	97,38	93,43	92,20	97,35	97,63	97,12	95,04
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	1.409.656.434.000	40.069.503.000	830.329.404.000	29.930.301.196.000	3.419.161.863.000	4.143.934.097.000	349.554.740.000	7.104.822.983.000	47.227.830.220.000
	Realisasi	664.292.384.647	38.126.598.016	806.858.793.183	27.938.511.262.851	3.179.053.663.580	4.017.542.105.990	297.222.497.020	6.779.189.886.605	43.720.797.191.892
	%	47,12	95,15	97,17	93,35	92,98	96,95	85,03	95,42	92,57
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	35.103.609.000	2.684.308.000	15.190.817.000	5.094.702.789.000	227.664.540.000	5.054.930.000	64.858.418.000	301.896.525.000	5.747.155.936.000
	Realisasi	33.475.306.390	2.428.415.000	13.913.349.891	4.303.190.034.286	145.378.458.876	4.714.966.690	62.190.507.648	285.787.999.383	4.851.079.038.164
	%	95,36	90,47	91,59	84,46	63,86	93,27	95,89	94,66	84,41
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	48.786.800.000.000								48.786.800.000.000
	Realisasi	48.624.944.886.000								48.624.944.886.000
	%	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	TOTAL									
	Anggaran	**51.171.377.446.000**	**81.480.999.000**	**912.278.290.000**	**37.415.416.049.000**	**4.203.943.210.000**	**4.182.277.051.000**	**582.506.013.000**	**8.484.329.407.000**	**107.033.608.465.000**
	Realisasi	**50.240.067.587.738**	**78.736.761.553**	**885.781.937.849**	**34.474.945.198.042**	**3.838.076.301.658**	**4.054.663.877.758**	**523.522.461.686**	**8.111.605.620.209**	**102.207.399.746.493**
	%	**98,18**	**96,63**	**97,10**	**92,14**	**91,30**	**96,95**	**89,87**	**95,61**	**95,49**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 19.d

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	51.140.840.744.000	81.480.999.000	907.185.866.000	23.581.051.046.000	3.420.826.567.000	3.953.788.921.000	575.239.148.000	7.619.603.261.000	91.280.016.552.000
	Realisasi	50.210.067.524.777	78.736.761.553	880.831.497.059	22.763.376.764.638	3.114.363.487.939	3.826.571.416.888	516.781.164.209	7.386.889.828.214	88.777.618.445.277
	%	98,18	96,63	97,09	96,53	91,04	96,78	89,84	96,95	97,26
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran				232.975.000.000					232.975.000.000
	Realisasi				152.143.039.895					152.143.039.895
	%	0,00	0,00	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
C	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	7.361.368.000		469.986.000	40.331.524.000	82.902.616.000	14.314.584.000	2.343.272.000	210.169.297.000	357.892.647.000
	Realisasi	6.825.049.967		340.751.028	29.613.006.887	75.389.156.859	13.952.644.150	1.825.381.254	164.423.571.484	292.369.561.629
	%	92,71		72,50	73,42	90,94	97,47	77,90	78,23	81,69
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran				13.559.877.841.000				653.556.276.000	14.213.434.117.000
	Realisasi				11.528.631.749.367				559.291.647.511	12.087.923.396.878
	%	0,00	0,00	0,00	88,80	0 ,00	0,00	0,00	90,67	88,89
E.	HIBAH LUAR NEGERI									
	Anggaran									
	Realisasi									
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	23.175.334.000		4.622.438.000	1.180.638.000	700.214.027.000	214.173.546.000	4.923.593.000	1.000.573.000	949.290.149.000
	Realisasi	23.175.012.994		4.609.689.762	1.180.637.255	648.323.656.860	214.139.816.720	4.915.916.223	1.000.573.000	897.345.302.814
	%	100,00		99,72	100,00	92,59	99,98	99,84	100,00	94,53
	TOTAL									
	Anggaran	**51.171.377.446.000**	**81.480.999.000**	**912.278.290.000**	**37.415.416.049.000**	**4.203.943.210.000**	**4.182.277.051.000**	**582.506.013.000**	**8.484.329.407.000**	**107.033.608.465.000**
	Realisasi	**50.240.067.587.738**	**78.736.761.553**	**885.781.937.849**	**34.474.945.198.042**	**3.838.076.301.658**	**4.054.663.877.758**	**523.522.461.686**	**8.111.605.620.209**	**102.207.399.746.493**
%		**98,18**	**96,63**	**97,10**	**92,14**	**91,30**	**96,95**	**89,87**	**95,61**	**95,49**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 19.e

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2020

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	7.957.320.000	6.276.886.513	78,88
2	Sumatera Utara	9.423.397.000	8.766.220.830	93,03
3	Sumatera Barat	8.037.972.000	6.322.117.851	78,65
4	Riau	5.514.787.000	4.986.097.850	90,41
5	Jambi	6.458.756.000	6.245.665.563	96,70
6	Sumatera Selatan	7.854.326.000	7.009.751.420	89,25
7	Bengkulu	6.526.392.000	6.365.705.188	97,54
8	Lampung	4.995.027.000	4.425.596.660	88,60
9	Kepulauan Bangka Belitung	5.046.832.000	4.642.010.543	91,98
10	Kepulauan Riau	7.093.000.000	5.484.176.011	77,32
11	DKI Jakarta	6.357.500.000	3.562.487.989	56,04
12	Jawa Barat	9.788.668.000	6.097.721.145	62,29
13	Jawa Tengah	11.615.160.000	8.724.302.321	75,11
14	D.I. Yogyakarata	4.797.776.000	4.327.509.875	90,20
15	Jawa Timur	10.959.437.000	9.177.289.400	83,74
16	Banten	5.054.338.000	4.470.064.425	88,44
17	Bali	3.674.169.000	3.205.669.168	87,25
18	Nusa Tenggara Barat	7.468.317.000	6.857.950.201	91,83
19	Nusa Tenggara Timur	12.078.935.000	11.465.837.085	94,92
20	Kalimantan Barat	5.832.604.000	4.890.485.083	83,85
21	Kalimantan Tengah	6.087.258.000	5.543.509.921	91,07
22	Kalimantan Selatan	8.517.855.000	7.578.829.016	88,98
23	Kalimantan Timur	7.281.122.000	5.818.332.488	79,91
24	Kalimantan Utara	5.271.236.000	4.572.591.304	86,75
25	Sulawesi Utara	6.129.022.000	5.649.673.552	92,18
26	Sulawesi Tengah	11.379.510.000	11.107.612.708	97,61
27	Sulawesi Selatan	7.019.359.000	6.109.976.074	87,04
28	Sulawesi Tenggara	4.481.058.000	4.327.693.850	96,58
29	Gorontalo	7.278.886.000	6.903.264.198	94,84
30	Sulawesi Barat	5.274.070.000	4.658.787.850	88,33
31	Maluku	5.440.168.000	4.047.796.602	74,41
32	Maluku Utara	5.817.494.000	5.623.091.811	96,66
33	Papua Barat	8.215.388.000	7.394.790.983	90,01
34	Papua	11.303.403.000	5.441.564.472	48,14
Dekonsentrasi Kemenkes		**246.030.542.000**	**208.081.059.950**	**84,58**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 19.f

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	DAK Fisik			DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	575.261.070.000	330.478.413.779	57,45	348.194.352.000	289.186.404.161	83,05
2	Sumatera Utara	891.175.677.000	649.937.280.155	72,93	557.363.380.000	503.687.996.044	90,37
3	Sumatera Barat	735.304.894.000	355.564.923.468	48,36	250.084.690.000	176.353.415.998	70,52
4	Riau	467.148.983.000	334.893.755.663	71,69	223.531.520.000	200.088.332.729	89,51
5	Jambi	376.590.026.000	247.345.901.006	65,68	193.081.508.000	175.519.928.498	90,90
6	Sumatera Selatan	534.344.934.000	364.268.608.194	68,17	326.166.774.000	301.007.433.242	92,29
7	Bengkulu	385.422.329.000	211.613.661.170	54,90	175.030.201.000	142.316.071.786	81,31
8	Lampung	459.650.212.000	338.748.678.007	73,70	286.230.742.000	228.088.048.483	79,69
9	DKI Jakarta	26.591.670.000	26.591.355.000	100,00	23.000.756.000	14.104.965.299	61,32
10	Jawa Barat	972.574.984.000	747.965.136.725	76,91	928.844.382.000	867.199.482.135	93,36
11	Jawa Tengah	1.098.547.609.000	984.368.197.206	89,61	768.882.656.000	599.445.375.711	77,96
12	DI Yogyakarta	181.716.487.000	161.864.200.278	89,08	97.320.978.000	79.138.104.266	81,32
13	Jawa Timur	1.178.412.528.000	897.021.816.018	76,12	802.296.663.000	560.043.874.060	69,81
14	Kalimantan Barat	898.074.274.000	520.435.309.690	57,95	309.479.119.000	284.027.998.200	91,78
15	Kalimantan Tengah	505.160.339.000	300.781.477.276	59,54	223.398.967.000	203.468.393.769	91,08
16	Kalimantan Selatan	322.922.241.000	272.909.720.795	84,51	225.233.689.000	186.161.995.827	82,65
17	Kalimantan Timur	450.696.012.000	293.306.648.989	65,08	185.397.981.000	97.055.100.369	52,35
18	Sulawesi Utara	573.714.648.000	161.696.836.870	28,18	179.703.046.000	80.277.717.281	44,67
19	Sulawesi Tengah	778.673.652.000	294.386.508.266	37,81	248.081.437.000	229.355.801.554	92,45
20	Sulawesi Selatan	992.914.254.000	740.289.509.039	74,56	85.344.704.000	73.259.426.371	85,84
21	Sulawesi Tenggara	694.980.025.000	465.814.353.436	67,03	477.918.043.000	378.392.668.011	79,18
22	Bali	272.045.754.000	269.879.384.396	99,20	313.404.461.000	299.308.803.416	95,50
23	Nusa Tenggara Barat	636.160.891.000	466.401.403.835	73,32	104.904.248.000	55.182.681.124	52,60
24	Nusa Tenggara Timur	1.115.892.045.000	319.137.264.013	28,60	177.095.657.000	148.020.177.811	83,58
25	Maluku	572.772.115.000	211.754.336.399	36,97	509.436.980.000	313.255.504.567	61,49
26	Papua	1.700.616.825.000	215.096.068.304	12,65	216.470.395.000	33.278.258.364	15,37
27	Maluku Utara	487.329.294.000	332.829.239.355	68,30	540.795.715.000	285.402.980.261	52,77
28	Banten	239.761.303.000	143.997.328.915	60,06	188.665.625.000	183.114.618.350	97,06
29	Kepulauan Bangka Belitung	306.809.332.000	277.537.661.027	90,46	195.117.378.000	160.295.333.847	82,15
30	Gorontalo	318.629.754.000	158.002.855.247	49,59	68.668.873.000	56.509.257.371	82,29
31	Kepulauan Riau	219.459.433.000	145.053.136.124	66,10	94.953.849.000	86.014.819.289	90,59
32	Papua Barat	653.808.325.000	46.610.549.117	7,13	87.979.138.000	66.075.041.787	75,10
33	Sulawesi Barat	318.355.187.000	151.935.059.363	47,73	175.480.136.000	15.962.471.595	9,10
34	Kalimantan Utara	219.482.894.000	173.701.783.788	79,14	62.862.078.000	54.287.710.977	86,36
TOTAL		**20.161.000.000.000**	**11.612.218.360.913**	**57,60**	**9.650.420.121.000**	**7.424.886.192.553**	**76,94**

KET:

1. Data Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020
2. Data Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik TA 2020 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) per 28 Januari 2021
3. Data Alokasi dan Realisasi DAK Fisik 2020 merupakan DAK bidang kesehatan (tidak termasuk KB)
4. Data Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik TA 2020 masih dapat bergerak hingga 21 Juli 2021

Lampiran 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	114.623	636	115.259
2	Sumatera Utara	299.198	558	299.756
3	Sumatera Barat	108.653	652	109.305
4	Riau	155.322	440	155.762
5	Jambi	65.427	278	65.705
6	Sumatera Selatan	158.251	487	158.738
7	Bengkulu	36.917	203	37.120
8	Lampung	147.694	440	148.134
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.476	196	27.672
10	Kepulauan Riau	40.568	204	40.772
11	DKI Jakarta	163.138	182	163.320
12	Jawa Barat	880.250	2.891	883.141
13	Jawa Tengah	522.802	2.552	525.354
14	DI Yogyakarta	41.896	239	42.135
15	Jawa Timur	562.006	3.287	565.293
16	Banten	237.844	344	238.188
17	Bali	64.417	349	64.766
18	Nusa Tenggara Barat	102.477	938	103.415
19	Nusa Tenggara Timur	140.603	1092	141.695
20	Kalimantan Barat	99.378	611	99.989
21	Kalimantan Tengah	53.783	293	54.076
22	Kalimantan Selatan	79.621	296	79.917
23	Kalimantan Timur	75.011	555	75.566
24	Kalimantan Utara	12.146	131	12.277
25	Sulawesi Utara	40.496	41	40.537
26	Sulawesi Tengah	62.469	684	63.153
27	Sulawesi Selatan	167.083	861	167.944
28	Sulawesi Tenggara	56.438	576	57.014
29	Gorontalo	23.894	241	24.135
30	Sulawesi Barat	33.034	356	33.390
31	Maluku	44.803	482	45.285
32	Maluku Utara	29.282	337	29.619
33	Papua Barat	21.990	158	22.148
34	Papua	71.352	332	71.684
Indonesia		**4.740.342**	**21.922**	**4.762.264**
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)			**4,6**	

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 12 Februari 2020)

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2019 - 2020

No	Provinsi	2019		2020	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(19)*
1	Aceh	115.422	157	114.623	173
2	Sumatera Utara	302.555	202	299.198	187
3	Sumatera Barat	109.431	116	108.653	125
4	Riau	154.878	119	155.322	129
5	Jambi	65.762	59	65.427	62
6	Sumatera Selatan	159.908	105	158.251	128
7	Bengkulu	37.103	35	36.917	32
8	Lampung	150.245	111	147.694	115
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.429	36	27.476	26
10	Kepulauan Riau	41.058	41	40.568	38
11	DKI Jakarta	166.696	100	163.138	117
12	Jawa Barat	873.575	684	880.250	745
13	Jawa Tengah	527.433	416	522.802	530
14	DI Yogyakarta	54.127	36	41.896	40
15	Jawa Timur	566.300	520	562.006	565
16	Banten	240.174	212	237.844	242
17	Bali	64.541	45	64.417	56
18	Nusa Tenggara Barat	103.315	97	102.477	122
19	Nusa Tenggara Timur	139.136	93	140.603	151
20	Kalimantan Barat	100.232	117	99.378	115
21	Kalimantan Tengah	53.804	74	53.783	68
22	Kalimantan Selatan	80.440	63	79.621	97
23	Kalimantan Timur	74.937	79	75.011	92
24	Kalimantan Utara	12.139	21	12.146	18
25	Sulawesi Utara	40.802	51	40.496	48
26	Sulawesi Tengah	62.707	97	62.469	81
27	Sulawesi Selatan	168.185	144	167.083	133
28	Sulawesi Tenggara	56.906	66	56.438	61
29	Gorontalo	23.856	40	23.894	56
30	Sulawesi Barat	32.851	49	33.034	46
31	Maluku	44.630	52	44.803	70
32	Maluku Utara	29.195	47	29.282	39
33	Papua Barat	21.850	47	21.990	48
34	Papua	71.339	66	71.352	72
Indonesia		**4.772.961**	**4.197**	**4.740.342**	**4.627**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 27 Maret 2020)

Lampiran 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu								
		Perdarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Abortus	Gangguan Sistem Peredaran Darah *	Gangguan Metabolik**	Jantung	Covid19	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	60	34	11	0	2	4	0	0	62
2	Sumatera Utara	67	51	3	0	8	1	0	0	57
3	Sumatera Barat	33	23	5	0	0	9	0	0	55
4	Riau	45	27	6	0	3	3	0	0	45
5	Jambi	23	17	3	0	0	0	0	0	19
6	Sumatera Selatan	42	39	4	0	8	4	0	0	31
7	Bengkulu	13	5	0	0	3	1	0	0	10
8	Lampung	44	24	2	0	10	1	0	0	34
9	Kepulauan Bangka Belitung	4	12	1	0	0	0	0	0	9
10	Kepulauan Riau	7	12	0	0	0	1	0	0	18
11	DKI Jakarta	26	25	5	0	15	1	0	0	45
12	Jawa Barat	206	214	28	0	73	26	0	0	198
13	Jawa Tengah	91	127	22	0	23	10	0	0	257
14	DI Yogyakarta	7	6	7	0	0	0	8	2	10
15	Jawa Timur	127	147	33	0	3	29	0	0	226
16	Banten	63	65	5	0	24	1	0	0	84
17	Bali	4	13	0	0	5	3	0	0	31
18	Nusa Tenggara Barat	38	31	8	0	6	11	0	0	28
19	Nusa Tenggara Timur	63	20	7	0	7	0	0	0	54
20	Kalimantan Barat	40	26	5	0	5	8	0	0	31
21	Kalimantan Tengah	24	17	3	0	1	3	0	0	20
22	Kalimantan Selatan	29	27	4	0	2	12	0	0	23
23	Kalimantan Timur	30	25	5	0	1	3	0	0	28
24	Kalimantan Utara	3	4	0	0	1	1	0	2	7
25	Sulawesi Utara	15	10	1	0	10	0	0	0	12
26	Sulawesi Tengah	32	14	5	0	3	0	0	0	27
27	Sulawesi Selatan	44	30	10	0	4	6	0	1	38
28	Sulawesi Tenggara	25	8	3	0	1	3	0	0	21
29	Gorontalo	11	12	3	0	0	0	0	0	30
30	Sulawesi Barat	11	14	1	0	0	0	0	0	20
31	Maluku	36	7	6	0	9	1	0	0	11
32	Maluku Utara	15	6	3	0	1	1	0	0	13
33	Papua Barat	27	8	6	0	0	0	25	0	7
34	Papua	25	10	11	0	2	1	0	0	23
Indonesia		**1.330**	**1.110**	**216**	**0**	**230**	**144**	**33**	**5**	**1.584**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 27 Maret 2020)

* Jantung, Stroke, dll

** Diabetes Mellitus, dll

Lampiran 23.a

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Ibu Hamil					Ibu Bersalin/Nifas									
		Jumlah	K1		K4*		Jumlah	Persalinan Ditolong Nakes		Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	126.085	112.986	89,6	96.673	76,7	120.354	100.689	83,7	96.999	80,6	100.063	83,1	93.736	77,9	98.741	82,0
2	Sumatera Utara	329.118	281.762	85,6	262.602	79,8	314.158	261.338	83,2	257.425	81,9	263.949	84,0	243.553	77,5	245.989	78,3
3	Sumatera Barat	119.518	99.426	83,2	87.011	72,8	114.086	86.478	75,8	87.049	76,3	87.734	76,9	84.741	74,3	87.785	76,9
4	Riau	170.854	142.968	83,7	78.189	45,8	163.088	131.215	80,5	80.275	49,2	132.246	81,1	119.127	73,0	130.827	80,2
5	Jambi	71.970	71.504	99,4	64.193	89,2	68.698	63.242	92,1	57.211	83,3	64.011	93,2	62.582	91,1	63.964	93,1
6	Sumatera Selatan	174.076	163.956	94,2	158.252	90,9	166.164	152.721	91,9	147.611	88,8	152.470	91,8	146.953	88,4	150.676	90,7
7	Bengkulu	40.609	38.017	93,6	35.163	86,6	38.763	34.148	88,1	33.826	87,3	34.105	88,0	32.291	83,3	33.964	87,6
8	Lampung	162.463	152.289	93,7	151.066	93,0	155.079	143.155	92,3	140.736	90,8	143.087	92,3	138.934	89,6	140.099	90,3
9	Kep. Bangka Belitung	30.224	27.808	92,0	27.808	92,0	28.850	26.059	90,3	25.286	87,6	26.035	90,2	25.579	88,7	26.133	90,6
10	Kepulauan Riau	44.625	44.549	99,8	42.387	95,0	42.596	41.331	97,0	40.865	95,9	41.337	97,0	38.652	90,7	41.201	96,7
11	DKI Jakarta	179.452	180.563	100,6	177.413	98,9	171.295	170.568	99,6	170.568	99,6	170.589	99,6	168.934	98,6	170.199	99,4
12	Jawa Barat	955.411	972.437	101,8	917.642	96,0	922.883	877.130	95,0	867.574	94,0	895.723	97,1	881.457	95,5	899.078	97,4
13	Jawa Tengah	575.082	573.352	99,7	542.212	94,3	548.942	541.122	98,6	532.562	97,0	530.879	96,7	524.800	95,6	532.333	97,0
14	DI Yogyakarta	59.422	45.586	76,7	39.625	66,7	43.775	41.033	93,7	41.013	93,7	40.977	93,6	38.928	88,9	40.578	92,7
15	Jawa Timur	618.207	604.004	97,7	563.342	91,1	590.106	572.588	97,0	561.096	95,1	573404	97,2	563.834	95,5	472.047	80,0
16	Banten	261.628	268.616	102,7	252.716	96,6	249.736	270.572	108,3	245.855	98,4	255.297	102,2	307.024	122,9	266.046	106,5
17	Bali	70.859	71.849	101,4	67.241	94,9	67.638	66.674	98,6	66.603	98,5	66.683	98,6	65.548	96,9	66.407	98,2
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	118.415	105,0	108.146	95,9	107.601	105.226	97,8	104.846	97,4	104.242	96,9	104.242	96,9	104.708	97,3
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	106.131	68,6	83.827	54,2	147.633	94.412	64,0	89.298	60,5	97.016	65,7	91.771	62,2	96.186	65,2
20	Kalimantan Barat	109.316	99.510	91,0	89.111	81,5	104.347	84.687	81,2	76.389	73,2	87.815	84,2	84.019	80,5	87.830	84,2
21	Kalimantan Tengah	59.161	52.843	89,3	47.589	80,4	56.472	45.985	81,4	37.805	66,9	48.201	85,4	45.723	81,0	48.428	85,8
22	Kalimantan Selatan	87.583	70.804	80,8	67.770	77,4	83.602	71.877	86,0	67.522	80,8	70.216	84,0	67.866	81,2	70.447	84,3
23	Kalimantan Timur	82.512	73.810	89,5	26.583	32,2	78.762	68.275	86,7	27.658	35,1	68.724	87,3	63.039	80,0	63.509	80,6
24	Kalimantan Utara	13.361	14.536	108,8	12.919	96,7	12.753	13.231	103,7	12.598	98,8	13.281	104,1	12.648	99,2	13.189	103,4
25	Sulawesi Utara	44.546	42.229	94,8	36.475	81,9	42.521	35.429	83,3	33.876	79,7	34.747	81,7	33.837	79,6	34.680	81,6
26	Sulawesi Tengah	68.716	61.653	89,7	55.072	80,1	65.592	54.008	82,3	52.618	80,2	54.456	83,0	51.586	78,6	53.166	81,1
27	Sulawesi Selatan	183.791	168.111	91,5	152.993	83,2	175.437	154.871	88,3	153.336	87,4	154.942	88,3	149.776	85,4	153.993	87,8
28	Sulawesi Tenggara	69.018	59.263	85,9	46.613	67,5	58.917	51.208	86,9	48.574	82,4	51.769	87,9	49.256	83,6	50.769	86,2
29	Gorontalo	26.283	0	0,0	20.268	77,1	25.089	0	0,0	21.878	87,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30	Sulawesi Barat	36.337	27.857	76,7	24.070	66,2	34.686	17.005	49,0	24.632	71,0	17.431	50,3	25.390	73,2	27.352	78,9
31	Maluku	49.283	38.721	78,6	31.689	64,3	47.043	21.983	46,7	14.772	31,4	23.101	49,1	21.039	44,7	22.442	47,7
32	Maluku Utara	32.210	27.710	86,0	22.775	70,7	30.746	23.191	75,4	21.360	69,5	24.010	78,1	23.515	76,5	23.408	76,1
33	Papua Barat	24.189	13.798	57,0	8.334	34,5	23.090	11.118	48,2	8.005	34,7	8.442	36,6	7.096	30,7	7.826	33,9
34	Papua	78.487	46.378	59,1	21.550	27,5	74.920	37.273	49,8	33.412	44,6	29.165	38,9	23.631	31,5	27.738	37,0
Indonesia		**5.221.784**	**4.873.441**	**93,3**	**4.419.319**	**84,6**	**4.975.422**	**4.469.842**	**89,8**	**4.281.133**	**86,0**	**4.466.147**	**89,8**	**4.391.107**	**88,3**	**4.351.737**	**87,5**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 23.b

PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil		Puskesmas Melaksanakan P4K		Jumlah RTK
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	359	248	69,08	0	0,00	105
2	Sumatera Utara	608	452	74,34	586	96,38	233
3	Sumatera Barat	276	218	78,99	0	0,00	0
4	Riau	231	202	87,45	0	0,00	42
5	Jambi	207	204	98,55	203	98,07	50
6	Sumatera Selatan	341	341	100,00	341	100,00	101
7	Bengkulu	179	176	98,32	179	100,00	60
8	Lampung	312	292	93,59	71	22,76	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,00	64	100,00	21
10	Kepulauan Riau	88	80	90,91	86	97,73	14
11	DKI Jakarta	315	153	48,57	0	0,00	0
12	Jawa Barat	1.083	790	72,95	1.010	93,26	51
13	Jawa Tengah	878	357	40,66	0	0,00	0
14	DI Yogyakarta	121	119	98,35	0	0,00	1
15	Jawa Timur	968	568	58,68	915	94,52	22
16	Banten	245	241	98,37	245	100,00	0
17	Bali	120	73	60,83	120	100,00	18
18	Nusa Tenggara Barat	174	173	99,43	173	99,43	6
19	Nusa Tenggara Timur	410	113	27,56	0	0,00	0
20	Kalimantan Barat	246	211	85,77	70	28,46	74
21	Kalimantan Tengah	205	158	77,07	189	92,20	53
22	Kalimantan Selatan	236	227	96,19	236	100,00	49
23	Kalimantan Timur	187	86	45,99	183	97,86	42
24	Kalimantan Utara	55	55	100,00	37	67,27	27
25	Sulawesi Utara	195	193	98,97	0	0,00	0
26	Sulawesi Tengah	207	173	83,57	207	100,00	72
27	Sulawesi Selatan	461	391	84,82	461	100,00	194
28	Sulawesi Tenggara	292	277	94,86	291	99,66	0
29	Gorontalo	93	93	100,00	0	0,00	0
30	Sulawesi Barat	96	76	79,17	70	72,92	0
31	Maluku	215	153	71,16	210	97,67	0
32	Maluku Utara	147	139	94,56	143	97,28	0
33	Papua Barat	161	14	8,70	0	0,00	13
34	Papua	428	24	5,61	0	0,00	0
Indonesia		**10.203**	**7.134**	**69,92**	**5.504**	**53,94**	**1.248**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

* hanya Puskesmas teregistrasi

Lampiran 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	126.085	21.842	17,3	22.452	17,8	18.456	14,6	12.282	9,7	9.709	7,7	62.899	49,9
2	Sumatera Utara	329.118	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Sumatera Barat	119.518	9.968	8,3	11.478	9,6	10.147	8,5	8.885	7,4	8.948	7,5	39.458	33,0
4	Riau	170.854	7.045	4,1	8.752	5,1	12.795	5,0	12.859	7,5	14.283	8,4	48.689	28,5
5	Jambi	71.970	12.565	17,5	13.516	18,8	10.484	14,6	7.848	10,9	6.427	8,9	38.275	53,2
6	Sumatera Selatan	174.076	59.120	34,0	56.959	32,7	25.502	12,8	22.333	12,8	20.641	11,9	125.435	72,1
7	Bengkulu	40.609	6.301	15,5	6.378	15,7	4.986	6,6	5.388	13,3	4.982	12,3	21.734	53,5
8	Lampung	162.463	932	0,6	898	0,6	1.189	0,7	1.500	0,9	1.666	1,0	5.253	3,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.224	385	1,3	909	3,0	2518	0,0	2994	9,9	4248	14,1	10669	35,3
10	Kepulauan Riau	44.625	5.807	13,0	5.515	12,4	4.835	10,5	4.977	11,2	5.534	12,4	20.861	46,7
11	DKI Jakarta	179.452	17.046	9,5	20.405	11,4	22.950	12,8	20.920	11,7	24.668	13,7	88.943	49,6
12	Jawa Barat	955.411	449.119	47,0	409.160	42,8	177.228	17,9	104.615	10,9	74.203	7,8	765.206	80,1
13	Jawa Tengah	575.082	90.290	15,7	76.188	13,2	76.140	10,3	84.356	14,7	97.655	17,0	334.339	58,1
14	DI Yogyakarta	59.422	51	0,1	528	0,9	9.181	16,6	11.965	20,1	21.745	36,6	43.419	73,1
15	Jawa Timur	618.207	26.171	4,2	22.961	3,7	40.142	5,8	63.976	10,3	410.271	66,4	537.350	86,9
16	Banten	261.628	92.301	35,3	86.246	33,0	32.047	12,2	21.274	8,1	16.348	6,2	155.915	59,6
17	Bali	70.859	22	0,0	155	0,2	1.152	1,6	4.574	6,5	26.276	37,1	32.157	45,4
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	24.725	21,9	24.831	22,0	19.163	15,8	13.625	12,1	10.953	9,7	68.572	60,8
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	19.870	12,8	16.789	10,9	11.550	6,8	6.490	4,2	5.915	3,8	40.744	26,3
20	Kalimantan Barat	109.316	9.872	9,0	10.846	9,9	10.002	0,0	9.045	8,3	9.660	8,8	39.553	36,2
21	Kalimantan Tengah	59.161	13.123	22,2	11.583	19,6	5.524	8,5	3.926	6,6	3.201	5,4	24.234	41,0
22	Kalimantan Selatan	87.583	12.533	14,3	16.803	19,2	12.922	6,0	7.700	8,8	4.211	4,8	41.636	47,5
23	Kalimantan Timur	82.512	5387	6,5	5545	6,7	4386	0,0	3677	4,5	4163	5,0	17.771	21,5
24	Kalimantan Utara	13.361	394	2,9	546	4,1	514	3,5	544	4,1	607	4,5	2.211	16,5
25	Sulawesi Utara	44.546	1.903	4,3	1.443	3,2	467	0,9	214	0,5	155	0,3	2.279	5,1
26	Sulawesi Tengah	68.716	15.233	22,2	16.570	24,1	13.591	12,9	10.496	15,3	9.185	13,4	49.842	72,5
27	Sulawesi Selatan	183.791	63.875	34,8	54.154	29,5	25.552	11,0	15.424	8,4	11.715	6,4	106.845	58,1
28	Sulawesi Tenggara	69.018	17.998	26,1	15.732	22,8	8.118	10,5	5.180	7,5	4.384	6,4	33.414	48,4
29	Gorontalo	26.283	13.222	50,3	11.982	45,6	1.844	7,0	818	3,1	779	3,0	15.423	58,7
30	Sulawesi Barat	36.337	5.921	16,3	5.469	15,1	4.039	11,1	2.091	5,8	1.650	4,5	13.249	36,5
31	Maluku	49.283	17.085	34,7	13.408	27,2	5.171	4,1	3.136	6,4	2.682	5,4	24.397	49,5
32	Maluku Utara	32.210	16.212	50,3	13.852	43,0	3.624	1,2	1.705	5,3	1.498	4,7	20.679	64,2
33	Papua Barat	24.189	1959	8,1	1902	7,9	1804	6,6	1375	5,7	2288	9,5	7.369	30,5
34	Papua	78.487	12.010	15,3	8.066	10,3	4.694	5,2	2.581	3,3	2.847	3,6	18.188	23,2
Indonesia		**5.221.784**	**1.050.287**	**20,1**	**972.021**	**18,6**	**582.717**	**9,6**	**478.773**	**9,2**	**823.497**	**15,8**	**2.857.008**	**54,7**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 5 Mei 2021)

Lampiran 25

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	1.008.563	38.868	3,9	27.795	2,8	23.319	2,3	18.895	1,9	14.608	1,4
2	Sumatera Utara	2.536.146	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Sumatera Barat	932.708	1.304	0,1	500	0,1	789	0,1	359	0,0	588	0,1
4	Riau	1.298.840	3.791	0,3	3.791	0,3	5.730	0,4	4.349	0,3	4.244	0,3
5	Jambi	681.903	5.443	0,8	3.788	0,6	3.966	0,6	2.928	0,4	3.084	0,5
6	Sumatera Selatan	1.535.939	8.248	0,5	3.517	0,2	4.280	0,3	1.665	0,1	1.569	0,1
7	Bengkulu	371.224	987	0,3	349	0,1	404	0,1	332	0,1	398	0,1
8	Lampung	1.449.606	371	0,0	414	0,0	803	0,1	652	0,0	535	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	272.638	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10	Kepulauan Riau	432.555	3.177	0,7	1.574	0,4	1.913	0,4	1.366	0,3	1.449	0,3
11	DKI Jakarta	2.019.402	16.056	0,8	13.316	0,7	18.445	0,9	14.734	0,7	17.359	0,9
12	Jawa Barat	8.886.516	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	Jawa Tengah	5.783.610	379.931	6,6	105.533	1,8	107.360	1,9	124.906	2,2	123.824	2,1
14	DI Yogyakarta	675.696	66	0,0	464	0,1	3.033	0,4	3.179	0,5	6.222	0,9
15	Jawa Timur	6.748.698	235.338	3,5	72.009	1,1	240.122	3,6	680.593	10,1	4.818.223	71,4
16	Banten	2.448.059	7.407	0,3	5.307	0,2	5.283	0,2	5.051	0,2	5.350	0,2
17	Bali	748.221	4	0,0	4	0,0	10	0,0	54	0,0	103	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	945.126	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	921.397	1.658	0,2	2.027	0,2	1.117	0,1	697	0,1	443	0,0
20	Kalimantan Barat	925.545	5.519	0,6	4.514	0,5	4.317	0,5	3.403	0,4	5.146	0,6
21	Kalimantan Tengah	503.047	3.378	0,7	1.672	0,3	1.237	0,2	782	0,2	596	0,1
22	Kalimantan Selatan	747.203	14.908	2,0	8.341	1,1	3.101	0,4	1.923	0,3	1.333	0,2
23	Kalimantan Timur	678.379	4400	0,6	2879	0,4	2741	0,4	2413	0,4	2564	0,4
24	Kalimantan Utara	135.666	475	0,4	846	0,6	745	0,5	768	0,6	740	0,5
25	Sulawesi Utara	422.592	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	534.901	5.727	1,1	3.377	0,6	2.570	0,5	1.778	0,3	1.631	0,3
27	Sulawesi Selatan	1.606.391	14.072	0,9	3.661	0,2	2.660	0,2	1.496	0,1	1.078	0,1
28	Sulawesi Tenggara	482.118	2.847	0,6	587	0,1	527	0,1	201	0,0	192	0,0
29	Gorontalo	223.997	2.595	1,2	1.603	0,7	1.222	0,5	656	0,3	456	0,2
30	Sulawesi Barat	249.899	256	0,1	134	0,1	40	0,0	65	0,0	6	0,0
31	Maluku	318.930	4.455	1,4	3.095	1,0	1.405	0,4	875	0,3	748	0,2
32	Maluku Utara	224.201	3.773	1,7	2.850	1,3	2.699	1,2	1.921	0,9	1.546	0,7
33	Papua Barat	180.420	460	0,3	730	0,4	1150	0,6	1107	0,6	1337	0,7
34	Papua	640.376	15.063	2,4	11.689	1,8	7.772	1,2	4.984	0,8	4743	0,7
Indonesia		**47.570.512**	**780.577**	**1,6**	**286.366**	**0,6**	**448.761**	**0,9**	**882.132**	**1,9**	**5.020.115**	**10,6**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 5 Mei 2021)

Lampiran 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	1.134.648	60.710	5,4	50.247	4,4	41.775	3,7	31.177	2,7	24.317	2,1
2	Sumatera Utara	2.865.264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	Sumatera Barat	1.052.226	11.272	1,1	11.978	1,1	10.936	1,0	9.244	0,9	9.536	0,9
4	Riau	1.469.694	10.836	0,7	12.543	0,9	18.525	1,3	17.208	1,2	18.527	1,3
5	Jambi	753.873	18.008	2,4	17.304	2,3	14.450	1,9	10.776	1,4	9.511	1,3
6	Sumatera Selatan	1.710.015	67.449	3,9	60.476	3,5	29.782	1,7	23.998	1,4	22.210	1,3
7	Bengkulu	411.833	7.288	1,8	6.727	1,6	5.390	1,3	5.720	1,4	5.380	1,3
8	Lampung	1.612.069	1.303	0,1	1.312	0,1	1.992	0,1	2.152	0,1	2.201	0,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	302.862	0	0,0	0	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0
10	Kepulauan Riau	477.180	8.984	1,9	7.089	1,5	6.748	1,4	6.343	1,3	6.983	1,5
11	DKI Jakarta	2.198.854	33.102	1,5	33.721	1,5	41.395	1,9	35.654	1,6	42.027	1,9
12	Jawa Barat	9.841.927	449.119	4,6	409.160	4,2	177.228	1,8	104.615	1,1	74.203	0,8
13	Jawa Tengah	6.358.692	470.220	7,4	181.721	2,9	183.500	2,9	209.263	3,3	221.478	3,5
14	DI Yogyakarta	722.279	117	0,0	992	0,1	12.214	1,7	15.144	2,1	27.967	3,9
15	Jawa Timur	7.366.905	261.509	3,5	94.970	1,3	280.264	3,8	744.569	10,1	5.228.494	71,0
16	Banten	2.709.687	99.708	3,7	91.553	3,4	37.330	1,4	26.325	1,0	21.698	0,8
17	Bali	819.080	26	0,0	157	0,0	1.162	0,1	7.513	0,9	26.379	3,2
18	Nusa Tenggara Barat	1.057.851	24.725	2,3	24.831	2,3	19.163	1,8	13.625	1,3	10.953	1,0
19	Nusa Tenggara Timur	1.076.060	21.528	2,0	18.816	1,7	12.667	1,2	7.187	0,7	6.358	0,6
20	Kalimantan Barat	1.034.861	15.391	1,5	15.360	1,5	14.319	1,4	12.448	1,2	14.806	1,4
21	Kalimantan Tengah	562.208	16.501	2,9	13.255	2,4	6.761	1,2	4.708	0,8	3.797	0,7
22	Kalimantan Selatan	834.786	27.441	3,3	25.144	3,0	16.023	1,9	9.623	1,2	5.544	0,7
23	Kalimantan Timur	760.891	9.787	1,3	8.424	1,1	7.127	0,9	6.090	0,8	6.727	0,9
24	Kalimantan Utara	149.027	869	0,6	1.392	0,9	1.259	0,8	1.312	0,9	1.347	0,9
25	Sulawesi Utara	467.138	1.903	0,4	1.443	0,3	467	0,1	214	0,0	155	0,0
26	Sulawesi Tengah	603.617	20.960	3,5	19.947	3,3	16.161	2,7	12.274	2,0	10.816	1,8
27	Sulawesi Selatan	1.790.182	77.947	4,4	57.815	3,2	28.212	1,6	16.920	0,9	12.793	0,7
28	Sulawesi Tenggara	551.136	800	0,1	16.319	3,0	8.645	1,6	5.381	1,0	4.576	0,8
29	Gorontalo	250.280	15.817	6,3	13.585	5,4	3.066	1,2	1.474	0,6	1.235	0,5
30	Sulawesi Barat	286.236	6.177	2,2	5.603	2,0	4.079	1,4	2.156	0,8	1.656	0,6
31	Maluku	368.213	21.540	5,8	16.503	4,5	6.576	1,8	4.011	1,1	3.430	0,9
32	Maluku Utara	256.411	19.985	7,8	16.702	6,5	6.323	2,5	3.626	1,4	3.044	1,2
33	Papua Barat	204.609	2.419	1,2	2.632	1,3	2.954	1,4	2.482	1,2	3.625	1,8
34	Papua	718.863	27.073	3,8	19.755	2,7	12.466	1,7	7.565	1,1	7.590	1,1
Indonesia		**52.779.457**	**1.810.515**	**3,4**	**1.257.477**	**2,4**	**1.028.960**	**1,9**	**1.360.797**	**2,6**	**5.839.365**	**11,1**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (data per 5 Mei 2021)

Lampiran 27.a

JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	TTD (90 Tablet)	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	126.085	89.701	71,1
2	Sumatera Utara	329.118	220.467	67,0
3	Sumatera Barat	119.518	90.385	75,6
4	Riau	170.854	131.996	77,3
5	Jambi	71.970	64.833	90,1
6	Sumatera Selatan	174.076	145.095	83,4
7	Bengkulu	40.609	34.816	85,7
8	Lampung	162.463	152.790	94,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.224	25.758	85,2
10	Kepulauan Riau	44.625	42.146	94,4
11	DKI Jakarta	179.452	178.244	99,3
12	Jawa Barat	955.411	910.811	95,3
13	Jawa Tengah	575.082	492.813	85,7
14	DI Yogyakarta	59.422	40.061	67,4
15	Jawa Timur	618.207	549.805	88,9
16	Banten	261.628	238.840	91,3
17	Bali	70.859	68.096	96,1
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	107.871	95,7
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	92.243	59,6
20	Kalimantan Barat	109.316	90.768	83,0
21	Kalimantan Tengah	59.161	45.902	77,6
22	Kalimantan Selatan	87.583	69.399	79,2
23	Kalimantan Timur	82.512	61.372	74,4
24	Kalimantan Utara	13.361	12.885	96,4
25	Sulawesi Utara	44.546	38.334	86,1
26	Sulawesi Tengah	68.716	55.287	80,5
27	Sulawesi Selatan	183.791	150.577	81,9
28	Sulawesi Tenggara	69.018	43.778	63,4
29	Gorontalo	26.283	20.121	76,6
30	Sulawesi Barat	36.337	23.712	65,3
31	Maluku	49.283	25.049	50,8
32	Maluku Utara	32.210	22.242	69,1
33	Papua Barat	24.189	7213	29,8
34	Papua	78.487	19.859	25,3
Indonesia		**5.221.784**	**4.363.269**	**83,6**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 27.b

PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil (9 Bulan)		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	337.198	53.631	15,9	126.085	89.701	71,1
2	Sumatera Utara	3.417.096	1.141.265	33,4	394.373	220.467	55,9
3	Sumatera Barat	256.710	66.902	26,1	119.518	90.385	75,6
4	Riau	282.588	181.324	64,2	165.154	131.996	79,9
5	Jambi	124.832	86.127	69,0	73.078	64.833	88,7
6	Sumatera Selatan	644.029	253.708	39,4	175.341	145.095	82,8
7	Bengkulu	73.450	20.383	27,8	40.609	34.816	85,7
8	Lampung	415.920	246.571	59,3	164.526	152.790	92,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	311.961	132.067	42,3	27.467	25.758	93,8
10	Kepulauan Riau	137.168	58.126	42,4	47.290	42.146	89,1
11	DKI Jakarta	406.751	128.427	31,6	183.811	178.244	97,0
12	Jawa Barat	2.072.071	708.684	34,2	957.701	910.811	95,1
13	Jawa Tengah	1.547.461	828.092	53,5	579.228	492.813	85,1
14	DI Yogyakarta	159.692	108.135	67,7	45.586	40.061	87,9
15	Jawa Timur	1.636.066	736.453	45,0	618.630	549.805	88,9
16	Banten	469.283	180.280	38,4	256.914	238.840	93,0
17	Bali	191.333	98.510	51,5	70.244	68.096	96,9
18	Nusa Tenggara Barat	311.908	99.487	31,9	113.831	107.871	94,8
19	Nusa Tenggara Timur	326.789	195.068	59,7	131.054	92.243	70,4
20	Kalimantan Barat	303.553	50.507	16,6	109.314	90.768	83,0
21	Kalimantan Tengah	98.941	54.934	55,5	59.129	45.902	77,6
22	Kalimantan Selatan	186.148	73.365	39,4	87.265	69.399	79,5
23	Kalimantan Timur	160.403	12.463	7,8	75.668	61.372	81,1
24	Kalimantan Utara	35.495	6.210	17,5	14.701	12.885	87,6
25	Sulawesi Utara	106.676	12.873	12,1	41.112	38.334	93,2
26	Sulawesi Tengah	178.003	101.762	57,2	68.716	55.287	80,5
27	Sulawesi Selatan	411.941	242.489	58,9	168.940	150.577	89,1
28	Sulawesi Tenggara	74.740	30.186	40,4	62.648	43.778	69,9
29	Gorontalo	347.481	57.025	16,4	25.685	20.121	78,3
30	Sulawesi Barat	55.296	20.237	36,6	24.160	23.712	98,1
31	Maluku	148.657	45.750	30,8	45.819	25.049	54,7
32	Maluku Utara	68.664	52.313	76,2	29.626	22.242	75,1
33	Papua Barat	21.077	10.122	48,0	24.110	7.213	29,9
34	Papua	326.643	27.930	8,6	78.487	19.859	25,3
Indonesia		**15.646.023**	**6.121.404**	**39,1**	**5.205.820**	**4.363.269**	**83,8**

Sumber: Laporan Rutin Tahun 2020

Lampiran 27.c

PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	72,2	89,1
2	Sumatera Utara	95,7	96,3
3	Sumatera Barat	89,8	95,1
4	Riau	96,0	98,3
5	Jambi	97,0	98,7
6	Sumatera Selatan	99,2	96,6
7	Bengkulu	94,8	96,4
8	Lampung	91,9	95,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	90,2	98,7
10	Kepulauan Riau	98,7	100,0
11	DKI Jakarta	97,5	98,2
12	Jawa Barat	51,0	66,4
13	Jawa Tengah	92,1	95,8
14	DI Yogyakarta	98,1	99,9
15	Jawa Timur	73,1	80,9
16	Banten	85,0	99,9
17	Bali	100,0	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	79,0	91,0
19	Nusa Tenggara Timur	64,2	90,0
20	Kalimantan Barat	93,0	95,9
21	Kalimantan Tengah	95,6	99,7
22	Kalimantan Selatan	98,0	98,8
23	Kalimantan Timur	96,0	96,1
24	Kalimantan Utara	75,6	90,5
25	Sulawesi Utara	96,0	95,9
26	Sulawesi Tengah	89,1	92,1
27	Sulawesi Selatan	89,6	93,1
28	Sulawesi Tenggara	81,9	88,1
29	Gorontalo	99,9	100,0
30	Sulawesi Barat	91,3	96,3
31	Maluku	81,9	92,0
32	Maluku Utara	64,9	85,5
33	Papua Barat	96,4	73,6
34	Papua	20,4	65,7
Indonesia		**78,5**	**89,0**

Sumber: Laporan Rutin 2020

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 28.a

JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI																
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah Peserta KB Modern	%	Jumlah Peserta KB Tradisional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(18)
1	Aceh	681.564	4.818	1,30	266.240	71,94	70.304	19,00	12.952	3,50	452	0,12	4.132	1,12	11.200	3,03	370.098	54,30	7.583
2	Sumatera Utara	1.702.756	23.448	2,78	426.199	50,61	182.129	21,63	41.163	4,89	7.866	0,93	59.753	7,10	101.507	12,05	842.065	49,45	34.162
3	Sumatera Barat	739.370	11.784	2,73	268.088	62,15	51.365	11,91	35.637	8,26	1.805	0,42	15.572	3,61	47.122	10,92	431.373	58,34	2.787
4	Riau	774.495	11.124	2,80	257.172	64,64	86.302	21,69	13.525	3,40	1.836	0,46	5.393	1,36	22.529	5,66	397.881	51,37	9.534
5	Jambi	624.187	4.071	0,95	275.765	64,21	90.976	21,18	13.451	3,13	732	0,17	5.214	1,21	39.265	9,14	429.474	68,81	5.481
6	Sumatera Selatan	1.232.939	7.871	0,96	584.827	71,37	94.757	11,56	16.573	2,02	2.093	0,26	6.394	0,78	106.957	13,05	819.472	66,46	4.917
7	Bengkulu	324.031	4.412	1,91	153.855	66,57	28.270	12,23	7.999	3,46	791	0,34	3.312	1,43	32.464	14,05	231.103	71,32	1.093
8	Lampung	1.232.133	7.086	0,84	593.235	70,10	118.629	14,02	36.314	4,29	3.133	0,37	6.337	0,75	81.556	9,64	846.290	68,68	6.275
9	Kep. Bangka Belitung	214.162	1.770	1,23	87.692	60,93	42.005	29,18	4.014	2,79	331	0,23	1.916	1,33	6.201	4,31	143.929	67,21	2.105
10	Kepulauan Riau	262.346	2.819	2,34	66.971	55,70	32.918	27,38	7.259	6,04	403	0,34	3.437	2,86	6.419	5,34	120.226	45,83	3.922
11	DKI Jakarta	1.026.602	12.685	2,19	336.541	57,97	88.991	15,33	102.680	17,69	3.337	0,57	15.587	2,68	20.704	3,57	580.525	56,55	7.639
12	Jawa Barat	8.193.401	46.628	0,86	3.495.227	64,40	958.487	17,66	502.812	9,26	20.598	0,38	127.898	2,36	275.578	5,08	5.427.228	66,24	18.182
13	Jawa Tengah	5.993.857	52.621	1,35	2.658.244	68,30	397.765	10,22	283.601	7,29	22.300	0,57	143.896	3,70	333.408	8,57	3.891.835	64,93	25.398
14	DI Yogyakarta	538.019	18.029	5,70	148.419	46,93	32.474	10,27	75.060	23,73	3.189	1,01	19.644	6,21	19.427	6,14	316.242	58,78	6.256
15	Jawa Timur	6.437.458	40.094	0,97	2.599.568	63,04	750.981	18,21	304.373	7,38	27.646	0,67	148.825	3,61	252.016	6,11	4.123.503	64,05	67.077
16	Banten	1.733.666	10.566	0,94	849.264	75,94	132.650	11,86	57.333	5,13	2.897	0,26	13.357	1,19	52.333	4,68	1.118.400	64,51	16.688
17	Bali	555.599	5.572	1,50	178.501	48,04	36.871	9,92	126.003	33,91	2.083	0,56	10.963	2,95	11.588	3,12	371.581	66,88	3.459
18	Nusa Tenggara Barat	903.315	2.998	0,53	391.224	69,56	52.459	9,33	39.408	7,01	2.190	0,39	8.434	1,50	65.741	11,69	562.454	62,27	8.753
19	Nusa Tenggara Timur	466777	854	0,48	105646	59,64	14335	8,09	15412	8,70	1177	0,66	8592	4,85	31124	17,57	177140	37,95	3578
20	Kalimantan Barat	421.145	2.146	0,86	165.378	66,08	66.105	26,41	6.390	2,55	533	0,21	1.862	0,74	7.860	3,14	250.274	59,43	7.836
21	Kalimantan Tengah	317.332	1.214	0,58	132.654	62,85	59.788	28,33	2.675	1,27	646	0,31	1.484	0,70	12.614	5,98	211.075	66,52	11.607
22	Kalimantan Selatan	651.250	3.353	0,74	232.255	51,09	189.617	41,71	7.068	1,55	1.072	0,24	3.419	0,75	17.821	3,92	454.605	69,80	2.614
23	Kalimantan Timur	596.047	6.266	1,90	176.783	53,65	99.184	30,10	24.130	7,32	1.211	0,37	7.411	2,25	14.519	4,41	329.504	55,28	4.511
24	Kalimantan Utara	1027	3	0,57	263	49,72	211	39,89	11	2,08	0	0,00	8	1,51	33	6,24	529	51,51	3
25	Sulawesi Utara	397.771	2.577	0,98	134.432	51,22	57.720	21,99	15.681	5,98	2.330	0,89	4.885	1,86	44.816	17,08	262.441	65,98	3.461
26	Sulawesi Tengah	468295	852	0,29	151860	51,99	98030	33,56	13380	4,58	733	0,25	4275	1,46	22951	7,86	292081	62,37	2778
27	Sulawesi Selatan	1.237.352	12.128	1,59	464.098	60,95	148.970	19,56	28.464	3,74	3.867	0,51	22.324	2,93	81.616	10,72	761.467	61,54	14.784
28	Sulawesi Tenggara	340.056	5.515	3,05	96.119	53,21	46.673	25,84	6.701	3,71	973	0,54	3.418	1,89	21.256	11,77	180.655	53,13	10.074
29	Gorontalo	179633	241	0,20	53131	45,07	28360	24,06	7098	6,02	516	0,44	3046	2,58	25502	21,63	117894	65,63	1128
30	Sulawesi Barat	198936	1033	0,93	57336	51,74	38267	34,53	2564	2,31	344	0,31	1250	1,13	10019	9,04	110813	55,70	1045
31	Maluku	220949	322	0,37	60546	70,34	11647	13,53	1625	1,89	145	0,17	844	0,98	10943	12,71	86072	38,96	1828
32	Maluku Utara	174013	101	0,11	63901	70,10	8590	9,42	1573	1,73	151	0,17	476	0,52	16369	17,96	91161	52,39	441
33	Papua Barat	83527	105	0,43	16776	69,25	4621	19,07	524	2,16	76	0,31	524	2,16	1600	6,60	24226	29,00	734
34	Papua	129119	225	0,70	23431	72,94	3988	12,42	705	2,19	150	0,47	588	1,83	3035	9,45	32122	24,88	459
	Indonesia	**31.527.492**	**228.947**	**1,07**	**12.658.568**	**72,94**	**4.124.439**	**19,36**	**1.814.158**	**8,51**	**117.606**	**0,55**	**556.447**	**2,61**	**1.808.093**	**8,49**	**21.308.258**	**67,59**	**298.192**

Sumber: Pendataan Keluarga , BKKBN, 2020

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

Lampiran 28.b

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA
MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	PUS Peserta KB																					
		Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)							Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)						Jejaring					Pelayanan Bergerak	%	Lainnya	%
		RSUP/ RSUD	RS TNI	RS Polri	RS Swasta	Klinik Utama	Jumlah	%	Puskesmas	Klinik Pratama	Praktek Dokter	RS Pratama	Jumlah	%	Pustu/Puskling/ Bidan Desa	Poskesdes /Poli ndes	Praktek Bidan	Jumlah	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	8.233	368	173	1.144	1.580	11.498	3,04	107.889	2.299	6.020	136	116.344	30,80	78.980	36.725	100.318	216.023	57,20	3.732	0,99	30.084	7,97
2	Sumatera Utara	48.809	4.025	1.975	16.839	9.899	81.547	9,31	143.831	13.366	14.520	5.002	176.719	20,17	141.677	32.008	297.692	471.377	53,80	30.033	3,43	116.551	13,30
3	Sumatera Barat	19.329	1.266	384	4.320	1.817	27.116	6,25	84.332	2.269	5.315	221	92.137	21,22	132.238	30.575	122.417	285.230	65,70	4.689	1,08	24.992	5,76
4	Riau	11.540	425	400	5.053	4.663	22.081	5,42	76.610	3.829	9.728	3.728	93.895	23,05	85.706	17.103	140.402	243.211	59,70	6.710	1,65	41.519	10,19
5	Jambi	5.567	416	307	2.705	2.922	11.917	2,74	65.885	2.485	5.029	135	73.534	16,91	141.083	22.272	126.741	290.096	66,70	15.622	3,59	43.786	10,07
6	Sumatera Selatan	10.163	556	363	3.446	1.194	15.722	1,91	128.877	1.971	8.473	398	139.719	16,95	154.615	129.782	336.221	620.618	75,28	17.777	2,16	30.553	3,71
7	Bengkulu	5.005	227	249	1.029	608	7.118	3,07	45.050	636	1.900	91	47.677	20,53	85.753	10.563	62.959	159.275	68,60	8.023	3,46	10.103	4,35
8	Lampung	12.103	490	282	4.457	3.577	20.909	2,45	164.983	3.961	11.478	664	181.086	21,24	198.213	34.357	365.033	597.603	70,09	8.850	1,04	44.117	5,17
9	Kep. Bangka Belitung	2.011	47	17	930	583	3.588	2,46	10.578	512	2.028	102	13.220	9,05	36.312	24.386	48.079	108.777	74,49	3.117	2,13	17.332	11,87
10	Kepulauan Riau	8.880	267	30	2.485	2.289	13.951	11,24	18.023	2.187	3.326	88	23.624	19,03	14.658	6.232	43.689	64.579	52,02	929	0,75	21.065	16,97
11	DKI Jakarta	22.385	4.384	1.465	40.424	8.905	77.563	13,19	154.772	14.666	31.941	1.163	202.542	34,44	4.698	938	219.667	225.303	38,31	7.470	1,27	75.286	12,80
12	Jawa Barat	130.968	23.655	7.629	95.510	31.111	288.873	5,30	801.854	34.933	107.922	4.076	948.785	17,42	892.484	100.498	2.625.453	3.618.435	66,45	66.749	1,23	522.568	9,60
13	Jawa Tengah	168.207	9.705	2.579	58.755	11.349	250.595	6,40	584.038	17.442	77.940	3.948	683.368	17,45	666.007	156.645	1.852.802	2.675.454	68,30	28.365	0,72	279.451	7,13
14	DI Yogyakarta	24.998	1.540	554	13.558	2.183	42.833	13,28	90.705	3.196	9.690	385	103.976	32,24	11.206	1.906	128.357	141.469	43,87	1.524	0,47	32.696	10,14
15	Jawa Timur	62.474	5.859	3.354	32.672	7.533	111.892	2,67	214.511	8.305	46.473	20.591	289.880	6,92	247.619	147.637	673.537	1.068.793	25,50	12.400	0,30	2.707.615	64,61
16	Banten	38.819	1.483	534	22.163	12.633	75.632	6,66	197.837	15.023	22.839	2.180	237.879	20,96	203.937	21.772	480.804	706.513	62,24	23.739	2,09	91.325	8,05
17	Bali	17.074	605	427	9.009	1.018	28.133	7,50	75.860	2.190	22.854	183	101.087	26,95	34.185	8.177	178.878	221.240	58,99	2.489	0,66	22.091	5,89
18	Nusa Tenggara Barat	11.737	1.007	559	1.774	1.187	16.264	2,85	106.132	2.620	9.178	543	118.473	20,74	135.533	163.587	82.157	381.277	66,75	10.770	1,89	44.423	7,78
19	Nusa Tenggara Timur	10.906	273	165	840	519	12.703	7,03	79.257	502	1.103	92	80.954	44,80	45.249	28.319	2.733	76.301	42,22	1.598	0,88	9.162	5,07
20	Kalimantan Barat	3.269	586	1.213	3.181	2.294	10.543	4,08	61.386	2.021	3.332	396	67.135	26,01	54.776	54.585	48.598	157.959	61,20	3.241	1,26	19.232	7,45
21	Kalimantan Tengah	1.932	272	258	332	746	3.540	1,59	47.685	1.043	1.706	5.682	56.116	25,20	67.996	24.885	38.382	131.263	58,95	2.183	0,98	29.580	13,28
22	Kalimantan Selatan	5.211	429	171	835	1.158	7.804	1,71	70.394	1.957	5.096	76	77.523	16,96	114.733	33.472	123.373	271.578	59,40	11.067	2,42	89.247	19,52
23	Kalimantan Timur	11.097	1.117	357	7.314	3.190	23.075	6,91	85.634	3.252	12.296	454	101.636	30,43	35.555	11.712	111.058	158.325	47,40	4.049	1,21	46.930	14,05
24	Kalimantan Utara	13	-	1	-	20	34	6,39	120	6	61	2	189	35,53	112	1	122	235	44,17	2	0,38	72	13,53
25	Sulawesi Utara	9.496	1.183	894	2.181	2.289	16.043	6,03	77.823	1.892	13.874	975	94.564	35,56	47.691	9.901	54.342	111.934	42,10	11.678	4,39	31.683	11,92
26	Sulawesi Tengah	6.262	204	123	794	659	8.042	2,73	58.455	1.532	1.999	125	62.111	21,06	110.688	45.677	28.324	184.689	62,64	6.047	2,05	33.970	11,52
27	Sulawesi Selatan	22.460	2.355	1.252	7.001	2.838	35.906	4,63	226.489	3.088	7.985	1.271	238.833	30,77	267.693	54.890	103.556	426.139	54,90	13.113	1,69	62.264	8,02
28	Sulawesi Tenggara	5.845	1.840	1.472	1.807	2.190	13.154	6,90	55.787	1.513	2.307	450	60.057	31,49	61.311	14.092	18.301	93.704	49,13	5.821	3,05	17.993	9,43
29	Gorontalo	4.294	78	25	453	369	5.219	4,38	45.102	907	1.940	40	47.989	40,32	20.105	8.882	15.044	44.031	36,99	6.622	5,56	15.161	12,74
30	Sulawesi Barat	2.005	62	18	240	338	2.663	2,38	28.034	466	643	34	29.177	26,08	47.933	8.680	12.695	69.308	61,96	2.369	2,12	8.341	7,46
31	Maluku	1.945	397	88	276	373	3.079	3,50	33.737	506	637	18	34.898	39,70	25.934	3.782	11.940	41.656	47,39	1.720	1,96	6.547	7,45
32	Maluku Utara	1.815	47	20	106	323	2.311	2,52	30.017	277	479	23	30.796	33,62	30.929	8.194	13.770	52.893	57,74	2.270	2,48	3.332	3,64
33	Papua Barat	1.073	209	9	65	91	1.447	5,80	12.455	60	226	5	12.746	51,07	5.784	1.204	1.417	8.405	33,67	120	0,48	2.242	8,98
34	Papua	1.547	403	83	122	332	2.487	7,63	19.690	214	516	157	20.577	63,16	4.470	302	2.441	7.213	22,14	220	0,68	2.084	6,40
Indonesia		**697.472**	**65.780**	**27.430**	**341.820**	**122.780**	**1.255.282**	**5,08**	**4.003.832**	**151.126**	**450.854**	**53.434**	**4.659.246**	**18,86**	**4.205.863**	**1.253.741**	**8.471.302**	**13.930.906**	**56,39**	**325.108**	**1,32**	**4.533.397**	**18,35**

Sumber: Pendataan Keluarga , BKKBN, 2020

Lampiran 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Peserta KB Pasca Salin		Peserta KB Pasca Persalinan															
		ABS	%	Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	Sumatera Utara	39.635	16	4122	9,5	9.771	18,3	12.011	26,8	2.199	5,5	6264	14,7	1.610	4,1	17	0,0	3.641	11,2
3	Sumatera Barat	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Riau	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	Jambi	47.021	8	1478	3,1	15.031	32,0	25.729	54,7	2.242	4,8	1968	4,2	290	0,6	50	0,1	233	0,5
6	Sumatera Selatan	113.617	0	10236	0,0	30.813	0,0	71.734	0,0	2.750	0,0	7755	0,0	514	0,0	0	0,0	0	0,0
7	Bengkulu	0	0	21653	55,9	1.351	6,2	3.588	16,6	14209	65,6	676	3,1	1622	7,5	177	0,8	30	0,1
8	Lampung	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9	Kep. Bangka Belitung	17.993	66	299	1,7	4.611	25,6	11.379	63,2	464	2,6	848	4,7	381	2,1	11	0,1	0	0,0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1843	0,0	55	0,0	0	0,0
12	Jawa Barat	582.160	66	6844	1,2	78.009	13,4	357.634	61,4	38.184	6,6	32006	5,5	9.561	1,6	2.178	0,4	10	0,0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	315.299	53	12026	3,8	32.206	10,2	217.161	68,9	27.003	8,6	18838	6,0	8.014	2,5	51	0,0	0	0,0
16	Banten	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17	Bali	33.820	4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20	Kalimantan Barat	34.123	33	479	1,4	7.166	21,0	21.669	63,5	549	1,6	968	2,8	538	1,6	25	0,1	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	29.607	7	381	1,3	6.194	20,9	21.675	73,2	183	0,6	1060	3,6	113	0,4	1	0,0	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	51.342	61	716	1,4	11.281	22,0	36.406	70,9	1.510	2,9	880	1,7	524	1,0	25	0,0	0	0,0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	6.543	0	708	0,0	465	0,0	2532	0,0	274	0,0	301	0,0	193	0,0	2	0,0	517	0,0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	28.813	44	243	0,4	8.049	12,3	16.155	24,6	1.194	1,8	2253	3,4	842	1,3	77	0,1	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	57.980	32	593	1,0	8.340	14,4	35.446	61,1	2.504	4,3	8243	14,2	1.214	2,1	86	0,1	1.554	2,7
28	Sulawesi Tenggara	21.416	0	620	0,0	6.922	0,0	11.630	0,0	499	0,0	1394	0,0	285	0,0	66	0,0	0	0,0
29	Gorontalo	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30	Sulawesi Barat	6.228	0	128	0,0	1.112	0,0	3.572	0,0	157	0,0	300	0,0	130	0,0	0	0,0	0	0,0
31	Maluku	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
32	Maluku Utara	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
33	Papua Barat	2.398	0	382	0,0	4.132	0,0	5898	0,0	222	0,0	581	0,0	95	0,0	0	0,0	3	0,0
34	Papua	14.693	2	478	0,1	2.448	0,4	9.821	1,6	145	0,0	2108	0,3	166	0,0	5	0,0	0	0,0
Indonesia		**1.402.688**	**40**	**11.243**	**8,1**	**35.889**	**26,0**	**85.645**	**62,0**	**3.488**	**2,5**	**8.904**	**6,4**	**1.088**	**0,8**	**13**	**0,0**	**5.988**	**0,4**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2020 (data per 3 Maret 2020)

Lampiran 30.a

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	126.085	27.018	21,43	3	0,01
2	Sumatera Utara	329.118	52.693	16,01	280	0,53
3	Sumatera Barat	119.518	37.266	31,18	11	0,02
4	Riau	170.854	42.528	24,89	140	0,33
5	Jambi	71.970	20.148	27,99	13	0,06
6	Sumatera Selatan	174.076	73.648	42,31	22	0,03
7	Bengkulu	40.609	10.524	25,92	29	0,28
8	Lampung	162.463	61.620	37,93	43	0,07
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.224	21.450	70,97	37	0,17
10	Kepulauan Riau	44.625	17.623	39,49	408	2,32
11	DKI Jakarta	179.452	158.294	88,21	227	0,14
12	Jawa Barat	955.411	375.836	39,34	741	0,20
13	Jawa Tengah	575.082	456.544	79,39	1.437	0,31
14	DI Yogyakarta	59.422	29.729	50,03	41	0,14
15	Jawa Timur	618.207	403.237	65,23	807	0,20
16	Banten	261.628	143.693	54,92	78	0,05
17	Bali	70.859	59.954	84,61	193	0,32
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	48.279	42,83	426	0,88
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	25.982	16,80	79	0,30
20	Kalimantan Barat	109.316	36.092	33,02	39	0,11
21	Kalimantan Tengah	59.161	13.556	22,91	23	0,17
22	Kalimantan Selatan	87.583	19.868	22,68	47	0,24
23	Kalimantan Timur	82.512	37.421	45,35	212	0,57
24	Kalimantan Utara	13.361	9.402	70,37	13	0,14
25	Sulawesi Utara	44.546	6.185	13,88	21	0,34
26	Sulawesi Tengah	68.716	34.038	49,53	21	0,06
27	Sulawesi Selatan	183.791	102.367	55,70	211	0,21
28	Sulawesi Tenggara	69.018	12.121	17,56	8	0,07
29	Gorontalo	26.283	9.427	35,87	18	0,19
30	Sulawesi Barat	36.337	7.150	19,68	3	0,04
31	Maluku	49.283	13.399	27,19	26	0,19
32	Maluku Utara	32.210	6.917	21,47	22	0,32
33	Papua Barat	24.189	8.552	35,35	219	2,56
34	Papua	78.487	22.193	28,28	196	0,88
Indonesia		**5.221.784**	**2.404.754**	**46,05**	**6.094**	**0,25**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2020 (Data SIHA per 5 Januari 2021)

Lampiran 30.b

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(5)*
1	Aceh	126.085	83.186	65,98	842	1,01
2	Sumatera Utara	329.118	32.265	9,80	356	1,10
3	Sumatera Barat	119.518	53.398	44,68	649	1,22
4	Riau	170.854	45.045	26,36	678	1,51
5	Jambi	71.970	34.989	48,62	437	1,25
6	Sumatera Selatan	174.076	71.924	41,32	515	0,72
7	Bengkulu	40.609	15.829	38,98	274	1,73
8	Lampung	162.463	107.828	66,37	1.457	1,35
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.224	21.439	70,93	460	2,15
10	Kepulauan Riau	44.625	17.129	38,38	265	1,55
11	DKI Jakarta	179.452	105.841	58,98	1.475	1,39
12	Jawa Barat	955.411	470.465	49,24	5.892	1,25
13	Jawa Tengah	575.082	415.265	72,21	5.312	1,28
14	DI Yogyakarta	59.422	26.411	44,45	183	0,69
15	Jawa Timur	618.207	424.114	68,60	7.950	1,87
16	Banten	261.628	136.566	52,20	2.083	1,53
17	Bali	70.859	39.713	56,05	488	1,23
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	66.596	59,08	1.998	3,00
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	53.610	34,66	2.627	4,90
20	Kalimantan Barat	109.316	45.647	41,76	1.101	2,41
21	Kalimantan Tengah	59.161	30.631	51,78	770	2,51
22	Kalimantan Selatan	87.583	47.875	54,66	1.024	2,14
23	Kalimantan Timur	82.512	46.149	55,93	885	1,92
24	Kalimantan Utara	13.361	10.220	76,49	212	2,07
25	Sulawesi Utara	44.546	8.319	18,68	128	1,54
26	Sulawesi Tengah	68.716	34.650	50,42	860	2,48
27	Sulawesi Selatan	183.791	125.255	68,15	2.672	2,13
28	Sulawesi Tenggara	69.018	20.673	29,95	715	3,46
29	Gorontalo	26.283	14.848	56,49	485	3,27
30	Sulawesi Barat	36.337	17.414	47,92	383	2,20
31	Maluku	49.283	19.651	39,87	363	1,85
32	Maluku Utara	32.210	15.675	48,67	611	3,90
33	Papua Barat	24.189	4.235	17,51	198	4,68
34	Papua	78.487	19.442	24,77	760	3,91
Indonesia		**5.221.784**	**2.682.297**	**51,37**	**45.108**	**1,68**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 9 April 2021

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah Jumlah estimasi Ibu Hamil sesuai dengan data Pusdatin

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Pemerikasaan HBsAg pada ibu hamil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

Lampiran 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kematian				
		Neonatal	Post Neonatal	Balita		
				Bayi [a]	Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	792	232	1.024	45	1.069
2	Sumatera Utara	608	107	715	50	765
3	Sumatera Barat	559	220	779	158	937
4	Riau	494	102	596	36	632
5	Jambi	313	40	353	7	360
6	Sumatera Selatan	454	82	536	44	580
7	Bengkulu	212	51	263	32	295
8	Lampung	473	69	542	19	561
9	Kepulauan Bangka Belitung	135	51	186	27	213
10	Kepulauan Riau	182	47	229	21	250
11	DKI Jakarta	300	89	389	66	455
12	Jawa Barat	2.252	514	2.766	193	2.959
13	Jawa Tengah	3.031	1.158	4.189	645	4.834
14	D I Yogyakarta	211	71	282	42	324
15	Jawa Timur	2.954	657	3.611	253	3.864
16	Banten	912	209	1.121	109	1.230
17	Bali	238	99	337	46	383
18	Nusa Tenggara Barat	700	159	859	51	910
19	Nusa Tenggara Timur	729	226	955	108	1.063
20	Kalimantan Barat	547	132	679	33	712
21	Kalimantan Tengah	327	40	367	22	389
22	Kalimantan Selatan	508	115	623	58	681
23	Kalimantan Timur	525	137	662	69	731
24	Kalimantan Utara	90	39	129	17	146
25	Sulawesi Utara	40	5	45	6	51
26	Sulawesi Tengah	336	81	417	28	445
27	Sulawesi Selatan	623	168	791	52	843
28	Sulawesi Tenggara	354	102	456	46	502
29	Gorontalo	191	53	244	20	264
30	Sulawesi Barat	260	43	303	22	325
31	Maluku	223	86	309	44	353
32	Maluku Utara	219	69	288	28	316
33	Papua Barat	213	46	259	34	293
34	Papua	261	87	348	75	423
Indonesia		**20.266**	**5.386**	**25.652**	**2.506**	**28.158**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Lampiran 32

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)							Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)								Penyebab Kematian Anak Balita (12-59 Bulan)								
		BBLR	ASFIKSIA	Tetanus Neonatorium	Infeksi	Kelainan Kongenital	Covid19	Lain-lain	Pneumonia	Diare	Kelainan Kongenital Jantung	Meningitis	Kelainan Kongenital Lainnya	Demam Berdarah	Penyakit Saraf	Lain-lain	Diare	Demam Berdarah	Pneumonia	Kelainan Kongenital Jantung	Kecelakaan Lalu Lintas	Penyakit Sistem Saraf	Tenggelam	Infeksi Parasit	Lain-lain
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
1	Aceh	254	278	0	18	66	0	176	30	30	0	0	0	0	1	171	2	2	3	0	0	0	0	0	38
2	Sumatera Utara	161	178	6	17	64	0	182	11	14	0	0	0	0	0	82	4	0	2	0	0	0	0	0	44
3	Sumatera Barat	168	151	0	11	71	0	158	26	15	0	0	0	0	0	179	3	5	5	0	0	0	0	0	145
4	Riau	165	109	1	12	56	0	151	9	12	0	0	0	0	2	79	4	4	0	0	0	0	0	0	28
5	Jambi	109	97	3	10	29	0	65	5	5	0	0	0	0	0	30	0	0	1	0	0	0	0	0	6
6	Sumatera Selatan	169	146	4	6	27	0	102	12	6	0	0	0	0	3	61	6	1	1	0	0	0	0	0	36
7	Bengkulu	73	50	0	4	32	0	53	3	2	0	0	0	0	0	46	2	0	1	0	0	0	0	0	29
8	Lampung	164	136	0	6	72	0	95	3	8	0	0	0	0	0	58	1	4	1	0	0	0	0	0	13
9	Kep. Bangka Belitung	54	41	0	2	18	0	20	8	3	1	0	6	1	0	32	0	3	1	0	1	0	2	0	20
10	Kepulauan Riau	72	66	0	7	14	0	23	2	5	0	0	0	0	0	40	1	1	1	0	0	0	0	0	18
11	DKI Jakarta	67	71	0	22	44	0	96	11	5	0	0	0	0	0	73	10	2	12	0	0	0	0	0	42
12	Jawa Barat	899	659	3	84	267	0	340	97	55	0	0	0	0	8	354	20	24	29	0	0	0	0	0	120
13	Jawa Tengah	1039	622	0	55	297	0	1.018	90	68	0	0	0	0	13	987	29	12	33	0	0	0	0	0	571
14	D I Yogyakarta	43	60	0	12	50	0	46	7	4	18	0	14	0	0	28	1	1	1	4	0	0	0	0	35
15	Jawa Timur	1165	839	6	118	463	0	363	103	62	0	0	0	0	15	477	28	30	39	0	0	0	0	0	156
16	Banten	346	299	10	42	111	0	104	39	31	0	0	0	0	1	138	5	26	11	0	0	0	0	0	67
17	Bali	95	49	0	6	45	0	43	16	0	0	0	0	0	0	83	0	1	4	0	0	0	0	0	41
18	Nusa Tenggara Barat	300	186	0	18	98	0	98	50	20	0	0	0	0	2	87	1	8	11	0	0	0	0	0	31
19	Nusa Tenggara Timur	173	248	1	34	76	0	197	64	19	0	0	0	0	0	143	8	13	20	0	0	0	0	0	67
20	Kalimantan Barat	154	142	2	22	52	0	175	25	13	0	0	4	0	1	89	1	0	3	0	0	0	0	0	29
21	Kalimantan Tengah	101	107	7	17	23	0	72	6	6	0	0	0	0	0	28	2	0	1	0	0	0	0	0	19
22	Kalimantan Selatan	226	91	1	6	52	0	132	11	11	0	0	0	0	0	93	4	1	3	0	0	0	0	0	50
23	Kalimantan Timur	182	145	0	17	62	0	119	19	14	0	0	0	0	0	104	7	2	5	0	0	0	0	0	55
24	Kalimantan Utara	36	24	0	0	7	0	23	2	1	0	0	0	0	0	36	0	2	0	0	0	0	0	0	15
25	Sulawesi Utara	17	9	0	2	3	0	9	0	1	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	3
26	Sulawesi Tengah	114	80	1	6	45	0	90	20	16	0	0	2	0	0	43	5	7	3	0	0	0	0	0	13
27	Sulawesi Selatan	219	179	0	15	58	0	152	12	20	0	0	0	0	2	134	1	19	6	0	0	0	0	0	26
28	Sulawesi Tenggara	121	95	0	9	31	0	98	14	14	0	0	0	0	0	74	4	1	0	0	0	0	0	0	41
29	Gorontalo	61	70	0	6	13	0	41	14	10	0	0	0	0	0	29	3	0	3	0	0	0	0	0	14
30	Sulawesi Barat	90	62	0	18	19	0	71	6	1	0	0	0	0	0	36	2	7	1	0	0	0	0	0	12
31	Maluku	45	58	0	16	15	0	89	22	6	0	0	0	0	0	58	11	0	2	0	0	0	0	0	31
32	Maluku Utara	72	47	4	16	8	0	72	11	8	0	0	0	0	0	50	1	3	4	0	0	0	0	0	20
33	Papua Barat	78	59	0	20	8	0	48	18	16	0	0	0	0	0	12	13	1	7	0	0	0	0	0	13
34	Papua	92	96	5	29	5	0	34	16	29	0	0	0	0	0	42	22	3	8	0	0	0	0	0	42
Indonesia		**7.124**	**5.549**	**54**	**683**	**2.301**	**0**	**4.555**	**782**	**530**	**19**	**0**	**26**	**1**	**48**	**3.980**	**201**	**185**	**223**	**4**	**1**	**0**	**2**	**0**	**1.890**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi Baru Lahir Ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	114.623	88.909	2,7	2.435	2,7
2	Sumatera Utara	299.198	210.951	1,0	2.143	1,0
3	Sumatera Barat	108.653	84.559	3,0	2.576	3,0
4	Riau	155.322	131.846	1	1.007	0,8
5	Jambi	65.427	58.464	1,8	1.057	1,8
6	Sumatera Selatan	158.251	128.421	1,3	1.681	1,3
7	Bengkulu	36.917	34.146	2,5	860	2,5
8	Lampung	147.694	146.740	2,2	3.166	2,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.476	26.000	4,2	1.086	4,2
10	Kepulauan Riau	40.568	36.518	3	944	2,6
11	DKI Jakarta	163.138	170.970	1,3	2.145	1,3
12	Jawa Barat	868.555	881.156	2,4	20.841	2,4
13	Jawa Tengah	522.802	537.492	4	23.974	4,5
14	D I Yogyakarta	54.020	41.007	6,1	2.510	6,1
15	Jawa Timur	562.006	559.865	3,7	20.510	3,7
16	Banten	237.844	173.990	1,9	3.331	1,9
17	Bali	64.417	63.745	3	1.805	2,8
18	Nusa Tenggara Barat	102.477	105.036	4	4.374	4,2
19	Nusa Tenggara Timur	140.603	94.258	6,9	6.501	6,9
20	Kalimantan Barat	99.378	84.019	3,5	2.982	3,5
21	Kalimantan Tengah	53.783	43.298	1,9	820	1,9
22	Kalimantan Selatan	79.621	70.511	5,7	4.002	5,7
23	Kalimantan Timur	75.011	60.439	5,2	3.144	5,2
24	Kalimantan Utara	12.146	13.144	6,3	832	6,3
25	Sulawesi Utara	40.496	32.363	2,4	786	2,4
26	Sulawesi Tengah	62.469	50.989	4	1.963	3,8
27	Sulawesi Selatan	167.083	151.314	4,2	6.353	4,2
28	Sulawesi Tenggara	62.744	44.286	3,3	1.481	3,3
29	Gorontalo	23.894	21.785	4,7	1.023	4,7
30	Sulawesi Barat	33.034	25.571	5,0	1.271	5,0
31	Maluku	44.803	28.421	1,7	490	1,7
32	Maluku Utara	29.282	21.330	3	657	3,1
33	Papua Barat	21.990	12.969	3	364	2,8
34	Papua	71.352	14.043	5	701	5,0
Indonesia		**4.747.077**	**4.248.555**	**3,1**	**129.815**	**3,1**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	114.623	97.786	85,3	92.629	80,8
2	Sumatera Utara	299.198	258.576	86,4	252.960	84,5
3	Sumatera Barat	108.653	86.662	79,8	85.310	78,5
4	Riau	155.322	131.927	84,9	97.258	62,6
5	Jambi	65.427	63.557	97,1	62.117	94,9
6	Sumatera Selatan	158.251	151.213	95,6	149.329	94,4
7	Bengkulu	36.917	5.538	15,0	33.054	89,5
8	Lampung	147.694	151.213	102,4	142.670	96,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.476	25.953	94,5	25.731	93,6
10	Kepulauan Riau	40.568	41.255	101,7	38.916	95,9
11	DKI Jakarta	163.138	167.518	102,7	163.897	100,5
12	Jawa Barat	880.250	894.491	101,6	872.230	99,1
13	Jawa Tengah	522.802	0	0,0	528.298	101,1
14	D I Yogyakarta	41.896	38.184	91,1	36.859	88,0
15	Jawa Timur	562.006	560.571	99,7	550.866	98,0
16	Banten	237.844	255.433	107,4	255.433	107,4
17	Bali	64.417	66.588	103,4	65.198	101,2
18	Nusa Tenggara Barat	102.477	105.140	102,6	102.645	100,2
19	Nusa Tenggara Timur	140.603	95.239	67,7	91.771	65,3
20	Kalimantan Barat	99.378	86.221	86,8	83.971	84,5
21	Kalimantan Tengah	53.783	48.134	89,5	43.982	81,8
22	Kalimantan Selatan	79.621	71.562	89,9	67.586	84,9
23	Kalimantan Timur	75.011	67.861	90,5	64.071	85,4
24	Kalimantan Utara	12.146	13.387	110,2	12.838	105,7
25	Sulawesi Utara	40.496	30.202	74,6	29.273	72,3
26	Sulawesi Tengah	62.469	53.382	85,5	51.845	83,0
27	Sulawesi Selatan	167.083	154.430	92,4	148.452	88,8
28	Sulawesi Tenggara	56.438	50.954	90,3	49.546	87,8
29	Gorontalo	23.894	0	0,0	12.264	51,3
30	Sulawesi Barat	33.034	25.599	77,5	24.746	74,9
31	Maluku	44.803	27.941	62,4	23.239	51,9
32	Maluku Utara	29.282	23.879	81,5	22.455	76,7
33	Papua Barat	21.990	8.545	38,9	7.319	33,3
34	Papua	71.352	29.735	41,7	25.592	35,9
Indonesia		**4.740.342**	**3.888.675**	**82,0**	**4.314.350**	**91,0**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

ase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 35

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Bayi Baru Lahir			Bayi Usia < 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat IMD		Jumlah	Diberi ASI Eksklusif	
			Jumlah	%		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	88.909	68.458	77,0	83.931	49.691	59,2
2	Sumatera Utara	217.654	142.499	65,5	168.915	75.903	44,9
3	Sumatera Barat	84.544	68.843	81,4	73.481	57.035	77,6
4	Riau	125.033	90.872	72,7	90.382	71.976	79,6
5	Jambi	64.073	53.269	83,1	65.384	33.256	50,9
6	Sumatera Selatan	126.840	113.326	89,3	144.168	74.354	51,6
7	Bengkulu	34.146	26.592	77,9	21.820	15.977	73,2
8	Lampung	146.541	121.724	83,1	128.503	90.051	70,1
9	Kep. Bangka Belitung	26.000	20.088	77,3	18.469	11.436	61,9
10	Kepulauan Riau	40.936	31.856	77,8	35.788	20.757	58,0
11	DKI Jakarta	170.776	164.188	96,1	40.045	26.192	65,4
12	Jawa Barat	872.075	730.090	83,7	732.350	428.789	58,5
13	Jawa Tengah	537.492	330.126	61,4	281.776	229.237	81,4
14	DI Yogyakarta	41.030	36.983	90,1	28.288	22.941	81,1
15	Jawa Timur	557.279	400.055	71,8	397.059	317.568	80,0
16	Banten	243.683	197.756	81,2	141.776	79.297	55,9
17	Bali	66.962	36.032	53,8	34.718	26.533	76,4
18	Nusa Tenggara Barat	105.036	90.867	86,5	92.810	81.054	87,3
19	Nusa Tenggara Timur	94.285	76.540	81,2	77.163	57.522	74,5
20	Kalimantan Barat	86.437	68.076	78,8	47.969	29.527	61,6
21	Kalimantan Tengah	48.549	40.541	83,5	20.919	12.405	59,3
22	Kalimantan Selatan	70.061	57.170	81,6	99.600	68.321	68,6
23	Kalimantan Timur	63.318	50.988	80,5	36.429	27.710	76,1
24	Kalimantan Utara	13.272	10.701	80,6	8.815	4.696	53,3
25	Sulawesi Utara	33.162	19.115	57,6	19.736	10.845	55,0
26	Sulawesi Tengah	54.523	50.040	91,8	36.707	22.714	61,9
27	Sulawesi Selatan	153.450	134.752	87,8	114.497	77.638	67,8
28	Sulawesi Tenggara	45.422	42.799	94,2	46.105	27.491	59,6
29	Gorontalo	21.885	18.371	83,9	20.295	9.513	46,9
30	Sulawesi Barat	25.626	22.169	86,5	17.881	13.938	77,9
31	Maluku	29.206	15.216	52,1	21.796	8.113	37,2
32	Maluku Utara	21.869	19.272	88,1	4.424	3.052	69,0
33	Papua Barat	11.606	9.581	82,6	11.488	3.901	34,0
34	Papua	36.034	24.107	66,9	31.174	21.037	67,5
Indonesia		**4.357.714**	**3.383.061**	**77,6**	**3.194.661**	**2.110.471**	**66,1**

Sumber: Laporan Rutin 2020

Lampiran 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kelurahan UCI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	6.503	1.387	21,3
2	Sumatera Utara	6.113	4.411	72,2
3	Sumatera Barat	4.120	0	0,0
4	Riau	1.872	0	0,0
5	Jambi	1.561	1.458	93,4
6	Sumatera Selatan	3.263	2.932	89,9
7	Bengkulu	1.516	1.251	82,5
8	Lampung	2.653	2.188	82,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	350	89,5
10	Kepulauan Riau	419	344	82,1
11	DKI Jakarta	267	264	98,9
12	Jawa Barat	5.957	4.838	81,2
13	Jawa Tengah	8.551	8.548	100,0
14	D I Yogyakarta	438	438	100,0
15	Jawa Timur	8.503	7.368	86,7
16	Banten	1.552	0	0,0
17	Bali	716	714	99,7
18	Nusa Tenggara Barat	1.142	929	81,3
19	Nusa Tenggara Timur	3.351	2.797	83,5
20	Kalimantan Barat	2.136	1.177	55,1
21	Kalimantan Tengah	1.583	904	57,1
22	Kalimantan Selatan	2.007	1.413	70,4
23	Kalimantan Timur	1.037	734	70,8
24	Kalimantan Utara	481	305	63,4
25	Sulawesi Utara	1.838	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	2.021	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	3.040	0	0,0
28	Sulawesi Tenggara	2.308	1.969	85,3
29	Gorontalo	731	588	80,4
30	Sulawesi Barat	652	301	46,2
31	Maluku	1.240	732	59,0
32	Maluku Utara	1.198	794	66,3
33	Papua Barat	1.697	0	0,0
34	Papua	2.158	0	0,0
Indonesia		**83.015**	**49.134**	**59,2**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 38

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Bayi Diimunisasi																	
					HB0												BCG					
					< 24 Jam						1 - 7 Hari											
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	57.276	57.347	114.623	36.904	64,4	34.188	59,6	71.092	62,0	10.000	17,5	9.484	16,5	19.484	17,0	34.554	60,3	33.286	58,0	67.840	59,2
2	Sumatera Utara	149.276	149.922	299.198	100.595	67,4	98.378	65,6	198.973	66,5	20.378	13,7	20.122	13,4	40.500	13,5	123.645	82,8	122.370	81,6	246.015	82,2
3	Sumatera Barat	54.172	54.481	108.653	32.732	60,4	31.632	58,1	64.364	59,2	5.806	10,7	5.503	10,1	11.309	10,4	36.974	68,3	34.477	63,3	71.451	65,8
4	Riau	79.618	75.704	155.322	51.340	64,5	48.623	64,2	99.963	64,4	5.491	6,9	5.196	6,9	10.687	6,9	57.398	72,1	54.953	72,6	112.351	72,3
5	Jambi	33.369	32.058	65.427	26.391	79,1	25.269	78,8	51.660	79,0	964	2,9	948	3,0	1.912	2,9	29.197	87,5	27.840	86,8	63.546	97,1
6	Sumatera Selatan	80.385	77.866	158.251	62.502	77,8	61.567	79,1	124.069	78,4	9.879	12,3	10.022	12,9	19.901	12,6	73.136	91,0	71.490	91,8	144.626	91,4
7	Bengkulu	18.805	18.112	36.917	15.510	82,5	14.757	81,5	30.267	82,0	2.091	11,1	1.874	10,3	3.965	10,7	16.642	88,5	16.180	89,3	32.822	88,9
8	Lampung	75.568	72.126	147.694	61.426	81,3	58.904	81,7	120.330	81,5	10.063	13,3	9.803	6,6	19.866	24439,7	70.654	93,5	68.346	94,8	139.000	94,1
9	Kep. Bangka Belitung	14.298	13.178	27.476	12.918	90,4	12.455	94,5	25.373	92,3	138	1,0	131	0,5	269	297,7	12.450	87,1	11.783	89,4	24.233	88,2
10	Kepulauan Riau	20.657	19.911	40.568	17.900	86,7	17.659	88,7	35.559	87,7	636	3,1	618	1,5	1.254	1447,1	18.797	91,0	18.690	93,9	37.487	92,4
11	DKI Jakarta	81.604	81.534	163.138	77.755	95,3	77.510	95,1	155.265	95,2	2.765	3,4	2.937	1,8	5.702	5984,3	79.473	97,4	78.205	95,9	157.678	96,7
12	Jawa Barat	439.450	429.105	868.555	411.309	93,6	394.579	92,0	805.888	92,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	404.493	92,0	389.274	90,7	793.766	91,4
13	Jawa Tengah	259.158	263.644	522.802	253.129	97,7	239.693	90,9	492.822	94,3	12.998	5,0	12.907	2,5	25.905	26522,0	266.627	102,9	255.765	97,0	522.392	99,9
14	D I Yogyakarta	21.293	21.055	42.348	19.799	93,0	18.757	89,1	38.556	91,0	915	4,3	862	2,0	1.777	1911,1	20.695	97,2	19.604	93,1	40.299	95,2
15	Jawa Timur	277.486	284.520	562.006	283.108	102,0	269.982	94,9	553.090	98,4	1.721	0,6	2.041	0,7	3.762	3687,3	280.083	100,9	267.865	94,1	547.948	97,5
16	Banten	121.087	116.757	237.844	109.565	90,5	106.011	90,8	215.576	90,6	11.500	9,5	10.977	9,4	22.477	9,5	117.820	97,3	113.995	97,6	231.815	97,5
17	Bali	32.441	31.976	64.417	32.360	99,7	30.734	96,1	63.094	97,9	2.345	7,2	2.199	6,9	4.544	7,1	34.631	106,8	32.861	102,8	67.492	104,8
18	Nusa Tenggara Barat	49.759	52.718	102.477	49.806	100,1	47.474	90,1	97.280	94,9	713	1,4	675	1,3	1.388	1,4	54.477	109,5	51.340	97,4	105.817	103,3
19	Nusa Tenggara Timur	69.628	70.975	140.603	45.238	65,0	42.078	59,3	87.316	62,1	3.152	4,5	2.818	2,0	5.970	4,2	52.702	75,7	50.004	70,5	102.706	73,0
20	Kalimantan Barat	50.522	48.856	99.378	26.458	52,4	25.915	53,0	52.373	52,7	13.603	26,9	13.249	13,3	26.852	27,0	39.378	77,9	37.935	77,6	77.313	77,8
21	Kalimantan Tengah	28.149	25.634	53.783	18.262	64,9	16.812	65,6	35.074	65,2	3.594	12,8	3.472	6,5	7.066	13,1	23.040	81,9	22.201	86,6	45.241	84,1
22	Kalimantan Selatan	40.415	39.206	79.621	24.507	60,6	23.521	60,0	48.028	60,3	10.104	25,0	9.559	12,0	19.663	24,7	33.675	83,3	31.827	81,2	65.502	82,3
23	Kalimantan Timur	39.314	35.697	75.011	30.535	77,7	28.266	79,2	58.801	78,4	3.351	8,5	3.445	4,6	6.796	9,1	34.578	88,0	32.733	91,7	67.311	89,7
24	Kalimantan Utara	6.437	5.709	12.146	6.201	96,3	5.663	99,2	11.864	97,7	518	8,0	484	4,0	1.002	8,2	6.054	94,1	5.662	99,2	11.716	96,5
25	Sulawesi Utara	20.654	19.842	40.496	7.911	38,3	7.498	37,8	15.409	38,1	5.735	27,8	5.522	13,6	11.257	27,8	15.027	72,8	14.397	72,6	29.424	72,7
26	Sulawesi Tengah	31.863	30.606	62.469	20.826	65,4	19.614	64,1	40.440	64,7	6.311	19,8	5.878	9,4	12.189	18648,5	27.775	87,2	26.540	86,7	54.315	86,9
27	Sulawesi Selatan	81.681	85.402	167.083	71.017	86,9	67.577	79,1	138.594	82,9	3.437	4,2	3.457	2,1	6.894	7929,2	75.408	92,3	72.843	85,3	148.251	88,7
28	Sulawesi Tenggara	31.573	31.171	62.744	25.995	82,3	24.052	77,2	50.047	79,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	27.606	87,4	26.314	84,4	53.920	85,9
29	Gorontalo	11.969	11.925	23.894	8.744	73,1	8.532	71,5	17.276	72,3	375	3,1	362	1,5	737	1008,8	9.419	78,7	9.028	75,7	18.447	77,2
30	Sulawesi Barat	16.584	16.450	33.034	11.425	68,9	10.789	65,6	22.214	67,2	1.100	6,6	1.038	3,1	2.138	3103,4	12.247	73,8	11.595	70,5	23.842	72,2
31	Maluku	22.579	22.224	44.803	10.569	46,8	10.251	46,1	20.820	46,5	4.579	20,3	4.358	9,7	8.937	19092,4	16.931	75,0	16.402	73,8	33.333	74,4
32	Maluku Utara	14.924	14.358	29.282	10.286	68,9	9.523	66,3	19.809	67,6	1.208	8,1	1.128	3,9	2.336	3389,3	11.453	76,7	10.899	75,9	22.352	76,3
33	Papua Barat	11.562	10.428	21.990	3.874	33,5	3.724	35,7	7.598	34,6	3.717	32,1	3.571	16,2	7.288	33,1	8.967	77,6	8.561	82,1	17.528	79,7
34	Papua	37.431	33.921	71.352	14.151	37,8	10.280	30,3	24.431	34,2	9.862	26,3	7.833	23,1	17.695	24,8	27.558	73,6	25.601	75,5	53.159	74,5
donesia		**2.380.985**	**2.354.420**	**4.735.405**	**1.991.048**	**83,6**	**1.902.267**	**80,8**	**3.893.315**	**82,2**	**169.049**	**7,1**	**162.473**	**6,9**	**331.522**	**7,0**	**2.153.564**	**90,4**	**2.070.865**	**88,0**	**4.230.938**	**89,3**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 39.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK/MR, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Bayi *(Surviving Infant)*			Bayi Diimunisasi																					
					DPT-HB-Hib3						Polio 4*						Campak/MR						Imunisasi Dasar Lengkap					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Aceh	57.654	55.310	112.964	27.542	47,8	27.980	50,6	55.522	49,1	29.383	51,0	29.027	52,5	55.522	49,1	24.869	43,1	24.024	43,4	48.893	43,3	24.016	41,7	23.209	42,0	47.225	41,8
2	Sumatera Utara	149.341	143.549	292.890	121.450	81,3	119.621	83,3	241.071	82,3	121.268	81,2	119.512	83,3	241.071	82,3	118.057	79,1	115.571	80,5	233.628	79,8	112.194	75,1	109.743	76,4	221.937	75,8
3	Sumatera Barat	54.361	52.166	106.527	31.579	58,1	30.212	57,9	61.791	58,0	31.244	57,5	30.455	58,4	61.791	58,0	30.824	56,7	29.547	56,6	60.371	56,7	29.394	54,1	28.253	54,2	57.647	54,1
4	Riau	77.649	74.415	152.064	53.925	69,4	52.266	70,2	106.191	69,8	52.955	68,2	50.972	68,5	106.191	69,8	51.018	65,7	49.193	66,1	100.211	65,9	45.541	58,6	44.237	59,4	89.778	59,0
5	Jambi	32.608	31.227	63.835	28.440	87,2	27.154	87,0	60.884	95,4	28.329	86,9	27.242	87,2	60.884	95,4	28.391	87,1	26.961	86,3	55.352	86,7	27.489	84,3	26.059	83,5	59.539	93,3
6	Sumatera Selatan	78.990	75.846	154.836	72.309	91,5	70.952	93,5	143.261	92,5	71.884	91,0	70.572	93,0	143.261	92,5	72.509	91,8	71.107	93,8	143.616	92,8	71.589	90,6	70.408	92,8	141.997	91,7
7	Bengkulu	18.354	17.623	35.977	16.123	87,8	15.685	89,0	31.808	88,4	16.084	87,6	15.727	89,2	31.808	88,4	16.160	88,0	15.725	89,2	31.885	88,6	16.010	87,2	15.620	88,6	31.630	87,9
8	Lampung	73.960	70.987	144.947	70.772	95,7	68.680	96,8	132.304	91,3	66.477	89,9	64.696	91,1	139.452	96,2	68.369	92,4	66.553	93,8	134.922	93,1	67.433	91,2	66.545	93,7	133.978	92,4
9	Kep. Bangka Belitung	13.758	13.190	26.948	11.817	85,9	11.128	84,4	22.945	85,1	11.800	85,8	11.123	84,3	22.945	85,1	12.043	87,5	11.172	84,7	23.215	86,1	12.060	87,7	11.258	85,4	23.318	86,5
10	Kepulauan Riau	20.683	19.882	40.565	17.590	85,0	17.537	88,2	35.127	86,6	17.715	85,7	17.647	88,8	35.127	86,6	18.311	88,5	18.196	91,5	36.507	90,0	18.215	88,1	18.145	91,3	36.360	89,6
11	DKI Jakarta	84.176	80.749	164.925	61.529	73,1	59.332	73,5	120.861	73,3	61.441	73,0	59.436	73,6	120.861	73,3	62.043	73,7	69.315	85,8	131.358	79,6	61.316	72,8	59.435	73,6	120.751	73,2
12	Jawa Barat	438.968	419.530	858.498	388.479	88,5	375.674	89,5	764.153	89,0	387.384	88,2	377.453	90,0	764.153	89,0	386.851	88,1	372.445	88,8	759.296	88,4	365.478	83,3	353.446	84,2	718.924	83,7
13	Jawa Tengah	264.349	251.281	515.630	263.603	99,7	253.656	100,9	509.064	98,7	260.504	98,5	251.457	100,1	517.259	100,3	264.548	100,1	252.449	100,5	516.997	100,3	260.640	98,6	248.805	99,0	509.445	98,8
14	D I Yogyakarta	20.880	19.789	40.669	20.608	98,7	19.508	98,6	39.812	97,9	0	TAD	0	TAD	40.104	TAD	20.380	97,6	19.313	97,6	39.693	97,6	20.229	96,9	19.130	96,7	39.359	96,8
15	Jawa Timur	282.804	271.041	553.845	273.762	96,8	261.958	96,6	535.720	96,7	273.574	96,7	262.821	97,0	535.720	96,7	272.049	96,2	260.884	96,3	532.933	96,2	274.700	97,1	264.198	97,5	538.898	97,3
16	Banten	119.818	115.073	234.891	112.151	93,6	108.575	94,4	220.726	94,0	110.723	92,4	107.480	93,4	220.726	94,0	111.484	93,0	108.071	93,9	219.555	93,5	109.419	91,3	105.014	91,3	214.433	91,3
17	Bali	32.456	31.110	63.566	33.243	102,4	31.885	102,5	65.128	102,5	33.079	101,9	31.602	101,6	65.128	102,5	32.783	101,0	31.174	100,2	63.957	100,6	32.449	100,0	30.752	98,8	63.201	99,4
18	Nusa Tenggara Barat	50.385	48.361	98.746	52.274	103,7	51.243	106,0	103.517	104,8	52.291	103,8	51.001	105,5	103.517	104,8	50.275	99,8	48.126	99,5	98.401	99,7	50.124	99,5	47.731	98,7	97.855	99,1
19	Nusa Tenggara Timur	68.712	66.028	134.740	53.481	77,8	50.967	77,2	104.448	77,5	52.875	77,0	50.444	76,4	104.448	77,5	52.481	76,4	50.090	75,9	102.571	76,1	50.981	74,2	49.139	74,4	100.120	74,3
20	Kalimantan Barat	49.540	47.484	97.024	35.442	71,5	34.051	71,7	69.493	71,6	35.904	72,5	34.225	72,1	69.493	71,6	35.784	72,2	34.328	72,3	70.112	72,3	35.377	71,4	33.968	71,5	69.345	71,5
21	Kalimantan Tengah	26.387	25.426	51.813	21.116	80,0	19.975	78,6	41.091	79,3	21.112	80,0	20.099	79,0	41.091	79,3	20.820	78,9	19.910	78,3	40.730	78,6	20.457	77,5	19.536	76,8	39.993	77,2
22	Kalimantan Selatan	39.463	37.877	77.340	30.504	77,3	29.128	76,9	59.632	77,1	30.551	77,4	29.099	76,8	59.632	77,1	29.792	75,5	28.643	75,6	58.435	75,6	29.630	75,1	28.665	75,7	58.295	75,4
23	Kalimantan Timur	36.047	34.453	70.500	31.557	87,5	30.292	87,9	61.849	87,7	31.345	87,0	30.129	87,4	61.849	87,7	30.716	85,2	29.096	84,5	59.812	84,8	29.990	83,2	28.412	82,5	58.402	82,8
24	Kalimantan Utara	7.938	7.561	15.499	5.237	66,0	4.953	65,5	10.190	65,7	5.129	64,6	4.868	64,4	10.190	65,7	5.321	67,0	4.955	65,5	10.276	66,3	5.098	64,2	4.723	62,5	9.821	63,4
25	Sulawesi Utara	20.364	19.510	39.874	14.947	73,4	13.730	70,4	28.677	71,9	14.980	73,6	13.932	71,4	28.677	71,9	14.300	70,2	13.233	67,8	27.533	69,1	13.483	66,2	12.523	64,2	26.006	65,2
26	Sulawesi Tengah	30.843	29.561	60.404	27.158	88,1	26.183	88,6	53.341	88,3	27.119	87,9	26.070	88,2	53.341	88,3	26.945	87,4	26.097	88,3	53.042	87,8	26.718	86,6	25.831	87,4	52.549	87,0
27	Sulawesi Selatan	83.416	79.920	163.336	71.786	86,1	68.651	85,9	140.437	86,0	71.720	86,0	68.890	86,2	140.437	86,0	72.652	87,1	70.239	87,9	142.891	87,5	61.807	74,1	60.649	75,9	122.456	75,0
28	Sulawesi Tenggara	31.159	29.807	60.966	26.159	84,0	25.045	84,0	51.204	84,0	25.901	83,1	24.826	83,3	51.204	84,0	27.231	87,4	25.836	86,7	53.067	87,0	26.076	83,7	24.512	82,2	50.588	83,0
29	Gorontalo	11.797	11.297	23.094	8.430	71,5	8.279	73,3	16.709	72,4	8.649	73,3	8.418	74,5	16.709	72,4	8.804	74,6	8.545	75,6	17.349	75,1	8.460	71,7	8.281	73,3	16.741	72,5
30	Sulawesi Barat	16.033	15.415	31.448	11.346	70,8	10.787	70,0	22.133	70,4	11.254	70,2	10.760	69,8	22.133	70,4	11.557	72,1	10.764	69,8	22.321	71,0	11.328	70,7	10.628	68,9	21.956	69,8
31	Maluku	21.804	20.954	42.758	16.548	75,9	16.001	76,4	32.549	76,1	16.328	74,9	16.076	76,7	32.549	76,1	16.575	76,0	16.201	77,3	32.776	76,7	15.700	72,0	15.349	73,3	31.049	72,6
32	Maluku Utara	14.411	13.828	28.239	10.802	75,0	10.218	73,9	21.020	74,4	10.746	74,6	10.181	73,6	21.020	74,4	10.378	72,0	9.896	71,6	20.274	71,8	9.843	68,3	9.314	67,4	19.157	67,8
33	Papua Barat	10.699	10.319	21.018	8.330	77,9	7.984	77,4	16.314	77,6	7.748	72,4	7.484	72,5	16.314	77,6	7.990	74,7	7.570	73,4	15.560	74,0	7.225	67,5	6.736	65,3	13.961	66,4
34	Papua	34.716	33.654	68.370	25.713	74,1	24.415	72,5	41.063	60,1	21.745	62,6	20.571	61,1	50.128	73,3	26.153	75,3	24.050	71,5	50.203	73,4	19.350	55,7	18.381	54,6	37.731	55,2
	Indonesia	**2.374.523**	**2.274.223**	**4.648.746**	**2.055.752**	**86,6**	**1.983.705**	**87,2**	**4.020.036**	**86,5**	**2.019.241**	**85,0**	**1.954.294**	**85,9**	**4.044.736**	**87,0**	**2.038.462**	**85,8**	**1.969.279**	**86,6**	**4.007.742**	**86,2**	**1.969.819**	**83,0**	**1.898.636**	**83,5**	**3.874.446**	**83,3**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3

MR = measles rubella

Lampiran 39.b

DROP OUT RATE **CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020**

No	Provinsi	2018		2019		2020	
		DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	13,7	7,1	20,1	9,8	21,5	10,8
2	Sumatera Utara	9,5	2,3	2,5	1,5	6,4	3,4
3	Sumatera Barat	2,9	3,2	15,3	5,2	10,1	8,0
4	Riau	4,4	3,2	5,6	3,9	9,0	3,6
5	Jambi	0,7	2,8	1,4	1,4	11,5	2,7
6	Sumatera Selatan	-0,9	0,4	1,8	0,5	1,3	1,5
7	Bengkulu	-5,1	2,6	7,6	4,2	2,9	3,1
8	Lampung	-1,4	0,0	3,0	0,7	3,8	0,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,5	3,9	3,8	4,5	3,2	4,3
10	Kepulauan Riau	-8,9	1,7	3,2	0,3	0,3	4,1
11	DKI Jakarta	1,1	0,6	-0,1	0,4	-8,2	0,4
12	Jawa Barat	11,6	2,0	2,5	0,6	3,8	3,2
13	Jawa Tengah	-2,2	0,1	1,2	0,4	1,4	1,0
14	DI Yogyakarta	1,4	0,3	1,3	0,4	1,4	0,4
15	Jawa Timur	1,7	1,3	2,2	1,1	1,9	1,4
16	Banten	4,6	3,1	4,0	3,0	4,2	3,7
17	Bali	1,6	2,0	5,2	4,8	4,8	3,1
18	Nusa Tenggara Barat	1,2	2,7	2,5	0,8	8,4	3,6
19	Nusa Tenggara Timur	-27,8	11,1	6,7	1,1	2,8	1,0
20	Kalimantan Barat	-4,5	3,0	6,5	4,4	7,4	8,2
21	Kalimantan Tengah	-12,6	2,6	5,5	5,0	9,3	8,5
22	Kalimantan Selatan	-2,8	7,5	2,8	1,8	8,2	6,3
23	Kalimantan Timur	2,2	2,4	5,2	4,2	9,9	6,9
24	Kalimantan Utara	9,6	6,4	9,9	6,1	11,9	12,7
25	Sulawesi Utara	-0,8	0,7	4,8	2,1	9,5	5,7
26	Sulawesi Tengah	-9,4	0,3	3,5	2,5	5,3	4,8
27	Sulawesi Selatan	-4,2	5,0	2,6	0,8	3,7	5,4
28	Sulawesi Tenggara	0,9	5,0	2,8	4,6	3,7	7,0
29	Gorontalo	-2,2	1,3	0,0	3,5	6,2	9,7
30	Sulawesi Barat	-8,6	4,6	2,9	3,8	6,0	6,8
31	Maluku	14,0	4,8	5,7	1,7	3,2	3,9
32	Maluku Utara	4,8	1,2	5,5	3,5	10,1	6,8
33	Papua Barat	-8,9	4,9	10,5	5,2	16,1	12,0
34	Papua	1,8	12,6	24,8	11,8	12,7	14,8
Indonesia		**2,5**	**2,3**	**3,6**	**1,8**	**4,2**	**3,3**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 39.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	23	5	21,7	23	3	13,0	23	2	8,7
2	Sumatera Utara	33	20	60,6	33	20	60,6	33	9	27,3
3	Sumatera Barat	19	9	47,4	19	8	42,1	19	0	0,0
4	Riau	12	4	33,3	12	6	50,0	12	2	16,7
5	Jambi	11	11	100,0	11	11	100,0	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	16	94,1	17	17	100,0	17	16	94,1
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	10	100,0	10	9	90,0
8	Lampung	15	15	100,0	15	15	100,0	15	14	93,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7	7	4	57,1	7	4	57,1
10	Kepulauan Riau	7	7	100,0	7	6	85,7	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	6	6	100,0	6	2	33,3
12	Jawa Barat	27	26	96,3	27	27	100,0	27	20	74,1
13	Jawa Tengah	35	35	100,0	35	35	100,0	35	34	97,1
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	5	100,0	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	37	97,4	38	37	97,4	38	36	94,7
16	Banten	8	7	87,5	8	8	100,0	8	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0	9	9	100,0	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	10	10	100,0	10	8	80,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3	22	6	27,3	22	6	27,3
20	Kalimantan Barat	14	6	42,9	14	6	42,9	14	4	28,6
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6	14	9	64,3	14	6	42,9
22	Kalimantan Selatan	13	11	84,6	13	13	100,0	13	5	38,5
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	10	9	90,0	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0	5	2	40,0	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	9	60,0	15	11	73,3	15	4	26,7
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3	13	12	92,3	13	8	61,5
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5	24	21	87,5	24	13	54,2
28	Sulawesi Tenggara	17	13	76,5	17	14	82,4	17	13	76,5
29	Gorontalo	6	4	66,7	6	5	83,3	6	1	16,7
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3	6	3	50,0	6	1	16,7
31	Maluku	11	6	54,5	11	5	45,5	11	4	36,4
32	Maluku Utara	10	3	30,0	10	5	50,0	10	2	20,0
33	Papua Barat	13	10	76,9	13	8	61,5	13	4	30,8
34	Papua	29	10	34,5	29	13	44,8	29	6	20,7
Indonesia		**514**	**374**	**72,8**	**514**	**379**	**73,7**	**514**	**280**	**54,5**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 40.a

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK/MR2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Baduta			Baduta Diimunisasi											
					DPT-HB-Hib4						Campak/MR2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	58.069	55.712	113.781	9.790	16,9	9.391	16,9	19.181	16,9	7.731	13,3	7.553	13,6	15.284	13,4
2	Sumatera Utara	150.945	145.118	296.063	91.512	60,6	88.791	61,2	180.303	60,9	85.985	57,0	84.438	58,2	170.423	57,6
3	Sumatera Barat	54.723	52.524	107.247	15.986	29,2	15.073	28,7	31.059	29,0	13.422	24,5	13.071	24,9	26.493	24,7
4	Riau	77.345	74.136	151.481	33.692	43,6	32.867	44,3	66.559	43,9	27.319	35,3	26.230	35,4	53.549	35,4
5	Jambi	32.751	31.368	64.119	22.251	67,9	21.089	67,2	48.310	75,3	21.071	64,3	19.618	62,5	40.689	63,5
6	Sumatera Selatan	79.758	76.597	156.355	63.846	80,0	62.553	81,7	126.399	80,8	62.551	78,4	61.958	80,9	124.509	79,6
7	Bengkulu	18.435	17.705	36.140	14.096	76,5	13.623	76,9	27.719	76,7	13.160	71,4	12.900	72,9	26.060	72,1
8	Lampung	75.130	72.125	147.255	60.108	80,0	58.748	81,5	118.856	80,7	56.418	75,1	55.687	77,2	112.105	76,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.727	13.162	26.889	8.370	61,0	8.323	63,2	16.693	62,1	6.681	48,7	6.451	49,0	13.132	48,8
10	Kepulauan Riau	20.977	20.169	41.146	13.463	64,2	13.285	65,9	26.748	65,0	13.004	62,0	12.812	63,5	25.816	62,7
11	DKI Jakarta	86.115	82.628	168.743	73.363	85,2	72.232	87,4	145.595	86,3	72.485	84,2	71.620	86,7	144.105	85,4
12	Jawa Barat	441.241	421.775	863.016	285.718	64,8	276.337	65,5	562.055	65,1	269.960	61,2	262.808	62,3	532.768	61,7
13	Jawa Tengah	266.555	253.393	519.948	220.137	82,6	211.698	83,5	431.835	83,1	218.011	81,8	210.846	83,2	428.857	82,5
14	D I Yogyakarta	20.759	19.482	40.241	19.427	93,6	18.513	95,0	37.940	94,3	19.214	92,6	18.269	93,8	37.483	93,1
15	Jawa Timur	285.035	273.222	558.257	248.984	87,4	238.896	87,4	487.880	87,4	246.701	86,6	237.282	86,8	483.983	86,7
16	Banten	120.893	116.122	237.015	78.847	65,2	77.133	66,4	155.980	65,8	76.816	63,5	75.344	64,9	152.160	64,2
17	Bali	32.537	31.195	63.732	26.871	82,6	25.259	81,0	52.130	81,8	26.214	80,6	24.926	79,9	51.140	80,2
18	Nusa Tenggara Barat	50.736	48.708	99.444	38.105	75,1	35.062	72,0	73.167	73,6	36.050	71,1	31.363	64,4	67.413	67,8
19	Nusa Tenggara Timur	67.936	65.294	133.230	36.360	53,5	34.694	53,1	71.054	53,3	35.155	51,7	33.364	51,1	68.519	51,4
20	Kalimantan Barat	49.908	47.843	97.751	25.764	51,6	24.642	51,5	50.406	51,6	23.721	47,5	22.542	47,1	46.263	47,3
21	Kalimantan Tengah	26.372	25.413	51.785	14.310	54,3	13.419	52,8	27.729	53,5	12.600	47,8	12.097	47,6	24.697	47,7
22	Kalimantan Selatan	39.822	38.228	78.050	21.514	54,0	20.377	53,3	41.891	53,7	18.448	46,3	17.587	46,0	36.035	46,2
23	Kalimantan Timur	36.108	34.513	70.621	22.361	61,9	21.323	61,8	43.684	61,9	19.717	54,6	19.191	55,6	38.908	55,1
24	Kalimantan Utara	7.823	7.455	15.278	3.522	45,0	3.272	43,9	6.794	44,5	3.260	41,7	2.943	39,5	6.203	40,6
25	Sulawesi Utara	20.512	19.652	40.164	10.952	53,4	10.366	52,7	21.318	53,1	9.665	47,1	9.142	46,5	18.807	46,8
26	Sulawesi Tengah	30.913	29.634	60.547	19.537	63,2	18.829	63,5	38.366	63,4	18.338	59,3	17.435	58,8	35.773	59,1
27	Sulawesi Selatan	83.855	80.354	164.209	58.470	69,7	56.500	70,3	114.970	70,0	56.595	67,5	54.806	68,2	111.401	67,8
28	Sulawesi Tenggara	31.035	29.691	60.726	20.123	64,8	18.208	61,3	38.331	63,1	16.369	52,7	15.662	52,7	32.031	52,7
29	Gorontalo	11.761	11.264	23.025	5.736	48,8	5.707	50,7	11.443	49,7	5.255	44,7	5.372	47,7	10.627	46,2
30	Sulawesi Barat	15.921	15.311	31.232	7.698	48,4	7.309	47,7	15.007	48,1	6.853	43,0	6.561	42,9	13.414	42,9
31	Maluku	21.681	20.837	42.518	13.434	62,0	13.000	62,4	26.434	62,2	12.903	59,5	12.716	61,0	25.619	60,3
32	Maluku Utara	14.367	13.789	28.156	7.472	52,0	7.055	51,2	14.527	51,6	6.728	46,8	6.299	45,7	13.027	46,3
33	Papua Barat	10.618	10.244	20.862	6.305	59,4	5.816	56,8	12.121	58,1	5.876	55,3	5.440	53,1	11.316	54,2
34	Papua	34.673	33.620	68.293	15.291	44,1	13.420	39,9	28.711	42,0	14.695	42,4	14.626	43,5	29.321	42,9
Indonesia		**2.389.036**	**2.288.283**	**4.677.319**	**1.613.415**	**67,5**	**1.552.810**	**67,9**	**3.171.195**	**67,8**	**1.538.971**	**64,4**	**1.488.959**	**65,1**	**3.027.930**	**64,7**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 40.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*		Campak (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)	
		Kelas 1	Kelas 2	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	112.725	112.194	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	Sumatera Utara	309.570	311.839	135.478	43,8	100.232	32,4	100.359	32,2
3	Sumatera Barat	108.396	108.734	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	Riau	143.694	142.332	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	Jambi	64.362	64.462	55.249	85,8	53.960	83,8	56.811	88,1
6	Sumatera Selatan	161.609	161.969	137.528	85,1	141.194	87,4	141.754	87,5
7	Bengkulu	36.846	36.858	31.713	86,1	30.281	82,2	30.852	83,7
8	Lampung	159.250	161.124	145.127	91,1	144.626	90,8	148.367	92,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	26.772	26.630	19.903	74,3	17.677	66,0	14.390	54,0
10	Kepulauan Riau	45.105	44.849	19.404	43,0	20.355	45,1	22.217	49,5
11	DKI Jakarta	189.300	189.796	67.690	35,8	31.030	16,4	27.437	14,5
12	Jawa Barat	870.898	872.541	60.174	6,9	12.978	1,5	13.001	1,5
13	Jawa Tengah	544.050	550.750	470.076	86,4	376.484	69,2	329.959	59,9
14	DI Yogyakarta	49.347	45.454	48.148	97,6	44.892	91,0	43.277	95,2
15	Jawa Timur	580.500	586.355	454.474	78,3	454.219	78,2	486.649	83,0
16	Banten	251.054	251.789	0	0,0	0	0,0	0	0,0
17	Bali	65.740	65.951	61.589	93,7	62.445	95,0	65.927	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	100.007	100.353	81.842	81,8	81.827	81,8	80.909	80,6
19	Nusa Tenggara Timur	123.128	122.225	97.068	78,8	97.065	78,8	94.802	77,6
20	Kalimantan Barat	99.417	99.559	51.177	51,5	64.519	64,9	62.888	63,2
21	Kalimantan Tengah	49.603	49.237	40.042	80,7	33.708	68,0	36.593	74,3
22	Kalimantan Selatan	82.353	83.053	53.099	64,5	53.412	64,9	56.190	67,7
23	Kalimantan Timur	68.051	67.663	42.985	63,2	45.126	66,3	44.687	66,0
24	Kalimantan Utara	15.294	15.206	7.553	49,4	6.127	40,1	5.819	38,3
25	Sulawesi Utara	42.226	42.588	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	59.379	59.412	0	0,0	0	0,0	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	166.203	166.447	3.138	1,9	3.686	2,2	3.765	2,3
28	Sulawesi Tenggara	58.819	58.448	40.978	69,7	40.246	68,4	40.885	70,0
29	Gorontalo	22.038	21.879	15.021	68,2	14.801	67,2	14.941	68,3
30	Sulawesi Barat	28.908	28.553	17.876	61,8	16.654	57,6	17.341	60,7
31	Maluku	39.708	39.361	14.792	37,3	12.948	32,6	13.587	34,5
32	Maluku Utara	27.506	27.424	17.741	64,5	17.817	64,8	17.411	63,5
33	Papua Barat	19.163	18.943	11.348	59,2	9.538	49,8	8.861	46,8
34	Papua	65.127	64.657	20.035	30,8	19.996	30,7	18.899	29,2
Indonesia		**4.786.148**	**4.798.635**	**2.221.248**	**46,4**	**2.007.843**	**42,0**	**1.998.578**	**41,6**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Catatan :
Dengan berlakunya PMK No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, maka pemberian imunisasi pada BIAS dilakukan pada kelas 1, 2 dan 5 SD. Pada tahun 2017-2018, pemberian imunisasi pada BIAS hanya dilakukan pada kelas 1 dan 2 saja, dan kelas 5 SD akan dilakukan mulai tahun 2019.

Lampiran 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Kecamatan	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	107.802	102.637	95,2	310.585	293.734	94,6	418.387	396.371	94,7
2	Sumatera Utara	390.226	280.705	71,9	1.001.858	903.093	90,1	1.392.084	1.183.798	85,0
3	Sumatera Barat	98.954	86.181	87,1	321.683	284.691	88,5	420.636	370.872	88,2
4	Riau	157.750	124.649	79,0	517.302	381.132	73,7	675.052	505.781	74,9
5	Jambi	69.013	63.386	91,8	227.015	200.199	88,2	296.028	263.585	89,0
6	Sumatera Selatan	166843	142755	85,6	637000	516297	81,1	803.843	659.052	82,0
7	Bengkulu	36.253	33.568	92,6	98.949	89.875	90,8	135.202	123.443	91,3
8	Lampung	169.148	155.978	92,2	511.589	473.789	92,6	680.737	629.767	92,5
9	Kep. Bangka Belitung	29.695	26.094	87,9	91.079	84.764	93,1	120.774	110.858	91,8
10	Kepulauan Riau	57.250	35.714	62,4	181.255	108.429	59,8	238.505	144.143	60,4
11	DKI Jakarta	122.641	110.568	90,2	454.060	382.742	84,3	576.701	493.310	85,5
12	Jawa Barat	875.409	793.084	90,6	3.208.539	2.815.687	87,8	4.083.948	3.608.771	88,4
13	Jawa Tengah	868.805	852.260	98,1	1.959.864	1.902.129	97,1	2.828.669	2.754.389	97,4
14	DI Yogyakarta	42.457	42.417	99,9	162.377	162.295	99,9	204.834	204.712	99,9
15	Jawa Timur	785105,5	533579	68,0	2108736	1934334	91,7	2.893.842	2.467.913	85,3
16	Banten	239.228	221.016	92,4	918.431	740.011	80,6	1.157.659	961.027	83,0
17	Bali	49.683	49.149	98,9	181.214	177.568	98,0	230.897	226.717	98,2
18	Nusa Tenggara Barat	111.606	109.894	98,5	377.055	358.906	95,2	488.661	468.800	95,9
19	Nusa Tenggara Timur	104.899	97.113	92,6	345.569	315.539	91,3	450.468	412.652	91,6
20	Kalimantan Barat	100.537	82.652	82,2	371.940	287.174	77,2	472.477	369.826	78,3
21	Kalimantan Tengah	64.809	42.697	65,9	175.946	137.476	78,1	240.755	180.173	74,8
22	Kalimantan Selatan	78.096	71.582	91,7	272.953	239.660	87,8	351.049	311.242	88,7
23	Kalimantan Timur	70.324	56.389	80,2	282.651	182.577	64,6	352.975	238.966	67,7
24	Kalimantan Utara	7.514	7.044	93,7	63.452	48.423	76,3	70.966	56.664	79,8
25	Sulawesi Utara	36.853	33.688	91,4	114.161	100.680	88,2	151.014	134.368	89,0
26	Sulawesi Tengah	54.406	50.437	92,7	185.831	157.868	85,0	240.237	208.305	86,7
27	Sulawesi Selatan	167.590	154.075	91,9	512.314	467.010	91,2	679.904	621.085	91,3
28	Sulawesi Tenggara	53.358	44.110	82,7	178.397	134.841	75,6	231.755	178.951	77,2
29	Gorontalo	22.346	20.841	93,3	70.005	61.615	88,0	92.351	82.456	89,3
30	Sulawesi Barat	27.118	23.098	85,2	92.092	76.874	83,5	119.210	99.972	83,9
31	Maluku	46.019	35.182	76,5	129.663	102.862	79,3	175.682	138.044	78,6
32	Maluku Utara	21553	19552	90,7	71368	59529	83,4	92921	79081	85,1
33	Papua Barat	23174	14424	62,2	64944	32493	50,0	88118	46917	53,2
34	Papua	68.370	26.277	38,4	267.793	66.038	24,7	336.163	69.711	20,7
Indonesia		**5.324.834**	**4.542.795**	**85,3**	**16.467.670**	**14.280.334**	**86,7**	**21.792.504**	**18.801.722**	**86,3**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2021

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	2020			2019		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	440.625	352.113	79,9	438.922	355.768	81,1
2	Sumatera Utara	9.776.742	6.307.203	64,5	429.601	415.398	96,7
3	Sumatera Barat	400.281	250.483	62,6	429.064	349.559	81,5
4	Riau	745.790	295.486	39,6	0	0	0
5	Jambi	263.430	169.592	64,4	0	0	0
6	Sumatera Selatan	799.969	485.767	60,7	785.415	603.637	76,9
7	Bengkulu	117.345	84.654	72,1	138.764	105.465	76,0
8	Lampung	614.132	414.453	67,5	677.602	540.927	79,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	118.957	63.268	53,2	119.761	82.669	69,0
10	Kepulauan Riau	225.873	128.174	56,7	359.111	209.011	58,2
11	DKI Jakarta	390.193	156.372	40,1	474.982	390.606	82,2
12	Jawa Barat	3.138.249	2.149.251	68,5	4.326.811	3.451.352	79,8
13	Jawa Tengah	2.272.887	1.369.895	60,3	0	0	0
14	DI Yogyakarta	192.978	135.249	70,1	195.540	158.391	81,0
15	Jawa Timur	2.783.068	1.566.665	56,3	2.817.658	2.189.488	77,7
16	Banten	1.005.193	574.303	57,1	1.112.622	814.213	73,2
17	Bali	207.528	129.642	62,5	227.010	185.575	81,7
18	Nusa Tenggara Barat	468634	337793	72,1	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	441.183	343.304	77,8	443.879	356.770	80,4
20	Kalimantan Barat	372.182	164.855	44,3	412.415	364.567	88,4
21	Kalimantan Tengah	184.819	83.507	45,2	2.329.225	1.288.705	55,3
22	Kalimantan Selatan	341.521	173.327	50,8	379.741	247.220	65,1
23	Kalimantan Timur	237.590	86.329	36,3	278.872	157.452	56,5
24	Kalimantan Utara	73.724	22.086	30,0	60.457	26.951	44,6
25	Sulawesi Utara	131.069	82.279	62,8	155.361	123.732	79,6
26	Sulawesi Tengah	249.571	163.703	65,6	209.307	147.996	70,7
27	Sulawesi Selatan	978.527	565.442	57,8	660.889	493.280	74,6
28	Sulawesi Tenggara	215.393	136.252	63,3	237.130	180.615	76,2
29	Gorontalo	92.419	69.853	75,6	103.664	75.601	72,9
30	Sulawesi Barat	108.770	69.865	64,2	112.509	85.654	76,1
31	Maluku	186649	108171	58,0	196.422	123.743	63,0
32	Maluku Utara	94.863	65.714	69,3	0	0	0
33	Papua Barat	97659	38646	39,6	0	0	0
34	Papua	336163	71603	21,3	335.253	100.956	30,1
Indonesia		**28.103.977**	**17.215.298**	**61,3**	**18.447.987**	**13.625.298**	**73,9**

Sumber:Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2021

Lampiran 44.a

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020			
		Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	2,5	9,2	83,0	5,4
2	Sumatera Utara	0,9	3,2	90,1	5,8
3	Sumatera Barat	1,4	6,6	87,2	4,9
4	Riau	0,8	4,4	88,6	6,2
5	Jambi	0,6	2,8	91,8	4,8
6	Sumatera Selatan	0,9	3,5	86,8	8,8
7	Bengkulu	0,4	2,6	90,0	7,0
8	Lampung	0,8	3,6	86,6	9,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,7	3,9	88,9	6,6
10	Kepulauan Riau	1,1	4,6	85,7	8,6
11	DKI Jakarta	0,9	3,8	85,5	9,7
12	Jawa Barat	0,9	4,2	86,6	8,3
13	Jawa Tengah	1,4	6,1	84,0	8,5
14	DI Yogyakarta	1,3	6,7	83,6	8,4
15	Jawa Timur	1,7	5,8	81,9	10,6
16	Banten	1,1	3,9	84,6	10,5
17	Bali	0,4	2,1	85,1	12,5
18	Nusa Tenggara Barat	1,9	8,6	83,4	6,1
19	Nusa Tenggara Timur	2,4	10,7	83,4	3,5
20	Kalimantan Barat	2,4	9,6	83,3	4,8
21	Kalimantan Tengah	2,1	7,6	84,1	6,2
22	Kalimantan Selatan	1,5	7,6	86,4	4,5
23	Kalimantan Timur	1,7	7,7	82,8	7,8
24	Kalimantan Utara	2,5	9,2	83,3	5,0
25	Sulawesi Utara	0,6	3,5	91,2	4,6
26	Sulawesi Tengah	2,0	8,1	84,7	5,2
27	Sulawesi Selatan	1,0	5,0	89,7	4,3
28	Sulawesi Tenggara	1,5	6,3	87,3	4,9
29	Gorontalo	1,7	6,2	89,6	2,5
30	Sulawesi Barat	1,9	8,2	85,5	4,4
31	Maluku	1,7	7,9	87,2	3,2
32	Maluku Utara	1,7	8,0	87,0	3,3
33	Papua Barat	2,8	9,6	81,7	5,8
34	Papua	2,8	8,3	82,2	6,6
Indonesia		**1,3**	**5,4**	**85,6**	**7,7**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 44.b

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020			
		Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	2,8	11,2	82,9	3,1
2	Sumatera Utara	0,7	2,8	92,8	3,6
3	Sumatera Barat	1,4	8,0	87,4	3,1
4	Riau	0,9	4,6	90,5	4,0
5	Jambi	0,6	2,9	93,5	2,9
6	Sumatera Selatan	1,0	3,7	89,9	5,5
7	Bengkulu	0,4	2,9	92,7	4,0
8	Lampung	0,8	4,1	89,9	5,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,6	3,6	89,9	5,9
10	Kepulauan Riau	1,0	4,7	87,4	6,9
11	DKI Jakarta	0,9	3,8	87,6	7,7
12	Jawa Barat	1,0	5,4	87,8	5,8
13	Jawa Tengah	1,5	8,0	84,1	6,4
14	DI Yogyakarta	1,2	8,2	82,5	8,0
15	Jawa Timur	1,9	7,8	81,8	8,6
16	Banten	1,2	4,8	86,9	7,0
17	Bali	0,4	2,7	87,3	9,6
18	Nusa Tenggara Barat	2,5	12,6	81,8	3,1
19	Nusa Tenggara Timur	3,0	15,3	79,8	1,9
20	Kalimantan Barat	2,9	11,6	81,6	3,9
21	Kalimantan Tengah	2,4	8,9	83,3	5,5
22	Kalimantan Selatan	1,8	9,0	85,6	3,6
23	Kalimantan Timur	1,9	8,9	81,7	7,5
24	Kalimantan Utara	2,6	11,2	81,2	5,0
25	Sulawesi Utara	0,6	3,3	92,9	3,3
26	Sulawesi Tengah	2,2	9,7	84,7	3,4
27	Sulawesi Selatan	1,0	5,6	90,8	2,5
28	Sulawesi Tenggara	1,7	8,1	87,1	3,1
29	Gorontalo	1,6	6,7	89,6	2,0
30	Sulawesi Barat	2,2	10,8	84,3	2,7
31	Maluku	1,7	9,8	86,5	2,0
32	Maluku Utara	1,8	9,3	86,8	2,1
33	Papua Barat	3,3	12,8	79,4	4,5
34	Papua	2,7	9,6	82,3	5,5
Indonesia		**1,4**	**6,7**	**86,5**	**5,4**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 44.c

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020			
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	5,0	9,7	83,1	2,1
2	Sumatera Utara	2,3	5,0	90,6	2,1
3	Sumatera Barat	3,2	8,4	87,1	1,3
4	Riau	2,3	5,4	90,4	1,9
5	Jambi	1,7	4,0	92,8	1,5
6	Sumatera Selatan	2,3	4,7	89,4	3,6
7	Bengkulu	1,0	4,7	93,5	0,8
8	Lampung	2,0	5,1	90,3	2,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,0	3,4	94,2	1,4
10	Kepulauan Riau	2,1	5,1	90,6	2,2
11	DKI Jakarta	2,3	4,6	89,9	3,2
12	Jawa Barat	2,2	5,6	90,1	2,1
13	Jawa Tengah	3,4	8,9	85,9	1,8
14	DI Yogyakarta	3,6	9,8	85,8	0,8
15	Jawa Timur	3,8	8,3	86,2	1,7
16	Banten	3,1	5,8	87,2	3,8
17	Bali	1,3	3,4	93,9	1,4
18	Nusa Tenggara Barat	6,2	13,2	79,1	1,5
19	Nusa Tenggara Timur	5,3	12,0	81,7	1,0
20	Kalimantan Barat	5,6	11,2	81,8	1,4
21	Kalimantan Tengah	5,1	10,4	83,0	1,5
22	Kalimantan Selatan	3,4	8,4	87,2	1,0
23	Kalimantan Timur	3,8	9,6	84,8	1,8
24	Kalimantan Utara	4,3	11,4	83,4	0,8
25	Sulawesi Utara	1,4	3,7	93,9	1,0
26	Sulawesi Tengah	4,4	10,3	84,1	1,2
27	Sulawesi Selatan	2,7	7,5	88,8	1,0
28	Sulawesi Tenggara	3,9	10,1	85,1	0,9
29	Gorontalo	2,9	7,2	89,4	0,5
30	Sulawesi Barat	5,4	12,6	81,2	0,8
31	Maluku	3,3	8,2	87,8	0,7
32	Maluku Utara	3,2	8,6	87,8	0,5
33	Papua Barat	5,4	11,3	81,7	1,6
34	Papua	5,2	10,3	83,3	1,2
Indonesia		**3,1**	**7,3**	**87,7**	**1,9**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 44.d

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020			
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	5,0	12,2	81,8	1,0
2	Sumatera Utara	2,0	5,3	91,6	1,1
3	Sumatera Barat	3,3	10,9	85,0	0,7
4	Riau	1,9	5,4	91,6	1,1
5	Jambi	1,6	4,5	93,1	0,7
6	Sumatera Selatan	2,2	5,0	90,8	2,0
7	Bengkulu	1,1	5,6	92,8	0,4
8	Lampung	2,1	5,7	90,9	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,9	3,7	94,6	0,8
10	Kepulauan Riau	1,9	5,3	91,6	1,3
11	DKI Jakarta	2,0	4,8	91,6	1,7
12	Jawa Barat	2,3	7,1	89,5	1,1
13	Jawa Tengah	3,3	10,4	85,4	0,9
14	DI Yogyakarta	2,9	10,9	85,8	0,4
15	Jawa Timur	3,3	8,9	86,8	1,1
16	Banten	3,1	6,4	88,5	2,1
17	Bali	1,3	4,5	93,4	0,8
18	Nusa Tenggara Barat	6,6	16,7	75,9	0,7
19	Nusa Tenggara Timur	6,6	17,2	75,7	0,5
20	Kalimantan Barat	5,9	13,2	80,1	0,8
21	Kalimantan Tengah	4,9	11,6	82,6	0,9
22	Kalimantan Selatan	3,1	9,2	87,1	0,6
23	Kalimantan Timur	3,7	10,9	84,4	1,0
24	Kalimantan Utara	4,6	13,6	81,3	0,5
25	Sulawesi Utara	1,2	3,7	94,5	0,6
26	Sulawesi Tengah	4,4	11,9	83,0	0,7
27	Sulawesi Selatan	2,6	8,3	88,6	0,5
28	Sulawesi Tenggara	4,3	12,2	83,0	0,6
29	Gorontalo	2,7	8,1	88,9	0,3
30	Sulawesi Barat	6,1	16,5	77,0	0,4
31	Maluku	3,4	10,9	85,4	0,4
32	Maluku Utara	2,9	9,6	87,2	0,3
33	Papua Barat	5,7	13,9	79,3	1,1
34	Papua	5,1	11,9	82,1	0,9
Indonesia		**3,0**	**8,5**	**87,4**	**1,0**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 44.e

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	2,5	6,7	79,4	7,7	2,6	1,2
2	Sumatera Utara	0,9	2,7	88,0	5,8	1,7	0,9
3	Sumatera Barat	1,4	5,0	83,0	7,5	2,3	0,8
4	Riau	1,0	3,6	85,8	6,8	2,1	0,8
5	Jambi	0,6	2,2	89,2	5,8	1,8	0,5
6	Sumatera Selatan	1,3	3,3	84,4	7,5	2,4	1,1
7	Bengkulu	0,3	1,5	85,4	9,5	2,5	0,6
8	Lampung	1,1	3,1	83,5	8,9	2,6	1,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,2	1,9	88,4	7,1	1,9	0,6
10	Kepulauan Riau	1,0	3,3	84,3	8,1	2,4	0,9
11	DKI Jakarta	0,8	2,9	84,6	8,2	2,5	1,0
12	Jawa Barat	0,9	3,5	82,1	9,3	3,1	1,1
13	Jawa Tengah	1,3	4,7	79,0	10,0	3,5	1,5
14	DI Yogyakarta	0,7	4,2	76,8	12,1	4,4	1,7
15	Jawa Timur	1,9	5,1	72,0	13,9	4,8	2,3
16	Banten	1,6	4,1	81,4	8,5	3,0	1,4
17	Bali	0,4	1,7	78,2	13,0	5,0	1,6
18	Nusa Tenggara Barat	1,0	4,4	79,8	10,3	3,2	1,4
19	Nusa Tenggara Timur	1,5	6,0	83,2	6,6	1,9	0,8
20	Kalimantan Barat	2,0	5,8	81,4	7,5	2,3	1,0
21	Kalimantan Tengah	2,0	5,5	79,1	8,9	3,1	1,4
22	Kalimantan Selatan	1,4	4,9	83,8	7,0	2,1	0,8
23	Kalimantan Timur	1,7	5,5	78,6	9,7	3,2	1,2
24	Kalimantan Utara	1,6	5,7	79,9	9,0	2,9	0,9
25	Sulawesi Utara	0,5	2,3	87,5	7,0	2,0	0,6
26	Sulawesi Tengah	1,3	5,4	81,6	8,0	2,6	1,1
27	Sulawesi Selatan	0,8	3,0	86,0	7,5	2,1	0,6
28	Sulawesi Tenggara	1,3	4,0	82,8	8,4	2,5	0,9
29	Gorontalo	1,2	3,6	87,3	5,6	1,7	0,6
30	Sulawesi Barat	1,3	4,5	81,1	9,2	2,9	1,0
31	Maluku	1,4	4,9	85,5	6,0	1,6	0,6
32	Maluku Utara	1,5	4,7	83,5	7,4	2,0	0,9
33	Papua Barat	2,8	7,4	75,3	9,6	3,3	1,6
34	Papua	3,1	5,7	76,2	10,4	3,3	1,4
Indonesia		**1,4**	**4,7**	**92,5**	**10,6**	**3,5**	**1,4**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 44.f

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	2020					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	2,2	6,9	82,5	5,8	1,8	0,8
2	Sumatera Utara	0,6	2,2	90,7	4,5	1,2	0,7
3	Sumatera Barat	1,2	4,8	85,7	6,0	1,7	0,6
4	Riau	0,9	3,7	88,3	5,1	1,5	0,6
5	Jambi	0,5	2,0	91,7	4,3	1,2	0,4
6	Sumatera Selatan	1,1	3,2	87,1	5,8	1,8	0,9
7	Bengkulu	0,2	1,5	89,6	6,6	1,7	0,5
8	Lampung	0,9	3,3	87,0	6,4	1,8	0,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,1	1,6	89,0	6,1	1,9	1,3
10	Kepulauan Riau	0,9	3,3	85,3	6,8	2,3	1,4
11	DKI Jakarta	0,7	2,8	85,3	7,1	2,6	1,6
12	Jawa Barat	0,8	3,6	84,6	7,5	2,4	1,2
13	Jawa Tengah	1,1	5,0	81,2	8,2	2,9	1,5
14	DI Yogyakarta	0,6	4,3	79,1	10,2	3,7	2,2
15	Jawa Timur	1,9	5,9	74,6	11,5	3,8	2,1
16	Banten	1,4	4,3	83,7	7,0	2,4	1,3
17	Bali	0,4	1,8	81,5	10,7	3,9	1,8
18	Nusa Tenggara Barat	0,9	5,4	84,2	6,8	1,8	0,8
19	Nusa Tenggara Timur	1,3	6,5	86,1	4,5	1,2	0,4
20	Kalimantan Barat	1,8	5,9	83,3	5,9	1,9	1,1
21	Kalimantan Tengah	1,8	5,7	80,8	7,5	2,7	1,5
22	Kalimantan Selatan	1,4	5,3	85,1	5,4	1,8	1,0
23	Kalimantan Timur	1,6	5,5	79,2	8,5	3,2	1,9
24	Kalimantan Utara	1,6	6,1	80,8	7,6	2,6	1,3
25	Sulawesi Utara	0,4	2,1	90,2	5,2	1,5	0,6
26	Sulawesi Tengah	1,3	5,8	83,9	6,2	2,0	0,8
27	Sulawesi Selatan	0,7	2,9	89,5	5,1	1,3	0,5
28	Sulawesi Tenggara	1,2	4,4	85,5	6,6	1,7	0,6
29	Gorontalo	1,1	3,8	89,0	4,2	1,3	0,6
30	Sulawesi Barat	1,2	4,6	84,7	6,9	1,9	0,7
31	Maluku	1,2	5,3	87,4	4,5	1,1	0,4
32	Maluku Utara	1,4	5,0	86,2	5,4	1,3	0,6
33	Papua Barat	2,9	8,2	77,5	7,5	2,6	1,3
34	Papua	2,8	6,2	77,9	8,9	2,8	1,4
Indonesia		**1,2**	**4,7**	**92,8**	**8,1**	**2,6**	**1,3**

Sumber: ePPGBM pengukuran Agustus 2020, diakses per tanggal 6 April 2021

Lampiran 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*11)*
1	Aceh	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2	Sumatera Utara	6.975	1.716	24,6	1.665	519	31,2	1.158	268	23,1
3	Sumatera Barat	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
4	Riau	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
5	Jambi	2.710	2.289	84,5	1.010	808	80,0	567	417	73,5
6	Sumatera Selatan	5.118	5.011	97,9	1.657	1.612	97,3	1.009	955	94,6
7	Bengkulu	1.493	1.342	89,9	473	466	98,5	260	246	94,6
8	Lampung	5.391	4.060	75,3	1.822	1.274	69,9	1.106	758	68,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	867	819	94,5	267	250	93,6	158	129	81,6
10	Kepulauan Riau	961	948	98,6	425	417	98,1	261	259	99,2
11	DKI Jakarta	2.905	2.897	99,7	1.328	1.309	98,6	1.237	1.220	98,6
12	Jawa Barat	24.047	23.428	97,4	7.713	7.108	92,2	5.229	4.695	89,8
13	Jawa Tengah	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
14	D I Yogyakarta	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
15	Jawa Timur	25.789	23.555	91,3	8.002	7.311	91,4	5.805	4.972	85,7
16	Banten	5.699	5.636	98,9	2.446	2.389	97,7	1.394	1.180	84,6
17	Bali	2.534	2.122	83,7	447	212	47,4	346	139	40,2
18	Nusa Tenggara Barat	2.062	1.705	82,7	1.020	869	85,2	457	279	61,1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
20	Kalimantan Barat	0	0	#DIV/0!	1.248	494	39,6	525	251	47,8
21	Kalimantan Tengah	2.416	2.394	99,1	700	692	98,9	392	384	98,0
22	Kalimantan Selatan	3.349	2.773	82,8	935	664	71,0	429	293	68,3
23	Kalimantan Timur	2.034	1.769	87,0	811	658	81,1	516	432	83,7
24	Kalimantan Utara	439	73	16,6	169	24	14,2	87	13	14,9
25	Sulawesi Utara	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
26	Sulawesi Tengah	2.579	1.600	62,0	909	436	48,0	457	194	42,5
27	Sulawesi Selatan	7.190	6.601	91,8	2.227	2.045	91,8	1.316	1.062	80,7
28	Sulawesi Tenggara	2.252	2.178	96,7	931	899	96,6	470	446	94,9
29	Gorontalo	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	1.313	966	73,6	347	255	73,5	0	139	#DIV/0!
31	Maluku	1.785	1.465	82,1	735	522	71,0	433	309	71,4
32	Maluku Utara	998	443	44,4	444	182	41,0	277	115	41,5
33	Papua Barat	0	0	#DIV/0!	0	2	#DIV/0!	11	0	0,0
34	Papua	2.607	309	11,9	719	68	9,5	371	36	9,7
Indonesia		**113.513**	**96.099**	**84,7**	**38.450**	**31.485**	**81,9**	**24.271**	**19.191**	**79,1**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Keterangan :

* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

Lampiran 48

PELAKSANAKAN DETEKSI DINI PADA POPULASI USIA >= 15 TAHUN
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Posbindu	Penduduk Usia 15+ Tahun	Jumlah yang Diperiksa	Cakupan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	352	4.286	3.345.424	22.165	0,66
2	Sumatera Utara	642	3.256	8.878.982	66.755	0,75
3	Sumatera Barat	276	2.302	3.306.494	101.217	3,06
4	Riau	237	1.019	4.473.351	21.407	0,48
5	Jambi	200	956	2.383.970	15.833	0,66
6	Sumatera Selatan	352	2.527	5.424.545	15.382	0,28
7	Bengkulu	183	954	1.298.603	297	0,02
8	Lampung	310	2.319	5.382.432	64.081	1,19
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	588	978.495	9.480	0,97
10	Kepulauan Riau	83	483	1.440.961	14.484	1,01
11	DKI Jakarta	350	1.857	7.100.187	571.064	8,04
12	Jawa Barat	1.088	7.262	31.886.485	265.528	0,83
13	Jawa Tengah	878	7.913	21.887.966	199.515	0,91
14	DI Yogyakarta	121	1.161	3.310.565	13.722	0,41
15	Jawa Timur	971	8.652	25.732.465	763.561	2,97
16	Banten	246	1.511	8.523.596	139.340	1,63
17	Bali	120	687	2.844.601	2.609	0,09
18	Nusa Tenggara Barat	173	2.058	3.148.772	1.715.249	54,47
19	Nusa Tenggara Timur	415	2.568	3.164.017	49.901	1,58
20	Kalimantan Barat	248	1.577	3.221.982	185.989	5,77
21	Kalimantan Tengah	202	1.014	1.815.552	29.694	1,64
22	Kalimantan Selatan	237	1.658	2.735.686	102.667	3,75
23	Kalimantan Timur	186	780	2.482.998	3.407	0,14
24	Kalimantan Utara	56	125	474.167	1.992	0,42
25	Sulawesi Utara	185	526	1.605.908	3.929	0,24
26	Sulawesi Tengah	202	1.522	1.942.942	63.016	3,24
27	Sulawesi Selatan	473	3.584	5.544.264	78.347	1,41
28	Sulawesi Tenggara	305	803	1.635.675	74.711	4,57
29	Gorontalo	93	547	776.700	24.921	3,21
30	Sulawesi Barat	104	695	861.066	23.511	2,73
31	Maluku	193	372	1.087.794	692	0,06
32	Maluku Utara	140	703	768.710	23.750	3,09
33	Papua Barat	169	331	628.661	1.465	0,23
34	Papua	399	168	2.277.564	2.499	0,11
Indonesia		**10.253**	**66.764**	**172.371.580**	**4.672.180**	**2,71**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 49

CAKUPAN PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN SANTUN LANSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Santun Lansia	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	359	177	49,3
2	Sumatera Utara	604	325	53,8
3	Sumatera Barat	275	182	66,2
4	Riau	230	141	61,3
5	Jambi	206	193	93,7
6	Sumatera Selatan	341	282	82,7
7	Bengkulu	179	175	97,8
8	Lampung	310	287	92,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	86	71	82,6
11	DKI Jakarta	315	310	98,4
12	Jawa Barat	1074	983	91,5
13	Jawa Tengah	878	878	100,0
14	DI Yogyakarta	121	104	86,0
15	Jawa Timur	968	704	72,7
16	Banten	243	141	58,0
17	Bali	120	95	79,2
18	Nusa Tenggara Barat	171	153	89,5
19	Nusa Tenggara Timur	410	66	16,1
20	Kalimantan Barat	246	113	45,9
21	Kalimantan Tengah	203	130	64,0
22	Kalimantan Selatan	236	153	64,8
23	Kalimantan Timur	186	165	88,7
24	Kalimantan Utara	55	26	47,3
25	Sulawesi Utara	195	54	27,7
26	Sulawesi Tengah	206	16	7,8
27	Sulawesi Selatan	461	366	79,4
28	Sulawesi Tenggara	291	234	80,4
29	Gorontalo	93	78	83,9
30	Sulawesi Barat	96	53	55,2
31	Maluku	212	33	15,6
32	Maluku Utara	147	92	62,6
33	Papua Barat	161	54	33,5
34	Papua	424	51	12,0
Indonesia		**10166**	**6949**	**68,4**

Sumber:Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2021

Lampiran 51.a

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK *TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					*Case Notification Rate (CNR)* Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut) *)	*Treatment Coverage (TC%)*	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
						Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
						Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	5.459.891	65.308	27.243	41,7	4.092	62,4	2.470	37,6	6.562	120	20.149	32,6	230	9,5
2	Sumatera Utara	14.703.532	221.518	78.339	35,4	13.034	64,4	7.212	35,6	20.246	138	62.819	32,2	988	13,1
3	Sumatera Barat	5.498.751	91.684	40.869	44,6	3.273	60,6	2.126	39,4	5.399	98	22.971	23,5	564	20,5
4	Riau	7.128.305	118.951	38.811	32,6	5.370	62,2	3.268	37,8	8.638	121	27.634	31,3	618	18,6
5	Jambi	3.677.894	27.427	15.164	55,3	1.820	61,8	1.125	38,2	2.945	80	13.681	21,5	128	7,8
6	Sumatera Selatan	8.567.923	164.138	67.733	41,3	5.843	60,9	3.757	39,1	9.600	112	33.773	28,4	618	15,2
7	Bengkulu	2.019.848	23.755	4.773	20,1	890	63,0	523	37,0	1.413	70	7.760	18,2	116	12,5
8	Lampung	8.521.201	92.826	57.341	61,8	6.713	58,5	4.757	41,5	11.470	135	29.508	38,9	1.216	34,3
9	Kep. Bangka Belitung	1.517.590	17.415	12.170	69,9	987	61,8	609	38,2	1.596	105	5.923	26,9	133	18,7
10	Kepulauan Riau	2.242.198	42.729	14.096	33,0	2.204	58,8	1.543	41,2	3.747	167	10.840	34,6	361	27,8
11	DKI Jakarta	10.644.986	230.515	92.846	40,3	13.958	57,5	10.316	42,5	24.274	228	47.431	51,2	2.304	40,5
12	Jawa Barat	49.935.858	622.361	233.602	37,5	43.695	55,0	35.728	45,0	79.423	159	128.057	62,0	11.482	74,7
13	Jawa Tengah	34.940.078	403.747	149.737	37,1	21.672	55,7	17.249	44,3	38.921	111	83.076	46,8	4.011	40,2
14	DI Yogyakarta	3.882.288	34.790	19.586	56,3	1.582	55,3	1.277	44,7	2.859	74	9.074	31,5	468	43,0
15	Jawa Timur	39.886.288	466.297	226.009	48,5	23.711	55,6	18.922	44,4	42.633	107	95.925	44,4	2.734	23,8
16	Banten	13.160.496	178.729	68.090	38,1	11.981	57,3	8.932	42,7	20.913	159	33.098	63,2	1.721	43,3
17	Bali	4.380.824	32.935	12.240	37,2	1.713	60,4	1.125	39,6	2.838	65	12.406	22,9	116	7,8
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	95.774	20.481	21,4	3.230	60,1	2.143	39,9	5.373	105	17.736	30,3	311	14,6
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	66.620	33.609	50,4	2.792	55,7	2.222	44,3	5.014	90	18.856	26,6	288	12,7
20	Kalimantan Barat	5.134.760	52.272	25.472	48,7	4.084	64,9	2.210	35,1	6.294	123	17.233	36,5	585	28,3
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	35.959	11.728	32,6	1.529	63,8	869	36,2	2.398	87	9.380	25,6	96	8,5
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	66.382	18.009	27,1	2.031	60,9	1.302	39,1	3.333	77	15.087	22,1	193	10,7
23	Kalimantan Timur	3.793.152	67.338	19.234	28,6	2.506	59,6	1.699	40,4	4.205	111	14.459	29,1	402	23,2
24	Kalimantan Utara	768.505	13.473	6.009	44,6	568	61,9	350	38,1	918	119	2.772	33,1	67	20,1
25	Sulawesi Utara	2.528.794	46.386	18.238	39,3	3.047	63,8	1.727	36,2	4.774	189	9.532	50,1	96	8,4
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	49.664	17.138	34,5	2.442	61,0	1.559	39,0	4.001	129	10.219	39,2	158	12,9
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	150.768	58.680	38,9	7.035	58,5	4.990	41,5	12.025	135	31.022	38,8	383	10,3
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	33.043	18.140	54,9	1.790	61,8	1.106	38,2	2.896	105	9.003	32,2	71	6,6
29	Gorontalo	1.219.576	19.742	8.242	41,7	1.317	57,5	975	42,5	2.292	188	4.306	53,2	60	11,6
30	Sulawesi Barat	1.405.012	19.683	10.824	55,0	1.120	58,5	793	41,5	1.913	136	4.445	43,0	76	14,2
31	Maluku	1.831.880	32.011	3.822	11,9	1.008	56,6	773	43,4	1.781	97	6.587	27,0	164	20,7
32	Maluku Utara	1.278.764	16.081	6.465	40,2	826	58,3	590	41,7	1.416	111	4.193	33,8	57	11,3
33	Papua Barat	981.822	15.428	5.021	32,5	761	52,9	677	47,1	1.438	146	6.516	22,1	154	19,7
34	Papua	3.435.430	90.056	25.070	27,8	4.619	55,1	3.769	44,9	8.388	244	18.530	45,3	1.847	83,1
Indonesia		**271.066.366**	**3.705.803**	**1.464.831**	**39,5**	**203.243**	**57,7**	**148.693**	**42,3**	**351.936**	**130**	**844.000**	**41,7**	**32.816**	**32,4**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

*) Berdasarkan Modeling Tahun 2018.

Keterangan:

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

Lampiran 51.b

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	117	113	384	345	565	367	716	413	895	522	813	424	602	286	4.092	2.470	6.562
2	Sumatera Utara	530	458	1.677	1.533	2.048	1.255	2.311	1.091	2.762	1.270	2.528	1.069	1.178	536	13.034	7.212	20.246
3	Sumatera Barat	275	289	386	399	469	338	496	306	587	318	597	300	463	176	3.273	2.126	5.399
4	Riau	315	303	631	658	911	575	1.041	579	1.095	566	893	409	484	178	5.370	3.268	8.638
5	Jambi	68	60	247	195	294	236	364	211	346	203	329	149	172	71	1.820	1.125	2.945
6	Sumatera Selatan	312	306	593	610	959	661	1.043	650	1.117	691	1.089	572	730	267	5.843	3.757	9.600
7	Bengkulu	76	40	97	92	135	92	176	109	148	97	162	60	96	33	890	523	1.413
8	Lampung	644	572	621	689	988	816	1.109	776	1.174	706	1.176	732	1.001	466	6.713	4.757	11.470
9	Kep. Bangka Belitung	66	67	97	109	158	111	189	122	189	84	154	79	134	37	987	609	1.596
10	Kepulauan Riau	185	176	358	366	478	377	450	300	394	176	214	105	125	43	2.204	1.543	3.747
11	DKI Jakarta	1.134	1.170	2.109	2.210	2.602	1.923	2.447	1.595	2.459	1.565	2.067	1.262	1.140	591	13.958	10.316	24.274
12	Jawa Barat	5.900	5.582	7.081	8.197	7.281	6.098	6.669	5.393	6.969	4.977	5.865	3.608	3.930	1.873	43.695	35.728	79.423
13	Jawa Tengah	2.106	1.905	2.621	3.354	3.159	2.855	3.330	2.520	3.734	2.780	3.891	2.430	2.831	1.405	21.672	17.249	38.921
14	DI Yogyakarta	247	221	189	211	217	219	209	174	236	167	261	154	223	131	1.582	1.277	2.859
15	Jawa Timur	1.347	1.387	2.981	3.733	3.142	2.938	3.611	3.050	4.688	3.436	4.606	2.829	3.336	1.549	23.711	18.922	42.633
16	Banten	886	835	1.766	1.917	2.319	1.743	2.121	1.499	2.259	1.466	1.712	1.025	918	447	11.981	8.932	20.913
17	Bali	60	56	220	195	290	256	327	193	350	202	260	133	206	90	1.713	1.125	2.838
18	Nusa Tenggara Barat	157	154	368	327	497	379	580	392	682	447	585	295	361	149	3.230	2.143	5.373
19	Nusa Tenggara Timur	127	161	430	481	545	469	445	345	456	296	435	262	354	208	2.792	2.222	5.014
20	Kalimantan Barat	328	257	564	415	658	350	691	365	763	361	636	284	444	178	4.084	2.210	6.294
21	Kalimantan Tengah	52	44	166	137	263	184	325	178	319	146	265	125	139	55	1.529	869	2.398
22	Kalimantan Selatan	89	104	230	195	323	207	397	228	404	271	372	192	216	105	2.031	1.302	3.333
23	Kalimantan Timur	212	190	361	341	429	318	418	280	468	300	402	186	216	84	2.506	1.699	4.205
24	Kalimantan Utara	35	32	72	60	93	73	108	56	120	64	79	38	61	27	568	350	918
25	Sulawesi Utara	44	52	379	305	427	271	558	283	674	347	589	281	376	188	3.047	1.727	4.774
26	Sulawesi Tengah	97	61	292	300	394	276	416	270	494	310	429	209	320	133	2.442	1.559	4.001
27	Sulawesi Selatan	183	200	974	896	1.178	837	1.269	843	1.407	1.023	1.142	741	882	450	7.035	4.990	12.025
28	Sulawesi Tenggara	35	36	280	243	318	235	307	161	367	202	282	152	201	77	1.790	1.106	2.896
29	Gorontalo	26	34	211	186	191	131	239	177	268	218	237	149	145	80	1.317	975	2.292
30	Sulawesi Barat	39	37	179	167	186	136	212	149	223	151	154	97	127	56	1.120	793	1.913
31	Maluku	77	87	190	171	194	142	179	123	154	122	127	76	87	52	1.008	773	1.781
32	Maluku Utara	26	31	170	161	174	128	173	102	127	84	99	51	57	33	826	590	1.416
33	Papua Barat	64	90	170	181	178	170	152	106	89	66	81	47	27	17	761	677	1.438
34	Papua	942	905	1.189	1.111	990	785	655	468	443	291	271	160	129	49	4.619	3.769	8.388
Indonesia		**16.801**	**16.015**	**28.283**	**30.490**	**33.053**	**25.951**	**33.733**	**23.507**	**36.860**	**23.925**	**32.802**	**18.685**	**21.711**	**10.120**	**203.243**	**148.693**	**351.936**
		9,32%		**16,70%**		**16,77%**		**16,26%**		**17,27%**		**14,63%**		**9,04%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

* : Data berdasarkan hasil penyisiran kasus SIM RS Mopping up

Lampiran 51.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	10	17	195	162	318	183	397	214	514	245	374	192	261	102	2.069	1.115	3.184
2	Sumatera Utara	74	76	712	656	1.021	592	1.222	537	1.405	615	1.187	512	494	226	6.115	3.214	9.329
3	Sumatera Barat	22	31	256	241	329	220	371	199	420	223	397	192	275	85	2.070	1.191	3.261
4	Riau	24	35	320	316	516	301	617	305	730	328	517	232	275	83	2.999	1.600	4.599
5	Jambi	12	8	149	112	189	139	255	134	243	137	207	100	99	40	1.154	670	1.824
6	Sumatera Selatan	81	50	352	345	600	406	656	381	697	432	636	326	399	153	3.421	2.093	5.514
7	Bengkulu	19	7	54	48	85	47	101	53	90	49	87	35	56	16	492	255	747
8	Lampung	74	84	336	360	613	466	705	471	730	421	696	440	567	254	3.721	2.496	6.217
9	Kep. Bangka Belitung	10	11	59	63	106	69	134	77	129	61	90	46	71	15	599	342	941
10	Kepulauan Riau	9	19	202	187	250	193	268	156	236	90	110	59	67	22	1.142	726	1.868
11	DKI Jakarta	46	83	1.082	991	1.355	810	1.337	717	1.312	726	956	522	386	163	6.474	4.012	10.486
12	Jawa Barat	182	293	2.971	3.153	3.325	2.431	3.154	2.224	3.295	2.010	2.442	1.441	1.396	584	16.765	12.136	28.901
13	Jawa Tengah	54	96	1.345	1.654	1.736	1.485	1.908	1.305	2.096	1.398	1.974	1.104	1.199	475	10.312	7.517	17.829
14	DI Yogyakarta	2	7	91	105	95	90	112	69	108	76	135	61	74	33	617	441	1.058
15	Jawa Timur	79	151	1.420	1.667	1.667	1.348	2.099	1.618	2.775	1.922	2.493	1.459	1.635	629	12.168	8.794	20.962
16	Banten	51	69	715	603	1.015	651	924	569	979	594	697	373	325	142	4.706	3.001	7.707
17	Bali	4	3	100	94	145	127	199	97	223	97	148	73	118	44	937	535	1.472
18	Nusa Tenggara Barat	20	26	231	194	335	238	411	247	492	316	413	209	249	99	2.151	1.329	3.480
19	Nusa Tenggara Timur	33	41	274	284	347	306	262	216	299	180	246	135	187	105	1.648	1.267	2.915
20	Kalimantan Barat	20	17	329	221	405	202	439	204	472	199	360	154	225	85	2.250	1.082	3.332
21	Kalimantan Tengah	10	9	94	85	165	95	200	88	210	71	145	63	65	22	889	433	1.322
22	Kalimantan Selatan	9	14	129	101	171	112	224	125	228	138	192	104	89	40	1.042	634	1.676
23	Kalimantan Timur	4	7	152	108	202	121	204	122	220	124	185	68	77	27	1.044	577	1.621
24	Kalimantan Utara	8	5	53	35	56	62	72	39	91	41	56	24	43	13	379	219	598
25	Sulawesi Utara	15	20	245	203	294	190	399	193	504	244	419	212	257	122	2.133	1.184	3.317
26	Sulawesi Tengah	20	16	172	173	240	166	276	166	296	183	242	118	161	60	1.407	882	2.289
27	Sulawesi Selatan	11	26	591	560	799	554	889	576	987	721	744	461	491	254	4.512	3.152	7.664
28	Sulawesi Tenggara	8	15	182	157	227	163	213	107	237	138	173	92	130	46	1.170	718	1.888
29	Gorontalo	9	15	138	117	129	88	161	120	172	152	151	84	87	45	847	621	1.468
30	Sulawesi Barat	5	7	121	111	142	111	148	113	164	104	96	62	77	38	753	546	1.299
31	Maluku	6	8	112	95	125	91	106	77	98	74	80	41	53	21	580	407	987
32	Maluku Utara	1	6	124	112	110	92	127	77	99	60	69	38	35	17	565	402	967
33	Papua Barat	6	12	103	90	115	85	89	57	62	34	46	22	13	7	434	307	741
34	Papua	73	78	681	616	565	413	340	216	232	146	139	68	65	21	2.095	1.558	3.653
Indonesia		**1.011**	**1.362**	**14.090**	**14.019**	**17.792**	**12.647**	**19.019**	**11.869**	**20.845**	**12.349**	**16.902**	**9.122**	**10.001**	**4.088**	**99.660**	**65.456**	**165.116**
		1,44%		**17,02%**		**18,43%**		**18,71%**		**20,10%**		**15,76%**		**8,53%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

* : Data berdasarkan hasil penyisiran kasus SIM RS Mopping up

Mopping up untuk kelompok umur

Lampiran 52

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati*)			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati*)			Angka Kesembuhan *(Cure Rate)* Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap *(Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis*						Angka Keberhasilan Pengobatan *(Success Rate/SR)* Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*
1	Aceh	2.655	1.359	4.014	5.473	2.907	8.380	1.599	60,2	837	61,6	2.436	60,7	3.119	57,0	1.693	58,2	4.812	57,4	4.718	86,2	2.530	87,0	7.248	86,5	159	1,9
2	Sumatera Utara	10.849	5.417	16.266	20.259	10.911	31.170	7.458	68,7	3.739	69,0	11.197	68,8	10.707	52,9	6.156	56,4	16.863	54,1	18.165	89,7	9.895	90,7	28.060	90,0	634	2,0
3	Sumatera Barat	4.076	2.238	6.314	6.999	4.369	11.368	3.095	75,9	1.762	78,7	4.857	76,9	3.033	43,3	2.177	49,8	5.210	45,8	6.128	87,6	3.939	90,2	10.067	88,6	307	2,7
4	Riau	3.772	1.912	5.684	6.923	4.105	11.028	2.533	67,2	1.284	67,2	3.817	67,2	3.798	54,9	2.528	61,6	6.326	57,4	6.331	91,4	3.812	92,9	10.143	92,0	293	2,7
5	Jambi	2.081	1.274	3.355	2.872	1.907	4.779	1.809	86,9	1.135	89,1	2.944	87,7	784	27,3	607	31,8	1.391	29,1	2.593	90,3	1.742	91,3	4.335	90,7	80	1,7
6	Sumatera Selatan	6.307	3.789	10.096	12.505	8.001	20.506	4.548	72,1	2.765	73,0	7.313	72,4	7.235	57,9	4.832	60,4	12.067	58,8	11.783	94,2	7.597	95,0	19.380	94,5	285	1,4
7	Bengkulu	1.036	592	1.628	2.001	1.270	3.271	831	80,2	486	82,1	1.317	80,9	877	43,8	587	46,2	1.464	44,8	1.708	85,4	1.073	84,5	2.781	85,0	80	2,4
8	Lampung	5.499	3.783	9.282	9.062	6.734	15.796	5.218	94,9	3.625	95,8	8.843	95,3	3.529	38,9	2.906	43,2	6.435	40,7	8.747	96,5	6.531	97,0	15.278	96,7	190	1,2
9	Kep. Bangka Belitung	777	442	1.219	1.310	786	2.096	555	71,4	337	76,2	892	73,2	615	46,9	383	48,7	998	47,6	1.170	89,3	720	91,6	1.890	90,2	96	4,6
10	Kepulauan Riau	1.734	1.000	2.734	3.240	2.182	5.422	1.210	69,8	727	72,7	1.937	70,8	1.564	48,3	1.149	52,7	2.713	50,0	2.774	85,6	1.876	86,0	4.650	85,8	154	2,8
11	DKI Jakarta	11.196	7.110	18.306	23.441	17.628	41.069	6.248	55,8	4.098	57,6	10.346	56,5	12.835	54,8	10.703	60,7	23.538	57,3	19.083	81,4	14.801	84,0	33.884	82,5	853	2,1
12	Jawa Barat	26.718	19.233	45.951	71.261	59.596	130.857	17.457	65,3	12.971	67,4	30.428	66,2	36.545	51,3	33.229	55,8	69.774	53,3	54.002	75,8	46.200	77,5	100.202	76,6	1.763	1,3
13	Jawa Tengah	15.182	11.295	26.477	32.054	25.835	57.889	10.513	69,2	8.224	72,8	18.737	70,8	15.274	47,7	13.095	50,7	28.369	49,0	25.787	80,4	21.319	82,5	47.106	81,4	1.521	2,6
14	DI Yogyakarta	1.009	666	1.675	2.332	1.760	4.092	762	75,5	522	78,4	1.284	76,7	1.228	52,7	1.020	58,0	2.248	54,9	1.990	85,3	1.542	87,6	3.532	86,3	273	6,7
15	Jawa Timur	18.785	13.692	32.477	36.575	29.498	66.073	14.134	75,2	10.632	77,7	24.766	76,3	17.441	47,7	15.333	52,0	32.774	49,6	31.575	86,3	25.965	88,0	57.540	87,1	2.304	3,5
16	Banten	7.002	4.494	11.496	18.234	13.523	31.757	4.889	69,8	3.079	68,5	7.968	69,3	10.003	54,9	7.931	58,6	17.934	56,5	14.892	81,7	11.010	81,4	25.902	81,6	476	1,5
17	Bali	1.423	879	2.302	2.464	1.702	4.166	1.007	70,8	654	74,4	1.661	72,2	1.162	47,2	895	52,6	2.057	49,4	2.169	88,0	1.549	91,0	3.718	89,2	325	7,8
18	Nusa Tenggara Barat	2.848	1.692	4.540	4.428	2.807	7.235	2.510	88,1	1.522	90,0	4.032	88,8	1.411	31,9	1.024	36,5	2.435	33,7	3.921	88,6	2.546	90,7	6.467	89,4	270	3,7
19	Nusa Tenggara Timur	2.100	1.524	3.624	4.262	3.270	7.532	1.384	65,9	1.010	66,3	2.394	66,1	2.443	57,3	1.948	59,6	4.391	58,3	3.827	89,8	2.958	90,5	6.785	90,1	183	2,4
20	Kalimantan Barat	3.640	1.873	5.513	6.099	3.427	9.526	2.300	63,2	1.174	62,7	3.474	63,0	1.845	30,3	1.136	33,1	2.981	31,3	4.145	68,0	2.310	67,4	6.455	67,8	228	2,4
21	Kalimantan Tengah	1.397	819	2.216	2.294	1.418	3.712	1.080	77,3	682	83,3	1.762	79,5	852	37,1	577	40,7	1.429	38,5	1.932	84,2	1.259	88,8	3.191	86,0	100	2,7
22	Kalimantan Selatan	1.875	1.171	3.046	4.610	3.087	7.697	1.253	66,8	811	69,3	2.064	67,8	2.419	52,5	1.705	55,2	4.124	53,6	3.672	79,7	2.516	81,5	6.188	80,4	257	3,3
23	Kalimantan Timur	2.154	1.397	3.551	4.585	3.355	7.940	1.377	63,9	879	62,9	2.256	63,5	2.737	59,7	2.193	65,4	4.930	62,1	4.114	89,7	3.072	91,6	7.186	90,5	211	2,7
24	Kalimantan Utara	667	356	1.023	1.096	679	1.775	269	40,3	168	47,2	437	42,7	354	32,3	279	41,1	633	35,7	623	56,8	447	65,8	1.070	60,3	77	4,3
25	Sulawesi Utara	3.613	2.062	5.675	4.969	2.817	7.786	2.733	75,6	1.614	78,3	4.347	76,6	1.324	26,6	761	27,0	2.085	26,8	4.057	81,6	2.375	84,3	6.432	82,6	124	1,6
26	Sulawesi Tengah	2.173	1.323	3.496	3.610	2.208	5.818	1.625	74,8	1.040	78,6	2.665	76,2	1.718	47,6	1.036	46,9	2.754	47,3	3.343	92,6	2.076	94,0	5.419	93,1	167	2,9
27	Sulawesi Selatan	6.919	4.619	11.538	11.628	8.256	19.884	4.739	68,5	3.345	72,4	8.084	70,1	5.061	43,5	3.784	45,8	8.845	44,5	9.800	84,3	7.129	86,3	16.929	85,1	744	3,7
28	Sulawesi Tenggara	1.760	1.129	2.889	2.622	1.670	4.292	1.353	76,9	857	75,9	2.210	76,5	901	34,4	560	33,5	1.461	34,0	2.254	86,0	1.417	84,9	3.671	85,5	153	3,6
29	Gorontalo	1.582	1.129	2.711	2.316	1.721	4.037	1.255	79,3	884	78,3	2.139	78,9	746	32,2	604	35,1	1.350	33,4	2.001	86,4	1.488	86,5	3.489	86,4	58	1,4
30	Sulawesi Barat	1.087	762	1.849	1.545	1.153	2.698	875	80,5	624	81,9	1.499	81,1	555	35,9	471	40,8	1.026	38,0	1.430	92,6	1.095	95,0	2.525	93,6	95	3,5
31	Maluku	1.394	916	2.310	2.495	1.825	4.320	347	24,9	251	27,4	598	25,9	800	32,1	681	37,3	1.481	34,3	1.147	46,0	932	51,1	2.079	48,1	48	1,1
32	Maluku Utara	906	641	1.547	1.313	921	2.234	363	40,1	260	40,6	623	40,3	621	47,3	448	48,6	1.069	47,9	984	74,9	708	76,9	1.692	75,7	137	6,1
33	Papua Barat	782	563	1.345	1.714	1.381	3.095	275	35,2	201	35,7	476	35,4	748	43,6	635	46,0	1.383	44,7	1.023	59,7	836	60,5	1.859	60,1	104	3,4
34	Papua	2.766	2.198	4.964	6.363	5.437	11.800	1.100	39,8	938	42,7	2.038	41,1	2.620	41,2	2.446	45,0	5.066	42,9	3.720	58,5	3.384	62,2	7.104	60,2	425	3,6
Indonesia		**157.764**	**103.349**	**261.113**	**322.954**	**238.146**	**561.100**	**108.704**	**68,9**	**73.137**	**70,8**	**181.841**	**69,6**	**156.904**	**48,6**	**125.512**	**52,7**	**282.416**	**50,3**	**265.608**	**82,2**	**198.649**	**83,4**	**464.257**	**82,7**	**13.174**	**2,3**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Hasil Pengobatan tahun 2020 berdasarkan kohort penemuan kasus tahun 2019

Lampiran 53.a

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Balita	Prevalensi Pneumonia Pada Balita (%)	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita												Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total			CFR (%)
					Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah			%	< 1 Tahun		1-4 Tahun					
					< 1 Tahun		1-4 Tahun		< 1 Tahun		1-4 Tahun		L	P	L+P		L	P	L	P	L	P	L+P	
					L	P	L	P	L	P	L	P												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	514.963	4,46	22.967	269	206	721	546	37	21	22	134	1.049	907	1.956	8,5	4	13	1	1	5	14	19	0,97
2	Sumatera Utara	1.419.374	2,99	42.439	471	445	812	643	30	29	43	35	1.356	1.152	2.508	5,9	1	5	14	16	15	21	36	1,44
3	Sumatera Barat	515.165	3,91	20.143	633	542	1.673	1.364	56	38	86	79	2.448	2.023	4.471	22,2	0	3	0	1	0	4	4	0,09
4	Riau	683.206	2,67	18.242	399	308	793	622	14	3	29	11	1.235	944	2.179	11,9	1	4	1	4	2	8	10	0,46
5	Jambi	365.995	3,15	11.529	250	226	768	530	8	7	12	11	1.038	774	1.812	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Sumatera Selatan	874.326	3,61	31.563	1.081	1.007	1.856	1.538	152	89	119	86	3.208	2.720	5.928	18,8	0	1	0	0	0	1	1	0,02
7	Bengkulu	214.664	2,00	4.293	76	36	107	57	4	0	3	8	190	101	291	6,8	2	0	0	1	2	1	3	0,96
8	Lampung	848.480	2,23	18.921	1.082	1.118	2.459	2.191	69	65	311	236	3.921	3.610	7.531	39,8	0	0	2	3	2	3	5	0,07
9	Kep. Bangka Belitung	139.019	6,05	8.411	238	226	947	709	7	2	12	6	1.204	943	2.147	25,5	1	1	0	0	1	1	2	0,09
10	Kepulauan Riau	139.019	3,98	5.533	134	129	289	261	5	6	0	2	428	398	826	14,9	0	0	2	3	2	3	5	0,61
11	DKI Jakarta	1.045.731	4,24	44.339	4.291	3.435	8.228	7.059	87	56	81	279	12.687	10.829	23.516	53,0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Jawa Barat	4.898.913	4,62	226.330	12.165	10.912	24.197	21.371	548	384	490	441	37.400	33.108	70.508	31,2	20	18	15	15	35	33	68	0,10
13	Jawa Tengah	2.652.751	3,61	95.764	5.767	5.235	14.935	12.693	434	409	487	1.089	21.623	19.426	41.049	42,9	25	41	14	35	39	76	115	0,28
14	DI Yogyakarta	242.608	4,32	10.481	402	318	869	685	21	13	15	12	1.307	1.028	2.335	22,3	6	4	8	6	14	10	24	1,03
15	Jawa Timur	3.898.048	4,45	173.463	10.088	10.140	28.617	26.509	442	262	442	429	39.589	37.340	76.929	44,3	13	10	1	4	14	14	28	0,04
16	Banten	1.222.487	4,12	50.366	3.794	3.489	7.922	7.358	179	115	164	153	12.059	11.115	23.174	46,0	14	5	1	1	15	6	21	0,09
17	Bali	415.605	2,05	8.520	561	347	1.033	755	96	48	49	55	1.739	1.205	2.944	34,6	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	513.375	6,38	32.753	2.245	1.793	3.794	3.193	215	136	206	153	6.460	5.275	11.735	35,8	0	0	2	0	2	0	2	0,02
19	Nusa Tenggara Timur	532.606	4,28	22.796	632	450	824	722	47	28	29	32	1.532	1.232	2.764	12,1	1	1	1	0	2	1	3	0,11
20	Kalimantan Barat	469.747	2,12	9.959	163	164	388	336	27	10	37	40	615	550	1.165	11,7	0	0	5	11	5	11	16	1,37
21	Kalimantan Tengah	278.055	4,37	12.151	95	85	180	147	3	2	0	3	278	237	515	4,2	3	1	5	3	8	4	12	2,33
22	Kalimantan Selatan	415.760	5,53	22.992	1.160	783	2.447	1.953	36	25	23	27	3.666	2.788	6.454	28,1	1	2	0	0	1	2	3	0,05
23	Kalimantan Timur	368.719	2,86	10.545	436	255	859	587	5	4	13	8	1.313	854	2.167	20,5	3	0	0	1	3	1	4	0,18
24	Kalimantan Utara	69.635	2,86	1.992	82	54	100	77	3	0	2	4	187	135	322	16,2	1	3	10	6	11	9	20	6,21
25	Sulawesi Utara	238.269	2,68	6.386	71	34	83	78	2	0	2	4	158	116	274	4,3	2	0	3	1	5	1	6	2,19
26	Sulawesi Tengah	296.133	5,19	15.369	1.102	796	2.051	1.624	62	19	33	37	3.248	2.476	5.724	37,2	2	2	5	3	7	5	12	0,21
27	Sulawesi Selatan	874.230	3,79	33.133	583	453	1.069	816	25	12	30	39	1.707	1.320	3.027	9,1	2	3	1	1	3	4	7	0,23
28	Sulawesi Tenggara	276.312	3,84	10.610	253	200	423	325	32	13	19	18	727	556	1.283	12,1	1	0	8	3	9	3	12	0,94
29	Gorontalo	119.754	4,84	5.796	346	290	427	393	17	16	16	9	806	708	1.514	26,1	5	20	3	1	8	21	29	1,92
30	Sulawesi Barat	134.083	4,88	6.543	93	79	217	143	8	3	10	12	328	237	565	8,6	0	1	0	1	0	2	2	0,35
31	Maluku	176.393	3,74	6.597	121	143	165	108	8	3	6	7	300	261	561	8,5	5	2	9	11	14	13	27	4,81
32	Maluku Utara	123.063	2,29	2.818	89	65	138	76	3	1	1	0	231	142	373	13,2	0	0	1	0	1	0	1	0,27
33	Papua Barat	98.182	2,88	2.828	216	170	437	417	4	2	23	22	680	611	1.291	45,7	0	0	0	1	0	1	1	0,08
34	Papua	0	2,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Indonesia		**25.074.670**	**3,55**	**890.151**	**49.388**	**43.933**	**109.828**	**95.886**	**2.686**	**1.821**	**2.815**	**3.481**	**164.717**	**145.121**	**309.838**	**34,8**	**113**	**140**	**112**	**133**	**225**	**273**	**498**	**0,16**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Laporan Rutin P2 ISPA Tahun 2020)

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di **beberapa** RS (belum semua kab/kota melaporkan kasus di RS wilayahnya)

Lampiran 53.b

BALITA BATUK/KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Balita Batuk Atau Kesukaran Bernafas			Batuk Bukan Pneumonia			Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%	Persentase Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Yang Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%
		Jumlah Kunjungan	Diberikan Tatalaksana Standar (Dihitung Napas/ Lihat TDDK*)	Persentase Yang Diberikan Tatalaksana Standar	L	P	L + P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	101.693	52.261	51,4	55.230	54.489	109.719	23	4	17,39
2	Sumatera Utara	143.982	104.437	72,5	86.127	85.937	172.064	33	12	36,36
3	Sumatera Barat	90.564	87.349	96,5	44.687	44.233	88.920	19	14	73,68
4	Riau	137.879	103.841	75,3	63.396	60.720	124.116	12	9	75,00
5	Jambi	95.707	85.152	89,0	46.544	45.886	92.430	11	10	90,91
6	Sumatera Selatan	149.321	139.342	93,3	78.182	76.364	154.546	17	12	70,59
7	Bengkulu	31.308	27.210	86,9	16.517	16.089	32.606	10	10	100,00
8	Lampung	179.564	160.003	89,1	88.593	86.676	175.269	15	8	53,33
9	Kep. Bangka Belitung	29.341	28.176	96,0	14.206	12.702	26.908	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	32.761	19.775	60,4	16.548	15.675	32.223	7	3	42,86
11	DKI Jakarta	256.810	256.408	99,8	119.315	108.657	227.972	6	6	100,00
12	Jawa Barat	993.578	771.626	77,7	495.000	492.630	987.630	27	21	77,78
13	Jawa Tengah	647.905	601.645	92,9	367.395	376.695	744.090	35	24	68,57
14	DI Yogyakarta	39.767	36.035	90,6	20.738	19.026	39.764	5	3	60,00
15	Jawa Timur	727.723	642.658	88,3	339.725	347.178	686.903	38	34	89,47
16	Banten	315.038	252.965	80,3	155.095	152.666	307.761	8	8	100,00
17	Bali	60.944	59.110	97,0	32.347	29.113	61.460	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	182.204	164.829	90,5	86.878	82.942	169.820	10	9	90,00
19	Nusa Tenggara Timur	171.487	164.986	96,2	87.658	87.442	175.100	22	16	72,73
20	Kalimantan Barat	47.524	38.648	81,3	37.656	36.478	74.134	14	6	42,86
21	Kalimantan Tengah	38.960	31.796	81,6	20.871	19.167	40.038	14	12	85,71
22	Kalimantan Selatan	76.933	70.204	91,3	36.909	34.198	71.107	13	12	92,31
23	Kalimantan Timur	54.744	43.033	78,6	37.272	33.438	70.710	10	5	50,00
24	Kalimantan Utara	10.254	6.855	66,9	5.960	5.241	11.201	5	2	40,00
25	Sulawesi Utara	29.463	21.924	74,4	23.730	22.547	46.277	15	6	40,00
26	Sulawesi Tengah	81.397	75.733	93,0	39.817	37.506	77.323	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	100.672	77.981	77,5	52.679	52.270	104.949	24	11	45,83
28	Sulawesi Tenggara	28.047	25.108	89,5	17.238	15.904	33.142	17	7	41,18
29	Gorontalo	19.500	14.499	74,4	9.282	9.008	18.290	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	21.703	17.286	79,6	11.272	10.874	22.146	6	5	83,33
31	Maluku	28.742	22.304	77,6	22.574	21.181	43.755	11	2	18,18
32	Maluku Utara	33.210	31.110	93,7	21.053	19.246	40.299	10	6	60,00
33	Papua Barat	13.828	11.805	85,4	10.771	11.317	22.088	13	0	0,00
34	Papua	0	0	#DIV/0!	0	0	0	29	0	0,00
Indonesia		**4.972.553**	**4.246.094**	**85,4**	**2.561.265**	**2.523.495**	**5.084.760**	**514**	**312**	**60,70**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Laporan Rutin P2 ISPA Tahun 2020)

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut di beberapa kab/kota termasuk kasus yang ditemukan pada beberapa RS (belum semua kab/kota melaporkan kasus di RS wilayahnya)

Lampiran 53.c

KASUS KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (*Recovery Rate/RR*)	Angka Kematian (*Case Fatality Rate/ CFR*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	8.746	7.149	358	81,74	4,09
2	Sumatera Utara	18.149	15.410	679	84,91	3,74
3	Sumatera Barat	23.464	20.364	504	86,79	2,15
4	Riau	24.966	23.104	583	92,54	2,34
5	Jambi	3.227	2.417	55	74,90	1,70
6	Sumatera Selatan	11.826	9.515	611	80,46	5,17
7	Bengkulu	3.603	2.597	117	72,08	3,25
8	Lampung	6.276	4.317	274	68,79	4,37
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.337	1.717	35	73,47	1,50
10	Kep. Riau	6.995	6.075	172	86,85	2,46
11	DKI Jakarta	183.735	164.787	3.270	89,69	1,78
12	Jawa Barat	83.579	70.788	1.172	84,70	1,40
13	Jawa Tengah	81.716	54.409	3.562	66,58	4,36
14	DI Yogyakarta	12.155	8.175	260	67,26	2,14
15	Jawa Timur	84.152	72.135	5.827	85,72	6,92
16	Banten	18.170	10.397	425	57,22	2,34
17	Bali	17.593	16.031	519	91,12	2,95
18	Nusa Tenggara Barat	5.664	4.551	273	80,35	4,82
19	Nusa Tenggara Timur	2.167	1.202	50	55,47	2,31
20	Kalimantan Barat	3.118	2.742	27	87,94	0,87
21	Kalimantan Tengah	9.740	7.476	269	76,76	2,76
22	Kalimantan Selatan	15.303	13.806	585	90,22	3,82
23	Kalimantan Timur	27.076	22.691	743	83,80	2,74
24	Kalimantan Utara	3.794	2.290	57	60,36	1,50
25	Sulawesi Utara	9.671	7.059	310	72,99	3,21
26	Sulawesi Tengah	3.552	1.865	106	52,51	2,98
27	Sulawesi Selatan	31.047	26.816	594	86,37	1,91
28	Sulawesi Tenggara	7.907	6.986	149	88,35	1,88
29	Gorontalo	3.841	3.308	104	86,12	2,71
30	Sulawesi Barat	1.941	1.552	34	79,96	1,75
31	Maluku	5.722	4.481	79	78,31	1,38
32	Maluku Utara	2.771	2.353	89	84,92	3,21
33	Papua Barat	5.979	5.444	99	91,05	1,66
34	Papua	13.216	7.088	147	53,63	1,11
Indonesia		743.198	611.097	22.138	82,23	2,98

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Data per 31 Desember 2020

Lampiran 53.d

JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Lab yang Memeriksa			Jumlah Spesimen[3]					Jumlah Orang Diperiksa[3]	Jumlah Orang Diperiksa Positif[3]	Jumlah Penduduk	Jumlah Orang Diperiksa/ 1 Juta Penduduk	*Positivity Rate (%)*
		RT-PCR[1]	TCM[2]	RT-PCR dan TCM[1]	Diperiksa	Positif	Negatif	Inkonklusif	Invalid					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	6	8	1	16.536	2.687	13.717	58	69	26.450	8.746	5.459.114	4.845	33,07
2	Sumatera Utara	23	8	2	166.232	36.597	129.510	51	73	139.587	18.149	14.954.028	9.334	13,00
3	Sumatera Barat	2	4		104.173	10.966	92.984	48	148	196.178	23.464	5.610.859	34.964	11,96
4	Riau	7	10	2	138.403	39.039	99.354	3	0	112.037	24.966	7.066.464	15.855	22,28
5	Jambi	4	5	1	32.299	8.966	23.313	19	1	17.392	3.227	3.641.279	4.776	18,55
6	Sumatera Selatan	13	8	1	98.177	19.088	76.925	41	2.122	64.542	11.826	8.702.628	7.416	18,32
7	Bengkulu	2	4	2	7.352	2.580	4.764	5	3	7.994	3.603	2.016.437	3.964	45,07
8	Lampung	5	4		46.033	17.496	28.368	43	109	25.657	6.276	8.609.884	2.980	24,46
9	Kep. Bangka Belitung	3	7	1	23.834	8.816	14.994	18	2	17.117	2.337	1.488.245	11.501	13,65
10	Kep. Riau	9	3	2	40.727	4.729	35.971	26	1	27.943	6.995	2.378.795	11.747	25,03
11	DKI Jakarta	77	15	8	1.466.081	368.202	1.090.863	5.167	520	969.614	183.735	10.645.542	91.082	18,95
12	Jawa Barat	57	22	6	897.824	314.155	577.361	3.100	958	527.596	83.579	50.103.251	10.530	15,84
13	Jawa Tengah	33	21	5	522.980	164.170	357.210	997	526	524.455	81.716	34.917.040	15.020	15,58
14	DI Yogyakarta	12	1		97.375	37.167	59.978	223	7	84.744	12.155	3.970.220	21.345	14,34
15	Jawa Timur	77	40	19	656.076	179.914	465.583	6.575	2.557	479.660	84.152	40.156.672	11.945	17,54
16	Banten	21	10	5	326.208	108.843	215.588	1.301	379	202.332	18.170	13.074.189	15.476	8,98
17	Bali	16	0		78.609	14.043	64.429	8	1	76.671	17.593	4.466.595	17.165	22,95
18	Nusa Tenggara Barat	6	11	3	24.593	9.555	15.025	6	7	19.439	5.664	5.298.471	3.669	29,14
19	Nusa Tenggara Timur	2	17	1	29.144	13.017	16.052	25	20	14.757	2.167	5.588.744	2.640	14,68
20	Kalimantan Barat	8	15		32.878	3.954	28.851	28	17	44.191	3.118	5.162.937	8.559	7,06
21	Kalimantan Tengah	5	15	1	44.575	14.774	29.573	193	34	40.351	9.740	2.722.168	14.823	24,14
22	Kalimantan Selatan	15	4	1	106.642	30.928	75.575	35	75	89.810	15.303	4.319.794	20.790	17,04
23	Kalimantan Timur	16	11	2	220.246	52.391	167.231	488	130	170.533	27.076	3.708.936	45.979	15,88
24	Kalimantan Utara	2	5	2	19.456	7.630	11.657	163	4	11.307	3.794	721.181	15.678	33,55
25	Sulawesi Utara	5	8	1	37.286	8.680	28.427	91	88	49.169	9.671	2.530.967	19.427	19,67
26	Sulawesi Tengah	4	6		29.549	10.914	18.216	336	83	12.954	3.552	3.120.863	4.151	27,42
27	Sulawesi Selatan	17	10	1	167.117	54.226	111.451	454	862	100.420	31.047	8.956.181	11.212	30,92
28	Sulawesi Tenggara	2	5	1	9.875	3.437	6.433	4	1	12.150	7.907	2.743.155	4.429	65,08
29	Gorontalo	1	2		7.377	1.747	5.449	6	175	13.358	3.841	1.195.883	11.170	28,75
30	Sulawesi Barat	2	2		12.475	4.567	7.840	64	4	5.232	1.941	1.396.749	3.746	37,10
31	Maluku	4	13		11.059	2.580	8.319	154	6	13.103	5.722	1.805.376	7.258	43,67
32	Maluku Utara	5	3	3	26.465	2.261	24.139	24	40	11.772	2.771	1.268.866	9.278	23,54
33	Papua Barat	6	10	2	23.845	5.725	17.875	58	183	14.937	5.979	1.008.698	14.808	40,03
34	Papua	7	14	1	32.066	9.349	22.622	40	17	44.541	13.216	3.438.243	12.955	29,67
Indonesia		474	321	74	5.553.567	1.573.193	3.945.647	19.852	9.222	4.167.993	743.198	272.248.454	15.310	17,83

Sumber [1] Badan Penelitian dan Pemngembangan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

[2] Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

[3] Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI 2021

Catatan: kolom E bukan merupakan penjumlahan C dan D

Data per 31 Desember 2020

Lampiran 53.e

KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	0-2 Tahun		3-6 Tahun		7-12 Tahun		13-15 Tahun		16-18 Tahun		19-30 Tahun		31-45 Tahun		46-59 Tahun		60+ Tahun		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Tidak diketahui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	40	113	39	16	79	64	66	57	109	86	902	1.099	1.428	1.627	1.034	1.041	557	349	4.254	4.452	40
2	Sumatera Utara	95	96	130	94	278	266	163	178	214	220	1.841	2.422	2.581	2.929	2.044	2.158	1.033	911	8.379	9.274	496
3	Sumatera Barat	176	169	196	219	407	449	275	404	357	458	2.576	3.100	2.981	3.491	2.293	2.736	1.177	1.155	10.438	12.181	845
4	Riau	287	251	271	273	610	507	454	347	395	442	2.950	3.250	4.153	3.713	2.764	2.373	953	842	12.837	11.998	131
5	Jambi	20	18	12	11	49	35	35	42	29	41	232	291	295	306	213	193	91	69	976	1.006	1.245
6	Sumatera Selatan	152	133	82	103	177	173	159	130	134	148	1.184	1.366	1.781	1.673	1.340	1.193	836	658	5.845	5.577	404
7	Bengkulu	15	23	21	19	47	64	28	29	31	47	350	495	553	656	363	421	195	161	1.603	1.915	85
8	Lampung	30	40	46	25	65	78	64	68	100	86	548	727	807	1.002	766	752	402	318	2.828	3.096	352
9	Kep. Bangka Belitung	35	19	31	32	63	58	55	39	43	70	267	259	405	331	226	194	87	92	1.212	1.094	31
10	Kepulauan Riau	58	61	59	79	118	127	75	102	75	83	918	1.121	1.224	1.023	816	541	246	175	3.589	3.312	94
11	Dki Jakarta	1.522	1.327	1.573	1.447	2.743	2.564	1.728	1.601	2.039	2.215	20.886	24.379	28.645	25.726	20.573	18.351	10.037	8.891	89.746	86.501	7.488
12	Jawa Barat	894	731	807	731	1.547	1.508	1.412	1.309	1.723	1.698	8.977	10.788	12.558	11.316	8.978	8.710	3.815	3.342	40.711	40.133	2.735
13	Jawa Tengah	591	598	516	480	1.095	1.083	847	862	970	1.092	5.477	7.939	7.665	9.266	7.299	8.052	4.229	3.670	28.689	33.042	19.985
14	Di Yogyakarta	111	125	139	104	216	234	148	231	158	376	1.223	1.596	1.495	1.416	1.369	1.422	708	705	5.567	6.209	379
15	Jawa Timur	412	374	420	358	778	859	710	880	871	1.154	6.950	8.997	10.673	11.725	11.477	11.578	6.090	5.352	38.381	41.277	4.494
16	Banten	116	129	165	145	314	318	203	286	207	303	1.914	2.419	2.687	2.895	2.370	2.097	836	665	8.812	9.257	101
17	Bali	117	101	123	98	244	190	126	122	252	247	2.032	2.389	2.335	2.318	2.337	2.009	1.292	874	8.858	8.348	387
18	Nusa Tenggara Barat	58	39	35	20	68	53	67	46	69	63	657	907	894	921	591	512	380	266	2.819	2.827	18
19	Nusa Tenggara Timur	12	10	18	16	26	30	15	30	35	30	479	271	353	271	192	172	89	68	1.219	898	50
20	Kalimantan Barat	27	22	14	13	25	22	43	25	77	44	387	401	452	453	409	336	195	118	1.629	1.434	55
21	Kalimantan Tengah	77	81	105	109	199	188	129	115	142	160	1.211	1.348	1.505	1.527	1.082	919	334	247	4.784	4.694	262
22	Kalimantan Selatan	126	115	149	119	241	268	190	184	240	243	1.854	1.993	2.408	2.209	1.833	1.565	735	483	7.776	7.179	348
23	Kalimantan Timur	191	169	202	197	362	381	268	257	275	274	4.014	2.674	5.656	3.122	3.121	1.988	1.011	691	15.100	9.753	2.223
24	Kalimantan Utara	19	20	28	24	72	56	90	27	93	47	668	400	742	503	419	305	125	87	2.256	1.469	69
25	Sulawesi Utara	50	67	41	47	117	103	81	68	127	113	1.144	1.203	1.398	1.539	1.111	1.126	577	550	4.646	4.816	209
26	Sulawesi Tengah	15	17	11	22	27	39	20	23	30	50	391	618	498	524	314	284	123	121	1.429	1.698	425
27	Sulawesi Selatan	197	189	224	181	390	365	273	274	426	390	3.509	4.577	4.424	4.953	2.811	2.859	1.227	1.055	13.481	14.843	2.723
28	Sulawesi Tenggara	23	33	38	39	94	89	65	51	114	102	1.196	1.348	1.384	1.362	764	624	282	236	3.960	3.884	63
29	Gorontalo	30	22	12	15	32	35	17	31	31	30	599	719	645	702	372	307	101	98	1.839	1.959	43
30	Sulawesi Barat	49	45	15	8	57	52	122	145	82	113	201	241	209	270	114	130	43	41	892	1.045	4
31	Maluku	15	17	36	37	78	63	50	54	100	93	738	863	973	1.082	515	586	171	143	2.676	2.938	108
32	Maluku Utara	17	12	12	13	19	22	21	20	36	27	432	376	487	409	289	150	102	58	1.415	1.087	269
33	Papua Barat	45	53	69	64	97	108	79	62	72	86	977	913	1.127	940	574	369	159	126	3.199	2.721	59
34	Papua	91	92	109	102	182	178	103	100	150	149	1.652	1.622	2.053	1.780	1.211	943	358	236	5.909	5.202	2.105
Indonesia		5.713	5.311	5.748	5.260	10.916	10.629	8.181	8.199	9.806	10.780	79.336	93.111	107.474	103.980	81.984	76.996	38.596	32.853	347.754	347.119	48.325

Sumber : Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2021

Catatan: Distribusi jenis kelamin dan umur hanya dari identitas kasus yang dilaporkan lengkap

Data per 31 Desember 2021

Lampiran 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	2	-	1	1	2	-	21	3	87	18	3	1	116	23	139	183.370	29.170	15,9
2	Sumatera Utara	16	11	11	4	17	4	273	77	1.244	403	101	32	1.662	531	2.193	607.267	84.819	14,0
3	Sumatera Barat	1	2	1	2	6	-	70	4	232	65	13	7	323	80	403	236.867	43.906	18,5
4	Riau	9	2	8	2	14	2	94	16	399	150	49	16	573	188	761	247.748	61.631	24,9
5	Jambi	2	2	3	2	3	-	23	14	60	44	10	4	101	66	167	139.505	22.716	16,3
6	Sumatera Selatan	11	6	1	1	8	7	66	15	311	99	26	5	423	133	556	327.869	93.701	28,6
7	Bengkulu	2	1	-	-	1	-	5	3	62	28	1	1	71	33	104	91.607	16.386	17,9
8	Lampung	8	6	9	4	8	2	80	32	302	99	22	17	429	160	589	286.692	71.317	24,9
9	Kep. Bangka Belitung	-	1	4	1	2	2	19	13	96	56	21	4	142	77	219	50.292	26.550	52,8
10	Kepulauan Riau	19	6	5	1	6	2	53	20	328	197	96	24	507	250	757	101.021	23.686	23,4
11	DKI Jakarta	17	15	8	16	82	37	667	132	2.784	817	273	83	3.831	1.100	4.931	371.356	218.931	59,0
12	Jawa Barat	70	30	21	30	125	34	747	184	2.772	1.320	239	94	3.974	1.692	5.666	1.636.764	500.615	30,6
13	Jawa Tengah	43	26	25	28	96	58	473	249	2.365	1.362	520	286	3.522	2.009	5.531	1.264.248	534.552	42,3
14	DI Yogyakarta	4	3	2	3	8	4	103	15	253	107	59	30	429	162	591	99.731	33.214	33,3
15	Jawa Timur	40	42	25	24	70	48	474	278	2.936	2.139	741	340	4.286	2.871	7.157	1.232.130	474.300	38,5
16	Banten	12	5	5	4	38	8	262	41	830	220	43	12	1.190	290	1.480	468.738	180.398	38,5
17	Bali	7	14	12	9	17	27	202	59	770	446	89	52	1.097	607	1.704	138.826	73.768	53,1
18	Nusa Tenggara Barat	4	1	-	-	8	10	31	20	122	68	11	3	176	102	278	219.134	53.570	24,4
19	Nusa Tenggara Timur	6	3	2	1	7	7	47	37	220	206	30	18	312	272	584	195.838	29.441	15,0
20	Kalimantan Barat	14	4	7	4	13	9	79	35	313	152	42	10	468	214	682	183.953	45.694	24,8
21	Kalimantan Tengah	3	2	-	-	4	3	25	11	112	92	25	9	169	117	286	99.614	16.200	16,3
22	Kalimantan Selatan	5	5	1	-	1	4	44	10	138	57	17	1	206	77	283	165.056	24.828	15,0
23	Kalimantan Timur	10	5	4	5	21	14	75	62	430	257	62	20	602	363	965	169.081	53.378	31,6
24	Kalimantan Utara	4	-	1	-	2	1	7	8	69	37	8	1	91	47	138	30.710	12.699	41,4
25	Sulawesi Utara	4	1	1	4	6	3	73	16	213	74	28	9	325	107	432	101.238	19.287	19,1
26	Sulawesi Tengah	3	3	-	1	9	2	49	12	149	75	13	1	223	94	317	123.586	39.668	32,1
27	Sulawesi Selatan	9	12	2	4	39	13	186	49	616	191	40	22	892	291	1.183	324.722	133.977	41,3
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	6	2	15	4	49	38	8	1	78	45	123	108.284	14.183	13,1
29	Gorontalo	-	-	-	-	1	2	24	2	43	8	4	-	72	12	84	45.403	13.565	29,9
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	1	3	2	17	3	1	-	21	6	27	58.677	8.235	14,0
31	Maluku	4	5	2	2	7	5	41	44	154	100	9	5	217	161	378	80.620	16.596	20,6
32	Maluku Utara	9	6	2	1	3	9	23	24	78	59	10	6	125	105	230	55.354	8.231	14,9
33	Papua Barat	3	6	2	4	7	25	20	69	113	137	13	6	158	247	405	172.417	29.983	17,4
34	Papua	26	25	4	10	53	201	233	449	772	776	68	27	1.156	1.488	2.644	44.473	10.563	23,8
Indonesia		**367**	**250**	**169**	**168**	**690**	**546**	**4.607**	**2.009**	**19.439**	**9.900**	**2.695**	**1.147**	**27.967**	**14.020**	**41.987**	**9.662.191**	**3.019.758**	**31,3**
		1,5		**0,8**		**2,9**		**15,8**		**69,9**		**9,2**		**100**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.a

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	155	174	139
2	Sumatera Utara	1.999	2.463	2.193
3	Sumatera Barat	624	541	403
4	Riau	539	558	761
5	Jambi	246	131	167
6	Sumatera Selatan	508	601	556
7	Bengkulu	107	177	104
8	Lampung	524	568	589
9	Kepulauan Bangka Belitung	205	234	219
10	Kepulauan Riau	1.033	854	757
11	DKI Jakarta	6.896	6.701	4.931
12	Jawa Barat	5.185	6.066	5.666
13	Jawa Tengah	5.400	5.630	5.531
14	DI Yogyakarta	833	714	591
15	Jawa Timur	8.608	8.935	7.157
16	Banten	1.334	1.643	1.480
17	Bali	2.211	2.283	1.704
18	Nusa Tenggara Barat	192	258	278
19	Nusa Tenggara Timur	842	821	584
20	Kalimantan Barat	692	698	682
21	Kalimantan Tengah	122	222	286
22	Kalimantan Selatan	297	474	283
23	Kalimantan Timur	1.126	1.301	965
24	Kalimantan Utara	166	199	138
25	Sulawesi Utara	555	673	432
26	Sulawesi Tengah	292	350	317
27	Sulawesi Selatan	1.174	1.537	1.183
28	Sulawesi Tenggara	106	180	123
29	Gorontalo	74	48	84
30	Sulawesi Barat	26	69	27
31	Maluku	462	462	378
32	Maluku Utara	200	267	230
33	Papua Barat	380	697	405
34	Papua	3.546	3.753	2.644
Indonesia		**46.659**	**50.282**	**41.987**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 55.b

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																							
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui	Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	0	0	1	2	0	0	1	11	9	14	9	12	3	2	0	1	0	0	0	2	42	23	67
2	Sumatera Utara	0	0	1	1	2	0	0	1	61	21	59	22	23	14	9	3	0	0	1	0	0	156	62	218
3	Sumatera Barat	0	0	0	1	0	0	1	1	32	10	49	24	18	4	4	3	1	0	0	0	0	105	43	148
4	Riau	0	0	1	0	1	1	0	1	15	18	24	28	22	7	9	8	4	0	0	0	0	76	63	139
5	Jambi	0	0	0	2	0	0	3	0	18	9	16	16	10	2	6	0	0	0	12	1	4	65	30	99
6	Sumatera Selatan	0	0	2	1	0	0	1	2	55	13	64	23	42	7	14	2	2	0	0	0	0	180	48	228
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	15	7	4	2	0	1	0	0	0	0	0	25	15	40
8	Lampung	0	1	4	1	3	1	0	0	25	9	35	12	18	6	3	4	0	2	0	0	0	88	36	124
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	6	6	8	3	2	1	0	1	0	0	0	20	12	32
10	Kepulauan Riau	0	0	1	2	4	2	3	1	68	22	69	39	41	29	14	8	3	0	0	0	0	203	103	306
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	3	3	1	1	47	13	60	21	44	12	15	5	4	1	0	0	0	174	56	230
12	Jawa Barat	0	0	3	3	3	8	8	6	162	57	213	120	124	58	45	11	10	5	0	0	0	568	268	836
13	Jawa Tengah	1	0	6	3	7	5	8	2	221	84	260	156	208	117	122	74	70	23	14	6	0	917	470	1.387
14	DI Yogyakarta	0	0	0	1	1	1	1	0	6	6	19	5	6	7	8	5	4	1	0	0	0	45	26	71
15	Jawa Timur	0	0	2	1	3	4	2	0	74	43	94	79	66	51	33	25	9	9	0	0	0	283	212	495
16	Banten	0	0	0	1	1	0	0	2	24	6	36	13	9	10	2	2	0	1	0	0	0	72	35	107
17	Bali	0	0	2	4	8	7	5	2	152	64	176	89	128	91	42	38	14	8	0	0	0	527	303	830
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	0	0	0	1	2	3	6	4	8	3	0	3	2	0	0	0	0	0	15	18	33
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	2	0	0	0	0	3	28	24	34	15	16	14	9	5	4	0	0	0	0	94	61	155
20	Kalimantan Barat	0	1	0	0	0	1	2	1	14	8	25	12	10	6	3	4	1	0	0	0	0	55	33	88
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	9	7	9	3	6	1	0	0	0	0	0	29	15	44
22	Kalimantan Selatan	0	0	3	2	1	1	1	1	44	15	32	16	22	8	13	0	4	0	0	0	0	120	43	163
23	Kalimantan Timur	0	0	1	1	0	1	2	5	23	15	42	19	15	16	15	5	2	0	0	0	0	100	62	162
24	Kalimantan Utara	0	0	2	0	2	0	3	1	23	11	21	12	11	7	6	3	1	0	0	0	0	69	34	103
25	Sulawesi Utara	1	0	1	1	1	4	3	4	68	50	63	45	37	19	17	6	4	3	0	1	0	195	133	328
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	21	8	20	9	9	3	6	0	1	0	0	0	0	57	20	77
27	Sulawesi Selatan	0	0	2	2	0	1	5	3	74	36	85	45	37	10	13	13	2	3	0	0	0	218	113	331
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	11	3	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	17	7	24
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	6	6	2	1	3	1	0	0	0	0	0	17	13	30
32	Maluku Utara	0	0	3	0	1	0	3	0	23	11	12	10	4	5	9	2	2	1	0	0	0	57	29	86
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	2	0	0	7	7	1	3	2	1	1	0	1	2	0	0	0	12	15	27
34	Papua	0	1	5	7	8	13	109	126	380	375	193	209	81	66	20	27	3	6	0	0	0	799	830	1.629
Indonesia		**3**	**3**	**42**	**35**	**52**	**55**	**163**	**166**	**1.709**	**968**	**1.761**	**1.089**	**1.042**	**583**	**455**	**259**	**147**	**66**	**27**	**8**	**6**	**5.401**	**3.232**	**8.639**
		0,1		**0,9**		**1,2**		**3,8**		**31,0**		**33,0**		**18,8**		**8,3**		**2,5**		**0,4**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.c

JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																				Total		
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	1	0	8	2	9	1	3	3	123	61	182	65	96	26	24	2	5	0	0	0	2	451	160	613
2	Sumatera Utara	1	0	42	36	27	24	27	12	1.062	402	1.280	448	462	161	164	48	31	4	23	11	18	3.119	1.146	4.283
3	Sumatera Barat	3	0	13	6	8	15	17	3	345	77	447	144	216	45	34	15	10	2	9	4	952	1.102	311	2.365
4	Riau	1	4	28	28	23	12	20	11	599	283	702	293	309	106	120	38	29	2	0	1	0	1.831	778	2.609
5	Jambi	1	1	6	5	2	0	6	2	210	82	233	76	93	24	39	7	4	2	12	2	42	606	201	849
6	Sumatera Selatan	0	0	14	10	7	6	13	6	416	132	450	137	207	35	75	8	7	3	12	12	0	1.201	349	1.550
7	Bengkulu	51	34	4	11	2	3	4	0	99	61	111	62	41	16	11	5	3	1	0	2	3	326	195	524
8	Lampung	4	2	16	19	10	7	14	2	270	121	328	132	128	36	33	18	9	4	6	0	0	818	341	1.159
9	Kep. Bangka Belitung	9	3	4	9	6	6	2	4	90	41	155	54	70	27	22	7	11	5	44	8	2	413	164	579
10	Kepulauan Riau	14	7	20	13	12	10	17	7	406	246	545	297	322	143	122	38	48	16	6	0	1	1.512	777	2.290
11	DKI Jakarta	4	1	20	8	20	15	19	8	673	122	956	173	444	83	158	30	39	8	2	1	7.963	2.335	449	10.747
12	Jawa Barat	62	19	76	83	42	50	54	41	2.330	923	1.961	854	624	265	192	64	39	9	128	62	20	5.508	2.370	7.898
13	Jawa Tengah	41	12	139	105	85	78	67	66	1.935	1.152	2.866	1.631	1.929	966	988	450	369	88	70	53	21	8.489	4.601	13.111
14	DI Yogyakarta	1	0	20	9	141	52	5	2	133	68	192	105	129	54	86	37	21	7	357	180	9	1.085	514	1.608
15	Jawa Timur	53	40	268	181	157	111	103	138	3.476	2.517	4.771	2.989	2.861	1.447	1.223	530	306	111	0	0	0	13.218	8.064	21.282
16	Banten	41	16	39	28	17	14	60	24	953	357	849	327	258	85	73	18	19	7	13	4	52	2.322	880	3.254
17	Bali	54	44	146	88	39	38	65	77	1.695	952	2.238	1.001	1.123	481	482	172	141	53	99	44	28	6.082	2.950	9.060
18	Nusa Tenggara Barat	2	2	20	20	9	10	7	6	160	120	227	131	84	36	24	11	1	1	5	3	1	539	340	880
19	Nusa Tenggara Timur	3	7	22	14	8	8	9	24	449	354	549	222	210	108	84	26	24	7	3	0	112	1.361	770	2.243
20	Kalimantan Barat	4	5	23	15	11	13	100	130	644	517	743	257	236	68	83	23	19	4	0	1	0	1.863	1.033	2.896
21	Kalimantan Tengah	1	0	4	4	0	4	0	3	54	51	99	47	39	21	23	5	5	1	5	3	0	230	139	369
22	Kalimantan Selatan	5	2	7	5	5	4	3	3	115	82	137	67	75	20	29	7	6	1	0	0	0	382	191	573
23	Kalimantan Timur	7	10	18	18	11	12	12	21	358	284	455	257	196	105	109	32	27	1	3	1	0	1.196	741	1.937
24	Kalimantan Utara	0	0	18	16	6	1	10	4	112	77	198	80	103	29	26	9	13	1	0	0	5	486	217	708
25	Sulawesi Utara	8	6	21	16	12	11	29	20	541	260	508	228	309	99	109	27	23	7	8	10	0	1.568	684	2.252
26	Sulawesi Tengah	1	2	12	8	5	2	3	14	204	149	221	97	86	31	32	6	4	3	6	6	0	574	318	892
27	Sulawesi Selatan	6	8	22	26	25	20	60	20	1.105	357	990	353	347	98	107	35	22	8	89	33	16	2.773	958	3.747
28	Sulawesi Tenggara	0	3	2	0	1	3	4	6	94	49	92	47	34	21	13	7	1	0	169	91	0	410	227	637
29	Gorontalo	1	3	0	4	0	1	5	2	73	17	58	18	19	4	5	2	0	0	1	2	0	162	53	215
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	10	5	5	2	0	0	0	0	0	0	0	18	9	27
31	Maluku	3	2	9	11	1	4	5	9	147	128	162	110	76	37	53	23	21	3	0	0	0	477	327	804
32	Maluku Utara	4	3	8	5	1	4	10	10	155	143	181	90	81	33	35	8	9	2	1	1	0	485	299	784
33	Papua Barat	0	0	0	1	0	2	0	0	7	10	2	4	3	1	1	0	1	2	0	0	1.734	14	20	1.768
34	Papua	20	18	209	142	93	192	825	2.038	5.577	6.216	3.724	2.646	1.420	869	490	269	288	150	0	0	41	12.646	12.540	25.227
Indonesia		**406**	**254**	**1.258**	**946**	**795**	**733**	**1.578**	**2.716**	**24.613**	**16.413**	**26.622**	**13.447**	**12.635**	**5.582**	**5.069**	**1.977**	**1.555**	**513**	**1.071**	**535**	**11.022**	**75.602**	**43.116**	**129.740**
		0,5		**1,7**		**1,2**		**3,3**		**31,6**		**30,9**		**14,0**		**5,4**		**1,6**		**1,2**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.d

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																						
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
2	Sumatera Utara	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	8	1	3	3	1	1	0	0	0	0	15	7	22
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0	5	3	8
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	1	0	10	3	7	5	6	2	4	1	0	0	0	0	28	11	39
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	0	8	5	13
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	4
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	4	3	2	1	0	0	0	0	0	12	6	18
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	6	2	8
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	8	3	0	1	2	0	0	0	0	0	19	6	25
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	1	1	0	31	12	40	25	46	11	21	8	8	1	4	0	151	58	209
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3	2	1	0	0	0	1	0	0	8	6	14
15	Jawa Timur	0	0	0	0	0	1	0	0	8	4	16	13	8	4	2	6	3	1	0	0	37	29	66
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
17	Bali	0	0	0	2	0	0	0	0	7	3	4	9	14	10	1	3	0	2	0	0	26	29	55
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	7	6	13
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	6
22	Kalimantan Selatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	6	4	10
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	2	2	0	1	0	0	0	0	0	11	2	13
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	5
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	2	0	0	1	0	11	4	19	9	7	2	3	3	0	1	0	0	41	21	62
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	4	0	0	0	0	2	0	0	0	8	8	16
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	9	8	17
Indonesia		**0**	**0**	**2**	**4**	**0**	**3**	**4**	**5**	**112**	**49**	**148**	**98**	**106**	**42**	**41**	**24**	**15**	**6**	**6**	**0**	**434**	**231**	**665**
		0,0		**0,9**		**0,5**		**1,4**		**24,2**		**37,0**		**22,3**		**9,8**		**3,2**		**0,9**				

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.e

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2020
		2018	2019	2020	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	89	49	67	613
2	Sumatera Utara	149	TAD	218	4.283
3	Sumatera Barat	347	258	148	2.365
4	Riau	269	TAD	139	2.609
5	Jambi	25	11	99	849
6	Sumatera Selatan	246	207	228	1.550
7	Bengkulu	55	69	40	524
8	Lampung	143	143	124	1.159
9	Kepulauan Bangka Belitung	38	44	32	579
10	Kepulauan Riau	289	411	306	2.290
11	DKI Jakarta	717	585	230	10.747
12	Jawa Barat	247	313	836	7.898
13	Jawa Tengah	1.941	1.613	1.387	13.111
14	DI Yogyakarta	48	78	71	1.608
15	Jawa Timur	1.586	958	495	21.282
16	Banten	207	158	107	3.254
17	Bali	549	240	830	9.060
18	Nusa Tenggara Barat	27	34	33	880
19	Nusa Tenggara Timur	94	29	155	2.243
20	Kalimantan Barat	95	113	88	2.896
21	Kalimantan Tengah	25	53	44	369
22	Kalimantan Selatan	0	5	163	573
23	Kalimantan Timur	171	203	162	1.937
24	Kalimantan Utara	267	66	103	708
25	Sulawesi Utara	332	125	328	2.252
26	Sulawesi Tengah	2	52	77	892
27	Sulawesi Selatan	337	TAD	331	3.747
28	Sulawesi Tenggara	113	52	24	637
29	Gorontalo	5	TAD	0	215
30	Sulawesi Barat	0	TAD	2	27
31	Maluku	68	45	30	804
32	Maluku Utara	108	61	86	784
33	Papua Barat	0	TAD	27	1.768
34	Papua	1.601	1.061	1.629	25.227
Indonesia		**10.190**	**7.036**	**8.639**	**129.740**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 55.f

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	67	1	1,49
2	Sumatera Utara	218	12	5,50
3	Sumatera Barat	148	14	9,46
4	Riau	139	3	2,16
5	Jambi	99		
6	Sumatera Selatan	228	7	3,07
7	Bengkulu	40	8	20,00
8	Lampung	124	13	10,48
9	Kepulauan Bangka Belitung	32	8	25,00
10	Kepulauan Riau	306	18	5,88
11	DKI Jakarta	230	12	5,22
12	Jawa Barat	836	27	3,23
13	Jawa Tengah	1.387	13	0,94
14	DI Yogyakarta	71		
15	Jawa Timur	495	16	3,23
16	Banten	107	13	12,15
17	Bali	830	5	0,60
18	Nusa Tenggara Barat	33		
19	Nusa Tenggara Timur	155	1	0,65
20	Kalimantan Barat	88	2	2,27
21	Kalimantan Tengah	44	2	4,55
22	Kalimantan Selatan	163	2	1,23
23	Kalimantan Timur	162	22	13,58
24	Kalimantan Utara	103	1	0,97
25	Sulawesi Utara	328		
26	Sulawesi Tengah	77	3	3,90
27	Sulawesi Selatan	331	3	0,91
28	Sulawesi Tenggara	24		
29	Gorontalo	0		
30	Sulawesi Barat	2		
31	Maluku	30	3	10,00
32	Maluku Utara	86	2	2,33
33	Papua Barat	27		
34	Papua	1.629	295	18,11
Indonesia		**8.639**	**506**	**5,86**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 56

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare									
				Dilayani				Mendapat Oralit				Mendapat Zinc	
				Semua Umur		Balita		Semua Umur		Balita		Balita	
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	147.417	95.410	56.698	38,5	17.693	18,5	38.092	67,2	14.946	84,5	14.664	82,9
2	Sumatera Utara	396.995	250.550	200.335	50,5	61.129	24,4	159.721	79,7	49.704	81,3	45.967	75,2
3	Sumatera Barat	148.466	90.039	72.584	48,9	17.717	19,7	72.584	100,0	17.717	100,0	17.717	100,0
4	Riau	192.464	126.139	62.440	32,4	19.940	15,8	59.332	95,0	18.690	93,7	17.391	87,2
5	Jambi	99.303	53.819	46.383	46,7	13.978	26,0	42.689	92,0	13.595	97,3	13.190	94,4
6	Sumatera Selatan	231.334	132.421	89.294	38,6	29.975	22,6	88.324	98,9	29.531	98,5	29.469	98,3
7	Bengkulu	54.536	30.563	19.039	34,9	7.778	25,4	18.917	99,4	7.756	99,7	7.756	99,7
8	Lampung	230.072	125.576	74.283	32,3	22.023	17,5	74.283	100,0	22.023	100,0	22.023	100,0
9	Kep. Bangka Belitung	40.975	22.751	12.515	30,5	4.498	19,8	12.231	97,7	4.450	98,9	4.461	99,2
10	Kepulauan Riau	60.539	35.876	21.212	35,0	5.220	14,6	21.212	100,0	5.220	100,0	5.220	100,0
11	DKI Jakarta	287.415	146.713	191.294	66,6	62.597	42,7	191.243	100,0	62.597	100,0	62.597	100,0
12	Jawa Barat	1.348.268	726.431	604.464	44,8	248.101	34,2	535.012	88,5	225.092	90,7	224.936	90,7
13	Jawa Tengah	943.382	438.814	412.805	43,8	119.404	27,2	303.625	73,6	91.583	76,7	94.232	78,9
14	DI Yogyakarta	104.822	46.851	26.877	25,6	5.178	11,1	20.299	75,5	4.226	81,6	4.457	86,1
15	Jawa Timur	1.076.555	468.721	572.925	53,2	194.499	41,5	544.314	95,0	188.947	97,1	184.612	94,9
16	Banten	355.333	202.913	221.426	62,3	89.902	44,3	203.382	91,9	84.085	93,5	72.382	80,5
17	Bali	118.282	54.206	22.022	18,6	5.413	10,0	17.517	79,5	4.113	76,0	3.670	67,8
18	Nusa Tenggara Barat	138.392	83.048	108.298	78,3	50.979	61,4	106.953	98,8	49.272	96,7	49.379	96,9
19	Nusa Tenggara Timur	149.618	109.829	52.818	35,3	21.898	19,9	45.672	86,5	20.842	95,2	20.929	95,6
20	Kalimantan Barat	138.639	82.410	36.794	26,5	12.998	15,8	35.700	97,0	11.904	91,6	12.998	100,0
21	Kalimantan Tengah	74.767	43.076	21.666	29,0	7.113	16,5	21.666	100,0	7.113	100,0	7.113	100,0
22	Kalimantan Selatan	116.207	66.244	36.343	31,3	13.316	20,1	30.419	83,7	11.656	87,5	12.073	90,7
23	Kalimantan Timur	102.415	58.950	34.421	33,6	11.344	19,2	27.104	78,7	9.655	85,1	9.797	86,4
24	Kalimantan Utara	20.750	12.961	14.877	71,7	5.472	42,2	10.620	71,4	4.413	80,6	4.198	76,7
25	Sulawesi Utara	68.277	34.131	3.369	4,9	1.360	4,0	2.706	80,3	1.174	86,3	1.143	84,1
26	Sulawesi Tengah	83.618	50.410	38.757	46,3	14.576	28,9	33.511	86,5	13.354	91,6	13.890	95,3
27	Sulawesi Selatan	241.056	138.461	86.993	36,1	28.044	20,3	62.824	72,2	21.236	75,7	23.435	83,6
28	Sulawesi Tenggara	74.401	48.913	15.237	20,5	6.145	12,6	15.053	98,8	6.145	100,0	6.142	100,0
29	Gorontalo	32.929	19.185	12.539	38,1	5.229	27,3	8.717	69,5	3.844	73,5	4.721	90,3
30	Sulawesi Barat	37.935	25.804	18.290	48,2	5.852	22,7	17.784	97,2	5.732	97,9	5.494	93,9
31	Maluku	49.461	35.130	15.877	32,1	7.575	21,6	13.275	83,6	7.212	95,2	7.118	94,0
32	Maluku Utara	34.527	23.533	11.268	32,6	5.608	23,8	10.075	89,4	4.930	87,9	5.317	94,8
33	Papua Barat	26.509	17.160	3.762	14,2	1.755	10,2	3.045	80,9	1.745	99,4	1.710	97,4
34	Papua	92.757	56.677	34.372	37,1	16.194	28,6	23.754	69,1	11.104	68,6	11.081	68,4
Indonesia		**7.318.417**	**3.953.716**	**3.252.277**	**44,4**	**1.140.503**	**28,8**	**2.871.655**	**88,3**	**1.035.606**	**90,8**	**1.021.280**	**89,5**
Angka Kesakitan Diare Per 1.000 Penduduk		**270**	**843**										

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	5.459.891	23	17	40	113	74	187	136	91	227	4,16
2	Sumatera Utara	14.703.532	5	11	16	60	32	92	65	43	108	0,73
3	Sumatera Barat	5.498.751	3	1	4	16	15	31	19	16	35	0,64
4	Riau	7.128.305	0	3	3	57	24	81	57	27	84	1,18
5	Jambi	3.677.894	6	2	8	31	22	53	37	24	61	1,66
6	Sumatera Selatan	8.567.923	10	12	22	103	55	158	113	67	180	2,10
7	Bengkulu	2.019.848	0	1	1	6	7	13	6	8	14	0,69
8	Lampung	8.521.201	8	5	13	74	34	108	82	39	121	1,42
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	4	2	6	18	14	32	22	16	38	2,50
10	Kepulauan Riau	2.242.198	1	2	3	27	26	53	28	28	56	2,50
11	DKI Jakarta	10.644.986	40	26	66	192	65	257	232	91	323	3,03
12	Jawa Barat	49.935.858	66	59	125	811	468	1.279	877	527	1.404	2,81
13	Jawa Tengah	34.940.078	52	45	97	627	311	938	679	356	1.035	2,96
14	DI Yogyakarta	3.882.288	5	7	12	36	20	56	41	27	68	1,75
15	Jawa Timur	39.886.288	82	53	135	1.093	635	1.728	1.175	688	1.863	4,67
16	Banten	13.160.496	33	30	63	347	170	517	380	200	580	4,41
17	Bali	4.380.824	9	4	13	32	19	51	41	23	64	1,46
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	23	7	30	142	76	218	165	83	248	4,84
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	16	13	29	168	78	246	184	91	275	4,96
20	Kalimantan Barat	5.134.760	3	2	5	33	14	47	36	16	52	1,01
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	1	0	1	30	12	42	31	12	43	1,55
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	6	4	10	48	18	66	54	22	76	1,77
23	Kalimantan Timur	3.793.152	4	8	12	79	33	112	83	41	124	3,27
24	Kalimantan Utara	768.505	2	3	5	13	5	18	15	8	23	2,99
25	Sulawesi Utara	2.528.794	23	13	36	199	121	320	222	134	356	14,08
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	6	6	12	124	65	189	130	71	201	6,49
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	48	45	93	313	209	522	361	254	615	6,89
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	12	10	22	65	40	105	77	50	127	4,61
29	Gorontalo	1.219.576	1	1	2	65	39	104	66	40	106	8,69
30	Sulawesi Barat	1.405.012	15	5	20	72	46	118	87	51	138	9,82
31	Maluku	1.831.880	10	19	29	185	88	273	195	107	302	16,49
32	Maluku Utara	1.278.764	42	33	75	256	174	430	298	207	505	39,49
33	Papua Barat	981.822	114	113	227	335	137	472	449	250	699	71,19
34	Papua	3.435.430	103	129	232	482	308	790	585	437	1.022	29,75
Indonesia		**271.066.366**	**776**	**691**	**1.467**	**6.252**	**3.454**	**9.706**	**7.028**	**4.145**	**11.173**	**4,12**
Proporsi Jenis Kelamin			**52,9**	**47,1**		**64,4**	**35,6**		**62,9**	**37,1**		

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	5.459.891	227	202	88,99	13	5,73	2,38	16	7,05	0	0,00
2	Sumatera Utara	14.703.532	108	55	50,93	17	15,74	1,16	10	9,26	1	10,00
3	Sumatera Barat	5.498.751	35	30	85,71	4	11,43	0,73	2	5,71	0	0,00
4	Riau	7.128.305	84	74	88,10	5	5,95	0,70	4	4,76	0	0,00
5	Jambi	3.677.894	61	31	50,82	7	11,48	1,90	0	0,00	0	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	8.567.923	180	160	88,89	12	6,67	1,40	12	6,67	0	0,00
7	Bengkulu	2.019.848	14	8	57,14	2	14,29	0,99	0	0,00	0	#DIV/0!
8	Lampung	8.521.201	121	87	71,90	11	9,09	1,29	9	7,44	0	0,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	38	33	86,84	2	5,26	1,32	6	15,79	0	0,00
10	Kepulauan Riau	2.242.198	56	29	51,79	6	10,71	2,68	1	1,79	0	0,00
11	DKI Jakarta	10.644.986	323	298	92,26	11	3,41	1,03	22	6,81	0	0,00
12	Jawa Barat	49.935.858	1.404	1.071	76,28	94	6,70	1,88	102	7,26	1	0,98
13	Jawa Tengah	34.940.078	1.035	863	83,38	77	7,44	2,20	54	5,22	2	3,70
14	DI Yogyakarta	3.882.288	68	57	83,82	5	7,35	1,29	2	2,94	0	0,00
15	Jawa Timur	39.886.288	1.863	1.435	77,03	167	8,96	4,19	120	6,44	5	4,17
16	Banten	13.160.496	580	507	87,41	48	8,28	3,65	50	8,62	4	8,00
17	Bali	4.380.824	64	56	87,50	3	4,69	0,68	1	1,56	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	248	221	89,11	10	4,03	1,95	12	4,84	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	275	227	82,55	8	2,91	1,44	19	6,91	1	5,26
20	Kalimantan Barat	5.134.760	52	44	84,62	5	9,62	0,97	3	5,77	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	43	35	81,40	3	6,98	1,08	3	6,98	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	76	61	80,26	5	6,58	1,16	4	5,26	0	0,00
23	Kalimantan Timur	3.793.152	124	75	60,48	7	5,65	1,85	13	10,48	0	0,00
24	Kalimantan Utara	768.505	23	21	91,30	1	4,35	1,30	4	17,39	1	25,00
25	Sulawesi Utara	2.528.794	356	338	94,94	9	2,53	3,56	30	8,43	1	3,33
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	201	192	95,52	1	0,50	0,32	14	6,97	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	615	534	86,83	27	4,39	3,02	47	7,64	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	127	103	81,10	7	5,51	2,54	19	14,96	1	5,26
29	Gorontalo	1.219.576	106	92	86,79	8	7,55	6,56	6	5,66	0	0,00
30	Sulawesi Barat	1.405.012	138	131	94,93	0	0,00	0,00	13	9,42	0	0,00
31	Maluku	1.831.880	302	276	91,39	3	0,99	1,64	33	10,93	0	0,00
32	Maluku Utara	1.278.764	505	488	96,63	11	2,18	8,60	121	23,96	2	1,65
33	Papua Barat	981.822	699	677	96,85	0	0,00	0,00	169	24,18	0	0,00
34	Papua	3.435.430	1.022	946	92,56	39	3,82	11,35	205	20,06	5	2,44
Indonesia		**271.066.366**	**11.173**	**9.457**	**84,64**	**628**	**5,62**	**2,32**	**1.126**	**10,08**	**24**	**2,13**

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 59

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	5.459.891	24	210	234	0,43	ELIMINASI
2	Sumatera Utara	14.703.532	9	109	118	0,08	ELIMINASI
3	Sumatera Barat	5.498.751	3	32	35	0,06	ELIMINASI
4	Riau	7.128.305	1	83	84	0,12	ELIMINASI
5	Jambi	3.677.894	5	59	64	0,17	ELIMINASI
6	Sumatera Selatan	8.567.923	13	174	187	0,22	ELIMINASI
7	Bengkulu	2.019.848	1	11	12	0,06	ELIMINASI
8	Lampung	8.521.201	5	120	125	0,15	ELIMINASI
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	6	49	55	0,36	ELIMINASI
10	Kepulauan Riau	2.242.198	3	80	83	0,37	ELIMINASI
11	DKI Jakarta	10.644.986	32	424	456	0,43	ELIMINASI
12	Jawa Barat	49.935.858	86	1.759	1.845	0,37	ELIMINASI
13	Jawa Tengah	34.940.078	74	1.065	1.139	0,33	ELIMINASI
14	DI Yogyakarta	3.882.288	13	89	102	0,26	ELIMINASI
15	Jawa Timur	39.886.288	90	2.049	2.139	0,54	ELIMINASI
16	Banten	13.160.496	27	561	588	0,45	ELIMINASI
17	Bali	4.380.824	5	71	76	0,17	ELIMINASI
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	13	231	244	0,48	ELIMINASI
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	18	374	392	0,71	ELIMINASI
20	Kalimantan Barat	5.134.760	4	70	74	0,14	ELIMINASI
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	1	56	57	0,21	ELIMINASI
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	6	95	101	0,23	ELIMINASI
23	Kalimantan Timur	3.793.152	4	122	126	0,33	ELIMINASI
24	Kalimantan Utara	768.505	5	26	31	0,40	ELIMINASI
25	Sulawesi Utara	2.528.794	28	375	403	1,59	BELUM ELIMINASI
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	5	183	188	0,61	ELIMINASI
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	52	643	695	0,78	ELIMINASI
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	14	171	185	0,67	ELIMINASI
29	Gorontalo	1.219.576	1	116	117	0,96	ELIMINASI
30	Sulawesi Barat	1.405.012	13	145	158	1,12	BELUM ELIMINASI
31	Maluku	1.831.880	21	367	388	2,12	BELUM ELIMINASI
32	Maluku Utara	1.278.764	46	530	576	4,50	BELUM ELIMINASI
33	Papua Barat	981.822	362	540	902	9,19	BELUM ELIMINASI
34	Papua	3.435.430	248	953	1.201	3,50	BELUM ELIMINASI
Indonesia		**271.066.366**	**1.238**	**11.942**	**13.180**	**0,49**	**ELIMINASI**

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 59.b

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (*RELEASE FROM TREATMENT* /RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2019		Tahun 2018	
		Penderita PB[a]	RFT PB (%)	Penderita MB[b]	RFT MB (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	71	92	217	89
2	Sumatera Utara	12	92	165	84
3	Sumatera Barat	15	73	64	81
4	Riau	11	82	25	92
5	Jambi	13	92	77	92
6	Sumatera Selatan	19	100	222	96
7	Bengkulu	2	100	22	95
8	Lampung	10	100	166	93
9	Kep. Bangka Belitung	12	67	48	88
10	Kepulauan Riau	N/A	N/A	N/A	N/A
11	DKI Jakarta	100	99	359	80
12	Jawa Barat	200	95	1.894	90
13	Jawa Tengah	147	96	1.648	86
14	DI Yogyakarta	9	89	30	63
15	Jawa Timur	241	93	2.893	90
16	Banten	122	93	830	88
17	Bali	14	79	117	68
18	Nusa Tenggara Barat	43	93	219	87
19	Nusa Tenggara Timur	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kalimantan Barat	8	100	70	89
21	Kalimantan Tengah	16	94	104	69
22	Kalimantan Selatan	24	96	137	90
23	Kalimantan Timur	25	88	163	86
24	Kalimantan Utara	4	50	31	81
25	Sulawesi Utara	104	99	397	92
26	Sulawesi Tengah	46	98	259	97
27	Sulawesi Selatan	167	94	853	86
28	Sulawesi Tenggara	18	89	258	87
29	Gorontalo	11	100	198	84
30	Sulawesi Barat	36	94	161	88
31	Maluku	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Maluku Utara	220	85	578	84
33	Papua Barat	316	64	377	45
34	Papua	N/A	N/A	N/A	N/A
Indonesia		**2.036**	**88**	**12.582**	**87**

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2020, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2020, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2018 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Lampiran 60.a

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	20	60,61
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	13	92,86
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	12	80,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	12	70,59
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	9	81,82
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua Barat	13	7	53,85
34	Papua	29	15	51,72
Indonesia		**514**	**470**	**91,44**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 60.b

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	126.085	83.186	65,98	842	1,01
2	Sumatera Utara	329.118	32.265	9,80	356	1,10
3	Sumatera Barat	119.518	53.398	44,68	649	1,22
4	Riau	170.854	45.045	26,36	678	1,51
5	Jambi	71.970	34.989	48,62	437	1,25
6	Sumatera Selatan	174.076	71.924	41,32	515	0,72
7	Bengkulu	40.609	15.829	38,98	274	1,73
8	Lampung	162.463	107.828	66,37	1.457	1,35
9	Kepulauan Bangka Belitung	30.224	21.439	70,93	460	2,15
10	Kepulauan Riau	44.625	17.129	38,38	265	1,55
11	DKI Jakarta	179.452	105.841	58,98	1.475	1,39
12	Jawa Barat	955.411	470.465	49,24	5.892	1,25
13	Jawa Tengah	575.082	415.265	72,21	5.312	1,28
14	DI Yogyakarta	59.422	26.411	44,45	183	0,69
15	Jawa Timur	618.207	424.114	68,60	7.950	1,87
16	Banten	261.628	136.566	52,20	2.083	1,53
17	Bali	70.859	39.713	56,05	488	1,23
18	Nusa Tenggara Barat	112.725	66.596	59,08	1.998	3,00
19	Nusa Tenggara Timur	154.663	53.610	34,66	2.627	4,90
20	Kalimantan Barat	109.316	45.647	41,76	1.101	2,41
21	Kalimantan Tengah	59.161	30.631	51,78	770	2,51
22	Kalimantan Selatan	87.583	47.875	54,66	1.024	2,14
23	Kalimantan Timur	82.512	46.149	55,93	885	1,92
24	Kalimantan Utara	13.361	10.220	76,49	212	2,07
25	Sulawesi Utara	44.546	8.319	18,68	128	1,54
26	Sulawesi Tengah	68.716	34.650	50,42	860	2,48
27	Sulawesi Selatan	183.791	125.255	68,15	2.672	2,13
28	Sulawesi Tenggara	69.018	20.673	29,95	715	3,46
29	Gorontalo	26.283	14.848	56,49	485	3,27
30	Sulawesi Barat	36.337	17.414	47,92	383	2,20
31	Maluku	49.283	19.651	39,87	363	1,85
32	Maluku Utara	32.210	15.675	48,67	611	3,90
33	Papua Barat	24.189	4.235	17,51	198	4,68
34	Papua	78.487	19.442	24,77	760	3,91
Indonesia		**5.221.784**	**2.682.297**	**51,37**	**45.108**	**1,68**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2021

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah Jumlah estimasi Ibu Hamil sesuai dengan data Pusdatin

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Pemerikasaan HBsAg pada ibu hamil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

Lampiran 61

KASUS *AFP (NON POLIO)* PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus *Non Polio AFP*	*Non Polio AFP Rate* per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1.663.146	13	0,73	61,54
2	Sumatera Utara	4.522.273	7	0,15	100,00
3	Sumatera Barat	1.603.797	24	1,36	95,83
4	Riau	2.121.322	10	0,19	40,00
5	Jambi	960.677	14	1,31	92,86
6	Sumatera Selatan	2.367.604	15	0,63	60,00
7	Bengkulu	544.615	1	0,16	100,00
8	Lampung	2.306.716	2	0,04	50,00
9	Kep. Bangka Belitung	397.663	8	1,44	75,00
10	Kepulauan Riau	647.324	2	0,27	100,00
11	DKI Jakarta	2.625.954	41	0,68	26,83
12	Jawa Barat	12.855.389	89	0,64	88,76
13	Jawa Tengah	8.101.509	77	0,90	96,10
14	DI Yogyakarta	833.780	5	0,48	80,00
15	Jawa Timur	8.705.111	77	0,79	81,82
16	Banten	3.611.758	13	0,34	92,31
17	Bali	999.405	22	2,17	68,18
18	Nusa Tenggara Barat	1.480.958	1	0,07	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.868.711	0	0,00	0,00
20	Kalimantan Barat	1.453.186	2	0,07	50,00
21	Kalimantan Tengah	739.812	4	0,45	100,00
22	Kalimantan Selatan	1.191.784	4	0,33	100,00
23	Kalimantan Timur	1.005.130	9	0,38	44,44
24	Kalimantan Utara	223.612	1	0,34	100,00
25	Sulawesi Utara	618.931	12	1,17	58,33
26	Sulawesi Tengah	868.047	7	0,75	100,00
27	Sulawesi Selatan	2.457.214	21	0,69	85,71
28	Sulawesi Tenggara	887.353	8	0,75	87,50
29	Gorontalo	330.700	1	0,28	100,00
30	Sulawesi Barat	432.327	1	0,23	100,00
31	Maluku	591.108	3	0,14	33,33
32	Maluku Utara	409.521	3	0,36	33,33
33	Papua Barat	288.340	10	1,34	50,00
34	Papua	980.684	29	1,85	86,21
Indonesia		**70.695.461**	**536**	**0,64**	**78,4**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Published : 03 April 2021

Lampiran 62.a

JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Difteri				Pertusis	Tetanus Neonatorum		Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L+P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	15	18	33	0	1	0	0	115	118	233
2	Sumatera Utara	6	4	10	0	1	0	0	11	8	19
3	Sumatera Barat	8	4	12	2	5	0	0	39	45	84
4	Riau	1	1	2	0	2	0	0	9	8	17
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	26	23	49
6	Sumatera Selatan	2	2	4	1	5	1	0	49	54	103
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	2	1	3	1	0	0	0	51	60	111
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	2	2	1	0	0	26	21	47
10	Kepulauan Riau	1	0	1	0	0	0	0	5	2	7
11	DKI Jakarta	8	10	18	1	0	0	0	313	283	596
12	Jawa Barat	40	35	75	3	3	0	0	131	192	323
13	Jawa Tengah	4	3	7	0	1	0	0	295	385	680
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	192	216	408
15	Jawa Timur	29	26	55	1	6	0	0	91	125	216
16	Banten	2	2	4	0	1	0	0	35	31	66
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	14	23	37
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	3	8	11	1	1	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	0	1	0	0	0	0	31	37	68
23	Kalimantan Timur	8	5	13	0	1	0	0	27	18	45
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6
25	Sulawesi Utara	1	0	1	0	0	0	0	18	16	34
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5
27	Sulawesi Selatan	1	0	1	0	1	0	0	59	70	129
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	9	12	21
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	0	2	4	6
31	Maluku	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	15	13	28
33	Papua Barat	1	0	1	0	1	0	0	8	2	10
34	Papua	3	0	3	0	5	3	2	14	17	31
Jumlah		**139**	**120**	**259**	**13**	**41**	**4**	**2**	**1592**	**1790**	**3382**
Case Fatality Rate (%)											
Insidens Rate Suspek Campak (1/100.000 penduduk)											**1,25**
Indonesia											

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Published : 31 Maret 2021

Lampiran 62.b

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Total	Meninggal	*Case Fatality Rate (%)*	Faktor Risiko																						
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS		
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Dimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*	*(29)*
1	Aceh	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	1	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7	Bengkulu	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	3	2	66,7	0	0	0	2	1	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	1	1	3	0	0
Indonesia		**4**	**2**	**50,0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**2**	**1**	**1**	**4**	**0**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 31 Maret 2021

Lampiran 62.c

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	115	54	31	6	2	5	1	0	1	1	6	11	233
2	Sumatera Utara	2	10	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	19
3	Sumatera Barat	27	32	15	1	0	0	0	2	0	0	6	1	84
4	Riau	1	5	5	0	0	0	1	0	0	0	5	0	17
5	Jambi	16	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
6	Sumatera Selatan	73	22	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	103
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	29	41	27	11	0	0	0	1	1	1	0	0	111
9	Kep. Bangka Belitung	6	8	9	2	2	6	1	2	2	5	4	0	47
10	Kepulauan Riau	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7
11	Jakarta	120	125	151	57	18	25	24	24	11	13	18	10	596
12	Jawa Barat	88	90	64	7	11	9	10	8	8	11	14	3	323
13	Jawa Tengah	172	185	131	33	23	29	30	19	12	6	20	20	680
14	DI Yogyakarta	68	87	88	28	24	20	23	22	15	9	13	11	408
15	Jawa Timur	74	45	47	6	10	3	2	3	15	3	6	2	216
16	Banten	12	31	7	0	0	4	5	2	0	1	3	1	66
17	Bali	11	10	7	5	0	2	1	1	0	0	0	0	37
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	22	22	3	1	0	0	0	0	0	20	0	0	68
23	Kalimantan Timur	5	13	20	0	0	2	0	0	4	1	0	0	45
24	Kalimantan Utara	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6
25	Sulawesi Utara	11	9	0	0	0	3	8	0	1	0	2	0	34
26	Sulawesi Tengah	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
27	Sulawesi Selatan	49	35	23	3	2	7	2	4	0	1	3	0	129
28	Sulawesi Tenggara	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	21
29	Gorontalo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	6
31	Maluku	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	Maluku Utara	1	0	0	2	1	2	3	2	4	7	6	0	28
33	Papua Barat	3	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10
34	Papua	2	4	3	0	0	0	0	0	3	1	18	0	31
Indonesia		**920**	**872**	**650**	**168**	**94**	**118**	**112**	**90**	**78**	**83**	**132**	**65**	**3382**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 31 Maret 2021

Lampiran 62.d

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	5	5	46	72	36	77	11	30	14	46	0	3	233	112	48,07
2	Sumatera Utara	0	0	1	3	0	7	0	2	0	0	0	7	19	1	5,26
3	Sumatera Barat	7	7	18	19	22	22	7	8	25	28	0	0	84	79	94,05
4	Riau	1	1	1	3	0	4	0	2	0	3	1	4	17	3	17,65
5	Jambi	6	6	14	16	2	12	1	7	2	8	0	0	49	25	51,02
6	Sumatera Selatan	21	21	29	34	19	22	10	10	14	16	0	0	103	93	90,29
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Lampung	5	5	16	32	0	31	0	14	0	24	0	5	111	21	18,92
9	Kep. Bangka Belitung	9	9	15	16	4	7	3	4	5	11	0	0	47	36	76,60
10	Kepulauan Riau	2	2	1	1	1	3	0	0	1	1	0	0	7	5	71,43
11	Jakarta	94	108	81	151	0	78	1	63	1	182	0	14	596	177	29,70
12	Jawa Barat	21	23	37	53	23	54	20	32	30	156	0	5	323	131	40,56
13	Jawa Tengah	77	80	116	169	31	138	31	90	91	201	0	2	680	346	50,88
14	DI Yogyakarta	64	65	62	90	12	84	11	62	28	107	0	0	408	177	43,38
15	Jawa Timur	52	52	52	63	23	34	10	20	16	47	0	0	216	153	70,83
16	Banten	4	5	7	17	0	19	0	6	0	19	0	0	66	11	16,67
17	Bali	0	0	9	9	9	9	5	5	8	14	0	0	37	31	83,78
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
22	Kalimantan Selatan	4	5	7	13	0	19	0	7	0	22	0	2	68	11	16,18
23	Kalimantan Timur	7	8	6	13	0	11	0	5	0	4	0	4	45	13	28,89
24	Kalimantan Utara	2	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6	2	33,33
25	Sulawesi Utara	3	3	1	3	4	4	4	10	3	14	0	0	34	15	44,12
26	Sulawesi Tengah	1	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	5	2	40,00
27	Sulawesi Selatan	26	26	40	44	16	20	8	11	12	28	0	0	129	102	79,07
28	Sulawesi Tenggara	5	5	11	13	2	3	0	0	0	0	0	0	21	18	85,71
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0,00
30	Sulawesi Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0,00
31	Maluku	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00
32	Maluku Utara	12	12	8	8	6	6	1	1	1	1	0	0	28	28	100,00
33	Papua Barat	3	3	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	10	10	100,00
34	Papua	9	9	11	11	2	2	1	1	8	8	0	0	31	31	100,00
Indonesia		**441**	**465**	**593**	**861**	**216**	**672**	**124**	**391**	**259**	**947**	**1**	**46**	**3.382**	**1.634**	**48,31**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021

Ket: * Divaksinasi = telah menerima minimal satu dosis imunisasi campak

Published : 31 Maret 2021

Lampiran 62.e

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1	1	1	1	5	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	1	1	1	1	10	0
13	Jawa Tengah	1	1	1	1	10	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	1	1	1	1	6	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	9	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	1	1	1	11	0
Indonesia		**6**	**6**	**6**	**6**	**51**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 31 Maret 2021

Lampiran 62.f

DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium											Tanpa Spesimen	
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	10	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	10	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	6	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	9	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	11	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**51**	**1**	**5**	**1**	**11**	**0**	**0**	**4**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 31 Maret 2021

Lampiran 63

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	3	0	0
2	Sumatera Utara	1	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	#DIV/0!
4	Riau	0	0	#DIV/0!
5	Jambi	0	0	#DIV/0!
6	Sumatera Selatan	0	0	#DIV/0!
7	Bengkulu	2	2	100
8	Lampung	0	0	#DIV/0!
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	#DIV/0!
10	Kepulauan Riau	0	0	#DIV/0!
11	Jakarta	4	2	50
12	Jawa Barat	9	8	89
13	Jawa Tengah	2	2	100
14	DI Yogyakarta	0	0	#DIV/0!
15	Jawa Timur	8	4	50
16	Banten	0	0	#DIV/0!
17	Bali	1	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	2	1	50
20	Kalimantan Barat	0	0	#DIV/0!
21	Kalimantan Tengah	1	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	1	100
23	Kalimantan Timur	0	0	#DIV/0!
24	Kalimantan Utara	0	0	#DIV/0!
25	Sulawesi Utara	1	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	#DIV/0!
27	Sulawesi Selatan	2	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	#DIV/0!
29	Gorontalo	0	0	#DIV/0!
30	Sulawesi Barat	2	2	100
31	Maluku	0	0	#DIV/0!
32	Maluku Utara	0	0	#DIV/0!
33	Papua Barat	0	0	#DIV/0!
34	Papua	1	1	100
Indonesia		**41**	**23**	**56**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2020

Lampiran 63.b

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Banjir	33	43	14	20	21	6	24	9	11	10	8	31	230
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
3	Gempa Bumi	0	0	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	1	4	5	4	2	2	2	0	4	1	4	7	36
6	Banjir Bandang	3	2	3	4	4	4	3	2	4	4	2	0	35
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	8	3	5	1	2	2	4	4	6	6	7	1	49
9	Gelombang Pasang/Badai	0	1	0	0	1	5	0	0	0	1	0	0	8
10	Banjir dan Tanah Longsor	6	8	4	0	0	2	6	1	7	10	5	4	53
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		**51**	**61**	**34**	**29**	**30**	**21**	**39**	**16**	**33**	**33**	**31**	**44**	**422**
1	Kebakaran	1	2	1	1	1	6	5	10	4	4	6	2	43
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	3	8	3	1	2	0	6	7	1	2	2	2	37
8	Gagal Teknologi	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		**6**	**10**	**13**	**2**	**3**	**6**	**11**	**18**	**5**	**6**	**9**	**4**	**93**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jumlah Bencana Sosial		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**3**
Total Jumlah Bencana 2019		**57**	**71**	**47**	**31**	**33**	**27**	**50**	**34**	**39**	**40**	**41**	**48**	**518**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 63.c

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2020

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Banjir	230	27	88	164	74.030	4	428.490
2	Letusan Gunung Api	6	4	0	104	4.706	0	11.357
3	Gempa Bumi	5	3	0	1	26	0	444
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	36	8	20	5	12	2	2.647
6	Banjir Bandang	35	16	49	32	1.803	14	30.655
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	49	14	12	20	51	6	720
9	Gelombang Pasang/Badai	8	4	0	0	0	0	1.340
10	Banjir dan Tanah Longsor	53	20	67	128	35.672	4	69.986
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		**422**		**236**	**454**	**116.300**	**30**	**545.639**
1	Kebakaran	43	13	6	2	363	0	8.601
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	2	1	8	31	32	0	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	0	0	0	0	0	0	0
5	Kecelakaan Industri	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	9	1	30	1.795	0	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	37	13	2	1.167	2.538	0	0
8	Gagal Teknologi	2	2	1	13	1	0	0
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		**93**		**47**	**3.008**	**2.934**	**0**	**8.601**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	2	2	0	7	53	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	1	1	4	0	0	0	196
Jumlah Bencana Sosial		**3**		**4**	**7**	**53**	**0**	**196**
Indonesia		**518**		**287**	**3.469**	**119.287**	**30**	**554.436**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 63.d

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	26	10	1	471	6	51.687
2	Sumatera Utara	15	22	58	2.363	2	61.851
3	Sumatera Barat	18	5	7	115	0	2.529
4	Riau	2	0	0	0	0	752
5	Jambi	3	0	0	0	0	647
6	Sumatera Selatan	9	1	0	4	0	666
7	Bengkulu	5	0	276	16	0	694
8	Lampung	10	4	74	594	0	368
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	0	0	0	0	8
11	DKI Jakarta	54	19	88	19.049	0	48.390
12	Jawa Barat	110	57	422	56.525	2	217.596
13	Jawa Tengah	64	11	96	4.137	0	31.158
14	DI Yogyakarta	3	0	0	529	0	328
15	Jawa Timur	32	8	175	1.621	0	3.043
16	Banten	18	25	64	29.497	4	43.589
17	Bali	2	0	12	18	0	16
18	Nusa Tenggara Barat	7	0	155	6	0	596
19	Nusa Tenggara Timur	14	30	1.887	2.878	0	9.478
20	Kalimantan Barat	15	4	0	12	0	2.878
21	Kalimantan Tengah	14	4	1	5	3	7.100
22	Kalimantan Selatan	4	0	0	93	0	327
23	Kalimantan Timur	5	4	0	4	0	3.119
24	Kalimantan Utara	2	11	0	3	0	36
25	Sulawesi Utara	6	6	10	234	1	1.389
26	Sulawesi Tengah	18	5	1	327	1	5.840
27	Sulawesi Selatan	28	50	23	285	11	19.887
28	Sulawesi Tenggara	4	1	104	163	0	11.412
29	Gorontalo	13	0	1	338	0	23.942
30	Sulawesi Barat	2	0	0	0	0	515
31	Maluku	3	2	0	0	0	124
32	Maluku Utara	6	0	0	0	0	1.647
33	Papua Barat	2	8	7	0	0	2.084
34	Papua	3	0	7	0	0	740
Indonesia		**518**	**287**	**3.469**	**119.287**	**30**	**554.436**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 65.a

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	*Incidence Rate* per 100.000 Penduduk	Meninggal	*CFR* (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	5.459.891	891	0,0	1	0,11
2	Sumatera Utara	14.703.532	3.125	21,3	7	0,22
3	Sumatera Barat	5.498.751	1.117	20,3	3	0,27
4	Riau	7.128.305	2.948	41,4	38	1,29
5	Jambi	3.677.894	2.049	55,7	14	0,68
6	Sumatera Selatan	8.567.923	2.359	27,5	3	0,13
7	Bengkulu	2.019.848	1.276	63,2	10	0,78
8	Lampung	8.521.201	6.372	74,8	26	0,41
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	1.144	75,4	9	0,79
10	Kepulauan Riau	2.242.198	1.753	78,2	9	0,51
11	DKI Jakarta	10.644.986	4.745	44,6	1	0,02
12	Jawa Barat	49.935.858	22.613	45,3	168	0,74
13	Jawa Tengah	34.940.078	5.683	16,3	107	1,88
14	DI Yogyakarta	3.882.288	3.618	93,2	13	0,36
15	Jawa Timur	39.886.288	8.567	21,5	73	0,85
16	Banten	13.160.496	2.910	22,1	25	0,86
17	Bali	4.380.824	11.964	273,1	23	0,19
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	4.720	92,1	13	0,28
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	5.968	107,7	59	0,99
20	Kalimantan Barat	5.134.760	784	15,3	4	0,51
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	669	24,2	5	0,75
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	1.768	41,1	20	1,13
23	Kalimantan Timur	3.793.152	2.299	60,6	18	0,78
24	Kalimantan Utara	768.505	515	67,0	8	1,55
25	Sulawesi Utara	2.528.794	1.219	48,2	18	1,48
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	1.190	38,4	12	1,01
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	2.714	30,4	27	0,99
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	905	32,8	9	0,99
29	Gorontalo	1.219.576	951	78,0	7	0,74
30	Sulawesi Barat	1.405.012	630	44,8	3	0,48
31	Maluku	1.831.880	77	4,2	5	6,49
32	Maluku Utara	1.278.764	425	33,2	8	1,88
33	Papua Barat	981.822	163	16,6	0	0,00
34	Papua	3.435.430	172	5,0	1	0,58
Indonesia		**271.066.366**	**108.303**	**40,0**	**747**	**0,69**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 65.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2018		2019		2020	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	23	22	95,65	23	100,00	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	32	96,97	32	96,97	33	100,00
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	4	57,14	7	100,00	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	5	83,33	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	21	77,78	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	37	97,37	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	7	87,50	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	13	59,09	22	100,00	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,31	13	100,00	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	11	84,62	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,83	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	12	70,59	16	94,12	17	100,00
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	5	83,33	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	6	54,55	7	63,64	5	45,45
32	Maluku Utara	10	4	40,00	8	80,00	9	90,00
33	Papua Barat	13	4	30,77	7	53,85	6	46,15
34	Papua	29	9	31,03	10	34,48	6	20,69
Indonesia		**514**	**440**	**85,60**	**481**	**93,58**	**477**	**92,80**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 66.a

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	*Annual Paracite Incidence* (API) per 1.000 Penduduk
				Mikroskopis	*Rapid Diagnostic Test (RDT)*	Total		L	P	L+P			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	5.459.891	29.545	21.161	7.923	29.084	98,4	213	26	239	239	1,00	100,0
2	Sumatera Utara	14.703.532	21.080	6.609	12.171	18.780	89,1	608	390	998	997	1,00	99,9
3	Sumatera Barat	5.498.751	8.978	3.976	4.645	8.621	96,0	58	35	93	94	1,01	101,1
4	Riau	7.128.305	8.119	5.030	3.035	8.065	99,3	1.051	689	1.740	1.740	1,00	100,0
5	Jambi	3.677.894	30.213	14.859	14.214	29.073	96,2	46	22	68	68	1,00	100,0
6	Sumatera Selatan	8.567.923	19.354	8.737	10.389	19.126	98,8	42	27	69	69	1,00	100,0
7	Bengkulu	2.019.848	13.265	8.456	4.580	13.036	98,3	49	56	105	105	1,00	100,0
8	Lampung	8.521.201	30.088	11.902	17.960	29.862	99,2	251	173	424	424	1,00	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	29.185	19.352	7.703	27.055	92,7	141	46	187	186	0,99	99,5
10	Kepulauan Riau	2.242.198	7.857	6.753	562	7.315	93,1	112	86	198	192	0,97	97,0
11	DKI Jakarta	10.644.986	59	58	1	59	100,0	54	4	58	56	0,97	96,6
12	Jawa Barat	49.935.858	18.198	16.512	1.152	17.664	97,1	303	16	319	309	0,97	96,9
13	Jawa Tengah	34.940.078	31.132	27.500	1.697	29.197	93,8	253	12	265	230	0,87	86,8
14	DI Yogyakarta	3.882.288	13.018	10.693	55	10.748	82,6	6	0	6	3	0,50	50,0
15	Jawa Timur	39.872.395	7.245	6.367	166	6.533	90,2	276	19	295	278	0,94	94,2
16	Banten	13.160.496	1.029	414	357	771	74,9	6	0	6	6	1,00	100,0
17	Bali	4.380.824	6.186	6.084	18	6.102	98,6	13	4	17	12	0,71	70,6
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	105.539	81.983	12.010	93.993	89,1	173	74	247	219	0,89	88,7
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	403.142	343.547	54.685	398.232	98,8	8.593	6.711	15.304	14.371	0,94	93,9
20	Kalimantan Barat	5.134.760	39.283	14.482	18.835	33.317	84,8	48	16	64	54	0,84	84,4
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	14.916	5.514	7.705	13.219	88,6	137	25	162	154	0,95	95,1
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	24.378	7.772	14.981	22.753	93,3	484	33	517	508	0,98	98,3
23	Kalimantan Timur	3.793.152	12.021	6.844	4.104	10.948	91,1	2.226	139	2.365	1.943	0,82	82,2
24	Kalimantan Utara	768.505	2.093	564	1.435	1.999	95,5	65	2	67	65	0,97	97,0
25	Sulawesi Utara	2.528.794	16.499	8.803	4.501	13.304	80,6	621	279	900	733	0,81	81,4
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	41.302	11.206	25.971	37.177	90,0	132	67	199	176	0,88	88,4
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	15.051	8.657	6.092	14.749	98,0	641	124	765	699	0,91	91,4
28	Sulawesi Tenggara	3.014.333	15.794	5.738	9.948	15.686	99,3	307	108	415	407	0,98	98,1
29	Gorontalo	1.219.576	11.210	5.289	5.921	11.210	100,0	35	1	36	36	1,00	100,0
30	Sulawesi Barat	1.405.012	15.681	5.305	10.232	15.537	99,1	137	6	143	143	1,00	100,0
31	Maluku	1.831.880	50.859	35.449	13.642	49.091	96,5	455	311	766	672	0,88	87,7
32	Maluku Utara	1.278.764	29.304	20.385	8.918	29.303	100,0	127	75	202	202	1,00	100,0
33	Papua Barat	981.822	120.764	80.186	40.354	120.540	99,8	6.279	3.691	9.970	9.823	0,99	98,5
34	Papua	3.435.430	685.382	530.528	147.552	678.080	98,9	122.724	94.117	216.841	205.968	0,95	95,0
Indonesia		**271.311.217**	**1.877.769**	**1.346.715**	**473.514**	**1.820.229**	**96,9**	**146.666**	**107.384**	**254.050**	**241.181**	**0,95**	**94,9**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 66.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria			
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	21	1	1	
2	Sumatera Utara	21	11	1	
3	Sumatera Barat	17	2		
4	Riau	10	2		
5	Jambi	7	4		
6	Sumatera Selatan	9	8		
7	Bengkulu	4	6		
8	Lampung	11	4		
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1		
10	Kepulauan Riau	3	3	1	
11	DKI Jakarta	6			
12	Jawa Barat	25	2		
13	Jawa Tengah	33	2		
14	DI Yogyakarta	4	1		
15	Jawa Timur	38			
16	Banten	6	2		
17	Bali	9			
18	Nusa Tenggara Barat	3	7		
19	Nusa Tenggara Timur	3	14	2	3
20	Kalimantan Barat	4	10		
21	Kalimantan Tengah	11	3		
22	Kalimantan Selatan	7	6		
23	Kalimantan Timur	3	6		1
24	Kalimantan Utara	3	2		
25	Sulawesi Utara	8	4	3	
26	Sulawesi Tengah	6	7		
27	Sulawesi Selatan	21	3		
28	Sulawesi Tenggara	11	6		
29	Gorontalo	2	4		
30	Sulawesi Barat	5	1		
31	Maluku		8	3	
32	Maluku Utara	1	8	1	
33	Papua Barat		3	6	4
34	Papua		8	5	16
Indonesia		**318**	**149**	**23**	**24**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 66.c

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2016- 2020

No	Provinsi	API				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	0,05	0,06	0,02	0,02	0,04
2	Sumatera Utara	0,27	0,17	0,09	0,07	0,07
3	Sumatera Barat	0,12	0,10	0,09	0,06	0,02
4	Riau	0,03	0,03	0,01	0,02	0,24
5	Jambi	0,14	0,05	0,05	0,02	0,02
6	Sumatera Selatan	0,28	0,11	0,08	0,07	0,01
7	Bengkulu	1,45	0,53	0,16	0,04	0,05
8	Lampung	0,40	0,52	0,38	0,18	0,05
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,11	0,07	0,16	0,09	0,12
10	Kepulauan Riau	0,36	0,17	0,11	0,06	0,09
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Jawa Barat	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
13	Jawa Tengah	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01
14	DI Yogyakarta	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00
15	Jawa Timur	0,01	0,00	0,01	0,02	0,01
16	Banten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0,24	0,15	0,34	0,19	0,05
19	Nusa Tenggara Timur	5,41	5,76	3,42	2,37	2,76
20	Kalimantan Barat	0,06	0,03	0,02	0,00	0,01
21	Kalimantan Tengah	0,19	0,29	0,25	0,07	0,06
22	Kalimantan Selatan	0,52	0,28	0,20	0,20	0,12
23	Kalimantan Timur	0,35	0,44	0,63	0,55	0,62
24	Kalimantan Utara	0,03	0,09	0,04	0,08	0,09
25	Sulawesi Utara	0,72	0,37	0,25	0,20	0,36
26	Sulawesi Tengah	0,49	0,18	0,06	0,06	0,06
27	Sulawesi Selatan	0,12	0,14	0,15	0,10	0,09
28	Sulawesi Tenggara	0,44	0,21	0,29	0,30	0,14
29	Gorontalo	0,15	0,04	0,05	0,03	0,03
30	Sulawesi Barat	0,09	0,11	0,19	0,14	0,10
31	Maluku	4,64	2,30	1,16	0,72	0,42
32	Maluku Utara	2,44	0,79	0,39	0,46	0,16
33	Papua Barat	6,79	14,97	8,49	7,38	10,15
34	Papua	45,85	59,00	52,99	64,03	63,12
Indonesia		**0,88**	**0,99**	**0,84**	**0,93**	**0,94**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 67.a

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis Tahun Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	583	0	0	13	570
2	Sumatera Utara	183	8	0	0	191
3	Sumatera Barat	187	0	0	0	187
4	Riau	157	2	15	8	136
5	Jambi	287	0	0	12	275
6	Sumatera Selatan	166	0	0	46	120
7	Bengkulu	64	0	0	0	64
8	Lampung	33	0	0	0	33
9	Kepulauan Bangka Belitung	102	0	4	6	93
10	Kepulauan Riau	81	0	0	0	81
11	DKI Jakarta	23	0	0	0	23
12	Jawa Barat	735	0	43	51	641
13	Jawa Tengah	402	26	2	26	400
14	DI Yogyakarta	3	0	0	1	2
15	Jawa Timur	262	67	0	0	329
16	Banten	116	0	0	9	107
17	Bali	2	0	0	0	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	10
19	Nusa Tenggara Timur	1.540	0	0	6	1.534
20	Kalimantan Barat	245	6	0	0	251
21	Kalimantan Tengah	52	0	0	0	52
22	Kalimantan Selatan	20	7	0	0	27
23	Kalimantan Timur	319	0	2	210	107
24	Kalimantan Utara	11	0	2	6	3
25	Sulawesi Utara	20	1	0	3	18
26	Sulawesi Tengah	193	0	0	13	180
27	Sulawesi Selatan	82	0	0	19	63
28	Sulawesi Tenggara	50	0	0	0	50
29	Gorontalo	5	0	1	0	4
30	Sulawesi Barat	55	0	0	0	55
31	Maluku	39	0	0	0	39
32	Maluku Utara	27	0	0	3	24
33	Papua Barat	1.089	0	0	459	620
34	Papua	3.615	0	0	0	3.615
Indonesia		**10.758**	**117**	**69**	**891**	**9.906**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 67.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota yang ditunda pelaksanaan Evaluasi Penurunan Mikrofilaria*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	12	6	50,0	5	41,7	2	1
2	Sumatera Utara	9	9	100,0	0	0,0	5	0
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	7	0
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	6	0
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	1	0
6	Sumatera Selatan	9	7	77,8	1	11,1	2	1
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	1	0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	0	0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7	0	0,0	5	1
10	Kepulauan Riau	3	1	33,3	0	0,0	0	2
11	DKI Jakarta	0	0	0,0	0	0,0	0	0
12	Jawa Barat	11	8	72,7	0	0,0	6	3
13	Jawa Tengah	9	0	0,0	6	66,7	0	3
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0,0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0,0	0	0,0	0	0
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5	0
17	Bali	0	0	0,0	0	0,0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0,0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	18	4	22,2	11	61,1	2	3
20	Kalimantan Barat	9	0	0,0	6	66,7	0	3
21	Kalimantan Tengah	11	5	45,5	2	18,2	3	4
22	Kalimantan Selatan	8	6	75,0	1	12,5	1	1
23	Kalimantan Timur	6	3	50,0	2	33,3	0	1
24	Kalimantan Utara	4	1	25,0	3	75,0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0,0	0	0
26	Sulawesi Tengah	9	7	77,8	2	22,2	3	0
27	Sulawesi Selatan	4	3	75,0	0	0,0	2	1
28	Sulawesi Tenggara	12	8	66,7	2	16,7	3	2
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4	0
30	Sulawesi Barat	4	3	75,0	1	25,0	1	0
31	Maluku	8	1	12,5	4	50,0	0	3
32	Maluku Utara	6	2	33,3	1	16,7	1	3
33	Papua Barat	12	0	0,0	11	91,7	0	1
34	Papua	23	6	26,1	16	69,6	4	1
Indonesia		**236**	**128**	**54,2**	**74**	**31,4**	**64**	**34**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Ket: * = Kolom tambahan untuk menjelaskan status 34 kab/kota yang sudah selesai POPM Filariasis 5 tahun tetapi tertunda pelaksanaan evaluasi penurunan mikrofilaria karena adanya kondisi pandemi Covid19

Lampiran 67.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	2018			2019			2020		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	684	458	0	893	634	0	640	640	0
2	Sumatera Utara	5.667	4.148	7	8.163	6.489	12	6802	5457	1
3	Sumatera Barat	1.721	992	2	4.994	2.912	1	4341	2508	2
4	Riau	1.402	1.242	0	2.514	2.514	1	2543	1696	4
5	Jambi	1.301	1.212	0	1.154	938	0	867	682	0
6	Sumatera Selatan	1.886	1.532	1	1.779	1.779	0	1842	1586	2
7	Bengkulu	1.415	1.305	1	1.608	1.505	0	1555	1481	0
8	Lampung	1.605	1.496	5	1.946	1.890	0	2043	1866	1
9	Kepulauan Bangka Belitung*	-	-	-	0	0	0	36	0	0
10	Kepulauan Riau*	-	-	-	2	0	0	13	3	0
11	DKI Jakarta*	-	-	-	157	80	0	869	697	0
12	Jawa Barat	1.266	707	0	1.571	944	0	1291	755	0
13	Jawa Tengah*	249	47	0	254	89	0	250	117	0
14	DI Yogyakarta*	-	-	-	112	302	0	56	56	0
15	Jawa Timur*	-	-	-	-	-	-	19	0	0
16	Banten	254	243	0	192	157	0	176	88	0
17	Bali	26.130	13.137	4	37.372	19.681	4	26979	13511	2
18	Nusa Tenggara Barat	-	-		861	559	13	1237	1144	6
19	Nusa Tenggara Timur	12.530	11.743	12	13.449	11.100	16	11262	10913	5
20	Kalimantan Barat	3.912	3.759	25	4.154	3.757	14	3124	2573	2
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	1.441	2.117	0	259	355	0
22	Kalimantan Selatan	359	348	1	438	376	0	311	270	0
23	Kalimantan Timur	1.240	1.078	0	1.049	1.822	0	169	222	0
24	Kalimantan Utara	26	23	0	155	104	0	36	25	0
25	Sulawesi Utara	5.423	3.268	16	5.851	3.129	17	3924	589	7
26	Sulawesi Tengah	2.758	2.591	5	3.471	11.468	8	2533	2422	1
27	Sulawesi Selatan	6.125	4.513	15	6.583	3.210	12	6078	4956	4
28	Sulawesi Tenggara	767	761	5	1.257	1.249	1	920	90	0
29	Gorontalo	1.003	961	10	1.063	991	5	662	661	1
30	Sulawesi Barat	1.187	1.009	-	1.348	1.348	0	1065	1065	0
31	Maluku	1.639	1.314	2	1.133	835	2	539	291	2
32	Maluku Utara	317	-	0	306	283	0	193	78	0
33	Papua Barat*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**80.866**	**57.887**	**111**	**105.270**	**82.262**	**106**	**82.634**	**56.797**	**40**
Persentase VAR/GHPR		**71,6%**			**78,1%**			**68,7%**		

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Ket : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati

* daerah bebas rabies

Lampiran 67.d

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE (CFR)* LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018 - 2020

No	Provinsi	2018			2019			2020		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(3)*	*(10)*	*(11)*
1	DKI Jakarta	31	2	6,45	37	0	0,00	209	9	4,3
2	Jawa Barat	2	0	0,00	32	1	3,13	55	9	16,4
3	Jawa Tengah	427	89	20,84	458	67	14,63	422	49	11,6
4	DI Yogyakarta	186	16	8,60	183	8	4,37	192	17	8,9
5	Jawa Timur	128	10	7,81	147	23	15,65	272	21	7,7
6	Banten	115	31	26,96	52	19	36,54	8	0	0,0
7	Maluku	5	2	40,00	2	1	50,00	0	0	0,0
8	Kalimantan Utara	0	0	0,00	8	3	37,50	11	1	9,1
9	Sulawesi Selatan	0	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,0
10	Sumatera Selatan	1	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
Indonesia		**895**	**150**	**16,76**	**920**	**122**	**13,26**	**1170**	**106**	**9,1**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020
Ket. : K= Kasus, M= Meninggal, *CFR=Case Fatality Rate*

Lampiran 70.a

REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	Pemeriksaan 2020	Cakupan Pemeriksaan Tahun 2020 (%)	Total Pemeriksaan s.d 2020	Cakupan Pemeriksaan 2018 s.d 2020 (%)	Hasil Pemeriksaan 2018 s.d 2020			
						IVA positif	Curiga Ca leher rahim	Benjolan	Curiga Ca Payudara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	7.288	1,2	30.423	3,8	432	164	1285	695
2	Sumatera Utara	54.575	88,0	225.804	11,2	575	71	660	62
3	Sumatera Barat	37.778	6,6	113.289	15,0	1.218	233	554	190
4	Riau	17.689	1.68	111.155	10,6	1360	102	317	0
5	Jambi	26.483	5,8	91.561	16,1	808	19	751	29
6	Sumatera Selatan	71	6,9	332.342	32,1	644	104	743	90
7	Bengkulu	22.145	11,1	35.612	17,9	102	0	34	0
8	Lampung	43.278	3,4	206.457	16,3	899	190	980	246
9	Kep. Bangka Belitung	21.218	9,7	82.380	37,6	134	18	71	23
10	Kepulauan Riau	6.188	1,6	28.971	7,3	350	68	132	4
11	DKI Jakarta	71	3,8	295.736	15,8	1.731	443	1.370	97
12	Jawa Barat	80.238	1,4	320.128	5,6	3.769	735	2725	906
13	Jawa Tengah	52.065	38,0	207.320	3,7	17.029	1209	3730	516
14	DI Yogyakarta	9.323	2,0	22.025	4,2	2034	39	2105	91
15	Jawa Timur	81.536	1,3	394.486	6,4	9.284	932	4642	935
16	Banten	85.140	5,0	130.249	8,4	827	266	1132	276
17	Bali	24.990	4,1	90.513	14,8	3.155	713	2995	68
18	Nusa Tenggara Barat	27.514	4,0	123.250	16,5	1.618	44	183	61
19	Nusa Tenggara Timur	27.280	3,6	77.258	10,2	969	0	213	0
20	Kalimantan Barat	7.255	1,0	32.505	4,3	639	133	604	63
21	Kalimantan Tengah	5.984	2,0	25.696	8,4	328	7	3	0
22	Kalimantan Selatan	11.273	5,0	61.981	17,5	518	73	155	145
23	Kalimantan Timur	4.687	0,8	23.159	3,9	341	170	347	59
24	Kalimantan Utara	3.386	0,7	12.031	2,5	223	35	265	41
25	Sulawesi Utara	2.748	0,7	11.578	3,1	367	10	3	0
26	Sulawesi Tengah	7.685	1,9	42.634	10,7	172	2	100	4
27	Sulawesi Selatan	12.362	1,0	42.765	3,4	363	52	301	77
28	Sulawesi Tenggara	792	0.24	5.619	1,7	77	0	15	0
29	Gorontalo	1.013	0,8	3.895	2,4	88	0	40	0
30	Sulawesi Barat	1.308	0,6	4.661	2,3	12	4	61	0
31	Maluku	712	37,1	7.548	2,3	56	2	6	2
32	Maluku Utara	1.741	0,3	7.443	1,2	17	8	9	3
33	Papua Barat	554	0,4	4.668	3,2	22	1	19	2
34	Papua	0	0,0	2.517	0,6	10	0	0	0
Indonesia		**686.370**	**1,8**	**3.207.659**	**8,3**	**50.171**	**5.847**	**26.550**	**4.685**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

K : Sasaran = perempuan usia 30-50

Lampiran 70.b

JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang Melaksanakan Posbindu	% Desa yang Melaksanakan Posbindu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	6.520	3.883	59,56
2	Sumatera Utara	5.951	3.041	51,10
3	Sumatera Barat	1.155	918	79,48
4	Riau	1.887	868	46,00
5	Jambi	1.509	745	49,37
6	Sumatera Selatan	3.360	2.148	63,93
7	Bengkulu	1.517	684	45,09
8	Lampung	2.647	1.912	72,23
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	344	87,98
10	Kepulauan Riau	400	267	66,75
11	DKI Jakarta	267	261	97,75
12	Jawa Barat	5.986	3.998	66,79
13	Jawa Tengah	8.582	6.580	76,67
14	DI Yogyakarta	438	409	93,38
15	Jawa Timur	8.579	6.758	78,77
16	Banten	1.592	999	62,75
17	Bali	716	529	73,88
18	Nusa Tenggara Barat	1.142	1.050	91,94
19	Nusa Tenggara Timur	3.448	2.270	65,84
20	Kalimantan Barat	1.990	1.132	56,88
21	Kalimantan Tengah	1.587	804	50,66
22	Kalimantan Selatan	2.009	1.484	73,87
23	Kalimantan Timur	992	348	35,08
24	Kalimantan Utara	482	100	20,75
25	Sulawesi Utara	1.765	419	23,74
26	Sulawesi Tengah	2.060	1.220	59,22
27	Sulawesi Selatan	3.047	2.616	85,85
28	Sulawesi Tenggara	2.683	669	24,93
29	Gorontalo	734	508	69,21
30	Sulawesi Barat	700	435	62,14
31	Maluku	1.044	186	17,82
32	Maluku Utara	1.286	623	48,44
33	Papua Barat	1.635	229	14,01
34	Papua	3.620	122	3,37
Indonesia		**81.721**	**48.559**	**59,42**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 70.c

KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	12	52,2
2	Sumatera Utara	33	10	30,3
3	Sumatera Barat	19	13	68,4
4	Riau	12	4	33,3
5	Jambi	11	7	63,6
6	Sumatera Selatan	17	12	70,6
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	10	66,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	1	16,7
12	Jawa Barat	27	18	66,7
13	Jawa Tengah	35	18	51,4
14	DI Yogyakarta	5	3	60,0
15	Jawa Timur	38	18	47,4
16	Banten	8	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9
20	Kalimantan Barat	14	8	57,1
21	Kalimantan Tengah	14	9	64,3
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	4	26,7
26	Sulawesi Tengah	13	11	84,6
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5
28	Sulawesi Tenggara	17	8	47,1
29	Gorontalo	6	2	33,3
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	6	54,5
32	Maluku Utara	10	7	70,0
33	Papua Barat	13	2	15,4
34	Papua	29	1	3,4
Indonesia		**514**	**279**	**54,3**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 71.a

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Target	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan Napza	% Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan Napza
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	23	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	10	0	0,0
3	Sumatera Barat	19	14	11	57,9
4	Riau	12	8	4	33,3
5	Jambi	11	7	8	72,7
6	Sumatera Selatan	17	15	15	88,2
7	Bengkulu	10	6	4	40,0
8	Lampung	15	10	8	53,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	0	0	0,0
11	DKI Jakarta	6	4	6	100,0
12	Jawa Barat	27	24	24	88,9
13	Jawa Tengah	35	13	0	0,0
14	D I Yogyakarta	5	3	0	0,0
15	Jawa Timur	38	38	38	100,0
16	Banten	8	5	0	0,0
17	Bali	9	6	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	14	0	0,0
20	Kalimantan Barat	14	9	8	57,1
21	Kalimantan Tengah	14	9	1	7,1
22	Kalimantan Selatan	13	10	10	76,9
23	Kalimantan Timur	10	4	0	0,0
24	Kalimantan Utara	5	3	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	7	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	13	0	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	24	17	17	70,8
28	Sulawesi Tenggara	17	11	1	5,9
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	4	0	0,0
31	Maluku	11	7	0	0,0
32	Maluku Utara	10	6	0	0,0
33	Papua Barat	13	8	0	0,0
34	Papua	29	19	0	0,0
Indonesia		**514**	**330**	**205**	**39,9**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 71.b

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

No	Provinsi	Target	Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	22	67
2	Sumatera Utara	32	0
3	Sumatera Barat	18	19
4	Riau	12	41
5	Jambi	11	10
6	Sumatera Selatan	17	84
7	Bengkulu	10	5
8	Lampung	15	18
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5
10	Kepulauan Riau	7	0
11	DKI Jakarta	6	30
12	Jawa Barat	26	48
13	Jawa Tengah	30	20
14	D I Yogyakarta	5	23
15	Jawa Timur	35	29
16	Banten	8	0
17	Bali	9	15
18	Nusa Tenggara Barat	10	11
19	Nusa Tenggara Timur	21	0
20	Kalimantan Barat	14	4
21	Kalimantan Tengah	14	11
22	Kalimantan Selatan	13	97
23	Kalimantan Timur	5	0
24	Kalimantan Utara	10	7
25	Sulawesi Utara	14	0
26	Sulawesi Tengah	13	0
27	Sulawesi Selatan	23	3
28	Sulawesi Tenggara	18	0
29	Gorontalo	6	0
30	Sulawesi Barat	7	38
31	Maluku	11	0
32	Maluku Utara	10	0
33	Papua Barat	13	0
34	Papua	28	0
Indonesia		**500**	**585**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2020

Lampiran 72.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum*	Sarana Air Minum sesuai Standar			
			Jumlah Sarana Air Minum Di IKL	%	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	2.893	2.846	98,4	997	34,5
2	Sumatera Utara	3.221	3.125	97,0	1.300	40,4
3	Sumatera Barat	4.146	3.883	93,7	2.771	66,8
4	Riau	3.516	3.041	86,5	1.635	46,5
5	Jambi	1.888	1.880	99,6	1.242	65,8
6	Sumatera Selatan	2.569	2.432	94,7	1.917	74,6
7	Bengkulu	1.220	1.021	83,7	693	56,8
8	Lampung	2.448	2.433	99,4	1.688	69,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.256	1.250	99,5	839	66,8
10	Kepulauan Riau	1.456	1.353	92,9	848	58,2
11	DKI Jakarta	2.560	2.560	100,0	1.233	48,2
12	Jawa Barat	10.516	10.160	96,6	4.275	40,7
13	Jawa Tengah	10.835	10.486	96,8	8.005	73,9
14	DI Yogyakarta	500	477	95,4	387	77,4
15	Jawa Timur	7.585	7.457	98,3	4.435	58,5
16	Banten	4.136	3.999	96,7	1.764	42,6
17	Bali	643	637	99,1	436	67,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.023	1.006	98,3	717	70,1
19	Nusa Tenggara Timur	2.355	2.112	89,7	1.693	71,9
20	Kalimantan Barat	1.948	1.501	77,1	963	49,4
21	Kalimantan Tengah	1.980	1.880	94,9	1.123	56,7
22	Kalimantan Selatan	3.420	2.662	77,8	1.552	45,4
23	Kalimantan Timur	3.487	3.444	98,8	2.065	59,2
24	Kalimantan Utara	796	794	99,7	526	66,1
25	Sulawesi Utara	1.097	1.057	96,4	699	63,7
26	Sulawesi Tengah	2.436	2.377	97,6	2.067	84,9
27	Sulawesi Selatan	3.305	2.969	89,8	2.086	63,1
28	Sulawesi Tenggara	1.319	1.243	94,2	808	61,3
29	Gorontalo	1.000	959	95,9	626	62,6
30	Sulawesi Barat	757	698	92,2	522	69,0
31	Maluku	846	711	84,0	627	74,1
32	Maluku Utara	511	458	89,6	375	73,4
33	Papua Barat	651	349	53,6	224	34,4
34	Papua	1.164	842	72,3	597	51,3
Indonesia		**89.483**	**84.102**	**94,0**	**51.735**	**57,8**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Ket* Sarana air minum yang memiliki penyelenggara adalah :

1. Kelompok Pengelola Sarana Air Minum (KPSPAM) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
2. Kelompok Pengelola Sarana Air Minum (KPSPAM) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) non PAMSIMAS
3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
5. Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri (BUKS) : sekolah, apartemen, industri/perkantoran, fasyankes
6. Depot Air Minum/ terminal air

Lampiran 72.b

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	82,63	85,81	87,66
2	Sumatera Utara	87,47	90,22	89,68
3	Sumatera Barat	80,50	81,44	83,37
4	Riau	87,65	87,42	88,25
5	Jambi	75,35	76,92	78,86
6	Sumatera Selatan	80,60	80,37	80,78
7	Bengkulu	61,22	57,60	62,47
8	Lampung	66,17	73,30	74,97
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,21	73,45	75,06
10	Kepulauan Riau	86,96	88,51	90,41
11	DKI Jakarta	96,07	99,82	99,84
12	Jawa Barat	89,55	92,30	93,42
13	Jawa Tengah	92,41	93,82	94,07
14	DI Yogyakarta	94,09	94,94	96,02
15	Jawa Timur	93,66	94,39	95,56
16	Banten	90,58	91,64	92,87
17	Bali	96,38	96,84	97,36
18	Nusa Tenggara Barat	94,44	93,93	94,13
19	Nusa Tenggara Timur	81,32	82,35	83,87
20	Kalimantan Barat	77,79	77,07	78,83
21	Kalimantan Tengah	71,69	73,27	74,91
22	Kalimantan Selatan	68,45	69,45	70,36
23	Kalimantan Timur	82,91	83,54	85,51
24	Kalimantan Utara	89,50	87,90	89,50
25	Sulawesi Utara	88,70	90,81	90,31
26	Sulawesi Tengah	85,29	83,42	84,60
27	Sulawesi Selatan	88,11	89,38	90,84
28	Sulawesi Tenggara	88,47	89,66	92,49
29	Gorontalo	93,37	94,19	94,16
30	Sulawesi Barat	71,99	71,50	72,75
31	Maluku	92,52	90,83	91,68
32	Maluku Utara	84,95	85,04	86,90
33	Papua Barat	83,19	81,85	79,56
34	Papua	62,43	60,85	62,73
Indonesia		**87,75**	**89,27**	**90,21**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Lampiran 73.a

JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana			Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	23	1.353.618	126.494	192.135	737.193	1.055.822	78,0
2	Sumatera Utara	33	3.946.276	254.668	670.427	2.192.463	3.117.558	79,0
3	Sumatera Barat	19	1.241.044	71.662	130.168	815.826	1.017.656	82,0
4	Riau	12	1.655.818	71.625	388.389	1.063.338	1.523.352	92,0
5	Jambi	11	954.048	63.366	204.397	571.799	839.562	88,0
6	Sumatera Selatan	17	2.258.676	140.175	394.810	1.430.063	1.965.048	87,0
7	Bengkulu	10	605.887	23.986	99.348	379.552	502.886	83,0
8	Lampung	15	2.228.287	94.899	537.136	1.395.706	2.027.741	91,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	427.861	8.223	68.894	337.908	415.025	97,0
10	Kepulauan Riau	7	889.009	22.867	241.923	393.077	657.867	74,0
11	DKI Jakarta	6	2.965.331	339.012	172.971	2.156.815	2.668.798	90,0
12	Jawa Barat	27	13.344.489	1.215.498	2.638.587	7.488.731	11.342.816	85,0
13	Jawa Tengah	35	10.429.786	1.090.065	1.104.836	7.817.694	10.012.595	96,0
14	DI Yogyakarta	5	1.088.699	53.773	98.041	936.885	1.088.699	100,0
15	Jawa Timur	38	11.542.137	897.004	1.579.970	8.488.056	10.965.030	95,0
16	Banten	8	3.180.557	261.862	482.486	1.927.320	2.671.668	84,0
17	Bali	9	1.058.803	70.330	26.417	909.116	1.005.863	95,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.433.878	194.363	154.783	984.361	1.333.507	93,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.222.028	134.924	359.965	568.275	1.063.164	87,0
20	Kalimantan Barat	14	1.402.255	42.665	892.731	32.160	967.556	69,0
21	Kalimantan Tengah	14	695.277	30.221	101.161	355.312	486.694	70,0
22	Kalimantan Selatan	13	1.095.335	82.790	225.728	611.563	920.081	84,0
23	Kalimantan Timur	10	966.762	37.573	145.373	677.472	860.418	89,0
24	Kalimantan Utara	5	142.509	7.476	24.549	80.557	112.582	79,0
25	Sulawesi Utara	15	658.576	61.077	124.767	400.289	586.133	89,0
26	Sulawesi Tengah	13	782.678	51.168	100.806	466.342	618.316	79,0
27	Sulawesi Selatan	24	2.181.328	165.743	222.412	1.771.360	2.159.515	99,0
28	Sulawesi Tenggara	17	635.500	41.156	122.358	363.951	527.465	83,0
29	Gorontalo	6	320.735	86.249	8.327	158.805	253.381	79,0
30	Sulawesi Barat	6	316.313	29.721	21.709	207.947	259.377	82,0
31	Maluku	11	416.494	26.327	122.061	130.663	279.051	67,0
32	Maluku Utara	10	310.622	38.456	23.747	149.020	211.223	68,0
33	Papua Barat	13	277.993	12.020	11.272	57.326	80.618	29,0
34	Papua	29	1.065.235	37.198	114.089	210.893	362.180	34,0
Indonesia		**514**	**73.093.844**	**5.884.636**	**11.806.773**	**46.267.838**	**63.959.247**	**87,5**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 73.b

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	69,67	73,16	77,06
2	Sumatera Utara	77,41	79,59	81,08
3	Sumatera Barat	62,50	63,98	68,11
4	Riau	80,12	80,04	83,99
5	Jambi	73,67	75,60	77,82
6	Sumatera Selatan	72,07	74,67	76,94
7	Bengkulu	71,75	75,91	78,10
8	Lampung	75,25	79,22	78,81
9	Kepulauan Bangka Belitung	87,95	90,32	92,58
10	Kepulauan Riau	85,87	89,13	89,19
11	DKI Jakarta	90,73	92,89	93,04
12	Jawa Barat	67,61	69,64	71,40
13	Jawa Tengah	78,21	80,29	83,24
14	DI Yogyakarta	92,02	94,67	96,96
15	Jawa Timur	74,28	78,78	80,98
16	Banten	77,45	81,01	82,00
17	Bali	91,58	94,59	95,01
18	Nusa Tenggara Barat	75,66	80,02	82,89
19	Nusa Tenggara Timur	61,78	64,55	69,70
20	Kalimantan Barat	72,44	72,08	75,81
21	Kalimantan Tengah	66,81	69,23	72,31
22	Kalimantan Selatan	73,24	76,56	81,17
23	Kalimantan Timur	84,11	89,27	89,17
24	Kalimantan Utara	81,67	77,20	82,09
25	Sulawesi Utara	79,31	82,36	85,49
26	Sulawesi Tengah	67,46	71,95	74,61
27	Sulawesi Selatan	84,44	87,80	88,96
28	Sulawesi Tenggara	73,61	79,75	82,38
29	Gorontalo	64,59	74,57	75,68
30	Sulawesi Barat	67,36	73,39	77,07
31	Maluku	69,92	70,00	75,06
32	Maluku Utara	69,08	72,52	75,99
33	Papua Barat	75,99	76,39	78,71
34	Papua	37,14	38,27	40,31
Indonesia		**74,58**	**77,39**	**79,53**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Lampiran 74

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
				Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	23	6.497	3.447	53,1	940	14,5
2	Sumatera Utara	33	6.110	3.776	61,8	543	8,9
3	Sumatera Barat	19	1.158	858	74,1	289	25,0
4	Riau	12	1.859	1.641	88,3	717	38,6
5	Jambi	11	1.562	1.256	80,4	587	37,6
6	Sumatera Selatan	17	3.240	2.428	74,9	1.481	45,7
7	Bengkulu	10	1.513	1.287	85,1	398	26,3
8	Lampung	15	2.640	2.263	85,7	1.369	51,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	391	391	100,0	230	58,8
10	Kepulauan Riau	7	417	336	80,6	86	20,6
11	DKI Jakarta	6	267	267	100,0	29	10,9
12	Jawa Barat	27	5.957	4.246	71,3	1.918	32,2
13	Jawa Tengah	35	8.562	8.523	99,5	6.762	79,0
14	DI Yogyakarta	5	438	438	100,0	438	100,0
15	Jawa Timur	38	8.501	7.797	91,7	5.334	62,7
16	Banten	8	1.551	1.445	93,2	257	16,6
17	Bali	9	716	668	93,3	284	39,7
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.140	1.130	99,1	652	57,2
19	Nusa Tenggara Timur	22	3.353	2.911	86,8	1.533	45,7
20	Kalimantan Barat	14	2.130	1.402	65,8	231	10,8
21	Kalimantan Tengah	14	1.571	1.342	85,4	389	24,8
22	Kalimantan Selatan	13	2.008	1.721	85,7	645	32,1
23	Kalimantan Timur	10	1.038	818	78,8	228	22,0
24	Kalimantan Utara	5	482	211	43,8	153	31,7
25	Sulawesi Utara	15	1.839	1.053	57,3	436	23,7
26	Sulawesi Tengah	13	2.017	1.389	68,9	436	21,6
27	Sulawesi Selatan	24	3.047	3.046	100,0	2.649	86,9
28	Sulawesi Tenggara	17	2.288	1.517	66,3	582	25,4
29	Gorontalo	6	729	517	70,9	46	6,3
30	Sulawesi Barat	6	648	524	80,9	156	24,1
31	Maluku	11	1.233	397	32,2	27	2,2
32	Maluku Utara	10	1.181	554	46,9	116	9,8
33	Papua Barat	13	1.837	412	22,4	81	4,4
34	Papua	29	5.521	989	17,9	152	2,8
Indonesia		**514**	**83.441**	**61.000**	**73,1**	**30.174**	**36,2**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021; Kementerian Dalam Negeri,2019 (Permendagri 72 Tahun 2019)

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Lampiran 75

PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	TFU Terdaftar				TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar							
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Puskesmas	Jumlah TFU Terdaftar	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Puskesmas		Jumlah Total	
						Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	148	34	60	242	127	85,8	26	76,5	49	81,67	202	83,5
2	Sumatera Utara	422	82	106	610	325	77,0	76	92,7	71	66,98	472	77,4
3	Sumatera Barat	717	108	133	958	622	86,8	79	73,1	84	63,16	785	81,9
4	Riau	886	257	333	1.476	670	75,6	105	40,9	84	25,23	859	58,2
5	Jambi	436	84	111	631	312	71,6	79	94,0	78	70,27	469	74,3
6	Sumatera Selatan	231	66	24	321	173	74,9	56	84,8	18	75,00	247	76,9
7	Bengkulu	612	138	116	866	504	82,4	127	92,0	74	63,79	705	81,4
8	Lampung	280	96	80	456	194	69,3	67	69,8	67	83,75	328	71,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	47	11	5	63	31	66,0	8	72,7	3	60,00	42	66,7
10	Kepulauan Riau	29	5	8	42	16	55,2	3	60,0	5	62,50	24	57,1
11	DKI Jakarta	717	73	248	1.038	612	85,4	61	83,6	147	59,27	820	79,0
12	Jawa Barat	2.194	156	374	2.724	528	24,1	97	62,2	155	41,44	780	28,6
13	Jawa Tengah	1.779	284	298	2.361	861	48,4	178	62,7	152	51,01	1.191	50,4
14	DI Yogyakarta	218	19	15	252	27	12,4	9	47,4	1	6,67	37	14,7
15	Jawa Timur	716	87	104	907	178	24,9	78	89,7	38	36,54	294	32,4
16	Banten	892	78	113	1.083	431	48,3	64	82,1	78	69,03	573	52,9
17	Bali	75	14	6	95	1	1,3	3	21,4	0	0,00	4	4,2
18	Nusa Tenggara Barat	71	3	8	82	60	84,5	2	66,7	2	25,00	64	78,0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
20	Kalimantan Barat	408	18	54	480	220	53,9	5	27,8	21	38,89	246	51,3
21	Kalimantan Tengah	461	54	82	597	430	93,3	32	59,3	38	46,34	500	83,8
22	Kalimantan Selatan	236	17	27	280	229	97,0	15	88,2	21	77,78	265	94,6
23	Kalimantan Timur	678	19	126	823	291	42,9	11	57,9	89	70,63	391	47,5
24	Kalimantan Utara	103	11	28	142	63	61,2	9	81,8	4	14,29	76	53,5
25	Sulawesi Utara	51	9	19	79	34	66,7	3	33,3	6	31,58	43	54,4
26	Sulawesi Tengah	925	185	220	1.330	626	67,7	132	71,4	66	30,00	824	62,0
27	Sulawesi Selatan	1.749	264	220	2.233	953	54,5	147	55,7	86	39,09	1.186	53,1
28	Sulawesi Tenggara	188	53	29	270	112	59,6	28	52,8	13	44,83	153	56,7
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
30	Sulawesi Barat	263	44	50	357	178	67,7	25	56,8	27	54,00	230	64,4
31	Maluku	0	1	1	2	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
32	Maluku Utara	1	6	8	15	0	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
33	Papua Barat	77	7	32	116	43	55,8	2	28,6	6	18,75	51	44,0
34	Papua	57	15	49	121	18	31,6	14	93,3	16	32,65	48	39,7
Indonesia		**15.667**	**2.298**	**3.087**	**21.052**	**8.869**	**56,6**	**1.541**	**67,1**	**1.499**	**48,56**	**11.909**	**56,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 76.a

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	TPP Terdaftar					TPP Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar									
		Jasa Boga	Rumah Makan/ Restoran	Depot Air Minum (DAM)	Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra Makanan Jajanan	Jumlah TPP Terdaftar	Jasa Boga		Rumah Makan/Restoran		Depot Air Minum (DAM)		Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra Makanan Jajanan		Jumlah TPP Memenuhi Syarat Sesuai Standar	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	377	2.186	2.192	2.725	7.480	35	9,3	264	12,1	339	15,5	313	11,5	951	12,7
2	Sumatera Utara	502	1.856	1.670	1.432	5.460	25	5,0	258	13,9	367	22,0	275	19,2	925	16,9
3	Sumatera Barat	301	1.775	2.161	1.705	5.942	29	9,6	590	33,2	1.314	60,8	600	35,2	2.533	42,6
4	Riau	325	2.055	2.492	2.046	6.918	155	47,7	799	38,9	1.231	49,4	810	39,6	2.995	43,3
5	Jambi	126	1.229	1.307	1.258	3.920	31	24,6	474	38,6	686	52,5	591	47,0	1.782	45,5
6	Sumatera Selatan	211	901	870	720	2.702	88	41,7	371	41,2	369	42,4	363	50,4	1.191	44,1
7	Bengkulu	88	567	765	1.254	2.674	18	20,5	217	38,3	416	54,4	603	48,1	1.254	46,9
8	Lampung	289	1.914	1.548	2.210	5.961	95	32,9	807	42,2	796	51,4	1.227	55,5	2.925	49,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	54	686	1.079	715	2.534	25	46,3	361	52,6	664	61,5	541	75,7	1.591	62,8
10	Kepulauan Riau	318	1.716	1.212	1.328	4.574	108	34,0	823	48,0	789	65,1	461	34,7	2.181	47,7
11	DKI Jakarta	432	3.878	2.601	3.638	10.549	218	50,5	2.575	66,4	1.220	46,9	2.757	75,8	6.770	64,2
12	Jawa Barat	1.548	4.889	8.443	7.201	22.081	509	32,9	1.317	26,9	2.787	33,0	2.431	33,8	7.044	31,9
13	Jawa Tengah	1.686	3.628	6.134	3.268	14.716	610	36,2	1.363	37,6	3.694	60,2	1.492	45,7	7.159	48,6
14	DI Yogyakarta	218	356	312	1.465	2.351	80	36,7	199	55,9	206	66,0	1.096	74,8	1.581	67,2
15	Jawa Timur	1.584	2.619	5.743	4.758	14.704	461	29,1	1.080	41,2	2.745	47,8	2.393	50,3	6.679	45,4
16	Banten	555	1.532	3.555	624	6.266	182	32,8	377	24,6	1.311	36,9	176	28,2	2.046	32,7
17	Bali	160	1.519	339	1.777	3.795	28	17,5	810	53,3	155	45,7	812	45,7	1.805	47,6
18	Nusa Tenggara Barat	300	1.015	543	1.318	3.176	75	25,0	395	38,9	248	45,7	615	46,7	1.333	42,0
19	Nusa Tenggara Timur	127	1.127	525	454	2.233	4	3,1	253	22,4	112	21,3	139	30,6	508	22,7
20	Kalimantan Barat	142	1.281	1.199	1.638	4.260	58	40,8	458	35,8	611	51,0	657	40,1	1.784	41,9
21	Kalimantan Tengah	112	786	1.421	1.299	3.618	40	35,7	287	36,5	733	51,6	862	66,4	1.922	53,1
22	Kalimantan Selatan	210	971	2.160	3.677	7.018	42	20,0	324	33,4	1.078	49,9	1.573	42,8	3.017	43,0
23	Kalimantan Timur	437	2.511	3.285	2.764	8.997	275	62,9	1.055	42,0	1.855	56,5	1.648	59,6	4.833	53,7
24	Kalimantan Utara	65	479	646	1.186	2.376	36	55,4	255	53,2	373	57,7	946	79,8	1.610	67,8
25	Sulawesi Utara	84	882	599	415	1.980	17	20,2	222	25,2	255	42,6	259	62,4	753	38,0
26	Sulawesi Tengah	136	1.209	1.251	1.409	4.005	71	52,2	798	66,0	955	76,3	979	69,5	2.803	70,0
27	Sulawesi Selatan	308	3.387	1.892	4.570	10.157	116	37,7	1.259	37,2	995	52,6	1.981	43,3	4.351	42,8
28	Sulawesi Tenggara	72	1.097	758	1.874	3.801	14	19,4	373	34,0	311	41,0	968	51,7	1.666	43,8
29	Gorontalo	78	488	572	851	1.989	22	28,2	124	25,4	243	42,5	142	16,7	531	26,7
30	Sulawesi Barat	35	638	305	291	1.269	13	37,1	256	40,1	193	63,3	115	39,5	577	45,5
31	Maluku	37	420	258	316	1.031	7	18,9	143	34,0	176	68,2	147	46,5	473	45,9
32	Maluku Utara	74	253	155	150	632	10	13,5	108	42,7	81	52,3	97	64,7	296	46,8
33	Papua Barat	59	508	232	120	919	21	35,6	197	38,8	118	50,9	57	47,5	393	42,8
34	Papua	94	697	570	753	2.114	24	25,5	253	36,3	329	57,7	404	53,7	1.010	47,8
Indonesia		**11.144**	**51.055**	**58.794**	**61.209**	**182.202**	**3.542**	**31,8**	**19.445**	**38,1**	**27.755**	**47,2**	**28.530**	**46,6**	**79.272**	**43,5**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 76.b

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	0	0,0
2	Sumatera Utara	33	0	0,0
3	Sumatera Barat	19	0	0,0
4	Riau	12	3	25,0
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	0	0,0
7	Bengkulu	10	0	0,0
8	Lampung	15	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	0	0,0
11	DKI Jakarta	6	0	0,0
12	Jawa Barat	27	20	74,1
13	Jawa Tengah	35	2	5,7
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	17	44,7
16	Banten	8	5	62,5
17	Bali	9	7	77,8
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0
20	Kalimantan Barat	14	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	14	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	13	0	0,0
23	Kalimantan Timur	10	0	0,0
24	Kalimantan Utara	5	0	0,0
25	Sulawesi Utara	15	10	66,7
26	Sulawesi Tengah	13	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	24	22	91,7
28	Sulawesi Tenggara	17	4	23,5
29	Gorontalo	6	0	0,0
30	Sulawesi Barat	6	0	0,0
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	0	0,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	0	0,0
Indonesia		**514**	**111**	**21,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 76.c

JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah RS dan Puskesmas	Jumlah RS dan Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	423	9	2,1
2	Sumatera Utara	780	68	8,7
3	Sumatera Barat	356	23	6,5
4	Riau	294	82	27,9
5	Jambi	235	4	1,7
6	Sumatera Selatan	405	25	6,2
7	Bengkulu	209	91	43,5
8	Lampung	401	169	42,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	86	25	29,1
10	Kepulauan Riau	112	26	23,2
11	DKI Jakarta	512	129	25,2
12	Jawa Barat	1399	193	13,8
13	Jawa Tengah	1176	510	43,4
14	DI Yogyakarta	196	67	34,2
15	Jawa Timur	1339	385	28,8
16	Banten	339	119	35,1
17	Bali	177	33	18,6
18	Nusa Tenggara Barat	198	16	8,1
19	Nusa Tenggara Timur	440	7	1,6
20	Kalimantan Barat	294	22	7,5
21	Kalimantan Tengah	230	12	5,2
22	Kalimantan Selatan	277	8	2,9
23	Kalimantan Timur	236	81	34,3
24	Kalimantan Utara	64	3	4,7
25	Sulawesi Utara	240	28	11,7
26	Sulawesi Tengah	248	28	11,3
27	Sulawesi Selatan	568	240	42,3
28	Sulawesi Tenggara	324	10	3,1
29	Gorontalo	110	1	0,9
30	Sulawesi Barat	108	3	2,8
31	Maluku	243	10	4,1
32	Maluku Utara	160	1	0,6
33	Papua Barat	181	2	1,1
34	Papua	471	1	0,2
Indonesia		**12.831**	**2.431**	**18,9**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 76.d

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2020

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Kebijakan Germas	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	13	56,5
2	Sumatera Utara	33	0	0,0
3	Sumatera Barat	19	2	10,5
4	Riau	12	0	0,0
5	Jambi	11	1	9,1
6	Sumatera Selatan	17	15	88,2
7	Bengkulu	10	6	60,0
8	Lampung	15	11	73,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	1	14,3
10	Kepulauan Riau	7	4	57,1
11	DKI Jakarta	6	5	83,3
12	Jawa Barat	27	27	100,0
13	Jawa Tengah	35	7	20,0
14	DI Yogyakarta	5	3	60,0
15	Jawa Timur	38	24	63,2
16	Banten	8	0	0,0
17	Bali	9	2	22,2
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	20,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,8
20	Kalimantan Barat	14	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	14	9	64,3
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	2	20,0
24	Kalimantan Utara	5	1	20,0
25	Sulawesi Utara	15	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	13	1	7,7
27	Sulawesi Selatan	24	3	12,5
28	Sulawesi Tenggara	17	1	5,9
29	Gorontalo	6	1	16,7
30	Sulawesi Barat	6	5	83,3
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	5	50,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	0	0,0
Indonesia		**514**	**171**	**33,3**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 76.e

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	53,59	57,41	63,21
2	Sumatera Utara	61,94	64,65	67,44
3	Sumatera Barat	49,38	51,42	56,87
4	Riau	64,88	62,94	68,44
5	Jambi	53,22	54,78	61,41
6	Sumatera Selatan	52,12	52,24	55,25
7	Bengkulu	42,57	41,73	47,94
8	Lampung	45,09	52,00	53,22
9	Kepulauan Bangka Belitung	27,81	26,16	30,64
10	Kepulauan Riau	34,09	44,09	48,19
11	DKI Jakarta	34,76	34,25	33,18
12	Jawa Barat	47,48	49,29	52,28
13	Jawa Tengah	62,42	64,69	67,93
14	DI Yogyakarta	78,88	81,61	86,19
15	Jawa Timur	60,96	65,61	68,08
16	Banten	53,30	56,92	56,21
17	Bali	72,92	77,24	77,05
18	Nusa Tenggara Barat	56,75	56,35	62,53
19	Nusa Tenggara Timur	30,19	32,08	36,34
20	Kalimantan Barat	54,78	53,52	58,81
21	Kalimantan Tengah	43,79	47,90	51,97
22	Kalimantan Selatan	45,45	46,73	52,99
23	Kalimantan Timur	63,89	65,55	70,80
24	Kalimantan Utara	64,73	60,76	66,73
25	Sulawesi Utara	61,73	64,61	69,48
26	Sulawesi Tengah	53,42	56,65	58,85
27	Sulawesi Selatan	57,87	60,93	64,24
28	Sulawesi Tenggara	55,83	59,82	66,77
29	Gorontalo	54,91	62,26	65,42
30	Sulawesi Barat	44,74	47,23	50,65
31	Maluku	51,78	51,75	57,50
32	Maluku Utara	54,32	59,03	62,14
33	Papua Barat	55,37	52,22	55,44
34	Papua	24,62	26,19	28,56
Indonesia		**54,09**	**56,51**	**59,54**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

Lampiran 76.f

PERSENTASE RUMAH TANGGA KUMUH MENURUT PROVINSI
TAHUN 2018-2020

No	Provinsi	2018	2019	2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	11,75	10,61	7,75
2	Sumatera Utara	10,46	8,70	7,84
3	Sumatera Barat	8,23	8,01	5,81
4	Riau	5,95	7,11	5,39
5	Jambi	7,83	6,54	4,35
6	Sumatera Selatan	12,58	12,24	10,59
7	Bengkulu	10,00	10,60	7,94
8	Lampung	11,86	10,29	8,66
9	Kepulauan Bangka Belitung	18,47	17,76	17,15
10	Kepulauan Riau	16,28	12,58	10,54
11	DKI Jakarta	24,53	23,59	22,07
12	Jawa Barat	16,55	14,09	12,83
13	Jawa Tengah	9,30	7,63	6,01
14	DI Yogyakarta	3,09	2,66	1,54
15	Jawa Timur	10,17	8,29	7,62
16	Banten	14,75	12,96	11,89
17	Bali	5,43	3,48	3,87
18	Nusa Tenggara Barat	13,75	12,67	10,72
19	Nusa Tenggara Timur	37,18	33,76	31,18
20	Kalimantan Barat	8,03	8,34	6,03
21	Kalimantan Tengah	13,21	11,00	8,08
22	Kalimantan Selatan	13,25	11,83	9,40
23	Kalimantan Timur	5,82	4,47	4,75
24	Kalimantan Utara	5,25	5,01	3,37
25	Sulawesi Utara	9,65	7,51	5,75
26	Sulawesi Tengah	13,38	12,92	11,70
27	Sulawesi Selatan	10,74	8,48	7,20
28	Sulawesi Tenggara	11,72	9,24	7,45
29	Gorontalo	13,71	8,66	8,34
30	Sulawesi Barat	17,25	13,63	12,77
31	Maluku	16,46	13,98	11,59
32	Maluku Utara	12,69	9,33	8,98
33	Papua Barat	9,87	10,24	7,99
34	Papua	44,63	43,29	40,27
Indonesia		**13,04**	**11,40**	**10,04**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2020

PUSAT DATA DAN INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2021

ISBN 978-623-301-218-8